



**ISHAK RAFICK**

WARTAWAN SENIOR

# CATATAN **HITAM** LIMA PRESIDEN **INDONESIA**

Sebuah Investigasi 1997-2007,  
Mafia Ekonomi, dan Jalan Baru  
Membangun Indonesia

Pengantar  
**Rizal Ramli**

"Syah Rafick adalah wartawan yang mempunyai dan penuh ide. Buku ini adalah refleksi pikiran dan pandangan ekonominya terhadap berbagai masalah ekonomi di Indonesia, terutama aspek hukum. Saya salut atas hasil kerjanya."

—Prof. Dr. Datta / Rochbini,  
Pengamat ekonomi dan  
Pendidik di Departemen NDEF

"Buku ini membuktikan gagalnya Mafia Berkeley dalam membangun Indonesia sekaligus dengan dampak dampaknya"

—Ichsanuddin Noor,  
Anggota Tim Indonesia – Inukit

"Buku ini menguraikan arah yang jelas dan menyatukan formula baru bagi perjuangan rakyat untuk mengambil kembali kedaulatan ekonomi dan hukum dalam politik Negara Indonesia"

—Ferry Juliantono,  
Sekjen Gerakan ARKIB  
Pergerakan ASGI dan KNE

## Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia

**Sebuah Investigasi 1997-2007, Mafia Ekonomi,  
dan Jalan Baru Membangun Indonesia**

Sehubungan dengan ebook digibook (format \*exe) yang saya download dari [www.4shared.com](http://www.4shared.com) rawan dihinggapi / dianggap virus oleh sebagian anti virus, maka saya ubah ebook ini menjadi format \*djvu. Perubahan format dilakukan semata-mata untuk kepentingan koleksi pribadi dan bukan untuk tujuan komersial. Semoga bermanfaat untuk kita semua.

**\*\*\*Mari Berbagi Melalui Ebook\*\*\***

**Jangan Lupa Membeli Buku Aslinya**

jandoy – 060112949  
janinmu@yahoo.com

# Daftar Isi

## **CATATAN HITAM LIMA PRESIDEN INDONESIA:**

Sebuah Investigasi 1997-2007, Mafia Ekonomi,  
dan Jalan Baru Membangun Indonesia

karya Ishak Rafick

Copyright ● 2007, Ishak Rafick

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
*All Rights Reserved*

Pewajah Sampul: Kasta Waisya  
Pewajah Isi: Ufukreatif House

Cetakan I: Januari 2008

ISBN: 979-1238-63-2

## **UFUK PUBLISHING HOUSE**

PT. Cahaya Insan Suci

Jl. Warga 23A, Pejaten Barat, Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan 12510, Indonesia

Phone: 62-21-7976587, 79192866

Homepage: [www.ufukpress.com](http://www.ufukpress.com)

Blog : <http://ufukpress.blogspot.com>

Email : [info@ufukpress.com](mailto:info@ufukpress.com)

Pengantar oleh Rizal Ramli ... 9

Pengantar Penulis ... 21

## **I. Merintis Jalan Baru Pembangunan Indonesia ... 27**

1. Yang Tersemat Di Pundak SBY-JK ... 27
2. Di antara Korupsi, Kebodohann dan Ketakutan ... 35
3. Pilihan-Pilihan yang Tersedia ... 42
4. Sebuah Jalan Baru yang Terbuka ... 60

## **II. Indonesia Batal Tinggal Landas ... 91**

1. Catatan-Catatan Menjelang Jatuhnya Orde Baru ... 93
2. Expatriat Memasuki Masa Suram ... 105
3. Antara Perut Perusahaan dan Perut Rakyat ... 113
4. Yang Menolong, Yang Teraniaya ... 122
5. Ketika Kesadaran itu sampai Batasnya ... 132
6. Agenda Reformasi Politik, Menuju Indonesia Baru ... 143
7. Peristiwa di Belakang Panggung Reformasi ... 150
8. GBHN Super dari Bawah Meja IMF ... 160
  - A. Kebijakan Moneter ... 161
  - B. Kebijakan anggaran Pemerintah ... 162

- C. Restrukturisasi sektor Finansial ... 163
- D. Reformasi struktural ... 166
- 9. Beberapa Bom Waktu yang Lain ... 176
  - A. Proyek Listrik Swasta ... 176
  - B. Kehadiran Swasta di Sektor Air Bersih ... 186
  - C. Karamnya BUMN Kertas ... 192
  - D. Sumber Dana Murah bernama Dana Reboisasi ... 201
  - E. Rontoknya Industri Hilir Berbahan Kayu ... 211
  - F. Masalah-masalah Administrasi ... 219

### **III. Kabinet Transisi Habibie ... 237**

- 1. Pait a Compli, Saat Kaum Reformis Lengah ... 237
- 2. Gerakan Reformasi Tambah Joki ... 240
- 3. Mendayung Di Antara Dua Karang ... 247
- 4. Upaya Menjinakkan Harga Sembako ... 269
- 5. Kabinet 512 hari Habibie ... 277
- 6. Reformasi BUMN di bawah Tanri Abeng ... 284
- 7. Merajut Ekonomi Kerakyatan ... 294

### **IV. Pemilu dan Kematian Ideologi ... 319**

- 1. Terjebaknya Kaum Reformis ... 319
- 2. Peserta dan Para Penyelenggara Pemilu ... 331
- 3. Perubahan Peta Politik yang Mengecewakan ... 340
- 4. Mesin Politik Bernama Golkar ... 349

### **V. Krisis Perbankan ... 363**

- 1. BI dan Para DOT ... 365

- 2. Mereka yang Masuk Daftar ... 374
- 3. Upaya-upaya Menggugat Pemamah BLBI ... 378

### **VI. Indonesia di Tangan Kyai Abdurrahman Wahid ... 391**

- 1. Obat Mujarab itu Bernama Abdurrahman Wahid ... 392
- 2. Mengambil Kembali Kedaulatan Politik ... 396
- 3. Tekanan Dunia Luar terhadap Gus Dur ... 409
- 4. Gus Dur Menuai Badai ... 421

### **VII. Indonesia di Tangan Satrio Piningit ... 433**

- 1. Sebuah Skenario Nista tentang Masa Depan ... 435
- 2. Menuju Liberalisasi Ekonomi tanpa Batas ... 437
- 3. Menjadi Negara Industri atau Pasar ? ... 453

### **Sebuah Kasus Menarik Bernama IPTN ... 469**

Sekilas Tentang Penulis ... 485

Daftar Pustaka ... 491

# Pengantar

## Rizal Ramli



Ishak Rafick adalah seorang jurnalis yang memiliki pengalaman belasan tahun, menulis berbagai artikel tentang ekonomi politik, korporasi, manajemen dan lain-lain. Ishak yang memiliki pendidikan tinggi alumni Universitas Indonesia ini, juga mendapatkan gelar Master of Art dari Rijks Universiteit Leiden Netherland dengan tesis berjudul " Het Beeld van Indonesie in the 20ste eeuwse koloniale literatuur" (Wajah Indonesia Dalam Literatur Kolonial Abad 20). Ishak juga mengikuti berbagai jenis *training* di dalam maupun luar negeri dalam bidang jurnalistik maupun manajemen seperti Nijenrode Management Institute, Breukelen Netherland. Dengan latar belakang pendidikan yang sangat luas dan motivasi yang sangat kuat, Ishak menulis buku **Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia**. Buku ini merupakan sebuah karya dan prestasi yang menonjol karena jarang sekali jurnalis Indonesia menulis buku, terutama tentang topik yang cukup serius. Sebagai seorang jurnalis, *style* penulisan Ishak sangat mudah dimengerti, enak dibaca walaupun memerlukan waktu yang cukup panjang untuk dapat memahami garis merah dari buku sang penulis. Justru itu menjadi daya tarik tersendiri dari buku ini, karena penulis

tidak ingin menjejalkan kesimpulannya sendiri kepada pembaca. Dia lebih senang memaparkan duduk perkaranya daripada menggurui. Gaya bahasanya bukan 'telling', tapi 'showing'. Dia menantang pikiran, sekaligus menggugah nurani.

Ada kegelisahan yang sangat mendalam dalam buku Ishak tentang peranan dan ketangguhan Negara serta korporasi dalam menghadapi gejolak krisis baik pada tahap awal maupun pasca krisis. Ishak, misalnya, mencoba memetakan dan melakukan analisa mengapa Indonesia gagal tinggal landas setelah 32 tahun Orde Baru. Berbagai kelemahan struktural dan penyimpangan prioritas masa Orde Baru dianalisa dengan tajam dan menarik secara jurnalistik. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang lumayan, Ishak memaparkan berbagai ketimpangan yang terjadi dan kerawanan di dalam bidang ekonomi maupun sosial. Namun pada akhirnya, Soeharto tidak mampu menahan besarnya tekanan terhadap perubahan dan keinginan untuk demokratisasi.

Ishak juga melakukan pembedahan yang kritis terhadap masa pemerintahan Habibie. Dalam banyak hal, Habibie berupaya memenuhi tuntutan reformasi, dengan menyusun Undang-undang Kebebasan Pers, Undang-undang Desentralisasi dan Undang-undang Pemilu. Habibie berhasil menegakkan landasan untuk demokratisasi sebagai respon terhadap tuntutan mahasiswa dan rakyat sebelum dan saat reformasi itu terjadi. Di sisi lain Habibie melaksanakan banyak permintaan IMF dalam bentuk berbagai Letter of Intent terutama dalam kaitannya dengan rekapitalisasi perbankan, BLBI & MSAA. Ishak juga menjelaskan berbagai perdebatan internal dan diskusi publik tentang arah kebijakan ekonomi dalam masa

pemerintahan Habibie.

Secara panjang lebar Ishak melakukan analisa tentang dinamika politik sejak pemilu tahun 1999 - 2004. Secara gamblang Ishak menarik kesimpulan yang sangat tepat yaitu kematian ideologi dalam proses politik di Indonesia. Sehabis kejatuhan pemerintahan otoriter Soeharto, ternyata ruang kosong demokratisasi dengan cepat diisi dan diambil alih oleh oligarki politik dan ekonomi yang tumbuh pada masa Orde Baru. Dengan kata lain demokratisasi Indonesia telah "dibajak" oleh tokoh-tokoh dan kekuatan lama Orde Baru yang telah berhasil melakukan akumulasi finansial maupun jaringan selama 32 tahun Orde Baru.

Tidak aneh bahwa transisi dari sistem otoriter ke sistem demokratis tidak membawa manfaat yang besar pada kemajuan negara maupun kesejahteraan rakyat. Seperti diketahui, proses pemilu maupun pilkada sangat diwarnai dan didominasi oleh politik uang. Jika kecenderungan ini terus berlanjut, maka akan timbul banyak pertanyaan tentang apakah demokrasi ada manfaatnya untuk rakyat kebanyakan. Seperti yang dikatakan Ishak, matinya ideologi dalam proses politik Indonesia merupakan salah satu penyebab utama dari komersialisasi dan dominasi politik uang dalam proses demokrasi di Indonesia.

Sangat sukar misalnya, untuk membedakan ideologi, visi dan strategi berbagai partai politik yang ada di Indonesia karena dominannya komersialisasi dan pragmatisme partai politik. Rakyat biasa diberikan pilihan partai-partai dengan nama dan simbol yang berbeda-beda, tetapi sebetulnya esensi maupun programnya tidak jauh berbeda. Dalam konteks seperti itu, demokratisasi yang diharapkan mampu mengurangi kecenderungan

massa mengambang (*floating mass*), justru menimbulkan gejala sebaliknya, yaitu semakin menguatnya kecenderungan massa mengambang.

Dalam kondisi vakum ideologi, dominasi pragmatisme dan politik uang, Indonesia sangat mudah sekali dipengaruhi oleh pandangan ekonomi ortodoks dan neoliberal yang semakin mengecilkan peranan negara dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. Negara hanya mewakili dan memperjuangkan kepentingan elit, sementara rakyat dilepaskan kepada belas kasihan mekanisme pasar. Misalnya, berbagai subsidi di dalam bidang pendidikan dan kesehatan dihapuskan tanpa melihat perbedaan kemampuan ekonomis dari masyarakat. Di negara-negara yang kapitalistik sekalipun, seperti di Eropa, tetap ada subsidi maupun bantuan keuangan di bidang pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat yang tidak mampu.

Ishak secara sangat detil menjelaskan berbagai tarik menarik dalam strategi dan kebijakan ekonomi sejak pemerintahan Habibie, Gusdur, Mega dan SBY. Tampak jelas walaupun ada upaya-upaya untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi dan upaya untuk menghindari peranan yang sangat besar dari lembaga-lembaga internasional untuk menentukan arah dan kebijakan ekonomi nasional, tetapi karena kevakuman ideologi, dominasi pragmatisme serta kelemahan visi, pada akhirnya peranan lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia sangat dominan dalam menentukan arah dan kebijakan ekonomi Indonesia. Dalam buku ini, Ishak memberikan penjelasan sangat detil tentang penyusunan "GBHN super dari bawah meja IMF". Kondisi Indonesia sangat berbeda dengan pengalaman Negara-negara Asia Timur yang berhasil mengejar ketinggalannya dari negara-

negara Barat. Mereka lebih akomodatif terhadap kepentingan negara-negara besar dalam bidang politik luar negeri dan pertahanan, tetapi sangat mandiri dalam penentuan strategi dan arah kebijakan ekonomi.

Ishak mengajukan pertanyaan penting, mengapa Indonesia batal tinggal landas? Pada tahun 1967, negara-negara utama di Asia nyaris memiliki posisi yang hampir sama secara sosial dan ekonomis. Pada waktu itu, GNP perkapita Indonesia, Malaysia, Thailand, Taiwan, Cina nyaris sama, yaitu kurang dari US\$100 per kapita. Setelah lebih dari 40 tahun, GNP perkapita negara-negara tersebut pada tahun 2004, mencapai: Indonesia sekitar US\$ 1.100, Malaysia US\$ 4.520, Korea Selatan US\$ 14.000, Thailand US\$ 2.490, Taiwan US\$ 14.590, Cina US\$ 1.500.

Ternyata bahwa kekuasaan dan peranan Mafia Berkeley nyaris 40 tahun tidak mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan mewariskan potensi sebagai salah satu negara gagal (*failed state*) di Asia.

Sejumlah kemajuan dalam bidang ekonomi Indonesia terutama didukung oleh eksploitasi sumber daya alam (minyak bumi dan hutan) serta peningkatan pinjaman luar negeri. Sementara kemajuan ekonomi negara-negara Asia Timur dan Tenggara lainnya terutama didukung oleh industrialisasi, ekspor, peningkatan produktifitas dan daya saing nasional. Sejumlah kemajuan ekonomi Indonesia di masa Orde Baru juga diikuti dengan kelemahan struktural dalam bidang ekonomi, ketergantungan terhadap utang yang semakin besar, disparitas pendapatan yang semakin tinggi dan sistem sosial politik yang semakin tidak demokratis. Ketergantungan terhadap utang tersebut menghasilkan suatu elit pengambil kebijakan ekonomi yang sangat tidak percaya diri dan secara mental dan

intelektual sangat menggantungkan diri pada belas kasihan negara dan lembaga pemberi utang. Sikap mental dan intelektual ini sangat jauh berbeda dengan elit pengambil kebijakan ekonomi di negara-negara Asia lainnya seperti Goh Keng Swee dan Lee Kwan Yew (Singapura), Mahathir Muhammad dan Daim Zainudin (Malaysia), Park Chung Hee (Korea), dan Deng Xiao Ping / Jiang Zemin dan Zhu Rongji (Cina).

Elit pengambil kebijakan ekonomi di negara-negara Asia Timur memiliki rasa percaya diri yang besar dan tidak memiliki ketergantungan mental dan intelektual kepada hutang. Mereka dengan sadar meningkatkan tabungan, investasi dan produktifitas. Sehingga ketergantungan mereka kepada hutang luar negeri relatif kecil. Sementara elit pengambil kebijakan di Indonesia di nina-bobokan oleh sumber daya minyak dan hutan yang berlimpah dan hanya terlatih menjadi hamba pencari hutang.

Ketika krisis ekonomi melanda Asia pada pertengahan 1997, negara-negara Asia Timur dan Tenggara tersebut justru memanfaatkan krisis ekonomi sebagai momentum historis untuk melakukan berbagai langkah perbaikan struktural. Mahathir misalnya, dengan sadar menolak resep IMF karena pasti akan menimbulkan gejolak ekonomi dan politik di Malaysia. Hasilnya sangat menggembirakan dalam bentuk stabilitas ekonomi dan finansial Malaysia; pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja juga tinggi.

Singapura, melanjutkan tradisi berfikir Goh Keng Swee (arsitek ekonomi Singapura) yang kritis terhadap dampak negatif dari kapitalisme predatori, mengambil langkah-langkah penguatan lembaga keuangan dalam negeri dan perbaikan *corporate governance* untuk mere-

dam badai krisis moneter.

Perdana Menteri Chuan Leekpai dari Thailand yang semula mengikuti resep IMF dan banyak dipuji oleh kreditor akhirnya justru 'digulingkan' oleh rakyat melalui pemilu yang memilih PM Thaksin secara mutlak. Nasib Chuan Leekpai sama dengan Megawati dipuji oleh IMF tetapi dikalahkan secara telak oleh rakyat. Dengan mandat kemenangan yang besar, Thaksin dengan cepat mengubah kebijakan yang tadinya pro-IMF menjadi pro rakyat dan ternyata hasilnya sangat menggembirakan baik dari segi pertumbuhan ekonomi, investasi maupun penciptaan lapangan kerja. Sayangnya kemudian, warna otoriter Thaksin terlalu kuat sehingga memancing oposisi dari golongan menengah.

Indonesia justru sebaliknya, krisis ekonomi semakin meningkatkan ketergantungan kepada pola berfikir IMF terutama karena elit pengambil kebijakan ekonomi tidak kreatif dan memiliki ketergantungan mental dan intelektual yang sangat kuat terhadap hutang dan pola berfikir IMF yang konservatif dan sangat monetaris. Sebagai akibatnya, total hutang meningkat menjadi dua kalinya, dan pengangguran sangat tinggi. Sementara propaganda bahwa investasi akan masuk jika Indonesia manut IMF, cuman angin surga. Tim Ekonomi Megawati yang pro IMF dan banyak dipuji kreditor justru menjadi salah satu faktor penyebab kekalahan telak Megawati di Pemilu legislatif maupun Pemilu Presiden. Nasib Megawati nyaris sama dengan Perdana Menteri Chuan Leekpai di Thailand yang dipuji kreditor namun ditolak oleh rakyat karena fokusnya hanya pada stabilitas finansial sementara banyak rakyat makin miskin dan menganggur.

Peningkatan pengangguran tersebut terjadi karena



tidak adanya visi, lemahnya kepemimpinan dan konservatisme ekonomi ala IMF yang sangat moneteris. Fokus utama hanyalah pada stabilitas moneter seperti inflasi dan nilai tukar, tetapi mengabaikan penciptaan lapangan kerja dan penyelesaian berbagai masalah di sektor riil seperti investasi, industri, pertanian, dan sebagainya. Di sektor riil, fokus utama hanyalah penjualan kekayaan negara dan aset warisan dari pemerintah sebelumnya secara serampangan dan merugikan negara.

Kasus kekalahan telak Perdana Menteri Chuan Leek-pai dan Megawati seharusnya dapat menjadi pelajaran bagi pemerintahan saat ini. Kreatifitas dan kepemimpinan yang pro-rakyat akan sangat menentukan keberhasilan seorang pemimpin. Kebijakan yang pro moneteris akhirnya akan mencelakakan pemimpin yang bersangkutan. Juga perlu dicatat banyak negara di Asia Timur dan Tenggara secara sadar memilih untuk ikut payung keamanan (*security umbrella*) Amerika dan kebijakan politik luar negeri sering manut Amerika, tetapi kebijakan ekonomi mereka relatif sangat independen dan bahkan sering terjadi perbedaan kepentingan ekonomi dan bisnis dengan Amerika. Pilihan untuk memilih kebijakan ekonomi yang independen tersebut merupakan satu-satunya cara mengejar ketertinggalan mereka dari negara barat.

Jika Pemerintah masih meneruskan pendekatan lama dalam kebijakan ekonomi yang sekadar hanya fokus pada stabilitas parsial dan sangat moneteris, maka sebetulnya tidak akan terjadi perubahan yang berarti dalam ekonomi Indonesia. Perubahan-perubahan telah terjadi dalam kepemimpinan politik dan militer, tetapi tidak terjadi perubahan dalam kepemimpinan dan pemikiran dalam bidang ekonomi, yang masih didominasi oleh Mafia

Berkeley yang ortodoks dan neoliberal. Segera setelah kejatuhan Presiden Soekarno, kelompok Mafia Berkeley mengabdikan selama 32 tahun kepada regim otoriter Soeharto dan kemudian berlanjut pada masa Megawati dan SBY. Banyak dari anggota dan muridnya yang menduduki posisi-posisi kunci dalam bidang ekonomi dan menjadi saluran strategi dan kebijakan yang dirumuskan oleh IMF, Bank Dunia dan USAID. Mafia Berkeley sekaligus berfungsi sebagai alat untuk memonitor agar kebijakan ekonomi Indonesia sejalan dan searah dengan kebijakan umum ekonomi yang digariskan oleh Washington.

Padahal rakyat ingin perubahan ke arah hidup yang lebih baik. Status quo kepemimpinan dan pemikiran dalam bidang ekonomi tersebut, mungkin menggembirakan kelompok pro-kreditur dan sektor finansial, tetapi akhirnya akan ditolak oleh rakyat seperti halnya Megawati. Pilihan terhadap cara berfikir status quo yang konservatif tersebut juga akhirnya akan menutup pintu bagi Indonesia untuk menjadi salah satu negara besar di Asia. Perdana Menteri Zhu Rongji, arsitek ekonomi Cina, pernah mengatakan bahwa dirinya bukan penganut fundamentalis pasar. Zhu Rongji akan memilih yang terbaik bagi Cina, terlepas dari apakah itu mekanisme pasar atau bukan, administratif atau regulatif.

Mafia Berkeley telah gagal membawa Indonesia menjadi negara yang sejahtera dan besar di Asia walaupun didukung regim otoriter selama nyaris 40 tahun. Selain ketinggalan dari segi pendapatan perkapita, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki distribusi pendapatan paling timpang, stok utang paling besar, serta memiliki landasan struktural dan industri yang sangat rapuh. Padahal negara-negara seperti Taiwan,

Malaysia, Korea Selatan, Cina dan Thailand tidak memiliki sumber daya alam yang besar seperti Indonesia. Di bawah pengaruh dan kekuasaan Mafia Berkeley, utang yang besar dan habisnya kekayaan alam dan hutan yang rusak, ternyata hanya menghasilkan pendapatan per kapita sekitar US\$ 1.100. dan pemenuhan kebutuhan dasar sangat minimum serta ketergantungan mental maupun finansial terhadap utang luar negeri.

Menjadi pertanyaan, mengapa Mafia Berkeley gagal membawa Indonesia menjadi negara yang sejahtera dan besar di Asia walaupun berkuasa selama nyaris 40 tahun? Karena strategi dan kebijakan ekonomi Indonesia yang dirancang oleh Mafia Berkeley akan selalu menempatkan Indonesia sebagai subordinasi (sekadar kepanjangan tangan) dari kepentingan global. Padahal tidak ada negara menengah yang berhasil meningkatkan kesejahteraan dengan mengikuti model Washington Konsensus. Kemerosotan selama tiga dekade di Amerika Latin (1970-2000) adalah contoh monumental dari kegagalan tersebut. Justru negara-negara yang melakukan penyimpangan dari model Washington Konsensus seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Malaysia, Cina, dan lain-lain. berhasil meningkatkan kesejahteraan dan memperbesar kekuatan ekonominya. Negara-negara yang berhasil tersebut mengikuti model pembangunan Asia Timur yang memberikan peranan yang seimbang antara negara dan swasta, serta ketergantungan utang yang minimal. Dua negara Asia, Indonesia dan Filipina yang patuh pada Washington Konsensus, mengalami kemerosotan ekonomi terus-menerus, ketergantungan utang yang permanen, ketimpangan pendapatan sangat mencolok, dan menonjol hanya sebagai eksportir Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Subordinasi kepentingan rakyat dan nasional kepada kepentingan global mengakibatkan Indonesia tidak memiliki kemandirian dalam perumusan Undang-Undang, strategi dan kebijakan ekonomi. Indonesia juga tidak memiliki fleksibilitas untuk merumuskan strategi ekonomi karena terpaku pada model generik Washington Konsensus. Padahal model tersebut dirancang terutama untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi global sehingga negara-negara yang mengikutinya justru akan gagal meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Hasil tipikal dari model Washington Konsensus adalah siklus terus-menerus dari "krisis ekonomi dan akumulasi utang", seperti yang terjadi di banyak negara Latin Amerika, Afrika dan Indonesia. Krisis ekonomi biasanya diselesaikan hanya dengan menambah beban utang yang kemudian akan kembali menjadi sumber krisis baru. Namun, dari segi kepentingan ekonomi global, krisis ekonomi merupakan peluang untuk memaksa negara yang bersangkutan melakukan liberalisasi ekstrim dan privatisasi ugul-ugalan. Liberalisasi ekstrim ala Washington Konsensus sangat berbeda dengan keterbukaan bertahap dan penuh persiapan untuk memperkuat kekuatan ekonomi domestik seperti Malaysia, Cina, Jepang dan lain-lain. Ketergantungan utang dan intelektual terhadap kreditor juga memungkinkan kepentingan global ikut intervensi merumuskan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah seperti Undang-undang tentang privatisasi air, BUMN, migas dan sebagainya.

Jelas sekali dari uraian tersebut di atas, selama tidak ada perubahan dalam arah dan kepemimpinan ekonomi, Indonesia tidak akan pernah mampu mengangkat kesejahteraan mayoritas rakyat dan menjadi salah satu negara

besar di Asia. Saudara Ishak Rafik, dalam buku ini, menawarkan jalan baru membangun Indonesia, sebagai kesimpulan dan kesadarannya bahwa jalan lama Indonesia yang telah dilalui sejak 40 tahun yang lalu sampai saat ini, ternyata tidak membawa perubahan yang berarti bagi mayoritas bangsa kita. Pola hubungan ekonomi kolonial yang ditentang habis-habisan oleh para pendiri Republik Indonesia, ternyata menampakkan wujud barunya dalam bentuk neokolonialisme ekonomi yang difasilitasi oleh Mafia Berkeley selama nyaris 40 tahun. Saudara Ishak, berdasarkan catatan jurnalistiknya yang sangat panjang selama 1997-2007, semakin meyakini bahwa tanpa jalan baru, Indonesia akan semakin ketinggalan dari negara-negara Asia Timur lainnya.

Z

## Pengantar Penulis



Buku yang ada di tangan Anda mulanya akan diberijudul, **Jalan Baru Membangun Indonesia**. Namun, setelah melihat perkembangan dan berbagai peristiwa tujuh bulan terakhir, serta masukan berbagai kalangan, maka judulnya diubah menjadi, **Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia: Sebuah Investigasi 1997-2007, Mafia Ekonomi, dan Jalan Baru Membangun Indonesia**.

Sebagaimana dipaparkan dalam buku ini, Reformasi, yang datang seiring badai krisis, memang berhasil memaksa sang diktator 32 tahun Soeharto lengser keprabon, tapi tak semua masalah langsung bisa dibereskan. Sebagian besar masalah-masalah yang bersifat fundamental justru tak tersentuh reformasi. Salah satu sebabnya adalah hilangnya kesempatan mereformasi sistem ekonomi dengan kreativitas sendiri. Karena terlalu menggebu ingin mengganti rezim refresif, kurang akuratnya diagnosis kaum reformis dan belum terstrukturanya konsep-konsep perbaikan, maka pemerintah Indonesia waktu itu lebih dulu membeli resep dari mentornya yang lama IMF. Ini memang aneh, tapi itulah yang terjadi di belakang panggung reformasi hanya beberapa bulan sebelum sang jendral besar menyatakan diri berhenti.

Dalam kehidupan sehari-hari biasanya orang tidak mau datang ke dokter yang sama dua kali, bila pada kali pertama si dokter telah memberi obat yang salah. Apalagi sampai mengakibatkan berbagai komplikasi berbahaya. Pemilik mobil juga tidak datang ke bengkel yang sama dua kali, bila pada kali pertama bengkel itu telah menyebabkan kerusakan mobil menjadi lebih parah. Sebaliknya pemerintah Soeharto yang panik kembali ke pelukan sang mentor, seperti dipaparkan buku ini, justru setelah terbukti resep-resep yang diberikan gagal. Indonesia tak jadi tinggal landas setelah 30 tahun menjalankan resep-resep itu. Lalu pemerintah setelah Soeharto pun dipaksa menjalankan resep-resep sang mentor dengan umpan dana yang dimilikinya. Akibatnya setiap upaya perbaikan dengan mengerahkan kemampuan kreatif menjadi marginal dan mandeg.

Buku ini merupakan hasil penelusuran jurnalistik selama 10 tahun, sekaligus analisis kritis yang komprehensif mengenai setiap peristiwa yang berlangsung selama itu. Saya sengaja tidak memberinya satu bab khusus sebagai pendahuluan. Sebab bila ada pendahuluan, maka tuntutan berikutnya adalah bab khusus penutup di akhir yang isinya kesimpulan. Penyusunan buku seperti itu memang cocok untuk tulisan-tulisan atau disertasi ilmiah di kampus-kampus. Namun, untuk buku susunan seperti itu menjadi tidak pas dan tampak kuno. Sebab kesimpulan yang diambil sangat menggurui pembaca dan merusak kenikmatan membaca. Penulis seperti itu seakan takut pembaca akan mempunyai kesimpulan lain.

Buku ini memang saya canangkan menjadi buku yang paling komprehensif memotret Indonesia selama sepuluh tahun terakhir. Di dalamnya ada sejarah heroik dan

menegangkan selama berlangsungnya reformasi yang mengalir bersama krisis ekonomi. Upaya-upaya mengatasinya dari satu kabinet ke kabinet yang lain, baik yang membawa hasil positif maupun yang blunder dan hanya membuang-buang waktu. Kadang saya sengaja membiarkan para pelaku, baik di dunia bisnis maupun politik, berbicara sendiri menanggapi situasi, agar pembaca dapat menangkap setiap peristiwa dalam nuansa dan ruang waktu saat kejadian itu sedang berlangsung.

Buku ini adalah kado kemerdekaan saya buat republik, SBY-JK dan kabinetnya, para pakar, pengamat ekonomi, para wakil rakyat, dan tokoh-tokoh LSM, serta media massa dan generasi baru Indonesia. Setidaknya agar krisis serupa tidak terulang lagi di masa depan. Buku ini jelas tidak sempurna. Masih banyak kekurangan di sana-sini. Tentu masih banyak pula masalah yang tidak dibahas. Padahal bagi banyak kalangan mungkin itu merupakan hal penting yang mesti ada. Hal-hal seperti itu memang tak bisa dihindari. Apalagi bila diingat negeri ini belum lagi memasuki masa senjanya. Masih banyak peristiwa yang sedang dan akan berlangsung di negeri dengan 17 ribu pulau lebih ini. Namun, satu hal yang sudah pasti adalah buku ini harus dimulai dari satu titik dan berhenti di titik lain. Kalau tidak buku ini tak bakal bisa terbit.

Buku ini tidak ditujukan untuk menyenangkan semua orang seperti cerita pengantar tidur, tetapi untuk memberi pencerahan kepada anak bangsa dengan cara memberi gambaran apa adanya tentang tanah air tercinta. Setidaknya agar muncul ide-ide kreatif untuk menyelesaikannya. Saya telah berusaha melihat segala sesuatunya dari segala sisi. Namun tentu saja masih ada

sisi-sisi lain yang terluput, tapi terlihat oleh orang lain. Bagi Anda yang melihat sisi-sisi lain tersebut atau bagi Anda yang tidak puas, tentu boleh menulis satu buku lagi untuk melengkapinya atau untuk membantah buku ini.

Buku ini telah terwujud atas bantuan berbagai pihak, tapi tidak akan saya sebutkan satu-persatu. Bagi mereka ini saya ucapkan beribu terima kasih. Terima kasih juga buat Risa, yang telah membuka jalan sampai ke penerbit. Tentu juga buat Defrizal yang telah menyumbangkan beberapa foto dan Dedes, yang telah meluangkan waktunya, di tengah kehamilannya yang semakin berat, untuk membaca naskah, memberi kritik dan saran, sehingga buku ini tampil lebih elegan. Buku ini telah kukerjakan di luar jam kerjaku yang normal. Dia mengambil sebagian besar dari malamku yang mestinya kupersembahkan buat istri dan kedua anakku. Untuk itu buat Sylvia, Rani dan Mahdi aku mohon maaf yang sebesar-besarnya! Juga terima kasih atas dukungan kalian! Dirgahayu Republik Indonesia!

Jakarta, 17 Agustus 2007

Ishak Rafick

# **CATATAN HITAM LIMA PRESIDEN INDONESIA**

**Sebuah Investigasi 1997-2007,  
Mafia Ekonomi, dan Jalan Baru  
Membangun Indonesia**

**ISHAK RAFICK**



SBY-JK, presiden dan wapres pilihan rakyat, tentu masih memiliki peluang untuk memadamkan api itu sebelum pijarnya terlihat, tapi bukan dengan membrangus gerakan dan menangkapi tokoh-tokoh penarik pelatuk ketidakpuasan.

## Merintis Jalan Baru Pembangunan Indonesia

Telah berlalu beberapa periode yang berat setelah krisis moneter (krismon) pertengahan Juli 1997, di mana para pemimpin bangsa ini tak sempat memetakan keadaan. Akibatnya kondisi perekonomian yang *force majeure* atau darurat, telah diatasi dengan cara-cara normal. Tak heran bila seiring redupnya tuntutan-tuntutan reformasi, program-program perbaikan menjadi marjinal. Di pentas dunia Indonesia ibarat orang, yang habis mengalami kecelakaan lalu lintas dan patah tulang kaki, dipaksa ikut lomba lari maraton oleh 'mentor'nya: International Monetary Fund (IMF). Orang nekat itu mungkin saja sampai ke garis finis, tapi dalam keadaan payah atau bahkan digotong.

### 1. Yang Tersemat Dipundak SBY-JK

Kini setelah kekuatan reformasi membeku dalam amnesia politik ekonomi rakyat, tugas memperbaiki nasib bangsa ini sepenuhnya ada di pundak presiden dan wakil presiden pilihan rakyat Susilo Bambang Yudoyono dan Jusuf Kalla (SBY-JK). Tentu keduanya diharapkan bertindak jujur dan cerdas. Jujur artinya berani melihat kondisi rakyatnya dengan mata kepala sendiri. Sedang

bertindak cerdas sangat berkaitan dengan kemampuan memilih skala prioritas untuk memperbaiki kondisi tersebut. Menyerahkan masa depan bangsa kepada trinitas IMF, World Bank (Bank Dunia) dan World Trade Organization (WTO) bukan saja tidak bijak, tapi sekaligus juga berbahaya.

Tak dapat dipungkiri masa depan negara dan bangsa ini sekarang berada di titik nadir. Tanpa perjuangan Kabinet Indonesia Bersatu SBY-JK, dapat dipastikan nasib rakyat akan semakin memburuk. Gejalanya sudah mulai terlihat lewat merebaknya pengangguran, busung lapar, kurang gizi, meningkatnya angka putus sekolah dan berbagai penyakit ringan yang merenggut nyawa, cuma karena si sakit tak punya biaya untuk berobat. Bila negara-negara maju memberikan asuransi kesehatan kepada segenap rakyatnya dan dunia pendidikannya dibikin gratis, bahkan diguyur beasiswa sebagai investasi masa depan, tentu rakyat Indonesia juga berhak mendapat perlakuan serupa dari pemerintahnya.

Sebaliknya bila rakyat negeri ini kembali menggunakan kayu bakar untuk memasak, karena tak punya cukup uang untuk membeli minyak tanah, briket batubara atau gas yang terkandung di dalam buminya sendiri. Bila rakyat kembali menggunakan obor dan lilin untuk penerangan, karena tak punya cukup uang untuk membayar listrik. Bila penduduk kembali menggunakan air sungai untuk memasak, mandi dan mencuci, karena tak punya cukup uang untuk membayar tarif perusahaan air minum (PAM). Bila generasi baru negeri ini harus tinggal di tempat-tempat kos yang sempit atau terus 'ngendon' di rumah orangtuanya yang sudah penuh sesak, karena tak punya cukup uang untuk mengkredit rumah yang terus dibangun

di sekitar mereka. Apa yang harus dilakukan? Trinitas IMF, Bank Dunia dan WTO, serta penganut neo liberalisme ekonomi tentu punya solusi genial: jual saja produk-produk itu kepada asing, agar cadangan devisa kita makin tambun.

Di beberapa sektor gejala ini sudah lama berjalan. Di sektor properti kini sedang digarap rancangan undang-undang yang memberi peluang kepada asing untuk memiliki rumah dan aset properti lain sampai 60 tahun. Bila berhasil, maka kewajiban pemerintah menaikkan pendapatan rakyatnya tentu akan sangat berkurang. Sebab rumah-rumah mewah, ruko (rumah toko), rukan (rumah kantor) dan gerai-gerai di pusat-pusat belanja, meski tak terjangkau bangsa sendiri, akan mendapatkan konsumennya dari berbagai negara lain. Artinya bila dulu harga produk-produk itu amat ditentukan oleh banyak sedikitnya permintaan. Sedang permintaan terhadap produk-produk tersebut amat ditentukan oleh kebutuhan dan daya beli masyarakat. Dengan kata lain secara ekonomi bila daya beli masyarakat sedang anjlok, meski produk itu amat dibutuhkan masyarakat, harga produk tersebut mesti turun karena permintaan terhadapnya sangat rendah. Sebaliknya bila permintaan terhadap produk tertentu amat tinggi, maka harga otomatis akan naik.

Tarik menarik antara permintaan dan penawaran yang mempengaruhi harga ini dapat dipastikan tidak akan terjadi lagi, setidaknya di sektor properti, bila RUU tersebut diundangkan. Artinya equilibrium tidak akan tercapai. Indonesia mungkin menjadi negara pertama di dunia, tempat hukum permintaan dan penawaran tak berlaku bagi mayoritas warganya. Sebab meski bangsa sendiri tak mampu membelinya, produk-produk primer itu



akan mendapatkan konsumennya dari belahan bumi lain. Dapat dipastikan dalam 10-15 tahun ke depan kota-kota baru di Indonesia akan berganti kulit dan perumahan-perumahan mewah akan dihuni segelintir orang-orang kaya Indonesia, ditambah orang-orang Amerika, Australia, Jerman, Belanda, Cina, Taiwan, Korea, Singapura, dan sebagainya. Orang Indonesia berpenghasilan menengah menempati rumah-rumah sederhana. Yang penghasilannya pas-pasan mungkin tinggal di rumah-rumah sangat sederhana, tempat kos sempit dengan penerangan seadanya. Sisanya, yang paling banyak, tinggal di desa-desa atau bergelimpang dalam kekumuhan kota.

Gambaran suram itu tidak mengada-ada. Banyak negara dunia ketiga telah berubah seperti itu. Ekuador, misalnya, yang seperti Indonesia mendapat bantuan IMF dan Bank Dunia selama tiga puluh tahun lebih, telah menjadi semakin buruk. Dalam bukunya *The Confessions of an Economic Hit Man* (Confessions, edisi Indonesianya terbit 2005), John Perkins menulis: Kami meminjam negara itu (Ekuador, pen.) miliaran dolar agar negara itu dapat mempekerjakan perusahaan rekayasa dan konstruksi kami untuk membangun proyek yang akan membantu keluarga-keluarga yang paling kayanya. Sebagai hasilnya, kata dia, selama tiga dekade itu, tingkat kemiskinan resmi meningkat dari 50% menjadi 70%. Kekurangan pekerjaan atau pengangguran meningkat dari 15% menjadi 70%. Utang negara meningkat dari US\$ 240 juta menjadi US\$ 16 miliar, dan bagian sumber daya nasional yang dialokasikan untuk segmen penduduk yang paling miskin menciut dari 20% menjadi 6%. Sekarang Ekuador mesti mempersembahkan hampir 50% dari anggaran nasionalnya hanya untuk membayar utang

(Indonesia 20% lebih, pen), sebagai ganti membantu jutaan warganya yang secara resmi digolongkan sebagai melarat pada tingkat yang berbahaya (h.233-234).

Bila tak cepat-cepat menyadari arah perkembangan ini, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjelma menjadi seperti itu, meski misalnya devisa negara makin tambun dan ekonomi tumbuh 6% ke atas tiap tahun. Apakah solusi seperti itu yang diinginkan SBY-JK dan kabinetnya bersama para wakil rakyat yang ikut menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)? Dapatkah solusi seperti itu mengangkat harkat dan martabat bangsa sendiri? Apakah mayoritas rakyat Indonesia dalam 10-15 tahun ke depan didisain cuma menjadi bangsa kuli dan penyedia tenaga murah buat industri, perkebunan, mal, supermarket, hypermarket, cady lapangan golf, satpam, tukang ojek, dan lain-lain dengan peng-hasilan asal bisa makan? Melihat kurangnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan rakyatnya, yang bisa dilihat dari minimnya anggaran pendidikan, nampaknya tanpa disadari arahnya cenderung seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan dasar semacam itu harus bisa dijawab oleh penyelenggara negara saat ini, bila memang peduli pada nasib dan masa depan rakyat. Sebab disadari atau tidak, bila tak hati-hati atau membiarkan semuanya berjalan seperti selama ini, penganut neo liberalisme ekonomi bisa membelokkan demokrasi menjadi korporatokrasi, satu istilah yang dipopulerkan Perkins lewat *Confessions*.

Dalam korporatokrasi kedaulatan tidak lagi berada di tangan rakyat, tapi di tangan perusahaan-perusahaan besar yang menguasai pasar. Suara rakyat hanya diperlukan menjelang dan selama pemilihan umum. Setelah itu baik wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),



Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan di birokrasi pemerintahan harus mendengar dan mengakomodasi kepentingan perusahaan. Untuk itu perusahaan siap membiayai sidang-sidang dewan di mana pun, termasuk di hotel-hotel mewah. Jadi bukan suara rakyat lagi yang mesti didengar, tapi pasar. Siapakah pasar? Dalam pengertian mutakhir pasar adalah sekumpulan produsen, trader, broker, spekulasi, para bankir, pelaku pasar modal, perusahaan perkebunan, pertambangan, pengembangan properti, konsultan, eksportir, importir dan orang-orang yang memiliki daya beli, tak peduli dari mana pun mereka berasal. Selebihnya? Bagi penganut neo liberalisme selebihnya mungkin hanya para pengganggu yang tak penting.

SBY jelas bukan penganut neo liberalisme. Oleh karena itu, dapat dipastikan, dia tak akan membiarkan Indonesia berkembang ke arah masa depan yang nista seperti itu. Menurut Menteri Komunikasi dan Informasi Dr. Sofyan Djalil (kini Menneg BUMN), SBY adalah presiden yang sangat peduli pada nasib dan masa depan bangsanya. Namun, peduli saja tak cukup. Sebagai presiden dan wapres, yang dipilih langsung oleh rakyatnya di tengah ketidakpastian ekonomi yang menyesak dada, pasangan SBY-JK diharapkan berani membuat 'grand design' masa depan bangsa. Akan seperti apa Indonesia dalam 50-100 tahun ke depan? Bila yang mau dicapai sudah jelas, maka langkah pertama untuk 3 - 5 tahun ke depan dalam bidang pendidikan, ekonomi dan politik sudah dapat ditentukan dari sekarang. Apa saja skala prioritas yang mesti dikerjakan dalam jangka pendek untuk mewujudkan masa depan seperti itu. Bila ingin membangun ekonomi berbasis pertanian, atau kelautan,

maka dasar-dasarnya harus sudah dibangun saat ini. Tanpa kerja nyata sekarang, cita-cita akan tetap membeku di dalam hati sendiri dan menjadi bahan cacian rakyat kecil di warung-warung.

Bila ingin memperbaiki nasib petani tentu impor beras bukanlah solusi yang bagus. Apalagi bila dilakukan pada saat panen raya, walaupun tujuannya untuk menekan harga beras yang dibutuhkan rakyat banyak. Pemerintah tidak perlu membuat para petani miskin dulu, baru memberi bantuan. Ada cara-cara yang lebih terhormat. Bila ingin menekan harga beras misalnya, pemerintah lewat Bulog atau Departemen Pertanian cukup membeli beras dari petani dengan harga pasar. Lalu jualah dengan harga yang ditetapkan. Dengan demikian, subsidi itu bisa dinikmati rakyat sendiri, bukan petani dari Thailand atau Vietnam. Cara yang lebih genial tentu saja dengan melakukan pembinaan kepada petani tentang cara-cara baru dalam mengolah tanah untuk meningkatkan produksi. Bila Fadel Muhammad berhasil meningkatkan produksi pertanian Gorontalo lewat berbagai terobosan dan penggunaan penemuan-penemuan baru dalam bidang pertanian, tentu hal serupa bisa dilakukan di provinsi lain.

Membiarkan harga beras meroket terus di pasar untuk mendapatkan legitimasi impor beras, seperti yang berlangsung belakangan ini terkesan sangat kasar dan menyakitkan. Demikian pula bila pemerintah ingin memberi bantuan kepada rakyat kecil dalam urusan kesehatan dan pendidikan. Pemerintah tidak perlu membuat mereka jatuh miskin lebih dulu, misalnya dengan menaikkan harga bahan bakar di dalam negeri setara harga di Negara-negara maju. Lalu mengalokasikan dana untuk biaya operasional sekolah (BOS) lebih besar ke sekolah-sekolah

untuk menolong mereka yang jatuh miskin. Sebab ketika perut lapar, pendidikan bagi rakyat kecil menjadi tak penting lagi. Jadi itu hanya menambah jumlah anak-anak putus sekolah. Pendeknya rakyat mengharap pemerintah melakukan berbagai terobosan untuk menembus kebuntuan nasib buruk mereka. Rakyat mengharap perubahan nyata dari kemiskinan menjadi kemakmuran. Atau dari kemelaratan menjadi kebahagiaan, dan dari ketakutan akan masa depan suram menjadi ketenangan menyongsong masa depan cerah.

Dulu keinginan untuk memiliki kehidupan yang bebas dari rasa takut, bebas dari rasa lapar, bebas dari kebodohan, bebas dari terik matahari dan hujan, serta bermartabat di antara bangsa-bangsa di dunia, telah mendorong para pendiri dan pejuang bangsa ini mengusir penjajah dari buminya. Keinginan serupa, dalam bentuknya yang lebih modern, telah mendorong rakyat, mahasiswa dan kaum reformis di seluruh tanah air di bawah pimpinan Amien Rais memaksa orde baru lengser ke prabron, 21 Mei 1998. Gerakan reformasi 1998 tentu saja tidak muncul begitu saja. Dia merupakan rentetan perjuangan panjang sejak proklamasi kemerdekaan, Program Bentengnya Muhammad Natsir yang ingin memakmurkan pribumi dekade 50-an (program ini telah diadopsi pemerintah Malaysia dan berjalan mulus) dan Gerakan Malari (1974) pimpinan Harriman Siregar yang melegenda itu. Lalu masih ada lagi penolakan terhadap NKK/BKK (1978), Pemuda Islam Menggugat (1979), Peristiwa Priok (1984) dan penolakan terhadap judi legal SDSB (1992) pimpinan Nuku Sulaeman. Semua tuntutan itu kini mesti diwujudkan SBY-JK yang telah memenangi hati rakyat lewat iklan dan kampanye pemilu yang apik, akhir 2004.

Terpilihnya SBY-JK di tengah medan reformasi yang belum selesai itu secara resmi seperti menyematkan tugas-tugas perbaikan nasib dan peningkatan martabat bangsa di pundak mereka. Tugas-tugas tersebut bukanlah tugas baru, sebab SBY-JK dalam kampanyenya menjelang pemilihan presiden (pilpres) memang menjanjikan perubahan. SBY-JK tentu menyadari bahwa itu tugas berat. Jadi tidak ada alasan untuk mengingkarinya. Sedang mengulur-ulur pelaksanaannya bisa menimbulkan keputusan dan depresi yang akut di masyarakat. Ini pada gilirannya bisa berubah menjadi bencana sosial dahsyat dan mahal. Apalagi bila diingat negeri ini mengidap penyakit kronis yang tak sembuh-sembuh, yaitu borok besar di kaki kiri dan kanannya. Di kaki kanan adalah utang luar negeri. Sedang di kaki kiri utang domestik. Keduanya sama-sama memberatkan. Menjelang kejatuhan rezim orde baru Soeharto, tepatnya pada Maret 1998 - menurut catatan Bank Indonesia (BI), utang luar negeri Indonesia sekitar US\$ 137,424 miliar, jauh di atas ambang batas yang US\$ 100 miliar. Dari utang sebesar gunung itu US\$ 63,732 miliar adalah utang pemerintah. Jadi lebih separuhnya atau US\$ 73,962 miliar merupakan utang swasta besar alias konglomerat, dan US\$ 10,5 miliar di antaranya berjangka pendek. Sebagian besar utang ini berasal dari bank komersial yang mengenakan persyaratan berat: berjangka pendek dan bunga tinggi. Itu belum termasuk utang Grup Sinar Mas milik konglomerat gaek Ekatjpta Widjaja (Oei Ek Tjhong) sekitar US\$ 14 miliar yang baru terungkap akhir 1999.

**2. Di antara Korupsi, Kebodohan dan Ketakutan**  
Akumulasi utang luar negeri sebesar itu telah terjadi

selama kurun waktu 32 tahun. Sedang utang domestik pemerintah terjadi lewat jalur aneh. Mulanya dunia perbankan kelojotan. Penyebabnya adalah berbagai salah urus dan pelanggaran batas maksimum pemberian kredit (BMPK) yang mengalir ke grup sendiri dan afiliasinya. Atau sekalian dialirkan ke perusahaan fiktif. Ketika kebobrokan itu terbongkar oleh badai krismon, orang pun panik dan menarik dananya dari bank. Guna membantu bank mengatasi rush akibat digilir nasabahnya itu, Bank Indonesia (BI) menggelontorkan bantuan likuiditas (BLBI) sampai Rp 144 triliun, hampir tanpa *reserve*. Atas desakan IMF pemerintah lalu mengeluarkan obligasi sebesar Rp 430 triliun untuk menyehatkan perbankan. Obligasi itu dikenal sebagai obligasi rekapitalisasi perbankan (obligasi rekap), yang bersama bunganya menjadi Rp 600 triliun lebih.

Menurut Kwik Kian Gie, Menko Perekonomian pada Kabinet Persatuan Abdurrahman Wahid, Megawati dan Ketua Bappenas pada Kabinet Gotong Royong Megahamzah, mulanya obligasi itu cuma untuk digunakan sebagai instrumen saja. Bila banknya sudah sehat, obligasi tersebut bisa ditarik kembali. Namun, ketika sudah sehat dan bebas dari kredit macet, atas desakan IMF pula, bank-bank rekap itu mesti dijual bersama obligasinya. Lalu demi memelihara kepercayaan internasional, bank-bank itu jatuh ke tangan asing atau konsorsium. Begitulah pemerintah tiba-tiba masuk ke dalam jebakan utang (debt trap) yang kedua setelah utang luar negeri. Betapa tidak! Dengan cara itu, tanpa disadari, pemerintah telah mengubah utang swasta menjadi utang publik Rp 600 triliun.

Dirubahnya utang swasta menjadi utang publik sebesar itu tentu membawa konsekuensi yang tidak kecil.

Jadi setelah menggelontorkan dana segar Rp 144 triliun dan bersusah payah membenahi puluhan bank sakit, pemerintah bukannya menuai hasil dan pujian, tapi malah mendapat tambahan utang ajaib Rp 600 triliun. Hebatnya lagi obligasi rekap segede gunung itu berbunga pula sekitar 12,5%. Jadi pembelinya mendapatkan bank sehat, plus obligasi besar berbunga tinggi. Harganya? Tak perlu khawatir, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), entah belajar berhitung dari siapa, berani menawarkannya dengan harga super miring. Saat itu BPPN memang lagi mengejar setoran demi menutup bolong-bolong anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Tidak percaya? Marilah kita ambil contoh BCA.

Seperti diketahui obligasi pemerintah yang melekat di BCA sebesar Rp 58 triliun. Setiap tahun, kata Kwik, pemerintah menyusui BCA Rp 7 triliun atau Rp 500 miliar lebih/bulan sebagai pembayaran bunga obligasi. Setelah dinyatakan sehat dan keluar dari bangsal 'rumah sakit' BPPN, 51% saham BCA kemudian jatuh ke tangan konsorsium Farallon (AS) dan Djarum dengan harga bantingan Rp 5,3 triliun. Artinya dengan dana Rp 10 triliun saja, konsorsium Farallon sudah bisa mendapatkan bank swasta terbesar di Indonesia (memiliki 15 juta nasabah, 700 cabang dan 1.800 ATM di seluruh tanah air), ditambah obligasi rekap senilai Rp 58 triliun. Nampaknya meski kelihatan kren dan pintar-pintar, para petinggi BPPN dan PPA (Perusahaan Pengelola Aset) yang menjadi kelanjutannya, perlu mengambil kursus tambahan kepada Putra Sampoerna yang bisa menjual perusahaan rokoknya seharga Rp 18 triliun. Dibanding BCA, perusahaan rokok itu jelas tak ada apa-apanya. Apalagi bila diingat selain bonus obligasi dan kelebihan-kelebihan itu, BCA bisa

membukukan keuntungan di atas Rp 2 triliun/tahun. Tahun 2005 BCA telah membukukan keuntungan bersih Rp 3,6 triliun, naik 12,6% dibanding 2004 yang mencapai Rp 3,2 triliun.

Padahal dengan obligasi sebesar Rp 58 triliun saja, yang menjanjikan penerimaan bunga Rp 7 triliun/tahun, maka dapat dipastikan dalam 2 tahun Farallon sudah balik modal. Bahkan melaba Rp 4 triliun. Itulah 'subsidi' yang harus dikeluarkan pemerintah buat konsorsium Farallon-Djarum yang sudah mau membeli BCA dengan harga obral. Ya, BPPN harus diakui telah mengobral ayam petelur emas semacam BCA dengan harga kelewat murah. Tentu diperlukan investigasi menyeluruh terhadap para petinggi BPPN kala itu. Bahkan seandainya BCA tidak ikut dijual. Artinya pemerintah cuma menerbitkan obligasi atau surat utang negara (SUN) senilai Rp 58 triliun dengan bunga tetap 12,5% setahun, lalu menjualnya seharga Rp 10 triliun (tak sampai 20% dari nilainya), itu pun sudah terlalu murah. Apalagi bila pembeli obligasi tersebut masih mendapat bonus bank swasta terbesar di Indonesia pula. Sementara mantan petinggi BPPN mendapat posisi direktur atau komisaris di bank-bank rekap yang telah diobral itu, getahnya terus membaluri rakyat dan pemerintah Indonesia. Soalnya sejak itu para pemilik baru bank rekap tersebut (BCA, Bank Danamon, Bank Permata, dan lain-lain) mesti disubsidi lewat APBN.

Memang dibutuhkan investigasi menyeluruh untuk meyakinkan banyak kalangan bahwa aksi jual murah bank-bank rekap tersebut telah didasari dengan perhitungan matang, rasional dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebab kadang-kadang korupsi dan kebohohan pada tataran praktis bisa menghasilkan sesuatu yang sama,

yaitu sama-sama merugikan negara, lembaga atau perusahaan. Bedanya cuma kebohohan tidak memiliki unsur kesengajaan dan tidak ada unsur memperkaya diri sendiri. Kebohohan cuma menempatkan si pelaku sebagai korban penipuan yang merugikan banyak orang. Si pelaku sendiri tak mendapat keuntungan dari ulahnya, atau setidaknya tidak berniat memperkaya diri sendiri. Yang mendapat keuntungan adalah lawan atau mitranya yang lebih cerdik dan berkuasa. Sang mitralah yang lebih banyak berperan memainkan posisinya yang lebih superior (abuse of power). Sedangkan korupsi lain lagi. Dia memiliki unsur kesengajaan. Di situ juga ada unsur memperkaya diri sendiri. Apakah mitranya juga mendapat keuntungan, itu soal lain. Namun, satu hal yang menjadi pasti adalah negara dan rakyat atau perusahaan tempatnya bekerja mesti menanggung kerugian itu.

Beban yang harus dipikul pemerintah dan rakyat akibat aksi obral bank-bank rekap dan aset-aset negara di BPPN sebenarnya tidaklah kecil dan akan berlangsung lama. Cuma entah karena lagi banyak pikiran, aksi obral BPPN itu hampir tak mendapat perlawanan dari anggota kabinet, kecuali dari Kwik. Sedang di luar kabinet yang bersuara lantang menentang boleh dibilang cuma Amien Rais, tokoh sentral reformasi yang gagal menjadi RI-1 lewat jalur resmi. Padahal dari penjualan BCA saja, misalnya, pemerintah akan mendapat beban yang cukup berat. Sampai akhir April 2002 obligasi yang masih melekat di bank itu, menurut Managing Director BCA waktu itu Jahja Setiaatmadja, sebesar Rp 59,631 triliun. Itu berarti bunganya terus berjalan dan menumpuk. Bila dibiarkan saja selama 20 tahun, misalnya, Farallon sebagai pemilik baru BCA bisa memiliki piutang atau tagihan kepada

pemerintah dan rakyat Indonesia Rp ratusan triliun, karena bunganya berbunga lagi. Dan oleh karena obligasi tersebut bisa diperjualbelikan, maka bukan tidak mungkin penagihnya juga akan bejibun.

Tahun 2002 saja pemerintah harus membayar bunga untuk obligasi rekap BCA sekitar Rp 6 triliun, jadi jauh lebih tinggi ketimbang Rp 5,3 triliun yang dikais BPPN untuk 51% saham BCA dari konsorsium Farallon - Djarum. Sedang obligasi yang jatuh tempo pada 2002 yang masih dipegang BCA, kata Jahja, tinggal Rp 1,027 triliun dari sebelumnya Rp 3,441 triliun. Sebagian obligasi, yang jatuh tempo Juli 2002, sudah dijual. Menurut catatan manajemen baru BCA obligasi yang jatuh tempo 2003 mencapai Rp 3,441 triliun. Tahun 2004 yang jatuh tempo mencapai Rp 7,498 triliun, lalu 2005 berjumlah Rp 6,075 triliun, 2006 meningkat sedikit menjadi Rp 7,266 triliun. Lalu 2007 obligasi yang jatuh tempo mencapai Rp 8,777 triliun. Puncak jatuh tempo terjadi pada 2008 yang mencapai Rp 17,060 triliun. Lalu pada 2009 menurun lagi, meski tetap akan memberatkan APBN, yaitu menjadi Rp 8,487 triliun. Sampai kapan beban itu akan dipikul rakyat Indonesia?

Menurut Direktur Farallon Capital Raymond Zage (Bisnis Indonesia, Rabu, 1 Mei 2002) pihaknya sebagai pemilik baru BCA, setidaknya memerlukan waktu 3-5 tahun untuk mengurangi obligasi pemerintah di bank tersebut. "Kemungkinan diperlukan proses selama 3 hingga 5 tahun untuk mengurangi obligasi, sehingga BCA bisa menjadi bank konvensional." Amboy! Bayangkan berapa keuntungan yang bisa disedotnya dari balung-balung rakyat negeri ini selama itu? Kwik sudah berupaya menghentikan pembodohan dan pembobolan uang negara tersebut, tapi digagalkan IMF yang rupanya lebih banyak punya pen-

dukung dalam kabinet waktu itu. Maka utang ajaib segede gunung itu pun legal sampai sekarang.

Akumulasi utang luar negeri yang mencapai US\$ 137, 424 miliar selama 32 tahun dan utang domestik Rp 600 triliun hasil sulapan IMF, jelas bukan kesalahan SBY. Namun sebagai presiden yang mewarisinya, SBY tentu berhak menyeleksi: mana yang perlu dilunasi, mana yang harus ditolak dan mana pula yang bisa dikurangi secara tanggung renteng. Membebani seluruhnya di pundak SBY, yang akhirnya mampir di punggung rakyat, tentu tak bijak. Menteri Keuangan Dr. Sri Mulyani Indrawati dan Menko Perekonomian Boediono, serta ekonom kondang semacam Muhammad Ichsan, M Chatib Basri, dan lain-lain tentu mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak adil berlaku di situ. Betapa tidak! Rakyat Indonesia dipaksa menanggung beban utang para bankir yang sudah kaya lewat beragam penyunatan subsidi, mulai dari pendidikan, kesehatan, sampai penghapusan program-program kesejahteraan. Pada saat sama rakyat, yang tak ikut bikin kesalahan itu dan tidak pernah menikmatinya, harus membayar bahan bakar minyak (BBM), listrik dan air bersih dengan harga mahal, agar negara bisa membayar utang.

Memang tak gampang mengubah keadaan tersebut atau menghentikan proses ketidakadilan yang telah berlangsung lama itu. Sebab setelah berhasil melakukan akrobat seperti itu, mereka tentu melihat Indonesia sebagai mangsa yang jinak. Mereka tak menginginkan perubahan. Toh perubahan adalah sebuah kepastian. Cuma dibutuhkan kejelian untuk menemukan setiap celah yang terbuka, diramu dengan sedikit kecerdasan dan keberanian. Bank Dunia sendiri pernah mengakui 30% utang luar negeri Indonesia bocor setiap tahun alias

dikorup atau tidak digunakan untuk membangun. Itu berarti 30% utang luar negeri Indonesia, yang menurut catatan BI bulan Maret 2005 berjumlah US\$ 134,362 miliar (utang pemerintah saja US\$ 78,5 miliar), tergolong utang najis (odeos debt). Bagian yang 30% ini tentu bisa dihapuskan, jika pemerintah berani *fight* di forum-forum IMF, Bank Dunia, Paris Club, dan lain-lain. IMF dan Bank Dunia, yang selama ini selalu mengawasi aliran utang itu, mestinya ikut menanggung renteng kebocoran tersebut. Itu yang pertama.

Yang kedua, utang domestik pemerintah Rp 600 triliun. Utang ajaib ini pukul rata seluruhnya merupakan odeos debt. Pemerintah sebenarnya tak pernah berutang pada bank-bank domestik yang telah berpindah tangan ke asing itu, tak pernah pula ada dananya, apalagi mengambil manfaat dari itu, maka sudah seyogyanya obligasi itu ditarik atau dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian tidak ada lagi kewajiban pemerintah untuk mengang-garkan pembayarannya di APBN tiap tahun.

### 3. Pilihan-Pilihan yang Tersedia

Harus diakui baik yang pertama maupun yang kedua, bukanlah tugas ringan. Pertanyaannya kemudian: apakah keadaan ini akan dibiarkan terus berlangsung? Apakah SBY, sebagai presiden pilihan rakyat, tega membebani kesalahan para pendahulunya kepada rakyatnya yang sudah miskin dan melarat? Jawaban atas pertanyaan itu akan sangat mempengaruhi kiprah Kabinet Indonesia Bersatu SBY-JK pada tahun-tahun mendatang.

Bila jawabannya adalah ya! Artinya SBY-JK lebih senang membiarkan ketidakadilan tersebut berlangsung seperti itu demi citranya di mata internasional, IMF,

Amerika Serikat (AS), Paris Club, Bank Dunia, CGI (Consultative Group on Indonesia), WTO, dan lain-lain, maka masa depan Indonesia dapat dipastikan tak akan mem-baik. Masa depan dan martabat bangsa ini tidak akan berubah seperti yang dijanjikan pada masa kampanye. Masa depan mereka adalah apa yang bisa kita saksikan sekarang, dengan kecenderungan menurun - baik dari sisi kemakmuran, keamanan, maupun kecerdasan dan harga diri.

Buat pemerintah membiarkan kebodohan dan ketidakadilan tersebut berjalan, tentunya jauh lebih ringan dan aman. Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana kabinet-kabinet sebelumnya, tinggal mengalokasikan 'upeti' Rp seratus triliun lebih untuk membayar cicilan utang luar negeri, plus bunganya, serta utang dalam negeri hasil sulapan IMF dan bunganya. Tahun 2004, misalnya, Kabinet Gotong-Royong Mega-Hamzah telah membayar pokok dan bunga utang dalam dan luar negeri sebesar Rp 139,4 triliun. Kabinet Indonesia Bersatu SBY-JK, yang kala itu baru terbentuk, telah membayar Rp 126,315 triliun pada 2005: cicilan utang pokok Rp 61,614 triliun dan bunga Rp 64,691 triliun. Lebih rendah Rp 17,2 triliun dari yang dianggarkan, karena mendapat moratorium akibat bencana tsunami di Aceh dan Nias.

Tahun 2006, mungkin karena kaget melihat akibat dari kesembronoan tim ekuin menaikkan BBM (1 Oktober 2005) rata-rata 126%, SBY-JK tak sempat menugaskan anggota kabinetnya memperjuangkan keringanan di forum internasional. Ya presiden mana yang tak kaget melihat 15 juta kepala keluarga di negara yang dipimpinnya langsung masuk jurang kemiskinan bersama-sama. Tindakan kurang perhitungan itu telah menyulap sekitar



60 juta rakyat di seluruh Indonesia menjadi pengemis tiga bulanan dengan penghasilan Rp 3 ribu lebih sedikit/hari atau Rp 100 ribu sebulan. Lebih jauh lagi tindakan tersebut ikut menyundul inflasi sampai 18% yang membuat BI dan sektor riil menggigil. Di sisi lain kealpaan meminta keringanan di forum internasional, memaksa pemerintah menganggarkan Rp 140 triliun lebih untuk membayar utang.

Dalam APBN 2006 untuk pembayaran utang dalam dan luar negeri pemerintah telah mengalokasikan Rp 140,22 triliun (4 kali lebih besar daripada anggaran pendidikan yang dijatah cuma Rp 34 triliun). Rinciannya: pembayaran beban bunga Rp 76,63 triliun dan cicilan utang pokok Rp 63,59 triliun. Itu juga jauh lebih besar daripada opportunity lost (selisih antara harga BBM bila dijual di luar negeri dengan harga BBM) yang dipelintir menjadi subsidi (sekitar Rp 95 triliun). Padahal yang belakangan itu yang amat mempengaruhi kehidupan rakyat banyak dan sebenarnya tidak melibatkan uang keluar sungguhan, atas tekanan IMF mesti dipangkas sampai nol dalam tenggat waktu yang telah ditentukan. Sementara subsidi buat para pemilik baru BCA, Bank Danamon, dan lain-lain yang melibatkan uang sungguhan boleh jalan terus. Nampaknya IMF, Paris Club, Bank Dunia, dan lembaga-lembaga super itu berusaha menggiring pemerintah Indonesia, termasuk Kabinet Indonesia Bersatu SBY-JK, untuk menggunakan logika-logika yang aneh dalam memimpin negaranya.

Itulah konsekuensi logis dari jawaban ya kabinet. Namun bila jawaban atas pertanyaan tersebut adalah tidak! Maka dapat dipastikan pada tahun-tahun mendatang, Kabinet Indonesia Bersatu SBY-JK akan lebih sering

berbenturan dengan IMF, Paris Club, Bank Dunia, CGI, Asian Development Bank (ADB), dan lain-lain. Sebab meminta penghapusan utang luar negeri sebesar 30% tentu akan mendapat perlawanan keras dari para biang rentenier itu, meski Bank Dunia pernah mengakui itu dikorup. Demikian juga dalam upaya menarik obligasi rekap senilai Rp 600 triliun atau menyatakannya tidak berlaku lagi, jelas akan mendapat perlawanan sengit. Pemilik baru BCA Konsorsium Farallon (AS), pemilik baru Bank Danamon (Temasek, Singapura), dan lain-lain yang sudah biasa menikmati subsidi Rp triliunan tentu tak akan menerima, meski mereka tahu obligasi dan bunga itu sebenarnya tak pantas.

IMF sendiri sebagai arsiteknya, pastilah akan berdiri paling depan di barisan para penentang. Lembaga super itu tentu akan melakukan berbagai manuver untuk menekan pemerintah Indonesia agar patuh seperti biasanya. Di sinilah diperlukan kepiawaian diplomasi Boediono yang manggung lagi sebagai Menko Perekonomian dan Sri Mulyani Indrawati yang kini berada di posisi Menkeu. Kalau cuma mau menjual obligasi atau SUN, tentu presiden SBY tidak memerlukan orang sekaliber Boediono dan Sri Mulyani di dua posisi strategis tersebut.

Kabinet Indonesia Bersatu jilid kedua di mana Boediono berada di dalamnya, menurut pengamat Indonesia Prof. R. William Liddle, dari satu segi memang boleh disebut reinkarnasi Mavia Berkeley-arsitek ekonomi orba pimpinan Prof. Widjojo Nitisastro dari Universitas Indonesia. Mereka adalah mainstream economist, ekonom profesional yang percaya pada kekuatan pasar sebagai penggerak utama ekonomi modern. Cuma Widjojo, kata dia, adalah makhluk orba yang diktator. Oudiens-nya

adalah Soeharto. Sedang ekonom Boediono dari UGM, adalah makhluk era reformasi yang demokratis.



**Boediono**

yang digunakannya untuk menjelaskan konsepnya kepada rakyat? Lewat telepon genggam atau sms (short message service), barangkali? Atau pakar Indonesia dari Ohio State University, AS itu menganggap Boediono telah mereduksi rakyat Indonesia menjadi pasar dalam pengertian mutakhir? Jadi audiens Boediono pasar? Sebagaimana umumnya para pemikir orientalis dan cabangnya pakar keindonesiaan (Indonesianist), Liddle juga menghentikan analisisnya di tempat, ketika daya kritisnya justru sangat diperlukan.



**Srimulyani**

Akan tetapi, meminta Liddle menggunakan pisau bedah setajam silet untuk menguliti tim ekonomi kabinet tentu tak bijak. Itu adalah tugas para cendekiawan negeri ini, setidaknya yang cinta tanah air dan bangsanya. Menurut saya sangat mungkin audiens Boediono adalah

pasar. Bahkan itu pun masih bisa dipersempit lagi menjadi pasar modal dan pasar uang. Padahal untuk negeri semacam Indonesia sebenarnya pasar modal dan pasar uang tak bisa dijadikan ukuran, karena pelakunya sangat sedikit, tak sampai 0,001% dari pelaku ekonomi di tanah air. Itu pun sebagian besar didominasi asing, para spekulasi dan pengejar gain atau keuntungan jangka pendek.

Doktor Ekonomi sekaliber Boediono dan Srimulyani tentu mubazir kalau cuma ditugasi menjual surat utang negara (SUN), yang yield-nya 329 basis poin di atas treasury bill AS atau bunganya 3,29% lebih tinggi daripada obligasi internasional di Amerika. Itu bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh mahasiswa IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pengetahuan) semester 2 jurusan Tataboga. Lewat multi level marketing barangkali malah lebih cepat laku. Apalagi bila diingat belakangan obligasi global yang dikeluarkan pemerintah yield dan kuponnya terus membubung. Dulu saat yield dan kuponnya berada pada kisaran 6%-7% saja sudah diminati asing, karena sudah lebih tinggi 3% lebih dibanding obligasi internasional negara lain. Apalagi bila yield dan kuponnya ditingkatkan menjadi 8%-8,5%. Dengan yield dan kupon setinggi itu, pemerintah tinggal mengumumkannya di internet, para pengejar rente akan antri. Penasihat keuangan (financial advisor) semacam JP Morgan, UBS Warburg dan Barkeley sebenarnya tak terlalu dibutuhkan untuk menjual Global Bond dengan yield dan kupon sebesar itu. Orang sekaliber Boediono dan Srimulyani, serta lembaga-lembaga hebat tersebut baru diperlukan, bila kabinet mau melakukan kerja-kerja besar dan fundamental semacam penghapusan dan pemotongan



utang. Juga ketika mau menarik obligasi rekap atau menyatakannya tidak berlaku.

Pada praktiknya nanti, SBY-JK mungkin akan memerlukan pengacara-pengacara canggih di pengadilan domestik dan pengadilan internasional. Pembayaran bunga obligasi rekap yang telah dilakukan pemerintah selama ini, sebenarnya sangat naif dan saking lucunya sampai mirip cerita Abunawas. Ceritanya begini: suatu hari di zaman khalifah Harun Al Rasyid, di ibukota Bagdad ada seorang miskin diseret ke pengadilan oleh tetangganya yang kaya. Si miskin, sebutlah namanya keboindo, dituntut ganti rugi Dinar 100 oleh si kaya. Dia dianggap bersalah telah mempergemuk diri sendiri dengan cara makan setiap tetangganya memasak. Aroma masakan enak tetangga kaya itu telah menaikkan selera makannya, sehingga dia menjadi gemuk. Si kaya keberatan. Dia sendiri tak pernah punya selera, karena itu tetap kurus. Si kaya menuntut Keboindo ganti rugi Dinar 100.

Pria miskin itu kelimpungan dan hampir pingsan menghadapi tuntutan yang tak masuk akal tersebut. Jangankan membayar ganti rugi Dinar 100, mau membeli minyak tanah saja dia harus antri dulu di kantor pos mengambil 'bantuan langsung tunai (BLT).' Untungnya dia memiliki seorang pengacara jempolan, Abunawas. Si pembela tampil tenang. Dia membenarkan dakwaan tersebut dan siap membayarnya saat itu juga. Si kaya dan jaksa penuntut senang dan takjub bukan kepalang. Si hakim terbengong-bengong. Sementara Keboindo mengeret menyembunyikan kepala di bahunya seperti kurakura. Namun Abunawas belum selesai. Dia mengambil Dinar emas dari kantongnya. Kemudian diketukkannya pada batu penjepit kertas di mejanya seratus kali.

Dengan demikian, katanya setelah itu, denda Dinar 100 sudah dilunasinya. Hakim pun mengetuk palu, dan menyatakan Keboindo tidak bersalah dan bebas dari tuntutan.



**Prof. Dr. Dorodjatun Koentjorojakti**

Jadi jika diperjuangkan sungguh-sungguh dan cerdas, bukan tidak mungkin, hakim internasional pun akan membebaskan pemerintah Indonesia dari kewajiban membayar obligasi rekap dan bunganya. Bahkan utang luar negerinya pun akan bisa dihapus, setidaknya 30%. Harus diakui Boediono memang tak punya pengalaman tempur di forum-forum internasional. Ketika menjabat Menkeu pada Kabinet Gotong Royong Mega-Hamzah, Boediono, bersama Menko Perekonomian Prof. Dr. Dorodjatun Koentjorojakti yang mantan Dekan FE-UI dan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, tak pernah berupaya kearah itu. Mendengar ide semacam itu pun, mereka sudah was-was.

Djatun dan Boediono memilih untuk mencari utangan baru, karena lebih aman. Bersama ibu Ani, Menkeu yang mantan Direktur Eksekutif IMF untuk Asia Pacific dan mantan mahasiswinya Djatun, mungkin saja Boediono menjadi lebih berani berbenturan dan bahkan bergulat. Tarik-menarik tentu ada. Bila dulu pemerintah Mega-Hamzah tak mampu memainkan kartu Djatun-Boediono, yang katanya dihormati di AS, untuk melunakkan IMF. Yang terjadi justru sebaliknya IMF lebih bisa memainkan kartu Djatun-Boediono untuk menakut-nakuti pemerintah Indonesia. Mampukah SBY memainkan kartu Boediono, Srimulyani sebagai truf untuk melunakkan IMF, Paris Club,

Bank Dunia dan pemerintah AS?

Jawaban atas pertanyaan itu masih terbuka. Sebagai presiden yang peduli pada nasib bangsanya, SBY tentu lebih punya peluang untuk memainkan truf itu. Apalagi Boediono dan ibu Ani-begitu Menkeu kerap disapa, telah menandatangani kontrak politik. Namun bungkamnya pasangan Boediono-Srimulyani dalam urusan tambang minyak Cepu seperti memberi isyarat bahwa SBY-JK belum mampu memainkan truf itu untuk kepentingan bangsanya. Apalagi setelah blok itu betul-betul diserahkan pemerintah kepada Exxon Mobil Corporation (14 Maret 2006) dengan memecat Dirut Pertamina Widya Purnama, satu hari sebelum Menteri Luar Negeri AS Condoleeza Rice tiba di Jakarta. Untung saja Condry, begitu Menlu AS itu disapa, tidak membawa pesan dari bosnya agar pemerintah Indonesia memenjarakan Dirut Pertamina yang 'mbeling' itu.

Kalau saja pemerintah AS juga memintanya sebagai prasyarat bagi kepercayaan internasional yang mahal itu, bukan tidak mungkin akan ada tim yang bisa mencarikan segudang kesalahan Widya untuk digiring ke balik trali besi. Seiring pemecatan itu pembongkaran terhadap borok-borok Pertamina yang marak selama setahun, seperti penyelundupan BBM bersubsidi ke luar negeri, penyedotan minyak di tengah laut dan lain-lain yang cukup merepotkan Widya dan jajarannya, hilang begitu saja. Tak ada penyelidikan, apalagi penyidikan terhadap kasus-kasus yang merugikan Negara puluhan triliun itu. Di sisi lain ada masalah baru timbul yang nantinya akan berakibat jangka panjang. Sebab dijegalnya Pertamina untuk mengelola sendiri blok Cepu, telah menutup peluang BUMN minyak itu menjadi perusahaan pertambangan minyak dan gas kelas dunia. Rupanya meski telah

mendapat kepercayaan penuh dari rakyat, pemerintah tak cukup punya kepercayaan diri untuk menangkal tekanan sang juragan AS. Tekanan itu sudah berlagsung sejak masa pemerintahan Abdurrahman Wahid-Megawati Soekarno Putri dan berlangsung terus sampai ke zaman Mega-Hamzah, tapi tak berhasil melunakkan hati pemerintah, meski Duta Besar AS Ralph L Boice ikut campur. Amien Rais, Ketua MPR waktu itu sampai berteriak agar pemerintah AS menghormati kedaulatan RI untuk mengambil keputusan sendiri soal blok Cepu.

Exxon baru berhasil mendapatkan keinginannya justru ketika Indonesia berada di tangan presiden dan wapres yang dipilih langsung oleh rakyatnya. Wakil rakyat di DPR/MPR nampaknya tak terlampau peduli lagi atau sibuk memikirkan berbagai tunjangan yang mungkin bisa didapat dengan cara diam.

Padahal sebelum itu pemerintah dan wakil rakyat sedikit banyak lebih bisa menjadikan kepentingan bangsa sebagai pijakan. Tak heran bila dua kabinet sebelumnya cenderung memberi kesempatan kepada Pertamina untuk membuktikan kemampuannya. Gesekan dengan para pendukung ekonomi neo liberal di dalam pemerintahan memang terjadi, tapi masih dapat diatasi. Waktu itu Baihaki Hakim misalnya, dan Dirut-dirut Pertamina selanjutnya sampai Widya Purnama, berhasil meyakinkan pemerintah bahwa dengan pengalamannya yang panjang dan perhitungan deposit minyak berlimpah (sekitar 1,4 miliar barel) dan gas sekitar 8,772 triliun kaki kubik, bila diberi kesempatan mengelola sendiri, maka keuntungannya akan jauh lebih besar bagi negara. Argumentasi itu kandas di masa SBY-JK. Kontrak yang mestinya berakhir 2010 itu diperpanjang 20 tahun dihitung mulai

2011-2030. Jadi ketika deposit minyak dan gas blok itu terkuras habis, baru blok Cepu akan kembali ke pangkuan republik. Semoga saja tidak membawa bencana kepada penduduk setempat seperti yang menimpa penduduk sekitar tambang emas Newmond Minahasa - juga milik AS. Bahkan Exxon naik kelas dari technical assistant contract (TAC) menjadi kontrak bagi hasil, di mana Exxon menjadi operator utamanya. Bagi hasilnya menjadi 45% buat Pertamina, 45% buat Exxon dan sisanya yang 10% buat Pemda Jawa Tengah dan Jawa Timur. Cuma itu tidak gratis. Pemda mesti merogoh kocek sendiri sebesar Rp 2 triliun untuk bisa mendapatkannya.

Ini menunjukkan bahwa Exxon berhasil mendiktekan keinginannya. Sebab untuk bisa mengeksplorasi dan mengeksploitasi blok Cepu, pemerintah sendiri berharap akan ada investasi baru sekitar US\$ 2,5 miliar yang disuntikkan oleh Exxon. Nah bila untuk mendapatkan 10% saham di blok Cepu pemda Jateng dan Jatim mesti patungan menyuntikkan dana Rp 2 triliun atau setara US\$ 2,1 miliar, maka Exxon cuma butuh sedikit tambahan untuk memenuhinya. Padahal berdasarkan undang-undang otonomi daerah merekalah sebenarnya yang lebih pantas mengklaim blok Cepu sebagai asetnya. Mengapa mereka harus bayar?

Sebelum krisis ladang itu 51% dimiliki PT Humpus Petragas dan 49% Ampolex Cepu Pte,Ltd, anak perusahaan Exxon Mobil Oil Ltd. Saham Humpus kemudian diambilalih Exxon Mobil melalui Mobil Cepu Ltd, sehingga 100% saham pertambangan menjadi milik perusahaan asing asal AS tersebut. Exxon Mobil rupanya meniru Freeport, yang berhasil memperpanjang kontraknya awal dekade '90-an 10 tahun sebelum kontraknya berakhir

pada masa akhir kekuasaan Soeharto. Tentu keberhasilan Exxon lebih hebat lagi, karena terjadi di era reformasi. Caranya masih tergolong sederhana. Pemerintah mengugaskan Rizal Malarangeng dan Lien Cie Wei sebagai tim perunding mewakili pemerintah menggantikan tim sebelumnya yang dianggap kaku. Rizal Malarangeng dan Lien Cie Wei sebenarnya dianggap banyak kalangan sebagai wakil neo liberalist. Sehingga ketika pemerintah memutuskan untuk menunjuk mereka menjadi wakil dalam perundingan, nasib blok Cepu sebetulnya sudah ditentukan sebagai upeti buat Exxon (AS). Padahal kalau pemerintah mau mengelola sendiri, dengan cadangan minyak dan gas sebesar itu dan harga minyak yang berada di atas US\$ 70/barel, dananya tidak akan sulit didapat. Sebab lembaga pendanaan akan antri untuk ikut membiayainya. Jadi alasan bahwa Pertamina tidak cukup punya dana untuk membiayainya tidak dapat dibenarkan.

Namun, persoalan blok Cepu sebenarnya tidaklah sederhana itu. Bila kiat amau berpikir jernih, setidaknya ada 4 hal yang terlepas ketika blok minyak itu diserahkan pengelolaannya kepada Exxon. Pertama, control atas blok minyak itu jatuh ke tangan asing, sehingga kita tidak bisa tahu berapa deposit dan produksi yang sebenarnya persis seperti tambang emas Freeport. Kedua, kesempatan untuk belajar mengelola sendiri sebuah tambang minyak di negeri sendiri agar nantinya bisa menjadi perusahaan pertambangan kelas dunia seperti Petronas (Malaysia). Ketiga, kesempatan untuk memperoleh manfaat sepenuhnya dari tambang. Keempat, kesempatan untuk memperbaiki undang-undang dan kontrak-kontrak pertambangan yang sudah berjalan selama ini untuk masa depan dan kemakmuran bangsa.

Dalam hal yang terakhir itu sebenarnya kita bisa belajar dari ahli ekonomi Pakistan Abul A'la Maududi. Menurut ekonom itu barang tambang adalah pemberian Tuhan untuk seluruh penduduk negeri, baik yang hidup sekarang maupun yang bakal lahir. Dia menyandarkan teorinya itu pada Al Qur'an yang menetapkan zakat barang tambang 20%. Bertolak pada ajaran itu dia berpendapat bahwa pemerintah hanya berhak berbagi hasil kepada investor untuk yang 80% itu, bukan seluruhnya. Sebab yang 20% lagi adalah hak rakyat. Jadi 20% dari hasil tambang mesti dialokasikan untuk menjamin pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan penduduk berpenghasilan rendah, terutama mereka yang berada di Cepu, Tuban dan Bojonegoro (jatim dan Jateng). Ini gratis dari Tuhan. Tidak ada alasan untuk memaksa mereka membeli milik mereka sendiri. Yang harus membeli adalah pihak Exxon. Di era global ini mestinya pemerintah mengadopsi teori Maududi, bukan sekadar menerima pikiran Exxon. Ini sekaligus bisa dijadikan titik tolak untuk memperbaiki semua kontrak pertambangan, termasuk Freeport yang boleh dibilang menguasai hampir 100% tambang emas di Timika, setelah pengusaha nasional Grup Bakrie menjual 7,5% sahamnya kepada Freeport.

Tentu masih banyak jalan untuk membatalkan kontrak-kontrak pertambangan yang merugikan Negara dan bangsa tersebut, kalau pemerintah mau. Sebab bila berpegang pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 misalnya, di mana ditetapkan bumi, air dan segala kekayaan yang terdapat di dalamnya adalah milik Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka semuanya bisa dibatalkan demi hukum. Cuma ini harus dilakukan lewat pengadilan. Hal lain yang

juga layak mendapat perhatian pemerintah saat ini adalah warisan blunder Kabinet Gotong Royong Mega-Hamzah, yaitu penjualan Indosat kepada Singapura. Penjualannya sejak awal telah menabrak berbagai ketentuan hukum di kedua Negara: Singapura adalah Negara yang menganut kebijakan pintu tertutup untuk udaranya, sehingga kepemilikan Indosat yang mempunyai satelit komunikasi bertentangan dengan undang-undang negara kota tersebut.

Sedang di Indonesia informasi adalah vital, karena kaitannya yang erat dengan rahasia Negara. Sehingga bila Indosat dimiliki Negara lain, maka undang-undang kerahasiaan Negara yang sedang digarap saat ini tidak akan efektif. Semua pembicaraan presiden, menteri-menteri dan lembaga-lembaga tinggi Negara, baik antar mereka ataupun dengan presiden dan petinggi negara lain akan mudah dideteksi dan disadap Singapura melalui satelit yang dimiliki Indosat. Begitu juga dengan pembicaraan rahasia dan lalu lintas data di dunia perbankan dan departemen lain di antara para pejabat yang menggunakan jasa satelit, semuanya bisa diketahui oleh Singapura. Transaksi jual-beli Indosat ini pun sebenarnya bisa dibatalkan demi hukum, bila pemerintah mau *fight*. Di-buy back juga bisa, tapi tentu Singapura akan memasang harga setinggi-tingginya, sehingga pasangan Boediono-Srimulyani akan enggan menyediakan dananya. Singapura lewat special purpose vehicle (SPV) yang bermarkas di Caiman Island telah membeli Indosat lewat pasar modal seharga Rp 12 ribu/saham. Pada waktu itu (2003) harga itu berarti 50% di atas harga pasar. Maklum harga saham Indosat sedang terjun bebas dari Rp 20 ribu/saham menjadi Rp 8 ribu.

Banyak analis dan pengamat ekonomi menengarai adanya permainan di balik jatuhnya harga saham Indosat. Saham itu telah digoreng sedemikian untuk kepentingan Singapura, sehingga dapat membeli Indosat dengan harga super diskon, sekaligus menjadi pahlawan. Terlepas dari kecurigaan seperti itu, ketika ditemui di rumahnya 7 Mei 2007 Sofyan Djalil seusai dilantik menjadi Meneg BUMN yang baru menggantikan Soegiharto, punya pandangan yang lebih cool. Menurutnya apa yang telah dicapai dalam penjualan Indosat pada masa Meneg BUMN di tangan Laksamana Sukardi (2003) adalah harga maksimal yang dapat dicapai saat itu. "Keadaan ekonomi waktu itu memang belum sebaik saat ini," katanya datar. Sofyan sendiri nampaknya tak terlampau berminat untuk mengambil kembali Indosat. "Kita kan masih punya Telkom. Kita besarkan saja Telkom. Toh pasarnya masih sangat luas dan rakyat kita yang sudah mendapat layanan belum sampai 30%. Sedang penduduk kita sudah di atas 220 juta," jelasnya enteng ketika ditanyakan masalah itu. "Kalaupun kita mau ambil kembali, maka yang kita tempuh adalah lewat pasar modal," sambungnya ketika didesak. Nah kalau jalan aman itu yang akan diambil pemerintah, tentu biayanya sangat mahal. Sedang kecu-rigaan analis dan pengamat ekonomi soal adanya permainan di pasar modal, yang dengan sengaja menjatuhkan harga saham Indosat untuk kepentingan Singapura dan merugikan Negara sendiri, boleh ditutup.

Boediono sebagai menko perekonomian dan Srimulyani sebagai menkeu tentu tahu betul tentang permainan semacam itu. Namun kedua elit politik ini nampaknya tak menganggapnya serius. Bungkamnya mereka dalam urusan Indosat sampai saat ini dan tambang minyak

Cepu, serta peristiwa-peristiwa di depan mata lainnya, seperti meyakinkan semua orang bahwa kedua pakar ekonomi ini terlalu besar untuk menjadi satelit Kabinet Indonesia Bersatu. Para pejuang ekonomi kerakyatan menilai pasangan ini keras menolak segala program yang meringankan beban rakyat dan lihai dalam mengutak-atik angka, misalnya dalam soal subsidi listrik, BBM, kesehatan dan anggaran pendidikan, sehingga berkurangnya anggaran publik bisa tampak manis. Di sisi lain mereka tak menganggap tabu segala program yang bisa menyenangkan IMF dan Uncle Sam, misalnya menyerahkan blok Cepu kepada Exxon Mobil seperti terlihat di atas. Contoh lainnya adalah membayar utang dalam dan luar negeri, berikut bunganya, tepat waktu, bila perlu lebih cepat. Dari sisi itu nampaknya dapat dibenarkan bila banyak kalangan menuduh keduanya sebagai penjaga kepentingan AS dan IMF di kabinet, sekaligus debt collector yang handal. Kedua pakar ekonomi ini bahkan tak malu membawa negaranya kembali ke pelukan IMF dengan mengikuti Post Monitoring Program beberapa tahun lalu, ketika negara lain ingin mengambil kembali kemerdekaannya dengan membuat program pembangunan sendiri. Tentu orang boleh saja menilai, tapi beberapa waktu lalu ibu Ani melontarkan kritiknya kepada sang mentor. "IMF jangan terus menekan kami," katanya. Sayangnya para ekonom di luar mainstream menganggap itu cuma letupan kekesalan biasa, bila tak bisa disebut mencari sensasi.

Bagaimanapun juga kepakaran Boediono dan Srimulyani tak bisa dibantah, dan banyak orang berharap agar presiden dan wapres tak segan memainkan kartu Boediono-Srimulyani. Sebab keduanya sangat dihormati

dan banyak dipuji di luar negeri, terutama oleh IMF dan pemerintah AS. Pujian dan penghormatan dunia luar itu tentunya tidak harus membuat pemerintah SBY-JK lupa memberi mereka tugas-tugas patriotik untuk membela kepentingan Negara di forum IMF, Paris Club, Bank Dunia dan lain-lain. Itu diperlukan agar APBN pada tahun-tahun berikut lebih sustainable dan ringan. Roda ekonomi bisa berputar lebih cepat karena karat-karat yang membeberatnya luruh dan rakyat lebih sehat dan cerdas karena pendidikannya lebih terjamin. Tanpa perintah SBY sebagai presiden pilihan rakyat, dapat dipastikan pasangan Boediono-Srimulyani tidak akan melakukan hal-hal besar semacam itu. Sebagaimana para senior Mavia Barkeley, pasangan Boediono-Srimulyani lebih senang mengemis utangan baru dan merayu investor asing. Memutar roda ekonomi dengan cara itu memang lebih aman dan gampang. Gejalanya semakin kasat mata pada minggu ketiga bulan Januari 2006. Menkeu Srimulyani terang-terangan menyatakan untuk mencapai pertumbuhan 6% per tahun dibutuhkan dana Rp 600 triliun. "Kalau kita menginginkan pertumbuhan 6% per tahun dengan produk domestik bruto Rp 3 ribu triliun, dibutuhkan dana investasi Rp 150 triliun kali empat. Karena output ratio investasi kita masih empat. Artinya kredit dan investasi yang dibutuhkan sekitar Rp 600 triliun," kata Srimulyani matematis.

Pernyataan menkeu itu seolah mengindikasikan bahwa dia dan Boediono tak punya alternatif lain, kecuali mengikuti jalan yang telah digariskan IMF kepada para pendahulunya. Apalagi bila diingat dengan mengikuti yang sudah-sudah jelas lebih aman dan tanpa resiko. Memang sikap 'pak turut' rada hina. Tidak match pula dengan gelar

akademik dan kepakaran yang telah diraih, karena petani pun melakukan hal serupa. Mereka umumnya tak terlalu berminat melakukan cara-cara baru atau mengimplementasikan penemuan-penemuan baru dalam bidang pertanian, karena tak bersedia menanggung resiko. Nah dalam upaya memacu pertumbuhan sebenarnya masih banyak cara lain yang dapat ditempuh, misalnya menarik obligasi rekap yang Rp 600 triliun atau menyatakannya tidak berlaku. Pemerintah bisa juga meminta penghapusan dan pemotongan utang atau penundaan pem-bayarannya sampai 20 tahun ke depan, sehingga tersedia dana yang diperlukan untuk memutar roda ekonomi.

Perhitungannya sederhana saja. Bila perhitungan bu menkeu memang akurat, pertumbuhan 6% yang diidamkan itu bisa dicapai hanya dengan mencabut obligasi rekap yang jumlahnya sekitar Rp 600 triliun. Apalagi bila dikombinasi dengan penghapusan dan pemotongan utang, atau setidaknya menunda pembayaran bunga dan cicilan utang luar negeri. Sebab dana yang dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang dan bunga setiap tahun sudah di atas Rp 120 triliun. Bila dana ini digelontorkan ke sektor riil, dapat dipastikan roda ekonomi akan segera bergerak lebih cepat. Sebaliknya dengan berutang lagi, tim ekonomi yang dinakhodai Boediono-Srimulyani membawa Indonesia menuju kegagalan yang sama seperti rezim orba. Soeharto, bersama Kabinet Pembangunannya, telah membangun Indonesia dengan mesin utang selama 32 tahun. Hasilnya adalah kegagalan yang mengesankan di penghujung abad XX. Ibu Menkeu dan seluruh anggota Kabinet Indonesia Bersatu tentu belum lupa kejadian itu.



#### 4. Sebuah Jalan Baru yang Terbuka

Sebenarnya dengan legitimasi rakyat yang dimilikinya, kata pakar ekonomi Rizal Ramli dalam sebuah diskusi di Taman Ismail Marzuki bulan Januari 2006, kabinet saat ini mestinya lebih percaya diri menghadapi tekanan dunia luar, termasuk IMF, Bank Dunia dan WTO. Masih banyak opsi yang tersedia untuk menyelesaikan keterpurukan bangsa ini. Menurut Menko Perekonomian pada masa Kabinet Persatuan Abdurrahman Wahid-Megawati Soekarnoputri itu, Indonesia bisa mencoba mengikuti jejak Pakistan, Nigeria, atau Argentina. Tanpa terobosan seperti itu, solusinya menjadi parsial dan memakan waktu. Nampaknya apa yang diungkap Rizal memang layak mendapat perhatian.

Marilah kita kupas satu per satu. Menjelang invasi Amerika Serikat ke Afgansitan pada tahun 2002, George W Bush meminta dukungan pemimpin Pakistan Jendral Musharaf. Kemudian orang nomor satu di Pakistan itu dengan cerdik memainkan posisinya yang strategis untuk meringankan beban negara dan rakyatnya. Dia meminta pemotongan utang luar negeri Pakistan sampai 50%, sedang sisanya dia meminta bunganya diturunkan sampai menjadi 0% sebagai syarat. Pemerintah AS yang pragmatis tak melihat pilihan lain yang lebih bagus dari itu untuk menyukkseskan invasinya di Afganistan, tetangga Pakistan yang sama-sama muslim. Permintaan itu dikabulkan AS hampir tanpa perdebatan berarti. Kini Musharaf bisa lebih ringan mendorong pertumbuhan ekonomi Pakistan.

Pemerintah Nigeria lain lagi. Presiden terpilih negeri itu meminta kepada pemerintah AS dan IMF apa yang disebutnya ongkos demokrasi. Pemimpin baru yang juga

berasal dari militer itu tahu bahwa negerinya tidak termasuk negara-negara miskin yang bisa mendapat keringanan utang, sebab Nigeria adalah anggota OPEC - sama seperti Indonesia. Di sisi lain dia pun tahu bahwa sebagian besar rakyatnya sangat miskin dari sisi pendidikan, kesehatan, ketersediaan tempat tinggal, listrik, air bersih, dan lain-lain. Berdasarkan itu semua, dia menyatakan kepada para kreditornya bahwa Nigeria cuma punya US\$ 0,30 dari setiap US\$ 1 utang luar negerinya. Artinya dia terang-terangan meminta pemotongan utang luar negerinya 70%. Para kreditor yang mau utangnya dibayar dipersilakan mengambil itu, yang tidak mau boleh menunggu sampai Nigeria mampu membayarnya. Para kreditor terperangah dan marah, tapi akhirnya setuju. Tak berhenti sampai di situ, lewat perjuangan sepenuh hati dan bantuan organisasi NGO (Non Government Organization), sisa utang yang masih ada dapat dibeli pemerintah Nigeria dengan harga 10% dari nominalnya. Maka dengan keberanian dan sedikit kecerdasan saja, Nigeria telah mendapat pemotongan utang sampai 90%. Kini negeri itu telah terbebas dari utang luar negeri. Tidak ada lagi alokasi dana dalam APBN Nigeria untuk pembayaran utang luar negeri.

Opsi lain yang bisa ditempuh pemerintah, selain apa yang telah dilakukan Pakistan dan Nigeria, tentu saja meniru Argentina. Pasien kambuhan yang sudah bosan dicekoki obat generik IMF ini, mengambil sikap proaktif mengurangi beban negaranya. Sang presiden menyatakan pemerintahannya tidak bisa membayar utang luar negeri dan bunganya kepada para kreditor sampai 3 tahun ke depan, karena Argentina sangat membutuhkan dana pembangunan untuk mengurangi penderitaan rakyatnya.

Dana, yang seyogyanya dipakai buat membayar cicilan pokok utang dan bunga utang luar negeri itu, lalu dipakainya untuk mengguyur sektor riil. IMF berang, negara-negara kreditor marah besar. Para pakar ekonomi neo liberal pendukung IMF di negeri itu meramalkan Argentina akan makin terpuruk, akan dikucilkan dalam pergaulan internasional, investasi luar tak akan masuk, bahkan yang sudah ada bakal henggang, dan sebagainya. Namun kenyataan berbicara lain. Ekonomi Argentina yang diguyur dana segar berlimpah itu tumbuh 7% tahun itu. Tahun kedua lebih fantastis lagi. Ekonomi Argentina tumbuh 8% tanpa utang baru. Tahun ketiga pemerintah Argentina sudah boleh berbangga, karena investor luar sudah berduyun-duyun masuk setelah melihat pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Para kreditor dan IMF yang berang itu pun melunak terhadap pemerintah baru Argentina.

Perkembangan positif di Argentina, Nigeria dan Pakistan tentu juga diamati oleh tim ekonomi SBY-JK yang dikomandoi Boediono-Srimulyani. Daripada menghabiskan segala daya untuk merayu investor asing dan mencari utang baru untuk mengejar pertumbuhan 6%, mungkin jauh lebih efektif dan efisien berjibaku mengurangi beban negara dan rakyat Indonesia di forum-forum internasional. Seiring dengan upaya-upaya tersebut, otot Rp terhadap US\$ atau valuta asing lain tentu harus diperkuat lewat berbagai terobosan dan instrumen baru yang mestinya dilakukan BI. Alasannya? Nilai Rp telah diserahkan pada kehendak spekulasi di pasar uang London. Lalu harga minyak, yang sangat berpengaruh terhadap tarif dan harga-harga produk di dalam negeri, digantungkan pada harga internasional. Logikanya setiap nilai Rp menguat

terhadap US\$, maka harga BBM, tarif listrik, tarif air minum, ongkos transport dan harga-harga di dalam negeri bisa turun. Jadi menguatnya otot Rp terhadap US\$ bisa meringankan beban rakyat.

Cuma dalam memperkuat otot Rp, presiden mesti hati-hati. Sebab bukan tidak mungkin di dalam kabinet pun ada orang-orang yang tidak senang. Apalagi sampai kembali ke kurs sebelum krisis yang Rp 2.100-2.300/US\$. Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Perjalanan sejarah bangsa ini sejak krisis berkali-kali membuktikan banyak orang penting negara, tidak menginginkan Rp kembali ke nilai riilnya sebelum krisis. Bahkan mereka yang tidak menginginkan Rp menguat dengan kecepatan bagus, juga tak kurang.

Buktinya tak sulit dicari. Pada masa Kabinet Reformasi Pembangunan Habibie, misalnya, nilai Rp pernah menguat luar biasa: dari Rp 15.000-17.000/US\$ menjadi Rp 6.700 dengan kecenderungan terus menguat. Tiba-tiba mantan Ketua Bappenas Ginjar Kartasasmita, entah mewakili siapa, berteriak lantang. Nilai yang ideal buat rupiah, menurut dia, adalah Rp 7.000/US\$. Penguatan Rp pun terhenti. Setelah kabinet transisi Habibie diganti, otot Rp memang mengempis lagi sampai di atas Rp 10.000/US\$. Namun pada bulan Mei-Juni 2002, masa Kabinet Persatuan Abdurrahman Wahid-Megawati, otot Rp menguat lagi. Namun baru saja mencapai angka Rp 8.425/US\$, Deputy Gubernur BI Miranda S. Gulthom, yang mestinya gembira, malah berteriak cemas. Menurutnyanya nilai yang bagus buat rupiah, agar perusahaan bisa ekspor, adalah Rp 8.500-Rp 8.900/US\$. Argumen itu jelas tak masuk akal, karena ketika kurs masih di bawah Rp 2000/US\$ pun sudah banyak perusahaan nasional yang



mengekspor. Namun, kurs Rp telanjur mengempis lagi. Padahal saat itu nilai US\$ tergerus hebat terhadap semua mata uang dunia akibat skandal Enron. Di Indonesia justru menjadi selasa kelabu akibat efek Miranda.

Tentu Miranda tidak bermaksud melakukan tindakan subversif terhadap negerinya sendiri, meski pernyataan Deputy Gubernur BI itu telah menyebabkan nilai Rp melorot. Ada maksud baik di balik pernyataannya itu, mungkin seperti Ginanjar yang ingin meningkatkan ekspor. Akan tetapi, bila ditinjau dari kepentingan yang lebih luas, di era global ini nilai mata uang suatu negara sebenarnya merupakan cermin dari nilai bangsa itu di mata dunia. Itu sebabnya negara-negara maju cemas bila mata uang mereka menyusut beberapa sen saja terhadap mata uang lain. Lihat saja bagaimana upaya negara-negara anggota Uni Eropa menaikkan gengsi Euro. Juga upaya Malaysia memelihara nilai RM, Korea mengangkat Won, Thailand memperkuat Baht, dan lain-lain. Jadi melorotnya nilai Rp terhadap valas secara langsung mencerminkan mengempisnya martabat bangsa Indonesia di mata dunia. Sebaliknya ketika Rp mulai menguat, martabat bangsa ini juga mulai meningkat.

Namun pernyataan Miranda telah merangsang orang untuk melepas Rp dan memborong dolar, serta mengakibatkan nilai Rp mengempis. Tak gampang memahami perasaan pemerintah, pakar ekonomi dan kaum nasionalis dalam urusan mata uang ini. Tidak ada perdebatan berarti soal itu sampai sekarang. Sedang karir Miranda terus melaju. Dia sempat dicalonkan menjadi Gubernur BI. Ini menunjukkan aksi Miranda mendapat penghargaan cukup baik di republik. Kini Miranda masih manggung sebagai Deputy Senior yang punya posisi cukup strategis dalam

mengangkat atau menjatuhkan nilai Rp terhadap valas. Jadi bila Kabinet Indonesia Bersatu SBY-JK ingin meringankan beban rakyatnya yang melarat dengan memperkuat otot Rp, nampaknya presiden mesti menanyakan dulu kepada Miranda: berapa sebenarnya nilai Rp yang bagus saat ini?

Bukan tidak mungkin Miranda yang pada masa Gus Dur-Megawati menganggap nilai yang pantas buat Rp adalah Rp 8.500-9.000/US\$, pada masa SBY-JK telah menurunkannya menjadi Rp 9.000-Rp 10.000/US\$. Jadi dengan kurs pada tanggal 13 Januari 2006 yang mencapai Rp 9.370 dan mengempis lagi ke level Rp 9.475 hari-hari berikutnya, sudah bisa dianggap berprestasi. Bahkan para pialang pasar uang menganggap nilai rupiah yang mencapai Rp 9.370/US\$ sudah melampaui nilai terkuatnya. Banyak orang meramalkan Rupiah akan digiring ke level Rp 9.500-9.700, dan pada akhir tahun 2006 akan digantung di posisi Rp 10 ribu/US\$. Untungnya ramalan itu tak terjadi, sehingga dia cuma bergema sebagai isu yang layu sebelum berkembang. Bila itu terjadi pun mungkin orang tak perlu khawatir, karena masih dalam batas toleransi BI. Sejak awal 2007 nilai Rp nampak anggun di kisaran Rp 9.185-9.200/US\$. Bahkan belakangan sudah berada di kisaran Rp 8.800-8.900/US\$. Lonjakan agak liar memang sempat terjadi pada September 2005 saat Rp tiba-tiba menyusut sampai di atas Rp 11 ribu/US\$. Itu, kata banyak pengamat, boleh dianggap sebagai shock therapy saja atau setidaknya sebagai peringatan betapa pentingnya pemerintah SBY-JK berbaik-baik dengan eksekutif BI, yang telah bekerja laiknya tukang bendungan.

Tak dapat dipungkiri fungsi bank sentral memang

sangat penting. Namun sepertinya tak diperlukan orang sekaliber Burhanuddin Abdullah sebagai Gubernur BI dan Miranda sebagai Deputy Senior untuk menjaga bendungan. Apalagi dengan gaji dan tunjangan seperti yang diajukan dalam rencana anggaran tahunan BI tahun 2006: Total gaji dan tunjangan Gubernur BI sebulan mau dianggarkan Rp 223,76 juta - bandingkan dengan presiden yang gaji dan tunjangannya cuma Rp 62,74 juta, sedang wapres Rp 57,32 juta. Deputy Senior Rp 187,25 juta dan Deputy Rp 169,86 juta. Dengan kata lain, dalam setahun Gubernur BI mau dianggarkan mendapat gaji dan tunjangan sebesar Rp 2,685 miliar, Deputy Senior Rp 2,246 miliar dan Deputy Rp 2,038 miliar. Jadi jauh di atas gaji presiden dan wapres yang dipilih rakyat lewat pemilu dan punya kewajiban mengurus 220 juta lebih rakyat. Dalam komponen gaji petinggi BI itu bahkan sudah dimasukkan tunjangan prestasi Rp 45.515.500/bulan buat Gubernur BI, Deputy Senior dapat Rp 37.546.000 dan Deputy Rp 34.928.500. Artinya mereka sudah menilai diri berprestasi, karena itu tun-jangan prestasi langsung dimasukkan ke komponen gaji. Kendati kasar, ini sedikit lebih canggih dibanding Dirut PLN Eddie Widiono yang membagi-bagi bonus (tantiem) untuk dirinya sendiri dan kru PLN - ketika perusahaan yang dipimpinnya masih merugi triliunan akibat inefisiensi, kebocoran, pat-gulipat listrik swasta dan berbagai salah urus.

Dengan rencana gaji petinggi BI sebesar itu dan anggaran operasional Rp 8 triliun/tahun, sebenarnya orang boleh berharap banyak dari Burhanuddin dan Miranda cs. Bukan sekadar menjaga bendungan agar nilai Rp berada di kisaran Rp 9.000 - Rp 10.000/US\$. Apalagi cuma lewat cara-cara konvensional: menaikkan suku

bunga untuk mencegah pelarian modal dan spekulasi, lalu melonggarkannya beberapa bulan kemudian untuk mengurangi inflasi. Pekerjaan seperti itu mungkin bisa dilakukan oleh komputer, asal diprogram seperti remote trading misalnya. Atau jangan-jangan bisa di-outsource seperti tenaga satpam. Pada bulan Mei 2007 nilai Rp nampaknya terus menguat sampai ke level Rp 8.900/US\$. Nilai Rp yang stabil dengan kecenderungan menguat ini tentu sedikit banyak ditentukan oleh BI dan kebijakan makro pasangan Boediono dan ibu Ani. Sayangnya kestabilan nilai Rp dan makro ekonomi ini tak berhasil menarik gerbong sektor riil untuk ikut bergerak. Sektor riil tetap melempem, bank-bank tak berani meng-gelontorkan kredit ke sektor riil. Pertanian, perikanan dan kelautan tetap meranggas kesulitan dana. Sedang kepala-kepala daerah sebagian lebih senang membiarkan dana APBD-nya nganggur di bank. Mereka lebih senang menerima bunga dari uang itu daripada menggunakannya untuk membangun daerah dengan segala risikonya. Ini mengkhawatirkan banyak kalangan. Karena bila reshuffle kabinet kedua ini, yang tidak menyentuh tim ekuin (ekonomi dan industri), nantinya tetap tak bisa menggerakkan sektor riil, maka kekecewaan akan semakin dahsyat.

Reshuffle atau merombak kabinet adalah hak prerogatif presiden. Dan sebagai presiden dan wapres pilihan rakyat, SBY-JK tidak perlu ragu melakukannya demi memperbaiki nasib rakyat yang telah memilih mereka. Bahkan pasangan ini boleh mengambil jalan baru, seperti meminta penghapusan 30% utang luar negeri yang tergolong najis itu, menyatakan obligasi rekap tidak berlaku, dan lain-lain. Sebab itulah jalan pintas paling

rasional untuk membangun negara dan bangsa Indonesia yang lebih bermartabat. Bila tidak dilakukan, maka segala upaya yang sedang berjalan, termasuk pembrantasan korupsi dan penegakan hukum, akan kurang berarti. Sebab semuanya tidak berpengaruh langsung terhadap perbaikan nasib rakyat, biaya hidup, pendidikan, transport, harga sembako, dan yang ringan-ringan semacam itu. Apalagi bila diingat kadang-kadang setelah seorang pejabat dihukum karena terbukti korupsi lewat berbagai mark up dan pungutan tambahan, biayanya malah bertambah setelah dia diganti. Lihat saja misalnya biaya haji. Setelah Menteri Agama (Kabinet Mega-Hamzah) Said Agil al Munawwar dibui karena korupsi, ongkos naik haji bukannya turun, malah semakin mahal. Ini bertentangan dengan logika. Sebab dengan pikiran sederhana saja: bila biang mark up dan pungutan tambahan dihilangkan, biaya seharusnya turun. Itu sebuah contoh kecil. Dalam masalah listrik, ada juga contoh menarik. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang protes terhadap kenaikan tarif dasar listrik (TDL) pada masa Gus Dur, malah menghadiahi wong cilik kenaikan TDL rutin 4 bulan sekali ketika berkuasa. Ini menunjukkan Negara ini telah diurus tanpa perencanaan yang matang dan target terukur yang dibuat sendiri.

Sebagai seorang jendral, SBY tentunya punya keberanian ekstra untuk menempuh jalan baru memperbaiki nasib wong cilik. Bahkan untuk menempuh jalan-jalan yang tak pernah ditempuh oleh para pendahulunya. Tanpa keberanian seperti itu, dapat dipastikan, nasib bangsa ini akan terus berputar-putar, ketika bangsa-bangsa lain telah memasuki millenium ketiga. Atau Indonesia terpaksa menunggu seorang nasionalis sejati,

yang mencintai rakyatnya sepenuh hati, untuk mengubah keadaan lewat reformasi kedua atau revolusi.

Reformasi kedua yang lebih dahsyat atau bahkan revolusi, bukan lagi mustahil saat ini. Apalagi bila diingat rakyat sudah punya pengalaman dua kali menumbangkan rezim. Pertama pada 1998, saat kekuatan reformasi dan rakyat di bawah Amien Rais berhasil memaksa diktator 32 tahun Soeharto lengser ke hprabon. Kedua, ketika wakil-wakil rakyat di MPR berhasil memaksa presiden Abdurrahman Wahid yang dipilih lewat pemilu demokratis, meninggalkan istana negara pada 2002. Ke depan nanti rakyat yang sudah dikecewakan oleh partai politik dan wakil-wakilnya, akan bisa bertindak lebih beringas. Rakyat Papua telah membutikannya beberapa waktu lalu. Wakil-wakil partai di DPR, yang selalu bisa dilunakkan pemerintah lewat politik uang, kenaikan gaji dan tunjangan Rp puluhan juta setiap rakyat mendapat beban tambahan, tentu tak akan didengar lagi.

Memang dengan cara itu pemerintah selalu berhasil melunakkan para wakil rakyat dan membuat suara mereka terpecah-pecah setiap kepentingan rakyat sedang dipertaruhkan. Contohnya tunjangan tambahan Rp 10 juta buat anggota DPR, saat pemerintah menaikkan harga BBM rata-rata 126% Oktober 2005. Lalu mandulnya para wakil itu saat pemerintah mengimpor beras dan rencana kenaikan gaji mereka menjadi sekitar Rp 50 juta/bulan - saat pemerintah berencana menyerahkan blok Cepu kepada Exxon dan menaikkan tarif dasar listrik yang kemudian batal. Semua itu jelas membuat rakyat sadar bahwa wakil-wakilnya sudah dibeli, sebuah preseden buruk yang amat berbahaya. Sebab membungkam wakil rakyat tidak sama artinya dengan memuaskan rakyat.

Lemahnya DPR dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan rakyat cuma semakin mencoreng nama Golkar dan Partai Demokrat, serta partai-partai gurem lain pendukung kebijakan anti rakyat. Pada gilirannya gejala ini akan melahirkan sikap anti partai. Bila sudah sampai ke tahap itu, rakyat akan merasa tidak memiliki wakil lagi di lembaga-lembaga perwakilan. Kemudian keinginan dan ketidakpuasan mereka akan disalurkan lewat jalan-jalan yang tidak konvensional dan inkonstitusional, seperti ketika menjelang kejatuhan Soeharto tahun 1998.

Gejala penyaluran aspirasi lewat jalan-jalan lain sudah mulai terlihat. Pendudukan gedung DPRD di berbagai daerah, pemukulan terhadap lurah dalam masalah BLT, penolakan terhadap penggusuran oleh aparat dan pelemparan batu terhadap pasukan polisi di halaman kampus Universitas Cendrawasih, Papua Barat adalah fakta-fakta yang sudah berbicara sendiri. Daftar ini bisa diperpanjang, misalnya dengan aksi buruh dan pekerja di seluruh tanah air tahun 2006. Mereka sekata menolak inisiatif pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13/2003. Dalam hal yang terakhir itu pemerintah dinilai telah bertindak terlalu jauh sampai menjadi kaki tangan perusahaan swasta dan asing. Hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa korporatokrasi mulai menemukan bentuknya di negeri ini.

Revisi undang-undang biasanya dilakukan untuk memperbaiki hal-hal yang dianggap kurang manusiawi menjadi lebih manusiawi, dari yang kurang adil menjadi adil, dari yang memberatkan pekerja menjadi yang meringankan. Dalam hubungannya dengan upah, maka perubahan biasanya dilakukan dari upah yang terlalu rendah menjadi sesuai standar. Anehnya revisi undang-

undang ketenagakerjaan justru menghapus kewajiban perusahaan untuk membawa karyawannya memiliki kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Padahal itu merupakan salah satu cita-cita kemerdekaan dan tuntutan reformasi. Revisi juga menghapus hak cuti besar (2 bulan) bagi pekerja yang telah mengabdikan pada perusahaan selama 6 tahun lebih dan menurut UU No 13/2003 dapat diambil pada tahun ke 7 dan 8. Hak mogok, pesangon bagi yang terkena PHK (kecuali yang bergaji di bawah Rp 1 juta) dan dana pensiun dihapus pula dalam revisi. Bila pengembalian hak-hak tenaga kerja seperti itu diusulkan oleh pemerintah dan disetujui pula oleh DPR, maka rakyat akan tergiring ke jalan buntu.

Gejala ini tentu mengkhawatirkan. Sebab mengangkat harkat dan martabat bangsa untuk memiliki kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, bebas dari rasa takut, bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari kebodohan, bebas dari penganiayaan, bebas dari panas dan hujan, dan hal-hal mendasar semacam itu adalah kewajiban negara yang mesti dijalankan sepenuhnya oleh pemerintah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut negara-negara barat yang maju berani menekan negara-negara lain - bahkan melakukan invasi militer. Invasi militer AS ke Korea, Vietnam, Panama, Afganistan dan Irak adalah bukti dari kepedulian pemerintahnya terhadap perut warganya.

Bila Kabinet Indonesia Bersatu SBY-JK sebagai institusi, yang mendapat kepercayaan mengelola kekayaan alam, bumi dan laut Indonesia, membebaskan diri dari kewajiban tersebut, maka kehidupan rakyat dan bangsa ini akan benar-benar terpuruk. Negara liberal semacam Belanda saja sangat sensitif terhadap hal-hal seperti itu. Di negeri kincir angin, pemerintah menjaga agar rakyatnya

tidak bekerja melampaui kewajaran. Di sana ditetapkan yang wajar bagi kemanusiaan itu adalah 40 jam seminggu atau 8 jam per hari (5 hari kerja). Dalam 40 jam seminggu itu penghasilan harus bisa menghidupinya secara layak bagi kemanusiaan. Artinya gajinya cukup untuk makan-minum dengan kandungan gizi yang bagus (ada daging, telur, roti, susu, buah, dan lain-lain), bisa bayar sewa rumah yang layak (lengkap dengan pemanas ruangan, listrik berlimpah, gas dan air bersih), membeli pakaian, bahan bacaan, alat hiburan, dan lain-lain, plus asuransi dan sedikit tabungan. Pendidikan anak-anak? Sudah menjadi tanggungan negara.

Di negeri kincir angin itu pekerja atau buruh menerima minimal f (gulden) 15 per jam setelah dipotong pajak untuk pekerjaan kasar atau yang tidak memerlukan ketrampilan khusus. Sedangkan harga 1 kg daging f 10 per kg dan harga 1 liter susu segar f 0,95) Jadi seorang pencuci piring di restoran misalnya, akan mampu membeli 1,5 kg daging sapi kualitas bagus dengan kerja 1 jam atau membeli sekitar 15 liter susu segar. Setiap perusahaan atau pemberi kerja dituntut untuk memenuhi itu dan aparat pemerintah rutin melakukan kontrol. Perusahaan yang tidak mampu atau tidak mau memberikan upah minimal itu, dikenai denda dan perusahaannya ditutup. Tentu negara berkembang semacam Indonesia tak bisa dibandingkan dengan Belanda yang tergolong negara maju.

Namun bila pemerintah berani memaksa rakyatnya untuk membayar tarif BBM dan listrik setinggi negara-negara maju, tak ada salahnya bila pemerintah berani mengarahkan perusahaan-perusahaan dan para investor asing untuk membayar tenaga kerjanya dengan standar tinggi. Rakyat Indonesia jelas tidak keberatan membayar

listrik dan BBM seperti orang Jepang, tentu pada saat penghasilan mereka juga setinggi orang Jepang. Kini saat mereka cuma bisa makan dua kali sehari dengan menu seadanya, setelah bekerja 10 - 12 jam sehari (7 hari seminggu) di pabrik-pabrik atau di mal-mal - dengan liburan sistem shift 2 minggu sekali, pemerintah mestinya membuat aturan lebih ketat kepada perusahaan. Kita mengundang investor swasta dan asing, bukan untuk memberi mereka segala privilege mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya dari negeri ini. Juga tidak untuk memberi kesempatan mereka memeras tenaga kerja seenaknya sendiri seperti tertuang dalam revisi undang-undang No. 13/2003 tentang kete-nagakerjaan. Kita mengundang mereka cuma untuk mempercepat rakyat negeri ini mencapai tingkat kemakmuran dan keadilan, sehingga martabat mereka setara dengan warga negara-negara maju.

Itu jelas bukan tugas gampang. Mungkin itu pula sebabnya rakyat memilih SBY-JK sebagai presiden dan wapres pada pemilu 2004. SBY yang jenderal militer dan JK yang pengusaha diharap menghasilkan formula jitu untuk memperbaiki keterpurukan bangsa ini. Apalagi dari sisi sumber daya manusianya negeri tercinta ini juga sudah mengkhawatirkan. Betapa tidak! Menurut sensus tahun 2003: 64,5% penduduk berusia 10 tahun ke atas cuma berpendidikan sekolah dasar (SD) ke bawah. Lengkapnya seperti ini: 8,5% tak masuk SD, 23,0% tak tamat SD (DO di tengah jalan), dan yang tamat SD cuma 33,0%. Artinya dalam 10 tahun ke depan, orang-orang inilah yang akan memenuhi bursa tenaga kerja kita. Sementara dari 42 juta usia sekolah, wajib belajarnya cuma menjangkau 32,9% alias 67,1% gagal. Itu berarti Indonesia, setelah

60 tahun merdeka, cuma mampu menyediakan tenaga kerja kasar, kurang ketrampilan dan pendidikan. Anak-anak petani, nelayan, perajin, tukang batu, tukang gali sumur, dan lain-lain cuma bisa melanjutkan pekerjaan orang tuanya dengan keahlian dan keterampilan yang tidak meningkat. Jadi ketika aset-aset negara dan perusahaan yang bagus-bagus berpindah tangan kepada asing, sebagian besar rakyat negeri ini akan berubah status menjadi sekadar kuli dengan gaji rendah dan boleh diberhentikan kapan saja tanpa alasan, tanpa pesangon-seperti yang dikehendaki oleh para pemrakarsa dan pendukung revisi undang-undang No 13/2003 yang akhirnya ditunda itu.

Cuma orang-orang yang mencintai bangsanya yang bisa melihat itu sebagai krisis. Bila untuk mengatasi krisis perbankan pemerintah berani menggelontorkan BLBI Rp 144 triliun, plus obligasi rekap Rp 600 triliun, tentu krisis pendidikan itu juga menuntut keberanian pemerintah untuk menggelontorkan dana ratusan triliun guna menanggulanginya. Setidaknya harus ada keberanian moral untuk mengalokasikan 20% APBN buat pendidikan, bukan cuma Rp 34 triliun seperti yang telah dianggarkan dalam APBN 2006 - jauh di bawah alokasi anggaran pembayaran utang dalam dan luar negeri ditambah bunganya yang mencapai Rp 140,22 triliun. Darimana dana itu bisa diperoleh? Minta saja sejoli Budiono dan Sri Mulyani untuk menukar tempat kedua item tersebut dalam APBN. Tentu IMF, Bank Dunia, Paris Club, WTO dan lain-lain akan berang, seperti berangnya mereka ketika Argentina melakukan tindakan semacam itu. Toh orang sekaliber Budiono dan Srimulyani pasti bisa mengatasinya. Bila lembaga-lembaga super itu memang menghormati kedua

petinggi negara dari dunia kampus itu, tentu mereka akan bisa dilunakkan. Orang-orang Pakistan, Argentina dan bahkan Nigeria saja bisa melunakkan mereka dengan alasan rakyat, masa kedua Doktor Ekonomi handal itu tak bisa.

Ekonom semacam Chatib Basri dan M Ichsan, serta para wakil rakyat di DPR tentu diharapkan lebih peka lagi terhadap gejala-gejala terpinggirkannya hak-hak rakyat di hadapan perusahaan dan lembaga-lembaga super dunia. Untuk itu tidak dibutuhkan studi banding ke negara-negara lain. Cukup lakukan penelitian holistik alias partisipatif saat reses. Caranya mudah: menginap saja dua - tiga hari di tempat-tempat kos para buruh pabrik di Jababeka dan mal yang listriknya dijatah 100 watt per pintu. Lalu coba makan dengan menu mereka sehari-hari, yang memang disesuaikan dengan gaji. Sekali-sekali para menteri dan keluarganya boleh bergiliran seminggu sekali tinggal di rumah-rumah penduduk yang berada di bawah SUTET. Atau anggota DPR boleh juga secara bergiiran menginap dalam tenda dekat semburan lumpur panas Lappindo, Sidoarjo sambil menyaksikan kematian industri rumahan di daerah itu. Penelitian partisipatif seperti ini akan menghasilkan pencerahan luar biasa dan menumbuhkan cinta kepada bangsa sendiri. Dengan demikian perjuangan untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa akan lebih bertenaga, tak mudah melempem seperti yang sudah-sudah saat diimingi tambahan gaji atau tunjangan.

Segala metoda dan jalan yang telah ditempuh DPR selama ini telah menghasilkan kekecewaan luar biasa di akar rumput. Di sisi lain para anggota dewan yang terhormat pun nampaknya juga bisa membaca kekecewaan

itu. Anehnya mereka tak berusaha menjembatani kesenjangan yang terus melebar, tapi malah menjaga jarak dari rakyat yang diwakilinya. Ini pada gilirannya menimbulkan perasaan tak aman di kalangan anggota dewan dan paranoya berlebihan. Pemagaran sekeliling gedung DPR/MPR, dengan pagar besi tajam setinggi 4 meter, adalah bukti yang paling kasat mata. Bisa jadi dalam 2-3 tahun ke depan para anggota dewan akan meminta fasilitas body guard dan senjata untuk melindungi diri dari rakyat.

Akumulasi kekecewaan, frustrasi dan kemarahan rakyat terhadap presiden dan wapres, serta wakil-wakil yang dipilih sendiri ini akan sangat berbahaya. Rakyat di akar rumput kini cuma menanti seorang negarawan sejati yang datang dengan cinta. Gejalanya sudah mulai terlihat. Aksi damai yang diselenggarakan bertepatan dengan ulag tahun Gerakan Malari pada 15 Januari 2007 oleh Harriman Siregar, dan kawan-kawan terang-terangan mengusung tema cabut mandat. Ini adalah tema besar, yang bila tak hati-hati menanganinya akan menjelma menjadi api yang membakar republik. Gerakan ini akan menjalar ke daerah-daerah dengan tema mencabut mandat gubernur, bupati, walikota, dan lain-lain. Apalagi para gubernur, bupati dan walikota itu seperti serempak menjalankan program yang sama setelah keluar sebagai pemenang dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Sepanjang tahun lalu sampai saat ini kita bisa menyaksikan bagaimana para kepala daerah itu memerangi orang miskin di daerahnya masing-masing. Walikota Jakarta Timur, misalnya, telah berhasil membersihkan daerahnya dari pedagang kakilima tanpa solusi. Di sekitar terminal Kampung Melayu trotoir dibikin miring agar tidak dijadikan tempat berdagang. Lalu ketika mereka berpindah

ke bawah jembatan layang yang space-nya lumayan luas, dagangan dan rombongan mereka dirusak oleh polisi pamong praja. Setelah itu space itu diberi pagar besi tinggi. Mereka kemudian dibiarkan menggelar dagangan di space yang sangat sempit dan tak layak di sudut jembatan layang, seperti manusia gua. Bencana yang ditimbulkan dari aksi kepala daerah itu terhadap rakyatnya sama dahsyat dan merusaknya dengan bencana alam. Jauh sebelum itu 14 ribu pedagang kaki lima kawasan Monas telah diusir paksa oleh aparat pemda DKI, hanya untuk menempatkan beberapa ekor rusa di situ. Sebagian memang kemudian ditampung lagi, tapi kawasan itu sudah tidak lagi bisa menghidupi para pedagang dan keluarganya seperti dulu. Pemerinah daerah Provinsi, kabupaten dan kota madia lain di seluruh Indonesia juga melakukan hal yang sama: mengusir kaum miskin dari pusat-pusat kota, bukan mengentaskan kemiskinan.

Di sisi lain bencana alam semakin sering saja mendatangkan penduduk beberapa tahun terakhir. Bencana-bencana ini dengan segala bentuknya terus berdatangan silih-berganti menimpa berbagai daerah secara bergiliran. Ada tsunami, ada gempa, gunung meletus, banjir, kekeringan, tanah longsor, berbagai penyakit, busung lapar, demam berdarah, flu burung dan berbagai kecelakaan kereta api, kapal laut, serta pesawat udara. Belum lagi soal semburan lumpur di Porong, Sidoarjo, Jawa timur. Kesalahan manusia ini telah dicoba pelintir menjadi bencana nasional semacam tsunami, sehingga biaya penanggulangannya harus ditanggung negara. Ini nampaknya membuahkan hasil. Buktinya tak sulit dicari. Lihat saja APBN perbaikan 2007. Di sana pemerintah telah mengalokasikan dana triliunan untuk menanggulangnya.



Padahal kalau untung, PT Lapindo Inc yang sedang berburu gas alam di kawasan itu boleh mengempitnya sendiri, bila perlu bebas pajak. Artinya bencana, yang secara tidak langsung melibatkan dua raksasa Grup Medco (Arifin Panigoro) dan Grup Bakrie (Nirwan Bakrie) harus ditanggung oleh seluruh rakyat Indonesia yang sudah melarat.

Mestinya pemerintah tidak perlu bertindak terlalu jauh. SBY-JK sebagai presiden dan wapres pilihan rakyat cukup bertindak sebagai pelindung rakyat. Presiden atau wapres cuma perlu memanggil bos-bos perusahaan yang terlibat dan memaksa mereka untuk mengembalikan kehidupan dan masa depan para korban lumpur dengan tenggat waktu yang ketat. Mereka telah kehilangan tempat tinggal, kampung halaman, ladang nafkah, sekolah, tempat mengaji, masjid, masa lalu, masa kini dan bukan tindak mungkin juga masa depan mereka. SBY-JK, yang telah mendapatkan kepercayaan rakyat, bisa menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan rasa cinta mereka kepada rakyat, kepada tanah air. Tentu pemerintah juga boleh membantu kedua raksasa itu dengan dana talangan atau pinjaman, agar proses gantiruginya tidak berlarut-larut. Namun bila melihat Perpres No 14/2007 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, nampaknya bukan itu yang ingin dicapai. Setidaknya ada 3 hal yang patut diperhatikan dari Perpres tersebut: pertama, dia meng-alihkan sebagian besar tanggungjawab dari pihak Lapindo kepada pemerintah, terutama dalam perbaikan infrastruktur dan biaya sosial. Kedua, dia mengizinkan pembayaran gantirugi dengan mencicil tanpa bunga. Padahal para korban telah merasakan penderitaan itu langsung dan terus-

menerus selama setahun lebih tanpa kepastian. Sebagian malah telah menderita gangguan jiwa karena tak kuat menahan derita akibat luapan lumpur yang menenggelamkan rumah, sawah dan tempat usaha mereka. Ketiga, dia telah melegalkan penggunaan uang Negara untuk kepentingan perusahaan.

Padahal yang diharapkan hanyalah agar presiden dan para pembantunya di kabinet yang pintar-pintar itu, agar Lapindo tidak melansir persyaratan lain yang memberatkan korban. Perpres No 14/2007 tentu telah dipikirkan masak-masak sebelum dikeluarkan. Ada dasar-dasar pemikiran dan perenungan mendalam yang mendahuluinya. Cuma bila dasar-dasar pemikiran itu tidak dijelaskan kepada halayak ramai, maka yang timbul justru interpretasi negatif tentang itu. Pada gilirannya ini bisa menimbulkan perasaan kecewa yang sulit disembuhkan. Oleh karena itu apabila ada interplasi dari wakil rakyat mengenai itu, presiden harus berani menjelaskannya di depan sidang wakil rakyat. Apalagi bila diingat ketika presiden mengutus 7 menteri, yang berasal dari berbagai partai untuk menjawab pertanyaan DPR dalam masalah resolusi PBB untuk Iran, telah disalahartikan banyak kalangan sebagai upaya menjinakkan DPR. Sedang kalangan awam menilainya sebagai perbuatan pengecut.

Masalah lain yang juga sangat mencoreng muka Kabinet Indonesia Bersatu SBY-JK beberapa bulan terakhir adalah Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura. Perjanjian ekstradisi dengan Negara kota itu tentu merupakan agenda penting kabinet, yang sejak awal menyatakan perang terhadap korupsi. Sedang para koruptor besar dan mereka yang dikategorikan sebagai penjahat ekonomi sebagian malah bersarang di negara tetangga itu. Dalam



hal ini orang sering menunjuk bos grup Raja Garuda Mas (RGM) Sukanto Tanoto dan bos Grup Gajah Tunggal Syamsul Nursalim. Mereka dan pengusaha semacam itu disinyalir mendapatkan perlakuan istimewa di Singapura, karena membawa banyak duit dari Indonesia. Cuma mengekstradisi konglomerat besar semacam Syamsul dan Sukanto tentu bukan perkara mudah. Bahkan mustahil, meskipun misalnya sudah ada perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Soalnya mereka belum pernah dibawa ke meja hijau dalam dakwaan apa pun. Bahkan penyelidikan atau penyidikan pun tak pernah dilakukan terhadap mereka. Jadi tidak ada alasan hukum untuk mengekstradisi mereka.

Syamsul, yang lewat banknya BDNI telah melahap BLBI Rp 27,4 triliun, memang pernah dipanggil kejaksaan pada masa Gus Dur-Megawati. Dia tak datang dengan alasan kesehatan. Lalu bos BDNI itu kabur ke Singapura dengan alasan berobat. Kasus itu kemudian menguap. Bahkan pada masa Kabinet Gotong Royong Mega-Hamzah, Syamsul bersama konglomerat besar lain penandatanganan master settlement & acquisition agreement (MSAA) diberi hadiah sertifikat release & discharge (lunas dan bebas dari segala tuntutan hukum oleh Ketua BPPN waktu itu Syafruddin Arsyad Temenggung).

Sedang Sukanto, si bos RGM memang pernah dicekal berkaitan dengan bangkrutnya Unibank miliknya yang membebani Negara Rp 4 triliun lebih. Dia juga dianggap telah merekayasa kepemilikan bank tersebut sampai berkeping-keping menjadi 20 lebih, di mana Sukanto menjadi pemegang saham minoritas yang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Sedang perintah cekalnya sendiri telah dicabut atas permintaan Budiono yang saat itu menduduki posisi menteri keuangan. Itu

dilakukan Budiono hanya satu bulan setelah perintah cekal itu keluar, tanpa penjelasan sampai sekarang. Sedang utangnya kepada Bank Mandiri sebesar US\$ 700 juta lebih, yang dulu diberitakan dihapusbukukan dirut waktu itu ECW Neloe, telah dibantah Sukanto. Orang terkaya Indonesia (menurut Forbes Asia edisi Oktober 2006) itu mengaku tak ada masalah dengan utangnya, dan dia tetap membayar cicilan dan bunganya.

Baik kasus release & discharge buat Syamsul dkk, maupun kasus Unibank dan utang Sukanto di Bank Mandiri sampai saat buku ini ditulis tak pernah dipermasalahkan Kabinet SBY-JK. Jadi siapa yang mau diekstradisi? Dan apa alasannya? Seperti kata Mensesneg Prof.Dr. Yusril Ihza Mahendra sebelum reshuffle kedua, yang mendepaknya keluar, peradilan ekstradisi itu tidak sertamerta bisa memboyong koruptor balik ke Indonesia bersama uangnya. Itu memerlukan proses panjang mulai dari penyelidikan, penyidikan, sampai ke proses pengadilan dan vonis. Itu bisa memakan waktu bertahun-tahun. Sedang tanpa proses pengadilan dan vonis bersalah, maka tidak seorang pun bisa dipaksa kembali ke Indonesia bila dia tidak menghendakinya. Masalahnya akan bertambah runyam lagi bila yang bersangkutan sudah berganti kewarganegaraan.

Namun nampaknya masalah ekstradisi ini telah diperjuangkan kabinet Indonesia Bersatu SBY-JK berapa pun biayanya (at all cost). Cuma pemerintah Singapura bertindak lebih cerdas. Mereka langsung mengaitkannya dengan masalah pertahanan dan latihan perang atau defence cooperation agreement (DCA). Wakil Indonesia yang hanya punya satu tujuan, penandatanganan perjanjian ekstradisi dan merasa di atas angin, langsung

terjebak. Setelah sama-sama menandatangani kesepakatan, barulah disadari bahwa Singapura mengambil keuntungan jauh lebih banyak dan berdampak mengurangi kedaulatan Republik Indonesia dalam jangka panjang. Sebab Singapura boleh menggunakan wilayah laut Indonesia sebagai tempat latihan perang, termasuk melibatkan pihak ketiga seperti AS, dan lain-lain. Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai tuan rumah tidak dibolehkan terlibat dalam latihan. Indonesia juga tidak diperkenankan ikut mengatur, termasuk soal senjata dan peluru macam apa yang boleh digunakan dalam latihan untuk misalnya melindungi nelayan dan habitat laut.

Singapura merasa keterlibatan TNI akan mempengaruhi jenis latihan dan mengubah substansi perjanjian pertahanan. Negara kecil itu tentu pantas memperjuangkan kepentingannya sendiri. Yang tampak naif justru pihak Indonesia. Bagaimana jika mereka ternyata berlatih di wilayah RI untuk mempecundangi TNI, bila suatu saat terjadi konflik bersenjata. Panglima TNI Djoko Suyanto mengaku telah dua kali meminta Singapura membahas soal teknis latihan perang yang akan digelar di wilayah Indonesia, tapi tidak mendapat tanggapan. Saya jadi teringat sejarah bangsa kita. Dulu raja-raja nusantara sudah ditipu oleh kompeni dalam perjanjian yang tidak dimengertinya. Mereka menyangka tidak akan ada konsekuensi yuridis dari kertas-kertas yang ditandatangani. Lalu Soeharto yang panik di tengah krisis yang menyesakkan dada, menandatangani 50 poin LoI yang juga tidak dimengertinya. Ironis sekali bila Menteri Pertahanan Prof. Dr. Juwono Sudarsono dan Menlu Hasan Wirayuda juga terjebak dengan cara yang sama, di zaman reformasi pula.

Tentu dapat dimaklumi bila para wakil rakyat di DPR berang. Mereka bahkan menilai perjanjian itu sebagai menggadaikan kedaulatan untuk sesuatu yang tak pasti. DPR menolak meratifikasinya. Sedang Menteri Pertahanan, yang juga pakar hubungan internasional, ngotot memaksa dewan berpikir ulang bila ingin menolak. Juwono yang renta, ibarat pohon coklat telah melewati usia 7 tahun alias lewat masa produktifnya, berargumen: "dengan perjanjian ekstradisi, Indonesia dipastikan bisa mengembalikan aset Negara US\$ 600 juta yang dilarikan koruptor ke Singapura." Siapa yang menjamin? Bagaimana pula caranya? Apalagi angka yang disebutkan sangatlah kecil.

Ada dua kemungkinan yang mendorongnya memberi angka sekecil itu. Pertama, dia memang tidak punya data akurat tentang berapa banyak uang Negara yang dibawa kabur ke negeri jiran itu oleh koruptor atau penjahat ekonomi. Kedua, yang dimaksudkannya memang penjahat ekonomi kelas teri. Dia menambahkan, seperti dikutip Koran Tempo (14 Juni 2007): "Perjanjian ekstradisi, implementation agreement, dan DCA merupakan tiga hal dalam satu paket. Apabila ada salah satu yang tidak diratifikasi, artinya perjanjian yang lain juga tidak berjalan," kata mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia itu tegas entah mewakili siapa. Mestinya dia bisa berbicara tegas pula terhadap Singapura. Hal senada juga dilontarkan Departemen Luar Negeri Singapura seperti dikutip AFP. "Posisi Singapura adalah bahwa perjanjian itu sudah selesai dan isinya tidak bisa diubah begitu saja atau sebagian tanpa menimbulkan risiko berantakannya seluruh paket perjanjian ekstradisi dan pertahanan."

Pernyataan itu dengan gamblang menunjukkan beta-

pa superiornya posisi Negara mini Singapura di hadapan republik Indonesia, sehingga dia berani mendiktekan kehendaknya. Kekalahan ini seperti melengkapi kekalahan yang berlangsung terus di tengah era globalisasi. Sebelum itu republik yang diwakili Dr. Rizal Malarangeng dan Lien Cie Wei telah menelan kekalahan melawan Exxon, sehingga blok Cepu harus diserahkan pengelolaannya kepada perusahaan AS tersebut. Jauh sebelumnya pula pada masa Kabinet Gotong-royong Mega-Hamzah, Indonesia harus menyerahkan Pulau Sempadan dan Ligitan kepada Malaysia. Ini merupakan akibat dari kekalahan diplomatik RI di bawah pimpinan Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda di mahkamah internasional. Bukan tidak mungkin Ambalat pun nantinya akan terlepas, mengingat kemampuan diplomasi RI di ranah internasional makin mengkhawatirkan saja. Sedang posisi sang menlu tetap dipertahankan sampai sekarang. Bahkan Juwono yang dulu dikenal sangat brilian dan sangat saya kagumi, diusianya yang uzur sudah menjadi selema itu. Indonesia modern sangat merindukan kembalinya diplomat-diplomat jempolan sekelas Haji Agus Salim dan Muhammad Roem yang tak gemeteran menghadapi negara lain.

Jelas ada yang salah di negeri ini, sehingga bencana terus mengepungnya dari segala arah. Sebagian terang-terangan menganggapnya sebagai azab dari Allah. Sebagian lagi menilainya sebagai akibat kebodohan para pemimpin negara, dan yang lain melihatnya sebagai reaksi alam. Akibat ulah segelintir orang-orang yang mau cari untung sebanyak-banyaknya, alam kehilangan keseimbangan dan bereaksi balik. Bukan tidak mungkin suatu saat ada orang yang bisa meyakinkan penduduk bahwa azab ini datang, karena mereka telah salah memilih

pemimpin dan wakil-wakil mereka. Bila itu terjadi, maka cabut mandat adalah tema yang akan semakin populer. Cabut mandat nantinya akan berubah menjadi satu-satunya jalan untuk menghentikan bencana lebih jauh. Apalagi setelah kasus aliran dana nonbujuter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) diungkap mantan menterinya Rochmin Dahuri di Pengadilan. Aliran dana itu telah membuat tokoh-tokoh nasional partai, baik yang dari blok reformis maupun stock lama, menjadi najis di mata masyarakat. Sebagian dana itu ada yang datang dari pengusaha impor pasir laut Singapura. Mereka merasa perlu memberikannya kepada menteri Rochmin waktu itu. Tujuannya agar 7 kapal berbendera asing, yang tertangkap basah mengangkut pasir dan ditahan pemerintah Indonesia, dibebaskan.

Ekspor pasir laut ini telah memperluas teritorial Singapura dari 560 km<sup>2</sup> menjadi 660 km<sup>2</sup> dalam 30 tahun. Menurut data resmi pemerintah Singapura pasir yang sudah diangkut 18,8 miliar kubik atau senilai Rp 105 triliun. Bertambahnya daratan Singapura seluas 100 km<sup>2</sup> itu tentu membuat batas laut Singapura bertambah maju. Bukan tidak mungkin nanti beberapa pulau kita yang berdekatan dengan Singapura akan bisa diklaim sebagai milik mereka. Atau setidaknya menjadi sengketa di mahkamah internasional yang menghabiskan energi dan biaya mahal. Artinya pemerintah Indonesia sendiri dan perusahaan-perusahaan nasional telah memberi senjata kepada negara tetangga itu untuk merampok wilayah kita. Saya jadi teringat Ambalat. Pulau kecil, yang mengandung minyak ini, dulu masuk wilayah Indonesia. Kini menjadi sengketa dengan Malaysia setelah pulau Ligitan dan Sepadan masuk wilayah mereka dan arena itu wilayah

laut Malaysia meluas sampai ke Ambalat. Tentu kita tidak ingin perluasan Singapura akibat ekspor pasir itu mengakibatkan kita kehilangan beberapa pulau lagi. Di sisi lain akibat ekspor pasir itu, secara legal maupun sembunyi-sembunyi, telah menimbulkan kerusakan lingkungan di pulau-pulau sekitar Selat Malaka. Bahkan pulau Nipah sempat hilang akibat pengerukan pasir. Nah sebagian dana itu telah, seperti terungkap dipengadilan, telah ikut membentuk dana non bujeter DKP yang dialirkan Rochmin ke berbagai lembaga, termasuk partai-partai dan tokoh-tokohnya.

Amien sendiri, si pemimpin kaum reformis, secara jantan mengakui menerima aliran dana DKP tersebut. Bahkan dia menyebutkan sekalian bahwa dana itu telah dipakainya untuk pasang iklan dalam rangka pilpres. Untuk itu Amien bersedia dihukum. "Ya kalau karena itu saya mesti masuk penjara 10 tahun, misalnya, ya gak apa. Yang penting Indonesia bisa menjadi negara maju dan demokratis," katanya kalem beberapa waktu lalu di televisi. Setelah pengakuan Amien, satu per satu tokoh-tokoh partai lain ikut mengaku. Tidak semuanya memang. Golkar misalnya, justru membantah. "Dana kampanye kita sudah diaudit dan sudah clear. Tidak ada itu dana DKP," sanggah wapres Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum Golkar kepada wartawan. Sementara itu beberapa partai mengambil jalan berputar untuk menyelamatkan partai dan orang-orang pentingnya. Beberapa nama yang tidak terlalu penting nampaknya akan dimunculkan sebagai kambing hitam dan dikorbankan. Belakangan Amien dan SBY berdamai dan bersepakat untuk memasukkan kasus itu dalam wilayah hukum. Ini sebetulnya sebuah kompromi yang bagus, agar persoalan-persoalan negara yang lebih

penting bisa dibereskan dulu.

Cuma karena kasus tersebut telanjur merusak partai-partai dan nama-nama tokoh pentingnya di tataran politik, maka perlu juga dibuat lembaga ad hoc untuk menjernihkannya. Tanpa upaya seperti itu, maka rakyat di akar rumput akan menganggap semua partai dan tokoh-tokohnya tak bisa dipercaya. Itu sangat berbahaya bagi masa depan bangsa. Padahal sebagian mungkin benar-benar bersih. Itu sebabnya kasus ini dibongkar habis. Mereka yang bersalah, setidaknya harus mendapatkan sangsi politik. Sebab kasusnya juga berada di wilayah politik.

Ada beberapa opsi yang bisa diambil. Pertama, partai-partai yang memakai uang haram itu dibubarkan saja untuk menciptakan efek jera. Sekaitan dengan itu eksekutif partai dicabut hak politik-nya untuk dipilih sebagai anggota dewan maupun dalam jabatan kenegaraan. Sangsi ini mungkin terlalu keras, tapi efeknya akan segera terasa dalam pembrantasan korupsi. Kedua, partai-partai yang memanfaatkan dana nonbujeter itu didiskualifikasi. Setidaknya mereka tak boleh ikut pemilu legislatif dua kali berturut-turut. Sedang tokoh-tokoh teras partainya tidak diperkenankan menjadi calon anggota legislative dan menduduki jabatan-jabatan publik untuk waktu 10 tahun. Ketiga, tokoh-tokoh partai, tanpa kecuali, menyatakan kesalahannya dan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia melalui televisi selama 3 hari berturut-turut pada saat prime time. Dengan cara ini partai-partai tersebut telah merehabilitasi namanya, sehingga masa depan demokrasi Indonesia bisa diselamatkan. Tanpa itu mungkin yang muncul adalah prahara dahsyat yang menimpa partai-partai dan tokoh-tokohnya.

Yang menjadi sasaran utama tentu mereka yang sudah menjadi anggota dewan dan yang menduduki jabatan-jabatan publik.

Tak cuma itu yang patut dikhawatirkan. Di tengah ketidakpastian dan kemuakan pada partai seperti ini, ada satu lagi ramalan yang akan ikut meramaikan dunia politik ke depan. Ramalan itu kini beredar lewat sms. Konon berasal dari Jayabaya yang disampaikan kembali Raden Ngabehi Ronggo Warsito. Bunyinya kalau di Indonesiakan seperti ini: Nusantara akan kembali menjadi negara besar dan mengalami masa keemasan setelah dipimpin 7 orang pemimpin. Yang pertama, orang-orang dari penjara (satrio kinunjoro murbo waseso), Soekarno dan rekan-rekannya yang memerintah republik setelah proklamasi kemerdekaan adalah bekas tahanan. Kedua, Satrio Mukti Wibowo kesandung kesampar, ini dinisbatkan kepada Soeharto. Ketiga, Satrio jinumput semelo atur gawe wirang, ini Habibie. Keempat, Satrio Lelono topo ngrame, wuto ngiteri jagad, ini Gus Dur. Kelima, Satrio piningit hamung tuwuh - ini Megawati (yang dipingit cuma wanita). Keenam, Satrio pinilih hamboyong pambukaning gapuro, gelar kloso tanpo nglengahi, ini SBY (pemimpin yang katanya tidak pernah duduk karena banyaknya persoalan). Ketujuh, Satrio pinandito sinisihan wahyu, ratu tanpo makutho. Yang ini masih misterius. Dia tidak bermahkota alias tidak melalui pemilihan normal. Ramalan ini seperti sengaja dipas-paskan dengan apa yang telah lewat, sehingga mengundang orang untuk mewujudkan yang ketujuh.

Bagaimanapun naifnya, banyak kalangan mempercayainya. Bila jutaan orang berani menggantungkan nasibnya pada undian untuk menjadi kaya lewat kuis judi sms,

iklan sabun, shampo, tabungan bca, dan lain-lain, menambah satu lagi bentuk judi tentu bukan masalah. Bila mereka yang mempercayainya bertemu gerakan cabut mandat dan mereka yang ingin menghentikan azab, tentu apinya akan membakar semua.

SBY-JK, presiden dan wapres pilihan rakyat, tentu masih memiliki peluang untuk memadamkan api itu sebelum pijarnya terlihat, tapi bukan dengan membrangus gerakan dan menangkapi tokoh-tokoh penarik pelatuk ketidakpuasan. SBY-JK cuma bisa memadamkannya dengan cinta, dengan cara-cara yang ditempuh para negarawan sejati. Presiden dan Wapres cuma perlu melakukan sedikit lompatan salto untuk keluar dari jalan-jalan yang telah dibuatkan orang lain. SBY-JK cuma perlu merintis jalan baru seperti telah dipaparkan di atas, yang mungkin saja akan berlawanan arah dengan apa yang telah berjalan selama ini.

**Z**

Namun sebagaimana rekannya sesama diktator di Iran sana, Shah Reza Pahlavi dan Chou Ches Koe di Rumania, iaat Soeharto untuk menunggangi reformasi kandas. Cendekiawan Muslim Nurcholis Majid yang hadir dalam pertemuan dengan Soeharto mengaku telah memilih Amien Rais sebagai pemimpin.

## II

### Indonesia Batal Tinggal Landas

Mulanya memang krisis moneter (krismon) yang menyebabkan nilai tukar rupiah terus mengempis terhadap USS pada bulan Juli 1997. Keadaan ini mengkhawatirkan banyak orang. Pelaku bisnis, yang sebelumnya banyak mengandalkan utang luar negeri, tentu menjadi makhluk yang paling cemas. Sebab setelah band intervensi diperlebar, nilai Rp langsung masuk ke jurang yang makin lebar itu. Artinya bila band intervensi benar-benar dicabut, dapat dipastikan nilai Rp akan terjun bebas. Itulah yang diprediksi oleh pakar-pakar ekonomi semacam Managing Director Ecomit waktu itu Dr. Rizal Ramli, pengamat ekonomi kritis Kwik Kian Gie dan Fu'ad Bawazier, mantan Dirjen Pajak yang kemudian diangkat Soeharto menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Pembangunan VII.

Namun, suara-suara para pakar ini tertutup oleh suara-suara lain yang lebih lantang, baik di dalam kabinet maupun di luar. Suara-suara lantang yang belakangan itu justru memberi semangat pemerintah untuk ikut saran



IMF. Mereka menganggap sudah waktunya pemerintah melepas band intervensi dan membiarkan pasar uang menentukan nilainya. Sistem nilai tukar mengambang terkendali (Managed floating exchange rate), yang selama ini diterapkan dengan mendepresiasi rupiah 5 - 6%/tahun, dianggap ketinggalan zaman. Kebijakan tersebut dinilai boros, karena memaksa pemerintah mencairkan devisanya untuk menjaga stabilitas nilai Rp. Sebaliknya dengan melepas band intervensi, maka pemerintah bisa menghemat devisa. Itu alasan pertama. Alasan kedua, fundamental ekonomi Indonesia sangat kuat, tak mungkin roboh oleh badai moneter seperti yang menimpa Korea dan Thailand yang nilai mata uangnya mengempis 40% lebih setelah band intervensi dilepas. Ketiga, Indonesia masih punya cadangan devisa di atas US\$ 21 miliar, cukup besar untuk menjaga stabilitas moneter.

Begitulah pemerintah Indonesia di bawah Soeharto kemudian mencabut band intervensi, dan membiarkan Rp terjun bebas di pasar uang yang penuh spekulasi. Maka tiba-tiba fundamental ekonomi yang dianggap kuat itu bobol dan dunia usaha pun terhempas. Seiring mengempisnya nilai Rp terhadap valuta asing (valas), terutama US\$, nilai utang pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta nasional menggelembung hebat. Perusahaan-perusahaan tak mampu membayar utang yang membengkak sampai 500% akibat mengempisnya nilai Rp sebesar itu. Ini pada gilirannya menyeret perbankan di tanah air ikut masuk jurang. Ya siapa yang bisa membayar utang yang tiba-tiba meningkat 5 kali lipat saat jatuh tempo? Artinya bila sebelum krisis 6 atau 7 tahun lalu mereka meminjam US\$ 200 juta atau Rp 400 miliar dengan kurs Rp 2.000/US\$, maka saat jatuh tempo mereka harus

membayarnya 5 kali lipat atau Rp 1 triliun. Bagaimana caranya? Dengan keuntungan 100% pun itu tak akan bisa dibayar, apalagi kalau cuma 20%. Di sisi lain harga bahan baku yang mesti diimpor juga meningkat 5 kali lipat, sedang harga tak mungkin bisa dinaikkan 5 kali lipat pula. Artinya perusahaan-perusahaan yang kekenyangan utang dolar dan penghasilannya dalam Rp, dapat dipastikan langsung megap-megap tak bisa bernapas.

### **1. Catatan-Catatan Menjelang Jatuhnya Orde Baru**

Para pakar dan pelaku ekonomi sebenarnya sejak awal telah menyadari bahwa krisis yang mengharu-biru dunia usaha Indonesia adalah krisis nilai tukar alias kurs. Buktinya tak sulit dicari. Apalagi bila diingat puluhan tahun ekonomi Indonesia, yang menerapkan sistem kurs mengambang terkendali, oke-oke saja. Bila sistem itu terus dijalankan, maka kurs Rp terhadap US\$ akan menjadi Rp 4.000/US\$ pada tahun 2018-2020. Artinya dengan depresiasi atau penyusutan nilai 5%/tahun, maka kurs yang pada 1997 bertengger di angka Rp 2.130/US\$ dalam waktu 20 tahun ke depan baru akan menjadi Rp 4000/US\$. Dalam perjalanan waktu itu tidak akan terjadi gejolak dan kejutan apa-apa, karena semuanya bisa diperhitungkan dan terkendali. Sebaliknya dengan mengambil jalan pintas mencabut band intervensi, demi menghemat devisa, dalam waktu setahun saja nilai Rp telah menyusut 500%, sehingga menjadi Rp 10.000/US\$ pada 1998. Penghematan macam apa yang didapat?

Selama tiga dekade sebelumnya Indonesia oke-oke saja. Padahal utangnya besar. Pembangunan berjalan lancar. Bahkan dipuji Bank Dunia, IMF dan para pakar. Berbagai lembaga pendanaan luar negeri, kata Fu'ad



Bawazier, berlomba-lomba menawarkan dan melemparkan dananya ke Indonesia. Mereka memuji-muji Indonesia sebagai negeri yang 'very good.' Fundamental ekonomi Indonesia dinilai kuat. Pokoknya semua 'happy.' Seandainya tidak ada masalah kurs, mungkin sekarang masih oke-oke aja. Orang masih mampu membayar utang dalam dan luar negeri. Fu'ad menilai dalam urusan nilai tukar Rp, pemerintah kurang teguh pendirian dan terlalu banyak mendengar suara-suara luar.

Fu'ad mengakui masih banyak yang tidak benar dalam ekonomi Indonesia. Ada sistem ekonomi liberal berdampingan dengan monopoli, tata niaga, dan sistem perbankan dengan bank sentralnya yang amburadul. Perbankan sangat dimanjakan lewat program penjaminan, sehingga pengelolaannya menjadi tidak 'prudent.' Meski demikian, dia yakin, semuanya masih bisa dibenahi, asal tidak dalam keadaan panik. Namun kurs sebagai sumber malapetaka mesti dikendalikan dulu. Kalau tidak, makin sulit membenahi struktur ekonomi yang kacau, inefisien dan distortif. Untuk mengatasi masalah kurs ini, Fu'ad menyarankan agar pemerintah menerapkan currency board system (CBS), satu kubu dengan Peter F. Gontha yang memboyong Steve Hanky.

Sebaliknya kubu IMF lebih senang membiarkan nilai tukar Rp mengambang seperti itu. Mereka menganggap nanti juga beres sendiri. Fu'ad sendiri berpendapat resep IMF mungkin akan bermanfaat, tapi bukan pada saat utang pemerintah dan swasta sedang jatuh tempo. Jika masalah nilai tukar tidak diselesaikan segera, kata orang Banyumas itu, program-program jangka panjang yang dikemas IMF dalam satu bundel dengan pinjaman akan sia-sia. Bahkan pak Harto sendiri, kata dia, akhirnya

menyadari bahayanya pelepasan band intervensi itu. Dari situlah muncul ide CBS. Fu'ad sendiri mengaku tak menolak resep generik IMF yang dikenal dengan Letter of Intent (LoI), asal masalah kurs diselesaikan dulu. Saat masuk Kabinet Pembangunan VII, Fu'ad memang berupaya menggiring US\$ ke tingkat yang wajar terhadap Rp. Dia mematok Rp 6.000/US\$ sebagai prasyarat perundingan dengan IMF, tapi Soeharto keburu lengser diterjang reformasi dan Fu'ad tak ikut 'berlari' pada estafet berikutnya di bawah Habibie

Masalah kurs Rp ini sebenarnya memang tak bisa dianggap enteng. Agar lebih mudah dipahami, marilah kita ambil contoh PLN. Di samping karena berbagai salah urus, kebocoran, in efisiensi dan proyek listrik swasta yang mahal, perusahaan listrik negara ini sangat dirugikan oleh kurs. Menurut Dirut PLN Eddie Widiono, dalam sebuah wawancara dengan penulis untuk majalah SWA, pada tahun 1996, PLN berhasil menuai laba Rp 1,2 triliun. Kurs waktu itu cuma Rp 2.407/US\$ (kurs ini sebenarnya ketinggian, tahun itu cuma sekitar Rp 2.100-2.300/US\$). Masih menurut Eddie pada 1997 ketika nilai rupiah melorot menjadi rata-rata Rp 4.673/US\$, PLN membukukan rugi Rp 0,6 triliun. Tahun 1998 kerugian PLN meningkat menjadi Rp 9,2 triliun, kurs Rp 8.065/US\$. Tahun 1999 kerugian membengkak lagi menjadi Rp 11,4 triliun, kurs Rp 8.136/US\$. Tahun 2000 kerugian PLN meningkat drastis menjadi Rp 23,4 triliun, seiring mengempisnya kurs menjadi Rp 9.643/US\$.

Melihat angka-angka kerugian di atas, tentu masuk akal bila banyak pakar ingin menerapkan kurs tetap lewat CBS atau kembali ke sistem 'managed floating rate.' Dengan demikian rakyat tidak perlu ikut menanggung

kerugian kurs tersebut dengan membayar listrik lebih mahal, sesuai saran IMF. Kwik Kian Gie sendiri, dalam kesempatan wawancara dengan penulis majalah SWA, menganggap kurs yang wajar adalah sekitar Rp 1.800/US\$. Patokannya sederhana saja: harga paket McDonald di AS dan di Indonesia disandingkan, lalu dikurs, maka didapatlah angka itu. Namun baik pendukung CBS maupun managed floating rate semacam Kwik, tak didengar Soeharto. Sang penguasa orba sudah lebih dulu menandatangani kesepakatan dengan IMF. Tanpa disadari butir-butir kesepakatan yang mendetil itu telah mencabut kedaulatan Negara. Artinya pemerintah dan pemimpin negeri ini kehilangan kemandiriannya untuk mencari solusi kreatif atas krisis yang menimpa negaranya. Kita akan kembali lagi ke butir-butir kesepakatan tersebut nanti pada sub bab tentang **GBHN Super dari Bawah Meja IMF**.

Keputusan pemerintah RI menerima solusi buatan IMF untuk mengatasi krisis itu berbeda secara diametral dari pemerintah Malaysia. Perdana Menteri Malaysia waktu itu Mahathir Muhammad memilih untuk menolak IMF. Dia menetapkan fixed rate buat RM (Ringgit Malaysia). Pokoknya US\$ 1 dipatoknya sama dengan RM 3,4. Bukan cuma itu. Guna mencegah pelarian modal dan agar RM tidak menjadi bulan-bulanan para spekulan di pasar uang di London sana, Dr. M, begitu dia disapa, memberi ultimatum: ringgit yang ada di luar Malaysia, bila tak masuk kembali dalam waktu satu bulan setelah ditetapkannya kurs tetap, maka dianggap tak laku!

Tanpa IMF, pada 5 Desember 1997 pemerintah diraja Malaysia menggelindingkan paket pengencangan ikat pinggang yang mengutamakan kemandirian. Paket itu

meliputi instrumen yang sangat luas, makro maupun mikro. Anggaran belanja negara dipangkas 18% dan proyek-proyek raksasa yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan rakyat banyak ditangguhkan. Target pertumbuhan diturunkan dari 7% menjadi 4-5% saja. Lalu defisit neraca berjalan diciutkan menjadi 3% dari PDB (sebelumnya 4%) dan pertumbuhan kredit dibatasi maksimal 15% per tahun dari sebelumnya 30%. Di sisi lain pembiayaan sektor atau kegiatan nonproduktif dan spekulatif dihentikan sama sekali. Pada saat sama, untuk memulihkan kepercayaan di pasar modal, Pemerintah menutup izin pencatatan (*listing*) saham baru, *rights issue*, serta langkah-langkah restrukturisasi perusahaan seperti saling bertukar saham (*share swap*). Ini adalah suatu keputusan yang berani dan sangat fokus untuk mengatasi krisis yang mulai mendekat.

Menurut Sritua Arief dalam artikelnya di Kompas (8 Januari 1998) berbeda dari negara lain yang memilih menelan pil pahit IMF, Malaysia tidak mengurangi atau menghapuskan subsidi. Tidak pula menaikkan harga-harga barang dan jasa (*public utilities*). Kontraksi fiskal itu sepenuhnya ditujukan untuk mengurangi konsumsi barang-barang mewah impor. Itu bisa dicapai hanya dengan menghapus proyek-proyek mewah. Malaysia lebih mengutamakan investasi bagi pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Penurunan target pertumbuhan bukanlah akibat peng-hematan, tapi penegasan bahwa jika strategi pro rakyat dijalankan dengan benar, pertumbuhan pasti diraih. Ini sesuai dengan pemikiran kaum strukturalis bahwa redistribusi dilakukan bersama pertumbuhan, bukan redistribusi dari pertumbuhan.

Pemerintah diraja Malaysia, kata Sritua, berkeputus-

an memperbesar dukungan bagi industri-industri kecil dan menengah, terutama yang dimiliki orang Malaysia (Melayu), melalui semacam panitia khusus yang memproses permohonan kredit. Kebijakan ini didukung larangan atau pembatasan ketat kredit untuk proyek-proyek perumahan mewah dan konsumsi mewah. Jadi pemerintah Malaysia menyadari bahwa yang menyebabkan *over-heated economy* bukan kredit secara keseluruhan, tetapi kredit kepada sektor-sektor konsumsi mewah. Hasilnya?

Hasil dari paket kebijakan kreatif itu sangat luar biasa, sesuatu yang tak pernah dipikirkan oleh IMF dan para pendukungnya sendiri. Wonder boven wonder alias aneh bin ajaib: dengan menolak resep IMF, krisis tak jadi mampir di Malaysia sampai sekarang. Bahkan negeri jiran itu mampu berekspansi ke luar negerinya untuk berinvestasi dan membeli aset-aset Indonesia yang dijual murah oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Sebaliknya di Indonesia akibat menjadi pak turut IMF, krisis moneter itu tanpa dapat dibendung terus berkembang menjadi krisis ekonomi berkepanjangan. Keadaan menjadi lebih parah lagi, terutama setelah pemerintah menerapkan kebijakan uang ketat (*tight money policy*) dengan menaikkan suku bunga setinggi-tingginya, untuk mencegah pelarian modal. Memang modal tak jadi lari, tapi juga tak bisa dimanfaatkan untuk memutar roda ekonomi. Sebagian besar mengendap di bank atau Sertifikat Bank Indonesia dan menjadi beban baru. Akibatnya uang beredar menjadi sedikit. Bank mengalami 'negative spread', tak berani menyalurkan kredit ke dunia usaha. Sektor riil mati suri. Banyak perusahaan tak mampu lagi membiayai operasional dan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Keadaan ini secara simultan menciptakan kesengsaraan di kalangan rakyat banyak, di samping frustrasi dan putus asa. Akibatnya ratusan ribu orang kehilangan pekerjaan. Sementara angkatan kerja baru, bahkan yang baru lulus dari Perguruan Tinggi, tak bisa diserap. Indonesia tiba-tiba kelebihan sekitar 20 juta penganggur baru.



**BJ Habibie**

(wapres) BJ Habibie yang sempat berkunjung ke Malaysia setelah peristiwa tersebut, sayangnya tak sempat menanyakan kepada pemerintah Malaysia: mengapa kaki tangan kerajaan sampai menembak warga negara Indonesia? Mereka bukan kriminal! Mereka cuma mencari kerja agar perut tak keroncongan, sebab negeri sendiri tak mampu memberi pekerjaan dan penghasilan yang layak.

Dalam hal membela warga negaranya, Indonesia sebenarnya bisa meniru Filipina, yang membela Contemplasion, tenaga kerja wanita negeri itu yang diperlakukan tidak adil di Singapura. Fidel Ramos, sang presiden waktu itu, bahkan rela kehilangan berbagai kontrak bisnis dengan Singapura demi membela harga diri rakyatnya. Namun Pemerintah Indonesia mungkin memang sedang banyak urusan yang lebih besar, misalnya mencari dana

pembangunan. Maklum roda ekonomi mesti terus berputar. Salah-salah gara-gara membela TKI, modal dari negeri jiran itu tak jadi masuk. Apalagi di tengah paceklik dana pembangunan, harga-harga membubung tinggi pula ikut dolar, terutama sembilan bahan pokok (sembako). Alam kemudian menyempurnakan penderitaan itu dengan El Nino, bencana kekeringan plus berbagai hama tanaman yang menggagalkan panen produk-produk pertanian.

Akibat paling buruk dari akumulasi bencana tersebut, kata pengamat politik UI Arbi Sanit, Orde Baru (orba) kehilangan legitimasi ekonominya. Orba yang selama 30 tahun menggemborkan pertumbuhan rata-rata 7% sebagai prestasi, dan oleh karena itu mendapat 'kepercayaan' untuk mengurus kepentingan rakyat, limbung hanya dalam 6 bulan. Pendapatan per kapita Indonesia yang telah mencapai US\$ 1.000, akibat mengempisnya nilai Rp terhadap US\$ yang mencapai 500%, kembali ke tahun-tahun sebelum 1967 yaitu sekitar US\$ 214. Angka ini masih bisa menurun apabila nilai Rp terus menyusut terhadap US\$, kecuali kita mau menghitungnya berdasarkan sistem onocoroko yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Menjelang Millenium ketiga, setelah melewati 6 kali pelita (pembangunan lima tahun), Indonesia 'urung' tinggal landas. Sebagai gantinya, pemerintah Soeharto kembali menggiring Indonesia ke titik nol dalam pelukan IMF.

Rakyat, yang selama ini diam, memang kehilangan kesabarannya. Mereka ikut-ikutan berunjuk rasa di seluruh tanah air. Seluruh lapisan masyarakat, terutama kelas menengah-bawah seperti terluka dan meradang di se antero negeri. Maklum banyak orang tua kehilangan kemampuannya membiayai pendidikan anak-anaknya.

Kemarahan rakyat ini lantas membuat Dunia kampus menggeliat dari tidur panjangnya. Geliat inilah yang kemudian menjadi cikal-bakal gerakan reformasi, yang menuntut perubahan di segala bidang, termasuk pergantian pucuk pimpinan negara. Dunia kampus kembali mendapatkan peranan sosial politiknya.

Begitulah masyarakat, mahasiswa, para alumni perguruan tinggi, organisasi massa (ormas), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tidak lagi hanya menuntut diturunkannya harga-harga, tapi secara bersama-sama menuntut reformasi politik, sesuatu yang selama ini paling ditakuti rezim orde baru (orba). Soeharto bersama jajarannya dianggap biang keladi yang mengakibatkan lemahnya fundamental ekonomi Indonesia. Rezim ini telah membengkalakan sektor informal, pertanian, peternakan, dan perikanan rakyat yang mengakibatkan Ibu Pertiwi tak mampu mencukupi pangan penduduknya. Di sisi lain orba lewat kebijakan dan keputusan politik telah memberi segala peluang dan fasilitas kepada segelintir pengusaha untuk menjadi gurita bisnis yang memasung usaha pribumi.

Kaum reformis menilai setidaknya ada 79 Keputusan Presiden (Keppres), yang sangat merugikan rakyat dan menguntungkan bisnis kroninya, telah dikeluarkan Soeharto selama 32 tahun masa kekuasaannya. Di antara 79 keppres itu ada 2 yang khusus dihadiahkan buat kelancaran proyek properti mewah Grup Salim di Teluk Naga. Mega Proyek tersebut rencananya dibangun di atas lahan 80 ha, separuhnya didapat dari reklamasi pantai. Sedang yang 40 ha merupakan wilayah hunian penduduk yang terdiri dari 13 desa: 7 desa nelayan dan 6 desa pertanian beririgasi teknis. Selama setengah tahun kedua

tahun 1996 penduduk Teluk Naga menolak proyek tersebut, juga Gubernur Jabar waktu itu Nuriana. Yang paling krusial adalah masalah ganti rugi, karena tanah mereka cuma dipatok seharga Rp 7 ribu-14 ribu/m<sup>2</sup>, sesuai nilai jual obyek pajak setempat (NJOP). Tentu saja itu tak salah, tapi pengamat properti Panangian Simanungkalit menganggap cara penghitungan nilai tanah seperti itu sudah kuno dan tak bisa digeneralisir. "Mestinya yang dihitung adalah nilai masa depan tanah itu (future value). Artinya harus dilihat dulu lahan itu nantinya untuk apa? Bila peruntukannya untuk perumahan mewah dan hotel bintang lima, maka nilainya tentu jauh lebih tinggi dibanding bila dia diperuntukkan buat membangun sekolah, perpustakaan dan rumah sangat sederhana (RSS)," katanya ketika ditemui penulis untuk majalah SWA, ketika protes penduduk Teluk Naga sedang marak.

Menurut Panangian bila yang mau dibangun memang service apartemen mewah dan hotel bintang lima seperti direncanakan, maka nilai tanah itu mestinya bisa mencapai US\$ 1.500/m<sup>2</sup> kali 30 (bila yang dibangun 30 lantai). Bila di situ juga akan dibangun rumah sederhana (RS) dan RSS, sesuai formula 1:3:6 (satu rumah mewah, 3 RS dan 6 RSS), plus sekolah, perpustakaan dan berbagai fasilitas umum, maka nilainya nanti dirata-ratakan. Cara pandang pengamat property itu sangat progresif dan pemerintah nampaknya sudah harus mulai menerapkan cara penilaian seperti itu demi melindungi kepentingan rakyat banyak. Taruhlah setelah dikembangkan Salim tanah itu akhirnya bernilai US\$ 1.500/m<sup>2</sup>. Nilai itulah yang mesti dibagi tiga, yaitu si pemilik semula mendapat sepertiga, karena telah merelakan tanahnya

plus benefit ekonomi yang bisa diperolehnya dari tanah itu seumur hidupnya untuk dikembangkan oleh Salim atau siapa saja. Si pengusaha mendapatkan sepertiga bagian, karena telah bekerja keras mengelola dan menaikkan nilai tanah itu. Sedang sepertiga lagi menjadi hak pemerintah, karena telah menjaga segala sesuatunya sehingga bisa dikembangkan dan aman. Artinya dengan carfa baru ini pemerintah bisa mendapatkan US\$ 500/m<sup>2</sup> tanah di Teluk Naga itu. Ini jauh lebih besar dibanding 20-30% dari NJOP yang cuma Rp 7-14 ribu/m<sup>2</sup> yang pembebasannya memerlukan kekerasan dan menimbulkan kesengsaraan.

Akar-akar masalah semacam itulah yang dituntut gerakan reformasi untuk dicabut. Setidaknya agar rakyat negeri ini kembali mendapatkan hak-haknya untuk berkembang dan makmur dari sisi ekonomi. Kaum reformis yakin selama akar masalah itu tidak dicabut, selama reformasi politik dan ekonomi tidak dilakukan, maka kesalahan dan penderitaan yang sama akan terulang. "Sesungguhnya desakan reformasi politik yang diteriakkan mahasiswa atas nama masyarakat bukan sekadar mengembalikan pembangunan kepada standar kehidupan manusia yang wajar. Lebih dari itu. Reformasi politik dan ekonomi adalah untuk menghindari pengulangan kekeliruan yang sama. Orba telah membengkalakan kemampuan ekonomi rakyatnya selama 30 tahun lebih dengan akhir kegagalan yang menyakitkan," jelas Arbi serius ketika ditanya apa sebenarnya yang dituju oleh gerakan reformasi.

Namun tuntutan dan keinginan rakyat banyak itu tak digubris pula oleh wakil-wakil rakyat di DPR/MPR hasil pemilihan umum 1997, yang memakan banyak korban. Bukti paling nyata adalah dipilihnya kembali Soeharto

sebagai presiden untuk ketujuh kalinya secara aklamasi pada bulan Maret 1998. Para wakil ini seakan tak mampu mendengar dan melihat kenyataan, bahwa rakyat sudah bosan dengan gaya kepemimpinan orba yang gagal memberikan kemakmuran dan keamanan bagi rakyatnya. Sidang yang sama juga mengangkat BJ Habibie sebagai Wapres, satu posisi yang menjadi semakin strategis seiring meningkatnya usia Soeharto. Rasanya janggal bila MPR tak tahu bahwa rakyat secara umum tak menghendaki Soeharto lagi, mengingat sejak pertengahan dasawarsa '90-an tuntutan itu sudah sangat transparan. Kriteria calon presiden yang dilontarkan Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia (ICMI) Dr. Amien Rais secara gamblang menunjukkan penolakan itu. Jauh sebelum itu Sri Bintang Pamungkas, politikus PPP, terang-terangan menolak Soeharto.

Penolakan terhadap orba semakin kuat lagi setelah pembentukan Kabinet Pembangunan VII bulan Maret 1998. Hanya sehari setelah Presiden dan Wapres disumpah, lebih 10 ribu mahasiswa berkumpul di kampus UI Depok. Di hadapan mereka Amien Rais, pakar sosiologi UGM dan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, menegaskan kembali ultimatumnya. Pemimpin reformasi itu menyatakan akan mengerahkan *people power* yang damai, jika dalam tempo 6 bulan kabinet yang baru terbentuk tak mampu mengatasi krisis ekonomi dan moneter. Sebelumnya pada ulang tahun Hari Republik di Hotel Regent Jakarta, Amien juga telah menyampaikan hal senada. Ketika itu antara lain Amien meminta MPR segera mencari alternatif lain, jika dalam waktu 6 bulan keadaan negara menjadi semakin parah.

Namun rakyat yang lapar dan putus asa tak punya

cukup kesabaran selama itu. Belum dua bulan Kabinet Pembangunan VII berjalan, masyarakat sudah merasa semakin tidak tahan. Titik terang dianggap belum terlihat, meskipun para menteri telah bekerja keras siang-malam. Sebagai bukti orang menunjuk keengganan IMF mencairkan pinjamannya. Dunia luar semakin tidak percaya kepada pemerintah, dan negeri tercinta dianggap beresiko tinggi sebagai tempat berinvestasi. Sementara (Letter of Credit (LC) pengusaha Indonesia tidak diterima di manca-negara. Tanpa jaminan negara lain ekspor-impor menjadi sulit dilakukan. Sementara US\$ semakin liar saja dan bertengger di atas Rp 10 ribu/US\$. Nilai Rp terus mengempis. Pada 22 Januari 1998 saja kurs sudah melampaui Rp 13 ribu/US\$.

## **2. Expatriat Memasuki Masa Suram**

Keadaan yang menyesakkan dada itu tidak hanya menimpa pengusaha, profesional dan rakyat Indonesia secara keseluruhan, tapi juga menerpa para pekerja dan profesional asing (ekspatriat). Selama puluhan tahun mereka memang menikmati kemewahan di negeri ini dengan gaji US\$ puluhan ribu/bulan, berkali-kali lipat di atas pribumi dengan kemampuan setara. Itu pun masih ditambah berbagai fasilitas mewah, termasuk kendaraan dan perumahan. Kini saat dunia usaha menggigit kesulitan likuiditas, mereka rela menerima bayaran di bawah standar. Banyak perusahaan yang mempekerjakan ekspatriat, menerapkan formula baru dalam sistem penggajian. Alasannya sederhana saja: menekan biaya operasional agar perusahaan tak bangkrut. Tenaga kerja asing yang mahal itu tentu boleh memilih berhenti dari pekerjaannya atau sekalian kembali ke negerinya bila tak setuju dengan



sistem penggajian baru.

Berdasarkan cara masuknya ke bursa tenaga kerja di Indonesia, sebenarnya mereka terbagi dalam 3 golongan. Atau kalau mau sedikit ilmiah, setidaknya bisa disebut ada 3 alasan yang mendorong dunia bisnis di tanah air mendatangkan bule dan tenaga kerja asing (TKA) lain. Pertama, kebutuhan perusahaan untuk memperluas pasar ke manca negara, sekaligus untuk mendekati sumber-sumber pembiayaan internasional. Ini adalah pertimbangan paling rasional dan bagus, sebab si asing dijadikan tenaga handal untuk kepen-tingan perusahaan. Tentu di sini mereka harus bisa menunjukkan prestasi dan kepiawaiannya, bukan sekadar bekerja dengan bayaran tinggi. Kedua, cuma sekadar latah atau menganggap kehadiran bule di perusahaan sebagai lambang bonafiditas. Di perusahaan semacam ini si bule jelas bisa jadi raja tanpa harus menunjukkan prestasi berarti yang menguntungkan perusahaan.

Ketiga, karena tekanan. Ini biasanya terkait dengan pemberian bantuan atau pinjaman dari lembaga-lembaga donor (kreditor) internasional, seperti IMF, Bank Dunia, Consultative Group on Indonesia (CGI), dan lain-lain. Yang terakhir ini boleh dibilang merupakan kelanjutan dari penjajahan, di mana Indonesia dipaksa untuk menghargai ekspatriat lebih tinggi dari pribumi. Tidak jarang lembaga-lembaga internasional itu meminta pemerintah untuk menggunakan produk atau jasa perusahaan-perusahaan asing tertentu. Ini jelas sulit ditolak pemerintah, karena berkaitan dengan pinjaman yang biasa diperhalus menjadi bantuan.

Dengan dasar pemikiran seperti itu, dapat dimaklumi bila banyak perusahaan doyan mempekerjakan expatriat.

Padahal gaji dan fasilitas yang harus diberikan perusahaan kepada mereka bisa 4-5 kali lebih besar daripada tenaga lokal dengan keahlian dan pengalaman setara. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan tenaga lokal. Untungnya perasaan cemburu itu tidak sampai berubah menjadi aksi massa, seperti yang terjadi di Jerman menjelang jebolnya Tembok Berlin. Itu sebabnya Indonesia tetap menjadi surga buat TKA yang amat 'dibutuhkan' itu. Apalagi perusahaan juga cukup punya dana untuk membayar mereka. Maklum ekonomi Indonesia sepuluh tahun terakhir tumbuh di atas 7%/tahun, sumber-sumber dana asing dengan senang hati dan royal memberi utangan. Tak jarang si mitra asing sengaja mendorong agar perusahaan mempekerjakan expatriat atas beberapa pertimbangan.

Cuma ketika krisis datang menerjang dan ratusan perusahaan Indonesia tersungkur, keadaan berubah 180 derajat. Manajemen perusahaan terpaksa mengkaji ulang kebutuhan mereka akan tenaga asing. Ini dapat dimaklumi sebab kehadiran tenaga asing yang banyak itu, ternyata tak mampu menyelamatkan perusahaan dari krisis. Mau tak mau kini kehadiran tenaga asing mesti dikaitkan langsung dengan kebutuhan real perusahaan dan biaya. Bahkan kepada tenaga expatriat yang benar-benar dibutuhkan pun terpaksa diadakan negosiasi ulang soal bayaran. Maklum bila mereka harus dibayar dengan patokan kurs yang sedang berlaku, perusahaan bisa mati.

PT. Aspac Inti Corpora (Aspac) adalah satu di antara sekian banyak perusahaan yang melakukan terobosan kreatif seperti itu. "Meskipun kami tidak terlalu terpukul oleh meroketnya dolar dan harga-harga, toh kami harus melakukan penghematan secara interen, antara lain



dengan mengurangi jumlah expatriat (expat) dari 12 menjadi 7 orang," tutur Presdir Aspac Benny Sutrisno terus terang, ketika ditemui penulis waktu itu. "Kemudian expat yang tinggal, separuh gajinya kami bayar dolar dengan kurs Rp 4.000,00/US\$," sambung orang nomor satu di Aspac itu.

Pada masa normal apa yang dilakukan Aspac tentu akan mengundang protes di dalam dan di luar negeri. Namun kini keadaannya lain. Dalam situasi seperti itu jangankan memperoleh laba, menjalankan roda usaha pun menjadi sulit. Aspac bukanlah satu-satunya perusahaan, yang berani melakukan terobosan kreatif seperti itu. Hal yang sama juga dilakukan oleh Grup Sinar Mas, Salim, Bakrie, Lippo, PSP, dan lain-lain. "Pokoknya kami melakukan sliming down (perampingan) dan penghematan di berbagai tempat," kata Ignasius Jonan, Dirut PT. Swadana Perkasa, anak perusahaan PSP yang bergerak di bidang investasi di luar negeri. "Expat kita bayar dengan kurs yang ditentukan perusahaan (bervariasi Rp 3500-Rp 4000/US\$). Kalau tidak mau, ya mereka boleh keluar," tambah Jonan yang juga komisaris di beberapa anak perusahaan PSP. Dia enggan memerinci berapa jumlah expatnya.

Lebih jauh lagi, menurut Corporate Secretary Grup PSP Rudy Soraya, sebelum krisis di PSP ada sekitar 10 Expat. Kini tinggal 3 orang. "Kontribusi mereka terhadap perusahaan cukup besar, terutama pada masa-masa awal beroperasi, seperti melembagakan golf course kita, dan lain-lain. Di posisi general manager di beberapa anak perusahaan kita tempatkan expat, karena mereka memiliki keahlian khusus yang tidak dimiliki manajer lokal," jelasnya panjang tanpa mengurangi kehati-hatiannya. Kinerja

perusahaan, kata Rudy, tidak menurun setelah ditinggalkan expat. Ini dimungkinkan karena sejak awal para expat tersebut telah didampingi tenaga lokal. Mereka inilah yang kini mengisi posisi expat yang pergi.

Berbeda dari Aspac dan PSP yang di samping menyalurkan kurs gaji, juga mengurangi expatnya, Grup Bakrie (GB) nampaknya tidak mengurangi jumlah expat. GB cuma menyalurkan kurs, bahkan lebih dulu sebelum perusahaan lain melakukannya. Sebuah sumber di GB mengatakan kini di GB ada sekitar 20 expat. Umumnya mereka berasal dari India dan Filipina, dan berada di posisi finance. Itu diperlukan, karena posisi itu akan banyak berhubungan dengan pihak asing. Mereka dianggap lebih mampu dari segi bahasa dan melobi. Toh dalam urusan gaji, sejak Oktober 1997 GB terpaksa menyalurkannya dengan patokan kurs sendiri, yaitu Rp 3.500/US\$. Sebenarnya pemerintah boleh juga meniru siasat para pengusaha mengatasi krisis nilai tukar ini.

Meskipun tidak bermaksud membenarkan, banyak pengamat menilai pengurangan expat di perusahaan atau pematokan kurs secara sepihak sebagai tindakan yang urgent (mendesak). Bahkan tindakan tersebut mendapat dukungan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Menteri Tenaga Kerja waktu itu Abdul Latief. Menurut Menaker Abdul Latief pengurangan penggunaan tenaga kerja asing merupakan seleksi pasar. Tidak ada instruksi Menaker untuk itu. Namun sampai saat ini dia belum memiliki data pasti berapa jumlah TKA yang telah di PHK. Dia berpendapat, terlepas dari krisis ekonomi saat ini, pengurangan TKA adalah momentum tepat bagi tenaga kerja kita untuk menggantikan mereka.

Pendapat senada juga dilontarkan Wakil Ketua Komi-

si V DPR, yang membidangi ketenagakerjaan Muhsin Bafadal. "TKA yang keahliannya sudah bisa digantikan oleh pekerja Indonesia supaya dipulangkan, karena jika dipertahankan akan memboroskan devisa," ujarnya mantap ketika ditemui penulis waktu itu di gedung DPR/MPR. Muhsin mencontohkan TKA yang segera dapat dipulangkan dan diganti dengan tenaga kerja lokal, antara lain manajer hotel, pekerja restoran, dan sejenisnya. Menurut pengamat ekonomi dari INDEF Didik J. Rachbini menggaji TKA dengan kurs yang ditentukan perusahaan sendiri, dalam keadaan normal, tidak bisa dibenarkan. Namun pada saat krisis, rasionalisasi tenaga asing tidak hanya perlu dilakukan dengan pemotongan, tapi bila mungkin mengganti dengan tenaga lokal. "Di negeri mereka kita juga tidak boleh bekerja, karena dianggap mengurangi peluang orang lokal," kata Didik bersungguh-sungguh.

Depnaker mencatat pada 1995 telah ada sekitar 57 ribu TKA di Indonesia. Devisa yang mereka sedot sekitar 2,4 miliar US\$. Akhir 1997 jumlah mereka sudah mencapai sekitar 70 ribu. Mereka umumnya bekerja di sektor perbankan, akuntansi, sekuritas, komunikasi, telekomunikasi, pariwisata-khususnya perhotelan, dan lain-lain. Devisa yang mereka sedot diperkirakan sekitar 3 miliar US\$/tahun, suatu jumlah yang tidak kecil. Apalagi jika dibandingkan dengan perolehan devisa TKI kita di mancanegara yang hanya sekitar 5-6 miliar US\$/tahun. Padahal jumlah TKI di luar negeri sudah di atas 2 juta.

Didik menilai kehadiran TKA atau Expat di Indonesia sangat paradoks. Sebagian memang kontributif terhadap pembangunan. Sebagian lagi tidak terlalu perlu. Yang pertama jelas kita butuhkan, misalnya dalam industri mesin, pesawat terbang, ahli las dalam air, ahli besi,

farmasi, dan sebagainya. Yang kedua sebenarnya Indonesia tidak butuh-butuh amat, tetapi menjadi seolah dibutuhkan, karena satu paket dengan pinjaman luar negeri. "Banyak bidang yang sebenarnya kita mampu dan memiliki keahlian untuk mengerjakannya, juga dimasuki expatriat, contohnya dalam pembangunan jalan, properti, pabrik, bahkan akuntansi dan manajemen," jelas Didik bersungguh-sungguh.

TKA itu, kata Didik, datang seiring dengan proyek-proyek dari luar. Misalnya lembaga dana internasional memberikan utang, maka expert (tenaga ahli) mereka datang sebagai bagian inheren dengan aliran modal tersebut. Jadi sebagian pinjaman balik lagi ke sana untuk membayar expert mereka. Paket IMF biasanya juga diikatkan dengan expert yang mereka tunjuk, misalnya untuk audit perbankan. Didik berpendapat mereka seharusnya kita tolak. Bila itu tidak mungkin, maka setidaknya jumlah dan waktu mereka dibatasi. Begitu proyek berjalan, mereka harus pulang.

Tak dapat dipungkiri pandangan Didik, Muchsin, Abdul Latief dan para pelaku bisnis soal TKA, memang mewakili getaran jiwa tenaga kerja terdidik Indonesia yang selama ini tak didengar suaranya. Krisis dahsyat ini mestinya telah memberi pencerahan kepada pemerintah dan para pengusaha negeri ini untuk meng-hitung dulu dengan cermat kebutuhan dan kekayaan yang dimiliki buat membayar 'high level man power.' Toh keberadaan mereka selama ini terbukti tak bisa menghindarkan Indonesia dari krisis. Jadi nanti hanya yang diperlukan saja yang layak didatangkan. Itu pun masih ada catatannya, yaitu regulasinya harus dibikin sama. Artinya expert kita pada level yang sama harus dibayar setara dengan expat.

Selama ini karena kurang selektif dan kritis, banyak biaya dialokasikan pemerintah untuk hal-hal yang tidak perlu, misalnya konsultasi kepada kreditor. Krisis ekonomi, yang mendorong perusahaan mengurangi jumlah expat atau setidaknya mengubah struktur gaji, tentu membuat mereka terpukul.

Pertanyaannya kemudian: bagaimana para expat sendiri menghadapi perkembangan tersebut? Untuk pertanyaan mendasar ini tanggapan mereka agaknya cukup bervariasi. Sebagian bisa memaklumi, dan bertahan di sini. Sebagian lagi memilih hengkang. Sementara sebagian lainnya dengan berat hati terpaksa meninggalkan Indonesia, karena dipecat atau karena perusahaan tempatnya bekerja gulung tikar.

Kelompok pertama itu boleh dibilang diwakili Miriam Tulevsky dan kawan-kawannya. "Saya dapat mengerti kesulitan ekonomi pemerintah Indonesia dan perusahaan-perusahaan di sini. Demikian juga kawan-kawan saya sesama expat. Kita dapat mengerti langkah-langkah penghematan harus dilakukan, termasuk menentukan kurs dolar di luar harga pasar. Sebab dolar sekarang terlalu mahal. Nanti gaji kita bisa lebih besar daripada gaji direktur. Itu kan tidak lucu," tutur Miriam, seorang Expatriat asal Australia ketika dimintai komentarnya oleh penulis buat SWA, 5 Maret 1998. Mereka ini pada dasarnya tidak mau dilihat sebagai pihak yang menanggung keuntungan dari derita Indonesia.

Kelompok ini, kata Miriam, kommit dan mau tetap di sini sampai 2-3 tahun mendatang. Mereka juga tidak keberatan gajinya berkurang karena kurs di luar harga pasar, asal memang ditawarkan begitu. Masih menurut wanita bertubuh sintal itu, sebaliknya kelompok kedua

keberatan. Kebutuhannya banyak dalam dolar, mau kirim ke negaranya, atau menabung dalam dolar. Mereka memilih kembali ke negaranya. Tapi ada pula yang langsung dipecat karena perusahaannya terpukul dolar sangat serius. Yang itu tidak punya pilihan, mereka pulang. Miriam menolak menyebut berapa gaji yang dia terima. "Ini confidential. Anda bisa tanya Price Waterhouse saja," katanya menghindar sambil tersenyum. Dia sendiri telah berencana kembali ke negerinya sejak setahun lalu, sebelum krisis. Alasannya sangat pribadi: dia sudah tujuh tahun di Indonesia dan ingin kembali. Di samping itu perusahaan tempatnya bekerja juga sudah tutup.

Menurut Price Waterhouse Coopers untuk mempekerjakan seorang expatriat senior, sebuah perusahaan harus mengalokasikan US\$ 150-250 ribu setiap tahun. Dari konvensasi itu, 40-60%nya adalah gaji kontan. Sisanya berupa tempat tinggal, pembayaran pajak, asuransi kesehatan, dan biaya liburan pulang kampung. Ketika kurs US\$ masih Rp 2.430 atau Rp 2.500, jumlah itu mungkin tidak terlalu memberatkan. Bayangkan berapa yang mesti dibayarkan perusahaan ketika US\$ 1 menjadi Rp 8000 atau 10.000? Padahal pada masa krisis seperti ini laba perusahaan tidak bertambah, bahkan mungkin rugi.

### **3. Antara Perut Perusahaan dan Perut Rakyat**

Pemerintah tentu tak ingin mencampuri urusan internal perusahaan. Apalagi yang berhubungan dengan gaji ekspatnya. Itu dapat dimaklumi, karena krisis sudah telanjur menjalar kemana-mana dan bikin pusing kepala. Sebab di lapangan yang terjadi bukan hanya mengempisnya nilai Rp terhadap valas, tapi juga daya beli rakyat. Akibatnya produsen dan pedagang tak bisa menaikkan

harga. Keadaan ini pada gilirannya membuat mereka lebih suka membidik pasar luar negeri. Indikatornya tak sulit dicari. Lihat saja misalnya beberapa produk tertentu seperti Crude Palm Oil (CPO) yang termasuk kategori sembako. CPO alias minyak mentah sawit, yang menjadi bahan baku utama minyak goreng penduduk, ini kerap raib dari pasar.

Harga CPO dunia memang lagi bagus-bagusnya, dan Indonesia sudah pula surplus. Jadi kalau saja pengusaha cuma mengeksport kelebihan produknya, tentu tak akan terjadi masalah. Apalagi pemerintah memang membuka peluang itu agar pengusaha bisa menyedot US\$ dari mancanegara. Untuk itu pajak ekspor produk CPO, yang telah berlaku sejak 1994, diturunkan Menteri Keuangan (Menkeu) saat itu Marie Muhammad pada 14 Juli 1997. Cuma maksud baik itu kemudian berubah menjadi senjata makan tuan.

Keputusan pemerintah menurunkan pajak ekspor CPO tersebut dengan cepat menjadi bumerang, sesuatu yang di atas kertas boleh dibilang mustahil. Betapa tidak! Menurut Kabulog waktu itu Beddu Amang, produksi CPO sampai akhir Desember 1997 sekitar 5,6 juta ton. Kebutuhan dalam negeri hanya sekitar 2,7 juta ton. Artinya kebutuhan dalam negeri benar-benar aman. Sejak 1994 pemerintah memang mengenakan pajak ekspor sebesar 10-12% buat CPO untuk mengamankan kebutuhan dalam negeri. Nah karena produksi sudah jauh melampaui kebutuhan nasional, maka pada 14 Juli 1997 pemerintah memangkas pajak ekspor itu menjadi 5% untuk CPO, Refined Bleached Palm Oil (RBPO) 4%, Crude Olein (CRD Olein) 4%, dan RBD Olein 2%. Ini dimaksudkan agar produsen CPO dapat menikmati bagusnya harga CPO

dunia, sekaligus menyedot devisa dari pasar internasional. Di luar dugaan, yang terjadi kemudian para produsen ramai-ramai mengeksport produknya, dan mengabaikan pasar domestik. CPO yang biasanya berlimpah itu tiba-tiba raib. Akibatnya pabrik-pabrik minyak goreng merintih kesulitan bahan baku. Kelangkaan bahan baku ini menyebabkan produksi minyak goreng menurun drastis. Sebagai efek dominonya minyak goreng menjadi sulit didapat. Kalaupun bisa didapat harganya melambung tinggi. Harga minyak goreng di dalam negeri yang dulu Rp 1.400/kg langsung melompat menjadi Rp 2.200.

Kuat dugaan CPO berlari mengejar dolar di pasar internasional. Maklum harga CPO, yang pada Juli 1997 cuma US\$ 516/ton, pada Desember 1997 naik menjadi US\$ 540/ton. Harga itu pun bukan harga mati, sebab kecenderungannya harga CPO akan meningkat terus. Toh banyak kalangan merasa sebal terhadap kelakuan para produsen CPO. Apalagi diketahui mayoritas mereka merupakan pengusaha besar, yang punya andil gede menjerumuskan Indonesia ke jurang krisis. Lihat saja daftar 1.689 perusahaan yang masuk bangsal BPPN akibat overdosis utang. Menurut Dirut PDBI (Pusat Data Bisnis Indonesia) waktu itu Christianto Wibisono dari 1.689 perusahaan pengutang itu, sebenarnya sekitar 300 bisa dinisbatkan kepada sekitar 30 kelompok usaha besar alias konglomerat.

Pada saat krisis para pengusaha besar itu tanpa malu-malu tampil dengan dua wajah. Di satu sisi tampil memelas dan merengek meminta bantuan pemerintah untuk menghadapi tuntutan kreditor asing. Di sisi lain tampil sebagai pedagang besar yang tahu betul di mana bisa menyedot untung dengan mengeksport CPO secara

sembunyi-sembunyi - mengorbankan pasar domestik.

Toh pemerintah tak bisa bertindak tegas kepada para pedagang besar itu. Sebagai gantinya pemerintah lantas mengubah strategi. Pada tanggal 3 Desember 1997 Menperindag waktu itu Tungky Ariwibowo, menetapkan semacam kuota ekspor buat 8 kelompok perusahaan besar. Itu berarti hanya 8 perusahaan yang diperkenankan mengekspor CPO. Kedelapan perusahaan tersebut adalah Kantor Pemasaran Bersama (KPB) PTP Nusantara, PT Bukit Kapur Reksa, PT Smart Corporation (Sinar Mas/Eka Tjipta Widjaja), PT. Musim Mas, PT. Intiboga Sejahtera (Grup Salim/ Liem Sioe Liong) PT. Asianagro (Raja Garuda Mas/RGM/Sukanto Tanoto), PT. Astra Agro Lestari (Astra), dan PT. London Sumatera (Grup Bakrie). Itu pun yang diekspor tak boleh melebihi 25% produk. Yang 75% harus dilempar di pasar dalam negeri agar pabrik minyak goreng dapat memproduksi. Diluar 8 perusahaan besar itu diharuskan melempar 100% produk mereka di dalam negeri. Mengapa cuma 8? "Delapan perusahaan tersebut kami pegang dulu, karena mereka menguasai 70% produksi CPO nasional atau sekitar 3,71 juta ton dari 5,6 juta ton produksi 1997," jelas Dirjen Industri Hasil Hutan dan Pertanian (IHHP) Sujata ketika dimintai penjelasannya waktu itu.

Kebijakan itu segera terbukti tidak efektif untuk menjinakkan produsen CPO yang haus dolar. 10 Desember 1997 pemerintah kemudian menambah 7 perusahaan lagi yang mendapat kuota ekspor: PT Sucofindo, PT Tasik Raja, PT Permata Hijau, PT Tidar Grup, PT Duta Palma Nusantara, Grup Sipef, dan PT Tunas Baru. Toh keadaan tidak membaik. Harga minyak goreng terus membubung tinggi. Beberapa merek populer seperti Bimoli (Salim) dan

Filma (Sinar Mas) bahkan sempat lenyap dari peredaran. Pabrik menjerit minta pasokan CPO. Dugaan semakin kental bahwa ada pihak yang menimbun CPO untuk memperoleh keuntungan besar.

Namun produsen menolak dituduh menimbun. "Tuyulnya itu justru di distributor, pengecer, dan konsumen. Minyak goreng kan bisa bertahan sampai setahun. Sementara CPO tidak mungkin ditimbun. Dia harus segera diolah karena cepat berpermentasi," Kata Wakil Ketua Federasi Asosiasi Minyak dan Lemak Nabati (FAMNI) H. Tarmidzi Rangkuti berang ketika ditanyakan masalah itu. Toh Ketua Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) Nafis Daulay mengakui adanya peningkatan ekspor besar-besaran CPO dan olein (minyak goreng) sejak Juli 1997. Menurutnya harga CPO yang tinggi di pasar internasional dan turunnya nilai rupiah memacu produsen mengekspor CPO-nya.

Menanggapi keadaan tidak menyenangkan itu pemerintah lalu mengeluarkan kebijakan lebih ketat, mengenakan pajak ekspor tambahan untuk produk CPO dan turunannya. Begitulah Pajak ekspor CPO kemudian menjadi 30%, RBPO 30% CRD Olein 30%, dan RBD Olein 28%. Namun CPO tetap tak jinak. Produsen merasa lebih untung mengekspor ke mancanegara, meskipun harus membayar pajak tambahan, daripada melegonya di dalam negeri. Apalagi setelah Rp terjun bebas sampai menembus angka Rp 10.000/US\$. Akibatnya pabrik minyak makin menjerit. Harga minyak goreng meroket. Setelah perayaan Natal, Tahun Baru, dan Lebaran berlalu, bahkan setelah Sidang Umum MPR harga minyak goreng malah menembus angka Rp 7000/liter. Merek-merek populer seperti Bimoli dan Filma lebih sering menghilang dari peredaran. Padahal

semula orang menduga setelah perhelatan-perhelatan besar itu berlalu, harga-harga akan kembali normal.

Seakan putus asa, pemerintah lantas melarang ekspor CPO dan olein sampai Maret 1998. Larangan itu lalu diperpanjang sampai waktu tidak terbatas. "CPO tidak boleh diekspor sampai pasokan minyak goreng di dalam negeri stabil," tegas Tungky. Pernyataan itu didukung Kabulog Beddu Amang. "Jadi 100% CPO dan olein yang ada untuk dalam negeri. Dengan adanya ketentuan ini berarti tidak ada ekspor. Siapa yang menimbun atau melanggar ketentuan ini akan dikenakan sangsi," tegas Kabulog dalam wawancara dengan penulis untuk majalah SWA seusai acara Hut Republika, 26 Februari 1998. Dia menolak menjelaskan apa saja sangsinya. Bob Hasan, yang menggantikan Tungky sebagai Menperindag, juga menerapkan kebijakan yang sama. Akibat larangan ekspor CPO Indonesia itu, harga CPO internasional naik lagi menjadi US\$ 670/ton.

Pengamat ekonomi dan pertanian Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih tidak setuju dengan pelarangan ekspor CPO. Dia lebih suka bila pemerintah membiarkan segalanya berjalan dalam mekanisme pasar yang normal. "Sebenarnya ini perkembangan wajar. Produsen ingin untung. Sekarang ada kesempatan meraih untung besar di mancanegara. Di dalam negeri pabrik minyak goreng kan tidak mau membeli dengan harga tinggi, karena minyak gorengnya tidak boleh dinaikkan. Dia termasuk sembako. Jadi biarlah produsen jual ke luar kan? Kenapa harus dilarang? Kalau dilarang, produsen bisa menimbun, bisa pula menyelundupkannya. Mereka tidak mau rugi," tutur Bungaran sungguh-sungguh. "Inilah satu contoh kebijakan pemerintah yang paling tidak efektif. Biar sampai habis

energi pemerintah, pasar akan tetap menang," tambah Guru Besar Institut Pertanian Bogor itu cepat.

Bungaran berpendapat harga di luar sebetulnya tidak naik secara signifikan. Sebelum krisis, saat kurs Rp 2.430/US\$, harganya sekitar US\$ 516/ton. Harganya menjadi US\$ 540 pada Desember 1997, tapi Rp sudah jatuh menjadi Rp 4.700/US\$. Jadi kenaikannya tidak begitu hebat. Cuma Rupiah jatuh terlalu dalam. Apalagi saat kurs menembus angka Rp 9000-10.000/US\$. Kenaikannya menjadi sangat berarti dibanding menjual di dalam negeri dengan harga 2.200/kg. Jelas di luar bisa dapat 4 kali lipat lebih besar. Untuk kebutuhan di dalam negeri, kata Bungaran, biarlah orang beralih ke minyak goreng kelapa yang mayoritas merupakan usaha rakyat.

Menurut Pakar pertanian itu industri CPO mempunyai prospek yang bagus. Pertama, karena pembudidayaannya mudah. Kedua, pasarnya sangat luas - world wide. Ketiga, keuntungannya besar dan bisa diandalkan untuk meraih devisa. Pemerintah, kata Bungaran, sebaiknya membiarkan saja industri ini tumbuh secara wajar. Jangan ganggu pertumbuhannya dengan aturan yang menghambat. Dia memang tidak mengada-ada. Menurut catatan Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) luas areal perkebunan kelapa sawit meningkat rata-rata 13,2% per tahun. Produksinya sendiri meningkat 13,8% per tahun. Bila dulu hanya perusahaan negara dan swasta besar saja yang mengelola perkebunan sawit, sejak 1979 perkebunan rakyat ikut berkembang dan kini memiliki 722.533 hektar. Perkebunan rakyat menempati peringkat kedua dalam luas areal setelah perkebunan swasta 955.326 hektar. Perkebunan negara memiliki 399.613 hektar. Masih menurut PDBI nilai ekspor CPO juga sangat bagus. Dari Januari-Agustus 1997



saja ekspor komoditas ini telah mencapai US\$ 1,2 miliar. Padahal 1996 nilainya masih US\$ 1 miliar.

Saat ini Malaysia memberikan kontribusi 51,3% produksi CPO dunia. Indonesia berada pada posisi kedua dengan kontribusi 29,8%. Sisanya dipasok oleh Nigeria, Colombia, dan beberapa negara lain. Pada tahun 2000 produksi minyak sawit dunia mencapai 20,4 juta ton dengan kenaikan rata-rata 5% per tahun. Melihat pertumbuhan produksi CPO Indonesia rata-rata 12% per tahun, sedang Malaysia hanya 4-5%/tahun, maka PDBI memprediksi pada tahun 2005 produksi Indonesia akan melampaui Malaysia. Saat itu Indonesia akan memproduksi 12,3 juta ton CPO, dan Malaysia berada pada peringkat kedua, 11,8 juta ton.

Melihat begitu besarnya minat investasi di sektor ini, rasanya prediksi di atas akan menjadi kenyataan. Gejalanya sudah bisa dibaca sejak 1997. Menurut catatan BKPM sampai akhir 1997 telah ada 127 persetujuan investasi perkebunan sawit. Jadi akan ada 127 unit perkebunan sawit baru. Nilai investasinya sekitar Rp 13,27 triliun. Itu baru yang berstatus PMDN. Yang berstatus PMA, setelah dibuka kembali Juli 1997, ada 4 proyek dengan nilai investasi US\$ 200,4 juta.

Sekadar memberi gambaran ada baiknya kita lihat PT Astra Agro Lestari (AAL), dulunya bernama Astra Agro Niaga, didirikan William Suriadjaja 1983. Meskipun tergolong baru memasuki industri CPO, kata Presdir AAL ir. Benny Subianto, dari segi luas AAL dengan 42 anak perusahaannya masuk peringkat ke 4 terbesar setelah Sinar Mas, Grup Salim, dan Raja Garuda Mas (RGM). AAL kini memiliki 200 hektar lahan: 177.976 hektar ditanami sawit. Sisanya ditanami teh, dan kakao. Dia juga memiliki

12 pabrik pengolahan yang mengolah Tandan Buah Segar (TBS) menjadi CPO. Di samping itu AAL juga memiliki 1 pabrik (refinery) dan memproduksi minyak goreng Cap Sendok dan minyak goreng curah (tanpa merek) dengan produksi 69,47 ton/tahun. Minyak goreng tersebut sebagian besar beredar di Sumatera.

Benny berpendapat industri CPO ini sangat prospektif. Itu sebabnya Astra terus berupaya mengembangkannya. Kini CPO dan produk turunannya memberikan kontribusi 91% kepada AAL. "Dari 177.976 hektar yang telah ditanami itu, baru 66 ribu hektar yang telah dipanen dan menghasilkan 254.362 ton CPO tahun 1997. Kita pasok ke pabrik sendiri 100 ribu ton (refinery) untuk diolah menjadi minyak goreng (olein). Sisanya untuk memasok pabrik-pabrik lain di dalam negeri," tutur Presdir AAL itu tenang. Dia yakin tahun ini hasil CPOnya akan bertambah, karena yang dipanen akan bertambah 30 ha. Bila semua berjalan lancar, menurutnya, luas lahan AAL akan dikembangkan menjadi 300 ribu ha (280 ribu ha untuk sawit) sampai 2001. Jumlah pabrik CPOnya pun akan bertambah menjadi 23 buah (tahun 1998 akan bertambah 3 buah). Tahun 1997 AAL sempat mengekspor 12.500 ton CPO ke India dan Cina.

Kegiatan itu lantas dihentikan sehubungan dengan larangan ekspor dari pemerintah. Jadi semuanya, kata Benny, kemudian untuk memasok kebutuhan dalam negeri dengan harga patokan Rp 2500/kg. "Rugi sih enggak, tapi kita kehilangan kesempatan, istilahnya opportunity loss, untuk mengekspor pada saat negara butuh devisa," jawabnya hati-hati ketika ditanyakan masalah itu. "Dari sudut ekonomi tentu saja tidak menyenangkan. Bayangkan harga internasional sekarang US\$ 670/ton. Dengan



kurs taruhlah Rp 8500/US\$, maka harga per kgnya sama dengan Rp 5.695. Setelah dipotong pajak, dan potongan-potongan lain, minimal AAL bisa mengantongi Rp 4700/kg. Jadi dia kehilangan Rp 2200 setiap kgnya. Bayangkan bila AAL bisa mengeksport taruhlah 20 ribu ton CPO?" sambung Benny serius. Meski demikian keadaan di lapangan tidak membaik. Setelah sidang umum MPR 1998, harga minyak goreng bermerek lebih sering raib. Kalaupun bisa didapat, harganya sudah melambung menjadi Rp 7 ribu/liter. Artinya pengusaha berhasil memaksakan harga internasional di pasar lokal.

#### **4. Yang Menolong, Yang Teraniaya**

Usaha dari bawah untuk membantu pemerintah mengatasi keadaan yang menyesak napas itu bukan tak ada. Sebelum nilai Rp terpuruk sampai sebegitu dalam, lebih dua ratus kyai dari berbagai pesantren di tanah air datang ke istana negara. Mereka tak datang untuk meminta keringanan pajak atau meminta kredit tak berbunga dari dana reboisasi untuk mengatasi paceklik dana pembiayaan. Tidak pula meminta pemerintah menjadi perantara untuk memohon keringanan atau penghapusan utang dari para kreditor asing, seperti yang dilakukan para konglomerat dan pengusaha nasional.

Mereka, orang-orang dari pesantren itu, datang untuk menyumbangkan anting-anting, kalung dan gelang milik anak dan istri mereka buat meringankan beban pemerintah pada masa krisis. Tak ada pemandangan lebih mengharukan daripada malam itu. Orang-orang kecil dari tempat-tempat yang jauh, sebagian cuma bersarung dan baju koko sederhana, menyerahkan sebundal besar perhiasan emas. Perhiasan seberat 1,9 kg itu diserahkan

langsung kepada presiden, yang selama tiga dekade hampir tak pernah menyantuni mereka. Zainuddin MZ sendiri, kyai sejuta umat yang memimpin perhelatan itu, menyumbangkan 1 ons emas miliknya kepada pemerintah. Bantuan itu memang tak menyelesaikan masalah. Nilai Rp tetap terpuruk terhadap valas, terutama US\$. Maklum lebih separuh utang luar negeri Indonesia, termasuk utang swasta, diberikan dan mesti dikembalikan dalam mata uang paman sam itu. Tak banyak yang menyadari bahwa krisis ini bisa berkembang ke sesuatu yang tak bisa diduga, termasuk para kyai dan orang-orang dekat istana. Lebih-lebih bila diingat kepercayaan kepada kemampuan pemerintah untuk mengatasi keadaan ini telah pudar. Lihat saja protes dan ketidakpuasan yang tidak lagi ditutup-tutupi, telah merebak di seluruh negeri.

Di sisi lain, berpijak pada pandangan bahwa rakyat banyak masih mempercayai sang presiden, Siti Hardiyanti Rukmana alias embak Tutut menggelar Gerakan Cinta Rupiah (Getar), 10 Januari 1998. Putri sulung Soeharto dan salah satu bintang kemenangan Golkar pada Pemilu 1997 itu, memboyong anggota DPR/MPR dari Fraksi Karya ke dalam gerbong Getar. Tutut sendiri, sebagai pencetus, merupiahkan US\$ 50 ribu guna memperkuat otot Rp. Uang segitu tentu tak bisa dianggap besar, bila diingat kapasitas Tutut sebagai pengusaha besar dengan puluhan anak perusahaan yang menggurita ke mana-mana. Pada saat sama anggota fraksi karya yang dibawahnya hanya merupiahkan antara US\$ 1.000-5 ribu. Alhasil US\$ yang bisa dirupiahkan hari itu cuma US\$ 650 ribu dengan kurs Rp 6.450/US\$.

Namun getar tidak berhenti sampai di situ. Dia terus menjalar sampai ke menteri-menteri, para pengusaha,

pegawai Garuda, Dephub, para Gubernur, aparat pemda, rakyat biasa yang banyak duit, dan tentu para pengusaha besar. Cuma karena US\$ yang mengalir untuk dirupiahkan jumlahnya tak cukup signifikan, maka hasilnya juga tak optimal untuk mendongkrak nilai Rp. Pengusaha dari udik H. Murad Husin tercatat berada pada posisi teratas dalam merupiahkan US\$ miliknya. Pengusaha asal Luwuk-Sulawesi Tengah itu pertengahan Januari 1998 telah merupiahkan US\$ 3 juta di Bank Dagang Negara (BDN) cabang Luwuk. Bandingkan dengan Eka Tjipta Widjaja, konglomerat kelompok Sinar Mas yang sebagian besar penghasilannya dalam US\$, cuma merupiahkan US\$ 1 juta. Tommy Winata baru US\$ 500 ribu, Sukamdani S. Gitosardjono US\$ 50.100. Burhan Uray dari Grup Djajanti US\$ 50 ribu. CEO kenamaan dari Astra Teddy P. Rahmat hanya menukarkan US\$ 10 ribu, satu level dengan bos McDonald Bambang N. Rahmadi.

Jumlah yang dirupiahkan TP Rahmat dan Bambang N Rahmadi, yang terkenal kaya raya itu, sama dengan sumbangan cuma-cuma H Murad Husin. Ya, pengusaha udik itu pada 21 Januari 1998 tercatat tidak hanya telah merupiahkan US\$ 3 juta miliknya, tapi juga telah menyumbangkan US\$ 10 ribu kepada negara. Dalam bincang-bincang dengan penulis waktu itu dia menyebut alasannya menyumbang sederhana saja: dia merasa malu melihat para kyai, yang bukan pengusaha dan hidupnya sudah cukup susah, masih mau menyumbangkan emas-emasannya buat negara. "Mereka itu siapa? Kan bukan pengusaha, bukan pedagang. Mereka datang dari pondok-pondok pesantren yang jauh. Saya yakin hidup mereka sendiri pas-pasan. Bila mereka bisa menyumbang, masa kita pengusaha tidak?" jawab Murad sungguh-

sungguh ketika ditanyakan alasan menyumbangkan dolarnya. "Saya merasa diuntungkan oleh negara, karena telah memberi peluang bisnis kepada saya. Sekarang negara memerlukan bantuan, ya kita harus berikan," sambung pengusaha yang bergerak di bidang perikanan, kehutanan, perkebunan, dan pertanian itu.

Aksi spontan para ulama itu memang menimbulkan keharuan. Dia kembali menghidupkan kenangan orang akan sumbangan orang-orang Aceh kepada republik di awal-awal kemerdekaan untuk membeli pesawat terbang, alat yang mesti dipunyai oleh setiap negara merdeka. Tak heran bila banyak kalangan mencibir setiap aksi pemeritah yang ingin mengajarkan nasionalisme dan kebangsaan kepada para santri. Sebab orang-orang pondok pesantren ini lebih memiliki rasa kebangsaan yang tulus dan siap berkorban apa saja guna membela negaranya. Mereka ini cuma punya tanah air satu, Indonesia. Dalam senang dan dalam duka mereka akan tetap di Indonesia.

Orang-orang pesantren itu berbeda dari para pengusaha yang hampir tak mengenal batas-batas negara. Jadi mengajarkan paham kebangsaan, yang sudah dipraktikkan oleh para santri dan kyai, sama saja dengan menggarami lautan. Mungkin akan lebih berguna mengajarkan paham kebangsaan kepada para pengusaha yang cuma mengenal satu bahasa, uang. Para penilep BLBI, para penyelundup CPO, BBM, pencetak uang palsu, aparat negara yang sengaja meloloskan penjahat ekonomi ke luar negeri dengan imbalan uang, dan penjahat-penjahat semacam itu harus diakui lebih punya peluang untuk meninggalkan Indonesia saat negara sedang gering. Para kriminal kerah putih tersebut pukul rata adalah hasil didikan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi umum dalam

dan luar negeri. Mengajarkan alumni perguruan tinggi umum itu soal cinta tanah air dan paham kebangsaan, sebenarnya lebih relevan.

Toh meski memuji ketulusan para kyai dan santri dalam menolong tanah airnya, banyak kalangan menilai orang-orang pesantren itu terlalu naif. Sebagian lagi menganggapnya mencari muka, dan sebagian lain mencibir aksi itu sebagai pekerjaan sia-sia, ibarat menyangga beringin yang hampir roboh dengan seutas benang. Terlepas dari pro kontra yang mengiringi aksi para ulama itu, pengusaha udik semacam Murad Husin, Dirut PT. Kurnia Luwuk Sejati yang tak sempat mengenyam pendidikan tinggi, sudah digetarkannya. Namun Getar, gerakan yang dipimpin mba Tutut setelah aksi spontan para ulama pesantren, justru dinilai para pengamat sebagai gerakan setengah hati. Sebab yang dirupiahkan dinilai terlalu sedikit dibanding kemampuan mereka. "Bagi saya sebagai gerakan moral Getar cukup baik, tetapi dia tetap tidak akan mampu mendongkrak nilai rupiah. Sebab perburuan dolar masih tetap berlangsung dengan intensitas yang terus meningkat," ujar Rizal Ramli mengomentari aksi itu.

Rizal tidak sendirian. Tony A. Prasetyantono, staf pengajar Fak. Ekonomi UGM, punya pendapat senada. Baginya hasil gerakan ini masih belum signifikan. "Kalau seorang menteri menukarkan US\$ 1.000, berapa yang harus ditukarkan rakyatnya? ujaranya retorika. Menurut Tony gerakan ini baru efektif jika dolar yang dirupiahkan jumlahnya besar. "Masa cuma segitu sih yang mereka punya?" tanya beberapa kalangan sinis. Sebagian lagi malah mempertanyakan mengapa baru sekarang dirupiahkan. Mengapa tidak dari dulu-dulu sebelum harga dolar

sampai di atas Rp 6 ribu/US\$? "Oh tidak. Waktu kursnya masih Rp 4.000/US\$ saya sudah tukarkan 1 juta dolar di BDN Luwuk. Saya kan nasabahnya," bantah Murad Husin cepat ketika ditanyakan masalah itu. Aksinya yang tulus harus diakui telah memberi tambahan tenaga buat Getar yang diragukan itu.

Getar, kata mba Tutut, akan terus dikembangkan menjadi Gerakan Nasional Cinta Tanah Air (Genta), dan cinta produksi dalam negeri. Genta kemudian memang ikut bergulir. Setiap hari mediamasa cetak dan elektronik menyorot mereka yang datang ke BI, BDN, BBD ataupun bank lain untuk menyumbangkan perhiasan dan dolar kepada negara. Tidak ketinggalan anggota Asosiasi Pedagang Emas dan Permata (APP) DKI. Mereka datang serombongan dan menyumbangkan emasnya sebanyak 3.425 gram di BI. "Ini adalah aksi spontan kami. Jumlahnya memang tidak besar. Tapi ini baru tahap pertama," kata Sekjen APP DKI se usai acara tersebut menjanjikan. Lantas orang pun bertanya: di mana para konglomerat besar kita? Di mana Kelompok Jimbaran (Keji) yang suka bermain sinterklas-sinterklasan itu berada ketika negara lagi sakit? Kelompok pengusaha yang dibesarkan Soeharto itu dianggap paling diuntungkan Orde Baru selama 30 tahun lebih. Karena begitu doyanannya pada utang luar negeri, Keji sekaligus dituduh telah ikut andil mendorong negara ke jurang krisis tak berujung.

Menghadapi berbagai hujatan seperti itu, Keji memang tak diam seribu bahasa. Siapa lagi bila bukan Sofyan Wanandi yang angkat bicara? Juru bicara kelompok Jimbaran itu mengakui rendahnya partisipasi konglomerat dalam Getar dan Genta. "Jika mereka tidak bisa ikut, saya jamin bukan karena tidak mau, tapi mereka

dalam keadaan serba salah," jelas Sofyan dalam sebuah wawancara dengan penulis buat majalah SWA waktu itu. "Sebagian konglomerat memang sedang terjepit. Meski konglomerat berpotensi mengumpulkan emas lebih dari dua kwintal. Jumlah itu tidak banyak berarti untuk mengatasi krisis," tambahnya bersungguh-sungguh. Alasan itu diragukan banyak orang. Menurut mereka itu hanya retorika jimbaran saja. Kalau memang enggak mau nyumbang, bilang aja terus terang! Sebab emas 2 kwintal walau tak banyak berarti buat mengatasi krisis, jika diuangkan bisa menjadi dana abadi yang besar buat beasiswa. Setidaknya bisa membantu ratusan ribu orang tua murid yang kini tak mampu lagi membiayai sekolah anak-anak mereka.

Namun Sofyan memang tak sepenuhnya mengada-ada. Terlepas dari keengganan mereka untuk menolong, konglomerat memang lagi terjepit. Sebab kreditor asing yang dulu royal memberi pinjaman, kini menuntut agar mereka segera membayar utang. Keadaan tetap tidak membaik setelah pemerintah melikuidasi 16 Bank. Bahkan terus memburuk setelah pemerintah membekuooperasikan 38 bank lain. Lalu demi menghindari tenggelamnya perbankan Indonesia, pemerintah terpaksa menggelon-torkan dana tunai sampai Rp 144 triliun dalam bentuk kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI) untuk menalangi kewajiban bank akibat rush.

Sebutan KLBI kemudian berubah menjadi Bantuan Likuitas Bank Indonesia (BLBI). Jumlahnya sempat diungkap di media massa mencapai Rp 164 triliun, tapi yang Rp 20 triliun tak jelas juntrungannya. Terlepas dari misteri yang masih perlu diselidiki itu, banyak kalangan curiga ada permainan di balik penggelontoran dana sebesar itu.

Apalagi diberikan begitu mudah dalam waktu tak sampai 6 bulan. Sebagian bankir bahkan ada yang mendapat BLBI sampai 3 kali lipat di atas modal setor bank mereka. Mereka sebenarnya dinilai tak pantas menerima hadiah seperti itu, setelah merugikan nasabah dan negara lewat berbagai salah urus dan pelanggaran batas maksimum pemberian kredit (BMPK). Toh pemerintah tak merasa risau. Sampai saat ini boleh dibilang hampir tak ada upaya mengusut pembobolan uang negara raksasa tersebut. Ini cukup mengherankan sebetulnya. Apalagi bila diingat akibat gelontoran BLBI sampai Rp 144 triliun itu, pemerintah masih harus mengeluarkan obligasi untuk menyehatkan perbankan yang sudah kronis sebesar Rp 430 triliun.

Obligasi itu dikenal sebagai obligasi rekapitalisasi perbankan (obligasi rekap), yang bersama bunganya menjadi Rp 600 triliun. Begitulah lewat sulapan IMF yang hebat itu secara sim salabim, tiba-tiba pemerintah telah mengubah utang swasta menjadi utang publik sebesar Rp 600 triliun. Itu berarti roda ekonomi Indonesia yang sulit bergerak akibat digandoli utang luar negeri yang terus menggunung, menjadi bertambah berat. Pada Maret 1998 tercatat utang luar negeri Indonesia sekitar US\$ 137,424 miliar. Dari utang sebesar itu lebih separuhnya (US\$ 71,9 miliar) merupakan kontribusi perusahaan-perusahaan swasta besar alias konglomerat. Lalu atas tekanan lembut IMF yang memang punya kewajiban mengamankan uang Negara-negara penyandang dananya, pemerintah harus menanggung utang domestik pula sebesar itu. Artinya IMF telah menyandera pemerintah dan Negara Indonesia secara keseluruhan untuk melunasi utang pengusaha swastanya.

Setiap tahun setelah itu, siapa pun yang memerintah negeri ini, terpaksa menganggarkan Rp seratus triliun lebih untuk membayar cicilan utang dalam dan luar negeri, plus bunganya. Presiden transisi Habibie, yang melanjutkan pemerintahan setelah Soeharto lengser, adalah korbannya yang pertama. Presiden Abdurrahman Wahid dan kemudian Megawati Soekarnoputri yang muncul di era reformasi juga tak punya pilihan lain. Bahkan SBY-JK, presiden dan wapres yang dipilih langsung oleh rakyatnya terpaksa meng-ikuti jalan yang sama, setidaknya bisa dilihat dalam dua tahun pertama pemerintahan mereka. Mereka secara terpaksa ataupun sukarela menjalankan semua yang telah ditandatangani Soeharto di akhir masa jabatannya. Buktinya tak sulit dicari. Angka-angkanya terpampang jelas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2006. Lihat saja pemerintah mengalokasikan Rp 140,22 triliun, yaitu untuk pembayaran beban bunga Rp 76,63 triliun dan cicilan utang pokok Rp 63,59 triliun. Itu 4 kali lebih besar daripada anggaran pendidikan yang dipatok cuma Rp 34 triliun. Juga lebih besar daripada selisih harga BBM domestik dan internasional yang dipelintir pemerintah menjadi subsidi (Rp 95 triliun). Padahal yang belakangan itu yang amat mempengaruhi kehidupan rakyat banyak, atas tekanan IMF mesti dipangkas sampai nol dalam tenggat waktu yang telah ditentukan.

Itu berarti dalam keadaan darurat seperti saat ini, pemerintah mesti tetap membayar utang yang separuhnya sebenarnya merupakan utang swasta besar. Untuk itu pemerintah mesti menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik, juga air minum nantinya, serta memangkas segala bentuk subsidi dan anggaran kesejahteraan publik,

termasuk pendidikan dan kesehatan. Jadi pada saat daya beli rakyat anjlok dan negara dalam keadaan post majeure alias darurat, yang sebenarnya bisa mendapat keringanan, penundaan atau pemotongan utang luar negeri, pemerintah malah diminta membayar utang swasta sekaligus oleh IMF.

Soeharto yang sudah kehilangan dukungan di dalam negeri akibat krisis ekonomi berkepanjangan, tentu akan berpikir dua kali untuk menentang kemauan IMF. Pemimpin berpengalaman itu tahu betul, bila dia menyatakan post majeure, maka dukungan internasional yang diwakili IMF dan Bank Dunia pun akan hilang. Maka dia menutup matanya dari kenyataan, lalu ikut program IMF. Begitulah sesuai kesepakatan dengan sang juragan, per 1 April 1998, rakyat yang sudah melarat harus membayar listrik dan BBM lebih mahal. Padahal untuk makan saja mereka rela malu untuk ikutan mengantri sembako murah atau gratis berjam-jam.

Memang tidak semua wakil rakyat setuju pada kebijakan yang tak bijak itu. Komisi V DPR tegas-tegas menilai keputusan pemerintah menaikkan harga BBM dan listrik tidak adil dan mengandung bahaya sosial yang mahal. Pandangan wakil rakyat itu jelas tak salah. Cuma mereka tak menyangka bila kenaikan tarif BBM dan listrik itu telah ditetapkan dalam LoI dengan tanggal yang pasti, dan itu berlaku mutlak. Jadi Soeharto sendiri tak punya pilihan lain. Akibatnya dapat ditebak, pemerintah, diwakili Mentamben waktu itu Koentoro Mangkusubroto, sambil meneteskan airmata dihadapan wakil rakyat, menetapkan kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik (TDL) pada 1 April 1998. Akibatnya lebih dahsyat lagi. Republik seperti digoyang badai sampai di pelosok-pelosok. Arahnya

memang ke segala penjuru, tapi semakin lama makin terarah ke rezim Soeharto yang sudah terlalu lama bercokol.

Akhirnya Soeharto, bersama kabinet Pembangunan VII-nya yang baru berumur 70 hari, harus menuai badai. Sejak itu tanah air bergolak dahsyat. Kerusuhan meledak di mana-mana. Jakarta mengambil porsi yang paling besar. Orang-orang kecil yang merasa disepelekan, termasuk ibu-ibu dan anak-anak merangsek menghancurkan toko-toko, menjarah isinya, dan membakar dengan perasaan tanpa dosa. Tanah-tanah sengketa dan yang disinyalir milik keluarga Cendana dan kroninya dipatok ulang.

### **5. Ketika Kesabaran itu sampai Batasnya**

Gempa susulannya juga tak kalah dahsyat. De Soehartonisasi dan kebencian kepada klan Cendana merebak di seluruh tanah air. Sekaitan dengan itulah Bank Central Asia (BCA), bank swasta terbesar di Indonesia, tiba-tiba kelojotan setelah digilir habis nasabahnya selama seminggu. Sebelumnya, saat kerusuhan 13-14 Mei 1998, BCA juga telah menjadi sasaran amuk massa. Sekitar 122 kantor cabangnya (dari sekitar 150) di Jakarta dan sekitarnya dibakar, dirusak, dan dijarah. Saat itu tercatat sekitar 150 ATM BCA dirusak.

Ketika BCA megap-megap kesulitan likuiditas akibat penarikan dana besar-besaran (rush) oleh nasabah, orang cepat menghubungkannya dengan para pemegang saham yang lagi menjadi sasaran kebencian. BCA kala itu bagi banyak kalangan merupakan simbol persatuan klan cendana dengan konglomerat Liem Sioe Liong alias Soedono Salim. Konglomerat gaek itu setahun sebelumnya

telah henggang ke Singapura setelah menjual Indofood. Pandangan seperti itu antara lain diwakili pengamat perbankan Aberson Marle Sihalohe. "Masyarakat menarik dana dari BCA, lebih sebagai sikap ketidakrelaan menjadi pendukung tokoh-tokoh yang selama ini dikenal erat dengan masalah-masalah kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Sebab kalau soal keamanan dana, Gubernur Bank Indonesia (BI) sudah berkali-kali menegaskan jaminan pemerintah terhadap simpanan pihak ketiga," jelas Aberson sehari setelah BCA diambilalih BPPN (28 Mei 1998).

Aberson memang tak mengada-ada. Menurut catatan Data Consult/ICN saat itu hampir 70% saham BCA dimiliki keluarga Liem. Rinciannya: Soedono Salim 23,16%, Andree Halim 23,15%, dan Anthony Salim 23,15%. Sementara 30% saham BCA dimiliki anak-anak mantan presiden Soeharto. Tepatnya: Siti Hardiyanti Rukmana/mba Tutut 16%, Sigit Harjoyudanto 14%, dan sisanya yang 0,54% dimiliki pemegang saham lain.

Namun kerusuhan tak berhenti sampai ke penghancuran simbol-simbol Cendana dan kroninya. Kerusuhan yang dipicu oleh perasaan putus asa, tertekan dan amarah itu segera meluas ke mana-mana. Di sejumlah daerah dia malah berganti rupa menjadi kerusuhan etnis dengan sasaran penduduk keturunan Tionghoa. Toko-toko, rumah, harta, mobil, bahkan orangnya tak peduli laki-perempuan, tua-muda, dewasa-anak, asal bermata sipit dan berkulit kuning langsung diganyang. Pasar Baru, Glodok, dan daerah-daerah hunian yang banyak dihuni keturunan Tionghoa menggigil. Ini pada gilirannya membuat nyali orang-orang asing lain pun ikut ciut. Mereka berduyun-duyun, dengan cara apa pun meninggalkan

rumah-rumah mereka mencari tempat aman. Atau sekalian menuju bandar udara untuk meninggalkan Indonesia secepatnya. Bali yang damai juga menjadi pilihan yang menarik buat mereka.

Begitulah setelah keturunan Tionghoa menjadi sasaran kebencian, para turis atau profesional asal Amerika, Eropa dan Australia pun ikut henggang, meski belum ada seorang pun yang menjadi sasaran amuk massa. "Ik voel me hier niet veilig meer. Jakarta moet ik zo snel mogelijk verlaten. Maak me niet uit of ik een of twee dagen in Singapore moet overnachten, voordat ik naar Nederland kan vliegen. De situatie is voor me te Chaotisch. Saya merasa tidak aman lagi di sini. Secepat mungkin saya harus tinggalkan Jakarta. Tidak peduli apakah saya saras menginap dulu satu atau dua malam di Singapura sebelum bisa terbang ke Belanda. Situasinya bagi saya terlalu kacau", tutur seorang gadis cantik asal Belanda Inge Dahler tanpa menutupi kecemasannya. Saat itu dia sedang antri di depan counter KLM Bandara Soekarno-Hatta, 15 Mei 1998 (Pk.14.20), sehari setelah kerusakan mengerikan.

Gadis Belanda bertubuh padat itu cuma salah seorang dari ribuan wajah cemas yang memadati terminal keberangkatan (internasional) Bandara Soekarno Hatta. Dia mengaku memang belum ada gangguan terhadapnya di kawasan Buncit tempatnya tinggal, tapi wie weet he? (tapi siapa tahu?). Biasanya gangguan terhadap orang asing, katanya, masuk dalam tahap berikutnya setelah etnis yang dibenci. Itulah yang terjadi di Jerman, Chekoslowakia, Polandia, Rusia, dan lain-lain.

Sudah terlalu banyak malapetaka dinisbatkan pada krisis ekonomi berkepanjangan yang berkembang menjadi

krisis kepercayaan tersebut. Namun yang yang satu ini, bernama amuk massa, adalah produknya yang paling menakutkan, terutama bagi orang asing. Tidak heran bila mereka segera berbondong-bondong menuju bandara untuk menyelamatkan diri. Sekadar menyebut sebagian saja, Kedutaan Inggris langsung menyerukan 6 ribu warganya meninggalkan Indonesia. Mereka diangkut dengan sejumlah bus dari Kedubes Inggris ke bandara. Selanjutnya mereka dievakuasi dengan pesawat khusus British Airways. Pemerintah Amerika, Australia, Jepang, Singapura, Taiwan, dan lain-lain menyerukan hal yang sama.

Pemerintah Australia langsung mencarter pesawat Qantas Airlines dan Ansett Australia untuk menyelamatkan warganya dari kemungkinan amuk massa. Jepang tidak mau kalah. 6 Pesawat angkut militer pun dikerahkan untuk memperkuat 2 armadanya yang sudah dipakai mengangkut warga Jepang. Amerika lebih arogan lagi. Pemerintah Paman Sam berencana mengerahkan 2 ribu marinir ke Teluk Jakarta guna menjaga kemungkinan melakukan evakuasi militer warganya. Jendral Charles Krulak mengatakan kapal induk Amerika Serikat dan dua amfibi akan tiba di teluk Jakarta sekitar 25 Mei 1998. Duta Besar Qatar untuk Indonesia lain lagi. Dia tetap tinggal di Jakarta, meskipun seluruh bawahannya asal Qatar telah dipulangkan. Sang Duta Besar negara petrodolar itu, menurut seorang stafnya asal Indonesia, mengurus Kedutaannya dari Hotel Sheraton Bandara.

Apa arti henggangnya ekspatriat itu bagi Indonesia? "Dengan terjadinya kerusakan massa di berbagai tempat di tanah air, tatanan ekonomi Indonesia menjadi amburadul. Ini sebuah efek domino dari ketakberdayaan



pemerintah mengatasi keadaan di bidang politik," kata Dekan Fakultas Ekonomi UI waktu itu Prof.Dr. Anwar Nasution. "Manajer pabrik sudah tidak ada lagi, tenaga ahli sudah pada lari. Bahkan warga keturunan Cina yang punya duit pun lari. Akibatnya terjadi capital flight besar-besaran, menyusul pelarian modal yang telah berlangsung sebelum krisis. Siapa lagi mau kasih kredit kepada Indonesia? Apalagi melakukan investasi?" tambahnya. Menurut Anwar gejala ini sangat berbahaya bagi kelangsungan negara, sebab Indonesia saat ini justru sedang kekurangan dana pembangunan yang amat besar untuk memutar roda ekonomi.

Guru Besar ekonomi yang biasa bicara lantang itu memang tidak berlebihan. Perkembangan terakhir menunjukkan berbagai perusahaan asing dari Taiwan, Jepang, Australia, Amerika Serikat, dan lain-lain telah menghentikan operasinya di Indonesia. Perusahaan elektronik Sanyo menutup 5 pabriknya. Sonny menutup 2 pabrik televisi dan audionya, Sharp menutup 1 pabrik, Toyota menutup 2 pabrik, dan Nissan menutup 1 pabrik. "Kami sangat mengkhawatirkan keadaan di Indonesia," kata juru bicara perusahaan elektronik Sanyo di Tokyo memberi alasan. Sebagai-mana diketahui Indonesia merupakan negara kedua sasaran investasi Jepang di Asia setelah Cina. 1996 saja sekitar US\$ 30 miliar mengalir dari negeri Matahari Terbit itu ke sini. Amuk massa pada 13-14 Mei lalu telah membuat semuanya set back dan mencekam.

Lebih jauh lagi seiring amuk massa yang banyak ditujukan ke etnis Cina itu, membuat Menteri Ekonomi Taiwan Wang Chih-kang berang. Dia menginstruksikan penundaan investasi gula nasional Taiwan di Indonesia. Sebagai protes pada perlakuan rakyat Indonesia terhadap

etnis Cina, kata dia, perusahaan minyak Chinese Petroleum Corp. menolak membayar uang muka pembelian minyak kotor dan gas dari Indonesia. Sampai saat ini melalui berbagai proyeknya, investor Taiwan telah menanamkan 13 miliar dolar lebih, dan merupakan investor ke 6 terbesar di tanah air. "Meskipun Indonesia memiliki berbagai kekayaan alam yang amat dibutuhkan Taiwan, kepercayaan investor Taiwan telah menipis akibat keke-  
rasan yang menyerang penduduk keturunan Cina," kata pejabat VE Wong Corp. Perusahaan tersebut menunda investasi untuk waktu yang tidak terbatas, meskipun telah telanjur mendirikan pabrik senilai US\$ 4,9 juta di Sumatera Selatan.

Sementara itu PT Unilever Indonesia (Unilever), salah satu perusahaan multinasional yang sudah puluhan tahun di Indonesia, sejak 18 Mei 1998 menghentikan operasi di kantor pusatnya di Jl. Gatot Subroto. Alasannya apalagi, jika bukan keamanan? Tenaga Kerja Asing (TKA)nya bahkan sejak sehari setelah peristiwa penembakan di Kampus Universitas Trisakti (12 Mei 1998) telah berkemas kembali ke negaranya masing-masing. Kini seluruh TKA Unilever, kata petugas keamanan perusahaan multinasional itu Saifuddin, telah hengkang ke luar negeri. PT General Motor Buana Indonesia (GMBI) mengeluarkan jurus agak unik untuk mengatasi keadaan. Manajer Senior GMBI melakukan kerjasama dengan rekan-rekannya di Indonesia untuk tetap mengoperasikan perusahaan dari pusat operasi GM Asia dan Pasific di Singapura. GMBI, menurut Presdir GMBI William S. Botwick, tidak akan meninggalkan Indonesia begitu saja. "Kami berharap keadaan akan pulih, karena kami mempunyai komitmen jangka panjang di Indonesia dan berharap dapat

membantu Indonesia memulihkan ekonomi," jelas Botwick meyakinkan.

Tak berhenti sampai di situ. Seiring memanasnya situasi, aksi demo mahasiswa yang sekian lama hanya digelar di dalam kampus, jauh dari rakyat, birokrasi pemerintahan, dan DPR kemudian dianggap tidak efektif lagi. Maka mahasiswa yang didukung alumni, para rektor dan segenap civitas akademika mulai meninggalkan sarangnya. Seperti telah diduga sebelumnya mereka pun bentrok dengan petugas keamanan, dan luka-luka. Namun kampus tetap bergolak dan menuntut lebih jauh. Korban semakin banyak berjatuhan. Rakyat dan mahasiswa seperti serempak bereaksi terhadap penembakan 4 mahasiswa Trisakti dan seorang siswa SMU oleh petugas keamanan di kampus Universitas itu. Mereka diabadikan sebagai pahlawan reformasi oleh Presiden Habibie yang menggantikan Soeharto kemudian. Indonesia menangis, terutama kalangan kampus dan civitas akademika.

Sampai saat itu tak ada yang tahu bagaimana akhir drama reformasi di penghujung abad 20 itu. Tidak ada pula yang tahu bagaimana keadaan negara setelah reformasi. Namun Indonesia baru, yang sama sekali lain dari apa yang dipertontonkan rezim Soeharto, mulai menjadi cita-cita yang mengkristal. Setidaknya itulah yang bisa kita dengar dari sumpah mereka yang dilontarkan satu hari setelah penembakan di Tri Sakti. Dengarkan apa kata mereka!

Sumpah mahasiswa:

Bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan  
Berbangsa satu, bangsa yang cinta pada keadilan  
Berbahasa satu, bahasa kebenaran

Seluruh negeri bergetar oleh lagu reformasi. Mereka bernyanyi dengan irama mars tanpa dirigen, seakan tidak memerlukan alasan lagi mengapa lagu itu didendangkan. Mereka menuntut perubahan lebih banyak, termasuk pencabutan kelima paket undang-undang politik anti demokrasi hasil karya rezim Soeharto bersama wakil-wakil rakyat yang telah dikebiri pada 1985. Kelima undang-undang itu adalah: UU no 1/1985 tentang Pemilu, Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD (UU no 2/1985), Partai Politik dan Golkar (UU no 3/1985), Referendum (UU no 5/1985), dan tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU no 8/1985).

Mengapa kelima paket undang-undang ini? "Kelima paket UU tersebut adalah alat anti demokrasi yang sengaja dibuat pemerintah untuk mengebiri semua kekuatan sosial politik," jawab Arbi Sanit mantap. Dia tidak berlebihan. Sebagai contoh bisa kita ambil Undang-undang Keormasan (UU No.8/1985). Sebagaimana diketahui undang-undang keormasan ini tidak saja meminta korban ratusan jiwa di Tanjung Priok, tapi juga telah membuat Dewan Gereja Indonesia (DGI) - dengan alasan iman, terpaksa berganti nama menjadi Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Akibat undang-undang ini pula pada tahun 1987 Gerakan Pemuda Marhaen dianggap pemerintah tidak ada. Pelajar Islam Indonesia (PII), yang telah berkiprah sejak 1947 pun tidak diakui keberadaannya, cuma karena menolak mengganti azas Islamnya dengan Pancasila.

Menyadari bahaya semakin menghampiri kekuasaannya, Soeharto dan para pembantunya tidak diam saja menunggu nasib. Pada 28 April 1998 pemerintah, diwakili 16 menteri dan ABRI (TNI), menggelar dialog dengan

mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, pemimpin ormas pemuda, cendekiawan, dan tokoh masyarakat. Dialog itu dihadiri 250 peserta, minus mahasiswa UI, ITB, dan UGM yang memang memboikot. Mereka menganggap dialog itu hanya untuk menyenangkan hati, tapi tidak untuk menyelesaikan masalah. Mahasiswa menuntut reformasi total, termasuk penggantian pucuk pimpinan negara. Susunan anggota DPR/MPR juga dituntut untuk dirombak. 100 anggota DPR yang diangkat presiden dari ABRI (telah berkurang menjadi 75) dianggap tidak perlu ada. Demikian pula 500 utusan daerah dan golongan dari 1000 anggota MPR harus ditiadakan. Komposisi MPR yang 60%-nya terdiri dari orang-orang yang ditunjuk dan diangkat Soeharto dinilai negatif dan selama ini cuma sebagai alat yang melanggengkan kekuasaan rezim orde baru.

Namun Presiden Soeharto, yang kaya pengalaman, tak mau menyerah begitu saja. Dia pun kemudian menyatakan akan membentuk tim reformasi beranggotakan tokoh-tokoh Islam, pakar hukum, dan budayawan. Soeharto bersama tim bentukannya juga menawarkan agenda reformasi. Yang pertama akan direformasinya adalah Kabinet Pembangunan VII, yang nantinya akan diberi nama Kabinet Reformasi. Kemudian akan dirombak pula Undang-undang pemilu, kepartaian, undang-undang anti monopoli, dan sebagainya.

Namun sebagaimana rekannya sesama diktator di Iran sana Shah Reza Pahlavi dan Chou Ches Koe di Rumania, kiat Soeharto untuk menunggangi reformasi kandas. Cendekiawan Muslim Nurcholis Majid yang hadir dalam pertemuan dengan Soeharto mengaku telah memilih Amien Rais sebagai pemimpin. Di sisi lain upaya Soeharto

dijawab Mahasiswa dari berbagai kampus dengan menduduki gedung DPR/MPR sejak hari Senin, 15 Mei 1998. Ketika itu sang diktator sedang melawat ke Mesir. Sejak itu sejarah bergerak semakin cepat. Perkembangannya tidak lagi bisa diikuti dari hari ke hari, tapi dari detik ke detik. Mereka menuntut Soeharto turun dari jabatannya yang dianggap terlalu lama dan gagal. Segala upaya 'The Smiling General' Soeharto dicurigai sebagai alat untuk mengulur-ulur waktu sambil menyusun kekuatan, seperti yang dia lakukan saat mengebiri tokoh-tokoh Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) di awal orba. "Kami akan tetap berada di sini sampai Soeharto turun," kata Indri, mahasiswi Fisip UI semester II penuh semangat. Di sisi lain para mahasiswa melakukan orasi politik dan bernyanyi riang: "bang bang tut pepaya kulang kaling. Bambang dan Tutut, Bapaknya raja maling."

Soeharto yang frustrasi akhirnya gagal membentuk tim reformasi, antara lain karena 14 menteri yang diangkatnya, dipimpin Mantan Ketua Bappenas Ginanjar Kartasasmita, menyatakan tak bersedia duduk dalam kabinet. Mantan penguasa mutlak itu kemudian menyatakan diri berhenti dari jabatan Presiden RI, 21 Mei 1998 pagi, satu hari setelah Amien Rais menyatakan akan mengerahkan people power ke istana. Acara yang telah dipersiapkan rapih itu dibatalkan Amien dinihari pukul 02.00 lewat radio. Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra dianggap banyak kalangan telah membuatkan sang dictator sebuah 'exit program' yang cantik, sehingga sampai sekarang tak bisa dimintai pertanggungjawaban. Setelah Soeharto menyatakan mundur, Panglima TNI Wiranto maju ke depan, dan berjanji akan melindungi mantan presiden itu beserta keluarganya. Habibie sang Wapres kemudian

menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai presiden, menggantikan diktator 32 tahun Soeharto. Itu berarti tuntutan mahasiswa dan rakyat agar Soeharto turun dari jabatannya telah terpenuhi. Pertanyaannya kemudian akan berhentikah roda reformasi yang digelindingkan Amien, mahasiswa dan intelektual kampus?

Jawaban atas pertanyaan sederhana itu jelas tidak. Namun satu hal dapat dipastikan, gerakan reformasi kehilangan lawan bersama pada saat barisan mereka belum lagi solid. Gerakan reformasi terpaksa mengambil napas dulu memberi kesempatan Habibie memperbaiki keadaan. Itulah setidaknya yang bisa dibaca dari pernyataan tokoh sentral reformasi, yang kala itu sudah punya lembaga Majelis Amanat Rakyat (MARA). "Saya akan melihat dulu: apakah kabinet bentukannya benar-benar terdiri dari manusia-manusia yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)," kata Amien tegas yang disambut tepuk tangan publik.

Setelah Soeharto lengser keprabon sekitar 300 ribu mahasiswa reformis tetap menduduki gedung DPR/MPR. "Reformasi akan jalan terus dari gedung ini. Bukan di tempat-tempat lain, bukan di Cendana," kata Ketua Senat Mahasiswa UI Rama Pratama tegas. "Kita harus memberdayakan lembaga DPR/MPR agar nantinya benar-benar bisa mengontrol jalannya pemerintahan", sambungnya. Kabinet bentukan Habibie dianggap sebagai produk Soeharto juga. Habibie cuma wayang. Yang berkuasa tetap Soeharto. Mereka berteriak di gedung DPR/MPR secara serempak: "Adili Soeharto, tolak Habibie!"

Arbi memprediksi kabinet bentukan ahli pesawat terbang itu tidak akan bertahan lama, paling 3 bulan. Setelah itu adalah era reformis. Namun mahasiswa rupanya

tak bisa bertahan lama di gedung wakil rakyat. Lewat pemanfaatan Pam Swakarsa mahasiswa berhasil digebah keluar gedung. Kemudian panggung reformasi berpindah ke Ciganjur. Amien tak lagi menjadi tokoh sentral. Abdurrahman Wahid, Megawati dan kemudian sultan Hamengku Buwono X masuk gelanggang dan mengambil peran semakin besar. Kaum reformis tak menyadari ini. Juga Amien.

## **6. Agenda Reformasi Politik, Menuju Indonesia Baru**

Ketika Soeharto menyatakan diri berhenti dari jabatannya sebagai Presiden RI, 21 Mei 1998 sebagian besar rakyat Indonesia terperengah, termasuk yang menuntutnya mundur. Banyak kalangan sebetulnya berharap rezim Soeharto akan mempertahankan kekuasaannya lebih lama, sehingga ada waktu buat kaum reformis merapatkan barisan. Ternyata Soeharto, yang frustrasi, mendadak berhenti. Kekuatan-kekutan reformasi, yang selama ini dipersatukan oleh perasaan jenuh dan benci terhadap rezim Soeharto, seperti kehilangan tali pengikat. Tentu ada juga yang senang, karena merasa sudah menang. Mereka ini kemudian kembali ke kampus, bikin partai baru atau menghidupkan parpol lama karena kran itu memang dibuka Habibie. Ada juga yang sekadar meramalkan euforia demokrasi di luar panggung reformasi yang sebenarnya.

Meskipun demikian, gelanggang politik tidak lantas sepi dari tuntutan reformasi. Apalagi para mantan menteri, pejabat tinggi, dan orang-orang yang selama ini diuntungkan oleh rezim orba pun ikut-ikutan berteriak menuntut reformasi. Manuver dan teriakan mereka ini kadang-kadang lebih atraktif daripada mereka yang

benar-benar reformis. Dengan manuver seperti itu tidak jarang mereka berhasil menarik massa, atau membuat kesan seolah para reformis sejati sudah mulai melempem dan mengecewakan. Banyak kalangan menganggap mereka sebagai para petualang politik atau penunggang reformasi. Mereka berusaha cuci tangan dari dosa mereka selama ini, sekaligus mencari keuntungan ketika elemen-elemen reformasi belum lagi menyatu. Gejala ini tidak lepas dari pengamatan Arbi, dosen FISIP-UI yang sejak awal berada di lingkaran Amien. Menurutnyanya rakyat harus membuat perhitungan dengan rezim orde baru dan antek-anteknya. Golkar mesti dibubarkan dan bila perlu dijadikan partai terlarang. Para pejabat dan pendukungnya, yang telah merusak Indonesia sampai separah ini, sebaiknya dibagi berdasarkan golongan A, B, C, dan seterusnya. Sesuai tingkat kejahatan mereka, seperti para mantan PKI, termasuk para penunggang reformasi itu.

Namun, kaum reformis belum lagi memegang kendali kekuasaan untuk dapat memaksakan semua agendanya. Jangankan menguasai keadaan, merapatkan barisan pun mereka tak mampu. Kekurangan itu pada gilirannya ikut memperlemah posisi tawar mereka. Kaum reformis yang terserak tidak mampu mengupayakan konsolidasi secara terencana. Lebih parah lagi sebuah kekuatan yang tak tampak ikut pula bermain dan mengacaukan agenda bersama. Setiap kelompok dengan pemimpinnya masing-masing mulai terpacu untuk membuat agenda sendiri-sendiri, dan lupa memilih pemimpin bersama. Mahasiswa, sebagai inti kekuatan reformasi yang paling rasional, malah terjebak dalam eksklusivisme. Mereka membentengi diri. Bahkan menolak kepemimpinan tokoh-tokoh reformasi yang selama ini menjadi lokomotif gerakan perlawanan

terhadap orba.

Angkatan '98 seperti mengulangi kesalahan kakak-kakak mereka pada 1966. Seperti diketahui para pendahulu mereka itu, setelah berhasil menumbangkan rezim orde lama, menyerahkan urusan negara kepada orang lain yang belum begitu dikenal. Pengamat politik LIPI Muchtar Pabottinggi termasuk orang yang mengkhawatirkan hal ini. Dia dan kawan-kawannya berharap Amien Rais, yang sejak rezim Soeharto masih kuat telah menjadi tokoh oposisi paling berwibawa dan konsisten, akan bergerak cepat mempersatukan kaum reformis. Tugas itu tentunya tak gampang. Apalagi tokoh-tokoh sekaliber Gus Dur - begitu Abdurrahman Wahid akrab disapa dan Pemimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ikut meramaikan gelagang reformasi.

Memang benar para tokoh reformasi dan mahasiswa di seluruh tanah air sekata menganggap reformasi belum selesai. Reformasi harus berjalan terus sampai semua tuntutan dipenuhi. Namun tuntutan itu, harus diakui sampai menjelang Soeharto lengser, belum jelas bentuknya. "Memang mereka menuntut reformasi di segala bidang, tapi bagaimana reformasi di segala bidang itu? Tidak jelas! Memang mereka menuntut agar 5 paket Undang-undang Politik dicabut, tapi apakah semuanya? Atau bagian-bagian tertentu saja? Itu juga belum jelas," kata Rektor Institut Ilmu Pemerintahan Prof. Ryaas Rasyid sebelum Soeharto mundur.

Tantangan pakar ilmu pemerintahan itu tidak lama kemudian mendapat jawaban dari tokoh-tokoh reformasi, atau 'think tank' mereka. Bahkan dilengkapi dengan agenda sekaligus. Mereka yang telah menyumbangkan pikiran, untuk menyebut sebagian saja, adalah Guru Besar

Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada (UGM) Loekman Soetrisno, peneliti LIPI Hermawan Sulisty, pakar politik UI Arbi Sanit yang juga pemikir politik Majelis Amanat Rakyat (MAR)nya Dr. Amien Rais, CIDES, dan masih banyak lagi.

Sebagai orang yang pernah hidup di 3 zaman (penjajahan, kemerdekaan di masa orla dan orba) Loekman Soetrisno (61) menilai sistem yang diterapkan pemerintah Indonesia sampai saat itu, dikembangkan ketika Indonesia dalam keadaan darurat. Keadaan darurat itu kita warisi dari zaman kolonial, demokrasi terpimpin, dan zaman darurat 1965. Sistem tersebut memang layak ketika itu. Walaupun masih bisa diterima, ya hanya sampai Pelita III (1979-1984). Setelah itu tidak relevan lagi. Menurut Loekman yang paling mendesak untuk direformasi adalah lembaga kepresidenan. Meskipun UUD 1945 tidak membatasi masa jabatannya, masa jabatan Presiden harus dibatasi 2 periode saja. Setelah itu paket 5 undang-undang politik dicabut, Lembaga perwakilan rakyat DPR/MPR diberdayakan mulai dari perekrutan sampai ketika menjadi wakil rakyat, sehingga dapat mengontrol pemerintah. Kemudian baru DPRD I dan DPRD II, agar tidak menjadi atribut Pemerintah daerah (pemda), tapi menjadi lembaga berwenang yang siap mengontrol pemda. Birokrasi juga menjadi sorotan Loekman. Birokrasi, menurut Loekman, harus dilepaskan dari Golkar, netral, dan menjadi milik bersama bangsa.

Hermawan Sulisty segendang sepenarian dengan Loekman. Direktur Research Institute for Democracy and Peace (RIDEP) itu bahkan menawarkan agenda reformasi lebih komprehensif. Dia mulai dengan ideologi, undang-undang dasar, lembaga kepresidenan, kabinet, DPR/MPR,

partai politik, birokrasi, ABRI, pemilu, sistem pemerintahan lokal sampai ormas. Dalam soal ideologi, Hermawan tidak anti Pancasila, tapi dia menginginkan monopoli penafsirannya selama ini oleh pemerintah atau BP7 direformasi. Menurutnya Pancasila harus menjadi ideologi kerakyatan yang bersifat terbuka, sehingga tidak hanya menjadi legitimasi status quo. Demikian juga dengan UUD 1945. Dia harus direformasi, agar tidak menjadi jimat politik penguasa dan menutup pintu perubahan atau amandemen.

Lebih jauh lagi Lembaga perwakilan rakyat DPR/MPR dinilai Hermawan sebagai pemegang kedaulatan rakyat terlalu lemah. Dari segi keanggotaannya saja sudah terlihat: anggota MPR terdiri dari 500 anggota DPR (75 orang diangkat Presiden dari ABRI) ditambah 500 utusan daerah dan golongan yang diangkat dan ditunjuk Presiden. Para anggota yang masuk tidak lewat pemilu itu mesti dikeluarkan, karena bertentangan dengan semangat reformasi. Kemudian barulah lembaga kepresidenan. Masa jabatan presiden mesti dibatasi 2 periode, lalu kabinet, parpol, birokrasi, dan seterusnya.

Di antara sekian banyak tawaran alternatif, agenda reformasi politik Arbi Sanit boleh dibilang paling lengkap dan dinamis. Arbi berpendapat sejak terjadi krisis ekonomi berkepanjangan yang menyengsarakan rakyat banyak, orba sudah kehilangan legitimasi ekonominya. Munculnya Habibie menggantikan Soeharto sebagai Presiden tidak akan menyelesaikan masalah. Sejarah dunia membuktikan bahwa satu-satunya kekuatan yang bisa meredam implikasi politik dari ketidakpuasan dan kemarahan rakyat adalah pemerintah yang berwenang, mempunyai legitimasi, dan popularitas memadai. Pemerintahan Habibie, menurut

Arbi, tidak memiliki ketiga syarat tersebut. Apa yang harus dilakukan untuk menghindari bencana lebih besar? Di sinilah kelebihan tawaran Arbi. Dia memulai agenda reformasinya dengan sebuah solusi damai. Sarannya: pemerintah Habibie bertemu dengan kekuatan-kekuatan reformasi, lalu bersama-sama membentuk pemerintahan peralihan yang berwibawa, mendapat legitimasi, dan populer di dalam dan di luar negeri. Dengan kewibawaan itu pemerintah peralihan akan mampu menenangkan rakyat yang lapar dan frustrasi, sehingga roda pemerintahan dan ekonomi dapat berputar.

Kemudian di bawah pemerintahan peralihan itu lembaga kedaulatan rakyat DPR/MPR dibersihkan dari 575 anggota yang diangkat dan ditunjuk mantan Presiden Soeharto. Mereka kemudian diganti dengan wakil-wakil reformis dari seluruh tanah air. Adapun anggota dewan/majelis yang masuk karena KKN, tetapi lewat pemilu, pengantiannya diserahkan kepada partai bersangkutan. DPR/MPR berwibawa inilah kemudian mencabut 5 paket undang-undang politik anti demokrasi produk Soeharto bersama timnya. Setelah itu MPR dapat mengadakan sidang istimewa untuk memperkuat mandatnya kepada pemerintah peralihan sampai 2003, atau memilih presiden baru lewat proses demokrasi normal. Alternatif lain dapat juga pemerintah peralihan ini menyelenggarakan pemilu. Tentu setelah mereka mempersiapkan semua sarana dan prasarana pemilu dengan sistem distrik yang hemat penyelewengan. Sistem kepartaiannya juga harus disempurnakan pada periode peralihan ini.

Tahap berikutnya, menurut konsep Arbi, adalah periode reformasi normal. Dia membaginya dalam 5 poin besar: reformasi kerangka dasar kehidupan/sistem politik

(reinterpretasi Pancasila, UUD 1945, pemerintahan perwakilan, presidensial, budaya politik); reformasi suprastruktur politik (penguasa, eksekutif, DPR/MPR, Lembaga Peradilan, birokrasi sipil & militer); reformasi infrastruktur politik (orpol, ormas, sipil); reformasi proses politik (pemilu, hubungan antar lembaga tinggi negara, pola interaksi kekuasaan dari kekeluargaan ke kompetisi); dan reformasi kebijakan politik (cabut atau revisi tap MPR antidemokrasi, undang-undang antidemokrasi, peraturan pemerintah antidemokrasi).

Tak dapat dipungkiri bila agenda-agenda reformasi tersebut bisa berjalan seperti yang diharapkan kaum reformis, Indonesia tentu akan cepat menjelma menjadi negara baru yang sangat ideal, berkeadilan, makmur dan tentram. Namun kaum reformis tak pernah punya kesempatan, walau hanya beberapa detik, memegang kendali kekuasaan. Oleh karena itu, kaum reformis tak pernah bisa memaksakan agenda-agenda itu untuk dijalankan, kecuali satu: memaksa sang diktator 32 tahun Soeharto lengser ke prabon. Agenda lainnya berjalan secara parsial, terutama pada masa kabinet Transisi Habibie saat suara kaum reformis masih didengar. Selanjutnya suara kaum reformis semakin sayup. Akibat keadaan yang semakin sulit, ancaman kelaparan, biaya hidup makin tinggi, biaya kesehatan dan pendidikan yang makin mahal, dan lain-lain, orang menjadi semakin apatis dan lebih banyak memikirkan kebutuhannya sendiri.

Dalam perjalanan kehidupan bernegara yang makin menggigit, hampir tak terdengar lagi tuntutan rakyat banyak untuk menggiring para penjahat politik, yang mengebiri demokrasi dan partai-partai politik selama 30 tahun lebih, ke meja hijau. Memang ada sedikit pember-



sihan di DPR/MPR, yang pada akhir masa orba telah menjadi seperti tempat arisan keluarga. Banyak tokoh dan pejabat tinggi negara menjadi wakil rakyat bersama anak istrinya. Orang-orang yang dianggap tak patut itu kemudian secara diam-diam keluar dari situ. Tempat mereka diisi oleh wakil-wakil kaum reformis semacam Didik J Rachbini, Jimly Assiddiqi, dan lain-lain. Namun Golkar dan para pentolannya - baik yang tetap di mesin politik orba itu, maupun yang bikin partai baru atau pindah ke partai lain - tampil makin percaya diri dan berkesan reformis.

Wacana negara federal, yang pernah dilontarkan Amien dan telah membuatnya menjadi sasaran kecaman dari kanan kiri, kemudian dikembangkan menjadi konsep otonomi daerah. Konsep itu akhirnya terwujud dalam Undang-undang tentang Otonomi Daerah pada masa Habibie. Di sisi lain reformasi seperti mati muda atau setidaknya mati suri. Bahkan ketika Indonesia telah mendapatkan presiden-wapres dan wakil-wakil rakyat dalam pemilu yang relatif fair dan demokratis. Agenda-agenda paling esensial dari reformasi, yang menyangkut perbaikan kualitas hidup rakyat banyak, tetap mandeg. Keadaan status quo ini menimbulkan ribuan tanda tanya sampai sekarang.

## **7. Peristiwa di Belakang Panggung Reformasi**

Agaknya memang ada yang lepas dari perhatian kaum reformis dan para mahasiswa sebagai motornya. Di tengah situasi yang terus memanas sejak menjelang pemilu 1997 oleh berbagai kerusuhan, kelaparan, bencana alam, naiknya harga-harga menyusul mengempisnya nilai Rp terhadap US\$, Indonesia sebenarnya berada dalam medan laga yang diperebutkan oleh dua kubu besar. Di

satu sisi berdiri sang diktator Soeharto, yang letih dan panik. Di sisi lain berdiri tak sabar kaum reformis, yang menginginkan perubahan di segala bidang, termasuk pergantian pucuk pimpinan negara. Di atas keduanya berdiri IMF. Lembaga ini sejak 1967 telah menopang rezim Soeharto dengan dana pinjaman dan berbagai resep. IMF yang cerdik jelas mengetahui bahwa posisi Soeharto telah berada di ujung tanduk. Mempertahankannya pasti sia-sia. Sebagai lembaga yang kaya pengalaman di dunia ketiga, IMF tahu pasti bahwa nasib kekuasaan Soeharto sudah sampai di ujung. Cepat atau lambat tampuk kekuasaan itu harus diserahkan kepada orang lain lewat jalan damai ataupun jalan-jalan lain yang lebih buruk, seperti yang menimpa diktator Syah Reza Pahlavi di Iran, Anwar Sadat di Mesir, dan Marcos di Filipina.

Belajar dari kejatuhan para diktator boneka tersebut, IMF tak mau menunggu Soeharto jatuh dulu. Sebab bila itu terjadi, maka mengatur Indonesia pasti menjadi lebih sulit. Terlalu banyak konsesi dan privilege, yang telah dimiliki selama tiga dekade, akan dikaji ulang. Bahkan bukan tidak mungkin langsung dipotong kaum reformis. Maka sebelum mimpi buruk itu menjadi kenyataan, IMF lebih dulu mendekati Soeharto, bukan untuk mempertahankannya, tetapi untuk mendapatkan konsesi lebih besar lagi. Tak peduli siapa pun nanti yang duduk di kursi kekuasaan, kaum reformis atau bukan, posisi IMF sebagai penentu arah republik tak boleh terganggu. Dengan umpan US\$ 43 miliar, lembaga internasional itu berhasil memaksa Soeharto menandatangani kesepakatan pada 20 Januari 1998. Begitulah hari itu, di belakang panggung reformasi yang terus bergolak, Presiden Republik Indonesia disodori Managing Director IMF Michael

Camdessus apa yang disebut 'Indonesia-Memorandum of Economic and Financial Policies.' Secara harfiah berarti Kebijakan Ekonomi dan Finansial Indonesia. Semuanya terdiri dari 50 paragraf, yang kemudian lebih dikenal dengan 50 poin Letter of Intent (LoI) IMF. Padahal setelah menjalankan resep-resep IMF sejak 1967-1998, Indonesia tidak tinggal landas atau menjelma menjadi negara maju dan makmur. Republik malah harus kembali ke titik nol menjelang pergantian millenium. Toh IMF berhasil menggiring Indonesia, lewat Soeharto, masuk ke putaran kedua yang lebih menyedihkan di luar panggung reformasi.

Soeharto memang tak memiliki pilihan lain. Dia mesti menandatangani kesepakatan tersebut, bila ingin mendapat bantuan. Jendral yang makin renta dan panik akibat krisis ekonomi berkepanjangan itu, geram. Itu pasti. Namun Soeharto adalah orang yang pandai menyembunyikan perasaan. Sebagaimana raja-raja nusantara tempo dulu, dengan pengalaman panjang sebagai penguasa mutlak, dia tentu yakin kesepakatan itu tak akan memiliki implikasi hukum yang memberatkan di kemudian hari. Yang penting baginya saat itu adalah keluar dulu dari krisis lewat 50 butir LoI.

Rezim orba, yang tak mau kehilangan muka, kemudian menjabarkan setiap butir kesepakatan itu lewat sebuah dewan yang diberi nama Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan (DPKEK) yang langsung dipimpin Soeharto. Seperti sedang berlomba maraton, kemudian pemerintah sekaligus meluncurkan 46 keputusan yang menyentuh pelbagai bidang dan hajat hidup rakyat, termasuk 3 Peraturan Pemerintah, 7 Keppres dan 6 Instruksi Presiden (Kontan, 26 Januari 1998).

Ke 50 poin LoI itu sendiri diejawantahkan dalam 4 kebijakan sebagai bukti kepatuhan dan good will (niat baik) kepada juragan yang powerful itu, yaitu: kebijakan moneter (10 poin), Kebijakan anggaran (13 poin), restrukturisasi finansial (17 poin) dan reformasi struktural (21 poin). Jadi seolah butir-butir itu tak datang dari juragan IMF yang menjanjikan pinjaman US\$ 43 miliar, tapi merupakan inisiatif pemerintah Indonesia. Lalu IMF tinggal menjadi 'watch dog' yang mengawasi gerak-gerik pemerintah agar tak menyimpang dari kesepakatan. Kalau menyimpang sangsinya berat, antara lain: pinjaman tak dicairkan, kehilangan kepercayaan internasional karena IMF adalah tolok ukurnya, investor luar tak masuk, dan bahkan yang sudah masuk akan ke luar. Jadi tak jauh berbeda dari raja-raja nusantara pada masa kolonial dulu.

Memang tak bisa dibandingkan 'apple to apple' apa yang terjadi di Indonesia pada penghujung abad XX itu dengan apa yang terjadi di masa kolonial. Apalagi bila diingat imperialisme modern tampil jauh lebih wangi dan memikat dibanding penjajahan model lama yang kasar. Imperialisme modern tak memerlukan pernyataan takluk atau penyerahan kedaulatan negara secara implisit seperti saudara tuanya sang kolonialis zaman baheula. Penjajah modern lebih senang tampil bak sinterklas, tapi bantuannya mesti dikembalikan berikut bunganya. Derma- wan ini tampil meyakinkan dengan konsep dan analisisnya untuk mengatur pemerintah negara sasaran. Tujuannya sama saja: mendapatkan berbagai konsesi dan keistimewaan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya lewat sumber-sumber alam buat kebutuhan industri dan kenyamanan rakyat negara-negara penyandang dana, plus pasar buat produk dan tenaga kerja mereka yang

mahal. Sebaliknya penjajah model lama tampil bak bajingan murni yang kasar dan bengis untuk mendapatkan berbagai konsesi dan keistimewaan yang diinginkannya.

Pada masa penjajahan Belanda, raja-raja di Nusantara banyak yang menandatangani kesepakatan atau perjanjian dengan pihak Belanda. Sebabnya bisa bermacam-macam, mulai dari kalah perang melawan pedagang bersenjata itu, masalah suksesi, sampai urusan ancaman keamanan dari kerajaan-kerajaan tetangga. Belanda tak mau sembarangan memberikan bantuan sebelum kedudukan yang meminta bantuan jelas. Penjajah itu terang-terangan menolak memberi bantuan kepada raja-raja yang menganggap dirinya sejajar dengan Belanda. Pendeknya ketundukan kepada pemerintah Hindia Belanda harus diakui secara eksplisit di dalam perjanjian kesepakatan, tak peduli bagaimanapun caranya. Jadi saat perjanjian itu dibuat kedudukan raja boleh dibilang sudah menjadi semacam taklukan kompeni. Implikasi dari kedudukan itu adalah butir-butir kesepakatan hampir seluruhnya ditentukan oleh Belanda dan tidak seluruhnya dipahami sang raja.

Dalam perjalanan waktu, saat para penandatangan perjanjian itu sudah tak berkuasa lagi atau sudah diganti, pemerintah Hindia Belanda dengan segala cara, termasuk invasi militer, menuntut butir-butir perjanjian tersebut dilaksanakan. Raja-raja yang melakukan hubungan dagang dengan Portugis, Spanyol atau Inggris misalnya, langsung ditekan atau diberi sanksi. Padahal sebagian besar raja-raja itu sebenarnya menganggap butir-butir tersebut tidak terlalu mengikat dan tidak pula memiliki implikasi hukum.

Contohnya tak sulit dicari. Sejarah raja-raja Nusan-

tara, mulai dari tanah rencong sampai Jawa, Bali, Lombok, Nusatenggara, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Irian Jaya (kini Papua Barat), menyimpan banyak cerita soal itu. Baiklah kita comot satu dari sejarah nusantara, yaitu Kerajaan Buleleng, Bali. Raja Buleleng pada tahun 1841 dan 1843 pernah menandatangani kesepakatan dengan pemerintah Hindia Belanda. Tentu kita tak perlu menuliskan semua butir-butir kesepakatan yang detil itu di sini, tapi dapat dipastikan perjanjian itu tak jauh beda dari apa yang telah ditandatangani raja-raja lain di nusantara, khususnya raja-raja di pulau dewata, seperti I Goesti Ngurah Kesiman, Goesti Ngurah Pemetjoetan, Goesti Gede Dangin atau Goesti Ngurah Denpasar. Agar ini tak dianggap mengada-ada, akan saya kutip butir pertama perjanjian yang ditandatangani Goesti Ngurah Kesiman, dkk dari bukunya Anak Agung Gde Agung 'Bali in de 19de eeuw': Wij bovengenoemde vorsten verklaren ons land het eigendom te zijn van het Nederlands Indisch Gouvernement. Bila di Indonesiakan kalimat itu menjadi: Kami raja-raja yang disebut di atas menyatakan bahwa negara kami menjadi milik pemerintah Hindia Belanda.

Pernyataan itu bagi raja-raja Bali sebenarnya tidak memiliki implikasi hukum. Itu cuma improvisasi yang cerdas, bila tak bisa disebut licik, dari ungkapan basa-basi lama di Bali antara dua sahabat kental. Aslinya berbunyi: Kawanku yang baik mulai sekarang saya nyatakan dengan sepenuh hati bahwa segala yang saya miliki, rumah dan tanah pertanian menjadi milikmu. Sebaliknya sang kawan akan membalas: sahabat setiaku, saya sangat berterima-kasih atas pemberianmu yang berharga ini, dan saya yakinkan kamu sampai dunia kiamat kamu

bisa memiliki semua harta benda saya. Kebiasaan serupa juga ada di Hindustan. Bahkan basa-basi ini di India ditambahkan: mulai saat ini aku akan mencium kaki ibumu, karena dia sudah menjadi ibuku juga. Utusan pemerintah Hindia Belanda H.J. Huskus Koopman dengan cerdik memainkan ungkapan ini dalam poin pertama kesepakatan tersebut dengan mengubah kata-katanya.

Dengan cerdik pula Huskus Koopman tak menuliskan timbalan ungkapan serupa di poin dua, sehingga terbaca sebagai pernyataan penyerahan kedaulatan. Duta yang cerdik ini bahkan menindaklanjutinya dengan meminta tandatangan Tjokorda Dewa Agung Poetra, raja atau susuhunan yang amat dihormati di Bali dan Lombok, sebagai tanda persetujuan. Semua itu kemudian diserahkan kepada atasannya Gubernur Jendral Peter Merkus di Batavia. Sampai Peter Merkus diganti perjanjian itu memang tak menimbulkan persoalan apa-apa di Bali. Namun ketika sebuah kapal asing bernama Atut Rahman karam di perairan pantai Karanganyar, Karangasem, dan raja Buleleng menerapkan 'hak tawan karang,' kesepakatan itu menjadi persoalan.

Hak Tawan Karang merupakan undang-undang, yang berlaku di seluruh Bali sejak zaman baheula. Undang-undang ini memberi raja dan rakyat Bali hak memiliki kapal-kapal yang karam di perairan mereka, termasuk segala harta benda yang ada di dalamnya. Pemerintah Hindia Belanda di Batavia menganggap Buleleng tak berhak lagi menerapkan hak tawan karang di wilayah kekuasaannya. Raja Buleleng yang merasa tak pernah ditaklukkan, bahkan tak pernah berperang melawan Batavia, tak merasa perlu menggubris larangan itu.

Gubernur Jendral Belanda J.C. Reynst, yang meng-

gantikan Merkus, langsung mengirim asisten residen Banyuangi J.Ravia, sebagai komisaris pemerintah, untuk meratifikasi kesepakatan yang pernah ditandatangani raja Buleleng. J. Ravia yang datang dengan kapal perang Janus ditolak mentah-mentah oleh raja dan jajaran pemerintahannya. Tak putus asa Reynst kemudian mengutus misi lain dari tingkatan yang lebih tinggi pada Mei 1845, dipimpin Resident Besuki J.F.T. Major. Ikut dalam rombongan misi genting itu Raden Toemenggoeng Ario Prawiro Adi Ningrat, regent dan kepala penghulu Besuki, yang bertugas mendekati orang-orang Bugis di Buleleng. Pangeran Syarif Algadri bertindak sebagai penerjemah. Ditambahkan dalam rombongan itu seorang letnan satu Stampa guna mencari tempat-tempat yang bagus buat mendaratkan pasukan, bila misi itu gagal. Mungkin ini bisa dibandingkan dengan pendekatan yang dilakukan AS kepada negara-negara tetangga Irak dan Afganistan sebelum negara adidaya tersebut dan sekutunya menginvasi kedua negara merdeka itu. Singkat cerita akhirnya rombongan J.F.T. Major berhasil menemui raja Buleleng I Gusti Ngurah Made Karangasem, tapi gagal mendapatkan ratifikasi. I Gusti Ketut Djelantik, perdana menteri yang cerdas dan punya harga diri, menolak meratifikasi perjanjian tersebut.

Patih Buleleng itu memandang kesepakatan tersebut sebagai pengambil-alihan kedaulatan negaranya dengan cara yang arogan dan penuh muslihat. Menurut seorang saksi mata berinisial K di majalah *De Tijdspiegel*, Gusti Ketut Djelantik berkata dalam bahasa Belanda yang fasih dan terstruktur: "Dit is absoluut niet acceptabel! Hoe kan iemand slechts door middel van een stukje papier een ander man's land in bezit nemen. Zo lang ik nog leef zal

dit niet gebeuren. Wat straks de vorst na mijn overlijden in dit verband zal doen, is volkomen zijn goed rechts. Het lot van dit vorstendom kan alleen beslist worden met de punt van de kris (Gde Agung, 1990: 72). Bila diterjemahkan secara bebas, kata-kata Jelantik berarti: "Ini mutlak tak bisa diterima! Bagaimana seseorang bisa mengambil-alih negara orang lain cuma dengan secarik kertas? Selama saya masih hidup, ini tak akan terjadi. Apa yang akan dilakukan raja dalam urusan ini setelah saya mati, itu sepenuhnya hak dia. Nasib negeri ini hanya bisa ditentukan dengan ujung keris (perang)."

Gagal membujuk raja dan patihnya itu, pemerintah Hindia Belanda kemudian mengirimkan kapal-kapal perangnya untuk menginvasi Buleleng. Raja dan rakyat Buleleng yang cuma bersenjatakan keris, tombak, dan senjata-senjata tradisional semacam itu tak mampu menghadapi tentara Hindia Belanda yang membawa meriam, granat dan peralatan pembunuh massal paling modern saat itu. Konsekuensi logis dari kekalahan perang tersebut adalah keharusan meratifikasi kesepakatan manipulatif tersebut, plus membayar pampasan perang. Raja Buleleng menyetujui semua yang disodorkan, dengan harapan Belanda cepat angkat kaki dan kembali ke Batavia. Bahkan sang raja juga membangun pangkalan militer (garnisun) buat Belanda di Buleleng sebagai bukti kepatuhannya. Namun rakyat Buleleng dan Bali, yang tak dapat menerima negerinya diperlakukan seperti itu, secara keseluruhan memboikot orang-orang Belanda dan tentara yang ditempatkan di sana.

Di dalam masyarakat Bali aksi itu dikenal dengan istilah 'puik' artinya menganggap orang yang dibenci itu tak ada. Jadi orang-orang asing di garnisun itu dianggap tidak

ada oleh penduduk setempat. Aksi ini secara diam-diam mendapat dukungan istana. Tak ada seorang Bali pun yang mau berhubungan dengan kompeni dan antek-anteknya, juga tidak mau berbicara dalam kesempatan apa pun. Bila berpapasan, orang Bali akan pura-pura tidak melihat. Bahkan mereka tak mau berdagang dengan penjajah itu, meski barang dagangannya dibayar 10 atau 20 kali harga pasar. Akibat aksi itu orang-orang di garnisun stres berat, makanan dan minuman harus didatangkan dari Jawa dan Madura. Sejarah kemudian menjadi saksi bagaimana para pemenang perang itu, tak sampai 6 bulan kemudian, angkat kaki dari Buleleng dengan perasaan sakit dan depresi.

Imperialisme model lama yang kasar memang memerlukan senjata-senjata penghancur dan pembunuh massal, dan selalu pula akan mendapat reaksi patriotis seperti itu di seluruh dunia. Namun penjajahan modern, yang motifnya juga masalah perut, sumber kekayaan alam dan pasar, karena demikian wangi dan sopannya hampir tak mengundang reaksi. Wajah bengis dan primitifnya baru terlihat, ketika berhadapan dengan pemerintah-pemerintah yang tak mempan bujukan, seperti di Korea, Vietnam, Panama, Afgansistan dan Irak. Selebihnya dia lebih sering muncul dalam bentuknya yang halus dan sopan, sehingga korbannya seakan memberikan segalanya kepada si penjajah dengan perasaan suka dan tertolong. Penjajah modern menyajikan pengambilalihan kedaulatan itu dalam paket-paket yang menarik, misalnya LoI. Letter of Intent tersebut dalam operasionalnya menjadi semacam garis besar haluan negara (GBHN) yang sangat detil dan tidak memerlukan persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Keberadaannya bahkan tidak perlu diketa-

hui wakil rakyat di lembaga-lembaga perwakilan. GBHN buatan IMF ini cuma mengikat pemerintah Indonesia dengan jaminan bantuan dan kepercayaan luar negeri.

#### **8. GBHN Super dari Bawah Meja IMF**

Sebagaimana telah disinggung di atas tadi, dengan berpegang teguh pada 50 poin kesepakatan yang disodorkan IMF, pemerintah Soeharto kemudian mengajukan 4 kebijakan ekonomi. Keempat kebijakan itu tidak dipresentasikan dihadapan wakil rakyat di DPR/MPR untuk disetujui, ditolak atau diperbaiki. Kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan negara secara keseluruhan itu cuma memerlukan persetujuan juragan IMF. Nah karena kebijakan itu memang merupakan terjemahan dari poin-poin LoI, maka sang juragan pun langsung setuju. Dalam perjalanan waktu terjemahan LoI itu memang menjelma menjadi GBHN super yang tak bisa dirubah oleh wakil rakyat. Wakil rakyat di MPR memang membuat GBHN, dan mereka pun harus diakui telah mengerahkan segenap pikiran untuk membuat rel yang bagus bagi pemerintah untuk membawa rakyat negeri ini keluar dari krisis. Namun yang dijalankan pemerintah tetap saja apa yang telah disodorkan IMF sampai sekarang. Inilah GBHN super tersebut:

#### **A. Kebijakan Moneter**

1. Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga semua jenis Sertifikat Bank Indonesia (SBI), mulai dari yang berjangka waktu satu hari hingga satu tahun.
2. BI memberi otonomi penuh pada bank-bank milik negara untuk menyesuaikan suku bunga kredit maupun deposito mereka.
3. BI memperketat likuiditas, sehingga jumlah kredit yang tersalur ke perusahaan menjadi terbatas dan suku bunga kredit akan tetap sangat tinggi.
4. Untuk mengurangi dampak buruk pengetatan likuiditas pada pengusaha kecil, akan ada program sementara. Pengusaha kecil akan mendapat kredit lewat bank milik negara dengan suku bunga murah karena disubsidi. Beban subsidi ditanggung oleh pemerintah melalui anggaran.
5. Para eksportir akan mendapat fasilitas kredit komersial.
6. Bila kepercayaan masyarakat dan nilai tukar rupiah sudah membaik, likuiditas akan diperlonggar secara bertahap.
7. BI menetapkan kebijakan moneter dengan target mempertahankan laju inflasi di bawah 20%.
8. BI membatasi pertumbuhan uang beredar (M2, uang tunai plus deposito, tabungan, dan rekening bank lain) sebesar 16% untuk 1998.
9. Ada intervensi yang sangat hati-hati di pasar uang untuk menstabilkan dan mendukung nilai rupiah.
10. BI mendapat otonomi penuh untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan moneter. Untuk mengesahkan otonomi BI, pemerintah akan mengajukan rancangan undang-undang baru ke DPR sebelum akhir 1998. Undang-undang baru ini akan mencakup pula perubahan komposisi dan mandat Dewan Moneter.



### **B. Kebijakan anggaran pemerintah**

1. Pemerintah tetap menggunakan prinsip anggaran berimbang. Yang dimaksud anggaran berimbang di sini adalah pemerintah tidak boleh berutang dari dalam negeri.
2. Akan ada kenaikan harga energi untuk mengurangi distorsi ekonomi dan memperkuat keuangan pemerintah. Mulai 1 April 1998 harga listrik dan BBM akan naik. Kenaikan harga minyak tanah dan solar akan dibuat seminim mungkin untuk melindungi masyarakat miskin.
3. Pemerintah akan menaikkan lagi cukai alkohol dan tembakau mulai 1 Juli 1998.
4. Mulai 1 April 1998, pemerintah akan mencabut semua penangguhan pajak pertambahan nilai (PPN) kecuali bila ada hukum yang mengharuskan. Jadi, listrik swasta, taksi, kedelai untuk makanan ternak, gula, barang-barang pribadi, perlengkapan kedokteran, semuanya akan terkena PPN.
5. Mulai 1 April 1998 akan ada pajak 5% untuk bensin. Pajak ini jatah pemerintah daerah.
6. Jumlah dan jenis barang yang tergolong terkena pajak barang mewah akan ditingkatkan.
7. Nilai jual obyek pajak untuk tanah dan bangunan yang terkena PBB di kawasan perkebunan dan kehutanan akan naik hingga 40%.
8. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah akan meningkatkan audit tahunan, memperbaiki audit PPN untuk menjangkau pembayar pajak potensial yang besar, dan meningkatkan penagihan tunggakan-tunggakan pajak.
9. Semua dana yang selama ini berada di luar anggaran (non bujeter) harus masuk ke dalam anggaran.

10. Pemerintah akan mempercepat pelaksanaan Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak 1997 yang mensyaratkan masuknya penerimaan non bujeter ke dalam anggaran dalam jangka waktu lima tahun. Dua rekening terbesar non bujeter, dana investasi dan dana reboisasi, akan masuk ke dalam APBN 1998-1999 yang berlaku mulai 1 April 1998. Dana reboisasi hanya boleh dipakai untuk program penghutanan kembali.
11. Pemerintah menunda 12 proyek infrastruktur besar, termasuk pembangkit listrik Tanjung Jati C.
12. Pemerintah menghentikan dengan segera segala macam fasilitas pajak, tarif bea masuk, maupun keistimewaan kredit untuk program mobil nasional Timor.
13. Pemerintah akan tetap melaksanakan penghapusan fasilitas bea masuk 0% untuk mobil yang sudah menggunakan komponen lokal 60% mulai tahun 2000.
14. Pemerintah menghentikan dengan segera dukungan non bujeter dan keistimewaan kredit untuk proyek-proyek Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN).

### **C. Restrukturisasi sektor finansial**

1. BI bekerja sama dengan Bank Pembangunan Asia, IMF, dan Bank Dunia menyusun peraturan yang seragam, transparan, dan adil untuk memecahkan masalah likuiditas dan solvabilitas (kemampuan untuk membayar semua tagihan) bank-bank swasta. Peraturan ini akan segera diumumkan.
2. BI akan menyediakan dukungan likuiditas untuk bank. Syaratnya kondisi bank tersebut membaik. Program dukungan likuiditas untuk bank ini akan tetap konsisten dengan target pertumbuhan uang yang sudah ditetapkan.



3. Pemerintah akan menjamin bahwa proses penggabungan (merger) bank pemerintah akan dipakai untuk mengurangi kegiatan operasi bank-bank yang dimerger, menjual fasilitas dan cabang-cabang yang tak perlu, mengurangi tenaga kerja yang berlebihan, menciptakan automated sistem yang ekonomis, mengoptimalkan keuntungan dari kekuatan yang saling melengkapi, dan menyiapkan lembaga untuk men-swastakan bank-bank tersebut.
4. Pemerintah tak akan menyuntik modal lagi untuk bank negara kecuali yang hendak diswastakan.
5. Sebelum swastanisasi berjalan, bank negara yang masih ada akan beroperasi berdasarkan kontrak kinerja yang rinci sebelum akhir Maret 1998.
6. Untuk mendukung swastanisasi bank BUMN, pemerintah sebelum akhir Juni 1998 akan mengajukan perubahan UU Perbankan dalam hal pembatasan kepemilikan.
7. Bank baru yang terbentuk dari merger empat bank BUMN akan dipimpin oleh tim manajemen baru. Manajemen baru ini akan mulai bekerja sebelum akhir Februari 1998 dan akan merumuskan dan menjalankan operasi sementara sampai penggabungan tersebut rampung.
8. Pemerintah mencari mitra asing untuk membantu mendapatkan investor yang berminat dalam swastanisasi bank negara. Jadwal swastanisasi bank negara ini akan ditentukan dalam konsultasi dengan IMF dan Bank Dunia.
9. Sebagai persiapan swastanisasi, bank-bank negara akan menggunakan sistem, pengelolaan portofolio, dan pemeriksaan keuangan yang sesuai dengan standar internasional. Perubahan ini akan dimulai Februari 1998 dan dijadwalkan selesai sebelum akhir Juni 1998. Dengan standar baru ini bank bisa memisah-

- kan dengan kriteria yang seragam, mana aset yang masih baik dan mana yang buruk atau macet.
10. Untuk menanggulangi kredit macet di bank BUMN akan ada rencana bantuan finansial Bank Dunia sebelum akhir Juli 1998.
11. Pemerintah akan membentuk perusahaan yang akan mengelola kredit macet bank-bank BUMN sebelum akhir Maret 1998. Perusahaan ini akan beroperasi penuh sebelum akhir Juli 1998 dan sepenuhnya berkonsentrasi untuk menagih kredit macet bank BUMN dalam jadwal yang ditetapkan.
12. Persyaratan modal minimum bank akan ditingkatkan. Modal minimum bank swasta nondevisa secara bertahap akan setara dengan modal minimum untuk bank devisa.
13. Mulai Maret 1998, ahli-ahli pengawasan bank yang bereputasi internasional akan membantu tugas pengawasan BI.
14. Pemerintah akan merevisi kerangka hukum operasi perbankan setelah mengkaji seluruh peraturan likuidasi yang juga mencakup kebangkrutan dan penutupan bank. Pengkajian ini dijadwalkan selesai September 1998. Rencana tindakan untuk merevisi kerangka hukum akan dipersiapkan mulai akhir 1998.
15. Pemerintah akan memperbaiki transparansi dan keterbukaan di perbankan. Dalam tempo kurang dari dua tahun pemerintah akan mengharuskan bank untuk menerbitkan data yang lebih komprehensif.
16. Sebelum Februari 1998 bank asing bebas membuka cabang di seluruh Indonesia. Pemerintah juga akan mengajukan ke DPR rancangan undang-undang yang menghapuskan batasan penanaman modal asing di bank-bank yang sudah go public sebelum Juni 1998.
17. Pemerintah akan menghapuskan batasan pemberian kredit oleh bank, kecuali peraturan yang memang perlu

untuk menjaga prinsip kehati-hatian bank (prudential banking) dan peraturan yang mendukung pengembangan usaha kecil dan koperasi.

#### **D. Reformasi struktural**

1. Tarif bea masuk untuk bahan makanan dipangkas menjadi maksimum 5%. Peraturan yang membatasi impor produk peternakan juga dicabut. Kedua kebijakan ini mulai berlaku 1 Februari 1998.
2. Mulai 1 Februari 1998 semua batasan impor kapal bekas maupun baru dicabut.
3. Pemerintah menghapus semua pajak ekspor yang menghambat ekspor mulai 1 Februari 1998. Sebagai gantinya, untuk melindungi lingkungan hidup, akan ada pajak sumber daya alam. Mulai Maret 1998 pemerintah akan menurunkan pajak ekspor untuk kayu gelondongan, kayu gergajian, rotan, dan mineral menjadi 10% dari harga jual.
4. Pemerintah akan menghapus semua batasan ekspor yang berbentuk kuota dalam tempo tiga tahun kecuali ada alasan kesehatan, keamanan, atau pada saat terjadi kekurangan di pasar domestik. Contohnya larangan ekspor minyak sawit akan tetap berlaku hingga akhir Maret 1998. Setelah itu larangan ekspor minyak sawit harus dihentikan. Pajak ekspor minyak sawit tak boleh lebih dari 20%.
5. Pemerintah akan mencabut larangan investasi asing di perkebunan sawit mulai 1 Februari 1998.
6. Larangan investasi asing di bidang eceran dan pedagang grosir akan dihapus sebelum Maret 1998.
7. Semua tata niaga yang membatasi perdagangan, termasuk semen, kertas, dan kayu lapis, akan dibubarkan mulai 1 Februari 1998. Contohnya semen. Tak ada lagi batasan ekspor maupun batasan perdagangan antar provinsi. Pedagang bebas mengekspor maupun menjual semen merek apa pun di

mengekspor maupun menjual semen merek apa pun di provinsi mana pun.

8. Semua Pemerintah Daerah Tingkat I dilarang membatasi perdagangan antar provinsi maupun di dalam provinsi mulai 1 Februari 1998. Contohnya pedagang boleh menjual cengkeh ke siapa pun dengan harga berapa pun. Badan Penyangga Pemasaran Cengkeh akan dibubarkan Juni 1998.
9. Sistem kuota yang membatasi penjualan ternak hidup akan dihapus September 1998.
10. Pemerintah menegaskan larangan pemungutan retribusi untuk seluruh barang ekspor. Pendapatan pemerintah daerah yang hilang akan digantikan oleh pajak bensin dan subsidi dari pemerintah pusat.
11. Monopoli Badan Urusan Logistik hanya terbatas untuk beras. Semua pabrik penggilingan tepung bebas menjual tepungnya ke mana saja mulai 1 Februari 1998.
12. Petani bebas dari keharusan "formal" maupun "informal" untuk menanam tebu.
13. Semua pedagang boleh mengimpor gula dan memasarkannya di dalam negeri.
14. Sebelum April 1998 kerangka swastanisasi BUMN harus sudah ada. Kerangka ini mencakup: kriteria untuk menentukan perusahaan mana yang akan dijual, direstrukturisasi, atau ditutup. Kerangka ini juga mengatur proses penjualan yang transparan untuk memaksimalkan perolehan dana pemerintah dan memperlakukan semua penawar dengan adil.
15. Ada 12 BUMN yang sedang disiapkan untuk go public sepanjang 1998. Kali ini, pemerintah akan menjual seluruh sahamnya, bukan lagi sebagian. Pemerintah juga akan menjual sahamnya di BUMN yang sudah go public lebih banyak lagi sampai akhirnya BUMN-BUMN tersebut sepenuhnya menjadi milik swasta.

16. BUMN yang tersisa akan dibebani target keuntungan yang sangat jelas. Semuanya akan dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat setiap tahun.
17. Pemerintah akan membuat program padat karya untuk mempertahankan daya beli masyarakat miskin di desa maupun di kota.
18. Alokasi anggaran untuk program pembangunan masyarakat akan naik.
19. Pemerintah akan segera menyusun peraturan pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup sebelum Maret 1998.
20. Pemerintah akan mengkaji dan menaikkan iuran Hasil Hutan sebelum Juni 1998. Pada periode yang sama, pemerintah akan melelang konsesi, memperpanjang masa konsesi, dan mengizinkan jual beli konsesi.
21. Untuk mengurangi polusi udara, pemerintah akan mempercepat program penggunaan bahan bakar yang lebih bersih. Misalnya bensin tanpa timbal.

Tak dapat dipungkiri 50 poin LoI yang kemudian diterjemahkan pemerintah menjadi 61 butir kebijakan di atas, memang banyak mengandung hal positif. Kemestian dibubarkannya Badan Penyangga Pemasaran Cengkeh (BPPC) bulan Juni 1998, sekadar menyebut sebagian saja, memang perlu. Juga Dihentikannya semua fasilitas pajak buat proyek mobil nasional Timor adalah benar. Lalu dimasukkannya pemasukan negara non bujeter, seperti dana investasi dan dana reboisasi, dan lain-lain ke dalam anggaran adalah langkah awal menuju tertib anggaran.

Namun apa perlunya IMF memaksa pemerintah Indonesia untuk menaikkan tarif dasar listrik dan BBM per 1 April 1998 (kebijakan anggaran poin 2), ketika daya beli rakyat sedang mengempis? Lalu mengapa pula pemerintah mesti ditekan untuk memberi kebebasan kepada bank asing membuka cabangnya di seluruh Indonesia sebelum Februari 1998? Pemerintah juga mesti membuat rancangan undang-undang yang menghapus batasan penanaman modal asing di bank-bank yang sudah go public sebelum Juni 1998 (kebijakan finansial poin 16).

Apakah IMF memang sedang menyiapkan lahan buat bank asing untuk meraih keuntungan besar dari kebangkrutan Indonesia? Sebab satu rangkaian dengan itu, setelah 16 bank ditutup, suku bunga semua jenis sertifikat Bank Indonesia, mulai yang berjangka 1 hari sampai 1 tahun, mesti dinaikkan (kebijakan moneter poin 1). Nah, ketika bank-bank domestik kehilangan kepercayaan nasabahnya, bank-bank asing mendapat limpahan dana yang luar biasa besar. Dana-dana itu semakin deras mengalir ke bank asing setelah 38 bank dibekukan, dan seterusnya, dan seterusnya. Dana ini tinggal ditempatkan saja di SBI, maka sambil tidur atau onggang-onggang kaki mereka sudah bisa meraih keuntungan, karena dalam perjalanan waktu suku bunga meroket sampai di atas 60% guna mencegah pelarian modal. Ini pada gilirannya, seperti bisa diprediksi, mengakibatkan bank tak bisa menyalurkan kredit (negative spread) dan sektor riil mati suri. Di sisi lain bank asing terus menyedot keuntungan. Akumulasi keuntungan tersebut pada gilirannya bisa dipakai membeli saham dan aset-aset yang mesti dijual murah pula sebagai dampak sampingannya.

Anehnya lagi, seperti tak yakin akan kemampuan

konsepnya sendiri tentang pengembangan nilai Rp terhadap valuta asing (valas), terutama US\$, BI masih dibukakan pintu sedikit untuk intervensi di pasar uang dengan embel-embel sangat hati-hati, untuk menjaga stabilitas nilai Rp (kebijakan moneter poin 9). Di sisi lain pemerintah dipaksa memutuskan urat dana bagi Industri Pesawat Terbang Nasional (IPTN) yang notabene adalah milik negara dan telah dikembangkan sejak 1976. Artinya setelah 22 tahun dikembangkan dengan segala daya dan dana, saat menjelang pemerintah menuai hasil lewat pesanan-pesanan domestik dan luar negeri, industri pesawat terbang nasional itu mesti dibiarkan mangkrak. Sementara 27 proyek listrik swasta, yang sarat KKN, boleh jalan terus. Padahal memberatkan anggaran belanja negara, karena harganya kelewat mahal sampai di atas harga jualnya kepada konsumen. Lalu poin 10 dari kebijakan anggaran berbunyi: pemerintah menunda 12 proyek infrastruktur besar, termasuk Pembangkit Listrik Tanjung Jati C. Kenapa IMF tidak menekan pemerintah untuk membatalkan semuanya sekalian atau setidaknya direnegosiasi agar negara tak dirugikan? Apakah karena perusahaan dari negara-negara yang tergabung dalam Consultative Group on Indonesia (CGI), Paris Club dan IMF ikut menyedot rezeki dari proyek-proyek vital itu?

Harus diakui LoI itu memang luar biasa dan mencakup hampir semua yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Dia secara terang-terangan dan kasat mata mendorong Indonesia ke jalur cepat liberalisasi ekonomi, meninggalkan ekonomi kerakyatan dan melanggar Pasal 33 UUD 1945. Lihat saja setelah mempersiapkan perangkat agar asing boleh membeli aset dan bank-bank yang akan diprivatisasi, pada poin lain pemerintah disuruh

menyiapkan lembaga untuk menswastakan bank-bank pemerintah. Pemerintah tak boleh menyuntik dana lagi kepada bank-bank negara, kecuali yang hendak diswastakan (restrukturisasi finansial poin 3 dan 4). Apa artinya itu? Lalu pemerintah diminta mengajukan perubahan undang-undang perbankan sebelum akhir Juni 1998.

Pemerintah mesti mencari mitra asing untuk membantu mendapatkan investor yang berminat dalam swastanisasi bank negara. Jadwal swastanisasi bank-bank negara ini akan ditentukan dalam konsultasi dengan IMF dan Bank Dunia (restrukturisasi finansial poin 8). Hebatnya lagi kredit macet dari bank-bank BUMN itu mesti dikeluarkan dulu dan pengelolaannya diserahkan kepada lembaga baru yang akan dibentuk sebelum akhir Maret 1998 (poin 11). Artinya asing yang akan menjadi penadah bank-bank itu benar-benar akan mendapatkan bank yang bersih. Satu napas dengan itu persyaratan modal minimum ditingkatkan dan modal minimum bank swasta non devisa secara bertahap akan ditingkatkan setara dengan bank devisa (poin 12). Itu memang kelihatan netral, tapi poin 13 berbunyi: mulai Maret 1998 ahli-ahli pengawasan bank yang bereputasi internasional akan membantu tugas pengawasan BI. Bantuan itu tidak gratis, pemerintah harus membayar mahal para konsultan asing dengan dana utang.

Cuma orang yang putus asa dan panik yang mau menandatangani kesepakatan seperti itu. Soeharto telah menandatangani. Selanjutnya setelah dia lengser, para penggantinya terus dirongrong IMF untuk merealisasi setiap poin kesepakatan tersebut seperti raja-raja nusantara dulu. Tentu masih banyak poin-poin LoI itu yang perlu dipertanyakan, karena memang tak ada hubungan-

nya dengan perbaikan ekonomi. Sekadar tambahan bisa kita sebut di sini poin 2 dari reformasi struktural: mulai 1 Februari 1998 semua batasan impor kapal bekas maupun baru dicabut. Apa perlunya? Bukankah semua negara maju dan yang ingin maju mesti membatasi impor segala macam produk yang bisa dibuat di negerinya sendiri untuk melindungi industri dalam negeri? Bukankah Indonesia sudah punya PT PAL, Kojabahari, dan lain-lain yang terbukti piawai membuat kapal, bahkan untuk keperluan negara lain?

Pada saat yang sama pemerintah didesak untuk menghapus semua pajak ekspor mulai 1 Februari 1998 (reformasi struktural poin 3). Mulai Maret tahun itu juga pemerintah didesak untuk menurunkan pajak ekspor kayu glondongan, kayu gergajian, rotan dan mineral menjadi 10% dari harga jual. Kebijakan ini telah membuat hutan Indonesia makin rusak berat akibat ekspor kayu glondongan marak lagi dalam jumlah besar-besaran. Pada saat sama industri kayu dan furniture dalam negeri meranggas kekurangan bahan baku. Juga batasan ekspor yang berbentuk kuota mesti dihapus dalam 3 tahun, kecuali ada alasan kesehatan, keamanan, atau pada saat terjadi kekurangan di pasar domestik. Mengapa? AS sendiri menerapkan kuota impor untuk melindungi industri dalam negerinya. Mengapa pemerintah Indonesia tak boleh menerapkan sistem kuota ekspor buat produk tertentu guna melindungi konsumen dalam negerinya? Larangan ekspor minyak sawit cuma ditoteransi IMF hingga akhir Maret 1998, setelah itu pengusaha bebas menjualnya ke mana saja, juga kayu lapis, semen, kertas, dan lain-lain. Tiba-tiba saja republik benar-benar jatuh miskin, karena tak ada minyak goreng, tak ada kayu, rotan, semen,

kertas, dan lain-lain. Semuanya lari ke luar negeri mengejar dolar secara legal atas restu IMF.

Lebih jauh lagi alih-alih memberdayakan pedagang eceran dalam negeri, di masa paceklik dan banjir penganggur ini, IMF malah memaksa pemerintah Soeharto untuk menghapus larangan investasi asing di bidang eceran dan grosir sebelum Maret 1998 (reformasi struktural poin 6). Sejak itu pula hipermarket asing asal Francis Carrefour dan Continent (kemudian merger menjadi Carrefour), dan hipermarket asing lainnya menyerbu kota-kota besar Indonesia. Pedagang eceran dan grosir raksasa ini, tidak saja telah menggantikan fungsi pasar karena banyaknya item produk yang diperdagangkannya, tapi sekaligus telah merebut konsumen berduit yang seharusnya berbelanja di pasar dan pusat belanja domestik.

Lalu poin 8: semua pemerintah daerah dilarang memungut retribusi untuk barang ekspor, sebagai gantinya diciptakan pajak BBM. Impor gula dibuka lebar-lebar (poin 13). Sebelum April 1998 pemerintah diminta membuat kerangka swastanisasi BUMN untuk menentukan perusahaan mana yang akan dijual, direstrukturisasi dan ditutup (poin 14). Poin 15-nya lebih hebat lagi pemerintah mesti mempersiapkan 12 BUMN untuk go public sepanjang 1998 dan pemerintah mesti menjual seluruh sahamnya, bukan lagi sebagian. Pemerintah juga diminta menjual sahamnya di BUMN yang sudah go public lebih banyak lagi sampai akhirnya BUMN-BUMN tersebut sepenuhnya menjadi milik swasta.

Tak ada seorang pun yang berpikiran jernih dan jujur yang tidak melihat ini sebagai jebakan atau penipuan, tapi siapa berani melawan juragan IMF? Apalagi bila diingat



pengusaha dalam negeri lagi kesulitan likuiditas atau dikejar-kejar kreditor, maka swastanisasi itu akhirnya bisa dibaca sebagai pengambilalihan aset-aset negara yang bagus-bagus oleh asing atas restu IMF. Hal lain yang perlu disoroti lagi adalah reformasi struktural poin 20. Di situ pemerintah diminta menaikkan iuran hasil hutan sebelum Juni 1998. Itu tentu tak masalah, tapi kalimat ikutannya jelas berbahaya dan akan menjadi bom waktu di kemudian hari. Pemerintah diminta, pada periode yang sama, melelang konsesi, memperpan-jang masa konsesi dan mengizinkan jual-beli konsesi.

Bila itu berjalan, pertanyaannya kemudian: bagaimana caranya mengontrol para pengusaha hak pengusahaan hutan (HPH) nantinya, jika konsesinya bisa diperjual-belikan? Bagaimana memelihara kelestarian hutan, bila menangkap perusak dan penjarah hutan saja tak bisa lagi dilakukan karena pemilik konsesi setiap saat bisa berganti lewat jual-beli? Probosutejo telah menjual konsesinya pada 2002 setelah dia menerima dana reboisasi Rp 100,91 miliar. Pinjaman dengan bunga nol persen itu seyogyanya dipakai buat menanam 73 ribu hektar areal konsesi hutan tanaman industri miliknya sebagaimana disepakati saat akad (1996). Probo ingkar janji. Bukannya dipakai menanam areal HTInya, dana itu malah didepositokannya di berbagai bank. Pada 22 April 2003 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis adik tiri mantan presiden Soeharto itu 4 tahun penjara, membayar uang pengganti Rp 100,91 miliar, plus denda Rp 30 juta. Dia dinyatakan terbukti korupsi dengan menyalahgunakan dana reboisasi. Probo kemudian naik banding. Pengadilan Tinggi Jakarta lalu mengurangi hukumannya menjadi 1 tahun penjara pada 29 Desember 2003. Probo kecewa,

lalu menempuh upaya kasasi. Di tingkat kasasi, MA malah menguatkan vonis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Masalah ini nampaknya belum selesai. Akan ada upaya Peninjauan Kembali (PK) dan kasus suap yang mengiringinya. Akankah Probo menyusul Bob Hasan, si raja hutan dan sempat menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada Kabinet Pembangunan VII? Ataupun dia akan dibebaskan lewat PK, karena kepiawaian sang pengacara dan keteledoran media massa yang menyulapnya menjadi pahlawan. Bila tak hati-hati orang bisa saja nantinya menyamakan Probo dengan Khairiansyah, orang KPK yang membongkar kasus korupsi dan suap di KPU. Jawaban atas pertanyaan ini akan mempengaruhi kredibilitas pemerintah SBY-JK di mata rakyat yang memilihnya. Orang akan menganggap mereka cuma perpanjangan tangan dari rezim orba Soeharto. Bila PK berhasil membebaskannya dari hukuman, maka para pembalak berdasi akan semakin merajalela. Bukan tidak mungkin apa yang ditakutkan MS Kaban, Menteri Kehutanan Kabinet Indonesia Bersatu SBY-JK benar-benar menjadi kenyataan. "Hutan di Indonesia di ambang kritis. Masa bertahannya tinggal 15 - 20 tahun ke depan. Bila tak segera ditangani, saya khawatir bencana besar akan segera terjadi," katanya beberapa 1 Juni 2007 di Medan.

Di atas semua itu dengan membaca poin-poin LoI, yang telah ditandatangani Soeharto sebelum lengser, rasanya dapat dipahami mengapa agenda-agenda reformasi yang paling esensial tak bisa berjalan sampai sekarang. Ada ganjalan, tersembunyi dalam poin-poin LoI, yang menghalangi langkah-langkah pemerintah untuk memperbaiki nasib rakyat dan mengangkat martabat bangsa.

## 9. Beberapa Bom Waktu yang Lain

Selain GBHN super ala IMF, yang bisa membuat pemerintahan pasca orba kehilangan momentum untuk mengubah keadaan dengan caranya sendiri, masih ada beberapa hal yang bakal menjadi bom waktu di kemudian hari. Swastanisasi proyek vital misalnya, yang telah ditandatangani pada masa Soeharto, bila tak cepat-cepat dinegosiasi ulang, dapat dipastikan akan sangat memberatkan anggaran belanja negara dan rakyat secara umum. Itu antara lain bisa datang lewat pintu proyek listrik swasta yang mahal dan sarat kolusi, juga tentunya lewat swastanisasi proyek air bersih. Lalu masih ada lagi soal industri kertas, yang karena kelalaian pemerintah Soeharto atau memang ada unsur kolusi di situ, telah menyebabkan karamnya BUMN Kertas dan berjayanya swasta. Daftar ini masih bisa diperpanjang dengan keruwetan di kebijakan kayu dan administrasi yang amburadul, dan lain-lain. Baiklah agar lebih jelas akan kita kupas satu per satu.

### A. Proyek Listrik Swasta

Di tengah situasi yang terus bergejolak sejak menjelang pemilu 1997 dan krisis moneter yang terus menggerus nilai Rp terhadap valas, orang dibikin geger oleh kemungkinan bangkrutnya perusahaan listrik negara (PLN). BUMN yang sangat penting ini setidaknya terbelit 3 masalah besar. Pertama, masalah utang. Sampai akhir Desember 1997, PLN tercatat memiliki utang kelewat gede sampai mencapai Rp 26,4 triliun. Dari utang sebanyak itu Rp 23,2 triliun merupakan utang jangka panjang. Sisanya Rp 3,2 triliun adalah utang jangka pendek, yang secara langsung

akan memberatkan keuangan PLN. Kedua, kerugian sebanyak Rp 1,5 triliun akibat depresiasi rupiah. Hal yang mengejutkan itu dikemukakan Menteri Pertambangan dan Energi (Mentamben) waktu itu I.B. Sudjana, Oktober 1997.

Pernyataan Mentamben kemudian dipertegas Dirut PLN saat itu ir Djiteng Marsudi pada rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR-RI (5 Desember 1997). Kondisi itu tentu amat memprihatinkan. Apalagi bila diingat pada 1996 Badan Usaha Milik Negara tersebut masih meraih untung Rp 1,2 triliun. Mengakhiri 1997, yang separuhnya dilalui di tengah krisis, laba PLN menurun tajam, sehingga tinggal sekitar Rp 301,7 miliar. Lalu persoalan ketiga yang tak kalah bahayanya adalah kebutuhan dana investasi PLN yang hingga tahun 2008 mencapai sekitar Rp 144 triliun.

Hampir tak ada orang mempermasalahkan utang PLN yang besar itu. Dana tersebut konon telah digunakan PLN untuk investasi di sektor kelistrikan, yang dulunya didanai APBN. Hanya saja untuk melunasinya pada masa paceklik, memang tidak gampang. Toh perhatian orang lebih banyak terfokus pada kemungkinan rugi sebesar Rp 1,5 triliun itu. Pertanyaannya kemudian: mengapa BUMN, yang memonopoli pasokan listrik, bisa merugi? Mana ada perusahaan monopoli merugi? Sebagai bandingan bisa kita ambil monopoli trigu yang diberikan Presiden Soeharto kepada Grup Salim (Bogasari). Setelah tiga dasawarsa berlangsung, Grup usaha ini menjelma menjadi konglomerat besar yang sulit dicari tandingannya di Indonesia dan Asia Tenggara. Masa PLN, yang memonopoli pasokan listrik, kebutuhan yang jauh lebih vital daripada trigu, bisa merugi dan nyaris bangkrut?



Toh itulah kenyatannya, PLN tahun 1998 diprediksi merugi sampai Rp 1,5 triliun. Kerugian ini akan terus membesar pada tahun-tahun berikutnya. Mengapa? Dijiteng tanpa tedeng aling-aling mengaitkan kerugian itu dengan kewajiban membeli listrik swasta yang mahal. Dia tidak mengada-ada. PLN, menurut perjanjian yang telah ditandatangani pemerintah, memang harus membeli listrik dari pengusaha swasta seharga US\$ 0,574-0,856/KWh. Padahal selama ini harga jualnya kepada konsumen cuma US\$ 0,470/KWh. Sebelum masuknya listrik swasta dengan harga segitu, PLN sudah menuai untung, karena anak perusahaan PLN PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) I dan II, yang bergerak dalam pembangunan pembangkit listrik dan memasok listrik-biasa menjual produknya kepada PLN seharga US\$ 0,350/KWh. Jadi masuknya swasta ke proyek listrik dapat dipastikan bakal mem-beratkan PLN. Bila ingin untung atau setidaknya tidak merugi saja, PLN mau tak mau harus menaikkan tarif dasar listrik (TDL). Artinya kelemahan posisi tawar PLN terhadap investor listrik swasta, pada gilirannya dibebankan kepada konsumen, ini direstui pula oleh juragan IMF lewat GBHN supernya.

Sampai akhir 1997 tercatat ada sekitar 26 proyek pembangkit listrik swasta (total kapasitas 9.675 MW), 18 di antaranya telah disetujui dibangun. Mengingat konsesi rata-rata investor listrik swasta itu 30 tahun, dapat dibayangkan berapa akumulasi kerugian PLN kelak. Nah bila nantinya semua itu dibebankan kepada konsumen, dapat dipastikan betapa beratnya beban yang harus dipikul rakyat Indonesia yang sudah melarat. Pada 1997-2002, menurut Data Consult, secara bertahap konsorsium-konsorsium listrik swasta itu akan memasok listrik ke

PLN. Meski dalam *purchase power agreement* (PPA) tercatat hanya 30% yang wajib dibeli PLN dari produksi mereka, itu tetap saja memberatkan. Apalagi bila kekuatan lobi para pengusaha listrik swasta itu berhasil memaksa PLN membeli semua.

Masuknya swasta ke sektor listrik sebenarnya tidaklah tanpa rencana. Ini adalah buah dari upaya swastanisasi yang terus menggelinding di berbagai sektor, termasuk penyediaan air bersih, jalan tol, pelabuhan, bandara, telepon, penyulingan minyak, dan sebagainya. Tidak heran bila berbagai bisnis yang dulu dimonopoli Pemerintah, karena menyangkut hajat hidup orang banyak, kini mulai dijalankan swasta. Itu sah-sah saja, selama tidak merugikan konsumen. Cuma dalam praktiknya tidak selalu begitu. Seperti telah disinggung di atas di sektor listrik, misalnya, swasta telah diizinkan membangun pembangkit listrik. Sedang pendistri-busiannya tetap menjadi monopoli PLN. Itu berarti pengusaha listrik swasta cukup membangun pembangkitnya saja. Soal pemasarannya mereka tak perlu repot-repot. PLNlah yang akan membeli semua produk mereka, dan memasarkan produk tersebut kepada konsumen. Hebatnya lagi dalam menjual listrik pun mereka tak perlu bersaing dalam masalah harga dengan PJB I dan II. Mereka boleh menetapkan tarif sendiri.

PLN nampaknya memang tidak menuntut agar swasta menjual produknya di bawah harga listrik yang dihasilkan PJB I dan II. Bisa jadi kesepakatan ditandatangani pemerintah di belakang punggung manajemen PLN. Selanjutnya dia cuma menjalankan kewajibannya untuk membeli listrik dari para pembangkit listrik swasta. Lebih jauh lagi pemerintah tidak pula menjadikan

kemampuan konsumen sebagai bahan pertimbangan. Agaknya pemerintah Soeharto menggunakan pertimbangan lain. Tidak enaknya lagi pertimbangan tersebut cuma diketahui oleh pemerintah (dalam hal ini Mentamben), PLN, dan pengusaha listrik swasta. Transparansi yang dituntut masyarakat dan konsumen nampaknya belum bisa diberikan PLN.

Banyak kalangan keberatan dengan cara jual-beli listrik seperti itu, termasuk anggota DPR RI, terutama Komisi VIII dan VI. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan pengamat ekonomi UI Faisal H. Basri masuk juga dalam daftar orang-orang yang keberatan tersebut. Mereka semua senada menengarai adanya ketidakberesan dalam penunjukan investor dan tender PLN. Yang paling vokal mengkritik Pemerintah adalah Iskandar Manji, mantan anggota Komisi VI DPR RI. Menurutnyanya dalam setiap proyek listrik swasta, selalu didapati surat dari Pemerintah untuk menyetujui PPA, dan PLN tak bisa menolaknya. Contohnya kasus PLTU Tanjung Jati C, yang ditunda bersama beberapa proyek lain akibat krisis. Penundaan ini tercantum terang-terangan dalam LoI IMF yang ditandatangani Soeharto. Melihat harga listrik swasta yang demikian tinggi itu dan bau kolusi yang menyengat, sebenarnya lebih masuk akal bila semuanya dibatalkan demi hukum. Namun entah dengan pertimbangan apa IMF cuma menjegal Proyek listrik Tanjung Jati C yang dimenangkan PT CEPA (Consolidate Electric Power Asia) Indonesia.

CEPA Indonesia adalah konsorsium yang semula memenangi tender Proyek Listrik Tanjung Jati B pada akhir 1995. Proyek Listrik Tanjung Jati C didapatnya kemudian dengan cara agak akrobatik. Ceritanya begini: pada akhir

1995, CEPA Indonesia berhasil memenangi tender Proyek Listrik Tanjung Jati B senilai US\$ 1,77 miliar. Pada saat memenangi tender anggota konsorsiumnya adalah Cepa Hongkong dan PT International Manufacturing Producer Association (Impa) Energy, milik pelobi ulung Djan Faridz yang dikenal dekat dengan mba Tutut. Pengusaha yang amat tertutup itu kadang juga suka main sinterklas-sinterklasan. Pada 17 April 1996 misalnya, dia menyumbangkan 100 unit sepeda motor kepada Pangdam Jaya waktu itu Mayjen Sutiyoso, untuk pengamanan ibukota menjelang pemilu. Nampaknya Impa Energy, milik Djan Faridz, sebagai anggota konsorsium muncul belakangan, sebab tahun 1994 konsorsium itu beranggotakan Cepa Hongkong dan PT Gunung Sewu Mulia. Menurut Sammy Supit, Direktur Impa, perusahaan yang dinakhodainya bergerak dalam bidang operating/developer pembangkit listrik dan merupakan pemasok hydro equipment terbesar di Indonesia. Bahkan PT Ciwi Kimia, kata dia, ketika membangun pembangkit listriknya (1992), membeli equipment, termasuk generatornya dari Impa.

Terlepas dari prokontra penggantian anggota konsorsium Cepa Indonesia, proyek listrik swasta pukul rata memang berbau korupsi, kolusi dan nepotisme. Indikatornya tak sulit didapat. Tinggal kita deretkan saja proyek dan angka-angka investasi proyek-proyek tersebut, maka semuanya akan terpampang jelas di depan mata. Proyek Tanjung Jati B yang katanya menelan investasi US\$ 1,77 miliar atau Rp 4,1 triliun dengan kurs waktu itu misalnya, jelas tak masuk akal. Angka itu kelewat besar untuk pembangkit listrik berkapasitas 2 X 660 MW. Sebagai bandingan bisa kita ambil Proyek Tanjung Jati A, tetangganya yang ditangani Bakrie & Brothers (BB). Proyek yang

disebut belakangan itu berkapasitas sama besar, tapi cuma menelan investasi US\$ 1,66 miliar. Jadi ada selisih sekitar US\$ 11 juta.

Tingginya angka investasi listrik swasta di Indonesia akan semakin terasa bila dibandingkan dengan proyek serupa di negara lain. Di Sual, Pengasinan-Filipina, misalnya, proyek listrik berkapasitas 2 X 609 MW, cuma menelan investasi US\$ 1,40 miliar. Sedang PLTU Shaijiao C di Guangdong RRC yang berkapasitas 3 X 660 MW, menelan investasi US\$ 1,874 miliar. Konsekuensi logis dari tingginya investasi listrik swasta di tanah air, tentu saja harga listrik yang ditawarkan ke PLN juga tinggi. Cepa Indonesia mematok harga US\$ 0,739 /Kwh, jauh di atas harga PJB I dan II (US\$ 0,470/Kwh). Toh harga patokannya masih kalah mahal dibanding tarif yang ditawarkan Paithon I milik Hasyim Djojohadikoesoemo yang mematok harga US\$ 0,856 /kwh. Jadi dari sisi harga, di antara sekian banyak proyek listrik swasta, sebenarnya yang ditawarkan BB adalah yang terendah, yaitu US\$ 0,574/kwh, meski ini pun masih di atas harga yang ditawarkan PJB I dan II yang cuma US\$ 0,350. Angka-angka itu sekaligus menunjukkan bahwa BUMN yang dikenal tidak efisien itu bisa jauh lebih efisien daripada swasta nasional yang kolutif.

Terlepas dari bau anyir KKN yang terus mengikuti proyek listrik swasta tersebut, pada 1996 Faridz bersedia kompromi dalam soal tarif. Cepa Indonesia siap menurunkan harga jualnya kepada PLN sampai menjadi US\$ 0,573/KWh atau US\$ 0,001 lebih murah daripada yang ditawarkan BB. Namun itu tidak gratis. Pelobi ulung itu memberi syarat: asal Proyek Tanjung Jati C yang berkapasitas sama, juga diberikan kepada Cepa Indonesia. Apa

artinya itu? Itu berarti harga jual listrik swasta itu sebetulnya bukan harga mati. Bila PLN atau pemerintah mau, harganya bisa ditekan, bahkan mungkin sampai di bawah harga jual PJB I dan II. Toh pemerintah tak mau melakukannya. Yang terjadi kemudian malah Proyek Tanjung Jati C benar-benar diserahkan kepada Cepa Indonesia lewat sebuah Keppres dan surat dari Mensesneg waktu itu Moerdiono.

Hebatnya lagi ketika krismon memporandakan perekonomian republik pertengahan 1997, pemerintah cepat menyelamatkan proyek listrik Tanjung Jati B dengan cara mem-buy out-nya seharga US\$ 1,1 miliar, ketika proyek itu katanya baru sekitar 87% dikerjakan. Selanjutnya proyek itu tidak lagi mengusung nama Cepa Indonesia, tapi HI Power Tubanan. Darimana pula dananya di saat paceklik? Menurut Sammy, Faridzlah yang melobi pihak Jepang agar memberikan pinjaman lunak kepada pemerintah untuk membeli proyek tersebut. Boleh jadi Sammy tidak mengada-ada. Jepang sendiri waktu itu memang sedang gencar membantu perusahaan-perusahaannya di luar negeri agar tidak bangkrut. Pendeknya pemerintah diberi pinjaman dalam rangka menolong Sumitomo Corp, yang memegang mayoritas saham proyek Tanjung Jati B. Sammy sendiri melihat itu sebagai keistimewaan Faridz. "Faridz selalu berhasil meyakinkan partner-partner luarnya, sehingga proyeknya selamat," katanya memuji ketika ditemui penulis untuk majalah SWA waktu itu.

Fakta-fakta di atas dengan gamblang membuktikan bahwa swastanisasi di bidang kelistrikan bukannya membawa berkah bagi negara dan rakyat, tapi justru membawa bencana. Sebab mahalnnya harga beli PLN kepada swasta itu lambat laun akan menguras kas PLN. Pada

gilirannya ketika PLN tak kuat lagi membayarnya, harga listrik akan dinaikkan terus. Mestinya dengan alasan kesulitan dana pembangunan akibat krismon, semua proyek listrik swasta itu bisa dibatalkan. Atau setidaknya dinegosiasi ulang sampai mereka bisa memberikan harga listrik di bawah PJB I dan II. Atau di bawah US\$ 0,350/KWh agar ekonomis.

Sebab bila pemerintah lewat berbagai Intervensinya bisa memaksa PLN membeli listrik swasta yang mahal, tentu pemerintah juga memiliki kekuatan serupa untuk memaksa swasta memberikan harga bersaing. Pada acara dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR-RI, 5 Desember 1997 Djiteng mengakui adanya tekanan dari pemerintah untuk memenangkan kelompok-kelompok usaha tertentu dalam tender listrik. "Terus terang saya susah menerangkan, tapi kira-kira Bapak tahulah apa sebabnya. Bapak bisa memperkirakan bagaimana kalau saya harus menandatangani PPA atau kontrak pembelian listrik swasta, yang harganya lebih tinggi dari harga jual PLN? Dirut kok sampai menandatangani itu? Saya bisa membayangkan, nanti pasti saya ditanya DPR. Sudah kebayang Pak. Bapak kira-kira tahulah sebabnya, kok saya teken," tutur Djiteng setengah memelas. Dia mengaku kesal terhadap tekanan semacam itu. "Tetapi Bapak bisa memperkirakan sendiri. Bahkan ketika mulai menyusun spesifikasi tender saja sudah diintervensi begini-begitu. Kami sudah diarahkan membeli barang-barang untuk kepentingan pihak tertentu. Kalaupun peserta tendernya tidak banyak, maka kami dipukul dengan harga barang," tambah orang nomor satu di perusahaan listrik negara itu kecewa, tanpa menyebut siapa yang mengintervensi.

Tak dapat dipungkiri PLN memang mendapat banyak

hambatan struktural dalam negosiasi dengan listrik swasta. BUMN kelistrikan itu tidak diberi kebebasan untuk berunding sendiri dengan investor. Padahal dengan segala keahlian dan pengalamannya, PLN lebih tahu kebutuhannya: berapa yang harus dibeli, berapa harga pantas, dan sebagainya. "Posisi tawar PLN di hadapan investor swasta dilemahkan Pemerintah sendiri. PLN banyak mengalami hambatan struktural," jelas Faisal bersungguh-sungguh. Faisal melihat akar masalahnya ada di Tim Perunding Listrik Swasta yang dibentuk Pemerintah tanpa melibatkan PLN, sehingga terjadilah transaksi antara Pemerintah dan swasta.

Anehnya, meski akar masalahnya juga diketahui manajemen, untuk mengatasi masalah yang membelitnya, PLN tak berusaha menawar harga pasokan itu dari pemasok swasta. Sebagaimana perusahaan-perusahaan negara yang lain, PLN mencari jalan aman dengan mengalihkan tambahan beban itu ke konsumen. Agaknya manajemen PLN tak punya nyali untuk menghadapi para pengusaha besar yang memerasnya atas restu pemerintah. Masuknya swasta di bisnis pembangkit listrik tidak dengan sendirinya menimbulkan persaingan sehat, sehingga konsumen mendapatkan harga lebih murah. Sebaliknya listrik swasta justru menambah beban baru. Anekan-anekan ke arah itu paling tidak tergambar dari usulan Djiteng tak lama kemudian. Untuk menghadapi belitan utang dan rongrongan investor listrik swasta, Djiteng mengusulkan 3 hal, yakni, (1) PLN dibolehkan menaikkan tarif dasar listrik; (2) PLN disubsidi; atau (3) PLN dibiarkan bangkrut.

Langkah pertama, meski juga disyaratkan Bank Dunia, mestinya bisa ditolak Pemerintah. Apalagi saat

krismon, yang telah merontokkan daya beli rakyat sampai ke titik terendah. Menaikkan tarif dasar listrik pada saat rakyat sedang jatuh miskin secara politis berbahaya. Sedang membebankan inefisiensi di PLN kepada konsumen setianya jelas tidak adil. Namun membiarkan PLN bangkrut, alternatif ketiga, tentu lebih tidak bijak. Satu-satunya jalan yang tersisa adalah memberi subsidi, alternatif kedua. Inilah solusi yang diincar PLN dan investor listrik swasta, karena aman dan tidak repot. Cuma dalam situasi sulit seperti ini, tambahan subsidi tentu akan memberatkan anggaran belanja negara. Sebenarnya ada satu alternatif lagi yang lebih rasional dan manusiawi, yaitu negosiasi ulang dengan para pengusaha listrik swasta. Proyek-proyek yang masuk lewat jalur kolusi harus dipotong atau setidaknya harganya harus bisa ditekan sampai di bawah harga jual listrik PLN kepada konsumen. Tanpa keberanian moral seperti itu PLN tetap akan menjadi sapi perahan para pengusaha listrik swasta yang serakah.

Sebaliknya bila PLN berani dan berhasil menekan harga listrik swasta dalam negosiasinya, jelas negara akan diuntungkan. Preseden itu akan mudah pula diterapkan pemerintah di sektor lain yang juga diswastanisasi, misalnya di sektor penyediaan air bersih.

## **B. Kehadiran Swasta di Sektor Air Bersih**

Sejak memasuki dasawarsa '90-an Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) terlihat gencar mengundang partisipasi swasta. Alasannya sederhana saja: PDAM kewalahan melayani kebutuhan air bersih yang terus meningkat, baik bagi perumahan maupun industri. Data dari Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum (DPU), yang meng-

urusi air bersih, dengan gamblang menunjukkannya. PDAM, yang di seluruh Indonesia berjumlah 445, sampai Desember 1997 baru bisa melayani 37,2 juta jiwa atau 18% dari total penduduk. Sisanya masih memanfaatkan sumur pompa dan air sungai. Sedang pelanggan PDAM meningkat sekitar 11,9% setiap tahun. Di ibukota negara saja atau di DKI Jakarta, misalnya, baru 40% penduduk terlayani PDAM.

Angka-angka itu jelas memprihatinkan. Karenanya kehadiran swasta dalam menyediakan prasarana air bersih tentu menimbulkan harapan. Namun kekhawatiran bahwa suatu saat PDAM akan tunduk pada investor seperti yang menimpa PLN, tetap saja ada. Pertama, karena air merupakan kebutuhan yang menyangkut hajat hidup orang banyak paling primer. Bila sedikit saja harganya bisa dipermainkan, jutaan orang akan menderita. Kedua, karena para investor tersebut umumnya merupakan pengusaha yang selama ini memiliki *bargaining position* (posisi tawar) kuat, setidaknya sama kuatnya dengan investor listrik swasta yang melumpuhkan PLN.

Lihat saja kawasan barat Jakarta, misalnya, digarap Grup Salim lewat PT Garuda Dipta Semesta, berpatungan dengan L'Oréal Paris (Prancis). Kawasan timur dikuasai Sigit Harjojudanto melalui PT Kekarpo Airindo, bekerjasama dengan Thames Water (Inggris). Di Jawa Timur Hutomo Mandala Putra (Tommy) bersama Grup Ciputra menggarap proyek Umbulan, untuk kebutuhan Surabaya dan sekitarnya. Sementara cucu Soeharto Ari Sigit menggarap proyek Karang Pilang III (Ja-Tim). Lalu di Bontang, Kalimantan Timur, Ari kerja bareng dengan omnya, Tommy. Bob Hasan dengan Grup Nusambanya menggarap proyek air bersih serupa di Balikpapan,

menggandeng North West Water.

Kehadiran asing, yang digandeng swasta nasional, di sektor penyediaan air bersih sebetulnya sangat memprihatinkan, bila tak bisa disebut melecehkan martabat bangsa. Setelah setengah abad lebih merdeka dari penjajahan asing, ternyata pemerintah negeri ini tak mampu menyediakan air bersih yang sehat buat rakyatnya. Padahal Indonesia tidak terletak di gurun sahara atau padang pasir yang gersang, tapi seluruh pulau-pulainya dikelilingi air. Datarannya bergunung-gunung dengan telaga dan danau yang bahkan tak pernah kering di musim kemarau. Sementara curah hujannya cukup tinggi. Jelas ada yang tak beres, bila urusan penyediaan air bersih ini harus diserahkan kepada investor asing dan swasta. Dengan sedikit manuver, air bersih tentu bisa berubah menjadi lahan bisnis yang sudah pasti menguntungkan.

Air, yang diberikan Tuhan gratis untuk seluruh penduduk negeri, di tangan investor lambat laun akan dirubah menjadi komoditas yang mahal. Apalagi bila di sisi lain pemerintah juga membiarkan perusahaan-perusahaan swasta menyedot air ribuan m<sup>3</sup> per hari dari gunung, lembah dan danau untuk dijual di kota sebagai air kemasan. Sebab ini bagaimanapun juga mengurangi debit air yang biasanya sepanjang tahun mengalir sawah-sawah penduduk. Dampaknya sudah sejak lama terlihat dalam bentuk pengerasan tanah-tanah sawah akibat kekurangan air, sesuatu yang bahkan di zaman penjajahan fisik pun tak pernah terjadi. Mengapa justru di masa kemerdekaan ini, pemerintah Indonesia menyerahkan urusan penyediaan air bagi penduduknya kepada swasta dan asing? Padahal teknologi sudah sedemikian canggih-

nya, sehingga memungkinkan orang-orang di gurun pun bisa menikmati air berlimpah.

Toh Kasubdit Air Bersih Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum waktu itu, Ir. Poedjastanto, CES, DEA menilai kekhawatiran itu terlalu berlebihan. Menurutnya DPU bersama jajarannya tidak begitu saja menerima kehadiran para investor. "DPU menetapkan zona-zona tempat swasta boleh ikut serta memasok air bersih, dan di mana peran swasta tidak diperlukan. Di samping itu kami juga tidak membiarkan swasta menetapkan tarifnya sendiri. Nanti hanya orang kaya saja yang bisa menikmati air bersih. Padahal tujuannya bukan itu," tutur Poedjastanto meyakinkan. "Jadi tarif sampai sekarang ditentukan DPU bersama PDAM dan pemda setempat. Tentu dengan mempertimbangkan usulan investor," tambahnya. Batasan itu diakuinya agak menghambat laju investasi swasta di sektor air bersih, tapi itu lebih baik, katanya, daripada kedodoran.

Pada 1998 tercatat ada 20 proyek air bersih yang akan digarap PDAM bersama swasta. Semuanya tersebar di 14 provinsi, termasuk megaprojek di Jakarta. Cuma rakyat sebagai konsumen tentunya tak bisa setenang Poedjastanto menghadapi swastanisasi di sektor air minum. Lebih-lebih lagi kekhawatiran mereka bukan tanpa alasan. Gejala adu otot antara investor swasta dan DPU bersama jajarannya sudah sejak awal terlihat. Contoh paling jelas adalah Proyek Umbulan. Pemerintah terbukti tidak memenangkan investor yang berani memberikan harga terendah.

Sebelum badai krisis menghantam Indonesia, Proyek Umbulan sebenarnya sudah terkatung-katung 10 tahun lebih, karena soal tarif. Sebenarnya sejak zaman Kolonial

Belanda air Umbulan memang sudah didistribusikan kepada umum, karena kualitas airnya yang bagus (steril). Proyek air bersih raksasa berkapasitas 4 ribu liter/detik ini ditenderkan pemerintah sejak 1986. Grup Bakrie pernah berminat menggarap proyek ini. Dia membentuk konsorsium Bromo bersama tiga perusahaan Inggris. Rencana Bakrie macet, karena tidak mencapai kata sepakat soal tarif. Lalu investor lain datang silih berganti: Bimantara, Petrosea, Himpurna Ruba dan Krakatau Engineering. Semuanya mentok, antara lain karena soal yang sama. Siti Hardijanti Rukmana, dengan Grup Citra Lamtorogung Persada (CLP), pernah pula ingin menyabet proyek itu. CLP, menurut CEOnya waktu itu Bambang Soeroso, memperhitungkan investasi proyek Umbulan sekitar Rp 430 miliar. CLP meminta konsesi 15 tahun, dengan pola BOT (Build Operate & Transfer). Mereka mengajukan harga ke PDAM Rp 630/m<sup>3</sup>. Sementara PDAM bertahan pada angka Rp 618/m<sup>3</sup>, maka CLP pun mentok.

Setelah putri sulung Soeharto itu mentok, putra bungusnya Tommy lantas maju bersama raja properti Ciputra. Di luar dugaan konsorsium Tommy-Ciputra berhasil mendapatkan proyek itu. Padahal tarif yang diajukannya Rp 888/m<sup>3</sup> dan konsesi 25 tahun, jauh di atas tawaran CLP. Ketika hal itu ditanyakan ke Poedjastanto, ia mengatakan secara rasional perhitungan konsorsium Tommy memang lebih masuk akal. Hebat betul! Sebuah sumber di DPU, yang tak mau disebut jatidirinya, menuturkan sebenarnya DPU lepas tangan dalam Proyek Umbulan. Keputusannya diserahkan ke Pemerintah Daerah Jawa Timur.

Masalahnya bila harga jual investor ke PDAM semahal itu, berapa PDAM harus menjualnya ke konsumen? Di

atas kertas memang belum ada masalah. Air Umbulan menurut rencana waktu itu baru mulai 1999 akan didistribusikan ke konsumen. PDAM memasang tarif bervariasi, agar terjadi subsidi silang. Untuk sektor industri Rp 2.400/m<sup>3</sup>, konsumen rumah tangga (pengguna terbesar) dikenai Rp 200-350/m<sup>3</sup>.

Tak dapat dipungkiri melihat paparan di atas, masuk akal bila semakin banyak saja orang yang mengkhawatirkan laju swastanisasi proyek-proyek yang menyangkut hajat hidup orang banyak tersebut. Toh seperti biasa protes dan keberatan itu tak digubris pemegang kekuasaan. Bahkan melihat praktiknya selama ini orang-orang yang setuju pun, semacam Faisal, ikut cemas. Bagi Faisal sebenarnya swastanisasi sangat dibutuhkan. Ada tiga hal yang dijadikannya patokan: pertama, untuk mengatasi keterbatasan dana. Kedua, menambah pemain agar tak terjadi monopoli dan harga menjadi kompetitif. Ketiga, agar kebutuhan rakyat banyak bisa lebih cepat dipenuhi dengan kualitas produk lebih baik.

Sayangnya, kata ekonom itu, Indonesia tidak memiliki *blueprint* swastanisasi. Akibatnya semua menjadi kacau dan tidak terkontrol. Yang muncul di permukaan kemudian malah pemerintah yang disetir oleh investor swasta. Swastanisasi semacam itu justru menjadi beban berat bagi negara dan rakyat. Lihat saja, PLN, ada swasta mematok harga US\$ 0,574/KWh diterima. Lalu ada yang mematok US\$ 0,645 diterima juga, dan bahkan diatas US\$ 0,739 - 0,856, PLN juga oke.

Toh dalam soal swastanisasi, Faisal menilai, DPU lebih pandai menjalankannya daripada PLN. Dalam setiap kerjasama dengan swasta PDAM selalu menyertakan saham. Ini memudahkan PDAM mengontrol, dan keun-



tungan yang diperoleh konsorsium bisa kembali ke rakyat. Hanya saja, sarannya, PDAM harus berhati-hati menerapkan subsidi silang. Jangan sampai yang ke sektor industri terlalu mahal, sehingga mereka bisa lari, dan mengebor air sendiri. Bila itu terjadi, akan berbahaya buat lingkungan. Kejadian semacam Proyek Umbulan, di mana Pemerintah memenangkan bukan peserta tender termurah, hendaknya jangan terulang. Bila itu menjadi modus, swastanisasi di sektor air pun akan membebani negara dan rakyat. Jika tak hati-hati dan cerdas mengelolanya, swastanisasi di berbagai sektor, termasuk telekomunikasi, pelabuhan, pengeboran minyak, dan sebagainya, cuma akan menguntungkan pengusaha swasta di atas kebangkrutan negara dan rakyat secara umum.

### **C. Karamnya BUMN Kertas**

Kertas memang tidak termasuk produk yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti air, listrik dan beras. Dengan kata lain kertas sifatnya tidak vital. Tanpa mengkonsumsi kertas sampai puluhan tahun pun orang tak akan mati. Cuma kalau orang mau melihat kebutuhan yang lebih luas, misalnya sampai ke soal pendidikan yang memerlukan barang-barang cetakan di atas kertas, maka kertas bisa dimasukkan sebagai produk vital lapis kedua. Apalagi bila diingat dunia pendidikan Indonesia sejak dulu telah menderita kekurangan buku. Itu pada gilirannya mengakibatkan rendahnya mutu keluaran lembaga pendidikan.

Rakyat Indonesia secara umum, akibat tekanan kemiskinan, telah memilih membeli makanan atau kebutuhan perut daripada membeli buku untuk menambah kecerdasan dan wawasan mereka. Ini seolah membenar-

kan tesisnya F Engels yang berbunyi: semakin miskin seseorang atau keluarga, maka semakin besar bagian dari penghasilannya dihabiskan untuk makan. Nah karena mencerdaskan kehidupan bangsa sudah lama diakui sebagai tugas pemerintah negara mana pun di seluruh dunia, maka Republik Indonesia juga perlu mengusahakan terbitnya buku-buku bermutu dengan harga murah. Mungkin karena pertimbangan itulah para pemimpin negeri ini sampai sekarang merasa perlu memiliki perusahaan di bidang produksi kertas. Sebab harga kertas yang murah, akan memudahkan penerbit mencetak buku-buku dengan harga terjangkau. Sebaliknya harga kertas yang mahal, akan mengerek harga buku ke langit. Rakyat yang berada di bumi tak bisa meraihnya, kecuali segelintir golongan kaya.

Di industri kertas orang berharap pemerintah bisa berperan sebagai stabilisator harga. Orang justru keberatan bila industri kertas yang dimiliki negara, alias BUMN di bidang kertas, tidak dikelola dengan baik. Atau pabrik kertasnya dikelola sedemikian rupa agar swasta bisa besar. Atau setidaknya agar orang beralih ke produk kertas swasta, seperti yang terjadi di jasa Kereta Api dan angkutan umum bus dan kapal penyebrangan Ferri.

Dibanding negara-negara jiran, seperti Malaysia dan Singapura, konsumsi kertas di Indonesia masih sangat rendah. Di negeri dengan penduduk 200 juta jiwa lebih ini konsumsi kertas per kapita/tahun cuma 14 kg. Jiran kita Malaysia melalap 44 kg per kapita/tahun. Sementara seorang penduduk Singapura melahap 190 kg/tahun. Meskipun demikian dengan penduduk di atas 200 juta, pasar dalam negeri Indonesia jelas sangat menjanjikan. Apalagi bahan baku pulpnya sendiri di sini bukanlah

persoalan. Tanpa menanam pun, hutan alamnya masih mampu menyediakan. Berpijak pada kenyataan di atas tentu tidak ada alasan bagi BUMN kertas untuk menjadi industri gurem.

Namun kenyataan memang bisa berbicara lain dari hitungan-hitungan matematis di atas kertas. Produksi kertas kita mengalami pertumbuhan 19,9% setiap tahun. Artinya pasar di dalam negeri buat produk kertas mengalami peningkatan hampir 20%/tahun. Cuma dalam menggarap pasar gede tersebut, perusahaan-perusahaan kertas plat merah alias BUMN nampaknya kalah gesit dengan perusahaan kertas swasta. Tidak heran bila di tengah laju-nya pertumbuhan industri kertas di tanah air, BUMN kertas justru mengalami kemunduran drastis. Gejala ini tidak saja ditunjukkan oleh produksinya yang kecil, kualitasnya yang menurun, dan pangsa pasar yang stagnan, tapi juga oleh menyusutnya jumlah BUMN kertas itu sendiri.

Dulu Indonesia memiliki 6 BUMN kertas: PT. Kertas Leces (Jawa Timur) berkapasitas 197.600 ton/tahun, PT. Kertas Padalarang (Jawa Barat) berkapasitas 300.000 ton/tahun, PT. Kertas Kraft Aceh (DI Aceh) 165 ribu ton, Pabrik Kertas Basuki Rahmat (Jatim) 13.700 ton, PT. Kertas Blabak (Jateng) 5.400 ton, dan PT. Kertas Gowa (Sulsel). Dalam perjalanan waktu jumlah BUMN kertas ini terus menyusut, hingga kini tinggal 3: PT. Kertas Leces (Leces), PT. Kertas Padalarang (Padalarang), dan PT. Kertas Kraft Aceh (Kraft). Sisanya sudah diambilalih swasta, kecuali PT. Kertas Gowa (Gowa) yang telah dilikuidasi. Itulah setidaknya yang diakui Dirjen Industri Hasil Hutan dan Pertanian (IHHP) waktu itu Sujata, ketika ditemui penulis bulan Februari 1998 untuk majalah SWA.

Sedang Pabrik kertas Basuki Rahmat dan Blabak, kata dia, kapasitas produksinya terlalu kecil. Sudah tidak ekonomis lagi untuk diteruskan. Pemerintah tidak punya uang untuk mengembangkannya. Akhirnya BUMN Kertas itu dilego.

Menurut Kusmadi, mantan Dirut Leces, setidaknya ada 3 faktor yang mengakibatkan suramnya BUMN kertas. Pertama, kesulitan bahan baku, terutama kertas bekas yang harus didatangkan dari luar negeri. Kedua, mesin-mesin yang dipakai untuk memproduksi kertas sudah tua. Pada gilirannya ini menyebabkan terjadinya inefisiensi, dan kualitas produksinya rendah. Ketiga, kekurangan modal. "Untuk mengatasi handicap kita dalam masalah bahan baku dan permesinan, dibutuhkan tambahan dana segar, tapi kita kan BUMN. Kita kalah cepat dengan swasta dalam mencari pinjaman bank. Prosedurnya terlalu panjang," tutur laki-laki yang kala itu baru 3 bulan menikmati masa pensiunnya. Dia tak mengada-ada, Lewat lobi yang canggih, pemain kertas swasta bahkan lebih mampu menyedot dana murah, atau yang berbunga 0%, dari pemerintah - misalnya Dana Reboisasi. Padahal kalau diberi kesempatan sama, dengan kapasitas produksi hampir 200 ribu ton/tahun dan pengalaman panjang di industri yang digelutinya, rasanya tak pantas bila Leces cuma mampu menguasai 6% pangsa pasar kertas di tanah air. Pabrik Kertas Leces mestinya bisa menjadi penguasa pasar kertas.

Jadi dapat dipastikan ada faktor lain, selain ketiga faktor di atas yang menyebabkan penguasaan pasarnya menyusut di tengah pertumbuhan industri kertas. Kesalahan manajemen pasti ikut berperan, dan itu tentunya bukan monopoli Leces. Hampir semua BUMN melakukan kesalahan serupa. Buat Leces kesalahan manajemen ini

mungkin dimulai sejak 1996, ketika BUMN kertas ini mengalihkan garapannya dari memproduksi kertas koran ke produksi kertas HVS. Padahal kertas koran memiliki pangsa pasar dan pertumbuhan pasar yang jauh lebih besar dibanding kertas HVS. Setelah Leces meninggalkan lapangan, Aspex Paper milik Bob Hasan mengambil alih tempatnya, sehingga 80% kebutuhan dalam negeri akan kertas koran kemudian dipenuhi Aspex.

Banyak kalangan menduga Leces sengaja mengalihkan bidang garapnya ke HVS, bila tak mau disebut dipaksa, untuk memberi jalan kepada Aspex menguasai pasar kertas koran. Cuma untuk membuktikan kolusi seperti ini jelas tak gampang. Diperlukan investigasi berani dan tuntas untuk memberantasnya. Buat Leces, produksi kertas korannya memang tidak 100% ditinggalkan. Perusahaan ini masih memproduksi kertas koran untuk keperluan terbatas, misalnya untuk mencetak buku-buku pesanan Dep. Pendidikan dan Kebudayaan (kini Dep. Pendidikan Nasional).

Yang juga ikut melemahkan BUMN Kertas, kata Sujata, ada dua hal. Pertama, harga sangat ditentukan oleh negara-negara Nortscan: Amerika Serikat, Canada, dan Scandinavia. Akibatnya fluktuasi harga tidak bisa diprediksi. BUMN kertas kita tidak bisa bertahan menghadapi fluktuasi harga internasional. Pukulan paling berat dirasakan 1995, ketika harga pulp (bubur kertas) naik sampai US\$ 900/ton. Dalam kondisi normal US\$ 450/ton. Kedua, BUMN kertas tidak terintegrasi dengan pulp. "BUMN kertas kita hanya mempunyai pabrik kertas saja. Kalaupun punya pulp, itu sangat kecil, seperti Leces. Karena kecil dia menjadi tidak ekonomis," katanya berlogika. Ketika ditanya mengapa BUMN tidak dilengkapi saja dengan HTI,

bila kelemahannya ada di situ. Dia menjawab cepat. "Investasi di HTI kan tidak ringan, perlu modal besar."

Leces hanyalah satu contoh dari sekian BUMN kertas yang oleng di tanah air. Toh nasibnya terhitung masih lebih baik daripada Kertas Gowa dan Kertas Padalarang. Kertas Gowa mengalami masa suram yang panjang sebelum di tutup pada tahun 1992. Dia sulit mendapatkan bahan baku bambu yang persediaannya semakin tipis. Gowa kemudian dililit utang sebanyak Rp 22 miliar. Kerugian yang dideritanya juga tidak kecil, Rp 6,6 miliar. Untuk meringankan beban Gowa lalu memberhentikan 800 karyawannya, karena tak mampu membayar gaji.

Sebenarnya pada awal 1993 pernah ada sedikit titik terang bagi BUMN kertas bermasalah itu. Aset-aset Gowa, daripada menjadi besi tua, diserahkan pemerintah kepada pabrik kertas Padalarang. Bank Dagang Negara (BDN) waktu itu siap mengucurkan dana segar. Entah karena apa, rencana itu kemudian menguap. Sebagian kalangan menghubungkannya dengan kondisi PT Kertas Padalarang sendiri yang terus merugi. Padalarang tidak mampu memberikan darah segar kepada perusahaan kertas Gowa, karena dia sendiri lesu darah.

Untuk menyelamatkan aset perusahaan tersebut pemerintah Soeharto kemudian menawarkannya kepada swasta. Seluruh aset Gowa kemudian ditawarkan Grup Sinar Mas (Sinar Mas) seharga Rp 1 miliar. Perusahaan milik konglomerat Eka Tjipta Widjaja itu siap menanggung semua utang Gowa. Sinar Mas mundur tidak beberapa lama kemudian, karena PT Mandala Gading Utama (MGU), anak perusahaan Humpus, juga berminat. Anehnya Perusahaan milik Tommy Soeharto itu pun urung mengambil-alih Gowa. "Kita sebenarnya tidak mundur.

Sebagai perusahaan swasta kita kan mau untung. Nah waktu kita hitung-hitung, ternyata nilai asetnya tidak sebesar yang ditawarkan. Di samping itu pemerintah juga mengharuskan kita memakai semua karyawan Gowa, agar tidak terjadi PHK. Dan itu berat," tutur mantan Dirut MGU Irvan Gading waktu itu. "Jadi kita tidak mundur, tapi perhitungan kita tidak sesuai dengan perhitungan pemerintah. Lalu pemerintah menarik kembali penawaran tersebut," tambahnya. Irvan mengaku sudah lupa berapa harga yang diajukan pemerintah untuk seluruh aset Gowa, dan berapa pula yang diajukan MGU. Yang jelas akhirnya Pemerintah melikuidasi BUMN kertas bermasalah tersebut.

Sementara BUMN kertas plat merah megap-megap, di sisi lain pabrik kertas di tanah air bertambah terus. Semuanya merupakan perusahaan swasta atau patungan dengan asing. Menurut catatan Dirjen IHHP sampai 1998 di Indonesia ada 75 pabrik kertas, 12 di antaranya sudah terintegrasi dengan areal HTInya. Sebelum 1996 jumlah pabrik kertas di tanah air masih sekitar 46. Pada tahun-tahun mendatang jumlahnya akan terus bertambah. Hal itu bisa dilihat dari catatan Data Consult (DC). Sejak 1996 sampai dengan Mei 1997, sedikitnya ada 26 proyek yang telah mengantungi izin mendirikan pabrik kertas. Dari semua proyek tersebut, 23 di antaranya merupakan proyek baru, dan 3 merupakan proyek perluasan. Total investasi yang diserapnya sebesar Rp 10,199 triliun dan US\$ 14,2 juta. Kenyataan tersebut membuktikan bahwa industri kertas sangat prospektif dan menguntungkan.

Pemain lama, kecuali BUMN, dan pemain baru semakin menggurita di industri ini. Lihat saja misalnya gulungan kertas Sinar Mas. Grup usaha ini masuk ke industri kertas dengan berbagai bendera, salah satu di

antaranya PT. Indah Kiat Pulp & Paper Corp (IKPP). Tahun 1998 dia sudah menjelma menjadi produsen kertas terbesar di tanah air, 734 ribu ton/tahun: kertas tulis dan cetak 344 ribu ton, kraft liner 180 ribu ton, curragating medium 100 ribu ton, dan carton box 110 ribu ton. Benderanya yang lain, PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, didirikan 1972, kini merupakan produsen kertas terbesar kedua dengan produksi 651 ribu ton/tahun. PT. Pindo Deli Pulp & Paper Mills, berdiri 1975, memproduksi 200 ribu ton/tahun. Demikian juga anak perusahaannya yang lain PT. Lontar Papyrus, PT. Onwar Paper Utama, dan PT. Sinar Dunia Makmur. Ekspansi konglomerat yang dibesarkan orde baru itu bahkan tidak berhenti di situ. Eka Tjipta, yang digelari si raja kertas, berekspansi kemudian ke Cina dan India.

Pemain lain yang namanya terus berkibar adalah Bob Hasan. Dia masuk dengan bendera PT. Kiani Kertas yang tergabung dalam Grup kalimanis. Pabrik pulp dan kertas miliknya tak pernah sepi dari kecaman, karena mendapat fasilitas bebas pajak (tax holiday) selama 10 tahun, terhitung mulai 1 September 1997. Sebelumnya dia juga disorot banyak kalangan karena mega proyeknya senilai Rp 1,63 triliun mendapat dukungan Dana Reboisasi (DR) Rp 250 miliar dengan jangka pengembalian 8 tahun. Konon sampai krisis menghantam republik, dana itu belum dicairkan Bob. Begitulah setelah berkibar di industri kayu, pengusaha yang dikenal dekat dengan Soeharto itu semakin mantap di industri kertas. Di tangannya berada PT Kertas Kraft Aceh dan Aspex Paper.

Menurut Sekjen Serikat Pekerja Suratkabar (SPS) SL Batubara, Setelah Leces meninggalkan 'lapangan permainan', atau tidak lagi memproduksi kertas koran, Aspex

Paper menguasai lebih 80% pangsa pasar kertas koran. Malang-melintangnya swasta di industri kertas dan tenggelamnya BUMN kertas, tidak membuat segalanya menjadi lebih baik di tanah air. Sebaliknya absennya BUMN kertas telah menyebabkan masyarakat kehilangan stabilisator harga, dan semakin membuka jalan kepada swasta untuk melakukan kartel. Mereka kata SL Batubara seenaknya menentukan harga. Itu menambah kesulitan perusahaan-perusahaan penerbitan, termasuk majalah dan surat kabar. Mereka mengeksport produknya ketika harga di luar tinggi. Namun manakala harga di luar lebih rendah, mereka segera berteriak meminta perlindungan (proteksi) berupa bea masuk, dan sebagainya.

Lebih jauh lagi Pengamat Ekonomi dari Indef Didik J. Rachbini melihat persoalan industri kertas berada pada 3 level. Pertama, pada level masing-masing perusahaan, misalnya Leces, Gowa, Padalarang, dan lain-lain. Keadaannya sama persis dengan BUMN lain di industri tembakau, gula, dan sebagainya. Perusahaan-perusahaan tersebut mempunyai efisiensi sangat rendah. Sehingga ketika datang pemain baru seperti Aspex, dan lain-lain. industri-industri itu tergulung. Apalagi mereka investasi besar-besaran. Persaingannya menjadi tidak seimbang. Kedua, pada level struktur industri. "Industri kertas ini sejak dulu sangat protektif, ada tarif bea masuk sampai 40% yang baru saja dilepas, dan sebagainya. Karena begitu kaku diproteksi, dia menjadi distortif. Hal ini menimbulkan inefisiensi pada skala yang lebih luas. Bila ada pendatang baru masuk dengan efisiensi tinggi, maka mereka tergulung," tutur Direktur Indef itu berteori. Ketiga, level kebijakan. Pemerintah membiarkan terjadinya integrasi vertikal, sehingga persaingan sehat tidak

tercipta.

Menurut Didik dibolehkannya integrasi vertikal pada level kebijakan, memungkinkan investor yang kuat memiliki fasilitas produksi bahan baku, dalam hal ini HPH atau HTI. Lalu dia juga memiliki pabrik pulp dan kertas, penerbit buku, sampai distributor kertasnya. Pemain yang hanya memiliki pabrik kertas, akan tidak mampu bersaing dengan mereka yang kuat itu. Sebab harga bahan baku untuk pabriknya sendiri pasti lebih murah daripada harga untuk pesaingnya. Pada level ini juga pemerintah seharusnya menerapkan Undang-Undang Industri, karena Undang-Undang Anti Monopoli (sampai saat itu) belum ada.

Perusahaan-perusahaan yang sudah menguasai pangsa pasar di atas 40%, kata ekonom yang sangat concern terhadap masalah-masalah kenegaraan itu, mesti dipecah menjadi perusahaan-perusahaan lebih kecil yang sahamnya dijual ke publik. Saran Didik tentu patut didengar pemerintah. Setidaknya dengan tindakan seperti itu bisa dicegah berkembangnya kartel di industri kertas republik, sehingga persaingan bisa berjalan fair. Lebih jauh lagi pemerintah harus berani membantu BUMN kertas yang masih bagus untuk memiliki HTI sendiri, sehingga kesulitan bahan baku tidak terulang. Pemberian areal HTI di Kalteng (150 ribu hektar) beberapa waktu lalu sudah cukup bagus. Cuma kebijakan-kebijakan penunjang lain harus segera dilansir, bila tak ingin BUMN kertas benar-benar tenggelam.

#### **D. Sumber Dana Murah bernama Dana Reboisasi**

Sejak 1989 setiap tahun Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Dephutbun) berhasil mengumpulkan DR dari

pengusaha hutan sebanyak Rp 700-900 miliar. Tahun anggaran 1998/1999, kata sebuah sumber di Dephutbun, bahkan meningkat sampai Rp 1,2 triliun. Menurut Dirjen Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan (RRL) waktu itu Harsono, alokasi DR untuk rehabilitasi lahan hanya 10% dari dana yang diterima setiap tahunnya. Bila dibiarkan nganggur saja di deposito, tentu jumlahnya sudah bertambah secara otomatis sesuai tingkat suku bunga. Cuma ini mengandung resiko yang tidak kecil. Bila hutan-hutan itu semakin gundul dan rehabilitasinya dibengkalakan, pada saatnya nanti rakyat sekitar hutan dan masyarakat umum akan menuai bencana, mulai dari tanah longsor sampai banjir bandang. Bila itu terjadi, maka kerugiannya akan jauh lebih besar daripada akumulasi dana yang terkumpul di tambah bunganya sekaligus. Rakyat di desa-desa sekitar hutan, yang tak ikut menikmati manisnya harga kayu dan pulp, akan langsung jatuh miskin dan melarat akibat kehilangan harta, benda, rumah dan anggota keluarga.

Sebagian dana itu memang tetap nganggur dan menghasilkan bunga. Sebagian lagi telah mengalir ke berbagai bidang usaha seperti pabrik kertas dan Hutan Tanaman Industri (HTI). Dana reboisasi juga mengalir ke megaprojek sejuta hektar lahan gambut, industri pesawat terbang (IPTN) dan pupuk urea tablet. Bahkan dunia olahraga juga sebagian aliran dana tersebut, misalnya Panitia SEA Games, dan lain-lain.

Anda pasti membayangkan bahwa dana itu telah mengalir ke berbagai bidang usaha melalui seleksi dan perhitungan cermat seorang Fund Manager jempolan. Atau setidaknya tidaknya Dephutbun sebagai institusi pemerintah memiliki tim khusus untuk mengelola dana

tersebut, sehingga turn over-nya bisa lebih tinggi lagi. Namun kenyataan berbicara lain. Lembaga pemerintah penguasa hutan tersebut cuma memiliki tim pemungut dana. Bahkan guna memudahkan pengusaha menyeter DR, seperti diakui Sekjen Dephutbun Oetomo S, Dephutbun menyediakan 7 buah rekening atas nama Menhutbun: dua rekening di Bank Indonesia, satu di Bank Dagang Negara (BDN), satu lagi di Bank Bumi Daya (BBD), dan tiga rekening di Bank Eksim. Soal penggunaannya Dephutbun boleh jadi penonton. "Kita ini kan hanya pengumpul saja. Soal penggunaan DR dan bunganya itu bukan wewenang kita. Semuanya dikeluarkan berdasarkan Keppres", tutur Oetomo S terus terang ketika ditemui penulis untuk majalah SWA, 17 Pebruari 1999 (pk.16.30) di ruang kerjanya.

Pengakuan Oetomo membuktikan betapa tidak berdayanya Dephutbun dihadapan Soeharto ketika masih berkuasa. Sebagai bawahan, katanya, tidaklah mungkin Departemennya menolak perintah presiden. Dengan sikap inferior seperti itu memang dapat dimaklumi bila terjadi penyimpangan penggunaan dana. Sejak dipungut 10 tahun silam, DR seolah menjadi sumber dana murah tak bertuan bagi siapa saja yang memerlukannya. Pada saat sama Soeharto menjadi satu-satunya manajer pengelola dana (Fund Manager) yang bekerja tanpa tim. Tidak heran bila untuk dapat memanfaatkan dana 'nganggur' tersebut cuma diperlukan satu syarat, punya hubungan dekat dengan sang raja.

Cara pengelolaan dana ala orba itu kemudian dihentikan Dana Moneter Internasional (IMF) yang masuk lewat pintu krisis. Dalam salah satu klausulnya IMF meminta pemerintah agar DR dimasukkan ke kas negara, persis



seperti tuntutan berbagai kalangan di tanah air dan anggota DPR sekian lama. Menurut Sekjen Dephutbun sejak adanya komitmen dengan IMF, Menhutbun Muslimin Nasution telah menyetorkan DR ke kas negara sekitar Rp 800 miliar untuk APBN 1998/1999. Sementara posisi DR per 31 Januari 1999 di rekening Menhutbun ada Rp 2,694 triliun, dan bunga jasa giro DR ada 1,923 triliun lebih. Belum ada petunjuk mau diapakan dana itu.

Penyalahgunaan DR buat kegiatan di luar reboisasi diperkirakan di atas 2 triliun. Separuh digunakan pengusaha di luar sektor kehutanan. Setengahnya lagi dipakai mendanai proyek Hutan Tanaman Industri (HTI) pulp dan non pulp, termasuk HTI trans. Semuanya berdasarkan Keppres. Menurut Oetomo dana sebanyak itu tidak seluruhnya berasal dari DR. Sebagian besar berasal dari bunga jasa giro (bujagi). "Kita cukup ketat dan hati-hati. Lihat saja cuma satu yang kita keluarkan dari DR, yaitu Rp 250 miliar untuk PT. Kiani Kertas (pabrik kertas dan pulp) milik Bob Hasan. Uang itu juga sampai saat Soeharto berhenti belum pernah dicairkan, meskipun Keppresnya sudah dikeluarkan tahun 1996", jelas Mayjen (Pur) AD yang di karyakan itu tersenyum bangga seolah telah melakukan sesuatu yang brilian. Selebihnya, kata Oetomo, yang dikeluarkan bujaginya saja.

Bagi Dehutbun karena dana untuk Kiani Kertas tidak pernah diambil, maka berarti tidak pernah dikeluarkan. Anggota komisi III DPR-RI Ir.H. Sjahrani Sjahrin, SE,MM,MBA bisa menerima jalan pikiran seperti itu. "Kalau tidak pernah diambil, ya sama artinya dengan tidak pernah keluar kan?" katanya retorik. Cuma pak wakil rakyat itu lupa bahwa duit Rp 250 miliar yang ditaruh di rekening Kiani Kertas itu pun berbunga. Bila bunganya

20% saja, maka setiap tahun dia sudah menghasilkan Rp 50 miliar tanpa kerja. Meskipun alfa terhadap hal-hal seperti itu, Syahrani punya keluhan lain yang juga perlu dipikirkan. "Kita tidak bisa mengecek apakah benar dana itu tidak pernah diambil, atau mengecek kemungkinan DR itu baru kembali setelah banyak orang menuntut. Itu menyangkut kerahasiaan bank," tambah wakil rakyat itu datar.

Terlepas dari hambatan-hambatan yang merintanginya penyelidikan di atas, adalah menarik melihat cara Soeharto mengelola DR atau keturunannya yang disebut bujagi tadi. Untuk proyek HTI pulp dan non pulp DR dikeluarkan dalam 2 bentuk: pinjaman dan penyertaan modal pemerintah (PMP). Untuk proyek yang sama sekali di luar sektor kehutanan bentuknya lebih bervariasi lagi, antara lain: pinjaman berbunga rendah sampai nol, PMP, pembelian saham, menempatkannya di bank tertentu untuk dipinjamkan ke pengusaha tertentu pula, hibah, dan lain-lain. Tergantung moednya si Fund Manajer. IPTN, misalnya, mulanya diberikan pinjaman Rp 400 miliar dengan bunga 0%. Dalam perjalanan waktu industri pesawat milik negara itu rupanya kesulitan mengembalikan pinjaman tersebut. Soeharto kemudian mengubahnya menjadi PMP lewat sebuah Keppres. Perubahan status tersebut sekaligus menghapus dana itu dari administrasi Dephutbun. Oleh karena IPTN memang sepenuhnya dimiliki negara, maka penyertaan modal itu tidak menjadi masalah. Bagaimana dengan pengusaha dekat istana yang ikut menikmati dana murah tersebut lewat jalur korupsi kolusi nepotisme (KKN)?

Ari Sigit, cucu presiden lengser Soeharto misalnya, tercatat mendapatkan dana bujagi dengan cara halus.



Mulanya Dephutbun melalui Keppres diminta menempatkan dana Rp 80 miliar di Bapindo dan BNI untuk jangka waktu 7 tahun. Dana itu kemudian dipinjamkan kedua bank plat merah tersebut kepada Ari Sigit untuk usaha pupuk urea tabletnya. Menurut Oetomo Dephutbun menerima bunga 16%/tahun. Ini tentu sangat ringan, karena suku bunga bank telah berada di atas 20%. Jadi bila duit itu didepositokan kembali di bank dengan bunga 21% saja, maka setiap tahun dia memperoleh duit gratisan Rp 4 miliar. Mulai 1999, kata Oetomo, akan dikenakan bunga komersial biasa. Dephutbun juga tidak akan memperpanjang pinjaman dana bujaginya kepada pengusaha muda itu bila waktunya sudah habis (Juli 1999).

Dana bujagi tanpa bunga juga mengalir ke Tabungan Kesejahteraan Rakyat (Takesra) Rp 100 miliar. Uang sebanyak itu sengaja dikeluarkan untuk menalangi dana yang mestinya terkumpul dari konglomerat, tapi tidak terkumpul. Dana ini seluruhnya sudah kembali. Tentu bunganya, taruhlah 20% saja (Rp 20 miliar), boleh dinikmati Takesra.

Kemudian ada lagi dana Rp 527 miliar yang dikeluarkan pemerintah untuk pengembangan lahan gambut sejuta hektar di Kalimantan tengah. Dana ini tidak bakal kembali, karena sesuai Keppresnya berstatus hibah. Akibat berbagai halangan, terutama dalam soal lingkungan, megaproyek yang melibatkan Grup Sambu (milik konglomerat Tay Juhana atau Mr. T), Grup Salim, dan Ari Sigit itu dihentikan. Akan amblaskah duit setengah triliun lebih tersebut? Sekjen Dephutbun itu cuma mengangkat bahu. "Itu bukan wewenang Dephutbun lagi untuk mengurusnya," katanya datar. Kemudian masih ada US \$ 15,1 juta dipakai pemerintah untuk membeli saham PT

DSTP (IPTN) yang akan membuat pesawat N2130. Dana itu juga tidak lagi menjadi urusan Dephutbun. Pemerintah yang mengurusnya.

Satu-satunya yang masih belum jelas statusnya dan menjadi urusan Dephutbun adalah Rp 35 miliar yang nyangkut di panitia Sea Games. Ceritanya memang agak njelimet. Mulanya Soeharto (kala itu Presiden RI) meminta Dephutbun menyetorkan Rp 35 miliar ke Sekretariat Negara (Setneg). Dari situ dana tersebut disalurkan ke Konsorsium Sea Games yang diketuai Bambang Trihatmodjo. Komisi III DPR dalam sidangnya dengan Dephutbun (8 Februari 1999) sempat mempertanyakannya. Menhutbun Muslimin Nasution lewat Sekjenjnya menjawab bahwa Departemennya tidak berwenang menagih, karena yang meminjamkan adalah Sekretariat Negara (setneg). Menurut Oetomo pinjaman tersebut berbunga 15%/tahun, tapi sampai saat dipertanyakan Komisi III, nampaknya pinjaman dan bunganya belum dibayar panitia. Demikianlah nasib DR dan bujagi yang mengalir ke sektor non kehutanan. Bagaimana nasib dana Rp 1 triliun lebih yang mengalir ke HTI?

Sebagaimana untuk sektor non kehutanan, pengeluaran DR untuk HTI juga melalui Keppres. Tidak heran bila yang mendapatkannya adalah orang-orang dekat Cendana juga. Banyak pengamat melihatnya sebagai pemusatan penyaluran. Seperti telah disinggung di atas, ada tiga jenis penggunaan DR untuk HTI. Pertama, PMP lewat BUMN kehutanan (Inhutani). Di sini pemerintah menyettor modal sebanyak pengusaha swasta menyettor-nya. Sisa modal yang diperlukan untuk proyek tersebut dipinjamkan pemerintah, setengahnya dengan bunga 0% (tidak berbunga). Itulah tipe kedua. Ketiga, separuhnya lagi

dipinjamkan pemerintah dengan bunga komersial, diambil dari rata-rata bunga bank pemerintah/tahun. Oetomo membagi investasi proyek HTI menjadi 3: sepertiganya merupakan PMP dengan pengusaha swasta. Sepertiga kedua, DR yang dipinjamkan dengan bunga 0%, dan bagian terakhir adalah pinjaman berbunga komersial.

Melihat murahnya dana tersebut, tidaklah heran bila banyak pengusaha berminat. Tidak jarang mereka yang sudah mendapatkannya pun, berusaha memanipulasi data tanaman agar bisa mengeruk dana lebih banyak lagi. Salah satunya adalah temuan BPK pertengahan tahun 1998. Dalam laporan itu PMP dan pinjaman DR kepada PT. Menara Hutan Buana (MHB) milik Probo Soetedjo tertulis sebesar Rp 73.624.996.000 (73,624 miliar lebih). Padahal bila berpegang kepada persetujuan presiden melalui surat Mensesneg No.R 82/M/Sesneg-5/1995, tertanggal 16 Mei 1995, alokasi untuk MHB hanya Rp7.033.669.000 (7,033 miliar). Jadi ada pelampauan batas anggaran sebanyak Rp 66 miliar lebih. Itu dapat terjadi karena jumlah yang dianggarkan cuma untuk areal seluas 5 ribu hektar, sementara realisasinya mencapai 38 hektar lebih. Dephutbun sendiri menganggap itu sudah bukan masalah lagi. "Kita sudah menurunkan tim ke sana, dan memang benar MHB berhasil merealisasikan tanamannya seluas itu. Jadi tidak ada masalah," jawab Oetomo ringan ketika ditanyakan masalah itu.

Selain MHB milik Probo Soetedjo, pengusaha lain yang mendapat kucuran dana murah DR adalah PT Musi Hutan Persada (MHP) milik Grup Barito (Prayogo Pangestu dan mba Tutut), Grup Kiani (Bob Hasan), Sumalindo (Astra), Grup Adindo, dan lain-lain. Untuk selanjutnya lihat tabel berikut.

### Perusahaan Pengguna DR untuk HTI Pulp dan Non Pulp 1991 - 1998

NO	Nama Perusahaan (patungan)	PMP	Pinjaman
<b>HTI Pulp</b>			
1.	PT. Musi Hutan Persada	54.863.638.000	292.012.039.408
2.	PT. Surya Hutani Jaya	25.727.096.000	199.454.901.000
3.	PT. Menara Hutan Buana	2.609.087.000?	136.319.024.000
4.	PT. Tanjung Redep Hutani	7.694.419.000	88.675.381.000
5.	PT. ITCI Hutani Manunggal	11.756.630.000	59.594.051.000
6.	PT. Adindo Hutani Lestari	18.020.211.000	58.358.787.000
7.	PT. Tusam Hutani Lestari	2.344.236.000	22.565.968.000
8.	PT. Indonusa Indrapuri	7.737.804.000	10.999.289.000
Jumlah		133.753.121.060	867.970.440.408
<b>Non HTI Pulp</b>			
1.	PT. Kiana Hutani Lestari	4.724.178.000	52.116.720.510
2.	PT. Sylva Inhutani Lampung	3.593.608.700	17.229.890.400
3.	PT. Eai hijau Hutani	3.381.742.604	8.895.556.089
4.	PT. Sumalindo Hutani Jaya	2.671.350.500	7.521.244.000
5.	PT. Dwima Intiga	1.864.144.000	5.544.584.000
6.	PT. Ryani Hutani Sipatue	1.634.948.000	3.795.519.000
7.	PT. Gyera Hutani Lestari	?	2.822.556.000
Jumlah		18.319.971.804	97.926.069.999

Sumber Departemen Kehutanan dan Perkebunan, 1999

Tidak sebagaimana lainnya investasi dalam portofolio, yang hasilnya bisa sangat besar bila ditangani Fund Manager handal, portofolio DR untuk HTI Pulp dan Non Pulp sampai 1998 belum lagi menghasilkan apa-apa. Laba (dividen) dari penyertaan modal belum ada, dana yang dipinjamkan untuk jangka waktu 8 tahun itu belum kembali, bahkan bunganya pun belum ada yang membayar. Padahal sejak tahun lalu sudah ada yang jatuh

tempo, yaitu antara lain PT Surya Inhutani, dan PT Sumalindo. Mereka, kata Oetomo, meminta roll over selama kurang lebih 2 tahun. Menurut Oetomo sebenarnya dalam proyek HTI secara keseluruhan keuntungan bukan pada tanaman, tapi pada industri pengolahan (pulp). Masalahnya sampai tiba waktu tebang dan krisis menerjang republik, belum ada yang membangun industrinya. Kealfaan atau kesengajaan itu tidak mendapatkan sangsi. Sebaliknya Dephutbun malah menyarankan para pengusaha HTI agar hasil tebangannya dijual saja ke luar negeri dalam bentuk gelondongan, suatu saran yang amat berbahaya bagi pembangunan industri pulp dan furniture negeri sendiri.

Masih dalam urusan pengusaha HTI. Utang MHP, menurut Oetomo, sebenarnya juga sudah jatuh tempo. Perusahaan milik taipan Prayogo Pangestu itu bahkan sudah menebang. Namun di sini ada sedikit masalah. "Untuk Musi Hutan Persada memang ada sedikit masalah, tapi akan kita clear-kan. Dulunya dia perusahaan swasta. Jadi sudah menanam dulu. Dua tahun kemudian baru patungan, artinya kita pinjami DR. Bila dihitung dari pinjamannya, dia belum 8 tahun. Dia baru 6 tahun. Dihitung dari umur pohonnya, dia sudah nebang. Inilah yang sedang kita cari jalan pemecahannya," ungkap kelahiran 1942 itu hati-hati. Dia menolak memberitahu pemecahan macam apa yang ditawarkan peme-rintah. Rupanya masih terlalu panjang jalan untuk memperoleh keuntungan dari obral dana nganggur yang murah itu. Jangan-jangan dengan berbagai alasan rasional akhirnya dana itu pun lenyap. Bila itu terjadi: sangsi apa yang akan dikenakan kepada para penilep dana tersebut? Kasih duit lagi seperti para bankir penelan BLBI?

### **E. Rontoknya Industri Hilir Berbahan Kayu**

Kekurangan bahan baku sejak dulu menjadi penyakit kronis industri kita. Keluhan, bila tak mau disebut jeritan, soal pasokan bahan baku ini terdengar seperti koor hampir di segala sektor. Teriakan mereka menjadi semakin jelas dan lantang setelah krisis melulur republik pertengahan 1997. Spektrumnya hampir merata di semua sektor mulai dari industri berat, otomotif, tekstil, sampai industri obat-obatan, petrokimia, dan lain-lain. Bahkan industri rumahan tahu, tempe, yang berabad-abad menjadi makanan rakyat tanpa persoalan, juga kelenger karena ternyata 30% bahan baku kedelanya masih harus diimpor.

Dengan caranya yang paling terus terang, krisis seakan memberitahu kita betapa pembangunan industri di negeri ini amat rapuh. Pahit. Memang pahit kenyataan ini, tapi lebih pahit lagi bila melihat industri mebel dan kerajinan pun mengalami nasib serupa. Padahal bahan bakunya berlimpah, dan Indonesia sendiri merupakan pengekspor kayu dan hasil hutan terbesar di dunia. Bahkan yang masih berbentuk gelondongan pun diekspor secara legal, maupun sembunyi-sembunyi, hingga menimbulkan kerusakan hutan luar biasa dan menjadi sumber bencana di masa depan, seperti bom waktu. IMF, yang mestinya bisa mencegah perusakan hutan, malah memaksa pemerintah melegalkan ekspor kayu log (gelondongan) lewat LoI agar pemerintah bisa bayar utang. Dibukanya kembali ekspor kayu log itu pada gilirannya memperparah nasib industri furniture dan kerajinan Indonesia akibat kekurangan pasokan bahan baku. Marilah kita ambil kasus Industri furniture dan kerajinan yang menggunakan bahan baku kayu jati. Kasus ini amat menarik. Dia bisa menjadi

cermin dari industri lain di Indonesia, yang bahan bakunya disediakan alam, tapi peremajaannya dilupakan.

Industri mebel dan kerajinan yang menggunakan bahan baku kayu jati setidaknya memiliki empat keluhan. Pertama, semakin seretnya pasokan. Kedua, walaupun ada, harganya terus naik dari tahun ke tahun. Ketiga, sistem distribusi yang sering lebih menguntungkan pedagang daripada pelaku industri. Keempat, hadirnya pengusaha asing. Semuanya mengakibatkan banyak pemain di sektor ini limbung, terutama yang modalnya pas-pasan. Menurut Direktur PT Debindo ir Padmiarso peluang bisnis industri mebel nasional cukup besar. Namun peluang itu tidak bisa dimanfaatkan pengusaha akibat melonjaknya harga bahan baku kayu jati dan meranti sampai 300% sejak krisis. Itu diungkap Padmiarso dalam sambutan pembukaan pameran Furniture & Interior Expo, 25 Juli 1998 di Jakarta.

Seakan mewakili para pengusaha mebel dan kerajinan di tanah air, Padmiarso menilai kenaikan harga kayu jati dan meranti sudah tidak wajar lagi. Itu terjadi akibat sistem distribusinya tidak efisien. Pemerintah bukannya memasoknya langsung ke industri mebel dan perajin, tapi melalui lelang kepada pedagang. Pedagang kemudian mendistribusikannya ke industri mebel dan perajin dengan harga yang tentukannya sendiri. Itu sebabnya pengusaha kecil-menengah, yang bermodal pas-pasan, tak mampu bertahan. Bahan baku kayu jati dan meranti dilalap perusahaan besar bermodal gede, termasuk pengusaha industri mebel milik asing - yang bebas beroperasi dan mulai ikut berproduksi di Jepara. Kebebasan itu memberi peluang kepada pengusaha asing menjadi eksportir, importir, dan pengusaha besar

sekaligus di Indonesia dan di negerinya sendiri. Bila pemerintah tidak segera membenahi distribusi dan menindak saudagar asing yang kebanyakan berbisnis dengan visa turis, pengusaha industri mebel dan kerajinan jati dalam negeri akan mati satu per satu.

Namun Ketua Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) M. Jalal Kamal tidak terlampaui risau melihat perkembangan yang tidak menggembirakan itu. Ketika ditemui penulis untuk SWA pada 16 September 1999, dia menjelaskan sebenarnya ada dua cara yang ditempuh Perum Perhutani dalam mendistribusikan jati. Pertama, dengan mekanisme jatah. Kedua, melalui lelang. Selanjutnya lelang dibagi dua: lelang besar dan lelang kecil. Lelang besar, kata dia, digelar buat produsen mene-ngah ke atas. Sedang lelang kecil buat perajin kecil di wilayah (rayon) mereka, misalnya di daerah sentra produksi kayu Jepara (Jateng) dan Pasuruan (Jatim).

Pernyataan Jalal dibenarkan Iskandar, Direktur perusahaan keluarga PT Makrowood - produsen perangkat mebel untuk taman, kolam renang, dan sebagainya. Dia sendiri mengaku tak pernah berburu jati buat bahan baku produk gardennya di pelelangan. Padahal Makrowood mengeksport 4 kontainer garden/bulan kepada pembelinya di Italia, seharga US\$ 50-60 ribu/kontainer. Untuk memenuhi pesanan itu, Makrowood butuh 600 m3 kayu jati/semester atau 1.200 m3/tahun. Separuh dari kebutuhan bahan baku tersebut, diperoleh produsen perangkat mebel taman ini lewat mekanisme alokasi (jatah). Sisanya dibeli pengusaha kelahiran Kudus (1938) itu di pasar bebas.

Harganya, menurut Bos Makrowood itu, bervariasi tergantung jenis kayu (gelondongan dan gergajian) dan kualitasnya (fenier, prima, hara, ekspor 1,2,3, dan

sebagainya). Gelondongan dibandrol Rp 3-5 juta/m<sup>3</sup>, dan gergajian bisa sampai Rp 15 juta ke atas untuk kualitas terbaik (fenier). Itu harga alokasi dari Perhutani. Sedang harga di pasar bebas buat jenis yang sama bisa lebih tinggi 20%. Padahal kualitasnya masih di bawah Perhutani. Toh Makrowood tidak mau mengganti bahan bakunya dengan kayu jati muda atau kayu lain. Alasannya? Garden, kata Iskandar, selalu diletakkan di taman atau di luar rumah. Jadi diperlukan bahan jati yang tidak memuai dan tidak menciut oleh cuaca panas dan dingin.

Berbeda dari Makrowood yang mendapat alokasi separuh dari kebutuhan bahan bakunya, produsen mebel PT Sweetroom memburu seluruh bahan bakunya di pasar bebas. Perusahaan ini, menurut catatan Asmindo, merupakan salah satu produsen mebel jati besar di Jakarta. Sweetroom, kata Direktornya Suharman, memproduksi perangkat mebel berkualitas tinggi (high quality) sejak tahun '80-an. Produksinya 80% dipasarkan di dalam negeri. Sisanya diekspor ke Jepang, Australia, Singapura, negara-negara Eropa, dan Amerika Serikat. Suharman menolak menyebutkan berapa produksinya per bulan, dan berapa volume serta nilai eksportnya. "Kita ini berdasarkan job-order. Jadi enggak tentu. Lagipula bila produk perusahaan lain satu kontainer bisa memuat puluhan perangkat mebel, untuk produk kita satu perangkat mebel belum tentu bisa dimuat dalam satu kontainer," jawabnya berkilah. Cuma ada satu hal yang membuatnya galau, yaitu perusahaannya sampai saat ini dianggap belum layak mendapatkan alokasi bahan baku jati dari Perhutani. Eksekutif Sweetroom itu menengarai ada mavia yang bermain di situ, karena kriterianya tak jelas.

Bila produsen sekelas Sweetroom saja mengeluh soal

alokasi dan pelelangan bahan baku jati, tentu di tataran pengusaha kecil persoalannya menjadi semacam alarm. Sebagai contoh bisa kita lihat teriakan nyeri perajin mebel ukir Jepara. Perajin, yang biasanya tegar karena produknya banyak dibeli asing (menembus 37 negara, 800 petikemas/bulan, senilai US\$ 15.000/petikemas), itu nampaknya mulai keteteran. Ini terbukti pada dialog mereka dengan jajaran Depperindag 17 Juli 1998. Menurut juru bicara mereka Arifin Mubaroq, kenaikan harga kayu jati tidak wajar. Dalam waktu 3 bulan harga kayu jati berdiameter 30 cm naik dari Rp 1,2 juta menjadi Rp 2 juta/m<sup>3</sup>. Yang ukuran 40 cm naik dari Rp 1,8 juta menjadi Rp 3,5 juta/m<sup>3</sup>. Harga lelang itu disinyalir telah dimainkan mavia untuk mengambil keuntungan besar tanpa memeras keringat.

Di sisi lain langka dan mahalnyanya bahan baku kayu jati ini saat permintaan mebel dan barang kerajinan meningkat, telah mengakibatkan perburuan kayu jati oleh pengusaha dan pedagang menjadi seru. Pengusaha Jepara melintas ke Jawa Barat atau Jawa Timur. Demikian pula pengusaha Jawa Timur mencari kayu sampai ke propinsi lain. "Kami sudah berusaha membeli dari Perum Perhutani, tapi memang tampaknya persediaan jati terbatas," kata seorang pengusaha mebel di Rawamangun bernama H. Selamat. "Yah saya cari ke tempat lain sampai ke KPH (Kesatuan Pemang-kuan Hutan) Indramayu, Wonogiri, dan lain-lain. Pokoknya mesti dapat," tambah pengusaha mebel itu.

Dalam upaya berburu bahan baku jati ini, kekuatan modal akhirnya menjadi penentu. Yang tidak mampu membayar mahal terpaksa menolak order, mengganti bahan bakunya dengan kayu jati muda, atau dengan kayu

lain, misalnya mahoni, akasia, dan lain-lain. Resikonya mutu menurun. Hal demikian banyak dialami pengusaha mebel dan kerajinan kecil. Seorang pengusaha mebel dan kerajinan jati asal Sumedang, H. Edi, terus terang telah mengganti bahan mebel dan kerajinannya dengan akasia mangium. Penggantian bahan baku itu, kata dia, tidak dilakukan diam-diam. Kepada pembeli setianya di manca-negara, dia tanyakan dulu apakah mau membeli mebel dan kerajinan dari akasia mangium yang harganya lebih murah. Bila pembeli setuju baru Edi mengirimnya. Ini bukan tidak memiliki konsekuensi. Bahkan konsekuensi negatifnya sudah mulai terlihat misalnya di Jepara. Indikasinya adalah pengembalian mebel dan kerajinan Jepara dari buyer Eropa. Mutunya dianggap tidak memenuhi standar lagi. Gejala ini dikemukakan Ketua DPRD I Jateng drs. Endro Suyitno bulan Juli 1998. Meskipun belum menjadi mode, katanya, gejala re-ekspor mebel tersebut tidak boleh dianggap remeh.

Meskipun tidak dapat menyebut angka pasti, Asmin-do menyadari adanya penurunan kinerja industri mebel dan kerajinan. Anggota Asmino ada sekitar 500 - 600 perusahaan. Dari jumlah itu lebih seratusnya adalah koperasi. Ketua Asmino itu mengakui memang banyak masalah di industri mebel dan kerajinan, tapi dia yakin perusahaan mebel dan kerajinan jati yang berorientasi ekspor akan survive. Pada setahun pertama krisis peng-usaha ekspor bisa menanggung untung sampai 4 kali lipat. Sekarang mungkin 20-30% saja, tapi bila dolar di bawah Rp 7.000, mungkin banyak yang sekarat," paparnya tanpa menunjukkan bagaimana dia menghitungnya. Dia mempre-diksi produsen mebel dan kerajinan yang cuma mengan-dalkan pasar domestik akan menemui banyak kesulitan,

karena pasarnya menciut sejak krisis pertengahan 1997. Orang penting Asmino itu mengaku tidak tahu sudah berapa anggotanya yang lengser akibat kesulitan bahan baku, karena belum didata kembali. Namun pendatang baru, kata dia, juga tidak sedikit. Jalal mencium gejala masuknya orang-orang yang dulu bermain di properti ke industri mebel.

Namun ada gejala lain, yang juga tak bisa dianggap remeh oleh pelaku bisnis, pemerintah, dan masyarakat. Gejala itu berupa pencurian kayu jati yang mulai marak sejak krisis, dan berlangsung terus tanpa bisa dibendung. Sekadar menyebut sebagian saja, pada Januari - Juli 1998 jumlah kayu jati yang hilang telah mencapai 92 ribu pohon (senilai Rp 1,1 miliar). Itu berarti meningkat 30% dibanding periode sama 1997. Untuk bulan Juni-Juli 1998 jumlah yang dijarah mencapai sekitar 20 ribu pohon (Rp 270,7 juta). Itu baru yang di daerah Jateng. Temuan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Mitra Meru Betiri (MMB) di Jawa Timur lebih seram lagi.

Dalam laporannya tahun 1998 MMB mencatat dari 1.090 ha hutan jati di desa Curahnongko, Sanenrejo, Andongrejo, dan Curahtakir Kecamatan Tempurejo yang berada sekawasan dengan Blok Wonowiri, kini tinggal 400 ha saja. Selebihnya sudah dijarah. Anehnya, menurut koordinator MMB Ibnu Sutowo (mahasiswa Fak. Pertanian Univ. Jember), puluhan truk pengangkut jati gelondongan curian itu, dalam perjalanan ke tempat penampungan di Pasuruan bebas saja melalui pos-pos penjagaan Jaga-wana. Dalam laporan itu pula MMB mensinyalir adanya kong kalikong antara penjarah dan aparat.

Tudingan itu dibantah habis-habisan oleh aparat Jagawana. Menurut mereka yang terjadi adalah petugas



Jagawana di Wono-wiri, yang jumlahnya cuma 15 orang, tidak mampu menghadapi penjarah yang jumlahnya 200-300 orang. Sekadar melengkapi, pada 14 Septeber 1999, petugas Polwil Surakarta untuk kesekian kalinya menggagalkan pengiriman kayu jati ilegal ke Solo. Selain menangkap pelaku, Kdy (sopir truk pengangkut), polisi juga mengamankan barang bukti berupa 24 batang pohon jati berdiameter 35 - 40 cm.

Seperti bertiup bersama badai krisis yang membuat jutaan orang jatuh miskin dan LoI yang membuka kembali ekspor kayu glondongan, pencurian kayu jati langsung marak. Penebangan liar meluas sampai ke taman nasional. Penjarahannya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, pada gilirannya ikut mengakibatkan langkanya bahan baku industri mebel dan kerajinan. Pemicunya apalagi kalau bukan kebutuhan perut yang tak bisa ditunda. Saat mata pencaharian tak ada dan harga-harga kebutuhan hidup membubung tinggi, mencuri milik negara tentu sah-sah saja bagi mereka. Toh para bankir juga menjarah uang negara (BLBI) dan uang nasabah tidak apa-apa. Apalagi harganya lumayan mahal, menjanjikan keuntungan besar, dan menjualnya gampang.

Di sisi lain pencurian kayu telah mengakibatkan menurunnya produksi kayu jati Perum Perhutani. Yang paling jelas adalah di Jateng. Menurut catatan Perhutani pada 1997 Perum Perhutani I Jateng memproduksi 460 ribu m3 kayu jati dari 20 KPH. Pada tahun 1998 produksi melorot menjadi 381 ribu m3. Pada 1999 Perhutani memproyeksikan produksi hanya 310 ribu m3. Sementara itu Jatim memproduksi sekitar 300 ribu m3 kayu jati per tahun. Pada saat sama kebutuhan kayu jati di kedua kawasan tersebut sekitar 1,2 juta m3/tahun. Jadi, akan

ada kekurangan bahan baku hampir 600 ribu m3 kayu. Bagaimana mengatasinya?

Bila pemerintah tidak segera membenahi pengelolaannya, dan menegakkan supremasi hukum kepada siapa saja yang melakukan pencurian dan perusakan hutan jati, dapat dipastikan dalam waktu tidak lebih 10 tahun hutan jati kita akan habis. Pemberdayaan lahan gundul menjadi hutan jati seluas 40 ribu ha/tahun, yang dilakukan Perum Perhutani, tentu akan kalah cepat oleh keserakahan pengusaha dan aparat. Dampak bawaannya adalah bencana alam dan rontoknya industri hilir jati.

#### **F. Masalah-masalah Administrasi**

Apa bedanya negara-negara maju semacam Uni Eropa (UE), Amerika Serikat (AS) dan Jepang dengan Indonesia? Jawaban atas pertanyaan sederhana ini jelas tak sederhana. Terlalu banyak indikator yang mestik dipajang, sehingga orang yang biasanya cuma merasakan bedanya, menjadi benar-benar tahu dan mengerti. Toh dari semua indikator pembeda yang mungkin disajikan, orang masih bisa memerasnya dengan sedikit jenaka. Di negara-negara maju administrasi adalah bagian dari solusi. Sedang di Indonesia administrasi menjadi bagian dari problem.

Buktinya tak sulit didapat. Lihat saja misalnya pembagian subsidi langsung tunai (BLT). Untuk memudahkan menjangkau mereka yang berhak sampai ke pelosok-pelosok tanah air, pemerintah menyerahkannya lewat PT Pos Indonesia. Ini tentu merupakan pilihan tepat, mengingat jaringan Kantor Pos sudah menjangkau seluruh penjuru republik. Saat membagikan kepada orang per orang, petugas kantor pos mewajibkan mereka membawa kartu tanda penduduk (KTP). Ini untuk menghindari



adanya orang-orang nakal yang mau mengambil berkali-kali. Di sisi lain petugas kantor pos yang sudah sibuk itu tentu mesti membatasi waktunya agar pekerjaan pokok mereka tak terbelengkalai, misalnya dari 5-12 Januari 2006. Itu semua sah-sah saja. Memang seharusnya begitu.

Namun petugas kadang bertindak terlalu jauh, sehingga mengecek sampai ke masa berlaku KTP. Ketika didapati masa berlaku KTP seseorang telah habis, bagian dia tak jadi dibagikan, meski KTP itu asli dan dibawa oleh pemiliknya sendiri. Dia diminta petugas kantor pos untuk memperpanjang KTPnya dulu. Maka urusan pun menjadi makin panjang, sebab dia mesti kembali dari bawah Rt, Rw, Kelurahan. Petugas keluaran kemudian membawanya ke kecamatan. Selesaiannya bisa seminggu, bisa sebulan, bisa berbulan-bulan, tergantung 'moed' si petugas. Ketika KTP baru selesai, pembagian BLT telah berhenti. Dia bisa menunggu 3 bulan kemudian.

Itu baru satu soal. Di balik itu masih banyak urusan yang sama ruwetnya, misalnya urusan surat kelakuan baik dan surat-surat lain yang berhubungan dengan lamaran kerja, perguruan tinggi, dan segala macam tes buat menjadi pejabat publik. Meski telah memiliki KTP, orang tetap juga harus melewati Rt, Rw, kelurahan, dan kalau KTPnya habis masa berlakunya, prosedurnya kembali lagi dari nol. Pertanyaannya kemudian penduduk atau warga-negara mana dia, ketika seseorang tidak mempunyai KTP atau KTPnya sudah kedaluwarsa? Mengapa pula KTP dibatasi waktunya 5 tahunan? Aturan ini mungkin baik buat warganegara asing yang tinggal di Indonesia. Di negara-negara UE dan AS para warga asing yang sudah menjadi penduduk setelah 5 tahun tinggal di negeri itu secara legal, memang mendapat semacam green card

yang mesti diperpanjang tiap tahun. Setidaknya orang tersebut setiap tahun harus berada di negeri itu selama beberapa hari. Pokoknya dia mesti setor muka sebagai bukti bahwa dia masih penduduk negeri itu.

Sedangkan bagi warganegara sendiri, tak ada kewajiban itu. Di Belanda, misalnya, menjelang usia 18 tahun seorang warga akan mendapat surat panggilan dari Stadhuis (Kota praja) untuk mengambil paspor. Itu berlaku seumur hidup, kecuali suatu saat orang tersebut menyatakan diri melepas kewarganegaraannya untuk menerima paspor negara lain atau dia memilih menjadi stateless (tanpa kewarganegaraan). Ketentuan ini membebaskan warga Belanda dari urusan KTP dan administrasi lainnya yang njelimet seperti warga Indonesia. Dalam urusan apa pun orang Belanda cukup menyebut nama dan tanggal lahirnya di hadapan petugas administrasi, maka semua keterangan tentang dirinya akan tampak di monitor komputer petugas. Soal kartu identitas, orang bisa menunjukkan apa saja yang menunjukkan identitasnya, misalnya: kartu mahasiswa, kartu perpustakaan, surat izin mengemudi, kartu pegawai, dan lain-lain.

Cuma kartu mahasiswa, kartu perpustakaan, kartu pegawai, dan yang semacam itu tak bisa dipakai sebagai ID Card seumur hidup, karena ada batas waktunya. Orang yang sudah tamat dari Rijks Universitas Leiden, misalnya, tak mungkin menggunakan kartu mahasiswanya terus. Juga mereka yang bekerja di perusahaan atau lembaga tertentu, tak diperkenankan menggunakan kartu kepegawaianya terus setelah dia pensiun atau berhenti dari pekerjaannya. Namun paspor boleh dia gunakan terus sampai masuk liang lahat. Di Indonesia warga yang sudah berumur 60 tahun ke atas, baru boleh memiliki KTP yang

berlaku seumur hidup. Ini menggelikan dan tentu harus segera dibenahi. Setidaknya agar rakyat negeri ini bisa lebih tenang dan terhormat. Petugas kelurahan biar menyediakan formulir dan KTP untuk mereka yang menginjak dewasa.

Soal surat kelakuan baik, biarlah mutlak menjadi urusan polisi. Orang cukup datang ke kantor polisi terdekat dari tempat tinggalnya untuk mendapat surat kelakuan baik dengan menunjukkan KTP. Polisi tinggal memeriksa catatan kriminalnya. Kalau bersih, harus diberikan. Untuk apa memperpanjang prosedur administrasi, kalau dalam praktiknya semua bisa diatur dengan uang pelicin. Untuk menjadi pejabat publik, seperti anggota komisi pemilihan umum, komisi yudisial, calon anggota legislatif, komisi rekonsiliasi dan hak asasi manusia, dan lain-lain sebenarnya tidak perlu membuat persyaratan administrasi berlapis-lapis yang tidak terlalu perlu dan menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.

Toh semua orang mafhum bahwa surat-surat itu bisa diusahakan, bahkan tanpa orang yang bersangkutan berkeringat. Apalagi selalu saja terbukti penjahat lama, penjahat politik, penjahat ekonomi, dan lain-lain, yang mungkin saja mau ditangkal lewat prosedur bertele-tele itu, bisa mendapatkan surat-surat yang dibutuhkan. Bahkan mereka bisa lebih cepat daripada orang-orang potensial yang jujur dan taat prosedur. Karena tidak mau bermain uang untuk melicinkan jalan, orang-orang baik dan potensial lebih sering tersingkir di persyaratan yang tak perlu. Artinya persyaratan administrasi yang bertumpuk itu cuma bisa menghadang orang-orang Indonesia yang cerdas, potensial dan punya prinsip. Sementara orang-orang lancung tak terhambat.

Di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (kini Dep. Pendidikan Nasional) lain lagi. Masalah administrasi di sini mestinya bisa lebih baik daripada departemen lain, karena dialah yang akan memberi pelajaran dan contoh kepada seluruh penduduk negeri bagaimana menyelenggarakan administrasi. Namun kenyataan berbicara lain. Pada saat saya mau berangkat ke Leiden untuk melanjutkan studi S2 di Rijks Universiteit Leiden (RUL) 5 September 1989, ada seorang profesor dari UGM mengeluh. Dia mengaku sebenarnya dia sudah mesti berada di Belanda hari itu, karena ada seminar yang mesti dia hadiri di Belanda, tapi urusan administrasinya tidak beres-beres. Dia merasa dipingpong oleh PDK dan Sekretaris Kabinet (Sekab). Saya dan dua teman dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia juga mengalami hambatan serupa. Surat-suratnya tak beres-beres selama hampir dua bulan. Setelah Rektor UI waktu itu Profesor Sujudi angkat telepon, tiba-tiba beres. Sedang seorang teman lain yang tahu prosedur dibalik prosedur resmi itu, bisa beres dalam waktu kurang dari seminggu. Rahasiannya: dia mengaku memberi uang tips pada setiap meja yang mesti dilalui.

Itu terjadi jauh sebelum reformasi menggulung orba. Setelah orba tumbang nampaknya belum banyak yang berubah di situ. Lihat saja masalah ijazah SLTA atau SMA atau SMU atau apalah namanya. Untuk memperoleh selembarnya ijazah mahapenting itu, seseorang setidaknya mesti menghabiskan waktunya 12 tahun di bangku sekolah (6 tahun sekolah dasar, 3 tahun SLTP dan 3 tahun SLTA). Setelah mendapatkannya, ternyata cuma bisa dipakai 2 tahun alias dua kali menempuh ujian masuk perguruan tinggi negeri (UMPTN). Itu tentu tidak adil.

Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang membatasi berlakunya ijazah. Di negara manapun di dunia, ijazah SMA adalah sertifikat dasar untuk menempuh jenjang yang lebih tinggi kapan pun dia mau. Si pemilik, yang telah menempuh perjuangan begitu lama dengan penuh kesabaran dan ketekunan, boleh bangga setelah meraihnya. Setelah itu dia boleh langsung ke perguruan tinggi. Boleh juga bekerja dulu 1, 2 tahun bahkan 10 atau 20 tahun, kemudian masuk ke perguruan tinggi. Itu adalah hak dia sebagai warganegara dan sepenuhnya dilindungi undang-undang. Dulu orang Indonesia juga memiliki hak seperti itu, tapi kemudian terus direduksi pemerintahnya sendiri sejak pertengahan dasawarsa '80-an.

Tak ada penjelasan rasional buat ketidakadilan itu sampai orba jatuh. Namun karena tak ada juga yang mempersoalkannya, maka dia bisa berlangsung terus dan terus. Saya pernah menanyakan masalah ini kepada Prof. Dr. Wardiman (Menteri PDK pada Kabinet Pembangunan VI) dalam sebuah pertemuan dengan mahasiswa Indonesia di Delft (1993). Dia menjawab bahwa penduduk Indonesia sangat besar dan setiap tahun yang tamat dari SMU juga sangat banyak. Kapasitas perguruan tinggi di seluruh Indonesia tak bisa menampung mereka semua. Jadi perlu ada pembatasan. Jawaban itu tentu saja tidak menyelesaikan masalah. Padahal Cina yang penduduknya 5 kali lipat lebih besar daripada Indonesia, tak melakukan pembatasan tak kreatif seperti itu.

Tugas pemerintah dan menteri-menterinya tentu bukan mengumpulkan masalah, tapi mengatasi masalah-masalah itu demi masa depan bangsa. Bila PDK (depdiknas) dan perguruan tinggi negeri (PTN) sendiri tak bisa

menghargai output atau produk dari sistem pendidikannya, bagaimana negeri lain akan menghargainya? Dalam hal ini perguruan tinggi swasta dan dunia bisnis lebih bijak daripada PDK dan PTN, yang cuma mengadministrasi tahun ijazah. Kedua institusi itu lupa memperhatikan bahwa yang lulus itu adalah manusia dewasa yang punya otak dan cita-cita. Sebetulnya terbatasnya ruangan yang dapat menampung mahasiswa baru di perguruan tinggi sudah dimaklumi semua orang. Itu sebabnya diadakan tes penyaringan, agar yang benar-benar berminat dan berotak encer yang masuk. Namun menghalangi orang ikut berkompetisi merebut bangku terhormat di PTN, cuma karena ijazahnya dianggap kedaluwarsa, adalah bertentangan dengan hak azasi manusia. Itu merupakan pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan.

Masih dalam urusan dengan ijazah SMU, pemerintah juga mewajibkan kepada anak-anak muda harapan bangsa itu untuk melegalisasi ijazah. Sertifikat penting itu, yang baru saja mereka terima dari PDK lewat sekolah masing-masing, itu mesti mereka dilegalisir di kantor PDK setempat. Apa gunanya? Apakah pemerintah tidak percaya pada keaslian ijazah yang dikeluarkannya sendiri? Kalau itu alasannya, harus dibikin ijazah yang tak bisa dipalsu dan tegakkan supremasi hukum. Artinya sindikat pemalsu ijazah yang harus diperangi dan diberi hukuman berat. Bukan malah menghukum anak-anak yang baru lulus untuk melegalisasi ijazahnya yang sudah legal dan asli. Apalagi yang dilegalisasi adalah potocopynya dan bisa dititipkan kepada orang lain. Jadi tak ada pemeriksaan teliti soal keaslian ijazah pada saat legalisasi. Yang penting bagi petugas di sana adalah legalisasi ijazah itu dibayar per

lembar copy. Urusan administrasi yang berputar-putar ini pernah saya tanyakan pada Wardiman dalam kesempatan yang sama di Delft, tapi tak memperoleh jawaban rasional.

Setelah setengah abad lebih merdeka, Indonesia nampaknya belum juga berhasil membuat administrasi yang rapih, sekaligus mengikuti perkembangan zaman. Kekacauan administrasi yang terjadi selama masa orba harus segera diakhiri. Juga masalah peremajaannya yang sering diabaikan, harus diupayakan kembali. Kadang-kadang di beberapa sektor atau departemen adminis-trasinya lumayan rapih, tapi karena datanya tak pernah diremajakan (up date) maka jalannya tetap kacau. Tak perlu jauh-jauh mencari contohnya. Masuk saja ke ruang pers sekretariat negara. Cobalah lihat wartawan-wartawan yang bermarkas di situ. Lihat dari media manasaja mereka. Maka dalam sekali pandang Anda tahu betapa datanya tak pernah diremajakan. Banyak wartawan yang medianya sudah mati, misalnya editor, dan lain-lain masih nongkrong di situ. Sementara wartawan baru dari media, yang bonafiditasnya tak diragukan, sulit mendapat kartu pers Setneg. Adminstrasinya dibuat gelap dan tak ditangani, sehingga wartawan-wartawan yang baik malah tak bisa masuk. Wartawan-wartawan lama, bahkan yang sudah tak ada medianya, tetap terdaftar sebagai wartawan setneg atau istana, mendapat berbagai kemudahan dan fasilitas. Departemen-departemen, yang menyediakan tempat buat wartawan dari berbagai media, nasibnya juga seperti itu.

Pengabaian terhadap kewajiban up dating (peremajaan) data, bahkan juga menjalar sampai ke wilayah bisnis. Ini pada gilirannya menimbulkan frustrasi pelaku

bisnis berdedikasi dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Kalau tidak percaya mari kita lihat daftar eksportir terdaftar tekstil dan produk tekstil (ETTPT) yang dikeluarkan Sucofindo. Dalam investigasi penulis buat majalah SWA setahun setelah rerformasi menjatuhkan Soeharto (1999), terungkap betapa data itu setidaknya sejak 1994 tidak pernah diremajakan. Padahal daftar itulah yang dijadikan Depperindag untuk membagi kuota ekspor tekstil ke negara-negara maju semacam Uni Eropa (UE) dan AS. Akibatnya sudah dapat ditebak. Banyak perusahaan yang sudah mati atau tak jelas, atau bahkan fiktif tetap mendapat jatah kuota ekspor. Sebaliknya perusahaan-perusahaan tekstil yang bagus, punya pabrik dan mempunyai pasar di negara-negara maju tak mampu mengekspor produknya, kecuali dia membeli dari orang yang memiliki kuota tapi tak punya pabrik.

Membasmi jual-beli kuota tekstil dan produk tekstil (TPT)nya sendiri jelas tak gampang. Di samping sudah berlangsung lama, kegiatan itu pun bukan barang haram. Tempat transaksinya bahkan disediakan pemerintah, yaitu Bursa Komoditi Indonesia (BKI) yang berada di bawah Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Depperindag), kini telah dipisah menjadi Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian. BKI bertugas memfasilitasi, dan menyediakan sarana buat pertemuan para eksportir. Di situlah terjadi tiga pola jual-beli kuota: beli putus, tukar-menukar, dan pinjam-meminjam. Setiap transaksi dikenakan biaya  $0,015 \times$  nilai transaksi, dan langsung masuk ke PT Persero Kliring dan jaminan Bursa Komoditi (PKJKB). BUMN ini selama 24 jam online dengan Sucofindo. Di samping ketiga pola tersebut, ada 'undername' yang berlangsung di luar bursa. Di dunia

ekspor-impor, undername diartikan mengekspor dengan nama orang lain. Di negara penerima undername diperkenankan (third party document applicable).

Tanpa perangkat alih kuota, menurut Ketua Yayasan Indoteks Ir. Chamrul Djafri, realisasi kuota ekspor akan kedodoran. Sebab jumlah kuotanya sendiri terbatas dan bisnis tekstil sangat dinamis. Dia tak mengada-ada. Data Depperindag membuktikan perkembangan ekspor TPT kuota dan non kuota 1998 (Januari - April) meningkat 50,8% dibanding periode sama tahun sebelumnya, yaitu dari US \$ 1.632.958 tahun 1997 menjadi US \$ 2.462.906 tahun 1998. Dibanding 10 negara pesaing lainnya realisasi ekspor TPT kuota Indonesia adalah yang paling tinggi (63,79%). Selanjutnya Cina 45,23%, Thailand 40,1%, Filipina 38,10%, Hongkong 36,44%, Banglades 34,65%, Srilangka 32,20%, India 30,32%, Pakistan 26,37%, Malaysia 21,13%, dan Singapura 7,93%.

Jadi memberantas jual-beli kuota bukan saja sia-sia, tapi juga tidak relevan. Bagaimana dengan percaloan yang juga disinyalir ikut bermain mengerek harga kuota dari US\$ 2-3 menjadi US\$ 20 untuk yang hot katagori? Menurut orang BKI yang tak mau disebut jati dirinya, di sana sistemnya membership. Yang berhak menjadi anggota BKI cuma ETTPT. BKI, kata dia, juga tidak ikut menyeleksi siapa yang berhak mendapat status ETTPT dan siapa yang tidak. Yang menyeleksi adalah Depperindag dengan syarat yang jelas. Dia memang tidak asal cuap. Untuk memperoleh status ETTPT seorang pengusaha harus mengekspor ke negara-negara non kuota dulu senilai US \$ 400 ribu/bulan secara kontinyu. Tak heran bila BKI menganggap pengusaha itu bonafid bila dia sudah mendapat status ETTPT.

Ketika penulis berkunjung ke BKI waktu itu untuk majalah SWA keadaannya memang demikian. Yang bertransaksi di situ hanyalah ETTPT. Selebihnya pengunjung biasa yang tidak ikut bertransaksi, seperti wartawan, karyawan BKI, dan lain-lain. Lantas di mana letak persoalannya? "Transparansi," kata Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) waktu itu H.Irwandi Muslim Amin pasti. "Timbulnya masalah dalam pembagian kuota tekstil, karena pemerintah tidak bersikap transparan dalam pembagiannya. Akibatnya pengusaha yang tidak mendapat jatah menuduh terjadi jual-beli kuota. Padahal jual-beli kuota dibolehkan," tambahnya berteori. Banyak eksportir mengeluh, karena semuanya serba gelap. Mereka tidak tahu siapa saja yang mendapatkan kuota. Bahkan berapa sebenarnya jumlah ETTPT pun mereka tidak tahu. Beberapa eksportir lebih fokus menuduh Direktur Eksporlah sumber ketidaktransparanan di Depperindag. Menperindag dan Dirjen Perdagangan Internasional Djoko Moeljono dianggap terlalu percaya pada bawahannya itu.

Tuduhan, yang kian santer soal transparansi pembagian kuota, itu bagi Depperindag, tidak berdasar. "Saya tidak bilang bawahan saya malaikat semua, tapi sejak 1994 saya menjadi Dirjen Perdagangan Internasional, kita sudah banyak melakukan pembenahan. Lihat saja sebagai lembaga kontrol kita pakai PT. Sucofindo. Itu kan lembaga independen. Sedangkan di Amerika kita pakai ELVIS (Electronic Visa Information System). Dengan begitu kita bisa tahu siapa yang memenuhi kuotanya, siapa yang tidak," jelas Pak Djoko, begitu dia akrab dipanggil, cepat. "Soal kuotanya sendiri, kategori apasaja yang masih ada, berapa jumlahnya, dan sebagainya kita umumkan secara berkala. Kita juga jelaskan bahwa itu semua gratis. Tidak

dipungut bayaran," imbuhnya. Pengumuman berkala mengenai kuota, menurut seorang staf Direktur Ekspor, diberikan setiap Rabu. Pak Djoko mengaku memang kadang-kadang ada juga yang mengancam agar diberikan kuota atau mencoba memberi imbalan uang kepada stafnya. Sayang orang pemerintah itu menolak menyebut nama mereka yang suka menginjak kaki tersebut.

Di samping masalah transparansi, menurut Presdir Apac Inti Corpora (AIC) Benny Soetrisno, sistem kontrol pemerintah amat lemah. Pemerintah tidak pernah mengadakan peninjauan kembali terhadap ETTPT. "Pertumbuhan masing-masing industri tekstil itu berbeda-beda. Ada yang tetap, ada yang meningkat, bahkan ada yang tutup. Seharusnya pemerintah meninjau kembali kuota yang diberikan," tuturnya serius. Usul senada juga diajukan Poppy Dharsono, Vince Gowan, dan lain-lain. "Pemerintah mestinya melihat ke lapangan dong apakah pengusaha yang mendapat kuota itu, pabriknya masih ada enggak? Kalau sudah tutup jatah kuotanya kan enggak perlu lagi!" ujar Vince kesal.

Seruan agar pemerintah meninjau ke lapangan sekaligus menunjukkan bahwa para eksportir sebenarnya bisa menerima past performance alias realisasi ekspor tahun sebelumnya menjadi acuan pemberian kuota. Namun tanpa pengecekan langsung di lapangan dapat dipastikan daftar ETTPT akan statis dan tak berubah. Padahal kenyataan menunjukkan kebalikannya. Pasifnya aparat Depperindag di lapangan itulah yang sangat menghambat pendatang baru, yang justru bisa memproduksi barang bagus baik kualitas maupun kuantitas. Apalagi para pendatang baru itu terbukti pula berhasil menembus pasar negara kuota, tapi terpaksa mesti melupakannya, karena

tidak punya kuota. Ketidakpuasan seperti itu rupanya memang bukan tanpa alasan. Daftar ETTPT dari PT Sucofindo dengan jelas menunjukkan tidak adanya pengecekan dan peninjauan ulang terhadapnya.

Investigasi penulis buat majalah SWA waktu itu menunjukkan dari sekitar 1500 ETTPT, yang dikeluarkan Sucofindo, sebanyak 266 tidak mencantumkan alamat, antara lain: Baik-baik, Branta Mulia, Bulk Pakindo, FA Indonesia, dan lain-lain. Itu belum termasuk yang hanya mencantumkan nama kota Bandung, Jakarta, Surabaya, dan lain-lain sebagai alamat. Nomor telepon yang dicantumkan di situ pun banyak yang tidak benar. Di samping banyak pula yang tidak ada nomor teleponnya. Kesulitan lain adalah adanya perusahaan TPT misterius. Artinya ada namanya, ada alamat, tapi ketika dicek perusahaan itu tidak ada. Contohnya Cemerlang Abadi (ETTPT nomor: 090036), alamat Gedung Manggala Wanabhakti lantai 9 Jakarta. "Di sini tidak ada perusahaan bernama Cemerlang Abadi," kata pengelola Gd. Manggala Wanabhakti," saat dicek via telepon. "Yang ada PT Resik Cemerlang. Itu bukan perusahaan tekstil, tapi perusahaan jasa *cleaning service*," tambahnya ketika ditanyakan kemungkinan adanya nama perusahaan di situ yang agak mirip.

Ada lagi perusahaan Japfa Comfeed Indonesia (ETTPT No.: 090631). Tidak ada yang tahu sejak kapan perusahaan yang bergerak dalam bidang pakan ternak itu menjadi eksportir tekstil. Sulitnya ketika dihubungi perusahaan itu sudah tidak aktif lagi. "Sejak Desember 1995 sudah tidak ada kegiatan di sini. Pabriknya sudah berhenti," kata penerima telepon di sana. Sebenarnya masih banyak yang bisa diungkap dari daftar tersebut,

termasuk adanya perusahaan tekstil yang sudah mati, tapi status ETTPT dan nomor ordernya belum dicabut. Contohnya Kanindo Sukses Tekstil, dan lain-lain.

Kenyataan di atas tentu saja mengesankan, bila tidak mau disebut membingungkan. Tidak heran bila banyak eksportir protes. Harus disadari, bahwa mereka protes bukan untuk mengharamkan jual-beli kuota. Jual-beli kuota, dalam bentuk beli putus, tukar menukar atau pinjam-meminjam, bahkan undername, selama terjadi di antara dua atau lebih perusahaan tekstil yang masih hidup, itu bisa dibenarkan. Namun manakala dia terjadi antara perusahaan misterius, sudah mati atau fiktif dengan perusahaan tekstil beneran, itu tidak adil. Bila berdagang kuota itu dijadikan bisnisnya, itu memperkuda orang lain buat keuntungan pribadi namanya.

Pak Djoko agak terkejut ketika dibenturkan dengan temuan di atas waktu itu. Toh dia membenarkan bahwa memang ada lebih 1500 ETTPT. Dia mengakui Depperindag kekurangan aparat di lapangan untuk mengeceknya. Itu sebabnya sejak 1994 dia minta bantuan Sucofindo. Menurut Pak Dirjen, yang dikenal akrab dengan wartawan itu, dia juga pernah minta bantuan API untuk memonitor pengusaha nakal, tapi tidak ada tanggapan. Mereka merasa tidak enak melaporkan bisnis orang lain. "Soal yang 266 ETTPT tanpa alamat itu, kita memang sedang membenahi dengan bantuan Sucofindo. Sejak Oktober 1998 sekitar 200 ETTPT tidak diberi jatah kuota lagi, karena setelah dicek perusahaannya sudah tidak ada. Status ETTPTnya dicabut. Jadi data kita hampir klop," jelasnya hati-hati.

Jatah kuota mereka, menurut pak Dirjen, akan diberikan kepada eksportir produsen sesuai SK Menperindag

No: 374/MPP/Kep/8/1998, yang berlaku Januari 1999. Belum jelas apakah (266) perusahaan tanpa alamat identik dengan mefreka yang dicabut status ETTPT. Nampaknya ada sedikit perbedaan. Ini terlihat dalam daftar ETTPT (sementara) yang dikirimkan Direktorat Ekspor ke SWA. 43 nama dari sekitar 200 ETTPT tidak aktif tahun ini, semuanya beralamat jelas. Sekadar contoh bisa disebut di sini: Andora Pratama, Arsitas Mitra, Batik Semar, Indonesia Carpet, Jujur Jaya Abadi, Kerta Niaga, Kowari, dan lain-lain.

Soal perusahaan semacam Japfa Comfeed, Cemerlang Abadi, dan lain-lain Pak Djoko merasa tidak terlalu tahu profile masing-masing perusahaan. "Terus terang saya tidak tahu profile masing-masing perusahaan. Saya kan baru tahun 1994 menjadi Dirjen, sedang pembagian kuota sudah berlangsung sejak dulu. Tapi perusahaan kan kadang-kadang punya banyak unit usaha. Mungkin salah satu unit usaha mereka bergerak di bidang tekstil. Saya tidak tahu. Tapi ini akan saya tidak lanjut. Saya akan minta bantuan Sucofindo," katanya menjanjikan. Setelah masalah itu diungkap majalah SWA, Japfa Comfeed kemudian memberikan klarifikasi bahwa yang mereka ekspor selama itu adalah serat plastik. Sucofindo sendiri, ketika ditanyakan siapa menggunakan jatah kuota perusahaan yang sudah tidak ada seperti Kanindo, Cemerlang Abadi, dan lain-lain, mengaku tidak tahu. "Yang jadi wewenang kita cuma mengontrol dokumen barang ekspor, mengecek apakah dia sesuai *enggak* dengan yang ditulis, dan sebagainya. Soal apakah perusahaan tersebut masih ada atau tidak, itu bukan urusan kita. Apakah dia mengekspor undername, itu juga kita tidak tahu," kata seorang staf Sucofindo yang tidak mau disebut namanya.



Setelah orba tumbang dan Indonesia memasuki millenium ketiga, mau tak mau Indonesia dituntut untuk membenahi administrasi di segala sektor. Kekacauan administrasi dan kemalasan aparat meremajakan datanya harus dihentikan sampai di sini. Indonesia ke depan mesti menjadi negara yang tertib administrasi, sehingga administrasinya menjadi bagian dari solusi seperti lainnya negara-negara maju.

Z

Siang itu, pukul 14.35, Edward turun dari jeep tepat di rumah Ketua PBNU Abdurrahman Wahid di Jl. Warung Silah Ciganjur. Mantan bos Bank Summa itu membawa setumpukan fotokopian naskah pernyataan bersama Abdurrahman Wahid, Megawati Sukarnoputri, dan uskup Mgr. Carlos F.X. Belo mengenai krisis nasional.



## Kabinet Transisi Habibie

Mencari pengganti pemimpin otoriter, yang telah memerintah dengan tangan besi untuk kurun waktu lama, pastilah tak mudah. Walaupun misalnya terbukti sang pemimpin besar telah gagal menciptakan kemakmuran, keadilan, dan keamanan bagi rakyat, mengganti dia tetap saja sulit. Bila situasi kemudian begitu kritis, dan orang akhirnya mendapatkan pengganti, dapat dipastikan sang pengganti akan menemui banyak kesulitan, karena harus memimpin pemerintahan di bawah bayang-bayang sang diktator.

### 1. **Pait a Compli, Saat Kaum Reformis Lengah**

Antony Jay, seorang Machiavellian dalam bukunya *Management and Machiavelli*, punya resep untuk mengatasi krisis kepemimpinan seperti itu. Dalam situasi demikian, katanya, jangan angkat orang yang setia dengan sang diktator sebagai pengganti. Alasannya sederhana saja: orang itu pasti akan mengulangi cara-cara dan kegagalan yang sama. Jay menyarankan agar memilih

orang luar atau orang yang selama pemerintahan sang diktator menjadi 'duri dalam daging.' Dialah yang memiliki alternatif untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan menuju keadaan lebih baik.

Namun sejarah tidak selalu memberi orang cukup waktu untuk berpikir atau menentukan pilihannya sendiri. Pada saat roda sejarah berputar semakin cepat, peristiwa sejarah terjadi dari detik ke detik, maka hanya segelintir orang yang punya kesempatan berpikir dan menentukan pilihan. Hasil pilihan mereka kemudian disodorkan kepada rakyat sebagai 'pait a compli.' Itulah yang terjadi di Indonesia, 21 Mei 1998, ketika kekuatan reformasi, mahasiswa, dan intelektual kampus dipimpin Amien Rais berhasil memaksa Soeharto lengser ke prabon. Pada saat itu juga Habibie didaulat untuk menjadi presiden, dan disodorkan kepada seluruh rakyat sebagai pait a compli. Amien Rais, pemimpin kaum reformis sekaligus duri dalam daging pemerintahan Soeharto, tak serta-merta naik ke tampuk pimpinan republik. Ini sekaligus mengisyaratkan bahwa reformasi di Indonesia mengambil jalan berbeda dari Filipina, Polandia, Afrika Selatan dan Iran.

Di Iran ketika kekuatan revolusi berhasil menumbangkan sang diktator Syah Reza Pahlevi, pemimpin revolusi Imam Khomeini langsung naik ke tampuk pimpinan negara dan menentukan arah baru Iran. Demikian pula ketika Lech Walesa, pemimpin gerakan buruh, berhasil menumbangkan rezim komunis, kepemimpinan tertinggi Polandia langsung mampir di tangannya. Lalu Nelson Mandela, yang berhasil menumbangkan rezim apartheid lewat gerakan gerakan tanpa kekerasan di Afrika Selatan. Pria yang pernah dipenjarakan selama 26 tahun lebih itu langsung menjadi pemimpin tertinggi Afrika Selatan.

Sedang Corrazon Aquino yang menjadi pemimpin perlawanan rakyat Filipina setelah kematian suaminya Benigno Aquino, juga segera didaulat menjadi presiden negeri jiran itu setelah sang diktator Marcos kabur ke Amerika. Indonesia rupanya mengambil jalan lain.

Tentu saja tidak semua orang setuju, apalagi kaum reformis. Namun dengan segala kearifan, dan pertimbangan tetek bengek agar tidak timbul bencana lebih besar, agar tidak terjadi kevakuman kepemimpinan negara, agar roda ekonomi bisa berputar, rakyat tidak kelaparan, dan sebagainya, maka orang pun menerimanya dengan beberapa catatan. Habibie bersama kabinetnya boleh memerintah selama masa transisi. Begitulah komprominya dengan wakil-wakil reformis (kelompok 6) di bawah pimpinan Amien. Itu satu. Kedua, Habibie harus menyelenggarakan pemilu secepatnya, sekaligus mempersiapkan perangkat perundang-undangan dan fasilitas yang dibutuhkan, dan seterusnya.

Berbekal kepercayaan secuil itu Habibie bekerja cepat. Dia hanya membutuhkan waktu 24 jam untuk membentuk kabinetnya, tanpa berembuk dulu dengan kekuatan reformasi. Banyak pakar politik, ekonomi, dan pengamat menyayangkan momentum yang terlepas tersebut. Kalau saja Habibie mengajak kekuatan-kekuatan reformasi untuk membentuk kabinetnya, tentu bisa menjadi starting poin yang bagus bagi negara dan bangsa untuk memiliki pemerintahan yang *legitimated*, dipercaya, dan berwibawa, sesuatu yang amat dibutuhkan pada saat krisis.

Begitulah Habibie memulai pemerintahannya. Dibandingkan kaum reformis, dia memang berhasil mencuri start. Namun akibat kesalahan awal itu kabinet bentukannya

sejak berdiri sudah mengecewakan dan tampak goyah. Apalagi bila dilihat di dalamnya terlalu banyak muka lama (Hartarto, Ginanjar Kartasasmita, Faisal Tanjung, Syarwan Hamid, Hasan Basri Durin, Prof.Dr. Ida Bagus Oka, Panangian Siregar, dan sebagainya). Protes dan tuntutan reshuffle di pusat dan daerah terhadap susunan kabinet, yang mewarnai perjalanannya kemudian, merupakan bukti tak terbantah. Habibie menamakan kabinetnya Kabinet Reformasi Pembangunan, sesuatu yang kata pengamat ekonomi Dr. Syahrir, dalam sebuah wawancara dengan penulis waktu itu, menunjukkan ambivalensi.

Ekonom kondang itu berpendapat sesuatu yang paling menonjol pada Habibie adalah ambibvalensi dan kompromi. "Dia merupakan produk ordebaru (orba) yang sangat kental, dan menjadi Presiden karena gerakan reformasi," ujar Syahrir. Nama kabinet (reformasi pembangunan), menurutnya, menunjukkan ambivalensi. Juga personalia, dan produknya. Padahal semua orang tahu sekarang tidak ada pembangunan, pertumbuhan minus (13). Yang ada hanya keharusan mencegah kontraksi ekonomi agar tidak hancur-hancuran. Masih menurut Syahrir personalia kabinet juga ambivalen. Keempat menko berasal dari kabinet Pembangunan VII, Soeharto. Sementara kekuatan reformasi tidak duduk di situ. Amien Rais, Megawati, Gus Dur, dan Sultan Hamengkubuwono X menunggu di luar kabinet. Yang ada cuma simbol-simbol kekuatan reformasi, seperti Tanri Abeng, Adi Sasono, dan Fahmi Idris.

## **2. Gerakan Reformasi Tambah Joki**

Reformasi belum lagi selesai, tapi nakhoda ke pulau masa depan lambat laun cenderung berpindah tangan dari

Amien Rais ke Abdurrahman Wahid atau Megawati. Tanda-tandanya sudah mulai terlihat pada hari Kamis, 17 Juli 1998, ketika Edward S. Soeryadjaya berhasil mengubah Ciganjur menjadi pusat kekuatan baru. Rumah Ketua PBNU Kyai Haji Abdurrahman Wahid yang belum lama keluar dari rumah sakit akibat stroke, secara langsung disulap menjadi saingan istana tempat Habibie bertahta. Rumah kyai itu juga sekaligus menjelma menjadi saingan gedung DPR/MPR, tempat kekuatan reformasi memperoleh bentuknya yang utuh. Betapa tidak! Pertemuan politik ini secara berani menempatkan diri di luar mainstream reformasi.

Amien, yang bersama kekuatan reformasi dan mahasiswa berhasil memaksa Soeharto lengser 21 Mei 1998, tidak disertakan dalam pertemuan politik tersebut. Sebagai gantinya Edward, sang penggagas, menampilkan Kyai tanpa pondok pesantren yang akrab dipanggil Gus Dur itu - sekaligus sebagai tuan rumah. Pada saat sama Edward menyandingkan sang kyai dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri. Lalu agar lebih mentereng mantan bos Grup Summa itu mendatangkan Uskup Bello, tokoh kontroversial dari Dili, Timor Timur.

Siasat ini cukup berhasil. Indikatornya yang paling nyata dapat dilihat dari animo dan sambutan masyarakat terhadap pertemuan politik akbar ini. Hari itu, pukul 14.35, rumah Abdurrahman Wahid, terletak di Jalan Warung Silah Ciganjur, penuh sesak oleh pengunjung. Mereka, yang datang dari berbagai penjuru jabotabek dan sekitarnya, itu bahkan meluap sampai ke halaman masjid di depan rumah. Tidak ketinggalan tentu wartawan cetak dan media elektronik dari dalam dan luar negeri tumpah-ruah

di situ. Pernyataan yang ditelurkan dari pertemuan itu sebenarnya tidaklah isitimewa amat, cuma pernyataan keprihatinan biasa.

Namun gaungnya yang membahana ke seantero negeri dan manca negara secara jelas memastikan bahwa rumah kyai Ciganjur itu tanpa disadari telah menjelma menjadi pusat kekuatan baru. Kekuatan ini tak bisa diremehkan. Bahkan oleh kekuatan reformasi sekalipun! Apalagi bila diingat unsur-unsur kekuatan reformasi belum lagi sempat merapatkan barisan. Kekuatan reformasi mau tak mau mesti adu balap dengan kekuatan baru yang boleh dibilang telah memiliki sumber dana pasti. Bukan tidak mungkin pula kekuatan baru ini akan lebih banyak mendapat dukungan pihak luar dan tentara daripada kekuatan reformasi awal di bawah Amien, yang terlampau kritis terhadap Freeport (AS) dan antek-antek Orba yang belum KO beneran.

Dibanding Amien yang garang dan haus perubahan radikal, Gus Dur dianggap oleh kekuatan-kekuatan lama lebih bisa diajak kompromi. Apalagi bila diingat kyai itu boleh dibilang tak pernah menentang Soeharto. Bahkan ketika raja di raja itu memaksakan azas tunggal Pancasila kepada semua organisasi kemasyarakatan (ormas) dan partai politik (1982-1985), yang ditentang di seluruh tanah air, Gus Dur lebih senang berdiri mendukungnya. Sejak itu pula istana makin ramah terhadap cucu pendiri NU Kyai Hasyim As'ari ini. Bahkan ketika Gus Dur berbenturan dengan tokoh-tokoh sepuh NU semacam Kyai kharismatik As'ad Syamsul Arifin dan Idham Khalid, istana memilih Gus Dur. Dari sisi politik Gus Dur pun boleh dibilang tak benci-benci amat pada Golkar, mesin politik orba yang sangat efektif. Itu dengan gamblang bisa dilihat pada

pemilu terakhir masa Soeharto tahun 1997.

Saat itu Gus Dur tanpa ragu menggembosi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan menggandeng Siti Hardiyanti Rukmana alias embak Tutut ke pesantren-pesantren untuk memenangkan Golkar. Hasilnya memang nyata. Golkar memborong hampir 300 lebih kursi dari 425 yang diperebutkan. Sisanya dibagi kedua partai oposisi loyal PPP dan PDI dengan suara hampir berimbang, PPP cuma sedikit lebih tinggi daripada PDI. Jadi dengan melihat track record itu saja, tanpa analisis njelimet, dapat dimengerti bila kekuatan lama lebih sreg pada Gus Dur daripada membiarkan Indonesia berada di tangan Amien.

Juga dunia luar, terutama AS, dapat dipastikan lebih menyukai Gus Dur daripada Amien. Kendati Amien memperoleh gelar Doktornya di Cicago, AS, Ketua Umum PP Muhammadiyah itu dinilai dapat membahayakan kepentingan-kepentingan AS di Indonesia. Keinginannya untuk meninjau kembali kontrak-kontrak pertambangan asing, terutama Freeport, dinilai banyak kalangan terlalu nasionalistik, bila tak bisa disebut fundamentalistik. Sebaliknya Gus Dur, meski berpendidikan Timur Tengah, tepatnya Irak yang sangat dimusuhi AS, secara ideologis tidak berbahaya. Keaktifannya di Yayasan Simon Peres (Israel) dan Forum Demokrasi yang terus-menerus menentang ICMI, dianggap sebagai garansi meyakinkan. Tak heran bila media massa, terutama media luar, lebih senang meliput dan membesarkan gerakan 'reformasi' Ciganjur ini ketimbang memberi tenaga kepada tuntutan perubahan para reformis di gedung DPR/MPR.

Keadaan yang menguntungkan itu sekaligus menaikkan posisi tawar Gus Dur dipentas politik. Juga tentu saja posisi tawar Megawati yang menganggap sang kyai seba-

gai abangnya. Edward sebagai orang bisnis tentu punya perhitungan sendiri mengenai hal ini, tapi dia lebih senang menyimpannya di dalam hati sendiri. Bahkan sampai sang konco lawas Gus Dur terpilih pada Oktober 1999 sebagai presiden, yang kemudian akhirnya harus diserahkan kepada Megawati pada 2002, Edward tak pernah membuka kotak pandora'nya.

Siang itu, pukul 14.35, Edward turun dari jeep tepat di rumah Ketua PBNU Abdurrahman Wahid di Jl. Warung Silah Ciganjur. Mantan bos Bank Summa itu membawa setumpukan fotokopian naskah pernyataan bersama Abdurrahman Wahid, Megawati Sukarnoputri, dan uskup Mgr. Carlos F.X. Belo mengenai krisis nasional. Agak tergopoh dia menuju kerumunan wartawan berbagai media dalam dan luar negeri yang memenuhi halaman rumah Gus Dur. Para wartawan mendatanginya dan berusaha merebut naskah potocopian di tangannya. Terjadi tarik-menarik sebentar, beberapa lembar robek di tempat. Lebih separuhnya kemudian berpindah ke tangan wartawan di depan pintu samping rumah sebelum mantan bos Summa itu masuk.

Putra sulung mantan bos Grup Astra William Soeryadja itu tidak berusaha mengambil kembali lembaran-lembaran tersebut. Dia langsung menerobos masuk. "Ayo sak ikut masuk," ajaknya sambil berusaha tersenyum ketika melihat penulis di antara wartawan. Dari pintu samping dia menuju ruang tamu belakang, lalu berbelok ke kiri menemui Gus Dur yang duduk di ruang tamu depan didampingi Megawati dan Uskup Belo. Fotokopi naskah pernyataan itu dia serahkan masing-masing sebuah kepada Gus Dur, Megawati, dan si Uskup yang menerimanya dengan hormat. Sisanya dia bagikan lagi kepada

wartawan yang berusaha mendesak masuk ke ruang tamu. Pernyataan keprihatinan bersama itu pun kemudian dibacakan, dan diliput berbagai media cetak dan elektronik. Para tokoh itu gerah dan prihatin melihat keadaan negara dan rakyat yang semakin sengsara. Dari panggung baru itu mereka seiya menuntut perubahan. Tanya jawab berlangsung cepat kepada ketiga tokoh. Uskup Belo kebagian pertanyaan seputar referendum Timor Timur. Potografer terus memotret dan saling dorong. Sementara itu Edward yang memprakarsai pertemuan tersebut menyelina lagi ke pinggiran.

Mantan Bos Grup Summa itu rupanya lebih suka berada di belakang layar. Dia seperti berusaha tidak menonjolkan diri, meskipun mempertemukan 3 tokoh penting itu bukanlah perkara mudah. "Gua stress sak," katanya terus terang. "Bagaimana kalau terjadi apa-apa pada Gus Dur? tambahanya khawatir sambil sekali-sekali menengok ke ruang depan yang semakin sesak oleh wartawan. Ruang tamu sempit itu jadi semakin pengap. Tidak tahan melihat keadaan itu Edward langsung saja menghampiri Gus Dur yang duduk bersandar di kursi dengan mata tertutup. Dia lalu menghidupkan kipas angin yang tergantung di langit-langit ruang tamu. "Sudah beberapa hari ini gua ditugasin Gus Dur menjemput dan mengurus segala keperluan Uskup Belo untuk acara ini," tuturnya merendah sambil duduk di samping penulis. "Tiket, tiket?" tanya sang uskup tiba-tiba sebelum ke luar ruangan se usai acara. "Sudah sudah beres," jawab Edward cepat. "Besok pagi sudah bisa berangkat," tambahanya sambil merendengi Uskup menuju mobil.

Hajatan besar yang digagas Gus Dur dan Edward ini sebenarnya boleh disebut fait a compli ketiga yang terjadi

dalam waktu beberapa bulan saja. Pait a compli yang pertama seperti telah penulis paparkan di atas adalah yang dilakukan IMF sebelum Soeharto lengser lewat LoI. Yang kedua terjadi saat Soeharto menyatakan diri berhenti dari jabatannya sebagai presiden dan Habibie dilantik menggantikannya. Pertemuan Ciganjur adalah pait a compli ketiga yang tak kalah dahsyatnya dalam mengembosi kekuatan reformasi. Dari ketiga kejadian itu, cuma yang kedua yang disadari kaum reformis dan digugat sepenuh hati. Yang pertama luput dari perhatian, dan yang ketiga sering disalah-tafsirkan sebagai penambahan darah segar terhadap gerakan reformasi.

Begitulah kekuatan reformasi yang dimotori mahasiswa bersama Amien cuma merasa kalah start dari Habibie. Sedang di arena publik dalam perjalanan waktu gerakan reformasi di bawah Amien, nampak semakin redup. Gerakan reformasi Amien kalah gempita dibanding langkah kuda Gus Dur yang menggandeng Mega. Akhirnya Amien gagal menjadi matahari baru buat republik. Cahayanya terus memudar di sekitar gugusan bintang Gus Dur yang membawa Mega. Gerakan reformasi kemudian menambah satu joki lagi, yaitu Sultan Hamengku Buwono X sebagai pelengkap. Kekuatan reformasi yang belum lagi solid itu kemudian membawa Amien bergabung ke situ dan ikut berperan di sekitar Gus Dur yang makin mengkilap.

Lambat laun yang terlihat hanyalah tarik-menarik antara dua pusat kekuatan, yaitu istana negara di bawah Habibie dan Ciganjur yang dipimpin Gus Dur. Ahli pesawat terbang itu memegang kendali negara dan segala yang berhubungan dengan hajad hidup orang banyak secara formal, di hadapannya berdiri kekuatan baru yang garang di bawah komando Gus Dur. IMF, yang mewakili

kepentingan Amerika Serikat dan dunia luar, nampaknya sudah cukup tenang karena telah berhasil memaksa pemerintah Soeharto menandatangani 50 poin LoI. Dengan LoI itu, Habibie atau siapa pun yang memegang kendali republik, akan berjalan di garis-garis yang telah ditetapkan lembaga super kuasa itu.

### **3. Mendayung Di Antara Dua Karang**

Banyak kalangan meragukan kemampuan mantan pembantu setia Soeharto itu mengatasi keadaan. Sebab kehancuran bidang ekonomi, politik, dan hukum telah berlangsung dengan gradasi yang terus meningkat selama 32 tahun. Habibie mewarisi dari Soeharto negara yang hampir bangkrut, banyak utang, hutan yang rusak berat akibat kenakalan pengusaha HPH dan bencana el nino. Di sisi lain ibu pertiwi juga merana karena kesalahan kebijakan dan skala prioritas, sehingga tidak dapat menjamin pangan penduduknya. Krisis yang merebak sejak semester kedua tahun 1997 menambah beban lebih berat lagi dengan anjloknya daya beli penduduk, kemiskinan absolut yang kata Menkop & PKM Adi Sasono telah mencapai 80 juta, dan pengangguran yang jumlahnya akan mencapai 20 juta akhir tahun 1998.

Di samping itu masih ada kemarahan rakyat di berbagai daerah, seperti di Aceh, Irian Jaya, dan Timor Timur. Mereka merasa terlalu lama ditipu dan diperlakukan tidak adil. Kemarahan mereka mengancam integrasi nasional. Pada saat sama barisan kaum intelektual sudah merasa jenuh pada segala macam tekanan selama tiga dasawarsa. Habibie sendiri mengaku mewarisi benang kusut dari Soeharto. Dibutuhkan manajemen yang luar biasa cangguh untuk mengatasi semua itu, yang sayang-



nya kata banyak pengamat, tidak dimiliki Habibie. Keadaan yang tidak banyak berubah selama 90 hari pertama kekuasaannya dianggap sebagai bukti ketidak-mampuan itu.

Arbi Sanit pernah memprediksi Habibie hanya akan bertahan selama tiga bulan. Pertama, karena mantan orang kuat BPPT itu tidak populer baik di dalam maupun di luar negeri. Kedua, tidak legitimated. Ketiga, tidak mendapat kepercayaan memadai dari rakyat. Karena kedekatan dengan orang yang digantikannya, Habibie dianggap bukan orangnya yang bisa mendatangkan perubahan dan pembaharuan di bidang politik, ekonomi, dan hukum. "Hubungan saya dengan Soeharto sangat dekat, dan saya masih menganggapnya sahabat terbaik, sebagai guru saya. Kadang-kadang sebagai kakak saya, dan kadang kala sebagai ayah sendiri," tuturnya terus terang. Logikanya: bila tidak ingin dianggap mengkhianati sahabat, atau dianggap murid eMbalelo, adik yang tak tahu diuntung, atau anak durhaka, bisa dipastikan kebijakannya tidak akan bertentangan dengan Soeharto. Habibie diprediksi tidak akan mencelakakan Soeharto atau menyeretnya ke pengadilan, seperti yang dilakukan Presiden Korea Selatan Kim Dae Jung terhadap pendahulunya. Padahal untuk bangkit dari jurang kehancuran ini amat diperlukan keberanian moral untuk membuat kebijakan yang samasekali baru.

Sederet bukti dapat disajikan di sini: mulai dari caranya menangani masalah Partai Demokrasi Indonesia (PDI), kelangkaan pangan, minyak goreng, sampai masalah perbankan dan stabilisasi nilai rupiah. Cara penanganannya dinilai banyak pengamat, sebagai parsial, asal-asalan, dan berwarna orba. Lihat saja bagaimana

pemerintah Habibie tetap ngotot mengakui PDI hasil rekayasa (baca: Suryadi), di samping PDI hasil kongres (Megawati). Lebih tidak enak lagi pernyataan Habibie yang akan hadir dalam kongres PDI-Suryadi di Palu. Tentu saja banyak orang khawatir pada langkah Presiden yang tidak populer itu, tidak terkecuali ICMI, organisasi almamaternya yang saat itu dipimpin Ahmad Tirta Sudiro. Tirta Sudiro menghimbau agar Habibie tidak hadir dalam kongres PDI-Suryadi.

Sementara dalam menangani kelangkaan sembako, minyak goreng, dan naiknya harga-harga pemerintah Habibie nampak kedodoran. Terlalu banyak menteri dikerahkan untuk menanganinya. Ada Kabulog Beddu Amang, ada Menpangan A.M. Saefuddin, Menteri Pertanian Soleh Solahuddin, Menhutbun Muslimin Nasution, Menkop/PKM Adi Sasono, dan Menperindag Rahardi Ramelan, serta Menko Ekuin Ginanjar Kartasasmita. Kebijakannya sebentar-sebentar berubah. Orang seperti disuguhi pertunjukan pertandingan sepak bola tidak menarik, karena timnya tidak kompak. Kemana saja bola menggelinding, kesitu pula semua pemain tamplek. Setiap pemain ingin menguasai bola, lalu membawa ke goal lawan agar bisa menunjukkan dialah yang terhebat. Orang lantas merasa jarum jam selama 90 hari seperti tidak berputar, karena suasananya persis sama dengan zaman orba, kecuali bahwa adanya upaya kongkrit pemerintah Habibie memberdayakan pengusaha kecil dan koperasi dengan memanfaatkan moment kacaunya jalur distribusi setelah kerusuhan, 13 - 14 Mei 1998.

Toh harga sembako tetap meroket. Di beberapa daerah malah mulai rawan pangan, penjarahan merebak, dan butuh penanganan serius (lihat SWA no 16/XIV/6-19

Agustus 1998, Berbisnis di Tengah Rongrongan Anarki). Toh isu ini berhasil dimanfaatkan pemerintah, sehingga Consultative Group on Indonesia (CGI) merasa iba dan komit untuk memberi pinjaman US \$ 8 miliar kepada Indonesia dalam tahun anggaran berjalan. Bila digabung dengan pinjaman IMF, maka jumlah utang baru menjadi US \$ 14 miliar. Bagaimana mengembalikannya nanti? Buat pertanyaan mendasar ini, seperti biasa tak ada yang bersedia menjawab.

Seperti pendahulunya pula, pemerintah Habibie pun bangga dengan pemberian utang baru yang melebihi target. Dia menganggap kucuran utang baru sebagai bukti kepercayaan internasional kepada pemerintahannya. "Belum pernah kita menerima bantuan sebesar yang kita terima tahun ini. Tidak kurang dari US \$ 14 miliar. Dan bantuan itu diberikan secara spontan," tuturnya bangga di depan sidang paripurna I DPR, 15 Agustus 1998. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan transisi Habibie bersama kabinetnya masih menggunakan paradigma lama untuk memanaaje Indonesia baru. Paradigma usang ini nampaknya masih berlaku sampai saat ini, meski SBY-JK dalam kampanyenya menjanjikan perubahan. Pemerintah belum kapok berutang, bahkan tidak kreatif untuk menciptakan terobosan-terobosan baru guna mengatasi krisis. Utang luar negeri yang telah menjerumuskan Indonesia ke jurang krisis, malah kembali dijadikan Habibie sebagai alasan untuk mengangkat negara dan rakyat dari keterpurukan. Pilihan ini terpaksa ditelan kabinet transisi karena minimnya dukungan di dalam negeri.

Habibie sendiri sebenarnya tak sepenuhnya mendapat kepercayaan lembaga super itu. Dia dicurigai sebagai fundamentalis, atau setidaknya dikelilingi oleh orang-



**Kwik Kian Gie**

orang yang anti terhadap liberalisasi ekonomi. Indikatornya mudah didapat. Diulur-ulurnya pencairan pinjaman oleh lembaga super kuasa itu adalah bukti yang tak dapat dibantah. Akibat berlarutnya pencairan bantuan tersebut banyak kalangan menuduh IMF mempermainkan Indonesia dan memperkeruh situasi. Pendapat seperti itu antara lain dikemukakan Guru Besar FE-UI Lepi T. Tarmidi, pengamat ekonomi Kwik Kian Gie, dan pemimpin kaum reformis Amien Rais. Halaman media massa sampai bulan Agustus 1999 masih banyak dihiasi berita-berita krisis yang merisaukan dan protes terhadap IMF yang terus menunda-nunda pencairan pinjaman.

Di tataran yang lebih mikro, keraguan terhadap Habibie dipicu oleh liarnya minyak goreng dan tersendatnya distribusi sembako. Saking tidak enakunya situasi itu sampai-sampai ada yang curiga Habibie telah dikerjai oleh para pengusaha yang sebenarnya sedang dibantunya menghadapi kreditor. Tak putus asa, Habibie kemudian mengerahkan delapan menteri untuk bergotong-royong mengatasi keadaan. Namun minyak goreng tetap sulit didapat, dan harganya tetap di atas Rp 6.000/kg (jauh di atas harga yang dipatok pemerintah Rp 4.000 di tangan konsumen, kecuali membelinya saat operasi pasar. Soal operasi pasar ini banyak pakar ekonomi, antara lain Dr. Srimulyani Indrawati dan Marie Elka Pangestu (alumnus FE-UI yang aktif di CSIS), mengeritiknya sebagai gerakan mendistorsi pasar. Namun saat menjadi menteri di Kabinet

Indonesia Bersatu SBY-JK, kedua pakar ekonomi itu pun tak lagi memandangnya tabu. Bahkan saat ini, bulan Juni 2007, ketika roda ekonomi telah meggelinding pasti dan diklaim pemerintah telah membukukan pertumbuhan 6%, harga minyak goreng terus meroket di seluruh Indonesia beberapa bulan terakhir. Minyak goreng curah sudah berada di atas Rp 10 ribu/liter. Sedang Bimoli dan Filma telah melampaui Rp 17 ribu/liter. Operasi pasar yang digelar pemerintah SBY-JK bersama menteri-menterinya, yang dulu menentang cara-cara Habibie, tak membuahkan hasil. Seiring meningkatnya harga CPO dunia, minyak goreng menjadi langka. Runyamnya situasi saat ini dalam soal sembako, seakan mengembalikan orang ke masa Habibie.

Namun kabinet transisi Habibie, yang muncul di tengah tuntutan reformasi, jelas merasakan keadaan itu lebih pahit daripada Kabinet Indonesia Bersatu SBY-JK saat ini ketika tuntutan reformasi tak terdengar lagi. Habibie dulu seolah dikerjai para pengusaha, yang resah akibat ide-ide kabinet soal pembangunan ekonomi kerakyatan, hutan untuk rakyat, sistem distribusi gaya baru dan lain-lain. Apa pula pasalnya sehingga SBY-JK saat ini seperti mendapat perlakuan serupa? Padahal Kabinet Indonesia Bersatu sejak awal terlihat lebih ramah kepada pengusaha ketimbang kepada rakyatnya yang miskin dan merongrong. Gagasan tentang pembangunan ekonomi kerakyatan dan koperasi boleh dibilang tak pernah muncul dalam rapat-rapat kabinet. Lantas apa yang membuat dunia usaha, terutama yang bergerak di bidang CPO dan minyak goreng tak mendukung SBY-JK saat ini? Mengapa rakyat harus kembali berteriak mencari minyak goreng seperti delapan tahun lalu di masa Habibie?

Habibie memang telah dibuat panik dan pusing oleh kelangkaan minyak goreng di pasar. Sedang pabrik-pabrik minyak, yang tidak memiliki kebun sawit atau pabrik CPO, ikut pula menjerit kesulitan bahan baku. Itu terbukti dari protes pengusaha pabrik minyak di Lampung yang mengadu ke DPR waktu itu. Mereka mengaku tidak mendapat pasokan CPO, dan meminta pemerintah melarang ekspor komoditas itu. Rupanya pemerintah transisi belum mampu menjinakkan pengusaha CPO yang haus dolar, meski sebagian mereka adalah pengusaha-pengusaha yang dibantu dalam upaya merestruktuisasi utang dengan kreditor asing. Sementara kalau dilihat dari kesepakatan yang telah ditandatangani Soeharto dengan IMF, kegiatan ekspor CPO itu tidaklah haram. Bagi IMF apa pun boleh dilakukan asal bisa menambah devisa, meski rakyat negeri sendiri harus menggoreng telur di atas daun tanpa minyak seperti dilakukan sebagian penduduk Aceh waktu itu.

Singkatnya 90 hari Habibie, bersama Kabinet Reformasi Pembangunannya, sektor riil masih megap-megap. Pabrik-pabrik banyak yang tutup, baik karena kesulitan likuiditas maupun karena kesulitan bahan baku. Tidak terkecuali pabrik tahu dan tempe yang berbahan baku kedele. Arah yang dituju pun masih belum jelas. Apalagi yang bisa dilihat dari perjalanan kabinet reformasi pembangunan selama tiga bulan? Friksi, kata pengamat ekonomi UI Faisal H.Basri waktu itu.

Faisal menilik ada dua friksi besar dalam kabinet Habibie. Yang pertama, kelompok ortodoks. Ini diwakili Ginanjar, Budiono (Ketua Bappenas), Bambang Subianto (Menteri Keuangan), dan Syahril Sabirin (Gubernur Bank Indonesia). Yang kedua, kelompok populis, diwakili Adi

Sasono, AM Saefuddin, dan Soleh Solahuddin. "Kalau saja Presidennya kuat dan memperoleh mandat cukup dari masyarakat, maka yang bakal muncul adalah keseimbangan dari kedua ekstrem itu. Masalahnya sekarang yang muncul adalah kecenderungan tidak terjadinya gerak dinamis yang menghasilkan satu solusi seimbang. Yang terjadi justru tarik ulurnya ngotot-ngototan. Masing-masing kubu memiliki agenda politik sendiri-sendiri," jelas Faisal meyakinkan.

Masing-masing kelompok, kata Faisal, terus berkonsolidasi, sehingga polarisasinya makin kentara. Contoh paling kongkrit adalah perseteruan Ginjar dengan Adi Sasono. "Pada pertemuan delapan menteri membicarakan sawit di satu meja, begitu keluar keterangan mereka lain-lain. Itu akibat power basenya rendah, agenda politik yang tersembunyi, dan atau kepentingan pribadi," tambahnya panjang. Toh harus diakui banyak orang merasa lebih enak berhadapan dengan menteri di zaman Habibie daripada masa orba. Meskipun ada kubu-kubu di pemerintahan, menteri kini lebih terbuka, dan tak terlalu protokolair. Faisal menilai kubu ortodoks cenderung mengeluarkan kebijakan-kebijakan penge-tatan, misalnya menaikkan suku bunga, pembatasan kredit, mengurangi subsidi, dan sebagainya. Sementara kubu populis cenderung mengeluarkan kebijakan yang menyenangkan rakyat, misalnya subsidi sembako untuk rakyat miskin, kredit murah untuk koperasi, pengusaha kecil dan menengah, hutan untuk rakyat, dan sebagainya.

Namun kubu ortodoks tidak mendapat acungan jempol karena program-program pengetatannya. Soalnya di sisi lain mereka telah menggelontorkan uang negara sebanyak Rp 144 triliun (ada yang menyebut jumlahnya

sampai Rp 164 triliun) dalam bentuk BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) untuk membantu 55 Bank sakit di BPPN. Bantuan yang terlalu besar dan murah hati itu dianggap orang sia-sia (SWA no 15/XIV/23 Juli-5 Agustus/1998, Penyelamatan Sia-sia Bank Indonesia). Lebih jauh lagi gelontoran dana sebesar itu dinilai Kwik sebagai arogan, brutal, dan semena-mena. Apalagi dilakukan pada saat negara dan bangsa ini menghadapi krisis ekonomi berkepanjangan, dan pemerintah masih berusaha mencari pinjaman ke manca negara. Mestinya pada saat seperti itu, kata Managing Director ECONIT waktu itu Dr. Rizal Ramli, pemerintah mengguyur sektor riil dengan dana segar yang banyak, bukan malah memperketat likuiditas. "Pemerintah AS telah melakukan hal seperti itu ketika terjadi malaise ekonomi tahun '30-an dan terbukti efektif. Mengapa kita harus terima resep IMF untuk memperketat likuiditas?" jelasnya retorik.

Akibat salah obat ini, penyakit si pasien menjadi semakin parah. Lebih ajuh lagi. Tidak berbeda dari sektor riil, selama 90 hari Habibie, sektor keuangan juga nampak tidak membaik. Perbankan makin kronis, sakitnya tidak sembuh-sembuh. Sementara pemerintah belum juga mengumumkan kondisi masing-masing bank yang akan berguna untuk membangun kepercayaan. Nilai Rp terhadap US \$ under valued terlalu jauh. Bila semasa rezim Soeharto ada fimeo: dolar itu sama dengan Soeharto. Alias sama-sama tidak mau turun. Kini setelah 3 bulan Soeharto turun, dolar tetap tinggal di atas, dan sebentar-sebentar melonjak. Bahkan pernah mencapai di atas Rp 15.000/US\$. Akibatnya banyak perusahaan tidak bisa memproduksi karena sebagian atau seluruh bahan baku mesti diimpor. Mereka terancam pailit, karena tidak

mampu membayar utang yang telah jatuh tempo. "Sebenarnya sekitar 70% konglomerat Indonesia sudah bangkrut akibat terpuruknya nilai rupiah. Tak sedikit konglomerat yang nilai asetnya tinggal 15%, sementara utangnya membengkak hingga 500%," jelas Sofyan jujur jauh sebelum dia meniup terompet tanda bahaya.

Pernyataan dibenarkan Presiden Direktur lembaga riset PT Cisi Raya Wilson Nababan. Sebagai ilustrasi masalah berat yang dihadapi konglomerat saat itu Wilson menunjuk kasus Grup Tirtamas milik Hashim S Djojohadikoesoemo. Grup usaha ini pernah diprediksi akan berkembang pesat. Dalam tempo 10 tahun dia diyakini akan mampu menjadi sebesar Samsung atau Daewoo. Ketika krismon menerjang, Hashim terkapar bersama ratusan pengusaha besar lain. Di Semen Cibinong saja, rugi kursnya mencapai Rp 11 triliun, jauh di atas IPTN yang tidak dikehendaki IMF. Namun usaha putra bengawan ekonomi Indonesia itu tetap boleh jalan. Pemerintah lewat jalan apa saja diperkenankan membantu agar Tirtamas tak karam. Tahun 1999 diperkirakan Tirtamas akan melaba Rp 200 miliar. Laba itu sebenarnya cukup besar, tapi saat kelompok usaha ini menelan rugi kurs sebesar Rp 11 triliun, kata Wilson, jelas diperlukan waktu 50 tahun lebih untuk menutupinya saja.

Benny Sindhunata, Chief Research Officer Pusat Data Business Indonesia (PDBI) segendang sepenarian dengan Wilson. Lebih jauh lagi menurutnya ditinjau dari sisi ide, redistribusi aset dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah, memang mengurangi peran konglomerat yang selama ini mendominasi perekonomian sampai di atas 70%. Jadi ada dekonglomerasi dalam konteks pemerataan. Selama ini mereka menguasai industri dari hulu ke hilir dan

praktis menutup peluang orang lain ke bidang yang dikuasainya. Melalui penerapan UU Antimonopoli, redistribusi aset serta pemberdayaan usaha kecil dan menengah, komposisi ini diharapkan bisa dibalik: peran konglomerat menjadi sekitar 30%, sementara peran BUMN, industri kecil dan pelaku ekonomi di sektor informal lainnya 70%.

Bila krisis ini berlangsung terus, menurut Benny, yang paling dulu menyusut kemampuannya adalah penenggak BLBI. Mereka memang sudah masuk bangsal gawat-darurat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), seperti Grup Salim (BCA), Grup Gajah Tunggal (BDNI) Syamsul Nursalim, Usman Admadjaja (Bank Danamon), Grup Nusamba/Bob Hasan, dan lain-lain. Lalu di lapis kedua yang akan hancur adalah para konglomerat yang berjaya karena praktik KKN, khususnya bisnis keluarga Cendana, seperti: Grup Citra Lamtoro Gung Persada (mba Tutut), Bimantara (Bambang Trihatmojo, Sigit, Indra Rukmana, dan lain-lain.), Humpuss (Tommy Soeharto), Arseto (Sigit), Pentasena (Titiek) dan Artha (Ari Sigit).

Bisnis anak-anak pejabat dan mantan pejabat, kata Wilson, sebenarnya juga telah berkembang dengan pola serupa. Mereka lebih banyak mengandalkan proyek-proyek pemerintah. Mitra mereka, baik yang asing maupun yang lokal, menggandeng mereka juga dengan motif mendapatkan kemudahan. Di era reformasi semua bisnis yang berkembang lewat jalur KKN nampaknya tak akan bertahan. Habibie melalui menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Penertiban Aparatur Negara diakuinnya sudah berada pada track yang benar dalam upayanya membersihkan praktik KKN di seluruh jajaran instansi pemerintahan. Setelah 'kesaktian' mereka luruh, Wilson

yakin, para mitra ini pun bakal mundur teratur. Mereka yang akan bertahan adalah grup usaha yang berorientasi ekspor dan yang di masa lalu bertindak konservatif serta tak punya banyak utang, terutama dalam valas yang nilainya terus membengkak.

Krisis multidimensional diyakini akan menjadi seleksi alam yang sangat efektif dalam perekonomian Indonesia. Nantinya hanya perusahaan-perusahaan yang dikelola secara prudent saja yang bisa bertahan. "Memang tidak semua bisnis kroni berbau KKN. Ada juga yang dilakukan dengan benar dan dengan perhitungan bisnis yang matang. Yang itu akan bertahan dan berkembang di kemudian hari. Tapi yang selama ini mengandalkan fasilitas dan pengaruh kekuasaan ayah dan eyang mereka, akan tergulung bersama ratusan atau ribuan perusahaan lain. Yang tersisa di masa depan akan dipaksa oleh keadaan untuk berbisnis secara profesional," jelas Wilson bersungguh-sungguh.

Konglomerasi yang dibangun Sudono Salim (BCA, Indofood dan Indocement), menurut Wilson, memang telah dibangun, tumbuh dan berkembang bersama orba. Namun di sisi lain dia memiliki manajemen yang tangguh yang nantinya akan sangat berguna dalam iklim yang fair. Grup Salim dikenal sejak lama memiliki hubungan paling mesra dengan keluarga Soeharto. Selain bermitra dengan mba Tutut dan Sigit (BCA) serta Sudwikatmono (Indocement Tunggal Prakarsa, Indofood Sukses Makmur, dan lain-lain), grup ini juga paling banyak menerima fasilitas, dari monopoli tepung terigu hingga impor beras. Namun grup usaha ini akan survive karena pengalaman dan manajemennya yang bagus. Cuma ukurannya tidak akan sebesar dulu. Setidaknya di dalam negeri akan terjadi

penyusutan. Meski babak belur, diterjang krisis, mereka tak akan benar-benar punah. Mereka akan tetap eksis, tapi kepemilikan sahamnya menurun. Keluarga Salim boleh jadi hanya akan menjadi pemegang saham minoritas. Sebagian besar sahamnya beralih ke tangan Pemerintah atau pihak lain.

Namun sebagai badan usaha, Grup Salim akan terus hidup. Perusahaan-perusahaannya yang bergerak di bidang bahan baku dan alkohol akan mampu bertahan. Begitu pula Indocement dan Indofood, seperti telah disinggung di atas akan survive, meski monopoli trigu buat Bogasari dihapus. Wilson tak berlebihan. Berkat kepia-waian Dirut Bogasari Franciscus Welirang, perusahaan ini bisa mendapatkan bantuan terigu sebanyak 3 kapal dari pemerintah Australia dan Kanada. Dengan cara itu, di tengah iklim yang lagi bersahabat, Franky, begitu dia disapa, berhasil mempertahankan kedigdayaan Bogasari di bisnis terigu sampai sekarang. Sedang Indofood yang menjadi induknya nilai asetnya kini sudah berada di atas Rp 16 triliun. Sedang total revenue-nya sampai 31 Desember 2006 melampaui Rp 21.9 trillion. Jadi revenue-nya sudah melampaui aset.

Grup Sinar Mas (SM), konglomerasi milik Eka Tjipta Widjaja, yang memang lebih banyak bermain di pasar ekspor ketimbang domestik diyakini banyak orang akan menjadi yang terkuat di masa depan setelah redupnya Salim. Apalagi SM terlihat anteng-anteng saja ketika konglomerat lain megap-megap terlilit utang. Lewat ekspor *pulp* (bubur kertas), kertas budaya dan agro-bisnisnya (CPO, pisang, dan lain-lain), SM mampu menyedot US\$ miliaran dari pasar luar negeri. Mereka juga tak terhalang begitu banyak regulasi, tata niaga dan



kebijakan yang kerap mengacaukan pasar domestik. Ekspor CPO-nya memang sempat terhalang kebijakan larangan ekspor. Prediksi Wilson memang tak meleset, sampai utang grup usaha ini terbongkar pada akhir 1999.

Sedang bank kebanggaan pak Eka, Bank Internasional Indonesia (BII) sempat menjelma menjadi salah satu dari sedikit bank yang tak bermasalah. Ketika hampir semua bank dilanda *rush* di awal krismon, bank ini bergeming tak terusik. Toh waktu akhirnya membuktikan bahwa konglomerat terbesar kedua setelah Salim ini tak bisa menyelamatkan diri dari lubang yang digalinya sendiri. Lewat Asia Pulp & Paper, anak usaha yang dipimpin calon putra mahkota Teguh Ganda Wijaya, grup usaha ini telah menelan utang luar negeri US\$ 14 miliar lebih dari seratus lebih kreditor asing. Utang ini setara dengan 10% lebih utang luar negeri Indonesia. Seperti telah disinggung sebelumnya pada Maret 1998, menurut catatan Bank Indonesia (BI), utang luar negeri Indonesia sekitar US\$ 137,424 miliar. Dari utang sebesar gunung itu lebih separuhnya (US\$ 73,962 miliar) merupakan utang swasta besar alias konglomerat. Jadi utang APP sebesar US\$ 14 miliar itu berarti setara dengan 18% total utang swasta nasional. Utang itu tak mampu dikembalikan Teguh. "Waktu itu kita yakin krisis akan segera berlalu. Setelah 2 tahun yang berat ekonomi Indonesia akan melesat kembali. Lagi pula *cash flow* kita sangat bagus dan penghasilan kita dalam US\$. Jadi kita tidak merasa perlu melakukan hedging," jelas Yan Parta Wijaya terus terang ketika ditemui penulis untuk *Globe* (14 Desember 2006).

Dia tak membual. Sebelum krisis APP memang membukukan penjualan di atas US\$ 1 miliar/tahun. "Namun ketika harga kertas dan pulp jatuh, APP tak mampu

membayar utangnya," sambung Yan suram. Restrukturisasi utang ini berjalan alot dan berlarut-larut, sehingga grup usaha ini sempat dituding tidak memiliki niat baik untuk mengembalikan utangnya. Namun utang itu akhirnya berhasil direstrukturisasi pada 2003 dan berlaku efektif pada 2005. BII sendiri, bank yang menjadi kebanggaan SM, menderita kredit macet di grup usaha sendiri atau afiliasinya sampai hampir mencapai US\$ 1,3 miliar. SM boleh dibilang masuk kloter terakhir konglomerat yang terjerembab dalam kubangan utang valas, tak terlalu lama setelah Unibank milik Soekanto Tanoto (bos Raja Garuda Mas) kollaps. Toh sebagaimana Salim, SM pun diyakini banyak orang akan bertahan, meski kepemilikan keluarga Eka akan menyusut drastis dan banyak anak usahanya mesti direlakan pindah tangan atau dilikuidasi untuk melunasi utang. Kenyataannya memang tak sampai seburuk itu.

Setelah restrukturisasi disepakati dengan model yang dimodifikasi. Grup Sinar Mas tak lagi menjadi payung besar. Kerajaan bisnis ini dipecah 4 untuk menghindari bencana. Masing-masing kerajaan itu dikomandoi oleh putra-putra pak Eka. Nampaknya pada masa SBY-JK grup usaha ini akan semakin mengkilap. Apalagi setelah mereka menyatakan akan masuk ke industri bio fuel besar-besaran mulai 2007. Peluang ini memang dibuka lebar-lebar oleh pemerintah SBY-JK dalam rangka strategi energi nasional. Cuma karena pemerintah tak mempersiapkan sarana dan prasarannya, termasuk mesin-mesin murah pengolah jarak dan lain-lain untuk bio fuel, maka peluang itu hanya bisa disabet oleh pengusaha besar semacam Sinar Mas. Sebab bio fuel pengembangannya jadi bersifat estate dan padat modal. Pengusaha



kecil-menengah dan koperasi boleh gigit jari. Atau sekalian menjadi buruh perkebunan jarak untuk konglomerat yang tak terlalu terikat pada tanah air, karena setiap saat bisa henggang kemana pun mereka mau. Setelah krisis banyak konglomerat besar, termasuk keluarga Eka Tjipta Widjaja (Sinar Mas) dan Putra Sampoerna, tak mau tampil di media massa, kecuali pada saat dia memberikan sumbangan atau derma kepada masyarakat. Artinya mereka ingin menampilkan citra sebagai orang dermawan kepada masyarakat dan menolak publikasi bisnisnya yang banyak yang bisa jadi juga mendatangkan bencana.

Yang relatif mantap di tahun-tahun yang menyesak-nafas pada masa Habibie adalah Grup Lippo. Sebagian besar utang kelompok ini juga dalam rupiah, sehingga mereka tak perlu menanggung derita rugi selisih kurs. Seperti juga BII, Bank Lippo pun tak terusik penarikan masal oleh para nasabahnya. Bahkan dana pihak ketiga bank ini meningkat drastis. Di tengah kesulitan menyalurkan kredit komersial, Lippo banyak mengandalkan pendapatan dari penempatan dana di SBI dan antarbank. Pada masa kabinet transisi Habibie kelompok usaha ini lumayan mampu beradaptasi dengan iklim baru. James Riady, putra mahkota Grup Lippo, bahkan diangkat menjadi duta keliling Indonesia untuk AS.

Konglomerat lain yang diyakini bakal bertahan adalah Grup Astra. Konglomerasi yang didirikan dan dibesarkan William Suryadaja ini telah berpindah tangan pada 1993 karena berbagai tekanan. Dulunya grup usaha ini dianggap sebagai pelopor industri otomotif di tanah air. Dia mengawali bisnisnya sebagai (agen tunggal pemegang merek (ATPM) mobil Jepang (Toyota, dan lain-lain) yang

juga merakit dan mendistribusikannya di Indonesia. Meski berkembang sangat bagus, Astra tak pernah naik kelas menjadi produsen mobil. Tak pernah terjadi alih teknologi dari prinsipalnya kepada sang ATPM. Om Willem, begitu pendiri Astra itu disapa, sudah terdepak keluar sebelum alih teknologi itu terjadi. Sedang pemilik baru Astra tak terlampau peduli pada masalah alih teknologi. Sebagaimana ATPM lain (Suzuki Indomobil International dan lain-lain) Astra pun akhirnya lebih fokus pada keagenan dan bisnis-bisnis penunjangnya.

Di bisnis penunjang Astra memiliki banyak sayap: penjualan mobil dan servis/bengkel (Auto 2000), pemasaran mobil bekas (Mobil 88), pembiayaan kredit (Astra Credit Companies/ACC), penyewaan mobil (Toyota Rent a Car). Di asuransi dia memiliki Astra Insurance terutama mengandalkan *captive market* dari penjualan kredit lewat ACC. Sebelum krisis, ketika daya beli masyarakat kuat dan dorongan membeli mobil sangat tinggi, strategi ini menciptakan sinergi yang sangat bagus. Namun ketika daya beli masyarakat begitu terpuruk, hanya lapisan teratas saja yang masih memikirkan membeli mobil. Itu mengakibatkan penjualan mobil Grup Astra langsung anjlok sampai tinggal sekitar 20%. Lalu strategi *total services*-nya, yang sebelumnya sangat bisa diandalkan, malah menjadi blunder yang memberatkan perusahaan saat krisis.

Di sisi lain penjualan sepeda motor ikut mengempis.. Ini diakui Budi Setiadharna, Presdir PT Federal Motor. Penjualan sepeda motor di Indonesia anjlok hingga 50% lebih. Lembaga pembiayaan tak sanggup lagi mendanai. Sedang konsumen potensial, karyawan golongan menengah-bawah, banyak yang terkena PHK. Malah tak sedikit sepeda motor yang dibeli secara *leasing* dikembali-

kan ke lembaga pembiayaan, karena konsumennya tak sanggup mencicil lagi. Keadaan ini sedikit tertolong oleh ekspor. Di masa krisis yang ganas di era Habibie, Astra Agro Lestari (AAL) lah yang menjadi tumpuan grup usaha ini, karena mampu mencetak dolar lewat produk CPO, cacao dan karet. Kontribusi pendapatan AAL tercatat memang terus meningkat, meski masih jauh dari cukup untuk dijadikan *cash cow* bagi kebutuhan grup.

Sebab AAL sendiri belum memproduksi secara optimal. Dari sekitar 300 ribu hektare lahan kelapa sawitnya, baru sekitar 100 ribu ha yang bisa dipanen. Kelemahan lainnya adalah AAL belum memiliki industri hilirnya, baru di perkebunan dan pengilangan. Walhasil sumbangan agro-bisnis Astra hanya bisa meminimalkan kerugian grup. Padahal Astra telah mati-matian melakukan efisiensi dan mengecilkan skala perusahaan dengan melepas beberapa anak perusahaan dan penyertaannya, antara lain di LG Electronics dan Digital Astra Nusantara, yang dilepas ke Compaq. Awal September 1998 PT Astra Microtonics Technology, pabrik pembuatan *microchips* dan semikonduktor yang berbasis di Batam, tercatat telah dijual seharga US\$ 90 juta kepada Newbridge Asia, perusahaan investasi internasional asal Amerika Serikat yang digandeng Edwin Suryadjaya, putra kedua om Willem.

Bila grup usaha yang begitu kuat saja semacam Astra, Salim dan SM telah bergoyang seperti itu, bagaimana dengan Grup Gemala milik Sofyan? Meski sering meradang dan menggugat soal nasib konglomerat, Grup Gemala miliknya nampak stabil. Dia cuma mengaku terpukul di komponen suku cadang, karena pasarnya tergerus hebat sampai tinggal 15%. Sebagian besar produknya (80%) memang dilempar di pasar domestik kepada

ATPM. Sedang bisnis propertinya, seperti Atrium Senen dan Pasadena ikut terpuruk. Cuma karena portofolionya relatif kecil di properti, dia tidak terlalu memberatkan. Bisnis jasanya ada yang menguntungkan (asuransi dan distribusi), tapi ada juga yang loyo, misalnya Nomura Securities yang karam dan Bank Dana Utama yang sejak krismon tiap hari menyumbang kerugian. Divisi perkapalan Gemala, yang dulu memberi kontribusi bagus, ikut lesu karena turunnya ekspor ke AS dan Jepang. Dia tertolong karena kontrak jangka panjangnya dengan Jepang. Komponen otomotif yang dulu memberi kontribusi 40%, selama krisis malah menjadi sumber kerugian. Yang masih kinclong produk aki. Produknya 90% diekspor, terutama ke Australia, Inggris, Asia dan Eropa. Sedang bisnis kimia dan manufakturnya terpaksa dilepas ke mitra asingnya guna menutup kerugian di bidang lain.

Meski demikian Sofyan nampaknya tak terlampaui risau. Yang lebih merisaukannya justru program pemerintah Habibie yang kalau tak hati-hati, kata dia, bisa memperburuk situasi, sehingga 80% konglomerat akan mati. Di sisi lain dia mengajak para konglomerat mawas diri dan mengubah orientasi agar tidak terus-menerus berkolaborasi dengan pemerintah. Bagi banyak kalangan pernyataan perang terhadap praktik KKN, monopoli dan persaingan tak adil merupakan peluang bagus bagi pengusaha profesional untuk tampil di gelanggang. Harapan besar tampaknya diletakkan di pundak Grup Bosowa (Aksa Mahmud) dan Grup Kalla (Jusuf Kalla), pemain lawas yang kuat di trading. Grup Texmaco (Marimutu Sinivasan) juga bisa dijadikan tumpuan di masa depan karena kekuatan mereka di industri manufaktur, permesinan, suku cadang dan tekstil. Dia bahkan berhasil

membuat mobil sendiri dengan kandungan lokal 85%, termasuk blok mesinnya, sebelum krisis menggulung republik.

Bila pemerintah pandai memanfaatkan core competence Texmaco yang telah dibangun sejak 1968, tentu industrialisasi pertanian, perikanan, dan lain-lain akan cepat mendapatkan bentuknya yang nyata. Grup usaha yang sangat inovatif ini sanggup menyediakan mesin-mesin yang dibutuhkan oleh industri di tanah air, bila diberi kesempatan. Cuma sebagaimana grup usaha besar lainnya, perintis industri paling terintegrasi di Indonesia ini juga memiliki utang lumayan gede yang terjadi saat krisis. Utang itu pun membengkak seiring meroketnya nilai US\$ terhadap Rp.

Pada saat seperti itu banyak orang merindukan kestabilan nilai tukar. Apalagi para pengusaha. Mereka menginginkan equilibrium baru yang jelas dan ajeg, sehingga semuanya bisa diperhitungkan kembali. Habibie, sang presiden tanpa wapres, juga rindu stabilitas nilai tukar. Itu diungkapkan dengan emosional di depan IMF, sebagaimana diceritakannya kepada Kompas dan Republika (Kompas, 3/8/98), Habibie mengaku tidak peduli (I don't care) apakah mata uang Rupiah terhadap dolar akan stabil pada angka Rp 10.000 atau Rp 12.000/US \$, yang penting stabil.

Namun pernyataannya itu membuat pengeritiknya semakin panas. "Bagaimana tidak apa-apa, bila ternyata bagian terbesar dari barang yang kita butuhkan sehari-hari dan bahan baku dari pabrik-pabrik kita mesti diimpor? Dengan terpuruknya nilai rupiah sampai Rp 10.000/US\$ saja, bagian terbesar pabrik sudah akan tutup. Lalu bagaimana mereka hidup?" kata Kwik. Pengamat ekonomi

kondang itu tidak mengada-ada. Tak beberapa lama setelah pernyataan itu, sekitar 21 pengusaha menulis kepada Presiden dan Mahkamah Agung agar menyatakan kondisi ekonomi dan keuangan Indonesia dalam keadaan darurat (force majeure), sehingga memungkinkan swasta tidak membayar utang pada saat itu. Mereka antara lain pengusaha papan atas Yan Mogi (PT. Propertindo Surya Graha), Yanti Sukamdani, Junita Ciputra dan Harun Hajadi (PT. Kharismakusuma Pujalestari).

Tidak membaiknya keadaan Indonesia setelah 90 hari dipiloti Habibie membuat banyak orang menilai mantan orang nomor satu di IPTN itu tak punya konsep dan arah yang jelas dalam memimpin Indonesia. Akan seperti apa Indonesia tahun depan? Atau Tahun 2000? Bagaimana pula dengan pendapatan domestik bruto (PDB) kita? Dapatkah meningkat lagi setelah anjlok dari US\$ 1000 menjadi US \$ 216/kapita (menurut perhitungan Kwik dengan kurs Rp 10.000/US\$, dan kontraksi 10% dibanding sebelum krisis seperti diakui pemerintah).

Habibie sendiri membantah bila dirinya dianggap tidak punya konsep. Semua tindakannya selama menjabat Presiden RI ketiga adalah dalam kerangka konsepnya untuk membawa bangsa ini keluar dari krisis. Menurut Presiden mulai September tahun ini pesawat (Indonesia), yang beberapa bulan terakhir dipilotinya agar tidak terhempas dan sampai kini dalam kendalinya, masih terbang rendah. 'Pesawat Indonesia' akan mulai menanjak hingga pada posisi yang pernah dicapai sebelumnya. Untuk itu saya butuh waktu 3 tahun. Jadi hingga 2002," kata Habibie menjanjikan sekaligus memohon agar diberi tenggat waktu lebih panjang.

Meski akhirnya terbukti mampu menjinakkan dolar

dari Rp 15.000-17.000/US\$ saat memulai pemerintahannya menjadi Rp 6.700/US\$ saat menyerahkan estafet kepada Gus Dur. Juga terbukti berhasil mengerek indeks harga saham gabungan IHSG dari 300 ke 700, Habibie saat itu tidak bisa menjelaskan konsepnya secara gamblang. Dia tak dapat menunjukkan bagaimana langkah-langkahnya membawa 'pesawat Indonesia' menanjak lagi. Tak dapat diketahui pula bagaimana konsep itu harus dijalankan, bagaimana tahapannya, dan bagaimana pula hitungan-hitungannya. Sedang inflasi secara akumulatif telah mencapai 80 sampai 100% tahun 1998 menurut perhitungan IMF. Bagaimana melunakkannya? Semuanya masih gelap. Tidak heran bila orang meragukan konsepnya. Bahkan banyak juga yang meragukan apakah ahli pesawat itu benar-benar punya konsep atau tidak. "Di bidang ekonomi Habibie sangat tergantung pada Widjojo. Padahal ilmu mereka (Widjojo, Ali Wardhana, Ginanjar) dari dulu itu-itu saja, yaitu IMF, Asian Development Bank, World Bank, dan negara donor. Dan kini terbukti international capital-lah yang menyebabkan kita hancur dengan utang-utang itu," kata Syahrir pasti. "Kebijakan Indonesia satu, IMF," tambahnya. Cuma seperti yang terbukti kemudian setelah kabinet transisi Habibie, Kabinet-kabinet selanjutnya pun tak bisa melepaskan diri dari cengkraman IMF, Asian Development Bank, World Bank dan Negara donor. Karena itu pula perubahan radikal tak pernah bisa dibuat, mungkin tanpa disadari kaum intelektual bangsa ini telah berhasil dilumpuhkan.

#### 4. Upaya Menjinakkan Harga Sembako

Diberitahukan kepada para pembeli minyak goreng, bahwa terhitung mulai 18 Juni 1998 penjualan minyak goreng dialihkan ke PT Dharma Niaga. Alamat: Jl. Kalibesar Barat 11 Jakarta Kota. DA. nomor 0706 a/n Pasar Rebo Agency sebanyak 1.089 kg, pengambilan di KPB, dibatalkan.

Kalimat-kalimat tadi tertera pada papan pengumuman di PT Kantor Pemasaran Bersama (KPB) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di Jl. Cut Meutia, Jakarta (17/6/98). Pemberitahuan tersebut sekaligus mengakhiri tugas KPB. PTPN sebagai penyalur tunggal minyak goreng. PT.Dharma Niaga (DN) mengambilalih tugasnya. Tiga minggu kemudian DN sudah memiliki sebuah gudang seluas 2 ribu meter persegi di kawasan Penggilingan, 7 tangki minyak berkapasitas 8,5 ton/tangki, dan mempekerjakan 200 karyawan pengepakan (160-nya wanita). Mereka dibayar Rp 8.500/hari. Dalam sehari DN bisa memasarkan 40-50 ton minyak goreng tak bermerek. Sebagian besar dipasok PTPN dari Medan. Prestasi itu sebenarnya luar biasa, tapi karena besarnya pasar yang mau dilayani, prestasi tersebut menjadi tak berarti. Minyak sebanyak itu hanya dapat menjangkau 20-25 kelurahan di DKI Jakarta.

Namun DN memang tidak menyerah. Perusahaan itu kemudian menambah kapasitasnya menjadi 100 ton/hari. Ini pun tentu masih terlalu kecil untuk bisa meminyaki seluruh Indonesia, tanah air dengan 200 juta lebih penduduk. Satu-satunya jalan, kata Menperindag Rahardi Ramelan, adalah menambah jalur distribusi. "Saya tidak

mau mengatakan DN gagal menangani minyak goreng, tapi semakin banyak jalur distribusinya akan lebih baik buat rakyat," jelas Rahardi waktu itu. Begitulah selanjutnya PT Tjipta Niaga (TN), dan Pantja Niaga (PN) menemani DN dalam penyaluran minyak goreng. Dalam praktiknya ketiga BUMN Niaga itu pun dianggap tidak cukup efektif, maka Induk-induk Koperasi Pasar (INKOPPAS), dan berbagai jenis koperasi, serta Bulog disuruh ikutan menangani distribusi minyak goreng. Terobosan ini tentunya bukan tanpa dasar. "Jalur distribusi lama pada hemat kami sebagian memang hancur akibat kerusakan. Sementara yang tidak rusak, distributornya tidak berada di dalam negeri," kata Direktur Pelaksana KPB Dr. H. Asep T. Tojib berlogika ketika ditemui penulis waktu itu untuk majalah SWA.

Bagaimanapun rasionalnya penjelasan pak Asep, kelangkaan minyak goreng dipasar tetap saja misterius. Seakan ada kekuatan lain yang sedang bermain di sini yang menyebabkan seretnya pasokan ke pasar. Apa pun yang dilakukan pemerintah untuk mengatasinya, tanpa menemukan biang keladinya, dapat dipastikan persoalan tak akan beres. Betapa tidak! Sebagai penghasil CPO/minyak mentah sawit terbesar II dunia setelah Malaysia, rasanya tak pantas bila Indonesia tertimpa bencana kesulitan minyak goreng. Data Dirjen Perkebunan Departemen Pertanian menunjukkan pada 1997 Indonesia memiliki 2,4 juta ha areal sawit. Dari lahan seluas itu, menurut Capricorn Indonesia Consult Inc (CIC), 1,5 juta ha telah memproduksi dan menghasilkan 5,5 juta ton CPO dan 1,2 juta ton PKO (minyak inti sawit). Kebutuhan dalam negeri sampai akhir Desember 1997, kata Kabulog Beddu Amang, hanya 2,7 juta ton CPO.

Pabrik minyak goreng merupakan konsumen CPO ter-

besar (60%), sisanya diserap industri margarin, sabun, dan lain-lain. CIC mencatat sampai 1998 di tanah air ada 51 industri minyak goreng sawit yang memproduksi, tersebar di 14 propinsi. Total kapasitas mencapai 4.471.142 ton/tahun. Di samping itu masih ada 44 industri minyak goreng kelapa dengan kapasitas produksi 738.235 ton/tahun. Masih menurut CIC tahun 1996 kebutuhan minyak goreng domestik sekitar 2.140.000 ton. 1997 meningkat menjadi sekitar 2.230.000 ton. Kebutuhan meningkat rata-rata 5,1%/tahun. Itu masih di bawah pertumbuhan produksi CPO (12%/tahun). Berpatokan pada data-data di atas, mestinya pasokan minyak goreng buat republik ini aman, bahkan berlebih. Jadi bila kenyataan berbicara lain atau rakyat jadi kesulitan mendapatkan minyak goreng, maka pemerintah mestinya tidak hanya menangani jalur distribusinya, tapi menyelidiki apakah pabrik-pabrik minyak goreng telah memproduksi maksimal. Sebab bisa jadi mereka kesulitan bahan baku, karena CPO lari ke luar negeri.

Banyak pengamat sangsi terhadap cara pemerintah menanganani persoalan ini, karena belum menyentuh inti masalahnya. Padahal tanpa mengerutkan dahi pun permasalahan terlihat gamblang. Wakil Ketua Umum Federasi Asosiasi Minyak dan Lemak Nabati Indonesia (FAMNI) H.Tarmidzi Rangkuti, MSc, Ec berpendapat masalahnya adalah suplai tergangu akibat anjloknya nilai tukar Rp terhadap US\$. Jadi berapa pun penyalurnya ditambah, bila barangnya memang kurang, tidak akan menyelesaikan masalah.

Praktisi distribusi Djoko Tata Ibrahim juga punya pendapat senada, yaitu berkurangnya suplai minyak goreng. Cuma menurut Djoko penyebabnya bukan karena

CPO-nya lari mengejar dolar. "Berapa sih jumlah mereka yang lari ke luar negeri? Klien saya tidak berkurang kok!" kata Presdir Interimas Tata Trading itu cepat. "Suplai minyak goreng memang berkurang, akibat krisis ekonomi berkepanjangan. Produsen mengurangi produksi, karena kesulitan likuiditas dan bunga tinggi. Hal serupa juga terjadi pada sisi pedagang. Bila dulu mereka berani stok untuk dua bulan, kini paling banter mereka stok untuk seminggu, sehingga persediaan sedikit," jelasnya menyakinkan. "Bila kerusakan dianggap biang keladinya, maka minyak goreng baru langka setelah kerusakan dong. Kenyataannya kan sebelum kerusakan sudah langka," tambahnya berlogika. Toh dia tidak keberatan dengan sistem distribusi gaya baru itu. "Sebagai tambahan jalur distribusi itu bolehlah," katanya tersenyum.

Jalur distribusi minyak goreng baru itu, sebagaimana digambarkan Pak Asep, menjadi seperti ini: KPB (kembali pada fungsi semula) memonitor produksi CPO PTPN-PTPN, lokasi produksi, dan pelabuhan muat. CPO, yang merupakan 80% bahan baku minyak goreng sawit, lalu dikirim KPB ke pabrik-pabrik untuk diolah menjadi minyak goreng. Setelah jadi, KPB mengirimkannya ke pusat-pusat distribusi BUMN Niaga, Bulog, dan Inkoppas (Induk Koperasi Pasar) sebagai distributor utama. Inkoppas mendistribusikan minyak gorengnya melalui koperasi-koperasi pasar (koppas). Sementara Bulog melalui koperasi umum dan koperasi fungsional (pegawai negeri, ABRI, dan lain-lain). Sedang ketiga BUMN Niaga mendistribusikannya ke berbagai pasar lain atau langsung ke kelurahan-kelurahan. Apa yang kemudian dikenal sebagai operasi pasar biasanya dilakukan ketiga BUMN Niaga ini. KPB memberi harga Rp 3.500 pada setiap titik, dengan catatan di

tangan konsumen harganya tidak boleh di atas Rp 4.000/kg.

Meskipun tidak sempurna, upaya pemerintah Habibie menjaga stabilitas harga minyak goreng sebenarnya bukan tanpa hasil. Harga minyak goreng tidak lagi melonjak-lonjak. Cuma karena pasokannya tidak kontinyu, variasi harganya di berbagai tempat lumayan gede. "Bapak dagang di sini setiap hari dari jam 8/jam 9 sampai sehabisnya saja. Kadang jam 11 sudah habis. Tapi tempo-tempo bapak enggak dagang, karena barangnya enggak datang," tutur Pak Wignyo terus terang. Pedagang dadakan sembako (terbatas minyak goreng, gula pasir, dan beras) di halaman stasiun KA Tebet ini mengaku bisa menjual 50-60 plastik minyak goreng curah ukuran 1kg/hari. Ayah 4 putra itu mendapat pasokan dari petugas Bulog dengan harga Rp 3.500/kg, dan menjualnya seharga Rp 4.000/kg. Di pasar Inpres Cipinang Besar Selatan dan Pasar kecil di depan stasiun KA Jatinegara minyak goreng curah dijual seharga Rp 6.800-7.000/kg. Artinya di tangan konsumen harganya tidak lagi Rp 4.000, kecuali mereka datang langsung ke pasar induk atau membeli pada orang-orang semacam Pak Wignyo.

Pertengahan Juli '98 harganya bahkan mencapai Rp 7.000-7.500/kg. Bandingkan dengan harga yang ditetapkan pemerintah Rp 4.000/kg sampai di tangan konsumen. Apalagi bila kita mau menoleh agak ke belakang, Juli 1997 harga minyak goreng sawit (tanpa merek) masih Rp 1.650/kg. Oktober tahun sama naik sedikit menjadi Rp 1.700/kg. Yang bermerek harganya agak mahal, Bimoli ukuran 1 liter misalnya Rp 2.600, Filma Rp 4.300, dan Kunci Mas dijual Rp 2.900/liter. Jadi pemerintah dengan segala jerih payahnya itu, termasuk lewat sistem distri-



busi gaya baru, sampai saat ini belum berhasil mengembalikan harga dan pasokan minyak goreng ke kondisi sebelum Juli 1997.

Toh setelah berjalan 3 minggu, pemerintah kemudian melikuidasi sistem distribusi gaya baru. Dia dianggap kepanjangan. Mulai Agustus 1998 penyaluran minyak goreng sepenuhnya di tangan Bulog. Jalur distribusinya diperpendek. Bulog akan menyalurkannya ke koperasi-koperasi dan pengecer. Dari sini minyak goreng langsung disalurkan kepada konsumen. Tujuannya cuma satu: agar pasokan minyak goreng ke pasar bisa stabil, dan harganya bisa dijangkau konsumen yang daya belinya sudah hampir amblas.

Menurut pak Asep ada dua hal yang menyebabkan langka dan naiknya harga minyak goreng. Pertama, pembelian para konsumen cenderung bersifat rush. Mereka membelinya jauh di atas kebutuhan untuk keamanan. Kedua, para pabrikan minyak goreng swasta, yang biasanya men-suplay minyak goreng ke masyarakat, menahan produk mereka karena tidak dapat bersaing dengan produk PTPN yang harganya rendah (4.000/kg). Sementara yang non PTPN harganya bisa Rp 6-7.000/kg. Bila itu benar, berarti suplay total kebutuhan domestik saat ini sepenuhnya bergantung pada produk PTPN. Padahal kapasitas produksi CPOnya saja hanya 1,56 juta ton/tahun (130.000 ton/bulan). CPO sebanyak itu disalurkan ke rafinary milik kelompok PTPN (PTP.Agrintara, PT Adolina, dan PTPN IV) 530.400 ton, dan sisanya diolahkan prosesor swasta. Dengan rendemen 73%, maka dari kelompok PTPN menghasilkan 387.192 ton dan dari prosesor swasta 751.608 ton/tahun. Kebutuhan nasional tahun ini diperkirakan 2,8 juta ton. Bila swasta tidak

berpartisipasi, akan ada kekurangan minyak goreng sekitar 1,7 juta ton.

Kenyataannya memang tidak sampai sejelek itu. Meskipun tidak berlimpah, minyak goreng bermerek dari swasta masih bisa didapat. Siang (29 Juli 1998) di Tip Top Rawamangun dan Bazaria Ramayana Jatinegara, dengan stok sangat terbatas, Filma dijual seharga Rp 6.650-7.160/liter, Refil kemasan plastik/0,50 liter Rp 4.625, Barco Rp 10.000/liter, Sun Rise Rp 8.680/liter. Vetco (minyak kelapa) Rp 9.970/liter. Itu sekaligus berarti produsen swasta berhasil memaksakan harga internasional kepada konsumen lokal. Hasil pengamatan di kedua supermarket itu menunjukkan kurangnya merek terkenal di pajang di rak. Bimoli (produk Indofood/Grup Salim) sampai pk. 14.30 di Tip Top kosong samasekali. "Bimoli sudah lebih dua minggu ini tidak ada, kosong," kata seorang pramuniaga terus terang. Filma (produk Sinar Mas/Eka Tjipta) ada beberapa botol, Sun Rise agak banyak tapi harganya Rp 8.680/liter. Agak aneh sebetulnya bila Bimoli sulit, karena sebagaimana dinyatakan Chief Executive Officer PT Salim Indoplantation Rudyan Kopot, perusahaannya tidak mengekspor CPO. Produksinya habis diserap anak perusahaan Grup Salim lainnya. Itu berarti produksi minyak goreng grup Salim seharusnya tidak berkurang.

Sebuah sumber di Ramayana yang ditemui penulis waktu itu buat majalah SWA mengakui distribusi minyak goreng merek terkenal agak seret. "Sekarang ini yang banyak beredar justru merek yang tidak begitu terkenal, seperti Tropical, Vetco, Barco, Refil, dan lain-lain. Filma dan Bimoli sulit," ujar Agus, sebut saja begitu. Sejak habis lebaran kita beli cash dari distributor (pembayaran kurang dari satu minggu dianggap cash). Itu pun kita hanya



dijatah 3 kali order/bulan. Sekali order 50 karton/toko (per karton 12 botol satu literan). Bayangkan kita harus bayar cash untuk 60 toko," sambungnya. Dia menolak menyebut harga belinya dari distributor, tapi menurutnya margin yang diambil Ramayana sangat kecil, hanya 4%. Padahal itu sudah tanpa perantara. Bimoli dan Sun Rise dia pesan langsung dari distributor resmi Indomarco, Filma dan Kunci Mas dari Interma, Tropical dari Bina Karya Prima, Vetco dari PT Hasil Kesatuan. Agus mengaku bila dilos, dalam waktu sehari saja semua minyak goreng di Bazaria Ramayana akan habis, tapi demi pemerataan setiap pembeli hanya dibatasi maksimal 3 piece.

Ketika fakta kelangkaan minyak goreng itu ditanyakan pada Djoko Tata Ibrahim, dia tidak membantah. "Itu bisa saja terjadi. "Dulu 80% penduduk mengkonsumsi minyak curah, 20% minyak bermerek. Karena minyak curah sulit didapat, maka kebanyakan mereka mencari yang bermerek. Akibatnya yang bermerek jadi cepat habis. Sementara pedagang tidak bisa stock," paparnya cepat. Bagaimana dengan pembatasan? "Sebenarnya tidak ada pembatasan. Volume kita masih sama dengan yang dulu, tapi karena situasinya tidak normal: konsumen minyak tak bermerek ikut membeli yang bermerek, maka persediaan cepat habis. Agar semua kebagian, maka kita atur. Kalau enggak, nanti di daerah tertentu dapat banyak, di daerah lain tidak ada samasekali," jawabnya rasional. Presdir Interma Tata Trading itu mengaku lupa berapa volume distribusi minyak gorengnya per bulan.

Pemerintah nampaknya belum puas dengan segala upaya yang telah dilakukannya selama ini dalam mengatasi binalnya minyak goreng. Manuver-manuver baru terus dilakukan. Lihat saja ekspor CPO yang baru dibuka

22 April 1998 (dipajak 40%) sesuai kesepakatan dengan IMF, telah dinaikkan menjadi 60%. Namun karena keadaan tidak membaik, pengetatan akan segera dilakukan. Gejalanya mulai terlihat pada pernyataan Menpangan dan Hortikultura A.M. Saefuddin. "Sangat mungkin pemerintah akan stop ekspor CPO samasekali, supaya pasokan minyak goreng cukup, lalu harga turun," katanya mantap. "Pajak ekspor sebesar 60% tidak efektif, karena harga di luar negeri masih cukup menguntungkan, sehingga suplai di dalam negeri kurang," tambahnya. Akan efektifkah?

Mengingat pengalaman yang sudah-sudah, banyak kalangan skeptis terhadap efektivitas kebijakan itu. Ketika pemerintah melarang ekspor CPO Akhir Desember 1997-21 April 1998 saja, misalnya, pasokan CPO ke pabrik tetap seret. Sementara pada saat kran ekspor ditutup, di pelabuhan Rotterdam Belanda, pasar CPO terbesar dunia, mencatat adanya pengiriman 100.000 ton CPO dari Indonesia. Pengusaha kita yang haus dolar rupanya amat gesit. Nah ketika harga internasional CPO mencapai US\$ 675/ton dan kurs sudah melejit menjadi Rp 14-15.000/US\$, siapa mau menjual di dalam negeri? Pemerintah mesti melakukan komitmen baru dengan para produsen CPO di tanah air, agar mereka mengamankan kebutuhan dalam negeri lebih dulu.

## **5. Kabinet 512 hari Habibie**

Binalnya CPO dan langkanya minyak goreng, serta berbagai kesulitan hidup yang dirasakan rakyat pada 1998-1999, tentu tak bisa dinisbatkan seluruhnya kepada mantan menristek itu dan kabinetnya. Sebab ketika dia dilantik negara tidaklah berada dalam kondisinya yang prima, sehingga segala kesulitan yang menimpa rakyat

pada masanya bisa dianggap sebagai kemunduran. Bahkan sebaliknya republik sedang sakit berat, ketika dia duduk di pucuk pimpinan negara. Rasanya tak adil menilai kinerja pemerintahan transisi Habibie dengan ukuran normal. Kabinet Reformasi Pembangunan, yang dipakainya untuk mengatasi keadaan, dibangun Habibie dan mulai bekerja di tengah krisis yang sudah telanjur menjalar kemana-mana.

Ketika Soeharto lengser pada 21 Mei 1998, Habibie mewarisi negara porak-poranda. Utang luar negeri menggunung sampai menembus ambang batas aman US\$ 100 miliar, tepatnya sekitar US\$ 137,424 miliar pada Maret 1998. Dari utang sebesar itu lebih separuhnya (tepatnya US\$ 73,962 miliar) merupakan utang swasta besar alias konglomerat. Menurut siaran pers BI pada Februari 1998 dari utang segunung itu, US\$ 10,5 miliar di antaranya berjangka pendek. Sebagian besar utang ini berasal dari bank komersial yang mengenakan persyaratan berat: berjangka pendek dan berbunga tinggi. Pada saat sama nilai Rp terhadap US\$ telah menciut sampai di atas 500%, dunia usaha Indonesia langsung karam, menyusul perbankan yang sudah lebih dulu kolaps.

Habibie naik pangung kekuasaan pada saat seperti itu. Ribuan perusahaan tak mampu lagi bertahan. Pemutusan hubungan kerja merebak di mana-mana. Sementara tenaga kerja baru tak tertampung. Akibatnya jumlah penganggur bertambah sekitar 20 juta lagi. Keadaan semakin diperparah lagi oleh pengusiran tenaga kerja Indonesia dari beberapa negara Timur Tengah dan Malaysia. Ribuan pahlawan devisa dikirim kembali ke tanah air, pulang kampung. Masalah pengusiran dan penghinaan terhadap warga negara Indonesia dan TKI ini masih

berlangsung sampai sekarang, meski intensitasnya menurun. Rupanya sebagaimana kabinet transisi Habibie, pemerintah kabinet persatuan Gus Dur-Mega, Kabinet Gotong Royong Mega-Hamzah, dan Indonesia Bersatu SBY-JK pun tak cukup bernyali untuk membela mereka dengan cara elegan. Padahal situasinya relatif lebih terkendali dan roda ekonomi sudah menggelinding lagi. Keinginan untuk mengundang investasi asing sebanyak-banyaknya lebih dijadikan pertimbangan daripada harga diri bangsa. Di masa Habibie, yang dianggap tak cukup legitimated dan pertumbuhan minus sampai 13%, pertimbangan itu sangat kental.

Apalagi dia tak memiliki banyak pilihan setelah sang guru Soeharto menandatangani kesepakatan dengan IMF. Beberapa bulan sebelum dia naik tahta, republik telah masuk ke dalam jebakan utang (*debt trap*) yang kedua. Soeharto, yang telah melaksanakan cetak biru pembangunan ekonomi IMF sejak 1967 bersama Mavia Berkeley dan berakibat kegagalan yang menyengsarakan pada 1997, sekali lagi menyerahkan masa depan negerinya kepada IMF. Pada fase kedua ini Habibie diminta duduk di atas plana.

Keadaan ini sebetulnya sangat ironis. Mestinya pemerintah Soeharto boleh menuntut agar IMF ikut menanggung biaya kegagalan itu. Bukan malah memperbaharui cetak biru yang telah gagal, dengan segala konsekuensinya. Bila resep-resep IMF dan partnernya Bank Dunia memang bagus, mestinya setelah 25 tahun Indonesia sudah bisa tinggal landas. Setelah 5 kali pelita, jika resep-resep itu memang dikeluarkan oleh dokter ahli, seharusnya Indonesia sudah sembuh, sudah menjadi negara maju, bebas utang, bahkan menjadi kreditor

seperti Jepang. Yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya: Pemerintah mesti berutang lagi agar bisa bernapas. Mantan wapres itu tak punya pilihan lain. Bahkan langkah dan jalan yang mesti ditempuhnya pun telah dipilihkan IMF lewat 50 poin kesepakatan yang telah ditandatangani pendahulunya. Habibie, sang pengganti itu, tak diperkenankan memilih jalan-jalan lain untuk mengatasi keadaan. Di tangan IMF, laki-laki jenius itu dipaksa bertindak sebagai robot - bila tak bisa disebut boneka.

Padahal negara yang sakit parah ini memerlukan orang kreatif dengan kepandaian dan keberanian di atas rata-rata. Setelah orba kolaps dan negara masuk jurang kebangkrutan yang amat mengkhawatirkan, siapa pun yang melanjutkan estafeta kepemimpinan berikutnya sekurang-kurangnya harus melakukan 4 hal, tidak terkecuali presiden transisi Habibie. Keempat hal tersebut adalah: mengembalikan nilai Rp pada nilai real-nya. Itu yang pertama. Kedua, mendorong roda ekonomi agar berputar kembali di tengah sulitnya dana pembangunan. Ketiga, merestrukturisasi utang luar negeri pemerintah dan swasta. Keempat, menegakkan supremasi hukum terhadap mereka yang telah menyeret negara ke jurang kebangkrutan. Keempatnya bukanlah hal yang mudah. Apalagi bila diingat ke 50 poin LoI, jika dilihat secara teliti, tidaklah memberi peluang kepada pemerintah untuk mengatasi keadaan itu. Sebab sebagaimana telah kita lihat pada bab sebelumnya (GBHN Super ala IMF), itu lebih banyak mempersiapkan Indonesia untuk menjadi santapan asing.

Habibie jelas tak bisa meniru siapa pun untuk mengendalikan pesawat Indonesia di tengah turbulensi. Juga tak ada teori yang bisa dipakainya sebagai pijakan.

Buku-buku tentang politik penyelenggaraan negara dan ekonomi umumnya berbicara tentang keadaan normal, sehingga ilmu manajemen bisa berguna. Namun krisis adalah sesuatu yang unik dan setiap negara memiliki keunikannya sendiri. Apalagi Indonesia, yang dalam keadaan normal pun, ilmu politik dan ekonomi tak bisa dipakai mengambil keputusan.

Nah di tengah situasi yang tidak menguntungkan itu dan dukungan yang sangat minim di dalam negeri, Habibie terombang-ambing dalam dua tuntutan. Tuntutan pertama datang dari IMF yang menekannya untuk segera merealisasi 50 poin LoI yang telah ditandatangani Soeharto. Itu berarti di tengah krisis ekonomi berkepanjangan, ancaman kelaparan dan bencana alam, dia mesti segera meliberalisasi ekonomi Indonesia dan menjual aset-aset negaranya yang bagus-bagus untuk membayar utang, berapa pun biaya sosial politik dan keamanan yang harus ditanggung. Dia juga mesti menarik pajak lebih banyak, menaikkan TDL dan BBM, membuka kembali ekspor kayu glondongan, mengizinkan jual-beli konsesi HPH, dan lain-lain yang semacam itu. Di sisi lain ada tuntutan kaum reformis yang meminta dia melakukan tindakan radikal untuk mengatasi keadaan agar rakyat tidak semakin sengsara.

Terlepas dari berbagai kekurangan yang telah disebutkan di atas, harus diakui Habibie bersama kabinetnya telah melakukan tindakan cerdas dengan cara mengambil hati kaum reformis lebih dulu. Serentetan tindakannya yang bisa disebut di sini, antara lain: membebaskan tahanan politik dan narapidana politik (tapol dan napol) di awal pemerintahannya, termasuk Ketua dan pendiri Partai Rakyat Demokratik Budiman Sujatmiko dan tokoh

buruh Muchtar Pakpahan. Lalu dia memberikan pengurangan hukuman kepada 16.813 tahanan di seluruh tanah air. Tindakan reformistik lainnya adalah keberaniannya memberikan rehabilitasi kepada HR Dharsono, ir.Sanusi, Abdul Kadir Zaelani, dan AM Fatwa, dan lain-lain di hari Kemerdekaan ke 53. Lembaga SIUPP ciptaan Soeharto, yang amat dibenci insan pers dan penganut kebebasan, lewat Menteri Penerangan Yunus Yospiyah, dihapus Habibie.

Presiden yang suka ngomong blak-blakan ini tak canggung pula memberi gelar pahlawan reformasi kepada 4 mahasiswa Universitas Trisakti dan 1 siswa SMU yang mati tertembak aparat negara di kampus itu pada 12 Mei 1998. Kebebasan berserikat dan berkumpul, bahkan kebebasan untuk mendirikan partai politik yang selama ini diharamkan Soeharto, dibuka lebar-lebar Habibie. Semua itu disambut rakyat gegap gempita. Tak heran bila ketika pemilu digelar pada akhir masa pemerintahannya 200 lebih partai baru telah mendaftarkan diri untuk ikut berpesta. Tindakan-tindakan itu sedikit banyak telah memberi kesan bahwa reformasi telah berhasil, sekaligus membuat kaum reformis agak grogi.

Tentu orang terus menunggu tindakan lebih esensial lagi, seperti mengusut perusahaan-perusahaan kroni, harta hasil KKN, pengalihan saham bank-bank yang sudah telanjur menelan BLBI terlalu banyak, menghukum pemiliknya yang menyelewengkan dana nasabah dan dana BLBI, sekaligus menyita harta mereka, dan seterusnya. Cuma entah karena banyaknya persoalan yang melilit negeri ini, atau pikiran banyak orang tersita oleh harga sembako dan biaya hidup yang meningkat, atau karena sebagian merasa reformasi sudah berhasil, maka

tuntutan-tuntutan lain yang lebih esensial itu ditunggu dengan lebih sabar.

Tindakan-tindakan esensial tersebut, sampai dia diganti lewat pemilu, tak sempat dilakukan Habibie dan kabinetnya. Para penggantinya yang relatif lebih legitimated seperti Presiden Abdurrahman Wahid-Megawati, dan Megawati-Hamzah Haz juga tak sempat karena banyaknya persoalan baru. Bahkan SBY-JK, yang dipilih langsung oleh rakyat, seakan terpaksa membiarkan tuntutan-tuntutan reformasi itu membeku atau sirna dalam amnesia politik ekonomi rakyat, akibat tertumpuk masalah-masalah perut, pendidikan, kesehatan, keamanan dan bencana alam yang datang silih berganti dan berpindah-pindah ke seantero negeri.

Namun satu hal jelas terlihat bahwa rakyat dan kaum reformis pada masa Habibie mempunyai posisi tawar yang bagus. Suara mereka masih didengar oleh kabinet transisi itu. Indikatornya mudah didapat. Mereka berhasil menekan kabinet untuk tidak menaikkan BBM dan tarif dasar listrik, sekadar menyebut sebagian saja, meski IMF melotot. Bahkan kaum reformis berhasil menekan Habibie untuk tidak lagi membuat perangkat pasung, seperti Perpu no 2/1998 tentang Keamanan Rakyat. Selanjutnya rakyat menanti tindakan Habibie dan kabinetnya mengusut dan mengungkap kasus-kasus pelanggaran HAM, seperti penculikan, perkosaan, penjarahan berencana baik terhadap tanah dan harta negara, pengusaha, maupun rakyat kecil.

Yang lebih penting lagi, membawa Soeharto ke meja hijau, seperti janjinya pada surat kabar konservatif Korsel Chosun Ilbo. Yang terakhir itu sampai selesai masa jabatannya sebagai orang nomor 1 di republik tidak

terlaksana. Habibie cuma berhasil menggiring Soeharto menyerahkan sendiri aset-aset yayasan yang diributkan orang kepada negara. Soeharto juga sempat menjalankan pemeriksaan, bukan sebagai saksi atau terdakwa, tapi sebagai terperiiksa, suatu istilah baru yang dilansir Jaksa Agung Andi Muhammad Ghalib dan tak memiliki arti yuridis. Toh dalam urusan dengan mantan penguasa orba itu, apa yang dicapai Habibie boleh dibilang paling jauh. Sebab setelah itu tak ada lagi yang mampu menggiringnya sejauh itu. Kabinet Persatuan Abdurrahman Wahid-Megawati dan Mega-Hamzah yang lebih legitimated tak berupaya ke arah itu. Demikian juga Kabinet Indonesia Bersatu SBY-JK. Bahkan pada masa presiden pilihan rakyat itu, lewat Jaksa Agung Abdurrahman Saleh, kasus Soeharto sempat dinyatakan ditutup, sehingga menimbulkan protes luar biasa.

#### **6. Reformasi BUMN di bawah Tanri Abeng**

Terlepas dari berbagai kelemahan pemerintahan Kabinet Reformasi Pembangunan seperti telah dipaparkan di atas. Meski kurang mendapat dukungan di dalam negeri dan terus mendapat tekanan IMF, Habibie cukup gesit berselancar di antara dua karang itu. Salah satu yang paling menonjol di pemerintahannya adalah penataan kembali badan usaha milik negara, yang selama 32 tahun menjadi sapi perahan dan kasir penguasa. Dalam hal yang satu ini peranan Tanri Abeng, yang sudah manggung pada Kabinet Pembangunan VII Soeharto, menjadi sentral.

Berbeda dari zaman Soeharto, pada masa Habibie Menteri Negara (Menneg) BUMN Tanri Abeng memang mendapatkan peluang luas untuk merealisasi konsep-konsepnya. Itu sebabnya pada masa ini bintang Tanri

jauh lebih bersinar daripada di masa Kabinet Pembangunan VII-nya Soeharto. Pada masa akhir kekuasaan Soeharto, yang berlangsung cuma 70 hari itu, Tanri mengaku terlalu banyak diintervensi. Yang paling kasat mata tentunya, ketika dia, karena wewenangnya, seharusnya mengontrol 164 BUMN. Namun beberapa departemen terkait menolak menyerahkan kontrol itu kepada kementerian baru yang dikomandoi Tanri. Alasannya apalagi kalau bukan duit. Bagi mereka kehilangan kontrol berarti kehilangan sumber dana nonbujeter berlimpah yang selama ini bisa dipakai untuk apa saja. Mereka mengadu kepada presiden Soeharto. Hasilnya? Kekuasaan Tanri dikurangi. Menneg BUMN cuma boleh mengontrol 159 BUMN yang beroperasi di Indonesia. Sisanya yang 5 lagi, termasuk Pertamina dan Berdikari (BUMN yang bergerak dalam bidang perdagangan umum), tetap berada di bawah pengawasannya yang lama.

Contoh lainnya adalah di sektor perkebunan, khususnya yang bergerak dalam produksi dan pemasaran minyak sawit. Di sini Tanri punya wewenang mengelola 14 BUMN. Namun beberapa minggu setelah dia memegang kendali, pada suatu malam di bulan Maret 1998, Tanri ditelepon Presiden Soeharto. Jendral Besar itu memerintahkannya untuk menyerahkan kontrol kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan Bob Hasan, orang dekat presiden yang saat itu menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan. "I was disturbed by Soeharto's decision because I understood the motivation and interests that lay behind it. But he had given me a direct instruction, so there was little I could do about it. Fortunately fate intervened. Before the transfer of control over the palm oil plantations was finalised, Soeharto stepped down as

president. This gave me an opportunity to set things right," tulis Tanri jujur dalam bukunya *Indonesia, Inc, Privatising State-Owned Enterprises* (Singapore, 2001 p. 51).

Dalam masa jabatannya yang singkat, juga pada masa Habibie yang cuma berlangsung 512 hari, Tanri menata kembali manajemen BUMN yang selama 32 tahun amat amburadul dan rawan penyelewengan. BUMN yang biasa dijadikan sapi perahan rezim Soeharto itu ditata ulang, sekaligus dibuatkan master plan pembinaan dan privatisasinya. Di dalam kabinet transisi Habibie, Tanri dinilai banyak kalangan menduduki posisi istimewa. "Tanri adalah wakil profesional yang paling membangkitkan harapan," kata tokoh reformis dari UI Arbi Sanit, ketika dimintai komentarnya beberapa saat setelah susunan kabinet diumumkan. Penilaian senada juga dilontarkan Pakar Ekonomi dari FE-UI Prof. Dr. Anwar Nasution. "Top reformer dalam kabinet Reformasi ini, di mata saya, adalah saudara Tanri Abeng. Selama ini BUMN lebih banyak dijadikan alat perpanjangan tangan birokrasi pemerintah. Dalam masa jabatannya yang singkat, Tanri mampu mengubah BUMN menjadi benar-benar badan usaha. Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN telah berhasil memisahkan BUMN dari birokrasi pemerintah, memisahkan regulator dari operator, serta menghapus KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) dari BUMN," tutur Ekonom, yang biasa mengeritik pemerintah, itu terus terang.

Anwar memang tidak mengada-ada. Dalam soal pemberantasan KKN, misalnya, Tanri tergolong cepat mendeteksi dan cepat bertindak. Lewat kerjasama dengan departemen teknis terkait dan dikoordinasikan

dengan Menko Wasbangpan, dalam waktu 6 bulan sejak menjabat Menneg BUMN, Tanri telah menemukan 167 proyek dilingkungan BUMN yang berindikasi KKN (29 Desember 1998). Lalu pada 6 Juli 1999, dia menemukan 6 proyek lagi yang berindikasi serupa. Selanjutnya dari 173 kontrak berindikasi KKN itu (berasal dari 17 BUMN gemuk), tanpa tedeng aling-alang 79 proyek dibatalkan Tanri. Sisanya 25 proyek ditender ulang atau direnegosiasi, 59 proyek diproses dan diteruskan ke BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) untuk diteliti, dan 10 proyek dilanjutkan dengan kontrak kerjasama setelah dievaluasi lebih lanjut. Hasilnya? Dari tindak lanjut temuan tersebut, Menneg BUMN berhasil melakukan penghematan biaya sebesar Rp 465,2 miliar, dan penghematan anggaran investasi US\$ 991,3 juta atau Rp 9,913 triliun jika dihitung dengan kurs Rp 10 ribu/US\$.

Lebih jauh lagi, kata Guru Besar FE-UI itu, dalam era Kabinet Reformasi Pembangunan kita bisa melihat transparansi pengelolaan BUMN yang cukup baik. Anwar tidak berlebihan. Selama menjabat Tanri memang tidak bekerja secara rahasia. Tak seperti birokrat pemerintah pada umumnya, langkah-langkah Tanri sudah menjadi buku terbuka, yang bisa diikuti khalayak lewat berbagai publikasi. Bahkan pada akhir masa jabatannya Tanri masih membuat laporan pertanggungjawaban yang rapih, satu hal yang jarang dilakukan birokrat sebelumnya. Tanri, dalam hal ini, boleh dianggap sebagai tokoh perintis penegakan good corporate governance (GCG) di lingkungan BUMN.

Memang tidak semua yang dilakukannya berjalan mulus, mengingat kompleksnya masalah yang melilit BUMN. Namun dalam situasi yang penuh gejolak, restruk-

turisasi dan privatisasi yang dilakukannya boleh dibilang brilian. "Meskipun ada konsekuensi dengan lambatnya jadwal privatisasi. Itu wajar, karena harus melewati proses due diligence, pemeriksaan akuntan, konsultan, dan lain-lain. Tapi hasil dari proses ini bisa kita lihat dengan tingginya harga jual BUMN yang diprivatisasi," jawab Anwar cepat ketika ditanyakan masalah itu. Keberhasilan Tanri dalam merestrukturisasi dan memprivatisasi BUMN itulah, kata banyak kalangan, pada gilirannya berakibat pada menguatnya nilai Rp terhadap US\$ dan membaiknya IHSG. Kepiawaiannya membenahi BUMN dan menjadikannya pemain di pasar modal telah membuat pasar modal bergerak, dan investor masuk ke Indonesia.

Sekadar menyebut sebagian indikator saja, dalam waktu sekitar 6-7 bulan, dari Oktober 1998 sampai April 1999, Tanri berhasil menyeter ke kas negara sebesar US\$ 1,035 miliar atau Rp 10 triliun lebih dengan kurs Rp 10 ribu/US\$. Tangan dingin, pengalaman dan kemampuan manajemennya berhasil membenahi perusahaan-perusahaan plat merah itu, sehingga menjadi menarik buat investor. Itu pada gilirannya ikut mengerek nilai perusahaan, sehingga bisa dijual dengan harga yang bagus.

Sebagai bukti bisa kita lihat misalnya penawaran 14% saham semen Gresik, salah satu perusahaan BUMN yang telah dibenahinya. Penjualan itu berhasil menjaring Cemex sebagai partner strategis, sekaligus menyedot dana segar US\$ 122,1 juta atau Rp 1,379 triliun lebih dengan kurs waktu itu. Saham Indofood, yang dijual dalam dua termin di pasar modal (Januari dan April 1999), menghasilkan US\$ 115 juta atau Rp 1 triliun lebih. Pelindo II, yang dijual kepada mitra strategis menghasilkan US\$

215 juta atau Rp 1,892 triliun. Sedangkan Pelindo III yang juga dijual kepada mitra strategis menghasilkan US\$ 174 juta atau Rp 1,508 triliun. Sementara 9,62% saham Telkom yang dijual lewat pasar modal menghasilkan US\$ 409 juta atau Rp 3,277 triliun. Tidak heran bila Kabinet Reformasi Habibie, meskipun selama 512 hari kekuasaannya terus digoyang, berhasil melunakkan dolar dari Rp 15 - 17 ribu/US\$ saat memulai pemerintahan menjadi Rp 6.700/US\$ saat dia mengakhirinya. Di sisi lain indeks harga saham gabungan (IHSG) di pasar modal yang semula sudah anjlok ke level 300 berhasil dikereknya ke level 700. Bukan tidak mungkin bila Kabinet Reformasi mendapat perpanjangan waktu, atau setidaknya master plan dan program-program yang telah dicanangkan Tanri dilanjutkan, privatisasi BUMN bisa berjalan lebih baik.

Sebenarnya Tanri memang bukan orang pertama yang melakukan restrukturisasi BUMN. Sebelum krisis meluluh-lantakkan perekonomian Indonesia, rezim orba di bawah Soeharto telah melakukan dua kali restrukturisasi BUMN untuk memperbaiki kinerjanya yang buruk. Yang pertama terjadi pada awal-awal pemerintahan Soeharto sampai 1973. Yang kedua dilakukan pada 1989. Namun restrukturisasi BUMN harus diakui baru mendapatkan bentuknya yang paling sempurna dan komprehensif pada saat Menneg BUMN berada di bawah Tanri. Keberhasilan itu pada gilirannya kembali mempertegas kredibilitasnya sebagai manajer jempolan yang telah diakui dunia..

Upaya pemberdayaan BUMN di bawah Tanri dikenal dengan nama Program Reformasi BUMN. Program itu dibagi dua tahap. Pada tahap pertama, Menneg BUMN mencaangkan tindakan cepat yang harus diambil untuk memperbaiki kinerja, tanpa menyentuh aspek fundamental



perusahaan. Untuk mewujudkan itu Tanri meluncurkan 3 agenda besar: restrukturisasi, profitisasi, dan privatisasi. Yang dimaksud dengan restrukturisasi di sini adalah upaya peningkatan daya saing BUMN melalui penajaman fokus bisnis, perbaikan skala usaha, dan penciptaan core competence. Sedang profitisasi merupakan upaya untuk meningkatkan secara agresif efisiensi perusahaan. Sementara privatisasi ditujukan untuk meningkatkan penyebaran kepemilikan saham BUMN, meningkatkan akses kepada pasar internasional, pendanaan, dan teknologi.

Reformasi BUMN tahap dua, merupakan upaya sistematis untuk memperbaiki aspek fundamental perusahaan. Sasarannya adalah menciptakan perusahaan Indonesia yang berdaya saing dan berdaya cipta. Visinya tidak muluk-muluk. Cuma ingin menjadikan BUMN sebagai perusahaan multinasional Indonesia yang berukuran menengah, terfokus, dan memiliki core competencies tertentu. Dengan demikian diharap sebagian BUMN Indonesia akan masuk dalam nominasi Fortune 500 sebagai perusahaan yang kompetitif pada tingkat dunia dan berdaya cipta tinggi. Meski tak semua yang diinginkan Tanri menjadi kenyataan, karena singkatnya waktu yang dimilikinya. Namun kabinet transisi Habibie sebenarnya boleh bangga. Dalam 512 hari kekuasaannya yang terus digoyang, lewat kepewayaan Tanri, dia berhasil melunakkan kurs sampai ke level Rp 6.700/US\$ dan IHSG di angkat dari level di bawah 300 ke level 700. Keadaan itu secara gamblang mengindikasikan hidupnya kembali pasar modal Indonesia yang sempat mati suri karena minimnya transaksi. Hidupnya pasar modal ini mendorong masuknya investor dan tentu saja investasi. Ini pada gilirannya berhasil memperkuat

otot rupiah. Meski pemerintah Habibie tak menerapkan kebijakan radikal untuk menjinakkan dolar seperti yang dilakukan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad, otot Rp berhasil diperbesar sampai menjadi Rp 6.700/US\$. Prestasi ini tak pernah dicapai penerusnya sampai sekarang, saat Indonesia telah memiliki presiden dan wapres yang dipilih langsung oleh rakyatnya.

Menganggap sepi upaya tak kenal lelah yang dilakukan Tanri dalam membenahi BUMN tentu saja tak bijaksana. Sebaliknya sikap itu hanya melahirkan arogansi kontra produktif. Akibatnya pemerintah bisa kehilangan momentum untuk mengatasi krisis multidimensional, yang telah berlangsung lama. Tentu orang tidak perlu menjadikan master plan yang dibuat Tanri sebagai kitab suci. Namun bila pemerintah setelah Soeharto mewarisi negara yang jatuh miskin, sakit, dan banyak utang akibat berbagai salah urus selama 32 tahun rezim orba, maka dia juga berhak atas konsep dan langkah-langkah genial yang dibuat oleh seorang genius semacam Tanri untuk mengatasi keadaan.

Bila program recovery IMF yang bersifat try and error saja dipatuhi pemerintah, apalagi konsep Tanri yang nyata bagus. Melanjutkannya tentu lebih rasional daripada membuat yang baru dengan kemungkinan gagal lebih besar. Padahal konsep Tanri mudah dipahami, termasuk langkah-langkah yang telah diayunkannya dalam menjalankan konsep itu. Semuanya telah tersedia pula dalam bentuk tertulis. Bahkan Laporan Pertanggungjawabannya telah dibuat sedemikian, sehingga orang bisa mengikuti konsep restrukturisasi dan privatisasi yang digadangnya. Bagusnya lagi, seperti ingin memudahkan penggantinya, dalam laporan tersebut Tanri mencatatkan sejauh mana

program-program itu telah dilaksanakan, termasuk hasil-hasil sementara yang telah dicapainya, tidak terkecuali yang gagal seperti dalam soal privatisasi PT Krakatau Steel. Di samping itu konsep Tanri tentang Privatisasi BUMN masih bisa diikuti secara komprehensif lewat bukunya yang terbit di Singapura (2001) 'Indonesia, Inc., Privatising State-Owned Enterprises.' Buku itu cukup laris di negeri jiran. Bahkan banyak pemerintah negara berkembang mulai menjadikannya bahan kajian untuk menyusun pedoman restrukturisasi dan privatisasi badan-badan usaha milik negara mereka.

Menurut Tanri selama menjabat menneg BUMN tantangan yang paling berat sebenarnya tidaklah datang dari dalam BUMN-BUMN tersebut, tapi dari IMF. Lembaga super kuasa itu terus menekannya untuk menjual aset-aset negara seperti tercantum dalam LoI yang telah ditandatangani Soeharto. IMF terang-terangan menghen-daki agar pemerintah Indonesia angkat kaki dari dunia bisnis. Bagi lembaga itu tidak ada alasan bagi pemerintah untuk memiliki unit-unit usaha. Padahal Inggris, Singapura, Cina, India, bahkan Jepang yang tergolong maju masih memiliki perusahaan BUMN.

Untungnya meski mendapat tekanan luar biasa dari IMF, manajer jempolan itu bergeming. Dalam suatu kesempatan wawancara dengan penulis, Tanri mengakui terus terang adanya tekanan dari lembaga donor itu. "You have no business to be in business!" kata dia menirukan wakil IMF dalam sebuah pertemuan. Namun Tanri bereaksi lebih tegas lagi. Dia meminta lembaga super kuasa itu untuk tidak mendiktenya dalam urusan bisnis. Sebab dia telah mengenal dunia bisnis selama 30 tahun lebih dalam kapasitasnya sebagai manajer kelas satu, bukan sebagai

pengamat atau teoritikus. Ketegasan dan dedikasi Tanri membuat IMF berpikir dua kali untuk berargumentasi dengannya. Tanri mengaku bukan tak mau melego perusahaan-perusahaan BUMN yang berada di bawah kekuasaannya, tapi harus ditunggu timing-nya yang tepat dulu. "Buat apa dijual saat itu juga, bila harganya cuma cukup untuk sekadar makan beberapa hari. Kita akan menjualnya kalau harganya cocok dan menguntungkan," jelas Tanri bersungguh-sungguh.

Pria yang pernah digelar manajer 1 miliar itu tak mengada-ada. Dalam mengelola BUMN dia tak mau bertindak gegabah dan bersikap sebagai tukang lelang. Dia meluncurkan konsep yang sangat komprehensif. Seperti telah saya singgung di atas. "Perusahaan-perusahaan BUMN tidak akan dijual sebelum strukturnya dibenahi. Bila strukturnya sudah dibenahi, perusahaan itu tetap tidak dijual sebelum dia memberi profit kepada negara dan bangsa ini," jelas Tanri argumentatif. "Masa setelah segala daya dan dana untuk membenahnya kita keluarkan, terus kita kasih orang!" tambahnya cepat. "Nah kalau kita sudah menikmati keuntungannya beberapa lama, baru kita jual. Perusahaan yang melaba kan harganya bagus," sambung Tanri tersenyum.

Dalam waktu yang tidak terlalu lama Tanri terbukti berhasil membawa perusahaan-perusahaan BUMN melantai di pasar modal. Perusahaan-perusahaan itu tidak dibiarkannya melantai dengan pakaian seadanya, sehingga terlihat murahan. Tanri telah mendandani dengan merestrukturasinya lebih dulu, sehingga bisa tampil lux dan mahal. Itulah yang terjadi pada PT Telkom, Semen Gresik, Pelindo I, Pelindo II, dan lain-lain yang dijadi-kannya pemain di pasar modal. Tak sampai 6 bulan

kiprahnya, Menneg BUMN berhasil menyeter ke APBN Rp 10 triliun lebih. Angka itu jauh melampaui prestasi 2 tahun lebih Menneg BUMN di masa Gus Dur dan Mega, meski telah dilakukan dengan cara obralan atau bantingan atas desakan IMF. Bukan tidak mungkin Menneg BUMN Sugiharto, yang mantan profesional dari grup Medco, dan Dr. Sofyan Djalil yang menggantikan posisinya setelah reshuffle awal Mei 2007, juga mendapat tekanan serupa. Yang penting bagi IMF jual semua perusahaan-perusahaan BUMN itu, terutama kepada perusahaan-perusahaan dari negara-negara yang enjadi sponsornya, lalu bayar utang. Kemakmuran rakyat negeri ini memang bukan tugas dia untuk memikirkannya. Jadi diperlukan kecerdasan dan mental baja untuk bisa menolak tekanan lembaga itu, setidaknya setara dengan yang dimiliki Tantri. Selain itu tentu saja tekanan dari rakyat untuk mencegah penjualan aset-aset potensial negara.

## **7. Merajut Ekonomi Kerakyatan**

Sejak gerakan reformasi menemukan bentuknya yang nyata menjelang pemilu 1997 sampai setelah soeharto lengser, terjadi tarik-menarik yang sangat jelas antara pendukung status quo dengan kaum reformis yang menginginkan perubahan. Yang pertama, seperti telah dipaparkan pada Bab II, sebenarnya diwakili Soeharto dan mereka yang mendapatkan keuntungan dan berbagai fasilitas selama kekuasaan sang patron. Sponsor dan mentor utama pendukung status quo ini adalah Bank Dunia dan IMF. Yang kedua diwakili oleh kaum reformis dan warga kampus perguruan tinggi. Cuma karena kepan-daianannya memainkan peran sebagai dermawan 'suci' dan kritis, IMF berhasil menghindari dari bentrokan langsung

dengan kaum reformis. Sebaliknya dengan kecerdikan luar biasa, lembaga donor berpengalaman ini justru berhasil menampilkan rezim Soeharto sebagai musuh bersama, sambil diam-diam meminta berbagai konsesi darinya lewat LoI.

Kabinet transisi Habibie, yang kemudian menggantikan rezim orba Soeharto, terpaksa menjaga koeksistensi damai di antara kekuatan-kekuatan itu. Kadang-kadang dia tampak mendukung status quo dan taat menjalankan apa-apa yang telah disepakai pendahulunya. Ini membuat IMF, yang mewakili berbagai kepentingan luar, termasuk kreditor, merasa aman dan tak segan mencairkan pinjamannya. Namun tak jarang pula Habibie mengakomodasi tuntutan arus bawah dan kaum reformis lewat program redistribusi aset, ekonomi kerakyatan, hutan untuk rakyat, dan lain-lain. Tak heran bila pada tataran praktis, terlihat tak semua yang diinginkan IMF bisa berjalan mulus.

Ini membuat konglomerat, terutama yang dibesarkan orba, tetap merasa tak nyaman. Bahkan sebagian mereka, diwakili bos Grup Gemala Sofyan Wanandi seperti mencium adanya upaya menyapu bersih pengusaha besar. Jubir Kelompok Jimbaran itu menganggap Kebijakan Anti Monopoli, Undang-Undang Pesaingan Adil (undang-undang persaingan usaha), Redistribusi Aset dan Undang-Undang Kepailitan yang dilansir pemerintah dan kaum reformis di DPR, sebagai pernyataan perang terhadap konglomerat. Sofyan tanpa tedeng aling-alang menilai sebagian besar langkah yang diambil pemerintah, setelah lengsernya Soeharto, sebagai memberi angin kepada pengusaha kecil-menengah dan koperasi untuk mengambil alih peran pengusaha besar.

Memang tak semua orang setuju pada pandangan Sofyan. Presdir lembaga riset ternama PT Cisi Raya Wilson Nababan, misalnya, langsung tertawa geli mendengar kecurigaan Sofyan. Sebagian besar konglomerat hancur, kata Wilson, karena terlilit utang. Nilai utang mereka terus membengkak berlipat-lipat seiring menciutnya nilai Rp terhadap valas. Sedang bunga bank di dalam negeri ikut meroket akibat pengetatan likuiditas (tight money policy), sehingga tak ada tenaga untuk memutar roda ekonomi. Itulah yang membuat dunia usaha tersungkur, bukan kebijakan kabinet transisi yang mencoba mengatasi keadaan. Sofyan sendiri sebenarnya tak menampik bahwa batu sandungan yang membuat konglomerat tersungkur adalah utang.

Bagi Wilson kekhawatiran Sofyan terhadap program-program pemerintah Habibie, yang sangat reformistik dan pro rakyat, tak beralasan. Toh tarik-menarik antara kepentingan status quo dan kepentingan rakyat untuk mendapatkan hak-hak ekonominya tidak berhenti sampai di tingkatan wacana dan polemik. Dalam tataran yang lebih rendah, benturannya justru menjadi lebih seru. Sebab yang berhadapan langsung adalah wakil-wakil kaum reformis, baik yang ada di kabinet maupun di dewan perwakilan rakyat, melawan penganut ekonomi neoliberal. Yang pertama menghendaki sistem ekonomi kerakyatan, yang selama 32 tahun dimarginalkan orba. Sedang yang kedua mewakili rezim lama dan IMF yang menganggap ekonomi kerakyatan itu sebagai ilusi belaka dan cuma latah meniru negeri jiran untuk meningkatkan popularitas.

Namun meniru bukanlah barang haram. Apalagi bila yang ditiru memang terbukti bagus. Begitulah mungkin gagasan awal Ekonomi Kerakyatannya Menkop/PKM Adi

Sasono. Konsepnya, yang sangat berpihak kepada pengusaha kecil, memang dianggap imitasi dari Malaysia ketika memberdayakan etnis Melayu. Gagasan itu kemudian dibawa ke Sidang Istimewa MPR November 1998 oleh Didik J. Rachbini, Fadel Muhammad, Fachri Ali, dkk. Hasilnya? Tap MPR no. XVI/1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam rangka Demokratisasi Ekonomi. Tap tersebut seakan menandai berakhirnya politik ekonomi Orde Baru, yang terlalu berpihak kepada pengusaha besar. Namun kaum neo liberalis ekonomi tentu tak akan tinggal diam. Setiap saat, setiap ada kesempatan, terutama saat pergantian rezim, para pendukungnya pasti akan memberi iming-iming kepada pemerintahan baru untuk kembali berlaga mengatur republik. Apalagi ilmu ekonomi kerakyatan mempunyai kelemahan mendasar, yaitu kalah star dengan ekonomi pasar bebas.

Lihat saja tak semua orang gembira melihat iklim usaha baru yang diperkenalkan kru kabinet transisi. Sebagian besar rakyat dan para pelaku ekonomi kecil-menengah, karena ketidaktahuannya, tak merasa perlu ikut bergembira. Apalagi berjuang agar gagasan tersebut bisa berjalan. Sebagian lagi merasa ngeri dan khawatir terhadap gagasan tersebut. Pasalnya rumor yang berhembus kuat di kalangan pelaku ekonomi adalah lokomotif perekonomian akan segera beralih kepada masinis baru, yang sama sekali tak ramah terhadap pelaku ekonomi lama. Lokomotif ekonomi kerakyatan memang ditarik oleh masinis baru Menkop/PKM Adi Sasono. Dia disinyalir cuma akan mengikutsertakan ribuan koperasi, pengusaha kecil dan menengah. Para pengusaha besar, yang telah menjerumuskan negara ke jurang krisis lewat pintu utang, dipersilakan menunggu di perron. Pendeknya gagasan

ekonomi kerakyatan dianggap sebagian pelaku ekonomi sebagai tidakan memusuhi pengusaha besar, sebagaimana dilontarkan Sofyan di atas.

Terlepas dari pro-kontra yang mengiringinya, secara esensial koperasi, pengusaha kecil, dan menengah yang membentuk 94% lebih pelaku ekonomi, memang harus diberdayakan. Untuk itu jelas harus ada yang memulai, sebab bila gagasan ini cuma berhenti pada tingkat wacana, maka dia tidak akan menghasilkan perubahan apa-apa. Ekonomi rakyat, yang sebagian besar bergerak di sektor informal dan terbukti lebih tahan krisis, akan tetap gurem. Padahal mereka adalah pelaku ekonomi yang sebenarnya juga mempunyai hak untuk mendapat fasilitas dan bantuan dari pemerintah dan perbankan negerinya. Pemerintah Orde Baru di bawah Soeharto, sampai dia dipaksa lengser oleh gerakan reformasi, tak pernah secara serius memberdayakan pelaku ekonomi kecil ini, kecuali buat keperluan propaganda menjelang pemilu.

Begitulah titik balik itu datang setelah pemerintahan 32 tahun Soeharto yang gagal lengser keprabon. Pemerintahan transisi yang dipiloti Habibie kemudian memberi peluang besar kepada pelaku ekonomi kecil-menengah untuk berkembang. Tugas itu secara terang-terangan disampirkan di pundak Menkop Adi Sasono. Menteri, yang waktu itu oleh Far Eastern Economoc Review (FEER) digelar sebagai "The most dangerous man," itu langsung bertindak cepat. Dia memangkas berbagai prosedur kredit buat koperasi dan pengusaha kecil. Kewajiban agunan ditiadakan, dan porsi kredit ditambah menjadi Rp 10,8 triliun, meningkat lebih 5.000% atau 500 kali lipat dibanding di zaman Soeharto. Bunga buat pelaku ekonomi kecil pun diperingan menjadi 10-15%, jauh di bawah bunga

komersial yang saat itu mencapai 37% lebih.

Program pemberdayaan ekonomi rakyat tidak berhenti sampai di situ. Upaya ini kemudian diperlengkapi dengan sebuah Dewan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (DPEK), yang langsung dipimpin Presiden Habibie. Ketua Hariannya tentu sang penggagas Adi Sasono. Salah satu program DPEK tersebut, kata Deputy Fiskal dan Moneter Bappenas Soekarno Wirokartono, adalah mendirikan Lembaga Permodalan Nasional Madani (LPNM). Lembaga baru ini disambut masyarakat dengan sangat antusias, terutama pelaku ekonomi kecil-menengah (UKM). Sedang ekonom neoliberal yang terpinggirkan melihatnya dengan perasaan was-was dan sinis. Tak heran bila kritikan terhadapnya terus berhamburan seperti sumpah-serapah.<sup>2</sup> Kritikan itu pada gilirannya justru membuat nama LPNM makin membahana.

Tidak pernah ada angka pasti berapa dana yang disediakan pemerintah untuk lembaga yang kemudian lebih dikenal dengan PNM itu. Sebagian media mensinyalir PNM akan didanai pemerintah Rp 10 triliun. Mas Adi, sang penggagas, tidak tegas-tegas membantah rumor itu. "Lho kalau uang Rp 300 triliun untuk rekapitalisasi perbankan tidak dipermasalahan, kenapa yang ini yang untuk rakyat kecil dan nilainya cuma sepertigapuluhnya kok dipermasalahan?" jawab Menkop/PKM tangkas dan agak kesal ketika dikonfirmasi mengenai berita itu usai acara seminar di mobilnya menuju kantor. Menurutnyanya baik Dewan maupun PNM masih berupa konsep. Semuanya masih dalam proses pematangan yang melibatkan seluruh tim ekuin. "Kita belum bicara dana. Itu karangannya Kontan aja. Apalagi dibilang diam-diam dan gilya," tambahnya cepat. Dia tidak bersedia menjelaskan detail lembaga

tersebut. "Konsepnya masih kita matangkan," kata Mas Adi pendek waktu itu.

Pernyataan Menkop dibenarkan Asisten Kepala Badan Pembina BUMN Dr. Sofyan A. Djalil, yang secara intens terlibat dalam pematangan konsep tersebut. Program pemberdayaan ekonomi rakyat, kata Sofyan, diejawantahkan dengan LPNM. "LPNM memiliki dua sayap kembar: Entrepreneurship Development Program (EDP), dan Asset Redistribution Program (ARP). EDP dilakukan dengan memberdayakan modal ventura, management services, dan memperkuat lembaga keuangan alternatif, seperti Baitul Mal wa Tamwil (BMT), BPR, Badan Kredit Kecamatan, dan lain-lain. Satu sayap lagi, ARP, masih dalam studi lebih lanjut," papar Sofyan tenang. Menurut Sofyan pemberdayaan modal ventura akan dilakukan melalui institusi yang sudah ada, yaitu PT Bahana Artha Ventura. Dia akan bekerja secara learning curve (belajar dari pengalaman).

Tak dapat dipungkiri, untuk menjalankan fungsinya itu dibutuhkan dana sangat besar. Apalagi bila diingat yang mau diberdayakan secara ekonomi jumlahnya juga puluhan juta. "Ide awalnya begini. PNM ini bila ingin dijalankan secara maksimal, setidaknya mesti punya modal dasar Rp 10 triliun. Dari modal dasar itu yang perlu ditempatkan 25%. Bila ada uang Rp 2,5 triliun, kita sudah bisa jalan sebenarnya. Itu pun mungkin masih bisa dikurangi lagi. Saya pikir kalau kita ada uang Rp 1 triliun saja, kita sudah bisa jalan," jelas ahli hukum pasar modal itu meyakinkan. Lantas darimana PNM akan mendapatkan dana sebanyak itu? Asisten Meneg BUMN itu mengaku tidak tahu. "Itu saya tidak tahu. LPNM adalah bagian penting dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. Terserah

pemerintah mau carikan dana darimana," katanya kalem.

Masalah dana ini mungkin merupakan ganjalan paling besar bagi terwujudnya PNM. Apalagi dalam APBN tahun itu, belum ada dana yang dialokasikan buat lembaga penting tersebut. Ada kemungkinan BUMN yang bakal menjadi pemasok dana lembaga tersebut, tapi ini pun bukan perkara mudah. "BUMN mana sekarang yang punya duit?" kata Sofyan tertawa getir. Dia mengaku tidak tahu kapan program tersebut akan direalisasi. Menurutnyanya semua terserah pemerintah. "Kapan pun pemerintah memutuskan, kita siap saja. Sekarang masih dalam taraf perumusan konsep. Belum dibawa ke rapat kabinet," katanya terus terang.

Berbeda dari Sofyan yang agak pasrah, bagi Mas Adi sudah waktunya pemerintah membangun ekonomi kerakyatan, karena ini lebih sesuai dengan cita-cita pendirian republik setelah penjajahan. Ekonomi Indonesia pada masa orde baru seperti berjalan pada dua jalur: pertama, ekonomi modern yang dengan segala kemudahan dan fasilitas dari pemerintah, termasuk akses ke sumber-sumber keuangan, melaju di jalur cepat. Dia juga langsung terintegrasi dengan ekonomi global, sehingga memudahkannya untuk mencari sumber-sumber pembiayaan dari luar negeri. Kedua, ekonomi tradisional yang biasa dimasukkan ke dalam sektor informal, merayap di jalur lambat tanpa fasilitas dan kemudahan.

Kelompok pertama, yakni pelaku ekonomi modern, besarnya cuma 0,2%, tapi menguasai 61% produk domestik bruto (PDB). Sisanya (39%) dibagi bersama 99,8% pelaku ekonomi tradisional, biasanya disebut pengusaha kecil, menengah. Omset mereka Rp 1 miliar atau kurang/tahun. Lebih mengenaskan lagi dari 99,8% itu 96%-nya



beromset kurang dari Rp 50 juta/tahun. Sehingga, menurut Menkop PKM waktu itu, mungkin tidak bisa disebut kecil lagi, tapi mikro. Toh mereka telah menghidupi 90% lebih angkatan kerja di tanah air. Keadaan njomplang itulah yang ingin dirubah Adi dengan konsep Ekonomi Kerakyatannya. "Tugas pemerintah memang harus membantu ekonomi kecil, sehingga lebih egaliter. Dengan demikian transformasi struktur ekonomi kerucut bisa diubah menjadi belah ketupat, dengan klas menengah sebagai mayoritas. Paling atas, jumlahnya sangat kecil, orang-orang super kaya, dan paling bawah, jumlahnya juga sangat kecil, orang-orang amat miskin yang butuh bantuan," jelas Adi dalam sebuah wawancara dengan penulis buat majalah SWA (16 Maret 1999).

Ekonomi kerakyatan sebenarnya bukanlah barang baru di Indonesia. Bahkan struktur ekonomi belah ketupat sudah lama menjadi bahan perbincangan para pakar ekonomi non UI. Guru Besar UGM Prof. DR. Mubyarto adalah salah seorang yang paling getol memperjuangkan konsep itu. Namun konsep ekonomi Staf Ahli Menko Ekuin Bidang Pemerataan Pembangunan dan Penanggulangan Kemiskinan itu dipandang sebelah mata oleh rezim Soeharto. Bahkan Mubyarto sendiri kemudian dituding para penganut ekonomi neo liberal hanya mencari popularitas belaka, agar diangkat menjadi menteri. Selain Mubyarto, pengamat ekonomi HS. Dillon adalah tokoh yang tak pernah berhenti memperjuangkan ekonomi kerakyatan.

Menurut Dillon ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi yang memihak kepada kepentingan ekonomi sebagian besar rakyat secara adil, manusiawi, dan demokratis. Pada saat ini kepentingan ekonomi sebagian

besar rakyat itu terdapat dalam kehidupan petani, nelayan, buruh, pedagang kecil (sektor informal), para penganggur, dan kaum papa. Inilah realitas ekonomi rakyat yang sesungguhnya, dan dari sinilah seharusnya titik tolak ekonomi bangsa dimulai. Batasan itu dianggap Mubyarto sangat tepat.

Berbeda dari Mubyarto, Dillon, dan lain-lain, Adi Sasono tidak pernah memberi batasan jelas tentang ekonomi kerakyatan yang mau diwujudkan. Adi, yang telah 23 tahun bergerak di lembaga swadaya masyarakat (LSM), seolah tidak mau membebani departemennya dengan berbagai teori. Ekonomi kerakyatan yang didengungkannya langsung dibawa membumi dalam tataran praktis. Orang cuma bisa melihat langkah yang diayunkannya dalam upaya memberdayakan pengusaha kecil, menengah. Adi nampaknya lebih suka membiarkan orang merekonstruksi setiap langkah dan perangkat yang dibuatnya daripada memberi penjelasan ilmiah. Oleh karena itu untuk memahami bangunan ekonomi yang mau dibuatnya, ada baiknya kita ikuti gerak lokomotif ekonomi kerakyatan tersebut.

Adi mulai mengerek gerbong ekonomi kerakyatannya dengan memangkas berbagai prosedur kredit, yang selama ini menghalangi pengusaha kecil mendapatkan sumber permodalan. Seperti telah disebut di atas, dia menyediakan 17 skim kredit buat koperasi dan pengusaha kecil. Kewajiban agunan ditiadakan, dan porsi kredit ditambah menjadi Rp 10,8 triliun, naik 5.000% lebih atau 500 kali lipat dibanding di masa Soeharto. Bunganya pun diperingan menjadi 10-15%. Bandingkan dengan suku bunga perbankan yang masih di atas 37%.

Dengan langkahnya yang kongkrit itu Adi memang



mendapat pujian dari sebagian pelaku ekonomi yang diperjuangkannya. Namun seperti telah disinggung di atas, yang menentang pun tak kurang banyaknya. Bahkan sebagian pengamat menilai program itu berpotensi menimbulkan inefisiensi. Dekan FE-UI Anwar Nasution menilai kebijakan ekonomi kerakyatan sejauh ini masih belum jelas programnya, dan lebih bersifat semboyan. "Apa maksud dari konsep itu. Di surat kabar juga belum pernah dijelaskan. Bahkan pelaksanaannya terkesan hanya menghamburkan uang. Soeharto juga melakukan hal seperti itu," ujar orang nomor 1 di FE-UI itu sengit.

Ekonom UI yang lain Dr. Sri Mulyani Indrawati menyoroti lebih jauh lagi. "Para ekonom sangat mendukung pemberdayaan usaha kecil, menengah. Kita sama sekali tidak anti. Namun jenisnya cukup banyak: hulu, hilir atau yang berada di antara keduanya. Tidak bisa disamaratakan begitu saja," jelas Sri Mulyani kritis. "Jika pemerintah cuma mengintervensi usaha hilir, yang cuma menghasilkan popularitas besar dengan hasil kecil, memang sah-sah saja secara politis. Namun bagi ekonom itu tidak boleh," tambah Ani, begitu dia kerap disapa, serius.

Mendapat serangan seperti itu Adi bergeming. "Kalau pengusaha kecil diberi kredit dengan bunga 50%, jelas mereka tak bisa bekerja. Itu akan meningkatkan jumlah kemiskinan absolut, menimbulkan pengangguran, dan memancing penjarahan. Apakah itu efisien?" jawabnya argumentatif ketika dibenturkan dengan pandangan para ekonom tersebut. "Coba tanyakan kepada para ekonom itu mengapa mereka diam saja ketika bank-bank swasta diberikan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dengan bunga 12-13% setahun. Bahkan tahun '70-an pernah diberi KLBI dengan bunga 3% setahun. Kok itu tidak

dipertanyakan?" sambungnya kesal. Lagipula menurut catatan Adi pengusaha kecil dan koperasi lebih taat bayar utang daripada pengusaha besar. Sebagai bukti Menkop menunjuk kredit untuk pengusaha besar, yang jumlahnya triliunan rupiah, itu 70% macet. Sementara yang macet di pengusaha kecil cuma 5%.

Menkop menampik anggapan bahwa dia terlalu memanjakan pengusaha kecil dan memusuhi pengusaha besar. Dia mengaku cuma memberi kesempatan yang adil kepada semua pelaku ekonomi. Untuk mengurangi kekawatiran para penentangnya, Adi tak lupa membuat sistem kontrolnya. Dia memang tidak membual. Lihat saja untuk mengawasi penyaluran skim-skim kredit, Menkop/PKM melibatkan 5.150 sarjana dari 52 perguruan tinggi, dan sekitar 400-an LSM di tanah air. Dengan cara itu pula Adi seakan menjanjikan kepada penentangnya, bahwa konsepnya tidaklah sama dengan gerakan bagi-bagi duit kepada pengusaha kecil.

Terlepas dari pro-kontra yang mengiringinya, konsep ekonomi kerakyatan Menkop nampaknya jalan terus. Apalagi setelah dasar yuridis operasionalnya didapat Adi tak lama kemudian dengan dikeluarkannya Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Sehat. Masih satu nafas dengan itu adalah pendirian Dewan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (DPEK), yang langsung dipimpin Presiden BJ. Habibie. Adi sendiri bertindak sebagai Ketua Harian di situ. DPEK itulah, kata Soekarno Wirokartono, yang punya tugas mendirikan LPNM. Lembaga itu memang kemudian benar-benar berdiri dengan nama PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Di zaman Habibie pun, untuk mengurangi ketakutan pengusaha besar, modal dasarnya cuma dikasih Rp 1,5 triliun. Sedang modal

setornya dipatok Rp 300 miliar. Jumlah itu sebenarnya terlalu kecil dibanding perkiraan awal yang mencapai Rp 10 triliun, atau modal setornya setidaknya Rp 1,5 triliun. "Bila perkembangannya pesat, bisa jadi modal dasar PNM lebih dari Rp 10 triliun nantinya," jawab Menkop ringan ketika ditanyakan mengapa modal PNM jadi menyusut seperti itu. Sampai kini PNM masih eksis sebagai warisan Habibie. Cuma fungsinya sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat terpasas habis, sehingga dia seolah menjadi lembaga pembiayaan biasa. SBY nampaknya belum berpikir untuk menjadikanya alat efektif dalam memberdayakan UKM dan koperasi. Entah satu-dua tahun ke depan, sebab Sofyan salah seorang yang banyak terlibat mematangkankonsepnya dulu, kini menduduki pos Meneg BUMN.

Harus diakui dari sisi ide pendirian PNM adalah genial. Sayangnya akibat provokasi penganut neoliberal dan segelintir pelaku ekonomi yang selama ini diuntungkan oleh sistem pasar bebas, PNM banyak disalahpahami. Dia bahkan juga disalah-pahami oleh mereka yang nasibnya sedang diperjuangkan Adi. Padahal bila PNM bisa berjalan seperti yang diharapkan atau para penganut neo liberal bersikap demokratis sedikit untuk bertarung di tataran praktis mewujudkan masyarakat adil dan makmur seperti cita-cita kemerdekaan, dapat dipastikan nasib rakyat akan cepat berubah. PNM dengan dua sayap kembarnya: Entrepreneurship Development Program (EDP), dan Aset Redistribution Program (ARP) mesti diberi kesempatan. EDP, sebagaimana telah dikonsepskan, akan dijalankan dengan memberdayakan modal ventura, jasa manajemen, dan memperkuat lembaga keuangan alternatif, seperti BMT, BPR, Badan Kredit Kecamatan, dan sebagainya.

ARP, yang waktu itu masih dalam studi lebih lanjut dan kini menguap, dicanangkan antara lain untuk membeli saham-saham BUMN di pasar modal. Melalui lembaga reksadana, selanjutnya akan dikeluarkan surat berharga untuk diperjual-belikan kepada masyarakat. Yang boleh membeli diprioritaskan keluarga kelas menengah ke bawah, bila perlu dengan harga diskon.

Redistribusi aset perusahaan-perusahaan konglomerat, redistribusi HPH, dan lain-lain yang diambilalih untuk pengusaha kecil dan koperasi nantinya akan berbuhungan dengan lembaga ini. Memang banyak pengusaha besar kecut hati oleh kehadiran lembaga tersebut. Lembaga ini dianggap akan merampok aset-aset mereka dengan mendistorsi pasar lewat politik. Apalagi Adi diketahui banyak orang secara terang-terangan anti monopoli dan kepemilikan yang berlebihan, seperti dalam soal suplai terigu, kertas, semen, minyak goreng, dan sebagainya yang dikuasai pengusaha tertentu dan merugikan konsumen dalam penentuan harga. Juga dalam soal penguasaan HPH. Adi menganggap tidaklah adil bila seorang pengusaha HPH dapat memiliki areal sampai 3,6 juta ha (hampir seluas Inggris Raya). Sementara sebagian besar rakyat tak punya akses sedikit pun untuk ikut mengelola dan menikmati manfaatnya.

Siapa pun yang berpikiran waras di negeri ini dan mau merenungkan apa sebenarnya yang mau diwujudkan lewat perang kemerdekaan 1945, Revolusi '66, Gerakan Malari '74 dan reformasi 1998, tentu akan mendukungnya. Namun kenyataan bisa berbicara lain. Para pendukung neo liberal dan pelaku eko-nomi lama yang tampil wangi, mendapat dukungan penuh IMF pula, lebih mampu memelintir permasalahan lewat media. Maka sosok ekonomi

kerakyatan kemudian ditampilkan sebagai momok anti pengusaha besar (konglomerat), anti pasar, dan sebagainya. Bahkan pengamat dari mancanegara menggelari Adi sebagai Robin Hood Indonesia. Yang ini hendaknya dianggap sebagai pujian, sebab di negara-negara barat tokoh Robin Hood tak pernah dinilai negatif.

Namun menurut Ani, pakar ekonomi dari FE-UI yang paling lantang mengkritik ekonomi kerakyatan, seharusnya pemerintah membenahi usaha hulunya dulu yang justru bersifat jangka panjang. Semua itu tidak hanya bisa diselesaikan dengan pemberian kredit atau dengan redistribusi aset. Semuanya harus dibenahi mulai dari sektor hulu melalui program perbaikan manajemen, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain yang bersifat peningkatan kualitas sumberdaya. Ani sendiri nampaknya tidak konsekwen dengan ucapannya sendiri. Ini terlihat terutama ketika dia berada di birokrasi pemerintahan sebagai menteri keuangan. Ekonom UI ini tak bersedia meningkatkan anggaran pendidikan sesuai Ketetapan MPR, yaitu 20% dari total APBN. Seperti diketahui APBN 2006 cuma mengalokasikan Rp 34 triliun (tak sampai 9%) buat pendidikan. Ini jauh di bawah alokasi anggaran pembayaran utang dalam dan luar negeri ditambah bunganya yang mencapai Rp 140,22 triliun pada tahun sama.

Sebagai ekonom yang pernah berteriak lantang soal peningkatan sumber daya manusia Indonesia, mestinya Ani lebih berani menganggarkan setidaknya Rp 140,22 triliun untuk pendidikan dan mengupayakan pemotongan utang sehingga cukup dianggarkan Rp 34 triliun saja. Ani khawatir program ekonomi kerakyatan Menkop/PKM waktu itu tidak berkesinambungan, karena yang dicari cuma popularitas politik. Kini setelah dia menjadi menteri orang

menuduh bu menkeu cuma mencari muka pada IMF. Menkop/PKM sendiri ketika diserang Ani seperti itu cuma bilang: "Kalau membela rakyat itu mesti ada muatan politis. Kalau kita memperbaiki arloji atau berobat ke luar negeri, itu tidak politis. Jadi semua tindakan untuk membantu rakyat mesti ada muatan politisnya?" kata Adi retorik.

Berbeda dari para pengamat ekonomi neo liberal yang terang-terangan menentang Adi, reaksi dunia usaha terhadap sepak terjang dan tindakan Menkop/PKM kelihatan hati-hati, bila tak mau dibilang bimbang. "Selama ekonomi kerakyatan itu tidak memindahkan konsesi dari suatu golongan ke golongan lain dengan asumsi apa pun, maka itu harus diterima dengan lapang dada," jawab Rizka Baily, Direktur Investment Management PT Citicorp Securities Indonesia, diplomatis ketika ditanya tentang ekonomi kerakyatannya Menkop/PKM. "Masalahnya apakah ekonomi kerakyatan sekarang ini akan dikembangkan ke arah sana? Bagi investor asing yang masuk melalui capital market, yang paling baik adalah sistem ekonomi pasar," tambahnya. "Kalau dengan program itu ternyata perekonomian Indonesia menjadi stabil, dan pertumbuhannya menjadi tinggi seperti sebelum krisis, maka efeknya akan bagus. Para investor akan lebih convertible menanam modal di Indonesia, khususnya melalui Citicorp. Namun bila yang terjadi sebaliknya, maka mereka akan merasa terancam dan mungkin pergi dari sini. Sikap kita sekarang cuma wait and see saja," sambungnya panjang.

Tanggapan senada juga disampaikan Franky yang juga direktur Indofood Sukses Makmur (ISM). "Saya percaya bahwa program ekonomi kerakyatan itu intinya

adalah pemberdayaan pengusaha-pengusaha kecil. Nah, titik tolak pemberdayaan itu hanya ada dua: pertama, SDM yang menggerakkan bisnis itu. Kedua, menyangkut darahnya atau aspek permodalan. Dalam hal ini bagaimana perbankan menyalurkan dananya kepada pengusaha kecil. Ekonomi kerakyatan bisa dilakukan dengan kemitraan. Jadi saya kira tidak akan terjadi pemangkasan bisnis pengusaha-pengusaha besar," kata Franky berteori saat ditemui penulis di Unika Atma Jaya dalam acara Seminar Kajian Kritis Atas Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Franky cuma menyangkan bila program ekonomi kerakyatan cuma bersifat *charity* (sumbangan). Sebab dengan cara itu di samping akan menimbulkan ketergantungan pengusaha kecil dan koperasi kepada pengusaha besar, program itu pun akan bersifat *never ending*. Akibatnya semua pengusaha tidak bakal ada yang mampu, karena sifatnya *charity*. Jadi sama saja dengan membuang air tawar di laut, air laut itu tidak akan tawar juga. ISM sendiri, menurut pria berambut panjang itu, sudah melaksanakan program ekonomi kerakyatan dengan menggandeng pengusaha kecil sebagai mitra.

Franky tentu tidak mengada-ada. ISM dan banyak perusahaan besar lain membuat program kemitraan dengan pengusaha kecil menengah. Ada yang sukses dan kemudian menjadi besar. Ada pula yang gagal atamalah akhirnya setelah sekian lama bermitra dicaplok sang mitra besarnya. Contoh paling jelas tentu saja Kecap Cap Piring Lombok. Brand kecap milik pengusaha kecil-menengah, yang sudah dikenal masyarakat ini, telah masuk program kemitraan dengan Indofood. Dalam perjalanan waktu sang mitra besar terus mengajaknya berekspansi sampai keha-

bisan nafas. Kini Kecap Cap Piring Lombok masih eksis dipasar. Cuma dalam iklan di televisi menjadi persembahan Indofood.

Meski mendapat tantangan dari segala arah, termasuk IMF, Menkop/PKM terus menggerakkan lokomotif ekonomi kerakyatannya. Dia bahkan melengkapi prasarananya dengan memfasilitasi pembentukan Pos Ekonomi Rakyat (PER) bekerjasama dengan Departemen Dalam Negeri. PER akan didirikan secara maraton di 4.721 Kecamatan di seluruh Indonesia. Tugasnya membantu pengusaha kecil dan koperasi melalui pemanfaatan jaringan informasi. PER, kata (mantan) Dirjen Bina Pengusaha Kecil-Menengah Cacuk Sudarjanto, merupakan pengembangan lebih lanjut dari klinik konsultasi bisnis (KKB) yang dulunya dikembangkan Perguruan Tinggi. Organisasi ini diarahkan menjadi jaringan informasi modern mulai dari Kecamatan, Dati II, Propinsi, dan Pusat. Pemerintah, menurut Cacuk, hanya membiayai PER tingkat Pusat, Propinsi, dan Dati II. Sedang PER yang di tingkat kecamatan merupakan swadaya masyarakat.

Kegiatan PER di tingkat Kecamatan meliputi pelayanan informasi, pelayanan usaha, pendidikan, dan pelatihan. Minat masyarakat untuk mendirikan PER, kata Cacuk, cukup tinggi. Sampai bulan Juni 1998 diperkirakan akan ada 1.590 PER, sampai Desember akan bertambah 1.050 unit lagi, dan sampai Maret 2000 akan bertambah seribu unit lagi. PER Dati II akan menjadi pusat promosi untuk mengundang investor. Sementara PER Propinsi berfungsi sebagai trading house untuk perluasan produk-produk unggulan daerah. Terakhir PER tingkat Pusat melakukan advokasi, dan mengembangkan kerjasama dengan badan-badan internasional yang memiliki komitmen dalam

pengembangan usaha kecil.

Tak berhenti sampai di situ. Dalam rangka memberdayakan ekonomi rakyat dan koperasi, Adi maju lagi dengan gagasan mengembalikan Bank Bukopin yang sudah berbentuk PT ke bentuk koperasi. Tentu saja tidak semua orang setuju. Bahkan Menperindag/Kabulog Rahardi Rame-lan dibuat berang karenanya. Rahardi merasa dilangkahi, karena tidak diikutkan dalam musyawarah mengenai hal tersebut. Padahal Yayasan Bulog adalah pemegang saham mayoritas (33,77%) Bank Bukopin. Untungnya Rahardi tidak lantas mutung. Setelah dijelaskan dia pun nampaknya legowo. Apalagi para pemegang saham lain, Gerakan Koperasi (32,69%), Pemerintah RI (20,61%), dan Asosiasi Panel Kayu Indonesia/APKINDO (12,93%) - telah lebih dulu menyatakan persetujuan mereka atas perubahan status itu.

Meskipun para pemegang saham setuju, itu tidak lantas berarti semua persoalan beres. Kecurigaan bahwa perubahan status itu bermotivasi politik tetap bergulir. Kecurigaan secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi ditujukan kepada Menkop/PKM, yang dianggap arsitek perubahan sekaligus dekat dengan Partai Daulat Rakyat. Cara pandang seperti itu dikemukakan antara lain oleh Pengamat Perbankan Elvyn G. Masassya. "Ada 2 hal yang melatarbelakangi perubahan status tersebut. Pertama, kepentingan ekonomi yang dilatari kepentingan politik. Kedua, kepentingan ekonomi murni," jelasnya kepada penulis waktu itu yang datang menemuinya buat majalah SWA. "Untuk yang pertama, saya pikir Anda tahu sendirilah," tambahnya pendek.

Intinya, kata Elvyn, lembaga itu pada akhirnya bertujuan atau akan diarahkan untuk membiayai kekuatan

atau kelompok ekonomi tertentu. Seandainya itu terjadi, artinya bank yang sudah berstatus hukum koperasi itu membiayai atau memberikan kredit kepada satu koperasi atau kelompok koperasi tertentu dalam jumlah besar. Maka apa bedanya dengan bank yang memberikan pembiayaan kepada korporasi/perusahaan? "Lagipula bank yang melayani pembiayaan seperti itu juga sudah cukup banyak, seperti BRI, Bank Perkreditan Rakyat, dan sejumlah bank swasta yang memprioritaskan pada hal yang sama" tegas Elvyn sungguh-sungguh.

Terlepas dari pro-kontra dan segala perdebatan yang terus mengikuti langkah Menkop. Juga terlepas dari kecurigaan bahwa Menkop/PKM amat berambisi memiliki Bank Bukopin untuk mewujudkan Ekonomi Kerakyatannya, setelah gagal mendapatkan dana kongkrit Rp 10 triliun dari pemerintah. Adi sendiri mengang-gap sudah waktunya Bank Bukopin kembali ke khitah, yaitu bank yang spesial membiayai usaha perkoperasian. "Pengalihan dasar hukum itu untuk mengembalikan basis usaha Bukopin, yang semula membiayai usaha perkoperasian, lalu bergeser menjadi seperti lainnya bank umum," jelas Menkop mantap.

Senada dengan Menkop, Dirut Bank Bukopin Indra Kesuma mengatakan motivasi awal perubahan status hukum Bank Bukopin, dari PT menjadi Koperasi, adalah concern pemerintah untuk ber-pihak kepada pengusaha kecil dan koperasi. Di mata Indra sampai sekarang tidak ada Bank yang concern terhadap pengembangan usaha kecil dan koperasi. "Kalaupun ada mungkin hanya basa-basi saja!" tegasnya. Indra mungkin tidak mengada-ada. Kesulitan anggota ARDIN dan koperasi di berbagai daerah memperoleh pinjaman dari BRI sudah sering terdengar.

Walaupun menurut aturan tidak diperlukan jaminan untuk pinjaman Rp 50 juta ke bawah, orang BRI tetap meminta jaminan. Ini mendorong pemerintah berinisiatif untuk membentuk bank yang secara khusus memfokuskan diri dalam usaha kecil dan koperasi. Yang paling cocok, ya Bank Bukopin, karena sejarah awal berdirinya bank ini pun berbadan hukum Koperasi." urainya menukil sejarah. Keputusan menjadikan Bukopin sebagai bank koperasi, kata Indra, dilakukan dalam pertemuan menteri-menteri bidang ekuin yang dipimpin Ginanjar Kartasasmita.

Perubahan status itu, menurut Indra, tidak ada hubungannya dengan program rekapitalisasi. Walaupun berubah badan hukumnya menjadi Koperasi, Bank Bukopin tetap mengikuti program rekapitalisasi. Baginya rekapitalisasi merupakan sebuah 'different story.' Bank Bukopin sangat siap dan yakin bisa mengikuti program itu. Artinya, rekapitalisasi Bank Bukopin sendiri akan berjalan sesuai jadwal. "Perlu diketahui kebutuhan rekapitalisasi Bank Bukopin berjumlah sekitar Rp 700 miliar. 20 %-nya (sekitar Rp 150 miliar) sudah siap disetor APKINDO, sebagai salah satu pemegang saham. Sisanya yang 80% ditutup pemerintah," ujar Dirut Bank Bukopin itu tenang.

Menurut laporan keuangan Bank Bukopin per 30 Juni 1998 total aset bank itu Rp 5,30 triliun, meningkat sekitar 1,5 triliun dibanding periode sama 1997 yang Rp 3,53 triliun. Laba per 30 Juni 1998 Rp 87,22 miliar, meningkat drastis dibanding tahun sebelumnya yang cuma Rp 14,20 miliar. Dana pihak ketiga yang terkumpul tahun lalu Rp 3,12 triliun (1997: Rp 2,15 triliun). Sementara kredit yang disalurkan Rp 3,43 triliun. Padahal tahun 1997 Bank Bukopin cuma menyalurkan kredit sebesar Rp 2,25 triliun.

Dilihat dari angka di atas dan dukungan pemerintah

serta para pemegang saham, nampaknya perubahan status Bank Bukopin menjadi koperasi cuma soal waktu. Apalagi Bank Indonesia (BI) pun sudah setuju, seperti diungkap Direktur BI Subarjo Joyosumarto. Meskipun demikian realisasinya, kata Indra, akan dilakukan setelah rekapitalisasinya sendiri selesai. Selanjutnya bila semuanya telah beres, dewan komisaris akan berubah menjadi pengurus koperasi. Sementara dewan direksi tetap. Manajemen operasionalnya nantinya, kata Menhutbun Muslimin Nasution, akan dibantu Rabobank (Belanda). Bank dari negeri kincir angin ini berpengalaman di seluruh dunia sebagai bank koperasi yang khusus mendanai sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan.

Hal lain yang akan ikut memuluskan rencana tersebut adalah terpilihnya Deswandi Agusman, Dirjen Fasilitas Pembangunan, Pembiayaan, dan Simpan Pinjam Depkop, sebagai Ketua Pengurus Koperasi Bank Bukopin. Anggota pengurus yang lain: Muhammad Iqbal (Kopindo), Sri Mulyono Herlambang (Inkoppabri), Noorbasha Djunaid (GKBI), Abbas Adhar (Apkindo), unsur koperasi pegawai Bulog, dan Nurdin Halid (Inkud). Nama terakhir inilah dianggap banyak kalangan akan menjadi batu krikil nantinya. Sebab meskipun telah divonis bebas, orang tetap menganggapnya terlibat kasus korupsi miliaran rupiah, Simpanan Wajib Khusus Petani (SWKP). Toh Indra tak mau ambil pusing soal citra negatif yang telah terbentuk tentang Nurdin Halid. Dia menyerahkan persoalan itu kepada BI.

Selanjutnya Indra sendiri berjanji seandainya masih dipercayai sebagai Dirut, maka Ia akan tetap menjalankan visi dan misinya selama ini, yakni mengembangkan usaha kecil dan koperasi, sekaligus juga pribumi. Baginya di

segmen itulah kompetensi Bank Bukopin. "Tidak ada yang namanya fee based income. Yang kita inginkan adalah betul-betul membantu mereka!" tegasnya. "Makanya dalam operasinya Bank bukopin berkerja-sama dengan lembaga-lembaga ekonomi mikro, seperti BPR dalam penyaluran kredit ke usaha kecil di bawah Rp 50 juta. Di atas itu ditangani Bank Bukopin langsung. Program itu disebut dengan SWA-MITRA, yang hingga kini sudah memiliki jaringan 120-an kantor (BPR) di 21 profinsi," sambungnya meyakinkan. Program Swamitra ini telah mengangkat citra Bank Bukopin. Apalagi setelah mendapat penghargaan internasional (award) untuk Credit Commercial Program tahun 1999 dari Asian Banking Award. Di bidang ini Bank Bukopin berhasil mengalahkan saingannya dari 13 negara (142 bank).

Dilihat dari sisi infrastruktur nampaknya memang cukup komplit persiapan Adi untuk mewujudkan ekonomi kerakyatannya. Pertanyaannya kemudian: bila pemerintahan transisi Habibie ini berganti setelah pemilu, bagaimana nasib semua program dan perangkat yang dibentuknya? Buat pertanyaan ini Adi punya jawaban optimistik. "Sekarang kita hidup dalam era reformasi. Rakyat makin kritis, dan peka terhadap hak-haknya. Yang kita bangun adalah kesadaran kolektif rakyat. Yang dibangun adalah kemartabatan, dan lembaga kolektif rakyat. Saya yakin pemerintah mendatang tidak akan berani mengusik program ini," ujar tokoh LSM itu meyakinkan.

Nampaknya prediksi Adi tak menjadi kenyataan. Setelah Habibie turun dan Kabinet Persatuan Abdurrahman Wahid-Megawati manggung, apa-apa yang telah dibangun Adi dirobohkan, kecuali PNM. Bahkan Depkop PKM dipangkas, sehingga menjadi departemen kerdil yang

tak punya kaki-tangan di daerah. Setelah Gus Dur diturunkan, dan Kabinet Gotog royong Mega-Hamzah naik pentas, Depkop PKM dibiarkan tetap kerdil dan ekonomi kerakyatan boleh dibilang nyaris tak terdengar lagi. Bahkan Kabinet Indonesia Bersatu SBY-JK yang waktu kampanye menjanjikan perubahan nampaknya lebih senang mengikuti jalur cepat IMF menuju ekonomi liberal. Pemilihan Budiono, mantan Menkeu zaman Mega yang sangat IMF Centris menjadi Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan Srimulyani Indrawati yang juga bekas Direktur Eksekutif IMF, adalah indikator yang paling nyata.

## Z



Pesta demokrasi menjadi sesuatu yang tak lagi menakutkan, tapi malah menyenangkan. Pemilu di akhir abad 20 itu seperti berubah menjadi proyek besar yang setiap bagiannya bisa ditenderkan.



## Pemilu dan Kematian Ideologi

Pemilihan Umum (Pemilu) yang jujur dan adil (jurdil) memang mahal. Meski demikian, tak ada satu pun pemerintah Negara, yang mengaku menganut paham demokrasi, mau menghapus hajatan massal ini dengan alasan biaya. Begitu pula pemerintahan transisi Habibie. Sebelum masa jabatannya berakhir, ahli pesawat itu tak ragu mempersembahkan pemilu multi partai (1999). Habibie membuka kran selebar-lebarnya bagi siapa saja yang merasa punya pengikut dan mampu menarik massa untuk mendirikan partai politik (parpol). Presiden Habibie boleh bangga, karena pemilu yang dipersembangkannya kepada republik telah menjadi pemilu paling fair setelah pemilu 1955.

### 1. Terjebaknya Kaum Reformis

Begitulah tiba-tiba republik gegap-gempita oleh sebuah euforia reformasi. Untuk pertamakalinya, setelah puluhan tahun terkekang, orang menemukan kebebasan politik luar biasa. Akibatnya panggung reformasi langsung

sepi, karena unsur-unsurnya sebagian besar berbalik tumit. Mereka mengumpulkan pengikut masing-masing untuk mendirikan partai baru atau pulang kandang membesarkan partai lama. Parlemen jalanan, pendudukan gedung DPR/MPR dan cara-cara menekan lainnya, pelan tapi pasti terdorong ke sudut merah dan menjadi semakin tidak populer. Cara-cara menekan seperti itu bahkan dinilai sebagai pemaksaan kehendak dan setengah biadab. Demokrasi, dengan partai sebagai unsur dominan, menggantikan posisinya sebagai satu-satunya jalan yang tersedia untuk memperbaiki keadaan. Cara-cara di luar itu adalah inkonstitusional alias bar-bar. Kaum reformis, entah kenapa, ikut hanyut dalam arus pemikiran ini. Orang seperti lupa bahwa kalau mengikuti jalan-jalan yang disediakan konstitusi, maka reformasi tak bisa berlangsung. Gerakan reformasi berhasil memaksa Soeharto lengser ke prabon dan mengeluarkan unsur-unsur nepotisme dari gedung wakil rakyat, justru karena dia berada di luar jalur konstitusi.

Betapa tidak! Gerakan reformasi, atas nama rakyat dan mereka yang tak pernah didengar suaranya - telah mencabut mandat kepada DPR/MPR hasil pemilu 1997. Mereka langsung memakzulkan Soeharto lewat jalur lain yang 100% inkonstitusional pada 21 Mei 1998. Namun tahun 1999, hanya setahun setelah keberhasilan itu, kaum reformis terjebak dalam arus pemikiran demokrasi kepartaian. Padahal mereka belum lagi memegang kendali. Artinya tanpa disadari kaum reformis telah melikuidasi dirinya sendiri sebagai agen perubahan. Padahal badai krisis ekonomi berkepanjangan telah melumpuhkan sendi-sendi kekuasaan politik pemerintah sampai ke pelosok-pelosok. Rakyat tak hormat lagi pada aparat negara dan

simbol-simbol kekuasaan. Keadaan seperti ini sebenarnya harus segera ditangani dengan cara-cara darurat. Itu hanya bisa dilakukan oleh kaum reformis, satu-satunya gerakan yang memiliki alternatif masa depan dan cukup berwibawa di masyarakat. Terjebaknya kaum reformis ke dalam arus pemikiran demokrasi kepartaian seakan mengisyaratkan bahwa negara sudah kembali normal. Oleh karena itu reformasi sudah boleh menyiapkan lahan kuburan.

Amien sebagai pemimpin kaum reformis sebenarnya tahu betapa berbahayanya menyerahkan masa depan bangsa kepada demokrasi kepartaian pada saat seperti itu. Sebab kekuatan-kekuatan lama, yang masih memiliki segala fasilitas, akan lebih mampu bermain dan memenangkan hati rakyat yang telanjur jatuh miskin. "Mereka belum lagi *knock out*. Kekuatan-kekuatan lama itu baru terpukul jatuh, *knock down*," kata Amien seperti mengingatkan semua orang. Namun kesadaran Amien belum menjadi milik bersama kaum reformis. Akibatnya sudah dapat ditebak. Reformasi berjalan pelan ke liang lahat yang digalinya sendiri. Reformasi Indonesia mengambil jalan berputar, tak jadi menyusuri jalan-jalan yang telah dibuat oleh rekan-rekannya di Polandia, Filipina, Afrika Selatan dan Iran. Pendahulu Amien di Polandia Lech Walesa, Corry Aquino di Filipina, Nelson Mandela di Afrika Selatan dan Imam Khomeini di Iran telah menempuh jalan lain yang lebih tegas. Setelah berhasil menumbangkan rezim diktator yang berkuasa, para pendahulu Amien itu langsung memimpin negaranya dan melakukan perubahan dimana-mana. Sebaliknya Amien di Indonesia terjebak dalam putaran konstitusi, sehingga cuma menjadi pemimpin partai yang kekuatannya bisa diukur. Majelis Amanat

Rakyat (MARA), yang didirikannya bersama tokoh-tokoh reformasi seperti Arbi Sanit, Faisal H Basri, Muchtar Pabottinggi dan lain-lain, bermetamorfose menjadi Partai Amanat Nasional (PAN).

Itu tentu bukan perubahan biasa, seperti berubahnya Golkar menjadi Partai Golkar atau penambahan kata Perjuangan pada PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri. Perubahan Majelis Amanat Rakyat menjadi Partai Amanat Nasional adalah perubahan paradigma atau perubahan cara pandang kaum reformis terhadap keadaan negara. Mereka yang percaya pada teori konspirasi menilai perubahan ini sebagai keberhasilan Amerika dan CIA-nya mengandangkan kaum reformis ke dalam wadah partai, sehingga kekuatannya tak lagi tanpa batas.

Sebelum menjadi partai politik (parpol), meski tak solid, Kekuatan kaum reformis tak terukur. Mereka ada dimana-mana dan menjadi motor perubahan. Namun ketika dia menjadi parpol, kekuatannya justru bisa diukur dan gampang mengecil atau dikerdilkan. Sebab dengan sekali pandang saja orang bisa tahu bahwa ideologi pendukungnya sangat beragam. Perekat mereka cuma reformasi yang secara harfiah berarti pembangunan atau pembentukan kembali negara atau lembaga yang ideal. Partai dan kepartaian yang syarat dengan tujuan-tujuan jangka pendek bukanlah bahan perekat, tapi peretak idealisme. Begitu menjadi parpol, kekuatan kaum reformis langsung menyusut 141 kali. Sebab setiap pecahannya harus bersaing dengan 140 parpol lain yang mendaftar untuk ikut berlaga pada pemilu 1999. Amien dkk dengan PAN-nya harus menghadapi kenyataan pahit ini.

Untuk itu mereka tak perlu menanti lama. Pagar-pagar pemisah langsung dibuat di tengah reformasi yang

belum lagi selesai. Kaum reformis dan intelektual kampus yang kental nilai-nilai Islam, misalnya, tak bersedia bergabung di PAN. Sebab partai baru ini dianggap netral. Meski didominasi kaum reformis, PAN dianggap sama saja dengan partai nasionalis lain yang sudah lama eksis semacam Golkar dan PDIP. Begitulah dengan PAN-nya Amien kehilangan pendukungnya yang paling potensial. Kalangan muda muslim dan intelektual kampus, yang setahun sebelumnya berada di barisan Amin menduduki gedung DPR/MPR, membentuk parpol sendiri Partai Keadilan (PK). Lalu, masih di barisan kaum reformis, mereka yang merasa membawa aspirasi atau penerus Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), partai Islam terbesar setelah kemerdekaan, lebih suka mengibarkan bendera bulan bintang. Mereka ini mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Masyumi dan Partai Masyumi Baru dengan lambang yang mirip satu sama lain. Kaum reformis yang berada di PPP juga enggan bergabung di PAN. Mereka tak bersedia untuk memulai karir politik dari bawah lagi. Karena itu mereka tetap di PPP. Sementara Abdul Kadir Zaelani, satu di antara segelintir perintis reformasi yang berkali-kali masuk penjara karena menentang Soeharto, memilih bergabung ke PBB.

Kedua partai berlabel Islam PBB dan PPP bukan tidak tahu potensi Amien untuk memenangkan pemilu. Sebab semua jajak pendapat dan polling di media massa saat itu, termasuk Kompas, menempatkan Amien pada posisi pertama. Amien bahkan mengungguli presiden berkuasa BJ Habibie dan Megawati Soekarnoputri. Tak heran bila PBB dan PPP berebut menarik Amien untuk didudukkan di posisi nomor 1 partai. Namun sang reformis menolak dengan alasan diplomatis: baju partai Islam baginya terlalu

sempit. PBB yang kecewa akhirnya memilih Yusril Ihza Mahendra sebagai Ketua Umum. Sedang PPP tetap dipegang orang lama. Alasan penolakan Amien kemudian dimainkan orang-orang yang tidak menyukainya untuk menggembosi kekuatan pemimpin reformasi itu. Ini menimbulkan kerugian di kedua pihak sampai sekarang. Sebab baik kaum nasionalis, Islam tradisional, maupun Islam modern tidak memiliki tokoh dengan track record segemilang Amien.

Setidaknya ada lima keistimewaan Amien yang tak dimiliki oleh pesaingnya dari partai manapun saat itu. Pertama, Amien telah melengserkan Soeharto. Kedua, dia tak pernah terlibat dalam orba. Ketiga, dia bebas korupsi. Keempat, dia dikenal jujur baik oleh mereka yang menyukainya maupun oleh yang membencinya. Kelima, dia tak pernah main perempuan. Bahkan ahli sosiologi yang satu ini berani melawan AS dan IMF untuk kepentingan bangsa. Buktinya tak sulit dicari. Dia, sekadar menyebut sebagian saja, sudah mempersoalkan konsesi perusahaan tambang emas AS Freeport sebelum Soeharto jatuh. Paman Sam jelas menilai Amien sebagai orang yang bisa merugikan kepentingan mereka di Indonesia. Toh mereka tak mau terang-terangan menunjukkan ketidak-sukaannya. Negara adikuasa itu mengambil jalan berputar. Mereka memilih untuk mendekati Amien daripada memusuhi pemimpin kaum reformis itu. Berkali-kali Amien sengaja diundang kongres AS untuk menjelaskan agenda reformasinya.

Hal itu tentu saja membuat Amien dan kaum reformis bangga seperti mendapat dukungan. Namun lewat jalan diplomasi tingkat tinggi itu pula AS sebenarnya sedang mengukur seberapa berbahaya Amien bagi kepentingan

mereka di Indonesia. Pada saat sama paman Sam membiarkan semua kekuatan yang memusuhi reformasi tetap hidup dan berkembang. Kaum reformis sendiri terlalu naif untuk mengerti agenda-agenda orang lain, sehingga tanpa sadar telah membiarkan Amien digembosi di depan mata baik oleh pendukung status quo, Islam tradisionalis, maupun oleh kalangan Islam modernis yang seharusnya mendukung. Meski tanpa komando, mereka seperti seiya membangun citra bahwa Amien adalah agen negara super power itu. Citra yang terbangun inilah yang mereduksi kekuatan Amien dan PAN.

Di sisi lain menolak Amien, memang membuat partai-partai dan tokoh-tokoh Islam semakin islamis dalam ceramah dan kampanye politik. Cuma dalam tataran politik praktis yang terjadi lain lagi. Mereka justru lebih pragmatis. Lihat saja partai-partai Islam. Bahkan PK yang kemudian berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilu 2004, bisa mencalonkan siapa saja sebagai pemimpin negara tanpa persyaratan *ngjelimet*. Mereka cuma memasang persyaratan ketat untuk Amien dan orang-orang yang sebetulnya lebih dekat secara ideologi. Persyaratan itu dilupakan ketika dijadikan kendaraan oleh kalangan lain tanpa alasan yang jelas. Ini terlihat ketika PKS tak mampu mengambil suara bulat saat mau mencalonkan Amien sebagai RI-1 pada pemilihan presiden tahun 2004. Tamsil Linrung yang loncat dari PAN, Annis Mata, Adhyaksa Dault (mantan Ketua KNPI) dan orang-orang semacam itu, yang bergabung belakangan, terbukti mampu memberi warna lain kepada PKS.

Partai, yang awalnya memposisikan diri sebagai penegak nilai-nilai Islam ini, pada saat yang paling dibutuhkan, tiba-tiba ragu untuk menentukan Amien

sebagai calon presiden dari PKS. Nama Wiranto dan SBY muncul sebagai saingan Amien di dalam partai ini. Para pendukung kandidat itu masing-masing ngotot untuk memajukan jagonya sebagai capres dari PKS. Akibatnya penentuan calon itu berlarut-larut, sehingga berubah menjadi kampanye negatif yang merugikan Amien. Perkembangan itu tentu menarik, bila tak bisa disebut aneh. Semua kalangan pasti bisa menerima bila orang-orang PKS yang islamis itu tak dapat menentukan pilihan antara Wiranto dan SBY, sebab keduanya sama-sama tentara, sama-sama purnawirawan jendral, sama-sama mantan orang dekat Soeharto dan sama-sama terlihat mampu beradaptasi di era reformasi. Namun ketika mereka kesulitan memilih antara Amien, Wiranto dan SBY, orang menganggap PKS telah kehilangan khittah. Mesin politik PKS tak bisa bekerja buat Amien pada putaran pertama pilpres, tapi bergerak efektif pada putaran kedua untuk kemenangan SBY.

Sedang PBB, yang sejak jauh sebelum pilpres sudah menunjukkan ketidaksukaannya pada Amien, langsung merapat ke SBY. Akibatnya partai, yang saat itu dipimpin Yusril ini, mendapat hukuman langsung dari pendukung fanatiknya, sehingga menjadi partai gurem yang tak mencapai electoral threshold pada pemilu 2004. Padahal pada pemilu 1999, ketika masih direcoki oleh rivalnya dari kalangan sendiri Partai Masyumi dan Masyumi Baru, PBB berada di urutan keenam dalam pengumpulan suara. Dia berada satu tingkat di atas PK yang berada di posisi 7 dan tidak masuk electoral threshold. Namun petualangan politik Yusril, meski membuat perolehan suara PBB *jeblok*, berhasil mengorbitkan dua tokoh utama partai di Kabinet Indonesia Bersatu SBY-JK. Yusril diangkat menjadi Menteri

Sekretaris Negara (Mensesneg) dan MS Ka'ban, mantan sekjen PBB yang kemudian menjadi ketua umum partai, diangkat sebagai Menteri Kehutanan (Menhut).

Di sisi lain gembosnya popularitas Amien di kalangan partai Islam tak lantas membuat nama Amien menjadi semakin populer di kalangan aktivis politik yang rada netral. Sebaliknya mereka malah sudah lebih dulu menutup pintu buat Amien. Mereka sudah memiliki platform sendiri yang juga tak bisa ditembus. Oposisi pemberani semacam Sri Bintang Pamungkas, misalnya, lebih senang tetap di Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) yang didirikannya. Demikian juga Muchtar Pakpahan. Aktivis buruh, yang dibebaskan dari tahanan karena tuntutan kaum reformis, ini lebih senang menjadi raja kecil di Partai Buruhnya. Adi Sasono, tokoh LSM yang sebenarnya sangat reformis, tak bersedia pula berada di bawah Amien. Dia mendirikan Partai Daulat Rakyat (PDR). Abdurrahman Wahid sami mawon. Dia bikin Partai Kebangkitan Bangsa. Megawati tetap di PDIP. Tokoh Islam yang juga sangat reformis Prof. Dr. Deliar Nur mendirikan Partai Ummat Islam (PUI). Dr. Syahrir dari FEUI yang cukup kritis, bikin pula Partai Indonesia Baru. Daftar ini bisa diperpanjang misalnya dengan tokoh muda radikal kiri Budiman Sujatmiko, dan lain-lain yang juga ogah berkumpul dalam satu partai dengan kaum reformis. Namun sebagai bahan renungan betapa hebatnya demokrasi kepartaian ini memecah-belah kaum reformis cukuplah. Budiman, sebagaimana diketahui, berjibaku merebut hati rakyat pada pemilu 1999 lewat Partai Rakyat Demokratik (PRD). Namun jajannya tak laku, sehingga PRD hanya menambah panjang daftar partai gurem yang tak memenuhi electoral threshold untuk bisa berlaga lagi di pemilu

2004.

Serpihan-serpihan inilah yang kemudian harus berhadapan dengan kekuatan lama, pendukung status quo, para pemilik modal yang tidak ingin perubahan, kekuatan internasional yang lebih senang melihat Indonesia sebagai pasar daripada negara berdaulat, dan lain-lain. Memang tidak semua orang reformis tersedot ke dalam pusaran demokrasi kepartaian. Sebagian masih bisa menjaga jarak atau tetap memelihara independensinya. Mereka tak melebur diri dalam partai mana pun. Pengacara kondang Adnan Buyung Nasution, sekadar menyebut sebagian saja, dan tokoh legendaris gerakan lima belas januari (Malari) Harriman Siregar termasuk dalam golongan ini. Harriman tetap di Indonesia Demokrasi Monitor (Indemo), organisasi kemasyarakatan (ormas) yang didirikannya. Tokoh reformasi lain yang juga tak latah masuk parpol adalah Nurcholis Majid, Andi Malarangeng dan Mulyana W Kusumah. Namun pemilu pertama di alam reformasi itu memang terlalu menarik untuk dibiarkan berlalu begitu saja. Dengan keinginan untuk membuat pemilu yang bagus dan fair Nurcholis, Adnan Buyung Nasution, Andi Malarangeng dan Mulyana W Kusumah kemudian bergabung dalam tim 11 komite pemilihan umum (KPU), mewakili kaum reformis.

Dalam perjalanan waktu sebagian besar kaum reformis, baik yang berada di parpol maupun tidak, akhirnya kelelahan sendiri. Mereka ini sebagian langsung mutung dan kembali ke habitatnya di kampus seperti Arbi Sanit dan Faisal H. Basri, mantan Sekjen PAN. Sebagian lagi bergabung ke partai lama yang lebih menjanjikan. Di deretan ini bertengger nama-nama semacam Pius Lustri-lanang yang tak betah di PAN hengkang ke PDIP. Juga

Budiman dan Bitor (PRD) yang bergabung ke PDIP setelah pemilu 1999. Nuku Sulaiman (almarhum) dari PRO-Demokrasi yang mulanya tak suka berpartai, ikut pula bergabung ke PDIP. Lalu Nurcholis (almarhum) sempat terjebak ikut konvensi Golkar dan akhirnya terdepak keluar, karena urusan 'gizi.' Reformis lain Prof. Ryaas Rasyid, yang sudah mengukir namanya beberapa waktu di kabinet Gus Dur sebagai Menteri Otonomi Daerah, ikut latah bikin parpol menjelang pemilu 2004, bergandengan tangan dengan Andi Malarangeng.

Bersama Andi, Ryaas mendirikan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDKB). Partai ini ikut berlaga di pemilu 2004 dan menambah panjang daftar partai gurem. Setelah pemilu legislatif Andi berselisih paham dengan Ryaas soal calon presiden (capres). Ryaas, yang mengusung nama Amien di setiap diskusi dan seminar sebagai capres paling credible, menjelang pemilihan malah menggunggulkan pasangan Wiranto dengan alasan lebih punya kans untuk menang. Rasa hormat orang, terutama intelektual kampus, kepada Ryaas langsung anjlok setelah itu. Meski demikian rasionalisasi Ryaas dalam menjatuhkan pilihan, kemudian diadopsi oleh tokoh-tokoh parpol untuk mendukung siapa saja yang disukai. Ini sekaligus menandai matinya ideologi di dunia politik Indonesia, menyusul kematian serupa di dunia ekonomi yang sejak awal boleh dibilang tertutup buat mazhab ekonomi non kapitalis.

Dalam perjalanan waktu partai-partai nampaknya semakin netral dan sangat berorientasi pada kepentingan sendiri, kecuali pada saat kampanye. Para eksekutif parpol lebih suka menyediakan partainya sebagai kendaraan bagi siapa saja yang ingin naik ke panggung kekuasaan dengan imbalan tertentu. Ini terjadi tidak



hanya di tingkat nasional, tapi sampai ke daerah-daerah. Bahkan partai pemenang pemilu legislative 1999 PDIP tak luput dari kehinaan itu. Berkali-kali partai berlambang banteng gemuk itu melecehkan kadernya sendiri dengan mencalonkan kader Golkar atau TNI sebagai kepala daerah. Contoh yang paling kasat mata tentu saja saat pemilihan Gubernur DKI Jaya. PDIP di bawah Megawati Soekarnoputri mengajukan kembali Sutiyoso, orang yang dianggap berbau orba dan disinyalir terlibat dalam penye-rangan kantor PDIP pada 26 Juli 1996. Contoh lain yang tak kalah menyakitkan kader PDIP adalah pada pemilihan Gubernur Lampung. Megawati lebih senang memajukan kader Golkar daripada kader PDIP. Anehnya saat sang kader maju juga dengan kekuatannya sendiri dan memenangkan pemilihan, PDIP membiarkan kadernya dimakzulkan dan bahkan ditangkap dengan menggunakan helikopter seperti teroris. Daftar ini bisa diperpanjang, misalnya dengan kasus pemilihan gubernur Bali dan lain-lain, tapi sebagai contoh itu saja cukuplah.



Airways. Orang-orang PPP

PPP menambah kerunyaman ini ketika menyediakan dirinya sebagai kendaraan buat Samudra Sukardi, kakak kandung orang penting PDIP waktu itu Laksamana Sukardi. Laks, begitu mantan Presdir Lippo-Bank itu kerap disapa, saat itu menduduki posisi strategis Menneg BUMN. Sedang Samudera sedang berupaya keras untuk menduduki kursi nomor satu di maskapai penerbangan Garuda Indonesia Airways. Orang-orang PPP

menempatkan Samudra Sukardi di posisi puncak Garuda, persis seperti lainnya kampanye untuk mengangkat kader-nya sendiri. Bila partai-partai besar bisa bersikap seperti itu, partai kecil tentu lebih bisa lagi. Bahkan mungkin lebih parah. Partai-partai gurem seperti dengan sengaja menampilkan diri sebagai anggota tim sukses siapa saja untuk duduk di kursi eksekutif. Dalam hal yang satu ini PKS, yang dianggap sebagai partai yang paling punya prinsip, pun ikut bermain. Contoh yang paling bagus tentu saja pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jaya yang akan berlangsung Agustus 2007. PKS tidak berada di belakang Faisal H Basri, ekonom kritis yang relatif bersih dan bebas orba. Partai ini justru mengusung Adang Darajatun, mantan Wakapolri yang punya duit banyak. Ketua Umum PKS Tifatul Sembiring tak malu-malu berbicara soal imbalan, ketika ditanya wartawan. "Orang dia yang mau nikah, masa enggak bayar mahar," katanya setengah becanda. Nama Faisal H Basri akhirnya lenyap dari bursa calon, karena minusnya pendukung. Dia sempat mendatangi PDIP, tapi tak mendapat sambutan berarti.

## 2. Peserta dan Para Penyelenggara Pemilu

Pemilu 1999 akhirnya diikuti 48 parpol, termasuk 3 partai besar dari zaman orba (PPP, Golkar yang mendapat embel-embel partai, dan PDI yang dalam perjalanan waktu mendapat tambahan P). Artinya dalam seleksi awal sebelum pesta demokrasi itu dilaksanakan telah gugur 93 parpol dari 141 yang terdaftar. Yang gugur ini memang kebanyakan parpol baru, baik yang berasal dari kalangan reformis, partai baru pendukung status quo, maupun yang berasal dari sempalan partai lama. Mereka tak lulus seleksi tim 11, alias tak memenuhi syarat administratif minimal



untuk ikut berlaga sebagai peserta pemilu. Meski sangat menyedihkan bagi orang-orang parpol tersebut, bagi rakyat secara umum itu menjadi blessing in disguise. Soalnya bila semua lolos, dapat dibayangkan betapa sulitnya bagi pemilih saat pencoblosan. Sebab surat suaranya akan menjadi lebih tebal daripada majalah Tempo.

Pemilu pertama di era reformasi ini menelan biaya Rp 1,3 triliun. Itu berarti ada peningkatan hampir 5 kali lipat dibanding pemilu terakhir zaman orde baru (Rp 233 miliar) yang cuma diikuti 3 partai klasik (PDI, Golkar dan PPP). Artinya peningkatan biaya ini jauh lebih kecil dibanding peningkatan jumlah parpol peserta pemilu yang meningkat 16 kali. Kedua pemilu itu, meski waktunya masih berdekatan, tak bisa dibandingkan dari sisi manapun. Pemilu di zaman orba, termasuk pemilu terakhir di tahun 1997, pukul rata sangat tertutup. Penyelenggaraannya 100% berada di tangan pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri. Ketua Pelaksananya adalah Menteri Dalam Negeri yang pada 1997 dijabat Rudini. Lembaga Pengawas boleh dibilang nol. Pada pemilu terakhir memang pengawas swasta mulai ikut meramaikan dengan mendirikan Komite Independen Pengawas Pemilu (KIPP), tapi mereka ini mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan oleh rezim orba. Bahkan Teater Terbuka Taman Ismail Marzuki, tempat mereka bersarang, dihancurkan aparat dengan alasan mau dipugar. Pemilu terakhir di zaman orba, yang samasekali menolak partisipasi pihak manapun itu, seperti diketahui cuma menghasilkan akrobat politik.

Pesta demokrasi 1997, di tengah protes dan kerusuhan, tanpa malu-malu menghasilkan wakil rakyat kelas arisan kampung. Soeharto bersama orang-orang keperca-

yaannya menyeleksi setiap calon. Ini berlaku tidak saja bagi mereka yang mewakili partai penguasa Golkar, utusan daerah dan utusan golongan, serta tentara, tapi juga bagi mereka yang mewakili partai oposisi PPP dan PDI. Tak heran bila rakyat di kota dan di daerah lebih banyak diwakili oleh orang-orang yang tak mereka kenal. Kadang sang wakil pun bukan orang daerah itu, bahkan tidak tinggal di situ. Partai-partai yang telah dikebiri itu menentukan siapa yang mesti mewakili rakyat setelah diseleksi oleh tim pemerintah. Kalau pemerintah sudah acc terhadap nama-nama yang disodorkan pengurus partai, maka jadilah dia calon wakil rakyat. Bila suara yang dikumpulkan cukup, maka jadilah dia anggota DPR/MPR atau DPRD I dan II. Bila Soeharto atau kadang diwakili Menteri Dalam Negeri tak berkenan, partai akan menggantinya dengan orang lain. Setelah menjadi anggota DPR/MPR pun posisi mereka belum aman. Sebab setiap waktu bisa di-recall bila Soeharto menganggapnya 'mbeling.' Soeharto memang begitu berkuasa selama 32 tahun. Dia bahkan bisa menentukan siapa yang mesti menjadi temannya dan siapa yang boleh duduk di kursi oposisi. Dicoretnya nama-nama calon legislatif mantan Masyumi atau penandatanganan Petisi 50 selama masa orba adalah bukti yang tak terbantah.

Golkar sendiri, meski selalu keluar sebagai partai pemenang pemilu, tak punya kekuasaan apa-apa. Partai ini juga tak lepas dari seleksi tim khusus yang disetir Soeharto. Tokoh-tokoh masyarakat semacam Jimly Assid-diqi, Adi Sasosono, Prof. Muladi, Satrio Budiharjo Yudono (Billy Yudono), dan lain-lain telah dicoret dari daftar calon anggota legislatif dari Golkar dalam Pemilu terakhir orba (1997) juga karena Soeharto tak berkenan. Di sisi lain

orang-orang yang disukai sang patron, termasuk pejabat tinggi negara dan keluarga Cendana, tidak saja boleh menjadi calon anggota legislatif, tapi juga boleh memboyong keluarganya ke gedung wakil rakyat. Menpangab Jendral Wiranto termasuk dalam deretan orang-orang yang diperkenankan itu. Dia bersama anak dan istrinya menjadi wakil rakyat dari Gokar pada pemilu 1997. DPR/MPR arisan itu kemudian mengukuhkan kembali Soeharto menjadi Presiden RI untuk ketujuh kalinya. Padahal seluruh tanah air bergolak dan mengharapakan perubahan radikal, terutama dalam struktur pemerintahan. Inilah yang akhirnya memicu lahirnya gerakan reformasi yang bergerak bersama badai krisis tahun 1998.

Pemerintahan transisi Habibie, harus diakui telah berupaya keras mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga bisa mempersembahkan pemilu berkualitas pada 1999. Dia tak segan membuka pintu bagi lembaga-lembaga independent dari dalam dan luar negeri untuk ikut menyaksikan dan mengawasi jalannya pemilihan. Tak heran bila lembaga-lembaga internasional pun berdatangan, termasuk dana tentunya. Begitulah di samping menyediakan anggaran Rp 1,3 triliun buat hajatan besar itu, dana dari luar pun ikut membanjiri republik. United Nation for Development Program (UNDP), misalnya, menggelontorkan US\$ 100 juta. Konon kemudian dana itu dikurangi menjadi US\$ 80 juta, tapi kepastian tentang ini masih simpang siur.

Masuknya dana dari luar bukannya tak membawa dampak di dalam negeri. Malah sebaliknya. Pesta demokrasi menjadi sesuatu yang tak lagi menakutkan, tapi malah menyenangkan. Pemilu di akhir abad 20 itu seperti berubah menjadi proyek besar yang setiap bagiannya bisa

ditenderkan. UNDP, yang punya duit gratisan Rp 870 miliar (dengan kurs Rp 8700/US\$), banjir proposal dari sekitar 40 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Tidak semuanya stok lama memang, bahkan LSM dadakan nampaknya lebih banyak. Simak saja nama-nama ini. KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu), yang ini memang sudah dikenal. Lalu ada Unfrel (University Network for Free and Fair Ellection). Persatuan Wartawan Reformasi juga bikin tim pemantau pemilu. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) bikin tim serupa. Kemudian masih ada Visi Anak Bangsa yang bikin iklan bagus-bagus tentang pemilu di televisi.

Lembaga-lembaga semacam ini tidak saja meramalkan ibukota negara, tapi juga merambah ke kota-kota lain. Sekadar menyebut sebagian saja. Di Bandung ada Komite Nasional Pemantau Pemilu (KNPP) yang konon didirikan oleh 10 LSM. Biar agak keren ada pula yang menghubungkan pemilu dengan ekonomi, Komite Pemantau Pemilu dan Pengembangan Ekonomi (KPPPE). Di Medan ada Lembaga Pemantau Pemilu Independen (LPPI), dan masih banyak lagi. Bahkan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), yang biasanya mengurus lingkungan, bikin Civic Education (CE) untuk mendidik pemilih. Bagi UNDP ini tentu menggembirakan, karena setidaknya penyumbang dana dari 16 negara bisa tahu duit mereka terpakai.

Dana dari luar tersebut jelas bukan satu-satunya lajang bisnis. Yang dari dalam negeri pun lumayan basah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi pimpinan mantan Mendagri Rudini, yang pegang duit Rp 1,3 triliun, juga banjir peminat. Apalagi proyeknya juga segudang. Ada pencetakan formulir pendaftaran dan pemanggilan. Yang ini dibagi kepada beberapa perusahaan percetakan:

PT Marannu Anggareja, PT Metropos, CV Indonesia Printer, PT Pentas Cakra Bakti, PT Golden Web, CV.Yudhistira, dan PT Paser Media Indonesia.

Kemudian untuk memantau pengumpulan suara di daerah-daerah KPU butuh 150 perangkat radio SBB seharga Rp 20 juta/unit ditambah sejumlah itu untuk sarana pendukungnya. Panitia daerah kecipratan bikin 270 ribu set kotak suara. Konon harga termurah per set Rp 80 ribu. Jadi total dibutuhkan dana 21,6 miliar. Masih buat mereka yang di daerah adalah pembuatan tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 270 ribu juga. Bila satu TPS komplit berharga Rp 25 ribu saja, maka dana yang mesti dikeluarkan adalah Rp 6,75 miliar. Biaya keamanan pemilu belum lagi dihitung, tapi jangan khawatir preman tidak bakal dapat proyek ini. Itu lahan aparat negara yang paling tahu soal keamanan.

Lahan bisnis lain yang tersedia adalah pengumpulan dan distribusi data. Yang satu ini jelas butuh teknologi canggih. Proyeknya cuma bagi mereka yang bergerak dalam bidang itu. Telkom berada di urutan pertama. BUMN ini diminta menyediakan sarana saluran komunikasi data. Sebagai penyedia prasarana dan jasa distribusi informasi ditunjuk PT Asiatel. Perusahaan telekomunikasi yang berpusat di Hongkong ini mengoperasikan dua jaringan independen: jasa faksimili, dan voice service network. Lalu PT Mitra Integrasi Informatika menyediakan program pengolahan data internal KPU buat keperluan analisis dan administrasi pemilu. Konsorsium perbankan sebagian menyediakan perangkat dan jaringan di setiap kabupaten. Masih dalam soal teknologi informasi pemilu, PT.Praweda Ciptakarsa Informatika, jagoan teknologi informasi di Indonesia, ditunjuk sebagai konsultan pengintegrasian

jaringan dan sistem penghitungan suara secara on line dan real time.

Yang menjadi pertanyaan bagaimana mereka yang terlibat dalam proyek besar pemilu memperoleh order bisnis? "KPU cuma membuat rancangan. Kalau soal pengadaan, itu soal pemerintah," jawab Ketua KPU Rudini tegas. "Cara pelelangannya kan macam-macam. Kebetulan yang dipilih cara penunjukan langsung, karena keterbatasan waktu. Tapi semua dilakukan secara fair. Bila tidak memenuhi syarat, ya dicoret," tambah wakil Partai Keadilan dan Pembangunan (PKP) itu meyakinkan.

Meskipun sudah cukup fair menurut versi Rudini, dalam praktiknya sistem penunjukan langsung itu menimbulkan konflik kepentingan banyak pihak. Yang paling jelas adalah saat mau mencetak surat suara. Berbagai kepentingan ikut bermain di sana, termasuk oknum anggota KPU. Hal itu diakui Adnan Buyung Nasution, pengacara kondang yang jadi wakil pemerintah di KPU. "Keputusan untuk mencetak kertas suara, misalnya berapa banyak yang mesti dicetak, dan berapa percetakan mesti dilibatkan, memang berubah-ubah. Itu bikin bingung perusahaan percetakan," tutur Buyung terus terang. "Ada perusahaan percetakan yang order cetaknya diubah-ubah karena ada titipan dari sejumlah anggota KPU. Mereka diduga jadi beking beberapa percetakan. Ini yang bikin bingung," sambung pengacara senior itu cepat.

Soal order cetak-mencetak surat suara ini memang proyek besar. Betapa tidak! Barang yang mau dicetak itu 413 juta lembar kartu suara. Mulanya akan dicetak di atas kertas security printing, sehingga tidak mudah dipalsukan seperti layaknya buku cek, surat saham, uang, dan sebagainya. "Dengan teknik tertentu setiap upaya

menggandakannya akan mudah terlihat, karena di lembaran ganda itu akan tertulis copy atau ganda misalnya," kata Direktur PT.Karsa Wira Utama (KWU) Zainal Asikin.

Menurut Zainal di Indonesia cuma 14 percetakan yang mempunyai izin dari BAKIN mencetak security printing: PT Balai Pustaka, PT Grafisindo Mega Utama, PT Karatama (anak perusahaan Peruri), PT Wahyu Abadi, PT Karsa Wira Utama, PT Sandi Pala Arta, PT Swadana Eka Grafisindo Sarana, PT Byok Utama Grafiti Selasih, PT Djakarta Computer Supplies, PT Sumber Cakung, PT Stacopa Raya, dan PT Kartika Prama Tamas. Semua yang disebut di atas itu berada di Jakarta. Kemudian PT Jasuindo Tiga Perkasa di Sidoarjo, PT Aridas Karya Satria di Purwokerto. Sebelum terjadi ganjang-ganjing soal kemampuan dan biaya cetak, 14 percetakan tersebut hampir pasti mendapat rezeki nomplok. Apalagi 11 di antaranya sudah mendapat order, dan 3 lainnya dicanangkan. KPU sendiri telah memperkirakan biaya per lembarnya sekitar Rp 346,5. Bayangkan berapa besar nilainya bila yang dicetak 413 juta lembar?

Mega Proyek tersebut semula dibagi dalam dua konsorsium: satu di bawah pimpinan Balai Pustaka, dan yang lain di bawah Grafisindo Mega Utama. "Kami tidak melakukan tender, tapi ditunjuk oleh KPU. Balai Pustaka, membawahkan 5 percetakan, mendapat jatah 100 juta lembar kartu suara," kata Siswadi awal April 1999 saat diwawancarai penulis buat majalah SWA tenang. Bila biaya per lembar, katakanlah Rp 300 saja, maka total ordernya sudah Rp 30 miliar. Keuntungan yang bisa disedot percetakan paling tidak 10-15% dari proyek. Namun semuanya tiba-tiba buyar. Pasalnya Sekjen Persatuan Perusahaan

Grafika Indonesia (PPGI) Jimmy Juneanto meragukan kemampuan produksi para pemegang lisensi *security printing* tersebut. Menurutnyanya seluruh perusahaan tersebut cuma mampu mencetak 72 juta lembar dalam 20 hari. Padahal yang mau dicetak 400 juta lembar lebih. Di samping itu semua biayanya di-mark up, sehingga pemerintah akan dirugikan Rp 100 miliar lebih.

Mendapat serangan keras seperti itu pemerintah lantas putar haluan, meskipun tetap pakai sistem tunjuk seperti lazimnya di masa Soeharto. Lalu ditunjuklah 18 perusahaan lain untuk mencetak 413 juta lembar kartu suara tersebut. Biaya per lembarnya cuma Rp 111, sehingga total biaya cetak cuma Rp 45 miliar. Itu belum termasuk ongkos lipat yang per lembarnya Rp 8. Jadi total ongkos lipat Rp 3,9 miliar. Satu hal perlu diingat pencetakan tidak lagi dilakukan dengan security printing, tapi kertas biasa. Ketika ditanya mengapa ongkos cetak security printing begitu mahal dibanding cetak biasa, Zainal menjawab cepat "Itu tidak bisa dibanding. Maksud saya itu tidak apple to apple. Membandingkannya harus antara cetak biasa dengan cetak biasa, dan security printing dengan security printing!" "Biaya pengamanannya juga akan lebih mahal dengan cetak biasa, karena semua orang bisa mencetak yang seperti itu," sambung Direktur KWU itu.

Zainal memang tidak mengada-ada. Karenanya, jika tidak hati-hati, hal seperti itu bisa menjadi satu potensi konflik baru setelah pemilu. Namun pemerintah nampak siap mengantisipasinya dengan membubuhkan semacam materai, misalnya, sebagai bukti asli. Cuma dalam hal ini tentunya Pak Rudini harus pula menghitung biaya tambahan untuk itu. Sebab materai dan pemasangannya

tentu tak gratis.

Itu baru dari sisi biaya. Belum lagi bila dihitung potensi ketidakpuasan lain soal pencetakan tersebut. Gejalanya sudah mulai terlihat. Penunjukan percetakan-percetakan itu, kata mantan Ketua DPD PDI Jakarta (1989 - 1994) Alex Asmasubrata, berbau kolusi dan main mata. Menurutnya ada percetakan mendapat order mencetak 65 juta lembar, padahal sebenarnya tidak memiliki mesin cetak sesuai spesifikasi KPU. Sebaliknya ada yang punya kapasitas besar dan mesin sesuai spesifikasi cuma mendapat order 15 juta lembar. Sementara ada perusahaan yang secara teknis tidak mungkin melaksanakan sendiri pencetakan kartu suara, memberi order kepada perusahaan lain.

Untungnya aroma bisnis dan saling sikut dalam rebutan rezeki ini tidak merusak tujuan sebenarnya, yakni bikin pemilu yang fair. Terlepas dari beberapa kekurangan di sana-sini yang tidak terlalu prinsip, Pemilu 1999 yang diselenggarakan pemerintahan transisi Habibie telah dinobatkan menjadi pemilu paling fair dan bersih setelah pemilu 1955. Ini diakui banyak pihak dan pengamat, termasuk dunia luar. Hasilnya?

### **3. Perubahan Peta Politik yang Mengecewakan**

Golkar, yang selama 3 dasawarsa menjadi mesin politik Soeharto paling efektif, terbukti tak tergilas habis di era reformasi. Di bawah kendali Akbar Tanjung, yang cerdik, partai ini berhasil mengumpulkan 23.741.749 suara atau 22,44% dari total suara pemilih yang sah. Dia keluar sebagai runner up dengan 120 kursi di DPR. Artinya dibanding pemilu 1997 dan 6 pemilu sebelumnya, suara Golkar memang tergerus luar biasa. Tahun 1997 mantan

partai penguasa ini mendapatkan 70% lebih suara atau memborong 300 kursi lebih. Tahun 1999 sabuk jawara direbut PDIP pimpinan Megawati dengan 35.689.073 suara atau 33,74% suara. Partai banteng bermulut putih ini memperoleh 154 kursi di parlemen. Partai lama PPP berada di urutan ketiga dengan 11.329.905 suara atau 10,71%. Dia mendapatkan 58 kursi di parlemen. Artinya dibanding pemilu terakhir di masa orba, PPP kehilangan 31 kursi. Sedang PDI warisan orba di bawah Suryadi terpuruk jauh ke posisi 12. Dia Cuma mengantongi 345.720 suara. Partai ini cuma memperoleh 2 kursi dari jatah pembagian kursi sisa. Jika dibandingkan dengan pemilu 1997, PDI kehilangan 9 kursi dan tentu saja tidak masuk electoral threshold.

Angka-angka di atas dengan gamblang membuktikan bahwa memang ada perubahan luar biasa dalam pemilu legislatif pertama pasca orba itu dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Meski demikian ada juga banyak hal yang patut disesali, yaitu pemilu pertama itu sekaligus membuktikan bahwa kaum reformis belum mendapat tempat di hati rakyat yang nasibnya sedang diperjuangkan mereka. Lihat saja PAN dan Partai Keadilan (PK), misalnya. PAN, partainya kaum reformis cuma mengantongi tak sampai 10% suara atau tepatnya 7.528.926 suara pemilih. Artinya hanya sekitar 7,12% pemilih yang memilih PAN. Partai yang dipimpin amien Rais ini berada pada posisi 5 dan mendapatkan 34 kursi. Ini pada gilirannya membuat Amien mawas diri dan mundur dari bursa pemilihan presiden. "Saya tidak mau menjadi presiden ten persen," katanya setengah kecewa setengah berseloroh. PAN berada di bawah Partai Kebangkitan Bangsa yang membawa gerbong nahdhiyin. Partai yang didirikan Abdurrahman Wahid

ini memperoleh 13.336.982 suara dan mendapatkan 51 kursi parlemen.

Sedang partai kaum reformis dari kampus PK berada di urutan ketujuh dengan 1.436.565 suara. Partai ini hanya mendapat 7 kursi di parlemen dan tidak masuk dalam electoral threshold. Artinya dia hanya punya dua pilihan: mati atau ganti nama untuk bisa berlaga lagi dalam pemilu 2004. PK memilih yang kedua dengan menambah S (Sejahtera) di belakangnya. PK yang kemudian berganti nama menjadi PKS memang melakukan berbagai pembenahan di sana-sini dan tampil gemilang pada 2004 yang diikuti 24 parpol. PKS mengalahkan PBB yang semula reformis tapi memudar dan semakin kehilangan simpati ummat. PBB mengumpulkan 2.049.708 suara pada 2004 dan berada di urutan ke 7. Dia seperti bertukar tempat dengan PKS yang menduduki posisi 6. PBB hanya memperoleh 13 kursi dan tidak masuk electoral threshold. Artinya partai, yang kini dipimpin MS Ka'ban, ini hanya punya dua pilihan: mati atau ganti nama bila ingin berlaga pada 2009.

Sebenarnya bila mau berpikir rasional, setelah pemilu 1999 yang diikuti 48 parpol, partai-partai yang berada di bawah urutan ketujuh boleh disebut sebagai deretan partai gurem. Hasil pemilu itu mestinya memberi pencerahan kepada para pemimpin dan pengurusnya. Artinya para pemimpin partai-partai tersebut, baik yang merasa diri reformis maupun yang hanya menjalankan perintah kekuatan lama, tidak perlu lagi mengerahkan tenaga, pikiran dan dana untuk berlaga lagi di pemilu berikutnya. Bergabung saja dengan partai lain atau sekalian bikin fusi partai gurem seluruh Indonesia. Hitung-hitungan di atas kertas menunjukkan bila partai-partai gurem itu berfusi,

pada 2004 minimal mereka bisa memperoleh 35 kursi. Sebagian memang memilih mati, tapi sisanya tak menggabungkan diri. Partai-partai gurem itu mengganti logo dan nama untuk berlaga lagi.

PDIP sendiri sebagai pemenang pemilu legislative pada 1999 tak berhasil mengantarkan sang ketua kharismatis Megawati Soekarnoputri sebagai RI-1. Sidang paripurna MPR pada Oktober 1999 memilih Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Ini terjadi begitu cepat setelah pertanggungjawaban Habibie ditolak dan Amien Rais menyatakan tak bersedia menjadi presiden ten persent. Gus Dur yang partainya (PKB) hanya mengantongi sekitar 13 juta suara didaulat untuk maju dalam pilpres menjadi pesaing Megawati dari PDIP yang punya 33 juta sara lebih. Yusril Ihza Mahendra dari PBB kemudian juga ikut berlaga, sekaligus menjaga kemungkinan Gus Dur mundur di tengah jalan. Ahli hukum tata Negara itu maju ke gelanggang bukan tanpa perhitungan. Sebab bila Gus Dur mundur dari pemilihan, maka dia akan menjadi satu-satunya pesaing Mega. Bila itu benar-benar terjadi, maka bukan tidak mungkin Yusril akan memenangkan pemilihan di tengah arus penolakan terhadap presiden wanita.

Namun perhitungannya meleset. Gus Dur tak mundur dan terpilih menjadi RI-1. Sidang yang sama kemudian menempatkan Megawati sebagai RI-2. Pemilihan berakhir di situ. Tidak seperti yang semula dijanjikan Gus Dur: "Mas Amien memilih saya. Saya memilih Mega. Nanti Mega akan memilih Amien." Terlepas dari kejadian-kejadian sebelumnya, hasil akhir itu telah menyelamatkan Indonesia dari kemungkinan anarki akibat ketidakpuasan massa banteng. Begitulah Gus Dur kemudian menjadi RI-1 didampingi Megawati sebagai RI-2. Amien Rais, pemimpin



kaum reformis menjadi Ketua MPR. Sedang Akbar Tanjung, sang ketua Golkar, menjadi ketua DPR. Habibie kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada Gus Dur dengan tersenyum, tanpa beban. Dia menjadi presiden pertama republik yang turun dengan proses normal konstitusional. Dua presiden sebelumnya telah diturunkan lewat proses yang lain.

Sayangnya tradisi ini tak berlangsung lama. Presiden Abdurrahman Wahid, yang muncul dari pemilihan yang fair oleh wakil rakyat di MPR, terpaksa dihentikan di tengah jalan oleh lembaga tertinggi negara itu. Tindakan-tindakan presiden dianggap telah menimbulkan keresahan wakil rakyat di dewan, partai-partai pendukung kabinet yang menteri-menterinya dipecat, dan sebagainya. Megawati Soekarnoputri, pemimpin partai pemenang pemilu legislatif, akhirnya didaulat menggantikan presiden yang mempunyai energi luar biasa itu sampai 2004. Kekuasaan Mega juga dianggap mengecewakan banyak pihak, terutama dalam urusan penjualan aset-aset negara, tapi tak sampai menimbulkan impeachment (penyidangan presiden oleh wakil rakyat).

Pada akhir kekuasaannya presiden Megawati berhasil menyelenggarakan pemilu legislatif dan pemilihan presiden dan wapres secara langsung. Sebagaimana Habibie, Mega pun tak terpilih menjadi RI-1 dalam pemilihan presiden yang diseleggarakannya. Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Menko Polkam pada kabinet Gotong Royong Mega-Hamzah yang dianggap teraniaya pada masa Mega, memenangkan simpati pemilih. Partai Demokrat, yang menjadi kendaraannya, adalah partai baru dan bukan pemenang dalam pemilihan legislatif. Meski demikian orang super penting Partai Demokrat itu berhasil

menggandeng Jusuf Kalla, koleganya di kabinet sebelumnya yang menjadi Ketua Golkar. Hebatnya lagi Jusuf dari Golkar, yang berhasil memenangi pemilu legislative, menerima posisi RI-2. Mega akhirnya turun dari posisi RI-1 secara normal konstitusional dan menjadi orang kedua setelah Habibie.

Dibanding pemilu 1999, pemilu 2004 sebetulnya sangat istimewa dilihat dari sisi penyelenggaranya. Pemilu 1999 boleh dibilang pada setiap jenjangnya melibatkan partai politik. Sedang pemilu 2004 ditangani oleh orang-orang kampus dan tokoh-tokoh lembaga swadaya masyarakat (LSM), dengan alasan untuk menghindari konflik kepentingan. Kalau saja penyelenggaraannya menjadi lebih bersih dan bagus, tentu Indonesia bisa menawarkan konsep itu kepada dunia. Sayangnya yang terjadi justru sebaliknya. Pemilu 2004 coreng-moreng akibat berbagai kecurangan dan korupsi yang melibatkan orang-orang penting KPU. Pembuatan kotak dan surat suara, misalnya, pada masa ini ditangani langsung oleh pusat. Padahal untuk membuatnya tidak diperlukan teknologi canggih. KPU pusat sebenarnya cukup menetapkan spesifikasi dan menyediakan biaya pembuatannya.

Namun orang-orang kampus dan LSM itu berambisi membuat sesuatu yang istimewa. Kotak suara, misalnya, dibuat dari lempengan aluminium atau baja tipis bisa digunakan lagi pada pemilu-pemilu berikutnya. Idenya lumayan bagus, cuma pelaksanaannya akan sangat menyulitkan. Karena penyimpanan kotak suara aluminium atau baja tipis sebanyak 2,195 juta unit selama 5 tahun, akan memerlukan gudang-gudang yang banyak dan menelan biaya sangat besar. Lagi pula untuk apa? Hal-hal kecil seperti itu lupa dipikirkan orang-orang KPU asal



kampus. Di samping itu, karena ditangani langsung oleh pusat, maka panitia daerah hampir tak kebagian rezeki dari hajatan akbar ini. Hal ini dianggap amat mengecewakan, sebab Indonesia telah memasuki era otonomi daerah. Akibat pemusatan ini tentu saja biaya menjadi lebih mahal, karena ada ongkos transportasi dari Jakarta ke daerah-daerah, di samping rawan korupsi, kerusakan di jalan dan penyimpanan tentunya.

Terlepas dari segala peristiwa yang mengiringinya, pemilu legislatif dan pemilihan presiden dan wapres secara langsung telah berhasil dibuat dengan sukses. Pemilu dan pilpres 2004 ini telah menghadiahi Indonesia SBY-JK sebagai presiden dan wakil presiden pilihan rakyat. Cuma dampak ikutannya masih ada yang mengganjal, sekaligus memberinya perbedaan yang mencolok dari pemilu sebelumnya. Pemilu 1999 melahirkan seorang bintang, yaitu Prof.Dr. Harun al Rasyid. Pakar hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini dinilai sebagai anggota KPU yang paling berdedikasi dan memiliki integritas tinggi di tengah penampilannya yang sederhana. Dia bahkan menolak fasilitas mobil dinas untuk tugasnya di KPU.

Sikap seperti itu tak dipertontonkan anggota KPU 2004, yang sejak awal sudah meminta berbagai fasilitas kendaraan. Chusnul Mar'iyah, misalnya, telah meminta mobil Honda CRV terbaru untuk menambah kren penampilannya sebagai anggota KPU yang terhormat. Petinggi KPU yang lain juga punya minat serupa terhadap kendaraan bagus. Hanya Annas Urbaningrum yang merasa cukup dengan Toyota Kijang. Lalu ketika pemilu berakhir, beberapa orang penting KPU, antara lain: Ketua KPU Nazaruddin Syamsuddin, Mulyana W Kusumah, Daan

Dimara, Rusadi Kantaprawira dan Safder Yusacc masuk bui. Mereka terbukti korupsi di pengadilan mulai soal tender sampai dana rekanan. Sedang anggota KPU yang lain masih anteng-anteng tanpa diusik oleh abdi hukum sampai sekarang. Mereka ini antara lain: Chusnul Mar'iyah dan Annas Urbaningrum. Ini menimbulkan kesan bahwa telah terjadi tebang pilih di KPU. Mestinya hal seperti itu bisa diselesaikan secara elegan, misalnya dengan memeja hijaukan semua anggota KPU tanpa kecuali, tentu pengusaha-pengusaha yang terlibat juga harus diadili. Yang bersalah biar mendapat hukuman untuk mendapatkan efek jera. Yang tidak bersalah mesti dibebaskan demi hukum. Nantinya dengan pertimbangan jasa-jasa mereka, presiden tentu boleh saja memberi pengampunan.

Di samping semua hal yang telah dipaparkan di atas, ada satu hal yang sangat jelas tapi jarang dipikirkan orang, yaitu kemampuan Golkar beradaptasi di era reformasi. Partai yang dibesarkan orba ini hanya sekali grogi menghadapi pemilu di era reformasi, yaitu pada 1999. Kekuatan reformasi tak cukup kuat untuk membubarkan partai beringin. Hasilnya? Dalam keadaan kagok dan grogi pun partai ini masih mampu keluar sebagai runner up. Sedang pada pemilu 2004 dia sudah mampu berdiri di atas kuda-kudanya yang kokoh dan keluar sebagai jawara mengalahkan rival lamanya PPP dan PDIP. Sedang kaum reformis semakin kehilangan kepercayaan diri setelah menelan berbagai kekalahan di arena politik. Sebetulnya setelah pemilu 1999 ada satu kesempatan untuk menghukum partai yang dibesarkan orba ini, yaitu ketika Akbar Tanjung, sang pemimpin Golkar saat itu yang juga menduduki posisi Setneg pada saat pemilu diselenggarakan (1999), dianggap terbukti telah menyalahguna-

kan wewenang dan uang negara untuk kepentingan partai.

Akbar tak masuk bui dan Golkar tak mendapat hukuman apa-apa. Keinginan kaum reformis, yang dalam hal itu boleh dibilang diwakili oleh PAN dan PK, untuk membuat Panitia Khusus (pansus) tak diakomodasi oleh wakil rakyat dari partai-partai lain. PDIP, yang mestinya mendukung kaum reformis, saat itu malah berdam-pingan dengan Golkar menentang pansus. Padahal bila pansus digelar, bukan tidak mungkin Golkar akan mendapat sangsi politik. Sangsinya tentu bisa bermacam-macam. Yang paling buruk adalah dibubarkan. Sedang yang kurang buruk adalah diskualifikasi, misalnya partai beringin tidak boleh mengikuti 2 kali pemilu berikutnya. Sangsi atau hukuman seperti itu dapat dipastikan akan menimbulkan efek jera bagi siapa pun untuk mengulangi kesalahan serupa di kemudian hari.

Setelah ide pansus itu kandas, maka tak ada alasan lagi untuk meminggirkan Golkar dari arena politik. Peluang itu melayang. Ini menambah panjang kekecewaan rakyat kepada wakil-wakilnya di dewan setelah serentetan kekecewaan yang sulit disebut satu per satu. Doyannya mereka bikin rapat di hotel-hotel mewah, padahal sudah memiliki gedung dan ruang sidang yang bagus, adalah salah satunya. Dalam hal ini contohnya tak sulit didapat. Bersidang dan menginap di Hotel Mulia, Senayan misalnya, menjelang pemilihan gubernur BI. Lalu masalah studi banding ke luar negeri yang tak bermanfaat, di saat rakyat banyak kelaparan, digoalkannya rancangan perbaikan Undang-Undang No 13/2003 tentang ketenagakerjaan yang sangat merugikan karyawan, tak berdayanya mereka dalam masalah lumpur Lapindo, dan asih

banyak lagi. Sebetulnya anggota dewan hasil pemilu demokratis sudah mengecewakan sejak memuali kiprahnya. Kasus Trisakti, Semanggi I dan II, misalnya, dinyatakan sebagai peristiwa biasa, tidak ada pelanggaran hak azasi manusia (HAM) berat, dalam siding yang dipimpin Asmara Nababan dari PDIP. Perjuangan kaum reformis dari PAN dan PK kandas di situ. Lalu ada lagi pemagaran gedung DPR/MPR setinggi 4 meter, dan masih banyak lagi. Golkar, meski tak lagi sebesar dulu, nampaknya lebih mampu menentukan arah kebijakan di negeri ini dibanding partai mana pun. Partai ini nampaknya akan menjadi salah satu karya monumental Soeharto yang akan bertahan lama.

#### **4. Mesin Politik Bernama Golkar**

Golkar memang unik. Dia seperti memiliki seratus nyawa. Selama 3 dasawarsa dia menjadi peserta pemilu dan selalu keluar sebagai pemenang. Cuma entah karena apa, dia tak pernah menyebut dirinya partai politik. Kadang orang menganggapnya sebagai keajaiban dunia yang kedelapan. Alasannya sederhana saja: meski menjadi pemenang pemilu terus-menerus, misalnya, Golkar tak pernah bisa memilih pemimpinnya sendiri. Ada Ketua Dewan Pertimbangan, yaitu Soeharto yang menentukan segalanya. Sedang dua partai lainnya, yang mestinya menjadi partai oposisi, menambah keajaiban itu dengan berusaha mengambil hati sang Ketua Dewan Pertimbangan Golkar. Mereka berpacu untuk mencalonkannya menjadi presiden. Jadi ada perlombaan yang aneh di situ. Ini bahkan terjadi sampai pemilu terakhir di masa orba (1997), saat seluruh tanah air sudah bergolak menolak pencalonan kembali Soeharto. Golkar merebut 70% lebih

suara pemilih pada pemilu 1997 itu. Kemudian anggota MPR hasil pemilihan, plus mereka yang diangkat dan ditunjuk, secara aklamasi memilih kembali sang jendral besar sebagai RI-1.

Kejadian itu sungguh luar biasa dan mengundang kekaguman. Bahkan pada akhir dekade '80-an Ronald Reagan pun sempat menyambangnya, special untuk meminta resep dari sang jendral. Saat itu Soeharto telah menjadi presiden untuk kelima kalinya. Sedang si Rambo sudah dua kali menjabat presiden AS, batas maksimal yang dibenarkan konstitusi negaranya. "Anda ini luar biasa. Bisa sampai 5 kali terpilih sebagai presiden. Periode depan pun nampaknya akan terpilih lagi. Apakah Anda punya resep khusus untuk saya agar bisa dipilih lagi?" Demikian kira-kira pertanyaan Reagan. Seperti biasa Soeharto tidak menjawab. Dia hanya ter-senyum. Reagan menunggu resep itu dengan harap-harap cemas selama 2 hari kunjungannya. Namun apa lacur, jawaban itu tak kunjung diberikan sampai ketika dia mau naik pesawat kembali ke negerinya. Di tangga pesawat dia melangkah perlahan, mengharap bisikan dari jendral besar itu, tapi tak ada tanda-tanda Soeharto akan menjawab. Penasaran, dia pun berbalik dan mendekati Soeharto. "Anda belum menjawab pertanyaan saya," katanya sok akrab. Soeharto tersenyum, lalu menarik leher reagan agak ke bawah. Dia berbisik di telinga pemimpin AS itu: "Bikin saja Golkar!"

Fragmen di atas, meskipun cuma joke politik, harus diakui merupakan potret yang tepat tentang kehebatan Golkar. Betapa tidak! Lewat kerjasama 3 jalur: Abri, Birokrasi, Golongan Karya (ABG) partai penguasa itu berhasil mengantarkan Soeharto ke jabatan Presiden tujuh kali. Kalau

saja tidak ada krisis ekonomi pertengahan Juli 1997, keadaan mungkin akan terus seperti itu. Namun kenyataan berbicara lain. Krisis ekonomi datang, sekaligus membongkar penyelewengan, kesalahan kebijakan, dan skala prioritas yang sampai saat itu berhasil ditutupi. Masa jaya Golkar pun kemudian terlempar sejenak ke masa lalu. Apalagi setelah kekuatan reformasi berhasil memaksa Soeharto berhenti dari jabatan Presiden. Golkar seperti tak punya tenaga dan rentu. Kaum reformis dan intelektual kampus mencapnya sebagai mesin politik Soeharto, yang harus bertanggungjawab atas bekerjanya sistem politik birokratis otoriter sejak 1971 sampai Mei 1998.

Setelah Soeharto berhenti, Golkar seperti kehilangan perekat. Komponen-komponennya mulai merenggang. Yang pertama memperlihatkan gejala itu tentunya MKGR (Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong). Dipimpin Ketuanya Mien Sugandhi dan sekjennya Abdullah Puteh. Satu (dari tri karya) pilar utama Golkar itu memproklaimirkan MKGR menjadi partai, 27 Mei 1998. Dia mengklaim didukung 27 DPD (cuma ketika ikut pemilu 1999, partai MKGR hanya mendapat 204 ribu suara lebih sedikit dan tak mendapat 1 kursi pun di parlemen). Janda mediang Sugandhi (pendiri MKGR 3 Januari 1960) itu sendiri sebelum pemilu memang sudah mendapat tantangan dari kader-kader MKGR di Golkar. Mereka, antara lain Zaenal Bintang dan Irsyad Soediro, yang kemudian mendirikan Presidium Komite Nasional Penyelamat MKGR. Zaenal cs meminta Mien mundur dari ormas itu. Dua pilar yang lain, Koperasi Usaha Gotong Royong (Kosgoro) dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi), mengambil sikap menanti sambil melihat arah angin dari berbagai

kemelut politik pasca Soeharto.

Kemelut di MKGR boleh dibilang hanyalah riak kecil di panggung politik Indonesia pasca Soeharto. Gelombang pasanganya justru ada di Golkar. Lihat saja bagaimana serunya perseteruan di tubuh partai itu. Harmoko, sang Ketua Umum yang dulu dipuji-puji karena berhasil memenangkan Golkar sampai merebut lebih 70% suara, dikecam sebagai orang yang menjerumuskan Golkar dan Soeharto. Pada 3 Juni 1998 dia diminta mundur oleh 8 pimpinan DPD Golkar. Kemudian 23 DPD (Dewan Pimpinan Daerah) berhasil memaksakan musyawarah luar biasa (munaslub) lebih cepat dari jadwal semula (Oktober 1998) menjadi 9 - 11 Juli 1998.

Lebih heboh lagi ketika mau membentuk panitia munaslub. Golkar, yang tidak biasa konflik, malah menunjukkan potensi konflik kepentingan yang besar. Anehnya, jika kaum reformis di panggung politik Indonesia berhasil menurunkan Soeharto, di Golkar justru kubu Soehartois menang. Tanda-tandanya terlihat ketika kubu Soehartois berhasil memborong kepanitiaan munaslub: Ary Mardjono, yang dikenal dekat dengan mba Tutut, terpilih sebagai Ketua Steering Committee (panitia pengarah); Aulia Rahman, yang dikenal sebagai ketua tim ajudan Tutut, menjadi Ketua organizing committee; dan Waskito Reksohadiprodjo, juga orang dekat Cendana, menjadi Ketua penyelenggara. Mereka berhasil mengalahkan Kubu Harmoko yang mulai kehilangan petunjuk.

Pada hari-hari berikutnya terlihat perpecahan di tubuh Golkar makin parah. "Suka atau tidak suka harus saya akui, ini memang kemelut paling parah dan mengkhawatirkan dalam sejarah Golkar," kata Ketua Umum PP Kosgoro Drs. Bambang W. Soeharto terus terang waktu

itu ketika ditemui penulis untuk majalah SWA. Dia memang tidak mengada-ada. Tidak butuh analisis politik ngjelimet untuk mengetahuinya. Dengan pandangan kritis saja terhadap kiprah mereka yang terlibat, dapat diketahui di Golkar saat itu ada beberapa kubu saling berhadapan. Pertama, Kubu Harmoko-Gafur yang didukung Habibie. Mereka ini mencalonkan Mensesneg Akbar Tanjung sebagai Ketua Umum (ketum) Golkar. Di hadapan mereka berdiri kubu status quo yang didukung Cendana.

Lalu dari kiprah dan pernyataan mereka di media massa terlihat di kubu status quo ada dua kelompok: pertama yang berhubungan langsung dengan Soeharto, dan yang tidak berhubungan dengan mantan presiden itu. Di kelompok yang berhubungan langsung ada mantan Wapres dan Ketum Golkar Sudharmono, dan pini-sepuh Soksi dan dukun politik Suhardiman. Putra-putri Soeharto: mba Tutut dan Bambang Trihatmodjo, dan putra pak Dhar sendiri, Tanyo Adji Pramudyo Sudharmono masuk di gerbong itu. Di gerbong yang tidak berhubungan langsung dengan Soeharto berdiri mantan Menhankam Edi Sudradjat. Dia didukung mantan wapres Tri Sutrisno (ketua Pepabri), dan 21 DPD Golkar yang berasal dari jalur A (Abri).

Di samping itu masih ada kelompok lain, seperti Harsudiono Hartas (mantan kassospol Abri) bersama mantan wakasad Soerjadi, Ketua Yayasan Kerukunan Persaudaraan Kebangsaan Bambang Triantoro dan Theo Syafei dkk. Yang terakhir itu kemudian henggang ke PDIP dan menjadi orang kuat yang mendampingi Megawati. Di luar itu ada kelompok 45 agak kritis: Kemal Idris, Soerono, Hasnan Habib, Rudini, dan Ali Sadikin. Wahono, mantan Ketua DPP Golkar dan Ketua DPR/MPR periode sebelum-

nya, awalnya punya agenda sendiri tapi kemudian tidak terdengar lagi. Belakangan semua kelompok itu, di luar kubu Harmoko-Gafur, seperti bersatu dan mencalonkan Edi Sudradjat. Forum Komunikasi Putra-putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) berperan besar dalam memper-satukan visi mereka. Yang berbeda mungkin cuma Sudharmono, yang menghendaki Ary Mardjono menjadi Ketua Umum Golkar.

Berhasilnya disatukan kelompok-kelompok pendukung Edi Sudradjat itu seperti melengkapi kemenangan kubu cendana, yang sebelumnya berhasil memborong kepari-tiaan munaslub. Apalagi setelah Soeharto membatalkan pertemuan tiga jalur (Abri, Birokrasi, dan Golkar) yang sedianya diadakan di Cilangkap atas prakarsa Presiden Habibie. Semua pakar dan pengamat sepakat dibatal-kannya pertemuan 3 jalur tersebut menunjukkan bahwa Soeharto masih kuat. Hal itu diakui Amien. "Sebagai seorang prajurit bisa dibayangkan Soeharto mestinya tidak begitu saja menerima kekalahan. Ibarat tinju, ia belum knock out, tapi baru knock down, dan siap memukul balik," kata pemimpin kaum reformis itu ilustratif. Sebenarnya masih ada satu kubu lagi di mesin politik berlambang beringin itu, yakni kubu Ginanjar Karta-sasmita. Dia mengadakan pertemuan 12 menteri di kediamannya. Keduabelas menteri itu adalah Mendagri Syarwan Hamid, Meneg BUMN Tanri Abeng, Menkeh Muladi, Menko Ekuin Ginanjar Karta-sasmita, Mentrans AM Hendroprijono, Menaker Fahmi Idris, Menpera Theo Sambuaga, Menpen Yunus Yospiyah (kemudian menye-berang ke PPP), Mensesneg Akbar Tanjung, dan Menpora Agung Laksono. Sebuah sumber yang tidak mau disebut namanya menyebut pertemuan itu membahas usaha

penggalangan dana untuk menyukseskan Akbar sebagai Ketum Golkar. Mereka ini berhasil membuat formula baru dalam hal utusan DPD ke munaslub. Bila dulunya cukup satu wakil, mereka kembangkan menjadi tiga: Ketua wantim, Ketua DPD I, dan Sekretaris DPD I. Ketiganya punya hak suara sama. Menurut Menkeh Muladi per-temuan tersebut bukan untuk menggantal langkah Edi Sudradjat.

Bagaimanapun juga dengan formula baru itu, kubu Eddy Sudrajat, yang diatas kertas sudah menang, akhirnya dapat dikalahkan kubu Akbar. Politikus berpenga-laman dan berpenampilan kalem inilah kemudian yang mengendalikan golkar di tengah arus reformasi yang ingin membubarkannya. Dia berhasil memulas golkar menjadi seolah reformis dengan gagasan konvensinya yang genial. Dengan cara itu dia seperti menguasai panggung politik dan menjadi psat perhatian. Wiranto, Prabowo, Nurcholis Majid, Surya Paloh, dan tokoh-tokoh nasional lain berhasil ditarik ke orbitnya untuk berlomba menjadi orang yang akan dicalonkan golkar menjadi RI-1. Dia berhasil pula membawa golkar keluar dari kemelut dan saling cakar dalam organisasinya. Tak dapat dipungkiri tangan dingin Akbarlah yang berhasil mereformasi golkar menjadi partai yang solid sampai saat ini, sesuatu yang nampak mustahil setelah tumbanganya sang patron Soeharto.

Meski masa jayanya tak bisa dikembalikan seketika, seperti terlihat pada pemilu 1999. Golkar berhasil mem-peroleh 22% lebih suara pemilih dan menduduki posisi runner up di bawah PDIP. Bahkan pada pemilu 2004 golkar telah berhasil mengalahkan semua partai peserta pemilu dengan keluar sebagai jawara. Dia memenangi pemilu legislatif dan mengorbitkan jagonya menjadi RI-2. Padahal

jalur A (Abri) dan B (Birokrasi) telah melepaskan diri darinya. Kedua jalur itu seperti pernah diungkap Letjen. Ali Murtopo merupakan kunci sukses Golkar paling penting. Mantan ketua umum HMI itu telah melepaskan Golkar dari masa lalunya yang buruk dan tergantung pada ABG. Lukman Harun (kini almarhum), orang Muhammadiyah yang pada pemilu 1997 menjadi juru kampanye Golkar pernah meramalkan Golkar tidak akan sebesar dulu lagi. Dia akan menjadi partai kecil, kecuali Golkar bisa menelurkan program-program keislaman untuk menarik massa muslim. Manakala dia menampilkan diri sebagai musuh Islam, maka partai ini akan celaka. Agaknya jaringan partai ini masih kuat membelit republik sampai ke pelosok-pelosok terpencil. Semakin banyak parpol ikut pemilu, semakin baik buat partai ini.

Sebab sebagai akibat politik masa mengambang Soeharto selama 3 dekade, orang di pelosok-pelosok lebih mengenal partai beringin daripada partai-partai lain. Bila sama-sama tidak membawa perubahan, rakyat kecil lebih senang memilih yang lama daripada yang baru. Apalagi dalam perjalanan waktu warna ideologi semakin hilang dari partai-partai. Mereka menjadi mirip satu sama lain. Dalam keadaan seperti itu politik uang akan semakin hidup. Masa depan Indonesia agaknya masih akan banyak berhubungan dengan partai lama ini. Siapa pun yang mendapat dukungannya akan berjaya, tak peduli apakah dia musuh rakyat atau bukan.

Negara dan rakyat negeri ini telah mengalami penderitaan yang panjang sampai sekarang akibat dukungan yang telah diberikan Golkar kepada penguasa dan pengusaha besar pada masa orba. Nah bila aliansi serupa muncul kembali, tentu penderitaan itu akan semakin tak

berujung. Perselingkuhan antara penguasa dan pemilik modal nampaknya di masa pasca orba ini lebih memungkinkan, karena sarannya sudah terbentuk. Pengusaha bisa menjadi wakil rakyat lewat partai mana pun yang disukainya. Partai-partai memang menyediakan ruangan untuk itu. Katanya sih sekalian mencari dana segar untuk kepentingan partai, meski kenyataannya kader sendiri tersingkir. Dengan dana yang dimilikinya, kata Harriman dalam sebuah diskusi di INDEMO, para pengusaha kaya sekarang tidak perlu mendukung calon mana pun. Dia sendiri yang maju.

Seperti biasa bila politikus bertemu pemilik modal, maka kita tahu siapa yang bakal menjadi istri dan siapa yang menjadi suami. Pemilik modal akan menjadi suami dan si politikus akan menjadi istri yang suargo nunut, neroko katut. Dan bila dua partai terbesar bersatu, seperti yang terlihat akhir-akhir ini saat PDIP merapat ke Golkar, maka apa pun yang diinginkan kedua partai ini akan menjadi kenyataan. Merapatnya kedua partai besar ini tentu bisa membawa perubahan positif bagi negeri ini, bila keduanya memang punya cita-cita untuk itu. Namun bila yang dikejar hanya kepentingan sesaat, misalnya untuk menggertak presiden yang kebetulan berasal dari partai kecil seperti dugaan banyak kalangan, maka aliansi itu tak akan bermanfaat.

Namun konstelasi politik nampaknya cepat atau lambat akan berubah. Gejalanya sudah mulai terlihat beberapa tahun terakhir berupa ketidakpuasan terhadap kinerja anggota dewan yang didominasi dua partai besar itu. Ini telah menjalar dari pusat sampai ke daerah-daerah. Para wakil ini dinilai banyak kalangan sangat pandai dalam memperjuangkan kepentingan pribadi dan

corpnya, tapi tak bertenaga ketika harus memperjuangkan nasib rakyat. Ini bisa dilihat dalam kasus-kasus besar seperti kenaikan harga BBM, tarif dasar listrik dan kini air minum. Juga ketika pemerintah melansir perubahan undang-undang No13/2003 tentang ketenagakerjaan yang sangat berpihak kepada pengusaha. Kasus banjir lumpur Lapindo Sidoarjo, yang sudah menenggelamkan puluhan desa di Porong menambah cacat anggota dewan. Satu tahun lebih para korban telah menderita akibat kehilangan tempat tinggal, tempat usaha, sekolah anak-anak mereka, tempat mengaji, masjid, masa lalu dan masa depan mereka. Jangankan mendapat penggantian penghasilan mereka yang hilang, tempat tinggal mereka pun belum diganti sampai sekarang. Anggota dewan tak mampu memperjuangkan nasib mereka. Partai di mata rakyat terdidik kini tak lebih dari sekumpulan para calo, yang mencari keuntungan di dua meja. Mereka dianggap telah mengambil keuntungan dari pembeli dan penjual sekaligus atau dari pelaku dan korban. Terungkapnya masalah percaloan di DPR dalam menggoalkan proyek-proyek di daerah beberapa tahun lalu adalah bukti yang tak terbantah, meski kasusnya kemudian menguap.

Kini setelah muncul kasus dana nonbujeter DKP Rochmin Dahuri, keadaan menjadi bertambah parah. Partai dan tokoh-tokohnya, baik yang dari kubu reformis maupun kubu stock lama, pukul rata dianggap najis. Kasus korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh partai di era reformasi ini sangat memalukan, sehingga hampir semua orang menginginkan kasus ini dituntaskan. Meski telah terjadi kompromi antara SBY dan Amien untuk menganggap kasus dana DKP sebagai wilayah hukum, orang tetap menginginkan kasus tersebut dituntaskan juga di wilayah

politik. Apalagi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu mengatakan bahwa hampir semua departemen memiliki dana nonbujeter, yang penggunaannya juga tak jauh berbeda dari yang dilakukan DKP. Rochmin jelas tak mengada-ada. Dulu Akbar, ketika menjadi Ketua Umum Golkar dan menjabat Mensesneg telah tersandung dana semacam itu. Sejarah juga mencatat beberapa pejabat Bulog terkena kasus dana nonbujeter. Di zaman Abdurrahman-Megawati bahkan hampir menyeret presiden. Dilihat dari banyaknya kasus, nampaknya eksistensi dana nonbujeter tak dapat dibantah. Dana itu kadang dipakai untuk keperluan mendesak, ketika dana apbn belum turun. Kadang menjadi bahan bancakan, dan tak jarang jadi biaya keamanan buat meredam wakil rakyat.

Bila kita lihat dari kasus yang menimpa orang-orang KPU semacam Nazaruddin Syamsuddin dan Mulyana, nampaknya pengusaha swasta pun menyediakan dana semacam itu dengan penggunaan serupa. Kasus-kasus studi banding dan sidang-sidang DPR yang diadakan di hotel-hotel mewah yang dibiayai perusahaan atau instansi tertentu sekaitan dengan peraturan perundangan yang akan dibahas, sebenarnya merupakan kasus serupa tapi tak sama. Nah bila pemerintah memang ingin membrantas penyelewengan atau korupsi secara total, maka entre poin dana DKP ini harus dimanfaatkan maksimal. Sebab bila dia dibiarkan menguap, bukan tidak mungkin kasus ini akan berkembang menjadi prahara yang menimpa semua partai dan tokoh-tokohnya. Mereka, yang kini sudah menjadi anggota dewan atau menduduki jabatan-jabatan publik tapi tak membawa kesejahteraan, tentu akan menjadi sasaran utama. Jadi dapat dipastikan, dengan atau tanpa perencanaan, dalam beberapa tahun



ke depan nampaknya Indonesia akan merestrukturisasi dunia politiknya.

**Z**

Kalau saja Kwik Kian Gie tidak ngotot untuk membatalkan Master Settlement & Acquisition Agreement (MSAA), mungkin para konglomerat penandatangan kesepakatan itu sudah bisa tidur nyenyak. Betapa tidak!

V

## Krisis Perbankan



Mulanya memang krisis nilai tukar, yang menyebabkan nilai Rp mengkerut hebat terhadap valuta asing, terutama US\$ setelah band intervensi dicabut BI pada pertengahan 1997. Alasan pencabutan band itervensi itu sebenarnya sangat mulai, yaitu untuk menghemat devisa. Sebab sistem kurs mengambang terkendali (managed floating reexchange rate), yang mendevaluasi nilai rupiah 5-6% per tahun dianggap memboroskan devisa, di samping ketinggalan zaman. Saat itu memang cukup mengkhawatirkan, karena mata uang Korea Won sudah jatuh lebih dulu, kemudian Baht Thailand loyo, dan seterusnya susul-menyusul. Perdana Menteri Malaysia waktu itu Dr. Mahathir Muhamad mengambil jalan pintas untuk mempertahankan nilai ringgit RM Malaysia dengan kurs tetap (fixed rate). Indonesia, yang merasa punya fundamental ekonomi kuat dan cadangan devisa bagus ( di atas US\$ 20 miliar), cukup percaya diri untuk melepaskan Rp di pasar bebas. Awalnya BI cuma meloggarkan band intervensi, tapi lama-kelamaan dilepas sama sekali. Hasilnya?

Nilai Rp benar-benar terjun bebas dan masuk jurang sedalam 500% dari Rp 2.130/US\$ sampai di atas Rp 10 ribu/US\$. Artinya nilai utang luar negeri Indonesia yang waktu itu berjumlah di atas US\$ 137 miliar, lebih separuhnya merupakan utang swasta besar itu membengkak 5 kali lipat tanpa utang baru.

Keadaan tidak menyenangkan ini pada gilirannya menyeret dunia perbankan ke jurang yang sama. Sebab para pengusaha besar, yang umumnya juga memiliki bank dan banyak memakai uang nasabah untuk mendanai usahanya, termasuk dalam bentuk valas, tak mampu mengembalikannya. Dari sinilah kemudian BI dengan sigap melakukan operasi penyelamatan dengan menggelon-torkan BLBI sampai di atas Rp 144 triliun untuk para bankir. Masih dalam rangka operasi penyelamatan itu, atas nasihat IMF, pemerintah mengeluarkan obligasi yang bersama bunganya menjadi Rp 600 triliun lebih. Dengan cara itu, yang sejak awal dipandu sang mentor IMF, pemerintah telah mengubah utang swasta menjadi utang publik. Maka sejak itu pemerintah juga memiliki utang domestik, di samping utang luar negeri yang sudah berlangsung selama 32 tahun. Alokasi dana APBN untuk membayar utang pokok dan bunga utang luar negeri dan domestik ini telah mengurangi dana pembangunan yang semestinya bisa dipakai buat membiayai pendidikan, kesehatan dan perumahan rakyat sampai saat ini. Pendidikan, kesehatan, perumahan, BBM, listrik dan air bersih menjadi mahal buat rakyat sampai saat ini. Tentu saja banyak orang berang dan mendesak pemerintah untuk menghukum para biang kebangkrutan itu. Mereka juga meminta agar orang-orang yang telah menyebabkan kebangkrutan bank sendiri lewat kesalahan manajemen, pelanggaran batas maksimum

pemberian kredit, dan lain-lain dihukum berat, baik secara pidana, perdata, maupun sanksi sosial. Masyarakat, terutama kaum terdidik, antara lain meminta BI agar mengumumkan nama-nama mereka dalam daftar orang tercela (DOT) dunia perbankan. Setidaknya agar orang-orang tersebut tidak lagi bisa masuk dalam bisnis jasa perbankan atau memiliki bank lagi, sehingga bencana serupa tak akan terulang lagi.

### 1. BI dan para DOT

Meski semua orang menyadari perlunya pengumuman nama-nama orang yang telah menyebabkan karamnya dunia perbankan itu, termasuk para petinggi BI, bank central tetap ragu mengumumkan DOT. Mereka bersembunyi di balik pasal-pasal kerahasiaan bank. BI yang mestinya superior dalam urusan ini, malah mengerdilkan dirinya sendiri karena takut dituntut oleh para pelanggar aturan perbankan. Pengumuman nama-nama yang telah didengungkan dan dituntut masyarakat begitu lama dibatalkan petinggi BI dengan alasan hukum. "DOT tidak akan kita umumkan. Semua ahli hukum berpendapat sama: BI tidak berwenang untuk mengumumkannya. Bila itu dilakukan, maka BI dianggap melanggar pasal 49 Undang-Undang No. XIII/1968. Selama Undang-undang itu masih berlaku, ya kita tidak bisa umumkan," tegas Direktur BI Dr. Subarjo Joyosumarto mantap sesuai shalat Jum'at di BI, 19 Maret 1999. "Nanti kita masuk penjara semua, wartawan pada gembira ria," sambungnya setengah berseloroh.

Pernyataan BI tersebut tentu saja mengundang tanda tanya, karena selama ini orang menganggap pengumuman DOT satu paket dengan rencana penyelesaian perbankan. Apalagi Menteri Keuangan Bambang

Soebianto di hadapan anggota DPR, 1 Maret 1999, sebelum penutupan 38 bank, berjanji akan mengumumkannya. Tidak heran ketika pemerintah memutuskan menutup 38 bank bobrok, orang pun menunggu daftar mereka yang bikin dunia perbankan morat-marit. Toh pemerintah akhirnya mundur selangkah lagi, DOT tidak diumumkan, karena alasan hukum seperti kata Subarjo di atas. Hal senada telah disampaikan Guber-nur BI waktu itu Sjahril Sabirin beberapa waktu sebelumnya. "Bankir yang bersalah akan kita ajukan ke pengadilan. Jadi tidak usah BI yang mengumumkan. Masyarakat toh akan tahu sendiri nanti bila mereka diproses secara hukum," ujar Sjahril menjanjikan di sela-sela rapat pembahasan RUU BI di DPR.

Banyak kalangan tak dapat menerima jalan pikiran Syahril dan para pejabat BI yang salah kaprah seperti itu. Pengamat perbankan Pradjoto bahkan heran melihat kesadaran hukum para bankir yang ditakuti Sjahril dan Subarjo. Padahal ketika bankir-bankir itu melakukan kecurangan terhadap uang rakyat, mereka tak ingat hukum. Pradjoto memang tidak mengada-ada. Pelanggaran batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dan menumpuknya kredit macet, yang mengakibatkan bank-bank itu loyo, adalah indikasi paling nyata dari kelakuan tercela para bankir. Sebagian besar dipastikan masuk ke grup sendiri pula.

Pengamat Ekonomi dari LPEM-UI Dr. Sri Mulyani Indrawati menilai pemerintah ragu mengumumkan catatan orang-orang tercela itu, sudah hampir pasti bukan karena takut diperkarakan mereka yang bersembunyi di balik azas praduga tak bersalah. Toh pemerintah, dalam hal ini BI, seharusnya telah mempunyai catatan dan bukti nyata

tentang pelanggaran manusia tercela tersebut. Dalam mengumumkan dan menangani orang tercela dari bank swasta nasional, faktor hukum sangat bisa diatasi pemerintah. "Pemerintah selama ini sangat superior dalam menangani hukum, baik dengan manuver-manuver peraturan yang selalu bisa dibelok-belokkan, maupun dengan praktik sabun di tingkat tuntutan ataupun peradilan," jelas Ani meyakinkan. Sebagai ilustrasi Ani menyebut kasus korupsi cengkeh di Sulsel dan penyadapan telepon Presiden, Jaksa Agung.

Yang lebih masuk akal, menurut pengamat ekonomi yang biasa berbicara lantang itu, adalah kekhawatiran pemerintah akan implikasi politik dan konsekuensi lanjutan dari pengumuman tersebut. Bagi birokrasi, terutama BI, pembeberan terbuka akan menyeret lembaga ini dalam kesulitan besar. Itu bisa dimengerti, karena dengan demikian terbukti bahwa kelemahan dan penyelewengan praktik perbankan tersebut sedikit banyak akan melibatkan orang-orang bank sentral yang mengemban fungsi pengawasan. Hal itu dirasakan akan sangat menampar reputasi dan kredibilitas BI. Dia berpendapat menjelang pemilu seperti ini, implikasi politik jelas menjadi amat penting. Pengumuman DOT bagi bank swasta nasional, terutama yang dimiliki kelompok yang dekat dengan lingkaran kekuasaan, akan menggoyang reputasi pemerintah dan Golkar. Apalagi penerapannya secara konsisten bisa menyeret kewajiban mengumumkan DOT bank BUMN. Ani yakin DOT bank BUMN, terutama yang berkaitan dengan kredit macet, akan sangat berpotensi menggoyahkan pemerintah transisi dan Partai Beringin, karena hampir pasti sebagian besar elite politik Orde Baru terlibat.

Dengan cara berpikir seperti itu memang dapat dipa-

hami bila pemerintah akhirnya menempuh jalan aman. Pemerintah cuma mengumumkan hasil penilaian Komite Evaluasi untuk Proyek Rekapitalisasi (KEPR), yang bisa diakses siapa saja lewat internet di web site BI, 19 Maret lalu. Sebanyak 128 profil bank bisa di lihat di sana, dibagi dalam 4 kelompok: bank yang tetap beroperasi tanpa rekapitalisasi (74 buah), bank yang tetap beroperasi dengan mengikuti rekapitalisasi (9 buah), bank yang diambilalih pemerintah (7 buah), dan bank yang ditutup (38 buah). Banyak pakar dan praktisi perbankan sendiri meragukan obyektivitas penilaian tersebut. Sebabnya antara lain adanya kabar bahwa beberapa bankir diminta menyediakan 100% dana rekapitalisasinya, bukan 20% seperti yang didengungkan. Beberapa akhirnya menyerah.

Terlepas dari pro-kontra soal penilaian tersebut, harus diakui banyak informasi yang bisa diambil dari hasil evaluasi itu. Sebagai contoh misalnya Bank Alfa, yang diputuskan tidak diikuti dalam rekapitalisasi. KEPR menilai Bank Alfa memiliki CAR -23%, dan masuk dalam kategori B. Untuk bisa mencapai CAR 4%, Bank ini membutuhkan modal tambahan Rp 260,5 miliar. Masih menurut pengumuman KEPR tersebut, Bank Alfa memiliki total aset sebesar Rp 869,6 miliar. Kredit yang disalurkaninya berjumlah Rp 573,8 miliar, dan dana pihak ketiga yang dihipunkannya berjumlah Rp 677,2 miliar. Tagihan (kewajiban) antar banknya berjumlah Rp 84,0 miliar. Bank ini tercatat memiliki kredit macet Rp 274,1 miliar. Sedangkan jumlah nasabah ada 11.615. Kewajiban Bank Alfa kepada BI tercatat Rp 85,0 miliar.

Yang menarik di sini adalah tidak jelasnya penilaian soal fit and proper. Ada kesan bahwa BI ragu, bila tak mau dibilang tak punya nyali, untuk memberikan penilaian

yang gamblang atau menyebut nama-nama mereka. Lihat saja, Pemilik/pemegang saham/pengendali Bank Alfa dinilai tidak memenuhi fit & proper. Komisarisnya sebagian dinilai memenuhi ketentuan fit & proper, tanpa menyebut nama-nama yang memenuhi dan yang tidak. Sedangkan Direksi bank ini dinilai tidak memenuhi. Ngambangnya penilaian ini pada gilirannya tentu menimbulkan efek samping yang panjang di masyarakat. Bagaimana masyarakat tahu mana yang termasuk DOT, mana pula yang tidak?

BI rupanya lebih peduli pada para DOT, yang telah membangkrutkan banknya sendiri dan menyeret negara ke dalam krisis, daripada kepada masyarakat yang nantinya harus ikut menanggung kerugian lewat berbagai pengurangan anggaran pembangunan. Toh BI bersikukuh untuk tetap mempertahankan kerahasiaan nama-nama mereka. Dasarnya bukan tak ada. Itulah Surat Edaran BI No. 27/4/1995. Pasal 5 Surat Edaran itu memang menyebut DOT sebagai catatan BI yang bersifat rahasia. Pasal itu berbunyi: data mengenai orang-orang tertentu yang memenuhi kriteria perbuatan tercela di bidang perbankan, diadministrasikan oleh BI dan bersifat rahasia. Toh Prajoto tidak setuju bila Surat Edaran itu dianggap sebagai bentuk final.

Implikasi politik yang coba dihindari pemerintah dengan cara merahasiakan DOT dikhawatirkan Prajoto membawa dampak buruk di kemudian hari. Atau menjadi bom waktu yang setiap saat bisa meledak dan meluluhlantakkan dunia perbankan kembali. Orang-orang yang tidak layak mengurus atau memiliki bank akan kembali mengobok-obok banknya sendiri, dan merugikan nasabah. Sementara pendatang baru akan meniru pendahulunya, karena tidak adanya sangsi. Yang untung cuma si tercela,

tapi yang buntung pemerintah, perbankan, nasabah, dan karena kerugiannya cenderung dibebankan kepada negara lewat APBN, maka masyarakat secara keseluruhan pun ikut buntung. Jika DOT juga berakibat hilangnya hak-hak keperdataan seseorang tanpa proses pengadilan, menurut Pradjoto, lebih baik diumumkan saja sekalian. Dengan itu dua hal bisa diraih: menunjukkan kesungguhan politik pemerintah, sekaligus memberi peringatan pada bankir lain untuk tak mengulangi perbuatan serupa. Dengan cara itu pula dapat diharap kalangan perbankan bisa mengatur dirinya sendiri.

Anehnya di samping masyarakat dianggap tidak perlu tahu nama-nama mereka yang tercela itu, si tercela pun bisa tidak tahu bahwa dirinya dinilai seperti itu. Dalam hal yang satu ini nampaknya BI bekerja secara misterius. "Kita mempunyai data tentang semua pemilik/pemegang saham bank, direksi, dan komisaris, termasuk perbuatan tercelanya dalam perbankan. Jadi setiap ada proposal pendirian bank, kita lihat susunan pemegang sahamnya, komisaris, dan direksi. Lalu kita cocokkan dengan daftar kita. Bila ada orang tercela di situ, kita coret. Mereka kemudian kita persilakan menggantinya, terus begitu sampai semuanya oke," tutur Subarjo. Direktur BI ini kelihatan agak kurang senang, ketika ditanya bagaimana mekanisme penilaian fit and proper berlangsung.

Subarjo nampak lebih tidak senang lagi, ketika ditanya mengapa Bambang Trihatmodjo bisa memiliki Bank Alfa setelah Bank Andromeda miliknya dilikuidasi karena melanggar BMPK? Sementara Edward S. Soeryadjaya (mantan Bos Bank Summa) terganjal ketika mau masuk ke Bank Papan Sejahtera (BPS) bersama Gus Dur lewat PT Harawi Sekawan? "Sudah, sudah, sudah! Anda lihat

sendirilah di internet, kan profilnya sudah kita umumkan," jawab Direktur BI, yang biasa berbicara datar itu, sewot. Bagaimana dengan Safrullah Hadi Saleh, kok dia bisa diangkat menjadi Dirut Bank Nusa Nasional (BNN) padahal seharusnya dia masuk DOT, karena Bank Arya Panduarta yang dipimpinnya bobrok sehingga dilikuidasi? tanya penulis waktu itu untuk majalah SWA. "Siapa bilang dia masuk DOT? Baca sendirilah di web site BI!" jawab Subarjo kesal sambil menoleh dan menghentikan langkah sebentar, lalu dia pun menerobos pintu.

BI, seperti diakui Subarjo beberapa waktu lalu, memang memasukkan Edward ke dalam DOT. Yang bersangkutan samasekali tidak tahu menahu tentang hal ini. Begitu juga Bambang Samijono (pemilik Bank Dwipa) yang membobol uang nasabah Rp 300 miliar. Untuk memberi jalan kepada BPS, putra William Soeryadjaya itu akhirnya melepas kepemilikannya di Harawi. Dia mengaku kini cuma menjadi penasihat teknis saja buat Gus Dur. Meskipun demikian dia tidak terima namanya masuk DOT. Menurut kriteria DOT belum jelas, dan sangat tergantung kepada pejabat yang menyusun. "Saya cuma dijadikan kambing hitam. Padahal semua orang tahu saya sudah tidak aktif lagi di Bank Summa dua tahun sebelum bank itu dilikuidasi," katanya lancar. Toh penjelasan tersebut, yang pernah juga diungkapkannya kepada penulis sewaktu dia masih di Canada, jauh sebelum krisis, tidak bisa menolong. BI menutup pintu buatnya dalam perbankan nasional.

Sebaliknya Subarjo menolak bila BI dikatakan tidak punya kriteria jelas tentang DOT. Apalagi bila kriterianya dianggap mengandung karet, sehingga bisa ditarik-tarik semaunya. Kriteria perbuatan tercela dalam perbankan

nasional, katanya, bukanlah hal baru. Sebagai bukti dia menunjuk Surat Edaran BI No. 27/4/UPPB, tertanggal 25 Januari 1995, Perihal Kriteria perbuatan tercela orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan atau pengurus bank. Dalam surat edaran (SE) itu kriteria DOT disebut: Pertama, Pemegang saham bank, pengurus bank atau pegawai bank yang berdasarkan keputusan direksi BI dinilai terlibat dan atau bertanggungjawab terhadap terjadinya: a) penggelapan atau manipulasi yang dapat merugikan bank. b) Transaksi fiktif baik yang dilakukan pada sisa aktiva maupun pasiva bank. c) Kolusi dengan nasabah atau pihak lainnya yang merugikan bank. d) perselisihan intern yang mengakibatkan bank mengalami kesulitan. e) praktik bank dalam bank atau usaha bank di luar pembukuan bank. f) window dressing dalam pembukuan atau laporan bank yang secara materiil berpengaruh terhadap keadaan keuangan bank, sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap bank. g) kerjasama yang tidak wajar sehingga salah satu atau beberapa kantornya berdiri sendiri.

Kedua, Pengurus, mantan pengurus bank, dan pihak terafiliasi lainnya yang dalam masa jabatannya berdasarkan keputusan direksi BI dinilai terlibat dan atau bertanggungjawab atas terjadinya hal-hal yang telah mengakibatkan bank yang dipimpinnya mengalami kesulitan berat. Ketiga, Pemegang saham dan atau pengurus bank yang diminta oleh BI untuk melepaskan kedudukannya berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat (2) huruf a atau pasal 53 UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. (Sekarang ketentuan perbankan diatur dalam UU No. 10/1998, yang merupakan pengganti UU No. 7/1992). Keempat, Pemegang saham dan pengurus bank yang

tercatat sebagai debitor kredit macet pada suatu bank. Kelima, Orang yang berdasarkan keputusan pengadilan atau informasi yang diketahui secara umum dinilai memiliki akhlak dan moral yang tidak baik seperti penjudi atau penipu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Keenam, Orang yang dihukum atau pernah dihukum karena tidak pidana di bidang perbankan atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dengan kriteria seperti itu dapat dipahami bila banyak orang protes terhadap pengangkatan safrullah Hadi Saleh, mantan Dirut Bank Arya Panduarta, sebagai Dirut BNN yang diambilalih pemerintah. Begitu juga dengan pengangkatan Drajat Bagus Prasetyo, mantan Direktur Bank Mashill, sebagai Direktur Bank Duta. Kedudukan Miranda S. Goeltom juga dipertanyakan orang. Sebab dia sebelumnya merupakan komisaris Bank Uppindo yang ditutup, karena pelanggaran BMPK. Para pemilik/pemegang saham/pengendali, komisaris, dan direksi bank terlikuidasi (lihat tabel) bukan tidak mungkin seharusnya masuk DOT, kecuali bisa dibuktikan mereka benar-benar tidak terlibat hal-hal yang menyebabkan bank mereka mengalami kesulitan. Tidak tertutup pula kemungkinan adanya mereka yang tercela di bank-bank lain yang boleh jalan terus dengan atau tanpa rekapitalisasi.

Banyak kalangan berharap, kalau benar Edward pernah melakukan perbuatan tercela yang menyebabkan Bank Summa kollaps dan karena itu bisnis perbankan tertutup bagi dia untuk selamanya, mestinya BI bisa berbuat serupa pada para bankir lain yang menjarah bank mereka sendiri, termasuk para komisaris dan direksi. Orang menanti tindakan hukum BI terhadap Bos BDNI Syamsul



Nursalim, Bos Bank Danamon Usman Admadjaja, dan lain-lain yang banknya telah lebih dulu kollaps akibat berbagai pelanggaran, termasuk BMPK. Memang di situs web BI ada 179 nama yang dimasukkan dalam DOT oleh BI, tapi daftar itu dianggap belum menyentuh nama-nama besar.

## 2. Mereka yang Masuk Daftar

"Sebenarnya janganlah pergi ke luar negeri, kalau mau, nama kita pun bisa hilang dari daftar cekal. TKW saja bisa ke luar negeri dengan bermacam-macam cara, masa kita enggak bisa?" kata mantan Wakil Presiden Direktur Bank Aspac Hendrawan Haryono ringan penulis yang menemuinya waktu itu untuk SWA. Salah seorang dari 179 bankir tercekal itu tentu tidak hendak menyombogkan diri dengan kata-katanya. Namun satu hal menjadi jelas, bahwa perintah cekal untuk orang-orang pandai dan banyak duit semacam bankir bukanlah rantai yang merampas kebebasan. Setiap saat, kapan pun mereka mau, mereka bisa terbang tinggi dan menghilang. Bahkan Eddy Tansil, yang dianggap terang-terangan menilep duit Bappindo Rp 1,3 triliun, dapat menguap dari tahanan kejaksaan sampai sekarang. Abang si koruptor, bos Bank BHS Hendra Rahardja, juga bisa kabur dengan menggondol uang nasabah. Padahal banknya telah dibekukan. Apalagi mereka, yang sampai saat ini tidak merasa bersalah, atau merasa pelanggaran mereka tidaklah sebanyak dan seberat bankir kakap yang justru tidak dicekal.

Kekuatan lobi tingkat tinggi dianggap banyak kalangan mampu membersihkan nama, menghapus kesalahan, dan meringankan hal-hal yang berat. Dibatakannya perintah cekal para bankir nakal oleh Menteri Keuangan Bambang Subianto, lewat SK Menteri Keuangan No.:

SR/443/MK01, 21 September 1998, adalah salah satu contohnya. Kemudian tarik ulur soal berapa dan siapa saja bankir yang mesti dicekal, sebagai tindak lanjut dari dibekukannya 38 bank, merupakan contoh lain lagi. Lihat saja bankir cekal yang semula diperhitungkan akan berjumlah sekitar 300 berhasil diperas tim Bank Indonesia (BI) dan Departemen Keuangan (Depkeu) menjadi 210. Jumlah ini kemudian diperas lagi lewat lobi para broker politik, sehingga tinggal 170. Itu pun cuma dari 29 bank, padahal yang dibekukan ada 38 bank. Ini saja telah menimbulkan keheranan.

Lebih mengherankan lagi nama-nama beken, kroni Cendana, seperti Bambang Trihatmodjo (bos Bank Alfa), Siti Hardijanti Rukmana alias embak Tutut (Bank Yama), Siti Hedijati Hariyadi (Bank Alfa), Ciputra yang banknya (Bank Ciputra) menderita kredit macet di atas 30% tidak termasuk dalam deretan bankir tercekal. Bahkan Liem Sioe Liong (bos BCA) yang banknya punya kewajiban kepada pemerintah di atas Rp 52 triliun tetap bebas. Demikian juga Syamsul Nursalim (bos BDNI) yang banknya menelan BLBI Rp 28 triliun lebih, Usman Admadjaja (bos Bank Danamon) yang banknya menyedot BLBI Rp 12 triliun lebih, dan Bob Hasan (BUN) punya kewajiban Rp 6 triliun lebih, dan lain-lain tetap menjadi orang bebas. Minggu lalu mereka yang masuk daftar cekal memang bertambah 9 orang lagi, tapi nama-nama besar tersebut tetap tak tersentuh. Akibatnya banyak orang menganggap bahwa yang masuk daftar cekal kini hanyalah mereka yang tak mampu melobi pusat-pusat kekuasaan.

Pakar hukum Sutan Remmi Syahdeni membenarkan anggapan itu. Menurutnya cekal secara pilih kasih seperti itu malah bisa memperbesar ketidakpercayaan orang pada

pemerintah. "Apa pun Anda menyebutnya lobi atau yang semacam itu, bukan tidak mungkin memang berhasil menyelamatkan banyak bankir. Seharusnya semua yang diindikasikan terlibat pelanggaran perbankan dicekal, tapi bukan tanpa batas waktu seperti sekarang," tutur pakar hukum itu datar. "Batas waktu pencekalan harus jelas, misalnya satu bulan. Dalam jangka waktu itu harus dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian dan Kejaksaan. Bila dalam satu bulan tindak lanjut itu belum selesai, bisa diperpanjang. Namun bila tidak terbukti kesalahannya atau tidak dilakukan tindak lanjut sampai batas waktu tersebut, perintah cekal itu harus dicabut demi hukum," tambahnya tegas.

Sementara itu 23 April 1999, tanpa bermaksud mengikuti saran pakar hukum di atas, pemerintah telah membebaskan 64 bankir dari pencekalan. "Pembebasan dilakukan untuk kasus tahun lalu. Mereka dibuatkan SK pembebasan 23 April, dan berlaku efektif 3 Mei 1999. "Mereka berasal dari 16 BDL (Bank Dalam Likuidasi), 10 BBO (Bank Beku Operasi, dan 18 BTO (Bank Take Over)," tutur Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan Hadianto kepada pers waktu itu. Alasan pembebasan itu sederhana sekali. Ke 64 bankir tersebut, dari sekitar 90-an bankir tercekal, telah mengalami masa perpanjangan cegah 2 kali. Menurut UU No.9/1992 tentang keimigrasian masa perpanjangan cegah tidak boleh lebih dua kali. Selain itu, katanya ke 64 bankir tersebut telah memenuhi settlement kewajibannya kepada pemerintah. Tentu saja banyak orang bertanya-tanya: Iho kok gampang amat membebaskan mereka demi hukum? Proses hukumnya sendiri belum dijalankan, atau setidaknya belum pernah terdengar ada pemanggilan, penyidikan, dan yang semacam itu

kepada para pembobol bank tersebut. Pusat-pusat kekuasaan, kata sementara orang, telah berhasil dilobi untuk membersihkan nama baik mereka.

Bagi mereka yang peduli terhadap masa depan bangsa dan penegakan hukum, cara penguasa membebaskan bankir tercekal tanpa proses hukum merupakan preseden buruk. Mereka khawatir ke 179 bankir tercekal kali ini pun akan dibersihkan namanya dengan cara sama. Apalagi penundaan pengumumannya disinyalir telah disengaja pemerintah untuk memberi kesempatan kepada mereka untuk melarikan diri, contohnya Al Nyoo (Bank Papan Sejahtera), dan mungkin sekitar 30 bankir lagi sudah berada di luar negeri. Padahal, kata Ketua Center for Banking Crisis Denny Daruri, bila berpedoman pada daftar orang tercela (DOT) yang dikeluarkan BI saja kejahatan para bankir itu sudah jelas. Mereka melakukan manipulasi data, window dressing, menyalurkan kredit ke kelompok sendiri, kredit macet, melanggar BMPK, tidak mampu mengembalikan BLBI yang sudah kelewat banyak, dan lain-lain. Bagi Denny adalah aneh bila setelah dimasukkan dalam DOT, lalu dicekal, dan setelah itu selesai tanpa proses hukum.

Terlepas dari berbagai keanehan yang mengiringinya, menurut Denny, Kepolisian dan Kejaksaan mestinya segera menindaklanjuti daftar cekal tersebut dengan penyelidikan dan penyidikan. Dengan demikian dapat dibuktikan apakah mereka benar bersalah atau tidak? Kalau bersalah harus segera dihukum. "Lebih aneh lagi Kejaksaan Agung bukannya berterimakasih atas sumbangan data yang kita berikan, eh malah berusaha mengalihkannya ke soal-soal legalitas formal. Mestinya kejaksaan dapat menggunakannya sebagai bahan penyidikan awal," ujar Denny agak

kesal. Kejaksaan dinilainya seperti takut-takut berurusan dengan mereka yang berduit, dan mencoba mengalihkan opini dengan menantang CBC 'bertanding tinju' dengan Kejaksaan Agung.

Berbeda dari kejaksaan yang lututnya seperti gemetar dan ogah menindaklanjuti perintah cekal, para bankir tercekal lebih setuju pada pendapat CBC. Mereka berharap pemerintah segera menindaklanjuti dengan penyidikan, sampai ke proses pengadilan. "Kita lebih suka di proses segera ke pengadilan daripada dibiarkan ngambang begini tanpa batas waktu. Orang-orang sudah mencap kita bersalah, urusan bisnis kacau, karena orang di luar tidak percaya lagi pada kita," ujar Hendrawan Haryono, yang setelah masuk daftar, rajin kongko-kongko di paguyuban sesama bankir tercekal, terus terang.

### **3. Upaya-upaya Menggugat Pemamah BLBI**

Kalau saja Kwik Kian Gie tidak ngotot untuk membatalkan Master Settlement & Acquisition Agreement (MSAA), mungkin para konglomerat penandatanganan kesepakatan itu sudah bisa tidur nyenyak. Betapa tidak! Dengan skema MSAA, utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sudah dianggap lunas dengan menyerahkan sejumlah aset sebagai jaminan. Kesepakatan itu sekaligus membebaskan mereka dari tuntutan pidana atas berbagai pelanggaran perbankan yang mereka lakukan sebelum dan selama krisis. Jadi soal dugaan pembobolan bank sendiri, pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), kong kalikong antara pejabat BI dan para bankir sehingga BLBI bisa mengucur deras melampaui kelayakan, dan dugaan bahwa dana BLBI dipakai membeli dolar sampai nilai rupiah jadi kempis, sudah boleh

dilupakan kedua belah pihak. Dari sisi ini MSAA bolehlah disebut perjanjian damai antara konglomerat penelan BLBI dengan pemerintah (Badan Penyehatan Perbankan Nasional/BPPN).

Cuma masalahnya menurut Kwik, Menko Ekuin 10 bulan pada Kabinet Persatuan Gus Dur, skema MSAA berpotensi merugikan negara sekitar Rp 80 triliun, hampir 4 kali lipat anggaran pendidikan nasional tahun 2000. Hitung-hitungannya sederhana sekali. Aset-aset yang diserahkan Liem Sioe Liong (Salim), Syamsul Nursalim, Bob Hasan, dan Sudwikatmono sebagai alat pembayaran utang BLBI, nilainya paling banter cuma 30% dari yang dijamin. Artinya BLBI yang ditenggak lewat bank-bank mereka sebesar Rp 112 triliun tersebut, cuma dibayar 30%-nya. Kwik memang tidak mengada-ada. Divisi Aset Management Investment (AMI) BPPN, yang menilai ulang aset-aset tersebut pada April 2000 membenarkannya. Menurut AMI nilai aset kesepuluh holding company (holdco), yang dibentuk untuk menampung aset-aset jaminan tersebut, cuma Rp 30 triliun atau cuma 27% dari nilai saat dijamin.

Mengapa pemerintah tidak meminta saja kekurangannya dari mereka? Itulah masalahnya. Dalam skema MSAA, yang ditandatangani 21 September - 6 November 1998, para penerima BLBI sepakat mengembalikannya kepada pemerintah (BPPN) dengan menyerahkan sejumlah aset. Aset-aset itu ditaksir nilainya sama besar dengan jumlah BLBI yang mereka sedot selama krisis. Begitulah Grup Salim (BCA) yang menelan Rp 52,62 triliun BLBI menyerahkan 109 asetnya. Aset-aset itu kemudian dikumpulkan dalam satu holding PT Holdiko Perkasa (Holdiko). Syamsul Nursalim (BDNI) yang menelan Rp

27,41 triliun menyerahkan 12 aset, termasuk Tambak Udang Windu Dipasena. Aset-aset itu dikumpulkan dalam PT Tunas Sepadan Investama. Lalu Bob Hasan (BUN) yang menelan Rp 6,159 triliun menyerahkan 30 aset dan disatukan dalam PT Kiani Wirudha. Sementara Sudwikatmono (Bank Surya) yang memperoleh Rp 1,886 triliun BLBI menyerahkan 5 asetnya.

Lantas apa sebenarnya yang salah dari penyerahan aset-aset tersebut? Sampai di situ memang tidak ada yang salah. Apalagi bila mereka dengan jujur dan niat baik menilai aset sendiri (tidak ada mark up), seperti yang diminta dalam perjanjian MSAA. Itu baru menjadi masalah ketika orang membaca salah satu klausul, yang membuat Kwik uring-uringan. Klausul itu kasarnya berbunyi: apabila nilai aset-aset yang diberikan itu melebihi nilai yang dijamin, maka pemerintah harus mengembalikan kelebihan itu kepada pemilik aset semula. Namun bila ternyata nilainya kurang dari itu, maka dia menjadi tanggungan pemerintah. "Perjanjian seperti itu kok bisa ditandatangani?" kata Kwik berang beberapa waktu sebelum mengundurkan diri dari Kabinet Persatuan Gus Dur.

Tentu saja Menko Ekuin (kini mantan) keberatan bila MSAA diteruskan, sebab potensi kerugian yang harus ditanggung negara amat besar. Penilaian ulang AMI di atas adalah salah satu contohnya. Dipasena, pertambahan utang windu raksasa milik Syamsul dinilai Swiss First Boston, konsultan asing yang disewanya - US\$ 2 miliar. Dengan kurs penilai saat itu Rp 10-11 ribu/US\$, nilainya menjadi Rp 20 triliun lebih. Padahal nilai riilnya, kata Kwik dan dibenarkan Ketua BPPN Cacuk Sudarjanto, paling banter cuma Rp 2 triliun. Yang tinggal cuma kolam-kolam raksasa dan air, serta beberapa genset, dan lain-lain. Di

tataran aplikasi potensi ruginya lebih hebat lagi. Lihat saja Holdiko (yang menampung 109 aset Grup Salim) telah ditawarkan perusahaan berbendera Malaysia dengan Rp 20 triliun. Padahal dia dijamin Salim kepada BPPN dengan harga Rp 52 triliun lebih.

Entah karena memang ingin mengejar setoran atau karena tingkat intelektualitasnya terlalu rendah, BPPN sebagai penguasa aset hampir saja melepas Holdiko dengan harga diskon seperti itu. Orang merasa lebih tidak enak lagi setelah terungkap bahwa perusahaan yang mau mengambil alih Holdiko itu juga milik Salim. "Mengapa tidak bayar saja utangnya dengan cash, bila memang masih banyak duit?" begitulah opini yang berkembang kemudian. Salim sendiri menganggap harga itu wajar, karena pemerintah Thailand juga cuma mendapatkan 30% dari nilai aset yang dijamin konglomeratnya. Bila konglomerat besar semacam Syamsul membebaskan pemerintah kerugian sekitar Rp 20 triliun dari sekitar Rp 28,41 triliun BLBI yang ditenggaknya, lalu Liem Sioe Liong yang aset-asetnya dianggap bagus juga membebani pemerintah dengan kerugian sekitar Rp 32 triliun, Bob Hasan, Sudwikatmono berapa lagi? Haruskah semuanya dibebankan kepada APBN, yang berarti 217 juta rakyat Indonesia ikut memikulnya lewat pengurangan anggaran pendidikan, kesehatan, dan lain-lain?

Bagi Kwik adalah mustahil BPPN, yang notabene diisi oleh orang-orang profesional mantan pengelola bank, tidak mengerti soal ini. Banyak kalangan menilai kesepakatan itu tak beda jauh dengan prostitusi intelektual. Memang ada sebuah peredam kecil, klausul soal holdback asset. Dengan ini jika utang lebih besar daripada aset yang diserahkan, maka si penandatanganan harus menye-

rahan aset tambahan. Namun siapa lagi yang mau berpikir soal holdback asset, bila ada klausul bagus yang membebaskannya dari itu?

MSAA memang bukan satu-satunya kesepakatan yang disodorkan BPPN kepada konglomerat kakap pema-mah BLBI. Paralel dengan MSAA telah ditandatangani pula Master of Refinancing Agreement (MRA). Empat konglo-merat papan atas menandatangani, dan telah pula menyerahkan sejumlah aset. Usman Admadjaja (Bank Danamon) yang menerima Rp 12,32 triliun BLBI, misalnya, menyerahkan 26 aset yang digabung dalam PT Bantala Kartika Abadi. Kaharuddin Ongko (BUN), yang melahap Rp 7,839 triliun, menyerahkan 20 aset dan disatukan dalam PT Arya Mustika. Bank Umum Nasional (BUN) yang dimiliki Bos Hasan dan Kaharuddin Ongko, kata sumber di BPPN waktu itu memang telah dijadikan mesin uang kedua konglomerat itu lewat orangnya masing-masing. Jadi mereka berdua harus menanggulangi: Bob lewat MSAA, dan Kaharuddin lewat MRA. Samadikun Hartono (Bank Modern) yang memakan Rp 2,663 triliun BLBI menye-rahkan 10 asetnya dan digabung dalam PT Cakrawala Gita Pratama. Lalu Hokiarto, Hokianto (Bank Hokino) yang memakai Rp 339 miliar BLBI menyerahkan 12 aset.

Meskipun kedua kesepakatan itu sama-sama meru-pakan skema penyelesaian utang BLBI dengan jaminan aset, asumsi yang mendasari keduanya amat berbeda. Menurut sumber di BPPN (kini mantan) MSAA didasari asumsi bahwa aset-aset yang diserahkan para bankir tersebut bagus-bagus dan nilainya melebihi utang BLBI. Sementara skema MRA didasari asumsi bahwa aset-aset yang diserahkan tidaklah bagus, dan nilainya di bawah utang BLBI. Akibatnya perlakuan terhadap mereka juga

berbeda. Skema MRA mewajibkan penenggak BLBI itu untuk menyerahkan jaminan pribadi (personal guarantee), jika utang BLBI mereka ternyata lebih besar daripada aset yang diserahkan. Mereka ini berteriak merasa diperlakukan tidak adil oleh BPPN. Mereka lebih suka bila diizinkan menyelesaikan utang BLBI lewat skema MSAA.

Tidak kurang galaknya adalah 25 mantan pemegang saham bank beku kegiatan usaha (BBKU), yang kini diwajibkan mengikuti struktur penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS). Skema itu memaksa mereka untuk menyelesaikan kewajibannya dengan uang tunai. "Seharusnya pemilik BBKU juga mendapat perlakuan yang sama, yaitu menyelesaikan kewajibannya dengan skema MSAA," kata pemilik Bank Mashill Philip Widjaja.

Dilihat dari semangatnya, menurut Kwik yang kemu-dian kembali ke habitatnya di DPR, MSAA amat meng-untungkan konglomerat perampok uang negara. Meskipun tak banyak yang mendukungnya di pemerintahan, banyak orang secara diam-diam membenarkan pandangan kritis politikus PDI Perjuangan itu. Bahkan Presiden Abdur-rahman Wahid dan para wakil rakyat akhirnya setuju meninjau kembali MSAA. Sebelumnya, masih pada tahun 1999, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaporkan adanya kejanggalan dalam MSAA tersebut, tetapi tidak mendapat tanggapan berarti. Pandangan Kwik sendiri soal MSAA pada dasarnya tidaklah berbeda jauh dari pandangan Econit. Menurut Econit, yang dinakhodai Rizal Ramli sebelum menjadi Menko Perekonomian itu, setidaknya ada 6 kelemahan MSAA. Pertama, kesepakatan tersebut membebaskan debitur dari tindakan pidana yang telah mereka lakukan (release & discharge), seperti pelanggaran batas maksimum pemberian kredit (BMPK).

Kedua, setelah MSAA ditandatangani, pemerintah tidak bisa menuntut para debitur, jika ternyata jaminan yang diserahkan kurang dari jumlah kewajiban yang seharusnya ditanggung.

Masih menurut Econit, kelemahan ketiga dari kesepakatan itu, kepemilikan aset-aset yang diserahkan tetap atas nama debitur. BPPN hanya melakukan kontrol terhadap operasionalnya. Keempat, tidak ada sanksi yang tegas bila debitur melanggar kesepakatan MSAA. Dalam hal ini sebagai contoh Econit menyebut beberapa pelanggaran terhadap batas waktu penyerahan aset (closing date). Juga disebut adanya debitur yang belum memenuhi kewajiban menyetor dana tunai (cash obligation), seperti Syamsul yang belum menyerahkan Rp 1 triliun yang diwajibkan kepadanya dalam MSAA. Bos BDNI itu sendiri mengaku sudah melunasinya. Kelima, aset debitur yang diserahkan kepada negara, fisik saham, bukti kepemilikan atau sertifikat aset yang diserahkan, tidak dipegang oleh BPPN. Seluruhnya masih tetap dipegang debitur. Keenam, susunan direksi maupun komisaris dari holding company yang dibentuk dari perjanjian MSAA sebagian besar dijabat orang-orang BPPN. Yang terakhir ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Cara menghindarinya cuma satu, kata banyak pengamat, serahkan saja kepada pengelola independen.

Terlepas dari kontroversi yang mengiringinya, menurut sumber di BPPN, sebenarnya MSAA tidaklah jelek-jelek amat. Bahkan sebagai sebuah solusi saat itu dia merupakan prestasi. "Bayangkan krisis lagi sangar-sangarnya pada tahun 1998 itu. Nilai dolar semakin menggelembung, banyak perusahaan mati, situasi politik tak menentu, penjarahan dan perkosaan merebak,

Soeharto jatuh, dan sebagainya. Indonesia menjadi sorotan internasional, terutama dalam masalah ras. Jadi kita bisa menggiring mereka menandatangani MSAA dan MRA itu hebat sekali," tuturnya bersungguh-sungguh. "Kita sendiri sebetulnya enggak tahu harus bagaimana. Lalu Salim menawarkan bagaimana kalau dia serahkan sejumlah aset. Pertamanya kita tolak, tapi setelah dipikir-pikir itu bagus juga. Lalu karena kita enggak ngerti soal perjanjian seperti itu, kita tanyakan konsultan-konsultan IMF. Dengan bantuan merekalah kita buat drafnya, makanya dalam bahasa Inggris," tambahnya panjang sekaligus menerangkan mengapa perjanjian itu ditulis dalam bahasa Inggris, padahal menyangkut 2 pihak yang sama-sama Indonesia. Banyak orang khawatir perjanjian dalam bahasa asing ini akan menyulitkan, bila nantinya salah satu pihak memperkarakan yang lain di pengadilan.

Masalahnya setelah draf perjanjian itu jadi mengapa posisi BPPN amat lemah. Apalagi bila ditinjau dari 6 kelemahan MSAA yang diungkap Econit, BPPN di situ seperti didikte. Adanya klausul yang amat merugikan negara dan menguntungkan konglomerat, adalah bukti yang tak dapat dibantah. "Mungkin ya, tim ekonomi pemerintah Habibie saat itu yang dipimpin Ginjar Kartasasmita dan BPPN di bawah Glen MS Yusuf ingin memberi semangat kepada mereka untuk menjaga asetnya, agar tidak semakin jatuh. Dengan adanya kemungkinan mendapat keuntungan di situ, kan mereka terpacu," jelasnya berlogika. "Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa apa yang mereka katakan adalah benar (presented & warranted). Seperti Syamsul, misalnya, dia mengaku tidak memiliki aset lagi di luar negeri. Nah kalau ternyata diketahui di luar negeri, seperti di Singapura, Hongkong,



Cina, atau di negara lain dia masih memiliki aset, maka berarti dia sudah cacat. Perjanjiannya lantas bisa dibatalkan, dia bisa dikenakan sanksi, dan sebagainya," tambah orang BPPN itu.

Mungkin peluang seperti itulah yang mendorong Kwik untuk menggugat kesepakatan tersebut, ketika menjabat sebagai Menko Ekuin pada masa kepresidenan Gus Dur. Dia bahkan meminta ahli pengacara dan hukum kondang Kartini Muljadi dan Frederik B.G. Tumbuan untuk mengkajinya. Begitulah berpijak pada hasil kajian kedua tokoh itu, Kwik menilai MSAA bertentangan dengan undang-undang perbankan. Perjanjian perdata itu tidak bisa menghapus tindakan pidana yang mereka lakukan, seperti pelanggaran BMPK. "Ibu Kartini dan Pak Fred juga merekomendasikan agar MSAA dibatalkan demi hukum," kata Kwik. Kartini dan Fred bahkan menganjurkan BPPN agar mengambil langkah hukum, seperti paksa badan (gijzeling). Tindakan hukum seperti itu boleh dikenakan pada pemegang saham pengendali sejumlah bank penadatangan MSAA dan MRA, yang tidak melunasi kewajiban sebesar utang BLBI yang telah dinikmati, dan melanggar BMPK.

Dari hasil kajian Kartini dan Fred nampaknya MSAA sebagai sebuah perjanjian pun tak mungkin dilaksanakan, sebab beberapa poin yang seharusnya dilaksanakan telah dicerai sendiri oleh pelakunya. Paling jelas tentu cedera janji yang dilakukan bos BDNI Syamsul Nursalim, yang memang dijadikan kajian utama. Pengkajian serupa tentu bisa juga dilakukan pada penandatanganan MSAA yang lain. Setidaknya ada 5 cedera janji yang dibuat Syamsul: Syamsul tidak membayar lunas secara tunai kewajiban Rp 1 triliun sebagaimana ditetapkan dalam MSAA; Syamsul

tidak memindahkan hak atas kepemilikan aset ke PT Tunas Sepadan Investama; Syamsul melakukan beberapa misrepresentation (kekeliruan yang dilakukan dengan sengaja terhadap penyajian data tentang aset; belum semua aset tambahan (holdback asset) diserahkan ke escrow agent (penampung sementara aset tambahan); Syamsul belum menyerahkan dokumen-dokumen lain yang disyaratkan MSAA, seperti debtor's consent and acknowledgement dan loan forgiveness.

Setelah serangan panas Kwik terhadap MSA dan para penenggak BLBI besar, koor untuk membatalkannya semakin santer saja. Bahkan kalangan wakil rakyat dan pakar ekonomi pun ikut berteriak dengan nada yang sama. Dr. Sri Mulyani Indrawati, dari FE-UI termasuk salah satu yang menyerukan pembatalan MSAA. Namun pengacara Todung Mulya Lubis mengatakan tak mungkin, karena membatalkannya sepihak itu melanggar hukum. "Akan tetapi kontrak yang ditandatangani bukanlah harga mati. BPPN bisa saja membatalkan MSAA, bila debitor mencederai janji. Jadi harus diteliti dulu, tak bisa sekadar membatalkan," ujar mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia itu pendek. Namun langkah apa pun yang akan diambil pemerintah dan BPPN, hasil kajian Kartini Muljadi dan Fred Tumbuan tak bisa diabaikan begitu saja.

Bahkan setelah Kwik berhenti dari jabatannya sebagai Menko Ekuin, gugatan terhadap itu terus berjalan. Apalagi Dr. Rizal Ramli yang menduduki posisi Kwik sebagai Menko Perekonomian punya sikap yang tak kalah tegasnya. "Dalam masalah MSAA ini, kerugian negara harus ditekan seminimal mungkin. Dengan begitu debitor harus menambahkan aset jaminan dan memberikan personal



garansi guna menghindari pengurangan nilai asetnya," tutur Rizal sesuai berkonsultasi dengan Wakil Ketua DPR Tosari Widjaja. "Sebagai gantinya pemerintah bersedia memperpanjang jangka waktu pembayaran kewajiban debitor itu," tambahnya. Sanksi pidana? "Itu wewenang Jaksa Agung, bukan Menko Perekonomian," tegasnya. Syamsul kemudian sempat dipanggil kejaksaan untuk menjalani pemeriksaan, tapi dia tak datang dengan alasan kesehatan. Kemudian dia hengkang ke Singapura dengan alasan berobat dan tidak kembali sampai pemerintahan Gus Dur berakhir lewat impeachment wakil rakyat dalam persoalan lain. Megawati kemudian menggugurkan Gus Dur sebagai presiden.

Cuma urusan MSAA dan penenggak BLBI besar ini berakhir antiklimaks pada masa Kabinet Gotong Royong Mega-Hamzah. Sebelum masa pemerintahan Kabinet Mega-Hamzah berakhir dan BPPN habis masa baktinya, Ketua BPPN waktu itu Syafruddin Arsyad Temenggung berupaya keras untuk memberikan sertifikat Release & Discharge kepada para konglomerat besar tersebut. Upaya ini berhasil gemilang, meski dalam urusan siapa yang mesti menandatangani sertifikat lunas dan bebas tuntutan hukum berlarut-larut. Seakan ada yang tak beres dengan pemberian sertifikat tersebut dan khawatir akan menjadi masalah dikemudian hari, politisi PDIP memberi peringatan agar Megawati sebagai presiden tidak dilibatkan di dalam masalah itu. Begitulah sertifikat Release & Discharge kemudian ditandatangani Ketua BPPN Syafruddin A Temenggung. Kini setelah Hendarman Supandji menjabat Jaksa Agung menggantikan Abdulrahman Saleh masalah ini nampaknya angkat diangkat kembali. Kabinet Indonesia Bersatu SBY-JK, yang memang

bertekad membrantas korupsi, nampaknya tak bisa menerima pemberian sertifikat Release & discharge tergesa-gesa itu.

Z



## Indonesia di Tangan Kyai Abdurrahman Wahid

Reformasi berakhir antiklimaks. Partai-partai lama warisan orba tetap menjuarai pesta demokrasi 1999. Yang berbeda cuma satu: Golkar, yang selama 7 kali pemilu terus berada di tempat pertama, dalam pemilu paling demokratis setelah pemilu 1955 ini bertukar tempat dengan PDI Perjuangan pimpinan Megawati Soekarno-putri. Golkar harus puas di tempat kedua dengan kekalahan tipis dari si juara baru. PPP berada di tempat ketiga, tapi dengan ketertinggalan yang sangat jauh. Partai kaum reformis PAN pimpinan Amien Rais cuma mendapat tak sampai 10% suara pemilih. Partai berlambang Matahari ini cuma mampu menjadi pesaing baru PPP. Sedang partai kaum muda kampus PK di bawah Nur Mahmudi Ismail bahkan tak masuk electoral threshold. Sebab suara yang dikumpulkannya tak sampai 3%. Lebih parah lagi partai anak-anak muda beraliran kiri di bawah Budiman Sujatmiko PRD, yang sempat berkibar menjelang kejatuhan Soeharto, hanya bisa mengumpulkan tak sampai 1% suara. Nasibnya tak jauh beda dari PUDI di bawah Sri Bintang Pamungkas dan PDR pimpinan mantan Menkop/PKM Adisasono yang mengusung ekonomi kerakyatan. Partai-partai gurem ini

cuma punya dua pilihan: mati saja atau ganti nama. PK memilih opsi kedua dan berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) agar bisa berlaga lagi pada 2004. Hasil pemilu demokratis pertama ini sekaligus menunjukkan kegagalan kaum reformis mengajak rakyat di akar rumput pindah 'kereta.'

### **1. Obat Mujarab itu Bernama Abdurrahman Wahid**

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, melihat hasil pemilu seperti itu, Amien terpaksa mengurungkan niatnya maju ke medan laga pemilihan presiden di sidang umum MPR (Oktober 1999). Orang yang selama berbulan-bulan sebelum pemilu selalu keluar sebagai jawara dalam setiap polling pendapat itu mundur teratur, karena malu, disamping pilu tentunya. "Saya tidak mau menjadi presiden ten percent (10%)," katanya tahu diri. Sebaliknya muka-muka baru di MPR tak rela bila Indonesia, setelah perjuangan yang berat, harus kembali dipimpin orang-orang yang tak punya visi ke depan. Apalagi untuk kembali ke pangkuan antek-antek Soeharto. Maka dibuatlah manuver cantik dengan mengu-sung Abdurrahman Wahid. Selama 512 hari pemerintahan transisi Habibie, kyai tanpa pondok pesantren ini memang telah menjadi tokoh oposisi paling berwibawa di republik. Dia sekaligus telah menyisihkan ketokohan Amien. Dengan menggandeng Mega, cucu pendiri NU Kyai Hasyim As'ari itu seperti menyedot seluruh kekuatan Mega, sehingga selama 16 bulan yang penuh gejolak putri pemimpin besar revolusi itu hanya tampil sebagai adik yang manis.

Namun manuver kaum reformis dan intelektul kampus itu telah mengubah keadaan. Cucu kyai itu disulap sedemikian sehing-ga tampil sebagai pesaing putri mantan

presiden pertama republik. Gus Dur yang partainya cuma mengantongi 13 juta suara pemilih dihadapkan dengan Mega yang partainya telah memenangi pemilu legislatif dengan 35 juta suara. Namun Gus Dur tampil percaya diri. Dia tak memandang sedikit pn kekuatan Mega. Yang dia tahu hanya kekuatannya sendiri, yang didukung kaum reformis dan partai-partai lain yang tak menghendaki presiden wanita. Begitulah kaum tradisonalis dan Islam modern bergabung dalam satu barisan bersama kaum reformis. Di sisi lain Mega yang sudah telajur menampilkan diri sebagai adik manis justru rikuh sendiri. Sementara para pendukungnya tak bisa menganggap Gus Dur sebagai musuh yang harus dilawan habis-habisan. Yusril Ihza Mahendra, Ketua PBB kemudian ikut berlaga di sidang umum itu untuk menangkap segala kemungkinan. Mantan 'speech writer' Soeharto itu tentu tak sekadar nekat, mengingat PBB yang dipimpinnya memperoleh suara yang tak menggembirakan. Perhitungannya lumayan rasional: Habibie tak jadi maju dan Amien sudah meninggalkan lapangan. Bila Gus Dur mundur atau tak lulus tes kesehatan, maka saingannya hanya satu, Megawati. Dapat dipastikan Yusril yang muda, cerdas dan ganteng akan mampu memenangkan pemilihan di MPR.

Perhitungan Yusril akhirnya memang meleset. Gus Dur tidak mengalami kesulitan sama sekali dalam masalah kesehatan. Tak ada tes, tak ada pertanyaan soal itu. Meski pernah terserang stroke menjelang rontoknya orba dan pengelihatannya tak sehat, di mata wakil rakyat Gus Dur tetap lebih baik daripada Mega. Baik kaum modernis Islam, tradisionalis, maupun reformis seperti sekata memilih tokoh asal bukan Mega. Pokoknya Gus Dur saat itu boleh dibilang obat bagi kaum reformis yang terpukul

hebat akibat kekalahan telak dalam pemilu, obat bagi Golkar dan antek-antek orba yang tak ingin berhadapan langsung dengan seorang reformis galak seperti Amien, obat bagi mayoritas muslim yang tak ingin dipimpin seorang presiden wanita, dan obat bagi dunia luar, terutama AS, yang tak ingin Indonesia dinakhodai Amien yang bisa membahayakan kepentingan mereka di nusantara. Jadi saat itu Abdurrahman Wahid tiba-tiba saja menjelma menjadi obat mujarab bagi semua pihak.

Namun orang tetap saja terperengah ketika Gus Dur benar-benar terpilih. Apalagi dia tidak segera menyerahkannya kepada Mega seperti yang pernah dijanjikannya. Karena itu tak ada pula kejadian seperti dalam skenario Gus Dur sebelum pemilihan: "Amien memilih saya. Saya memilih Mega. Nanti Mega akan memilih Amien." Jadi dalam skenario itu Gus Dur, yang memenangkan pemilihan, menyerahkan tampuk kekuasaan kepada Mega. Sebab partainya sendiri PKB cuma bertengger di tempat kelima dalam perolehan suara, jauh di bawah PDIP yang memenangkan pemilu. Lalu Mega, yang ditunjuk presiden terpilih Gus Dur, menyerahkannya kepada Amien. Sebab dia merasa pemimpin kaum reformis itulah yang paling pantas memimpin Indonesia setelah menumbangkan sang diktator 32 tahun Soeharto. Skenario itu dilupakan Gus Dur begitu saja, ketika tampuk pimpinan republik diserahkan kepadanya. Namun kaum reformis dan Islam modern tidak menyalahkan Gus Dur dan tidak pula menyalahkan diri mereka sendiri, karena membiarkan peluang itu terlepas begitu saja. Sebagai gantinya mereka menyalahkan Amien. Ini membuat mantan Ketua Umum Muhammadiyah itu makin terpuruk di kalangan pendukungnya sendiri. Meski tak pernah diekspos keluar, kejadian ini berkembang

menjadi luka dalam. Luka ini akan menganga lagi dan menjadi penghalang setiap ada rencana mengangkat Amien menjadi pemimpin nasional, sehingga menguntungkan lawan-lawannya.

Sebaliknya posisi Mega di mata pendukungnya justru semakin bagus. Dia semakin disayang pendukungnya yang fanatik sambil menuding Gus Dur sebagai pengkhianat. Protes itu pun terpaksa ditelan sendiri pendukung Mega, karena putri sulung mantan presiden Soekarno itu tak menunjukkan kemarahannya. Sedang Gus Dur di mata kaum tradisional muslim yang fanatik, juga semakin berwibawa. Kemenangannya yang mulus di sidang umum MPR dianggap sebagai bukti kekuatan supranaturalnya. Keadaan itu jelas berbahaya. Untungnya Gus Dur, meski pengelihatannya tak awas, mampu membaca situasi dan merasakan resonansi ketegangan di akar rumput. Pendukung fanatik Mega, yang kecewa dan tersebar di seluruh tanah air, tentu tak rela melihat sang satria piningit dipecundangi begitu saja, justru setelah memenangkan pemilu. Dapat dipastikan kepercayaan diri pada jumlahnya yang terbukti paling besar dan rasa kecewa yang akut pendukung Mega, bila tak segera diredam, akan muncul ke permukaan dalam bentuk apasaja. Dia bisa memporandakan apasaja yang ada di depannya seperti air bah, banjir bandang, dan bahkan tsunami sosial.

Gus Dur mencium bahaya menghadang di depannya dan tahu pula bahwa dia memiliki alat ampuh di tangannya untuk meredam. Sebagai presiden terpilih dia memiliki hak prerogatif untuk mengangkat siapa saja sebagai wakilnya. Dia bisa mengangkat orang luar Jawa untuk menyenangkan mereka yang ada di pulau-pulau lain, bisa

mengangkat orang Muhammadiyah untuk menyenangkan kaum modernis Islam yang telah membuka jalan baginya untuk tampil ke tampuk republik, atau mengangkat seorang jendral untuk menentramkan TNI yang resah oleh arus reformasi dan demokratisasi, tapi Gus Dur memilih Mega sebagai wapres. Ketegangan di akar rumput pun sirna. Anak Kyai Haji Wahid Hasyim itu berhasil melewati rintangannya yang pertama dengan predikat cum laude.

## 2. Mengambil Kembali Kedaulatan Politik

Gus Dur kemudian menyusun kabinetnya yang diberi nama Kabinet Persatuan. Krunya lumayan beragam, karena Gus Dur tak ingin mengecewakan gabungan partai yang telah mengusungnya sampai ke RI-1. Dia menjadi kabinet pelangi atau gado-gado, kata para pengeritiknya. Menteri-menteri kabinet transisi Habibie pukul rata tak dipakai lagi, tidak terkecuali Menneg BUMN Tantri Abeng yang telah bekerja keras mereformasi perusahaan-perusahaan BUMN sampai menjadi pemain dipasar modal yang efektif. Dia bahkan menganggap sepi semua yang telah dicapai kabinet transisi Habibie, termasuk perjuangannya membangun ekonomi kerakyatan.



**Tantri Abeng**

Departemen Koperasi & Pengusaha Kecil Menengah (PKM), yang selama pemerintahan Habibie menjadi lokomotif ekonomi kerakyatan dan pembeda dari masa orba, diamputasi. Dia dijadikan kementerian non portofolio alias menteri negara. Akibatnya Depkop/PKM tak punya kaki di daerah. Ini sekaligus menandai disisirkannya kembali sistem ekonomi yang

berpihak kepada rakyat banyak. Keadaan ini berlangsung sampai sekarang. Lalu Departemen Penerangan, yang di zaman Habibie dinilai sangat reformis, terutama setelah sang Menpen Yunus Yospiyah mencabut kewajiban SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers), sekalian dihapus Gus Dur. Departemen Sosial yang pernah dihapus pada masa Habibie, dihidupkan kembali. Lalu Panglima TNI, yang selama puluhan tahun selalu dipegang Angkatan Darat, diberikan Gus Dur kepada Laksamana Widodo HS dari Angkatan Laut.

Goncangan yang dihasilkan oleh tindakan tersebut memang lumayan besar, tapi Gus Dur jalan terus. Sebagian kalangan memang dibuat sesak nafas, tapi sebagian lain menganggapnya sebagai tindakan reformistik. Sebagai presiden Gus Dur memang berhak melakukan berbagai perubahan yang dingininya agar Indonesia baru seperti konsepnya bisa terwujud. Cuma karena Gus Dur tidak pernah menjelaskan konsepnya sendiri, maka setiap dia melansir hal baru, timbul pula goncangan baru. Apalagi menteri-menteri yang membantunya pun tak pernah diajak duduk membicarakan langkah-langkah yang akan diambil. Akibatnya menteri-menteri seperti berjalan sendiri-sendiri dengan komando berada di tangan ketua partai masing-masing. Dari situ konflik antara presiden dengan partai pendukungnya, yang menaruh orang-orangnya di kabinet, dan wakil rakyat di DPR mulai tumbuh.

Di negara-negara maju yang kondisi demokrasinya sudah berjalan baik, konflik antara presiden dengan para pembantunya di kabinet dan para wakil rakyat tentu sudah mengakibatkan kelumpuhan. Atau setidaknya akan muncul mosi tidak percaya dan kabinet pun bubar. Pemilu

ulang digelar atau presiden baru dipilih. Namun Indonesia sudah punya terlalu banyak persoalan dan kemiskinan sudah cukup bikin pusing rakyat banyak. Jadi konflik antara presiden, para pembantunya dan wakil rakyat tetap menjadi konflik di antara orang-orang penting itu, atau setidaknya dianggap sebagai salah satu hiburan sekilas simulat. Rakyat tidak mau ikut campur, apalagi memikirkan keluarnya.

Begitulah konflik itu tetap terisolasi di antara para politisi dan orang-orang yang berkepentingan dengan pusat-pusat kekuasaan, tidak menjalar ke akar rumput. Keadaan ini memberi ruangan lebih luas kepada Gus Dur untuk melakukan berbagai trobosan dalam urusan politik. Gus Dur nampaknya memang cukup piawai memainkan peranan dalam ruangan yang dimilikinya itu. Kadang dia bergerak bagai ombak menggulung apa saja yang ada di depannya, seperti ketika dia memecat beberapa menteri-nya dengan berbagai alasan. Di lain saat dia nampak lembut dan sangat arif, seperti dalam urusan dengan konglomerat. Juga dalam soal Irian Jaya yang diganti namanya menjadi Papua Barat sesuai keinginan masyarakat di sana. Gus Dur bahkan tak segan mengizinkan pengibaran bendera Bintang Kejora. Begitu pula dalam urusan Aceh sampai dia sendiri tersandung dana dari Sultan Brunei. Langkah-langkahnya cepat dan tak terduga. Gus Dur seperti ber-pacu dengan waktu untuk menyelesaikan semua persoalan negaranya dengan caranya sendiri, one man show. Dia tak gentar dengan resiko apa pun yang bakal menghadangnya, bahkan tak sudi mengemis kepada Paman Sam, si penguasa jagad yang menyambut kemenangannya dengan dingin. Dia memilih menjaga koeksistensi damai dengan semua

kekuatan yang ada untuk mendapatkan kembali kedaulatan politik negaranya, sekaligus menjadikannya alat gertak. Dalam hal yang belakangan itu Gus Dur mempraktikkan politik bebas aktif, seperti dilansir Mohammad Hatta 'mendayung di antara dua karang' pada awal-awal kemerdekaan.

Atas dasar itulah gagasan Presiden Abdurrahman Wahid membentuk poros: Jakarta-Beijing-New Delhi, menjadi sangat menarik dan menimbulkan harapan bahwa Jakarta bukan lagi anak bawang yang bisa disetir Amerika Serikat (AS) atau negara mana pun. Dia juga bisa dijadikan alat gertak yang lumayan efektif untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia di mata dunia. Lawatan kenegaraan pertamanya dengan mengunjungi negara-negara tetangga Asia, bahkan dinilai pengamat politik CSIS Kusnanto Aggoro sebagai penegasan posisi, bahwa Indonesia memiliki alternatif selain Barat. Kebijakan inward looking ke Asia ini disebut Kusnanto sebagai alternatif yang lebih berdaulat. Di Tanah Air hampir tidak ada komentar negatif mengenai gagasan itu. Bila poros ini benar-benar terbentuk, ditambah kekuatan ekonomi dan teknologi Tokyo, bukan tidak mungkin masa jaya Barat, diwakili AS, akan segera berakhir. Asia akan memasuki zaman renaissance yang gegap gempita pada milenium mendatang, dan Indonesia akan ikut pegang peranan.

Perhitungannya sederhana saja. Dalam 20 tahun ke depan, Cina diramalkan akan tampil sebagai negara dengan kemampuan ekonomi dan militer luar biasa, getarannya pun dapat dirasakan saat ini. Sepertiga pendapatan Asia-Pasifik diperkirakan Kusnanto akan berasal dari Cina. Dengan segala potensi yang dimilikinya, negeri Tirai Bambu itu bakal tampil sebagai kekuatan

pengimbang AS.

Sementara kunjungan Presiden ke New Delhi (India), dinilai menunjang visi kelautan Gus Dur. Pertahanan laut India saat ini merupakan yang terkuat di Pasifik. Lagi pula, negeri berpenduduk terpadat di dunia setelah Cina itu, memiliki potensi luar biasa di teknologi transportasi dan persenjataan. India dianggap bisa menjadi sumber alternatif bagi industri persenjataan Indonesia yang sering kelimpungan dipermainkan Barat.

Manuver Gus Dur tersebut memang menunjukkan hasil bagus. Tak lama setelah kunjungannya ke negara-negara Asia, Presiden AS Bill Clinton mengundangnya ke Gedung Putih via telepon. Gus Dur tidak saja menyambut baik undangan itu, tapi sekaligus dengan mudahnya mengubur gagasan poros Jakarta-Beijing-New Delhi yang sudah melambungkan namanya. Poros Jakarta-Beijing-New Delhi tak pernah muncul lagi ke permukaan sampai sekarang, meski kabinet telah berganti dua kali. Gagasan genial dan terbukti efektif untuk menggertak barat ini, mestinya bisa dihidupkan kembali oleh SBY-JK yang dipilih langsung rakyatnya. Ini sangat bagus untuk mengurangi tekanan AS dalam soal HAM sambil meminta berbagai konsesi, misalnya blok minyak Cepu untuk Exxon. Merasa umpunya dilahap, Gus Dur bukannya meminta berbagai kemudahan, tapi sebaliknya. Dia malah memberi kabar gembira kepada Barat mengenai rencananya membuka hubungan dagang langsung dengan Israel, obsesi lamanya. Pada titik ini Gus Dur mulai tersandung. Membuka hubungan langsung dengan Israel tidaklah gampang dijalankan. Protes dan unjuk rasa ketidaksetujuan marak di seantero negeri. Para pengunjuk rasa, baik dari kalangan santri, organisasi keagamaan, maupun perguruan tinggi

di Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, dan lain-lain, seiya menolak hubungan dagang dengan Israel. Bagi mereka hubungan dagang sama artinya dengan mengakui negara Israel. Padahal Negeri Zionis itu sampai kini masih menginjak-injak, merampas tanah dan perkebunan kaum muslimin Palestina, dataran tinggi Golan, dan sebagainya.

Bahkan, seperti sehari-hari dipertontonkandi berita televisi, kaum Zionis Israel telah dan terus membunuh serta mengusir orang-orang Palestina dari kampung mereka. Saking keras kepalanya, resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun tidak digubrisnya. Sampai 1987 saja, negeri kecil itu telah menolak lebih 700 kali resolusi PBB. Yang terakhir resolusi PBB No. 242 tentang Hak-hak Rakyat Palestina, yang mengharuskan Israel angkat kaki dari tanah-tanah yang didudukinya sejak perang 1967. Lagipula penduduk Israel yang cuma 6 juta, kata Ketua Pelaksana Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam Ahmad Sumargono, SE, bukan pasar menggiurkan bagi produk-produk Indonesia yang bukan high tech.

Akibat keinginan membuka hubungan langsung dengan Israel itu Gus Dur, yang sampai saat itu masih tercatat sebagai salah satu pendiri Yayasan Shimon Peres (berkedudukan di Tel Aviv), langsung dituduh sebagai agen Yahudi oleh para demonstiran. Melihat gelagat tidak menguntungkan itu, para wakil rakyat lantas meminta Pemerintah menunda pembukaan hubungan tersebut. Pemerintah memang lalu menyatakan menundanya, tapi Gus Dur secara terbuka menganggap pembukaan hubungan dagang dengan Israel itu sah-sah saja. "Dalam urusan dunia kita boleh berhubungan dengan Yahudi. Nabi pun berdagang dengan Yahudi," katanya kesal di televisi



menanggapi berbagai protes. Bagi Presiden pembukaan kontak dagang dengan Israel lebih pantas ketimbang dengan Rusia, Cina atau Korea Utara. "Kenapa itu dibiarkan? Mereka terang-terangan atheis, menentang Tuhan. Sementara orang Yahudi dan Nasrani masih mengakui adanya Tuhan. Agama Islam masih satu rumpun dengan mereka, agama samawi," tambah presiden kyai itu argumentatif.

Menteri Luar Negeri Alwi Shihab, alumni Universitas Islam Al Azhar, Mesir, membenarkan pendapat Presiden. Alwi menilai pembukaan hubungan dagang dengan Israel amat urgen, karena berfungsi mengundang masuknya modal Yahudi ke negeri ini. Lebih jauh lagi, hubungan dagang dengan Israel digunakan Pemerintah untuk menarik simpati Yahudi internasional. "Program utama kita sekarang kan perbaikan ekonomi. Kita sudah merangkul Cina, Singapura, Jepang, India dan AS. Anda tahu kan perusahaan multinasional di AS umumnya dikuasai keturunan Yahudi. Sekitar 70% keuangan AS dikuasai Jewish Community. Jadi sasaran kita sebenarnya bukan Israel, tapi lobi Yahudi di AS," jelas Menlu yang juga profesor perbandingan agama di Universitas Harvard, AS itu meyakinkan.

Bagi Alwi membuka hubungan dagang dengan Israel jauh lebih menguntungkan daripada membiarkannya berjalan sembunyi-sembunyi sebagaimana terjadi selama ini. Memang data resmi Atase Perdagangan Israel di Singapura menunjukkan sepanjang 1999 nilai ekspor Indonesia ke Negeri Zionis itu mencapai US\$ 11 juta. Sedang impor Indonesia dari negeri itu mencapai US\$ 6 juta. Semuanya dilakukan melalui pihak ketiga, seperti Singapura dan Belgia. Bahkan, masih menurut Menlu, nilai perdagangan

kita tahun 2000 dengan Israel mencapai US\$ 20 juta. "Nah lebih baik kita melakukan secara terbuka saja. Jangan menjadi orang munafik," tegasnya. Menurut catatan Depperindag nilai ekspor Indonesia ke negara-negara Timur Tengah sekitar US\$ 2,5 miliar/tahun (atau 5% dari total ekspor yang besarnya US\$ 50 miliar).

Sasaran yang tak kalah penting daripada soal fulus itu, kata Alwi, mengurangi tekanan politik internasional terhadap pemerintah dalam soal pelanggaran HAM. "PBB kan membentuk komisi internasional untuk menyelidiki kasus pelanggaran HAM di Timor Timur. Kita bisa disamakan dengan Rwanda, Serbia (Yugoslavia) dan lain-lain. Dalam hal ini peran Kongres AS sangat besar," papar orang dekat Gus Dur itu tenang. "Kita harus jujur, lobi Yahudi di Kongres AS sangat kuat. Dari 27 ribu staf dan anggota Kongres, 20 ribu di antaranya Yahudi. Di kabinet AS, dominasi Yahudi juga sangat terasa," tambahnya. Dengan dibukanya hubungan dagang terang-terangan dengan Israel, Alwi percaya, Kongres AS akan mudah diyakinkan. "Mereka akan menganggap kita tidak anti-Yahudi. Selama ini citra Indonesia buruk di AS karena media massa di sana dikuasai Yahudi."

Terlepas dari pro-kontra yang mengiringinya, argumentasi Pemerintah sebenarnya cukup beralasan. Menyambung hubungan dengan Cina yang berpenduduk 1,2 miliar dengan kemampuan ekonomi, teknologi dan militer yang meningkat terus, memang lebih realistis. Apalagi bila diingat negeri berpenduduk 1,3 miliar orang itu memiliki cadangan devisa di atas US\$ 250 miliar saat itu. Sedang penduduk Israel cuma 6 juta jiwa, meskipun pendapatan per kapitanya di atas US\$ 16.400. Begitu pula dengan India, yang berpenduduk hampir 1 miliar serta memiliki

kemampuan pertahanan laut, teknologi transportasi dan persenjataan yang juga meningkat terus. Namun perlu diketahui, kata banyak pengamat ekonomi, semua itu sampai saat ini masih berupa potensi. Masih butuh waktu untuk menjadikannya kenyataan. Sementara dana, teknologi dan lobi Yahudi sudah lama menjadi kekuatan riil di AS dan Eropa.

Berpijak pada cara berpikir seperti itu, banyak kalangan dapat memahami keinginan Pemerintah membuka hubungan dagang dengan Israel, negeri induk miliarder Yahudi internasional. Salah satu di antara mereka adalah DR. Hamid Awaluddin. "Saya dapat memahami cara berpikir Gus Dur dan kabinetnya dalam hal ini. Yahudi connection di AS menguasai Kongres dan Senat dengan kemampuan lobi mereka. Yahudi juga menguasai media massa dan lembaga keuangan dari Wall Street sampai IMF," jelas pengamat politik dan hukum, yang pernah tinggal 13 tahun di negeri Paman Sam tersebut, waktu itu.

Dewi Fortuna Anwar, mantan penasihat politik Presiden Habibie, membenarkan pandangan Hamid. Menurut Dewi kekuatan lobi Yahudi di AS ada di berbagai sektor, termasuk politik. Menteri Pertahanan AS William Cohen, Menlu Medeleine Allbright, Sandy Berger (National Security Council), Allan Greenspan (Federal Reserve Bank), juga Henry Kissinger, mantan Menlu AS yang sampai sekarang masih dihormati di AS dan Eropa, adalah Yahudi. Israel merupakan pintu gerbang untuk mengeruk dana Yahudi diaspora (yang tercerai-berai) di berbagai belahan dunia.

Sekadar melengkapi gambaran tentang kedigdayaan lobi Yahudi, ada baiknya kita buka catatan Fu'ad bin Sayyid Abdurrahman Ar Rifa'i. Dalam bukunya 'Yahudi

dalam Informasi dan Organisasi,' dia menunjukkan bagaimana kaum Yahudi memperkuat pengaruhnya lewat dominasi kantor berita, media massa, perfilman, keuangan dan lembaga dunia. Kantor berita terbesar dunia Reuters dibangun keturunan Yahudi Julius Reuters. Kantor berita besar lainnya, Associated Press, International News Service dan United Press International, juga dimiliki orang Yahudi. Dominasi Yahudi pun kental di media massa AS, seperti The New York Times (terbit sejak 1941) dan The Washington Post. Kedua surat kabar itu sampai kini diakui paling banyak mempengaruhi kebijakan negeri itu. Bahkan surat kabar yang tidak terlalu besar pun, seperti The Sunday Times, The Chicago Sun Times dan The City Magazine, tidak mereka lepaskan. Di Inggris mereka menguasai The Times, yang semakin terkenal setelah diambilalih Yahudi Australia Rupert Murdoch. Kaum Yahudi juga menguasai The Daily Express, The News Chronicle, The Daily Mail dan The Observer.

Lebih jauh lagi Yahudi connection juga menguasai stasiun televisi acuan pemirsa AS dan Eropa: ABC, CBC dan NBC. Di perfilman apalagi. Di dunia glamour ini dominasi Yahudi amat kuat. Masih menurut Fu'ad dalam bukunya itu, di perfilman kehadiran Yahudi amat terasa. Lihat saja, William Fox (Fox Company), Samuel Golden (Golden), Lewis Mayer (Metro), Harny Warner (Warner & Bross) dan Hot Dixon (Paramount). Semuanya keturunan Yahudi. Di AS, menurut Fu'ad, 90% pekerja film mulai dari sutradara, produser, editor, artis sampai kru film adalah Yahudi. Seakan mau melengkapi hegemoninya, Yahudi mendominasi PBB, UNESCO, FAO, IMF, Bank Dunia, dan berbagai organisasi sosial internasional.

Perbankan AS dan pasar modal juga tidak lepas dari

cengkaman mereka. Dunia finansial ini sudah dari dulu menjadi tempat bermain kaum Yahudi diaspora. Mereka menguasai sebagian besar fund manager dunia. Soros Management Fund, Quantum Fund dan Goldman Sachs adalah raksasa-raksasa keuangan Yahudi yang menguasai pasar uang dan spekulasi valuta. Seorang George Soros saja bisa menjungkirbalikkan negara yang dikehendakinya lewat jual-beli mata uang di pasar uang internasional, seperti di London. Bahkan krisis moneter Asia, sebagaimana dilansir PM Malaysia Dr. Mahathir Muhammad, adalah ulah Soros. American Israel Public Affair Committee (AIPAC), salah satu organisasi Yahudi terkemuka di AS yang berdiri 1897, dikenal sebagai organisasi yang bisa memuluskan atau menjatuhkan kandidat politik. Tolok ukur mereka cuma satu: tokoh tersebut menyokong Israel atau tidak. Setiap pemilu di AS, AIPAC bisa menghabiskan US\$ 4-5 miliar - 4% dari pengeluarannya per tahun. Bila itu benar, dapat dibayangkan kekuatan dana Yahudi diaspora.

Pertanyaannya kemudian: apakah pembukaan hubungan dagang dengan Israel otomatis mendorong Yahudi diaspora menginvestasikan dananya di Indonesia? Apakah hubungan itu bisa memotivasi lobi Yahudi membela kepentingan Indonesia di hadapan lembaga-lembaga kredit dunia, seperti Bank Dunia dan IMF? Apakah Israel atau Yahudi tidak akan meminta konsesi lebih banyak lagi dari pemerintah Indonesia untuk kepentingan mereka, seperti dilakukan terhadap Anwar Sadat (Mesir)? Lalu apakah hubungan dagang itu benar-benar akan memacu kaum Yahudi Amerika mengurangi tekanan politik internasional terhadap Indonesia dalam masalah HAM?

Cukup sulit mendapatkan jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan itu. Jawaban buat pertanyaan pertama saja, simpang-siur. "Kita memang bisa membuka hubungan dagang dengan Israel secara terbuka, tidak seperti yang selama ini terjadi, secara diam-diam. Itu bukan berarti modal Yahudi internasional yang berlimpah itu otomatis akan diinvestasikan ke sini. Sebab untuk berinvestasi, ada perhitungan matematisnya sendiri. Bisa menguntungkan, enggak?" ujar pengamat Timur Tengah Riza Sihbudi. Pada dasarnya, kata Riza, investor datang ke suatu negara bukan karena negara tersebut memiliki hubungan dengan Israel, tetapi karena potensi ekonominya.

Hal senada juga dikemukakan Aviliani, pengamat ekonomi dari INDEF. Menurutnya Pemerintah terlalu agresif. Kalau mau dagang, harus kita lihat dulu apa yang bisa kita jual ke sana. Dia khawatir, jangan-jangan kita terlalu banyak membeli dari mereka. Sementara kita tak mampu menjual apa pun karena tidak mengenal kebutuhan pasar mereka. Lebih jauh lagi, kata dia, untuk mengundang investasi, investor dari manapun asalnya, Cina, India atau Yahudi Amerika, kita harus memiliki aturan yang jelas dan memudahkan. Jadi pemerintah mesti memperbaiki dulu aturan yang selama ini terkesan mempersulit datangnya investasi, seperti banyaknya kutipan dan berbelitnya perizinan.

Memang benar, karena penampilan Gus Dur yang bersahabat, Soros telah hadir di dunia bisnis Indonesia dengan membeli saham Bentoel. Sebelumnya dia juga masuk ke Bank CIC. Mungkin tak lama lagi, masuk ke Telkom, Indosat, dan lain-lain. Namun keha-dirannya di sini tidak sebagai investor langsung yang mendirikan pabrik atau membangun infrastruktur dengan sistem build ope-rate & transfer (BOT) misalnya, tapi sebagai investor

portofolio. Investasi jenis ini cuma bersifat jangka pendek alias cuma mencari capital gain, dan setiap saat bisa henggang dengan meninggalkan pukulan berat di pasar modal. "Biasanya para hedge fund seperti Soros akan masuk ke negara bermasalah untuk mencari untung besar dalam waktu singkat. Di kala saham-saham di pasar modal Indonesia jatuh, mereka datang. Setelah mendapat untung, mereka akan cepat pergi mencari negara lain," ungkap Managing Direktur Econit waktu itu Rizal Ramli dalam diskusi Economic Outlook 2000, 14 Desember 1999. Indonesia, menurut Rizal, sebetulnya amat butuh penanaman modal asing (PMA) untuk jangka menengah dan panjang.

Di sisi lain bantuan lobi Yahudi terhadap IMF dan Bank Dunia buat Indonesia, tak kunjung kelihatan. Padahal dengan rencana membuka hubungan dagang dengan Israel, The Holy Man, gelar dari majalah Newsweek buat Gus Dur, sudah menelan pil pahit di negerinya sendiri. Dia dianggap mengkhianati pendukungnya yang sebagian besar umat Islam. Toh IMF tetap memperlakukan Gus Dur seperti para pendahulunya, Soeharto dan Habibie, dengan Letter of Intent yang detil dan memberatkan. Bahkan untuk menetapkan tarif dasar listrik dan BBM pun, kabinet Gus Dur masih didikte. Banyak orang khawatir, Yahudi connection membiarkan Gus Dur sendirian menghadapi masalahnya. Mereka menunggu lebih banyak pengorbanan budayawan yang amat bersahabat dengan Israel itu, seperti Anwar Sadat yang akhirnya ditembak mati oleh tentaranya sendiri.

Bukan tidak mungkin dengan pengalaman mereka mempecundangi negara lain, bahkan PBB dan AS, Yahudi connection lebih mampu memanfaatkan Gus Dur

(Indonesia) daripada sebaliknya. PMA-PMA lama dari AS dan Eropa yang masuk lewat jalur kolusi-korupsi-nepotisme atau yang telah merusak lingkungan, seperti Freeport, tidak bisa dihukum di sini, karena adanya hubungan langsung itu. Indonesia jadi ibarat anak kecil yang mau memancing ikan paus, akhirnya malah ditarik menuju samudera. Yahudi connection mungkin terlalu besar buat Gus Dur. Kalau saja Indonesia mau menjadikan pengalaman Turki, Mesir dan Yordania yang membina hubungan dengan Israel lebih dulu sebagai pelajaran, mungkin keinginan membuka hubungan langsung akan surut. Ketiga negara itu bahkan telah berhubungan diplomatik dengan Israel. Toh aliran modal dan bantuan lobi Yahudi yang hebat, tidak juga mereka dapatkan. Negara-negara itu tetap tidak maju dan dimusuhi komunitas Yahudi.

Akhirnya tekanan politik internasional terhadap Pemerintah soal pelanggaran HAM, yang diharapkan bisa dicabut, terutama di Tim-Tim, ternyata berjalan terus. Bahkan tidak berkurang. Mereka memperlakukan para jenderal Indonesia yang terlibat, sebagai penjahat perang, seperti di Yugoslavia dan Rwanda. Lobi Yahudi di Kongres dan Senat AS rupanya belum berkenan mengurangi tekanan itu buat Gus Dur, sahabat mereka yang demokratis dan bersahabat.

### **3. Tekanan Dunia Luar terhadap Gus Dur**

Sikap bersahabat Gus Dur terhadap kaum Yahudi dan AS akhirnya memang terbukti tak berbuah manis. Popularitasnya terus menurun di dalam negeri. Sedang tekanan dunia luar, terutama AS dan lembaga-lembaga yang terkait dengannya tidak berkurang. Mereka terus

meminta presiden keempat RI itu memberi konsesi lebih banyak, seperti telah diprediksi oleh para pakar. Gus Dur pun akhirnya tak tahan lagi dan mengungkapkannya dengan segala kekesalan kepada media massa. "Baru saja ada satu masalah, yaitu sebuah perusahaan yang menjadi pembawa bendera kita di dunia internasional, karena punya ekspor yang besar dan sanggup membuat otomotif murah. Ini hendaknya dipelihara. Tetapi karena kebetulan ia punya urusan dengan bank, yang ikut di dalam BPPN, harus dilikuidasi. Sampai-sampai Stanly Fisher dari Washington telepon saya dan menanyakan hal itu. Saya katakan kita punya komitmen internasional. Tidak boleh perusahaan ini gulung tikar hanya untuk memuaskan nafsu Anda!" demikian Presiden Abdurrahman Wahid dihadapan ratusan ribu massa PDI Perjuangan di Istora Senayan pada HUT PDI ke 27.

Bocoran Presiden Abdurrahman Wahid soal tekanan pihak luar di atas, meskipun membuat banyak orang tercengang, sebenarnya memang bukan barang baru. Dari dulu sudah banyak disebut orang bahwa Amerika Serikat (AS) dan konco-konconya penguasa dana melakukan tekanan kepada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Orang juga tahu bahwa tidak semua tekanan itu didasari niat baik untuk memajukan ekonomi dan industri republik. Jelas bukanlah tujuan mereka membantu Indonesia agar nantinya dapat berdiri sendiri dalam ekonomi dan industri, seperti Jepang atau Cina yang kemudian menjadi pesaing. Para kreditor kakap tersebut tentu tidak ingin menciptakan Jepang kedua di kawasan lain. Berbagai kepentingan ikut mengotori niat baik pemberian kredit itu. "There is no free lunch," tak ada makan siang gratis, begitulah kata pepatah. Begitu pula dalam

praktiknya. Bila bisa mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya di saat normal, mengapa tidak diambil saja sekalian dengan ayam petelur emasnya di masa krisis. Jadi yang punya sudah boleh dikubur tanpa mengurangi sumbangannya ke kocek si pemberi kredit.

Jadi wajar bila pemerintah negara-negara pemberi kredit, sering secara salah kaprah disebut negara donor, melakukan tekanan di sana sini untuk mencapai tujuan mereka. Caranya bisa bermacam-macam. Yang paling lazim dan sopan tentunya dengan memberi saran agar jabatan-jabatan tertentu dalam pemerintahan diberikan kepada orang-orang yang dianggap bisa mengamankan kepentingan mereka. Saran Duta Besar AS untuk Indonesia agar Menteri Keuangan Bambang Soedibyo tidak mengganti Ketua BPPN Glen MS Yusuf beberapa waktu lalu, masuk dalam kategori ini. Sayangnya selain Amien dan Gus Dur, tidak banyak yang tersinggung terhadap tekanan santun Duta Besar AS itu. Padahal dalam soal tekan-menekan AS adalah biangnya.

Bahkan cara kasar dan blak-blakan dalam urusan menjaga kepentingan perut warga sendiri juga tidak jarang dilakukan negara adidaya itu. Invasi militer AS di Panama ketika mau menggusur Ortega (awal '90-an), adalah bukti tak terbantah. Bukti lainnya yang kasat mata adalah penyerangan terhadap Irak, juga Vietnam dan Korea Utara jauh sebelumnya. Negara adidaya yang lain, seperti Inggris, Prancis, Rusia, Cina juga tidak kalah biadabnya dalam hal ini. Bantuan Prancis, Den Mark kepada Militer Aljazair yang menghancurkan domokrasi, ketika partai Islam FIS memenangi 81% suara dalam putaran I pemilu negeri itu, adalah contohnya. Daftar

tekanan pihak luar ini bisa diperpanjang, tapi sekadar bahan renungan cukuplah itu.

Cara menekan yang lebih halus dan aman juga tidak kurang. Yang paling mudah tentu dengan memasukkan poin-poin di dalam perjanjian pinjaman. Tujuannya sederhana saja: agar dana yang dipinjamakan segera balik dengan membawa keuntungan berlipat, sekaligus membuka jalan kepada perusahaan-perusahaan mereka untuk ikut berebut rezeki. Hadirnya peritel raksasa asal Prancis (Continent dan Carrepour) di pusat kota Jakarta lewat butir-butir LoI seperti pernah disinggung di bagian lain buku ini adalah salah satu contohnya. Contoh lain akan segera kita dapat bila mau memelototi poin-poin kesepakatan dengan lembaga pemberi kredit internasional itu. Penunjukan konsultan dengan alasan mencegah kebocoran, misalnya, juga termasuk dalam cara menekan halus ini. "Dari dulu kita sering mendapat pinjaman dari negara-negara maju, seperti Jepang, AS, Belanda, Prancis, Inggris, dan lain-lain. Lalu mereka mewajibkan kita mengambil konsultan yang mereka tunjuk. Alasannya sih mulia," tutur Pengamat Ekonomi dari INDEF Didik J Rachbini sinis.

Bagi Didik itu sebenarnya merupakan korupsi yang dilegalkan. "Uang pinjaman itu sebagian balik lagi kepada mereka dalam bentuk *fee* buat technical assistance, yang manfaatnya hampir tidak ada," jelasnya cepat. "Mestinya kita hitung juga keuntungan dari technical assistance yang mereka berikan. Bila tidak ada atau terlalu minim dibanding *fee* yang amat mahal itu, sebaiknya pemerintah menghentikannya. Sebab itu juga merupakan pemborosan duit pinjaman yang nantinya harus kita bayar berikut bunga," sambungnya serius. "Lihat saja konsultan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional). Setelah kita

bayar mahal, apa sih hasilnya?" imbuh Didik retorik.

Sorotan kritis Didik memang tidak berlebihan. Sejak dibentuknya lembaga itu sampai berakhirnya Kabinet Reformasi Pembangunan Habibie dan naiknya Gus Dur, kinerja BPPN tetap saja payah dan kedodoran. Padahal dia telah membayar konsultan asing Lehman Brothers Inc dan JP Morgan, dibantu konsultan lokal PT Danareksa dan PT Bahana. Sampai bulan Juni 1999 saja biaya yang dikeluarkan buat membayar konsultan Rp 650 miliar yang diambil dari APBN, dan USS 10 juta diambilkan dari proyek Bank Dunia buat keperluan manajemen, audit, hukum, teknologi, pembukuan, dan akuntansi.

Glen terang-terangan mengakui ini di depan Komisi VIII DPR-RI (28 Juni 1999). Dari bagian APBN, kata dia, sekitar Rp 400 miliar merupakan biaya untuk membayar konsultan asing. Menurutnya seluruh biaya itu diperlukan untuk melakukan kegiatan finansial, legal due diligence, serta tindakan penyehatan lebih 50 bank, serta pengelolaan seluruh aset di BPPN. Pertanyaannya kemudian: sudah sebandingkah hasil yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan itu? Jawaban atas pertanyaan dasar itu amat meragukan. Buktinya sampai saat ini belum terlihat adanya bank yang menjadi sehat setelah dirawat. Sementara aset-aset perusahaan yang diserahkan kepada BPPN pun amat seret untuk diuangkan.

Meskipun demikian BPPN tak punya nyali untuk mengurangi atau memulangkan para konsultan asingnya. Bahkan sampai habis masa 'baktinya' lembaga super itu tak pernah mengurangi konsultannya. "Kita masih memerlukan keahlian mereka," kata Deputy Ketua BPPN Farid Harijanto pendek ketika ditanyakan masalah tersebut waktu itu. Dalam perjalanan waktu boleh dibilang telah

terjadi hubungan simbiosis mutualisme antara BPPN dan lembaga-lembaga konsultannya. BPPN bertindak sebagai tuan yang baik hati, sedang para konsultan itu mem-*back up*-nya dengan berbagai pemikiran dan analisis. Makin lama suatu persoalan bisa dibereskan, makin banyak keuntungan dan penghasilan yang bisa disedot. Sebenarnya bila kita mau berpikir logis, BPPN tidaklah butuh waktu begitu lama untuk menyelesaikan urusan dengan 1.668 debitornya.

Persoalannya BPPN, menurut mantan Direktur Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) Christianto Wibisono, terjebak pada birokrasi yang kalau bisa mempersulit, kenapa mesti diperlancar. Sepintas memang ada 1.668 perusahaan. Padahal kalau ditelusuri lebih dari 300 adalah grup yang mengakumulasi utang hampir 60%. Ratusan perusahaan masuk kategori sedang dan kecil. Namun kategori triliunan bisa dinegosiasi langsung dengan 30 raksasa debitor, yang salah satunya adalah BUMN dan anak perusahaan di bawah BUMN. Berpijak pada cara pandang seperti itu, memang harus diakui tidaklah pantas BPPN berlama-lama.

Pandangan serupa juga dilontarkan Rizal Ramli. Lebih jauh lagi dia menyarankan agar pemerintah melakukan renegosiasi kepada para konsultan yang dipakainya, agar mereka terpacu untuk memberikan benefit sebesar-besarnya. "Saya rasa harus dilakukan renegosiasi dengan konsultan-konsultan itu. Mereka sudah dibayar mahal. ternyata prestasi mereka cuman segitu. Mereka harusnya ikut bertanggungjawab dong!" kata Rizal. "Saya sih kalau asingnya bagus, bisa meningkatkan nilai tambah buat kita, ya kita sewa. Tapi pengalaman di BPPN menunjukkan, yang naik itu cuman biayanya aja, US\$ 60 juta

setiap satu semester. Hasilnya? Nilai tambahya, jangan-jangan kurang dari itu. Apa dong peranan konsultan jadinya?" tambah Rizal tertawa sinis.

Namun kinerja buruk seperti itu, kata Rizal, bukan monopoli BPPN saja. Sebagai contoh ekonom kritis itu menunjuk Bank Mandiri (BM). Selama ini BM diketahui menggunakan konsultan asing kelas dunia mulai Deutsche Bank (restrukturisasi keuangan), Andersen Consulting (teknologi informasi dan controlling), Mc Kenzie Consultants (restrukturisasi kantor cabang dan back office), Hay Management Consultants (sumber daya manusia), Indo-Ad Ogilvy & Matter (komunikasi), sampai Hadiput-ranto, Hadinoto & Partner/Baker & Mc Kenziey, dan Wiriadinata & Widyawan (konsultan perusahaan). Dengan menggunakan segudang konsultan hebat, Bank raksasa yang dikomandoi Robby Djohan itu, mestinya bisa melaju cepat. Nyatanya, menurut Rizal, biaya rekap bank itu bukannya berkurang, tapi malah bertambah. Banyak orang curiga jangan-jangan para konsultan asing itu sengaja berlama-lama, agar bisa mengambil keuntungan lebih banyak lagi.

Rizal tak dapat menerima tekanan yang terus saja dilakukan pihak luar terhadap Kabinet Persatuan Abdur-rahman Wahid-Megawati, terutama IMF yang sengaja mengulur-ulur waktu pen-cairan pinjaman agar bisa menyetrir Gus Dur. Padahal Pemerintahan Gus Dur dan Megawati telah lahir dari sebuah pemilihan yang demokratis. Mestinya mereka mendukung pemerintahan baru yang legitimated ini untuk memperbaiki keadaan. Memang benar negeri ini belum lagi pulih dari penyakit kronisnya akibat krisis dan overdosis utang warisan rezim Soeharto. Republik memang memerlukan hadirnya pemodal asing di



segala sektor, agar roda ekonomi dapat berputar menyusul Korea Selatan dan Thailand yang sudah tumbuh 8% dan 4,5% tahun 1999.

Rizal tak mengada-ada. Indonesia jelas akan menyambut baik datangnya modal asing lewat pintu mana pun dia masuk. Mau masuk lewat pasar modal, silakan! Apalagi bila mau investasi langsung dengan bikin pabrik, menambang logam dan mineral, membuka perkebunan, infrastruktur, kelistrikan, perbankan, dan sebagainya. Wajah pemerintah Gus Dur yang bersahabat, tentu akan menyambut gembira setiap masuknya modal dan investor baru. Apalagi negara juga masih memerlukan utang baru dari lembaga-lembaga kreditor internasional seperti IMF, Bank Dunia, Consultative Group on Indonesia (CGI), dan lain-lain seperti dulu. Namun harus diingat, karena dia lahir dari sebuah pemilihan yang demokratis, Indonesia baru di bawah Gus Dur jauh lebih dewasa. Akibatnya cara-cara main belakang menjadi tidak populer lagi.

Pernyataan kesal Presiden IV RI di depan massa PDI Perjuangan, yang merasa mau diarahkan lewat telepon oleh Stanly Fisher dalam kasus Texmaco, diharap banyak orang akan menjadi batu pertama pemerintahan yang lebih berdaulat. Untuk itu tentu saja Presiden dan para pembantunya harus banyak berkeringat. Maklum sejak krisis melanda republik bulan Juli 1997, dan IMF masuk sebagai 'juru selamat,' mengurus negara ini sudah menjadi ringan, seolah manajemen kenegaraan telah di-outsource kepada IMF. Memang benar keadaan negara amat mengkhawatirkan, karena rontoknya dunia usaha. Memang benar rakyat menggelepar akibat anjaknya daya beli, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan lain-lain. Namun Presiden dan menteri-menterinya tidak perlu berpikir

keras. Mereka cukup duduk manis, selanjutnya ikuti petunjuk IMF yang menjanjikan pinjaman US\$ 43 miliar.

Memang ada keberatan dari sebagian kalangan ekonom waktu itu terhadap LoI yang terlampau detil dan banyaknya poin yang merugikan republik. Itu pun hanya terbatas pada hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak, misalnya: pembukaan kembali keran ekspor kayu log, pencabutan subsidi listrik tanpa mempermasalahkan perjanjian kolusif PLN dengan investor listrik swasta yang kelewat mahal, masuknya ritel asing raksasa (Carrefour dan Continent), dan lain-lain. Di luar itu harus diakui sebagian besar penduduk republik adem ayem saja saat IMF mengambil-alih 'pemerintahan' pada masa akhir Kabinet Pembangunan VI Soeharto. Orang juga maklum ketika hal itu berlanjut pada Kabinet Pembangunan VII yang paling keras bau nepotismenya. Begitu pula pada masa pemeritahan Habibie yang dianggap tidak legitimated. Sejak krisis pemerintah RI, seolah dipaksa IMF untuk menjadi pak turut yang manis, sehingga pengalaman kerjanya semakin minus.

Namun kini Indonesia telah memiliki Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih wakil rakyat lewat pemilu demokratis. Jadi rasanya IMF tak punya alasan lagi untuk menuntun langkah kabinet dengan LoI yang detil sampai titik komanya. Lain halnya kalau memang Gus Dur bersama Tim Ekuinnya minta ditatah terus seperti anak kecil belajar jalan. Pemerintah Gus Dur bersama Megawati, yang terpilih secara demokratis dan mempunyai dukungan nyata, seharusnya memiliki semua syarat untuk melakukan pilihan-pilihan yang lebih berdaulat. Selama 100 hari pemerintahannya, Gus Dur tidak diberi kesempatan untuk berlaku kreatif, melakukan berbagai impro-

visasi dan inovasi dalam menjalankan pemerintahan dan membangun negaranya yang sudah telanjur porak-poranda. IMF menjadi super kabinet yang keputusannya tidak bisa ditawar, sampai-sampai untuk menaikkan gaji pegawai saja, Presiden harus meminta persetujuan IMF. "Kita harus berani melakukan terobosan baru dalam demokrasi. Kita angkat saja IMF sebagai anggota DPR/MPR. Kita jadikan dia satu fraksi sendiri. Jadi kalau kita jalankan semua petunjuk IMF, maka kita sudah punya dasar hukumnya," kata Didik sinis sambil tertawa ngakak ketika dimintai komentarnya waktu itu.

Meskipun disampaikan dengan setengah bercanda, Pembantu Rektor I Universitas Mercu Buana itu jelas tidak membual. Simak saja LoI yang ditandatangani pemerintah 20 Januari lalu. Di sana terpatir jelas apa-apa yang harus dikerjakan pemerintah, termasuk tanggal bulannya. Pada sub sistem perbankan, misalnya, IMF menetapkan target waktu penggantian top manajemen Bank BNI pada akhir Januari 2000, Februari top manajemen BRI mendapat giliran. Rekapitalisasi kedua bank pelat merah itu dilakukan pada Juni 2000. Lalu pemerintah diminta menjual Bank Bali dan Bank Niaga melalui tender terbuka pada semester I/2000.

LoI itu dibagi dalam 4 bagian: pendahuluan, strategi ekonomi jangka menengah, kebijakan ekonomi makro 1999/2000 dan 2000, dan reformasi struktural. Di sana pun ditekankan agar pemerintah mempercepat restrukturisasi sektor korporasi melalui sejumlah kebijakan yang tenggat waktunya juga ketat. Sebelumnya lembaga kreditor itu meminta pengurangan subsidi listrik dan bahan bakar minyak, dengan konsekuensi naiknya tarif kedua kebutuhan penting itu. Tujuannya cuma satu, agar

pemerintah bisa cepat bayar utang. Soal banyak yang kecewa dan sengsara, itu bukan urusan IMF.

Tak berhenti sampai di situ. Presiden Abdurrahman Wahid juga dipaksa mengikuti kemauan AS untuk membeli listrik swasta Paithon I yang anyir KKN dan mahal. Lewat Sekretaris Kedutaannya, negara adidaya itu mengancam akan mengenakan berbagai sanksi menyeramkan bila pemerintah tidak menjalankan isi perjanjian dengan Paithon I. Gus Dur, presiden yang dipilih di era reformasi, akhirnya menyerah. Presiden tak jadi membawa masalah listrik itu ke meja hijau. Gus Dur berhasil menyenangkan AS, tapi tak mampu menghibur rakyatnya yang kecewa. Di sisi lain Indonesia kehilangan Dirut PLN Adhi Satria, yang punya prinsip. Pemerintah terpaksa mentolerir mark up proyek sampai di atas US\$ 1 miliar lebih, saat negara lagi kesulitan dana pembangunan. Dampak dominonya akan segera menyusul, karena masih ada 27 proyek serupa lagi yang telah ditandatangani pada masa Soeharto. Indonesia nampaknya dipaksa kembali ke jalan lama yang menguntungkan asing setelah beberapa saat berbelok ke jalur reformasi yang berpihak kepada rakyat sendiri.

Kemenangan asing yang juga bikin ketar-ketir anak negeri adalah kasus masuknya Standard Chartered Bank (Stanchart) ke Bank Bali (BB). Maklum BPPN telah membuat perjanjian yang tidak masuk akal, yang memberi peluang kepada bank asing itu mendapat keuntungan dalam segala situasi. Jelasnya seperti ini: bila BPPN membatalkan perjanjian, maka BPPN harus membayar kepada Stanchart sebesar US\$ 25 juta. Namun bila pembatalan itu atas inisiatif Stanchart, maka BPPN harus membayar Stanchart sebesar US\$ 2,5 juta. Ambooy,

bagaimana perjanjian seperti ini bisa dibuat? Hebatnya lagi selama di bawah kontrolnya, Stanchart berupaya memasukkan 30 orangnya ke BB yang harus digaji oleh bank milik Rudy Ramli itu. Meskipun tidak seluruhnya berhasil, tapi BB sudah mengeluarkan banyak uang untuk membayar kepongahan orang-orang Stanchart. Perjanjian pat-gulipat dengan asing itu memang akhirnya kandas.

Tentu saja persoalan tidak berhenti sampai di situ. Dengan kekuatan modalnya, yang memang dibutuhkan pemerintahan baru, asing akan tetap berusaha menyeter Gus Dur di berbagai bidang. Sepinya aksi kongkrit pemerintah terhadap penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Aceh dan di Ambon juga membuktikan dominasi asing. Aceh dan Ambon, karena asing tidak mempedulikannya, maka persoalannya bisa diselesaikan kapan saja bila ada waktu. Berbeda sekali dengan kasus serupa di Timor Timur, yang berjalan cepat karena dorongan AS dan negara-negara pemberi pinjaman di barat sana.

Satu hal yang sulit dimengerti adalah sikap mendua negara-negara barat terhadap Gus Dur yang bersahabat. Di satu sisi Gus Dur mendapat kehormatan di AS, dan Presiden Bill Clinton menyebutnya "So sweet!" Begitu pula sambutan yang diterimanya di negara-negara Eropa. Semuanya menyambut hangat, dan penuh canda. Di sisi lain kehormatan dan keramahan itu tidak terlihat pada kebijakan mereka terhadap pemerintahan Gus Dur dan Megawati. Buktinya tidak ada *hair cut* (pemotongan utang) buat pemerintah, di samping pemerintah bersama tim ekuinnya memang tidak mau meminta. Takut disangka miskin atau tidak dipercaya kreditor. Padahal semua pakar ekonomi sepakat pemotongan utang itu amat diperlukan,

sebab beban pembayaran cicilan utang ditambah bunga sudah melebihi jumlah pinjaman yang masuk. Padahal sikap sok gentle pemerintah itu tetap saja tidak menimbulkan kepercayaan. Buktinya Bank Dunia mulai tahun ini meminta pre payment 1% dari total pinjaman yang akan diberikan CGI sebesar US\$ 4,7 miliar. Pasangan Abdurrahman Wahid-Megawati yang dipilih secara demokratis nampaknya sedang diarahkan untuk menjauhi keinginan-keinginan rakyatnya sendiri. Ini tentu pada gilirannya akan sangat berbahaya. Bukan tidak mungkin rakyat lewat para wakilnya akan mencabut kembali mandat yang telah diberikan itu.

#### **4. Gus Dur Menuai Badai**

Roda ekonomi telah menggelinding perlahan, ketika Abdurrahman Wahid menerima tongkat estafet dari Habibie. Tak seperti pendahulunya, Gus Dur mewarisi Indonesia yang relatif lebih stabil. Nilai Rp, misalnya, telah bertengger manis di kisaran Rp 6.700/US\$ (dari Rp 15.000-17.000/US\$). indeks harga saham gabungan (IHSG) berhasil dikerek ke level 700 (dari di bawah 300) berkat kepiawaian Menneg BUMN Tanri Abeng merestrukturisasi perusahaan-perusahaan BUMN dan membawa sebagian melantai di bursa saham. Sedang kalangan pengusaha kecil-menengah dan koperasi relative memperoleh martabatnya sebagai entitas ekonomi bangsa berkat perjuangan Menkop/PKM Adisasono. Dengan bekal itu saja, ditambah legitimasi yang dimilikinya sebagai presiden bersama wapres yang dipilih secara demokratis, 'kapal Indonesia' mestinya sudah bisa melaju kencang. Namun Gus Dur bersama kabinetnya menolak mewarisi semua hasil kerja keras kabinet transisi. Ini sebetulnya

merupakan kepu-tusan yang berani, meski tidak strategis, bila tak bisa disebut menyusahkan diri sendiri. Sebab ketika hasil jerih payah Habibie dan kabinetnya ditolak, maka yang tinggal cuma kesulitan warisan rezim orba yang gagal akibat berbagai salah urus puluhan tahun, utang menggunung, dan resep-resep usang dan mendetil dari IMF yang juga telah gagal.

Gus Dur memang tidak menyadari betul bahwa konsekuensi logis dari penolakan itu adalah kembali ke titik nol. Kalau saja setelah kembali ke titik nol, kendaraannya telah siap dan lebih bagus, mungkin tak masalah. Namun bila harus kembali ke titik nol dengan berjalan kaki dan kendaraan yang mau dipakai belum lagi dibuat, maka rakyat yang dibawanya bisa pusing dan muntah-muntah, karena merasa diajak berputar-putar dalam keadaan lapar dan lelah. Itulah yang kemudian terjadi, terutama dalam urusan membangun pengusaha kecil menengah dan koperasi yang tiba-tiba dibuat mandeg.

Gus Dur, juga kaum reformis pada umumnya, terjebak pada pemikiran bahwa biang keladi salah urus dan kebangkrutan Indonesia adalah rezim orba, dan Habibie adalah wayang di tangan mantan penguasa orba. Tak heran bila menolak hasil jerih payah Habibie atau menganggapnya tak ada menjadi penting, meskipun Gus Dur sendiri baik secara kasat mata maupun samar-samar, sebenarnya tak terlalu anti orba, Golkar dan keluarga Cendana. Semua orang pasti belum lupa bagaimana cucu pendiri NU itu menggandeng mba Tutut ke pesantren-pesantren untuk menggolkarkan santri, sekaligus menggembosi PPP menjelang pemilu 1997. Tindakannya kalis dari kritik dan hujatan kaum nahdiyyin. Bahkan kaum reformis pun lebih senang melupakan semua tindakan

kontroversial sang kyai. Gus Dur tetap dianggap bagian dari kaum reformis dan memiliki jalan pikiran jenial, yang tidak bisa dimegerti orang awam begitu saja. Jadi segala tindakannya tidak perlu dipertanggungjawabkan kepada siapa pun. Di mata pendukungnya yang fanatik Gus Dur boleh melakukan apasaja, kapan saja, di mana saja. Contohnya tak sulit dicari. Yang paling kongkrit mungkin saat dia membela perusahaan penyedap makanan Ajinomoto. Perusahaan yang dihujat jutaan konsumen karena menggunakan pankreas babi sebagai salah satu bahan bakunya ini, dibela presiden kyai ini, sehingga masalahnya tak sampai ke meja hijau.

Sebagai mantan aktivis LSM, presiden kyai ini seakan tahu betul ada gudang harta yang kuncinya berada di tangan Soeharto dan sebagian lagi disembunyikan para konglomerat peliharaan cendana di luar negeri. Keyakinan semacam itu pada gilirannya menuntun Gus Dur untuk merangkul cendana sebagai jalan pintas mendapatkan dana pembangunan yang lagi seret. Agenda nasional menggiring Soeharto ke meja hijau disisihkan Gus Dur sekalian dengan berbagai alasan. Padahal krisis ekonomi telah mencapai dasar, ketika Abdurrahman Wahid memulai pemerintahannya pada akhir 1999. Bahkan roda ekonomi sudah mulai menggelinding pelan, seperti terlihat dalam paparan sebelumnya. Jadi ekonomi Indonesia cuma punya satu kemungkinan, tumbuh. Bahkan bila pemerintah tidak melakukan apa-apa sekalipun, kata Didik, ekonomi akan tetap tumbuh. Akhir tahun lalu dia memprediksi, bahwa pada tahun 2000 Indonesia bakal membukukan pertumbuhan 3-4%. Perkiraan senada juga diungkap Rizal Ramli, sebelum diangkat menjadi Menko Perekonomian, pada waktu hampir bersamaan.

Prediksi kedua pengamat ekonomi itu memang terbukti. Di tengah anggaran negara yang minus sekitar Rp 42 triliun, sepanjang tahun 2000 ekonomi Indonesia menggeliat pasti. Bila tahun 1999 ekonomi Indonesia cuma membukukan pertumbuhan 0,13%. Tahun ini ditaksir mencapai 3-4%. Sementara inflasi bertengger pada angka terkendali, sekitar 7%. Naiknya harga BBM dan tarif dasar listrik, yang memacu demo dan pesimisme di kalangan bawah, seperti tak mampu menahan roda ekonomi yang mulai menggelinding ini. Bahkan protes berbagai kalangan atas kelakuan presiden yang sering nyeleneh, tak beraturan, dan mengecewakan tidak membuat Indonesia makin terpuruk.

Bila mau dihitung kekecewaan itu sebenarnya sudah menggunung. Di awal pemerintahannya dia memecat Menteri Investasi/Ketua BKPM Hamzah Haz, orang PPP dari NU, dengan alasan tak jelas. Lalu presiden kyai itu menambah masalah dengan cara merintis hubungan dagang langsung dengan Israel. Akibatnya poros tengah, yang mengantarnya ke istana, mulai terluka. Kemudian giliran PDI Perjuangan dan Partai Golkar dibikin miris lewat pemecatan Menteri BUMN Laksamana Sukardi dan Menteri Perindustrian Yusuf Kalla. Alasannya korupsi, satu alasan yang mencoreng wajah partai.

Kalangan nasionalis awam dan tentara kemudian dibikin Abdurrahman sesak napas dengan keinginan mencabut Tap MPR soal pelarangan PKI. Campur tangannya yang kasar di militer untuk mempercepat reformasi di tubuh TNI, menimbulkan persoalan baru yang sulit diselesaikan, dan ini disinyalir berdampak panjang terhadap stabilitas dan keamanan negara sampai kini. Daftar ini bisa diperpanjang, misalnya dengan grila politiknya

Sofyan Wanandi CS, yang dibiarkan Gus Dur merecoki Menko Ekuin Kwik Kian Gie. Kabinet Persatuan akhirnya memang dipereteli sendiri oleh Gus Dur, dan diganti dengan orang-orangnya sendiri. Terakhir dia mendepak Kwik dari PDIP dan Menkeu Bambang Soedibyo (PAN). Rizal Ramli kemudian diangkat menjadi Menko Perekonomian menggantikan Kwik. Sedang Menkeu Bambang Soedibyo (PA) diganti dengan Prijadi yang pernah tak lulus fit & proper test BI saat dicalonkan menjadi Dirut BNI.

Tak dapat dipungkiri itu semua membuat Gus Dur lebih mudah dijadikan sasaran tembak bersama. Dukungan kepadanya dari wakil rakyat di DPR semakin kecil. Bahkan 'anak-anak TK' berhasil menggiring Presiden untuk menjelaskan kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Mereka juga berhasil memaksa Gus Dur membagi kekuasaannya dengan Wapres Megawati. Gus Dur lalu mengeluarkan Keppres soal pendelegasian urusan teknis kenegaraan sehari-hari kepada Wapres, yang dimentahkannya sendiri cuma dengan memo. Orang semakin kecewa memang, tapi Gus Dur tak peduli. Hobinya melanglang buana juga tidak berkurang, meskipun anggaran untuk itu sudah habis.

Orang menyebut tindakannya itu sebagai escapisme, pelarian. Dia dianggap menyadari ketidakmampuannya menyelesaikan berbagai persoalan, tapi ogah mundur. Dia memilih untuk melupakannya dengan pelesiran jauh. Ini mungkin ada benarnya, mengingat persoalan di dalam negeri yang dibengkalaikannya memang banyak. Padahal semuanya butuh tindakan cepat dan terprogram. Lihat saja di Riau dan Kalimantan ada tuntutan agar pemerintah pusat memberi kesempatan daerah mengelola sumber-sumber alam sendiri. Aceh, yang perlu penyelesaian politis menyangkut pembagian rezeki yang adil antara pusat dan

daerah, malah dibiarkan merana setelah upayanya yang gagal mengatasi masalah di situ.. Papua Barat berubah menjadi batu sandungan, menyusul Kalimantan dan Ambon (Maluku) yang sudah minta korban jiwa dan harta terlalu banyak. Di bagian lain di tanah air bencana alam susul-menyusul. Ini pun tak terlalu merisaukan Presiden.

Dalam situasi seperti itulah ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2000 tumbuh 3-4%. Kenyataan ini cukup fenomenal. Memang masih ada catatan di sana sini. Pertumbuhan kali ini, kata mantan Menkeu Fu'ad Bawazier, lebih banyak dipacu oleh konsumsi yang tertunda, dan ekspor komoditas. "Dulu orang menunda konsumsinya karena krisis, dan menyimpan uangnya di bank. Sekarang mereka mengonsumsikannya, mungkin cuma bunganya saja. Sedangkan ekspor yang meningkat, itu bukan kerja pemerintah. Itu kerja swasta. Mereka ekspor, karena pasar dalam negeri menciut dan nilai Rp amat rendah terhadap dolar," jelas Fu'ad berteori.

Anggota Fraksi Utusan Daerah (Jogja) MPR itu memang tak mengada-ada. Pemerintahan Gus Dur sampai saat ini belum berhasil menjinakkan dolar. Bahkan beberapa bulan terakhir mata uang Paman Sam itu semakin liar, sehingga mencapai Rp 9.500/US\$, jauh di atas APBN yang mematok Rp 7.300/US\$. "Bila Gus Dur tidak mengubah kebiasaannya yang suka berubah-ubah, saya khawatir keadaan bukannya membaik, tapi malah memburuk. Investasi asing tetap enggak masuk. Padahal tanpa masuknya investasi baru, pertumbuhan tak bisa langgeng," kata Fu'ad bersungguh-sungguh.

Pandangan serupa juga dikemukakan Direktur Institut of Development & Economic Analysis (IDEA) Revrisond Baswir. Lebih jauh lagi, menurutnya, ada tiga faktor yang

mendorong pertumbuhan kali ini. Pertama, konsumsi yang tertunda. Kedua, ekspor komoditas, itu pun terbatas pada komoditas pertanian dan elektronik, yang diuntungkan oleh rendahnya nilai Rp terhadap US\$. Ketiga, naiknya harga minyak dan gas bumi. Namun restrukturisasi ekonomi riil sebenarnya belum pernah terjadi. Sektor riil masih mandeg. Sebagai bukti dia menunjuk kapasitas produksi pabrik terpakai sampai saat ini cuma 40%. "Investasi asing tak kunjung masuk. Yang terjadi malah *capital outflow* sekitar US\$ 4 miliar selama tahun 2000," tuturnya menyakinkan. "Realitas itu lebih banyak disebabkan tingkat ketidakpastian investasi dan *country risk* yang tinggi. Di situlah kegagalan pemerintahan Gus Dur," sambung Sony, begitu dia disapa, singkat.

Lebih jauh lagi Dr. Scott Younger, Chairman Strategic Intelligence, berpendapat tahun 2001 Indonesia masih mungkin mencapai pertumbuhan 4-5%, tingkat petumbuhan yang sudah dicapai pada kuartal ketiga 2000. Untuk itu ada beberapa hal yang mesti dilakukan pemerintah di luar masalah restrukturisasi utang dan reformasi politik. Yang paling penting adalah deregulasi untuk meningkatkan investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur dan manufaktur. Dalam jangka pendek ini akan mengundang investasi asing langsung. Itu sangat penting untuk menjaga kontinuitas pertumbuhan dalam jangka menengah dan panjang.

Scott mengakui tidak gampang memprediksi skenario Indonesia tahun depan. Menurutnya protes memang terhenti sejenak, karena sekarang Romadhon. Awal Januari nanti semuanya akan berlanjut dengan kekuatannya yang makin besar menentang presiden dan para eksekutifnya. Apalagi bila keterlibatan presiden dalam

Bulog Gate dan Brunei Gate dapat dibuktikan. "Bila Gus Dur bertahan, saya tidak yakin tekanan akan berhenti, kecuali dia dan para eksekutifnya mengubah cara kerja mereka dan memperbaiki hubungannya dengan legislatif," tutur Scott hati-hati. "Namun bila dia tak bisa bertahan, dan Megawati meng-gantikannya, maka perkembangan politik dan ekonomi akan sangat bergantung pada wakil presiden yang dipilihnya dan kabinet yang dibentuknya. Yang diperlukan adalah seorang menteri koordinator yang mumpuni dengan seminimal mungkin campur tangan politik untuk bertindak sebagai pemimpin kabinet (chef de cabinet). Juga dibutuhkan menteri-menteri yang berorientasi pada kerja. Bila ini terjadi, saya yakin ekonomi akan tumbuh signifikan. Rp yang kini terlampau kempis (under valued) bisa menguat," tambahnya tenang.

Pandangan seperti itu juga dikemukakan James van Zorge, konsultan Van Zorge, Heffernan & Associate. Van Zorge melihat panitia khusus DPR akan banyak berperan dalam 6 bulan ke depan. Bila mereka berhasil membuktikan keterlibatan Gus Dur dalam Bulog Gate dan Brunei Gate, maka itu akan menjadi amunisi besar yang bisa memaksa Gus Dur turun. "Dalam kondisi itu bila dia tetap mempertahankan kedudukannya, maka ekonomi tidak akan meningkat. Bahkan mungkin akan semakin terpuruk, karena banyaknya kerusuhan akan meningkatkan country risk Indonesia di mata investor. Rupiah semakin lemah terhadap US\$," paparnya prediktif. "Sebaliknya bila Mega naik menggantikan Gus Dur, maka investor luar akan wait and see. Mereka akan melihat dulu siapa-siapa yang diangkat Mega di jajaran kabinet, bagaimana kredibilitas mereka, bisa diterima pasar atau tidak," sambungnya cepat. Bila semuanya oke, maka investasi akan segera

masuk dan memacu pertumbuhan. Hal yang bakal menjadi ganjalan nantinya, kata Van Zorge, adalah utang Indonesia yang sudah kelewat besar. Ada baiknya pemerintah menegosiasi Paris Club lagi untuk mereschedule-nya, sebab nantinya bisa menjadi bibit krisis.

Berpijak pada perkembangan terakhir, antara lain hubungan Gus Dur dengan elit politik di DPR yang semakin runcing. Apalagi setelah presiden menganggap pansus illegal. Juga kecamaannya terhadap Menteri Senior Singapura Lee Kuan Yeu, yang merusak pamor Gus Dur di dunia internasional. Sony mempersiapkan 4 skenario yang bakal berpengaruh terhadap bisnis tahun depan. Pertama, Mega naik tanpa menimbulkan konflik horisontal. Bila ini terjadi, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh sampai 6%, bahkan bisa mencapai 8% tahun depan, karena investasi asing akan masuk bersamaan dengan dukungan internasional yang sudah lama dikantongi Mega. Restrukturisasi ekonomi akan berjalan lancar. Skenario kedua, Mega naik dan terjadi konflik horisontal. Iklim bisnis akan terganggu. Investor akan menunggu sampai keadaan pulih. Pertumbuhan ekonomi akan menurun, nilai Rp semakin kempis.

Skenario ketiga, kata Sony, Gus Dur bertahan dan tetap menjalankan kebiasaannya membuat bola liar politik. Situasinya tidak akan lebih baik dari kondisi saat ini. Ekspor akan berjalan terus, karena komoditi itu mengejar dolar. Indonesia akan mengalami kesulitan membayar utang dan kebutuhan impor lainnya. Pemerintahan akan rapuh, terjadi instabilitas politik yang akan mengganggu iklim investasi. Skenario keempat, Gus Dur tetap Presiden dan melakukan perubahan fundamental, terutama dalam gayanya mengurus negara. Tindakan-tindakannya mulai



terprogram, penuh perhitungan. Hubungannya yang sempit runyam dengan DPR dan Singapura diperbaiki. Ekonomi akan segera tumbuh pesat, mungkin di atas 8%. "Ini adalah kondisi ideal, tapi mungkin cuma mimpi," kata Sony tertawa.

Akhirnya Gus Dur, presiden pertama yang dipilih secara demokratis itu, dipaksa lengser lewat impeachment. Dia terpaksa keluar dari istana. Megawati sang wapres menggantikan posisinya tanpa pergolakan berarti. Mega, yang merasa itu memang sudah menjadi haknya karena telah memenangi pemilu, kemudian mengangkat hamzah Haz sebagai wapres. Mega mendapat jaminan dari kaum reformis tidak akan diturunkan di tengah jalan seperti Gus Dur. Bagaimanapun juga presiden Abdurrahman yang penuh energi dan ide itu telah membuktikan kepada dunia luar, bahwa Indonesia bisa diurus tanpa bantuan dana dari IMF. Selama pemerintahan Gus Dur lembaga super kuasa itu tak pernah mencairkan pinjamannya. Rizal, yang menduduki posisi Menko Perekonomian, melansir gagasan sekuritisasi aset. Ide ini sebenarnya sangat bagus. Kalau saja Gus Dur tak terlalu cepat lengser, sekuritisasi aset mungkin akan menjadi alternatif paling bagus untuk mebebaskan Indonesia dari utang. Karena aset-aset negara, terutama barang tambang bisa dinilai dulu, kemudian pemerintah bisa mengeluarkan saham yang kemudian diperjual-belikan di pasar modal untuk membiayai pembangunan.

Republik, yang sudah telanjur sakit parah ini, tak bisa sembuh di tangan Mega. Maklum presiden wanita, yang sangat patuh pada IMF ini, hanya mendapat obat generik dari kreditor dunia itu. Sakitnya malah bertambah parah akibat kesalahan diagnosa sang dokter.



## Indonesia di Tangan Satrio Piningit

Setelah presiden Abdurrahman dimakzulkan MPR, Megawati Soekarnoputri langsung didaulat menjadi presiden RI kelima. Sejak awal banyak orang memang sudah menganggap kursi RI-1 memang haknya, karena dialah Pemimpin partai yang membawa PDIP memenangi pemilu legislatif 1999. Kharisma putri Bung Karno ini telah menghasilkan energi luar biasa di akar rumput, sehingga Golkar, mesin politik orba itu, terlempar ke tempat kedua. Partai yang sempat membuat seluruh Jakarta menjadi merah di masa kampanye ini menyedot suara 35 juta pemilih, jauh melampaui Golkar yang cuma mendapat 22 juta suara. Partai-partai baru, tak peduli apa pun yang mereka tawarkan, tak mampu menarik suara pendukung fanatik partai ini. Meskipun kalah di sidang umum MPR pada Oktober 1999 dalam pemilihan presiden, Mega akhirnya memperoleh kembali haknya itu pada 23 Juli 2001 dari tangan MPR. Dia menjadi presiden wanita pertama yang memimpin republik berpenduduk 90% muslim ini dan wanita keempat di Asia yang menduduki kursi nomor satu

dalam pemerintahan di Asia setelah Indira Gandhi (India), Benazir Butho (Pakistan) dan Khalida Zia (Banglades). Negara adikuasa semacam Rusia (komunis) dan AS (liberal) belum pernah dipimpin wanita, bahkan memiliki calon presiden wanita pun belum pernah. Namun Mega tidak hanya didaulat menjadi presiden menggantikan Gus Dur, tapi sekaligus mendapat jaminan tidak akan diturunkan di tengah jalan. Ini salah satu kelebihan Mega yang pendiam. Padahal tak ada satu pun Negara di dunia, baik yang komunis, sosialis, maupun liberal, yang memberi jaminan seperti itu kepada presidennya.

MPR dan kaum reformis memang membuktikan jaminannya itu, sehingga tanah air tampak lebih adem dibanding masa Gus Dur yang panas dan tegang. Meski demikian repubik, yang sudah telanjur sakit parah ini, tak bisa sembuh di tangan Mega. Maklum presiden wanita, yang sangat patuh pada IMF ini, hanya mendapat obat generik dari kreditor dunia itu. Sakitnya malah bertambah parah akibat kesalahan diagnosa sang dokter. Mega yang tak punya pertahanan akhirnya memang kebobolan dari segala arah. Di luar negeri dia tak bisa membela tenaga kerja Indonesia yang dikejar-kejar aparat negara lain tempat mereka mencari nafkah. Bahkan mereka diusir secara tidak hormat dari negara jiran Malaysia, sehingga pulau Nunukan dipenuhi TKI merana. Di dalam negeri dia tak bisa mencegah penjualan aset-aset negara yang bagus-bagus kepada asing oleh para pembantunya. Bahkan bank-bank besar semacam BCA dan lain-lain, yang dengan susah payah disehatkan dengan biaya ratusan triliun, cepat berpindah tangan kepada asing atau konsorsium lokal dan asing dengan harga obral di zaman ini. BUMN, yang bagus dan strategis, semacam Indosat ikut

dijual. Juga dua kapal tanker Pertamina, yang sangat dibutuhkan BUMN minyak itu, terlego. Hal-hal seperti itu pada gilirannya kembali membuat anak negeri menggigil. Kementerian BUMN yang dipimpin Laksamana Sukardi dan BPPN yang saat itu dipimpin Syafruddin Arsyad Temenggung dituduh banyak kalangan, terutama kaum reformis, sebagai balai lelang. Semuanya terjadi atas tekanan IMF.

### **1. Sebuah Skenario Nista tentang Masa Depan**

Memang ada gejala yang tidak menyenangkan sehubungan dengan lembaga pembawa bendera demokrasi itu sejak krisis mengguncang republik. Sebab lembaga super kuasa yang mewakili dunia luar ini, tak memberi dukungan berarti kepada Gus Dur yang terpilih lewat proses demokrasi. Mereka malah sibuk menekan Gus Dur agar melaksanakan poin-poin LoI yang tak kalis dari motif cari untung. Seperti pada masa Habibie, lembaga itu pun menjadikan dana yang dimilikinya sebagai alat penekan. Habibie cukup berani dan piawai mengayuh di antara tebing: tuntutan reformasi dan tebing dana IMF, sehingga keduanya bisa diakomodasi. Penjualan aset-aset negara tak berjalan mulus di periode Habibie karena adanya perlawanan Menneg BUMN Tanri Abeng dan Adi Sasono yang mengusung ide-ide ekonomi kerakyatan, redistribusi aset, dan lain-lain. Sedang Gus Dur, yang dianggap bagian dari kaum reformis, justru sejak awal mendapat tekanan keras IMF. Sehingga terpaksa dihadapi Gus Dur juga dengan keras, antara lain lewat idenya membangun poros Jakarta-Beijing, Tokyo-ew Delhi, sekuritisasi aset, dan sebagainya untuk membiayai pembangunan.

Gus Dur tak bersedia menjual aset-aset potensial dan perusahaan-perusahaan pembawa bendera Indonesia



**Gus Dur**

semacam Texmaco, apalagi melikuidasinya, cuma karena perusahaan tersebut punya utang. Akibatnya sampai dia dimakzulkan MPR, IMF tak pernah mencairkan pinjamannya kepada kabinet persatuan Gus Dur-Mega. Sebaliknya buat pemerintahan Megawati, yang sejak awal memang dikehendaki dunia luar, IMF mudah mencairkan pinjaman. Namun buat Mega itu tidak gratis. IMF meminta kepatuhan sebagai imbalan, terutama

dalam program penjualan aset-aset negara. Begitulah satu demi satu kemudian aset-aset negara yang bagus-bagus dan potensial berpindah tangan ke asing atau konsorsium untuk sekadar menutup bolong-bolong APBN, sehingga rakyat terdidik negeri ini makin khawatir terhadap masa depan bangsa. Kaum reformis pun ikut dibuat kesal.

Soemarjoto kesal. Pemilik UD Tambak Udang Berdikari itu merasa disepelkan oleh manajemen BCA. Pasalnya proposal kredit yang diajukan Berdikari, untuk ketigakalinya, ditolak. Bank dengan 15 juta lebih nasabah itu, yang mayoritas sahamnya telah dikuasai asing (konsorsium Farallon - Djarum), menilai business plan-nya tak layak. BCA juga meminta agunan 145% dari pinjaman, yang tak bisa dipenuhi Soemarjoto. Padahal menurutnya prospek usaha tambak udangnya, seluas 30 ha di daerah Sukabumi, amat bagus. Hasilnya setahun bisa sampai 1.200 kg (1,2 ton) per ha atau total 36 ton per tahun. Cuma 2 tahun terakhir Berdikari gagal panen akibat serangan hama dan kekeringan. Gagal di BCA, Soemarjoto

lantas pindah ke Bank Niaga, tapi jawaban yang diterimanya tak beda. Lalu dia pun menunjukan proposal-nya ke Bank Danamon. Tak dinyana bank swasta nasional tersebut, yang juga telah berpindah tangan ke asing, pun menolak proposal Berdikari dengan alasan mirip-mirip.

Tak kuat menanggung biaya operasional, termasuk untuk membayar 70 pekerja tambak, Soemarjoto lalu menjual Berdikari. John Albert, seorang pengusaha makanan asal Kanada, lalu menggantikan posisinya sebagai bos. Dengan proposal dan business plan yang lebih kinclong, John berhasil menyedot dana segar dari BCA untuk mengakuisisi Berdikari. Untungnya si bos baru cukup baik hati, dia merekrut Soemarjoto untuk bekerja di tambak, yang dibangunnya sendiri, sebagai supervisor. Berdikari berubah status menjadi Penanaman Modal Asing (PMA). Kinerja perusahaan tambak udang windu itu memang terus meningkat dengan pertumbuhan 20%/tahun. Berdikari tercatat sebagai salah satu jagoan devisa, karena 90% hasilnya diekspor ke Kanada, AS, Uni Eropa. Sisanya yang 10% dilego di dalam negeri untuk memasok kebutuhan restoran-restoran dan hotel-hotel bintang lima.

## **2. Menuju Liberalisasi Ekonomi tanpa Batas**

Apa artinya semua itu bagi Indonesia? Bagi sebagian orang mungkin banyak artinya. Tambak itu toh ada di Indonesia, sebagian besar pekerjaanya orang lokal, dan US\$ yang didapat memperbesar cadangan devisa negara. Cuma bagi sebagian lagi keberhasilan Berdikari mengekspor produknya bukanlah apa-apa. Bahkan sebaliknya. Secara keseluruhan skenario di atas boleh disebut tragedi nasional. Apalagi bila diingat orang Indonesia cuma

menjadi kuli saja di tambak itu, termasuk bekas pemiliknya. Meminjam istilah mantan Menkop/PKM Adisasono, yang semacam itu tak bisa disebut pembangunan Indonesia, tapi pembangunan di Indonesia.

Adi tak berlebihan. Bayangkan John Albert, yang notabene adalah pengusaha Kanada, dengan mudahnya menggunakan uang nasabah Indonesia di BCA untuk membuka usaha atau membeli perusahaan Indonesia. Lalu mengekspor sebagian besar hasilnya. Devisa yang didapat boleh dikempit sendiri atau dikirim ke negerinya, karena kita tidak menganut rezim kontrol devisa. Sisanya untuk memenuhi kebutuhan orang-orang kaya atau turis-turis asing, yang menginap di hotel atau makan di restoran mewah yang juga dimiliki asing. Sebab semua pembatasan buat investasi asing sudah dipangkas International Monetary Fund (IMF) lewat Memorandum of Economic and Financial Policies (MEFP) atau yang lebih dikenal dengan Letter of Intent (LoI).

Dengan dipangkasnya semua pembatasan tersebut, Indonesia dibawa IMF memasuki liberalisasi ekonomi tanpa batas, tanpa reserve pula. Dengan demikian, asing bisa masuk ke segala sektor ekonomi dari mulai perbankan, perkebunan, pertambangan, perikanan, kelistrikan, pengadaan air bersih, sampai ke bisnis hotel, restoran, properti, otomotif, radio, televisi, media cetak, jasa, perkapalan, penerbangan, serta periklanan, dan ritel alias eceran. Kepemilikannya bisa sampai 100% pula, jauh di atas Malaysia yang membatasi kepemilikan asing cuma sampai 30% saja. Jadi di satu sisi IMF memang berperan sebagai dewa penolong yang mau membantu pemerintah Indonesia keluar dari krisis dengan dana dan resepnya seperti diyakini para pendukung liberalisasi ekonomi. Di sisi

lain IMF tak segan menjadi agen pemasaran bagi produk negara-negara penyandang dana. Menurut Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan kabinet Persatuan Abdurrahman Wahid. Tidak semua program yang ditawarkan IMF dalam LoI ada hubungannya dengan perbaikan ekonomi. Sebagian boleh dianggap sebagai poin-poin titipan dari negara-negara donor. Rizal memang tidak membual. Contoh paling nyata adalah kebijakan impor beras, gula, kedele, bawang putih, dan lain-lain yang amat merugikan petani Indonesia, tapi amat menguntungkan petani negara-negara donor tersebut yang memang sedang mencari pasar buat surplus produknya.

Pandangan Rizal dibenarkan Kwik yang di Kabinet Gotong-royong Mega-Hamzah ditaruh di posisi Ketua Bappenas. Wewenang Bappenas sendiri sudah dipangkas habis dan diberikan kepada Depkeu, sehingga Kwik bisa bertapa di situ. Toh dia tak habis pikir mengapa pemerintah rela didikte oleh mereka. Padahal negara-negara maju tersebut tidak mau melakukan hal seperti itu. "Ketika IMF menekan kami untuk membebaskan bea masuk beras dan gula sampai nol, Eropa, Amerika, dan Jepang memperlakukan bea masuk yang tinggi buat produk-produk pertanian. Itu dilakukan demi melindungi para petani mereka. Apakah itu bukan nasionalisme, yang bahkan tidak adil dan mau menangnya sendiri?" ungkap Kwik seperti membanding sikap anggota kabinet yang manut saja pada LoI yang ditetapkan IMF, di acara 100 tahun Muhammad Hatta.

Poin lain yang juga mengundang kecurigaan adalah poin LoI yang menyuruh pemerintah membuka pintu lebar-lebar buat masuknya peritel-peritel raksasa asing (al: Carrefour dan Continent yang kemudian merger)

untuk ikut merebut pangsa pasar ritel pada saat Indonesia lagi terpuruk. Padahal sebenarnya Indonesia membutuhkan investor baru yang membangun pabrik di sini, sehingga bisa mengatasi pengangguran yang terus membengkak. Bukan pedagang besar yang justru bisa mematikan pelaku sektor informal yang bermodal pas-pasan. Daftar ini bisa diperpanjang, misalnya dengan dibukanya kembali keran ekspor kayu gelondongan (bulat) yang pernah dilarang bertahun-tahun. Ini membuat produsen mebel dan kerajinan kayu dalam negeri kesulitan bahan baku. Sementara perusahaan sejenis di luar negeri yang sempat mati suri, hidup lagi. Pada saat sama kebijakan ini juga ikut memperparah kerusakan hutan di tanah air. Detil-detil poin LoI bisa dilihat lagi di bab II, ketika membahas GBHN Super dari bawah Meja IMF.

Masih dalam konteks menjadi agen yang membawa kepentingan asing ke Indonesia, IMF menetapkan jadwal ketat buat swastanisasi aset-aset bagus BUMN dan penjualan aset-aset prospektif dari BPPN. Lemahnya pemerintah dan lumpuhnya tim ekonomi Kabinet Gotong Royong Mega-Hamzah rupanya berhasil dimanfaatkan lembaga kreditor internasional itu. Sebagai bukti bisa dilihat bagaimana pemerintah lebih suka melepas aset-aset bagusnya kepada asing dengan harga super diskon, hamper tanpa perlawanan. Padahal kalau mau bermain cantik, jual saja kepada koperasi, dana pensiun, atau sekalian dipegang sendiri. Toh aset-aset itu sudah bagus dan menguntungkan. Kalau para pelaku ekonomi manca negara itu memang hebat, mestinya biar mereka keluar biaya dulu untuk menyehatkan perusahaan sakit. Yang bagus biar dimiliki bangsa sendiri.

Upaya seperti itu pernah dicoba pada kabinet Tran-

sisi Habibie lewat PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang diusung Menkop/PKM. Cuma kebijakan pro rakyat ini tak jalan mulus, karena ditentang banyak pihak dengan berbagai cara. Sedang Adi diberi gelar sebagai 'the most dangerous man in Indonesia' oleh media asing dan para pendukung liberalisasi, persis seperti penjajah dulu menggelari para pejuang kemerdekaan. Aset bagus semacam BCA, misalnya, yang hidup dengan obligasi pemerintah sebesar Rp 58 triliun dan setiap bulan disusui dana segar Rp 500 miliar lebih (Rp 7 triliun lebih setahun berupa bunga obligasi), 51% sahamnya dijual hanya seharga Rp 5,3 triliun. Atau seluruhnya Cuma Rp 10 triliun. Mengapa dijual dengan harga semurah itu? Kwik tak dapat menerima pembodohan seperti itu. Apalagi argu-mennya cuma karena itu sudah tertera dalam LoI, dan untuk menarik investor asing.

Gejala berpindahnya aset-aset bagus ke tangan asing, sebenarnya sudah lama terlihat. Cuma kasus BCA membuat sebagian orang semakin cemas. Apalagi IMF tak berhenti di situ. Pemerintah Mega malah diberi jadwal ketat untuk menjual sahamnya di Bank Niaga (September). Lalu Bank Danamon dan Bank Mandiri. Tujuannya untuk menutup bolong-bolong APBN. Menurut catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam waktu kurang dari 1,5 tahun terakhir saja (2000-2002) sudah ada 400 lebih aset Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang berganti kulit menjadi PMA. Bahkan PT Indofood Sukses Makmur (ISM), perusahaan makanan milik Grup Salim, ikut bermetamorfose menjadi PMA. Caranya? Dia jual 60% sahamnya kepada perusahaan patungan asing (Grup Nissin dan First Pacific), yang sebagian sahamnya dimiliki Salim. Padahal grup usaha itu

masih punya utang BLBI Rp 52 triliun lebih (BCA) yang tak kunjung diselesaikannya.

Namun aksi Salim menukar baju perusahaannya menjadi PMA dari segi hukum tidaklah salah-salah amat. Sebab Indonesia memang menganut rezim devisa bebas. Artinya arus modal bebas saja keluar masuk negeri ini. Ada yang diparkir sebentar di pasar modal, bak hewan yang mau digemukkan, lalu pergi lagi setelah mendapat capital gain. Ada pula yang dipakai melahap aset-aset bagus BUMN dan BPPN atas dukungan penuh dan jadwal ketat IMF. Yang lebih canggih dari itu juga ada. Dana yang dibawa lari (capital flight) grup-grup usaha besar, yang enggan membayar utang-utangnya kepada pemerintah, balik lagi ke sini dengan bendera negara lain (PMA). Dana itu digunakan untuk membeli aset-aset yang diserahkan mereka ke BPPN dengan harga obral, persis seperti mimpinya Kwik beberapa tahun silam. Jatuhnya harga aset-aset Salim menjelang penjualannya oleh BPPN, antara lain Indomobil dan BCA, diyakini banyak pihak penuh dengan nuansa seperti itu.

Melihat semua kejadian di atas tentu dapat dimaklumi bila Kwik dan Adi menilai penjualan aset-aset negara dengan cara seperti itu sebagai pengkhianatan kepada rakyat dan generasi yang akan datang. Sebab anak negeri telah diasingkan dari kepemilikan aset-aset negaranya. "Bila tahun lalu dan tahun ini defisit neraca pembayaran Indonesia ditutup dengan penjualan aset-aset, lalu beberapa tahun ke depan mau jual apa? Jadi harus ada upaya yang lebih kreatif dalam mengatasi keadaan ketimbang mengikuti semua kemauan IMF yang juga memiliki naluri pemangsa. Nanti bisa jadi rekolonisasi model baru, dimana asing menguasai semua sumber daya

kita," jelas tokoh LSM itu memberi peringatan.

Apa yang dikhawatirkan orang-orang semacam Adi, Kwik, dan Rizal memang patut mendapat perhatian anak bangsa. Selain karena apa yang telah dipaparkan di atas, gejala rekolonisasi itu memang berjalan cepat. ExxonMobil Oil, Inc misalnya, gencar menegosiasikan pemerintah untuk memperpanjang Technical Assistance Contract (TAC) pertambangan di lapangan minyak Cepu. Kontrak itu sebenarnya baru akan berakhir 2011. Mereka ingin memperpanjang kontrak itu 20 tahun lagi (dari 2011-2030), karena adanya penemuan ladang baru. Berdasarkan studi Lemigas diketahui lapangan TAC Cepu, terdiri atas 4 sumur minyak (Banyu Urip, Sukowati, jabaran, dan Alas Tua, menyimpan minyak sampai 1,4 miliar barel. Jadi bukan hanya 250 juta barel, seperti perkiraan semula. Cadangan gasnya ada 8,772 triliun kaki kubik.

Sebelumnya ladang itu 51% dimiliki PT. Humpus Petragas dan 49% Ampolex Cepu Pte,Ltd, anak perusahaan Mobil Oil. Setelah krisis melanda republik, saham Humpus kemudian diambilalih ExxonMobil melalui Mobil Cepu Ltd, sehingga 100% saham pertambangan menjadi milik perusahaan asing asal AS tersebut. ExxonMobil rupanya mau mengikuti jejak Freeport, yang berhasil memperpanjang kontraknya awal dekade '90-an atau 10 tahun sebelum kontraknya berakhir. Bila diperpanjang dengan kompensasi US\$ 300 juta, misalnya, Pertamina dan pemerintah memang beruntung mendapatkan dana segar yang besar, tapi adilkah itu buat rakyat? Menurut ahli ekonomi Pakistan Abul A'la Maududi barang tambang adalah pemberian Tuhan untuk seluruh penduduk negeri, baik yang hidup sekarang maupun yang bakal lahir.

Dengan bersandar pada ajaran Al Qur'an yang



menetapkan zakat barang tambang 20%, dia berpendapat bahwa 20% hasilnya mesti dialokasikan untuk rakyat, baik yang ada sekarang maupun yang bakal lahir. Dari dana itulah pemerintah mesti menjamin pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan penduduk berpenghasilan rendah. Jadi pemerintah, kata dia, cuma berhak melakukan bagi hasil dari yang 80% itu. Nampaknya teori Maududi layak dipertimbangkan, agar pemerintah tidak mengulangi kesalahan orde baru dengan Freeport, dan lain-lain yang boleh dibilang menguasai hampir 100% tambang emas di Timika itu. Dalam perjalanan waktu ternyata ExxonMobil tidak saja berhasil memperpanjang TAC sampai 2030, tapi sekaligus naik kelas dari technical assistance contract menjadi bagi hasil dan operator blok minyak tersebut pada 14 Maret 2006.

Tak dapat dipungkiri mental bangsa ini, terutama elit pemerintahnya, agak rendah bila sudah berhadapan dengan hal-hal yang berbau asing. Apalagi bila mereka juga menyediakan kredit. Tak heran bila IMF yang jago ngomong dan banyak duit diperlakukan sebagai dewa. Itulah faktor utama yang membuat Indonesia sulit keluar dari krisis. Mereka menyangka orang-orang IMF itu makhluk-makhluk angkasa luar yang tidak punya motif mencari keuntungan. Mavia Berkeley sangat berperan merusak local genius bangsa ini dalam mengatasi masalahnya sendiri. "Bersama kroni dan komradornya mereka biasa menghujat dan menakut-nakuti melalui penguasaan dan pengendalian pembentukan opini publik. Seolah bila lepas dari IMF, maka investor asing tak akan masuk. Lalu kalau investasi asing tak masuk, maka kiamatlah Indonesia," jelas Kwik dalam peringatan 100 tahun Muhammad Hatta. Politikus PDIP itu menilai pandangan seperti itu

membuat kita tidak kreatif dan tak berani melakukan inovasi baru. Padahal masih banyak opsi yang bisa diambil. "Cina dengan penduduk 1,2 miliar lebih, yang menutup diri puluhan tahun, setelah dibuka ekonominya ternyata 'not so bad.' Dalam bidang ekonomi kelompok Mavia Ekonomi Orde Baru ini, kata dia, sangat kuat, karena mereka berkesempatan membangun jaringan nasional maupun internasional.

Pendapat serupa juga dikemukakan Rizal dan Adi pada kesempatan berbeda di kantor SWA. Lebih jauh lagi menurut Adi penentu kebijakan ekonomi saat ini tidak beda dari tim ekonomi orde baru. Mereka menganut teori neo economy classic. Menurut Adi konsep ini mengasumsikan bahwa negara-negara yang saat ini masuk kategori terbelakang akan lebih maju, jika melakukan intensifikasi faktor modal. Karena dengan itu akan terbentuk competitive equilibrium (keseimbangan kompetitif). Mereka menganggap modal asing dapat menarik ekonomi nasional lebih cepat. Padahal masuknya modal asing tidak serta merta menyelesaikan persoalan dasar bangsa ini, karena persoalan dasar bangsa ini adalah kemiskinan absolut dan pengangguran. Sedangkan modal besar yang masuk sangat kecil sekali fungsinya dalam pengadaan kesempatan kerja.

Sebagai bukti Adi menunjuk data yang dikeluarkan Shijuro Urata (JICA 2000). Mantan menkop/PKM, yang pernah digelari lokomotif ekonomi kerakyatan itu, tak mengada-ada. Dari data yang disajikan Shijuro Urata terlihat jelas usaha kecil menengah (UKM) adalah penyumbang terbesar perekonomian Indonesia. Dari segi unit ekonomi UKM menyumbang 99,8%, sedang usaha besar cuma 0,01%. Dalam penyerapan tenaga kerja UKM

menyerap 99,4% tenaga kerja, sedang usaha besar hanya 0,06%. Sumbangan terhadap GDP, UKM juga sedikit lebih tinggi dari usaha besar. UKM menyumbang 41% GDP, sedang usaha besar menyumbang 40,64%.

Prestasi itu tentunya luar biasa mengingat UKM cuma menerima 10% kredit yang disalurkan perbankan. Sementara usaha besar menyedot 81,21%. "Jadi dalam perspektif ekonomi, pertama mestinya pemerintah berupaya memperbesar kesempatan kerja, karena ini menyangkut harga bangsa dan stabilitas. Itu sebabnya di negara maju kesempatan kerja merupakan indikator ekonomi. Presiden AS Theodore Roseveld saja dalam kampanyenya mengusung program job for all. Mungkin ini utopis bagi pemerintah sekarang. Jangankan menciptakan lapangan kerja, Tenaga Kerja Indonesia dicambuki seperti hewan di Malaysia, pemerintah tak membela," kata Adi heran. "Kedua, pemerataan kesempatan berusaha. Ini untuk mencegah situasi monopolistik," sambung Adi datar.

Bagi Adi mengikuti semua titah liberalisasi ekonomi IMF amat berbahaya. Bahkan banyak kalangan memiliki penilaian lebih ekstrem lagi. Mereka menganggap carut-marutnya perekonomian nasional saat ini sebenarnya tak lepas dari dorongan lembaga super itu. IMF lah, menurut mereka, biang keladi liberalisasi ekonomi Indonesia yang kebablasan, tanpa reserve. IMF, kata A Prasetyan-tono, menciptakan ketergantungan seperti obat bius pada negara-negara yang menjadi pasiennya. Bahkan sementara di Indonesia dia dipuji-puji oleh penganut ekonomi neo liberal, di negerinya sendiri, tepatnya di Washington DC, kredibilitasnya mendapat sorotan tajam ribuan demonstran tahun lalu. IMF bersama World Trade Organization (WTO) dan Bank Dunia ditempatkan sebagai

'the iron triangle' yang menyebabkan penderitaan di banyak negara dunia ketiga. Mereka menuntut agar lembaga ini dibubarkan untuk menata kembali ekonomi dunia baru yang lebih manusiawi.

Meskipun demikian menurut pengamat ekonomi dari FEUI Faisal H. Basri tidak ada yang namanya liberalisasi kebablasan. Liberalisasi merupakan tuntutan iklim usaha saat ini. Kalaupun sekarang keadaan menjadi tidak menentu akibat diterapkannya liberalisasi, itu karena kita tidak menjalankan kaidah-kaidah liberalisasi dengan baik. "Kalau kita ingin memberikan peluang kepada pasar untuk berperan, sadarilah bahwa itu harus sejalan dengan kemampuan kita untuk menciptakan institusi, aturan, jaring-jaring atau pengaman, agar pasar itu beradab," jelas Faisal berteori tanpa mau menyebut aturan macam apa yang dibutuhkan agar pasar jadi beradab. "Yang kebablasan dan lebih dahsyat justru liberalisasi keuangan. "Bank-bank asing dapat beroperasi dengan sangat bebas di Indonesia, dan asing boleh memiliki 100% saham di pasar modal," tambahnya mengingatkan. Pendapat serupa juga dilontarkan Bambang P.S. Brodjonegoro dari LPEM-UI, dan Ketuanya Muhammad Ikhsan. Lebih jauh lagi, kata Ikhsan, pasar itu harus dilengkapi dengan institusi yang namanya KPPU (Komite Pengawas Persaingan Usaha) untuk memonitor apakah kompetisi telah dijalankan secara benar atau tidak.

Sebagaimana Bambang dan Ikhsan, Faisal berpendapat Indonesia sekarang mengalami krisis perbankan dan krisis korporate. Keduanya menjadi pasien BPPN. "Seharusnya BPPN menjalankan fungsinya untuk menyehatkan perbankan. Jangan cuma tahunya jual aset," kritik Faisal. "Bank-bank itu kan mendapat BLBI dan obligasi rekap.

Mengapa obligasi yang Rp 650 triliun itu yang balik cuma 20%?" sambungnya retorik. "Itu karena BPPN menjual aset secara tidak benar. Koruptor-koruptor bersarang di BPPN. Nah kalau kita mau keluar dari krisis ini, kita harus memberantas korupsi, terutama di BPPN," tegasnya. Faisal tak berlebihan. BPPN dan Menneg BUMN memang tak sepatutnya dibiarkan berjalan sendiri, tanpa blue print yang transparan. Apalagi ulah Ketua BPPN Syafruddin Temenggung, yang mestinya berupaya agar aset-aset itu laku dengan harga tinggi, malah kadang menjatuhkan harga. Contohnya ketika dia melontarkan pernyataan bahwa asset recovery-nya cuma 25% sebelum hari H. Ada apa ini? Ikhsan tak sependapat dengan Faisal. Baginya penjualan aset yang dilakukan saat ini adalah bentuk pengorbanan bangsa ini untuk keluar dari krisis. "Seperti main catur, harus ada bidak yang dikorbankan," kata Ikhsan enteng.

Menurut Ketua LPEM-UI itu yang harus dilakukan saat ini oleh bangsa Indonesia adalah menjalankan semua kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya dengan IMF. Sebab jika kita terus berdebat mengenai keberadaan IMF, kita akan makin terpuruk. Pernyataan menyerah dan ketundukan membuta intelektual sekelas Ikhsan tentu berbahaya buat masa depan bangsa ini. Karena kepada orang-orang semacam Ikhsanlah sebenarnya rakyat sedang menitipkan masa depan. Bila intelektual semacam ini sudah kehilangan keberaniannya untuk berkreasi, maka bersiaplah untuk menjadi pak turut for ever. "IMF kita butuhkan untuk menjadi broker, bukan uang yang kita harap dari lembaga itu. Kita belum mampu melakukan negosiasi dengan begitu banyak kreditor yang memiliki karakter berbeda-beda," ujarnya seperti mengakui kele-

mahannya sendiri.

Untungnya tak semua intelektual kampus kita memandang IMF sebagai dewa. Koleganya sendiri Bambang menilai IMF sebenarnya juga punya andil dalam krisis perbankan. Atas tekanan IMF lah, kata dia, 16 bank ditutup pada November 1997 tanpa persiapan. Akibatnya kepercayaan kepada bank domestik anjlok. Ini terus berlanjut dengan pembekuan 38 bank, pem-BTO-an, penggelontoran BLBI sampai Rp 144 triliun tanpa kontrol, dan rekapitalisasi perbankan yang menelan obligasi Rp 650 triliun. Beban itu kini mesti dipikul rakyat lewat APBN dengan mengurangi berbagai subsidi, termasuk buat pendidikan. Jadi ketika negara-negara maju sudah menggratiskan pendidikan, bahkan membanjirinya dengan beasiswa, pendidikan di negeri ini mesti makin mahal. Rakyat juga membayar lebih mahal buat listrik. Pada masa Mega-Hamzah yang menjadi anak manis IMF listrik bisa naik 4 kali dalam setahun. Sedang BBM digantungkan pada harga internasional. Artinya setiap US\$ melonjak dan negara mendapat pemasukan lebih besar dari minyak, rakyatnya harus merogoh saku lebih dalam. Ini sebenarnya tidak adil, sebab rakyat yang tidak ikut membangkrutkan Negara dipaksa ikut menanggung beban. Sedang IMF boleh tetap menjadi dewa dan mengeluarkan teori-teori usang yang dibuat seolah baru. Sedang BI, yang gagal menjadi pengawas yang baik terhadap para banker, tak mendapat sangsi apa pun.

Bambang tidak menampik bahwa BI ikut bertanggungjawab, karena dia tidak menjalankan fungsinya sebagai pengawas perbankan dengan benar. Bank-bank bisa dikerjai sendiri oleh pemiliknya dengan pelanggaran batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dahsyat, yang

dikucurkan ke kelompok usaha sendiri, sampai sekarat. Sampai saat ini baru Bob Hasan, bos Bank Umum Nasional, yang digiring ke meja hijau dan masuk bui di penjara Nusa Kambangan. Sebagian bos besar lainnya henggang ke Singapura dan hidup enak di situ tanpa perasaan bersalah. Padahal beban yang harus ditanggung bangsa ini atas ulah mereka luar biasa besar. Apalagi setelah BII milik Grup Sinar Mas, yang selama krisis tak mengalami masalah, kelojotan pada 1999 akibat pelanggaran BMPK dahsyat yang dialirkan ke grup sendiri. Pada kemana para pentolan BI? Memang penyelesaiannya kemudian, kata CEO Sinar Mas Multi Artha Indra Widjaja, tidak menggunakan BLBI. Namun orang tetap saja mempertanyakan kelalaian BI. Padahal sebagian orang waktu itu menganggap krisis perbankan sudah berlalu.

Sedang beberapa tahun sebelumnya, seiring anjloknya kepercayaan orang kepada bank domestik, pemerintah dan BI yang disetir IMF telah membuka pintu lebar-lebar bagi bank asing untuk menyedot keuntungan besar dari dua arah. Pertama, mendapat dana segar berlimpah, pindahan dari bank domestik yang ditinggalkan nasabahnya. kedua, naiknya suku bunga sampai 70% akibat kebijakan uang ketat untuk mengerem pelarian modal. Ini membuat bank-bank sehat ikut sakit kesulitan likuiditas, sektor riil tersungkur karena sedikitnya uang beredar. Di sisi lain bank asing menarik keuntungan besar sambil onggang-onggang kaki, cukup menaruh dananya di SBI yang berbunga tinggi. Lebih jauh lagi bank-bank asing dibebaskan beroperasi, yang membuat bank-bank lokal - terutama kelas menengah, makin terjepit. Padahal di AS yang liberal itu ruang gerak bank asing dibatasi. Mereka tak dibolehkan membuka cabang di negara-negara bagian

lainnya. Ke depan nanti pengawasan terhadap bank tentu makin sulit. Siapa yang bisa mengontrol bank asing dan bank-bank domestik yang sudah ganti kulit menjadi PMA untuk mendanai proyek dan perusahaan asing dengan dana nasabah Indonesia? Mereka juga bakal bermain lincah di era otonomi daerah. IMF tak peduli.

Keadaan tidak menyenangkan ini sebenarnya sudah lama diprediksi Rizal. Dalam artikelnya pada 7 Oktober 1997 dia menyarankan agar pemerintah tidak mengundang IMF, sebab akan menjerumuskan Indonesia ke dalam krisis yang lebih parah. Dia menyebut lembaga itu sebagai tukang jagal. IMF ahli amputasi, bukan dewa penyelamat. Toh esok harinya, 8 Oktober 1997 pemerintah sudah mengundang IMF. Padahal, kata Rizal, sarannya didasarkan pada studi empiris. Negara-negara yang pernah ditolong IMF tak sampai 30% yang berhasil. Itu pun hanya negara-negara kecil semacam Panama. Selebihnya yang 70% gagal, lalu menjadi pasien kambuhan. Sebagai contoh Rizal menunjuk Turki, Argentina, Brazilia, dan Rusia. Sedangkan Meksiko yang sejak 1960 menjadi pasien IMF, baru stabil setelah dibukanya perdagangan bebas dengan AS. "IMF selalu memberikan obat generik. Artinya sama untuk semua negara. Misalnya untuk bidang fiskal dan moneter, IMF selalu menyarankan pengetatan. Akibatnya perekonomian semakin rontok," jelas Rizal.

Kebijakan itu, kata Rizal, juga dianggap aneh oleh ekonom AS peraih hadiah nobel Joseph E Stiglitz, karena menyarankan konsep yang tak pernah dijalankan negara maju ketika menghadapi krisis. "Ketika terjadi krisis dahsyat di AS tahun 1930-an (Malayse), ekonominya justru dipompa moneter agar tingkat bunga rendah, dan ekonomi berangsur pulih," papar Rizal ilustratif. Menurut

Rizal setiap negara yang dibantu IMF, pasti jadi pasien kambuhan. Itu karena solusinya selalu menambah utang. "Selain diobati dengan utang, IMF juga mengguyurnya dengan berbagai kebijakan yang sering diluar fokus. Indonesia mendapat 120 prasyarat. Lebih tidak masuk akal lagi di awal krisis, meskipun kita mendapat pinjaman US\$ 11 miliar dari IMF, uang itu tak boleh dipakai menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Uang itu dipakai membayar utang sindikasi bank asing," paparnya cepat. Dalam hal ini berarti IMF telah bertindak sebagai debt collector bagi perusahaan Negara-negara pendukungnya. "Lalu utang negara-negara pasien itu pun membengkak. Ada 30%, 50%, dan Indonesia membengkak sampai 2 kali lipat. Itulah prestasi IMF," tambahnya tertawa.

Prestasi lembaga internasional itu yang paling hebat tentu soal pengalihan utang swasta menjadi utang publik. Ketika Soeharto dipaksa lengser pada 21 Mei 1998, sebagaimana telah dipaparkan di bagian lain buku ini, Utang luar negeri Indonesia ada sekitar US\$ 137 miliar. Lebih separuhnya merupakan utang swasta. Kemudian atas bimbingan IMF, pemerintah mengubah utang swasta menjadi utang publik sebesar Rp 650 triliun. Inilah yang menambah utang pemerintah begitu besar. Selama 32 tahun pemerintahan orba Soeharto, pemerintah tak pernah memiliki utang domestik. Namun hanya beberapa tahun di bawah bimbingan langsung IMF pemerintah telah memiliki utang domestik Rp 650 triliun sebagai hadiah dari kerja keras menyehatkan perbankan. "Obligasi atau surat utang, yang semula dimaksud sekadar sebagai instrumen, sekarang dipaksakan IMF untuk dibayar betul. Obligasi yang tadinya harus ditarik kembali sebelum bank dijual, sekarang dipaksakan harus tetap melekat pada bank yang

dijual, seperti BCA," tutur Kwik meradang. Dia pernah memprediksi utang pemerintah akan terus membengkak sampai Rp 3-7 ribu triliun, bila terus mengikuti saran IMF. Bagaimana membayarnya? APBN tahun-tahun mendatang, menurutnya, bakal tak sustainable. Utang pokok obligasi akan ditunda pembayarannya, dan akan diterbitkan obligasi baru. Kini utang dalam negeri itu sudah membengkak lagi sampai di atas 800 triliun karena pemerintah memang makin doyan mengeluarkan obligasi

Nampaknya hampir semua pakar ekonomi di luar mainstream memiliki pandangan suram terhadap masa depan Indonesia di masa Mega. "Tahun 2002 diproyeksikan pembayaran utang pokok dan bunga sebesar Rp 130 triliun. Jumlah itu setara dengan 8 kali anggaran pendidikan, 3 kali gaji TNI dan Pegawai Negeri. Itu berarti anggaran yang ada telah digunakan untuk membayar utang dan subsidi rakyat dipotong di sana-sini," katanya prediktif. Sayangnya meskipun akhirnya Mega tak terpilih lagi setelah pemilu, kabinet yang dibentuk presiden dan wapres pilihan rakyat belum mengubah caranya menyiasati anggaran.

### **3. Menjadi Negara Industri atau Pasar?**

Di awal-awal orba pernah ada cita-cita yang amat memukau: Indonesia akan tinggal landas dalam 25 tahun. Artinya setelah 5 PELITA (5 kali pembangunan lima tahun) negeri tercinta akan tinggal landas. Lalu saat memasuki Pelita 6 Indonesia telah menjelma menjadi negara industri, yang berdiri berwibawa di samping negara-negara industri lain di dunia, seperti AS, Canada, negara-negara Eropa Barat (sekarang Uni Eropa) dan Jepang. Namun krisis memprorandakan semuanya pada pertengahan Juli 1997.

Indonesia 'callaps' cuma dengan sekali terjangan nilai tukar. Lalu dunia industri, yang mestinya bisa jadi tumpuan, justru masuk barisan yang paling dulu tergulung. Sebanyak 1.689 perusahaan besar dan menengah, yang selama ini dianggap sebagai pemutar mesin industri, terperangkap dalam jebakan utang.

Jebakan itu seperti tak pandang bulu, baik yang terafiliasi dengan grup usaha besar maupun yang di luar itu, dijeratnya sampai lunglai. Grup Mantrust yang sudah menjaral kemana-mana sejak 1958, sekadar menyebut sebagian saja, masuk bersama anak-anak perusahaannya. Lalu perusahaan petrokimia milik konglomerat Prayogo Pangestu Chandra Asri, Indofood Sukses Makmur milik Grup Salim, Asia Pulp & Paper milik Eka Tjipta Widjaja (Sinar Mas) dan Grup Gajah Tunggal milik Syamsul Nursalim pun masuk jaring. Juga Grup Bimantara milik Bambang Trihatmojo dan Timor Putra Nasional milik Tommy Soeharto. Daftar ini masih bisa diperpanjang dengan perusahaan tekstil lawas semacam Apac Inti Corpora, Kiani Kertas milik Bob Hasan (Grup Nusamba), Grup Bakrie milik keluarga Bakrie, Grup Bukaka milik Jusuf Kalla, dan berbagai perusahaan BUMN semacam Garuda, Industri Pesawat Terbang Nasional (IPTN), dan lain-lain. Bahkan si perintis industri otomotif Indonesia Grup Astra International, yang sudah pindah tangan dari keluarga William Suryadjaya, dan saingannya Suzuki Indomobil International milik Grup Salim ikut terjerebab. Kedua raksasa otomotif itu kini hanya menjalani fungsi marketing dari principalnya di Jepang, tak ada pembicaraan soal alih teknologi.

Kedua perusahaan perakitan otomotif itu, yang memang tak pernah naik kelas menjadi perusahaan

manufaktur otomotif beneran, bersama ratusan perusahaan lain pindah tangan. Begitulah satu demi satu, raja-raja utang itu harus menyerahkan perusahaan atau anak-anak perusahaan yang telah dibangun puluhan tahun kepada kreditor atau principalnya. Yang masih prospektif dibiarkan hidup. Yang tak punya harapan dijual laiknya investaris dengan harga murah untuk menutup utang. Sementara IPTN, yang telah dibangun bertahun-tahun dan prospektif dari sisi industri dan bisnisnya, terpaksa harus dibiarkan mangkrak karena urat dananya dicabut paksa IMF lewat LoI. Demikianlah sebagian besar jerih payah selama 3 dasawarsa cuma meninggalkan rasa lelah dan sakit. Hasil panennya harus dipersembahkan kepada sang kreditor yang selama ini dianggap dermawan. Itu pun tidak membuat utang-utang tersebut lunas. Malah sebaliknya makin membengkak, karena nilai mata uang sendiri mengempis sampai 500%.

Akhir yang nista seperti itu tentu membuat orang terpaksa menoleh ke belakang, memelototi kembali strategi industrialisasi yang sudah berjalan tiga puluh tahun lebih dan gagal. Padahal selama sepuluh tahun terakhir sebelum krisis menerjang, ekspor non migas Indonesia terus meningkat. Tak heran bila banyak kalangan menilai strategi pengembangan industri broad spectrum yang sudah berjalan cukup bagus. Salah seorang pakar yang sangat percaya pada kebijakan broad spectrum itu adalah Prof. M Sadli dari FE-UI. Dia bahkan menyarankan agar kebijakan broad spectrum itu tidak diubah untuk memberi kepastian kepada para investor. Menurutnya kebijakan tersebut telah terbukti berhasil membangun industri manufaktur sebagai basis ekspor.

Sadli tentu punya alasan sendiri untuk pujiannya itu. Sebagai pakar ekonomi yang telah puluhan tahun bergelut dengan buku dan punya jam terbang tinggi di bidangnya, kata-katanya tentu punya dasar-dasar teori yang mapan. Cuma ketika krisis menggulung semuanya, tentu pakar-pakar ekonomi semacam Sadli akan bisa membuat teori-teori baru soal kegagalan itu. Padahal kalau sejak dulu disadari bahwa kebijakan tersebut memiliki kelemahan di sana-sini, bahkan mengandung bahaya, mungkin hasilnya akan lain. Lagi pula dalam bidang industri kebijakan broad spectrum sebenarnya tidak istimewa. Dia boleh dibilang tumbuh begitu saja tanpa perencanaan.

Ciri paling menonjol dari kebijakan industri broad spectrum adalah tidak adanya upaya pengkajian atau seleksi terhadap produk-produk yang sudah biasa dibuat. Padahal pengkajian dasar itu penting untuk menentukan produk-produk mana yang bisa dikembangkan menjadi produk unggulan. Namun sebaliknya kebijakan ini mendorong untuk mengembangkan produk apa saja buat memenuhi kebutuhan pasar sesaat. Andalannya apalagi kalau bukan sumber daya alam berlimpah, proteksi, subsidi dan kredit dari bank-bank BUMN atau sumber dana murah lainnya. Artinya semuanya dikembangkan secara serabut dan karena itu nilai tambahnya amat kecil. Kebijakan industri broad spectrum ini pada gilirannya berkembang menjadi resource based industry. Dari istilahnya memang tampak kren, tapi kalau pakai bahasa blak-blakan dia boleh disebut industri yang bertumpu pada sumber daya alam.

Biasanya industri yang bertumpu pada sumber daya alam untuk memproduksi barang ekspor, kurang peduli pada peningkatan sumber daya manusianya (SDM). Tidak

heran bila, setelah tiga puluh tahun berjalan, yang berkembang cuma industri-industri perakitan alias putar baut (meminjam istilah ekonom CSIS Pande Rajasilalahi) atau industri tukang jahit dan ekstraktif menurut istilah Kwik Kian Gie. Industri tukang jahit dan ekstraktif ini memang bisa bertahan dan bahkan berkembang selama persaingan belum begitu ketat. Bagi pelakunya sendiri, menurut Kwik, itu sudah sangat menguntungkan dan menjadikan mereka orang-orang yang sangat kaya secara individual. Tak heran bila mereka pun tak merasa perlu melakukan lompatan-lompatan dalam penerapan teknologi dengan biaya riset dan investasi beresiko tinggi. Namun ketika batas-batas negara mulai memudar, dunia menciut jadi sebesar 'kepala' dan Indonesia memasuki era global, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi saat pasar kita disatroni pemain-pemain kawakan dari negara-negara lain? Mampukah para pelaku industri itu bertahan dan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri? Bila mereka tak mampu bertahan, dapat dipastikan negeri dengan 200 juta lebih penduduk ini akan direduksi menjadi pasar, dan penyedia bahan baku industri, sekaligus sumber tenaga murah. Bencana apalagi yang lebih dahsyat daripada itu selain kiamat?

Sebenarnya alarm atau tanda bahaya tentang kemungkinan karamnya dunia industri Indonesia sudah sering dibunyikan. Satu di antaranya adalah yang diteriakkan Menteri Perdagangan Kabinet Pembangunan VI Satrio Billy Joedono. Kalau tak percaya, lihat saja harian Kompas, 21 Juli 1995. Menteri yang terkenal jujur itu menilai pola ekspor non migas Indonesia sangat rawan, karena hanya bertumpu pada beberapa produk. Sekitar 90% ekspor non migas kita, menurut mendag, berasal dari



23 komoditas. Sementara yang nilainya di atas US\$ 1 miliar hanya 5 komoditas, yaitu kayu, gabus, garmen, tekstil, sepatu dan kerang-kerangan. Sebagai menteri perdagangan Billy, begitu dia disapa, jelas tak hendak memberi peringatan palsu. Dia risau, karena yang berkembang lebih banyak bersifat ekstraktif. Artinya cuma mengambil kekayaan alam dengan kadar olahan minimal, sedikit di atas pemulung murni. Sedang dalam bidang manufaktur sifatnya lebih ke perakitan atau tukang jahit, seperti garmen, sepatu, elektronik dan otomotif. Dengan kata lain, industri manufaktur Indonesia cuma menjadi tempat produksi dengan sistem maklon yang mengerjakan pesanan principalnya di luar negeri.

Strategi industrialisasi seperti itu tentu sangat rawan. Negara-negara industri maju semacam AS, Jepang, Jerman, Inggris, Prancis, Belanda, Italia, dan lain-lain tentu tak merasa khawatir terhadap kemajuan Indonesia - tak peduli seberapa besar pun pertumbuhan ekonomi dan ekspor yang dibukukannya. Bahkan negara-negara industri baru semacam Cina, Korea dan India tak terlampaui risau. Sebab dengan pola industri seperti itu, Indonesia dapat diprediksi tak akan menjadi pesaing baru dalam menghasilkan barang-barang industri dengan nilai tambah tinggi.

Pola pengembangan industri seperti itu justru akan membuat Indonesia terperosok lebih dalam alias turun kelas. Pola itu hanyalah mendisain diri sendiri untuk kuntet, sehingga cuma bisa berlomba dengan negara-negara baru semacam Myanmar dan Vietnam. Indonesia akan bersaing dengan mereka dalam merayu para investor negara-negara industri maju agar membangun pabrik di negeri mereka. Tak peduli apakah teknologi yang mereka

bawa sudah ketinggalan zaman, merusak lingkungan atau bahkan tak membawa teknologi sekalipun, seperti dalam pengolahan air bersih. Umpannya apalagi bila bukan biaya produksi murah, sumber bahan baku berlimpah, dan berbagai insentif bebas pajak. Bahkan tenaga kerjanya pun boleh dibayar murah dan boleh ditendang kapan saja seperti koeli kontrak, seperti budak. Celaknya hal-hal seperti itu masih jadi andalan sampai sekarang, seperti terlihat pada perubahan Undang-Undang No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan yang diprotes keras kaum buruh pada awal 2006. Padahal negeri jiran kita Malaysia sudah melompat jauh. Negeri puak Melayu itu berani menolak investor yang mau membangun industri manufaktur di negerinya, kalau hanya membawa teknologi rendah. Malaysia cuma mau menerima investor dengan teknologi canggih alias high tech yang ramah lingkungan.

Dari sisi pemerintah sebenarnya pembangunan industri Indonesia bukanlah tanpa perencanaan. Bahkan pemerintah Soeharto tak segan terjun langsung membangunnya, ketika swasta belum berani melangkah. Pengembangan industri strategis adalah bukti yang tak dapat dibantah. Cuma karena sosialisasinya sangat kurang, maka dia seakan menjadi proyek-proyek mercusuar demi kebanggaan rezim sesaat, tanpa ada kaitannya dengan masa depan bangsa. Tak heran bila pemahaman anak negeri tentang pengembangan industri strategis sangat dangkal dan terbatas. Bahkan mahasiswa perguruan tinggi, sebagai entitas intelektual yang mestinya paling berkepentingan terhadap masa depan industrialisasi di negerinya, juga tak memiliki pemahaman yang komprehensif.

Apa yang Anda ketahui tentang industri strategis?

"Industri yang berada di bawah payung Badan Pengembangan Industri Strategis (BPIS)," jawab seorang mahasiswa yakin. "PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN), PT PAL, Pindad, dan lain-lain. Pokoknya industri-industri, yang dengan segala cara dan fasilitas, pengembangannya dipiloti mantan Menristek BJ.Habibie," tambahnya cepat ketika dimintai penjelasan lebih lanjut. Mahasiswa Fakultas Ekonomi (semester VI) salah satu universitas terkemuka di tanah air tersebut tentu tidak salah. Agaknya begitulah citra yang berkembang di masyarakat tentang industri strategis yang dikembangkan Soeharto selama 32 tahun.

Jadi meskipun definisi industri strategis masih bisa diperdebatkan, juga cakupannya. Toh sampai saat ini orang seperti sepakat, bahwa yang termasuk dalam industri strategis adalah kesepuluh BUMN yang pada masa Orde Baru berada di bawah payung BPIS. Mereka adalah: PT Pindad, PT Dahana, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI), PT Industri Kereta Api (INKA), PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN), PT PAL Indonesia (industri perkapalan), PT LEN Indonesia, PT Krakatau Steel (industri baja), PT Barata Indonesia, dan PT Boma Bisma Indra (spare part). Begitulah sampai rezim orba rontok oleh krisis dan gerakan reformasi, rakyat terdidik negeri ini cuma memiliki pema-haman dangkal soal pembangunan industri strategis di negerinya.

Pemahaman dangkal anak bangsa itu sekaligus menunjukkan bahwa Soeharto bersama kabinet pembangunan I - VII-nya gagal mengambil hati rakyat untuk ikut mendukung industrialisasi yang dicanangkannya. Padahal dia merupakan program serius dan bersifat jangka panjang. Landasan utamanya bukanlah kapur, pasir dan

semen bertulang baja, tapi nasionalisme, rasa kebangsaan dan tekad yang kuat untuk berdiri sama tinggi di hadapan bangsa-bangsa lain.

Tanpa nasionalisme, keinginan untuk mandiri, pemahaman geografi dan geopolitik yang benar, maka pembangunan industri di negeri ini sampai kapan pun akan menghadapi banyak hambatan. Sebab dia tak punya akar tunggang yang kuat dan menjalar kemana-mana, tapi bergantung di awang-awang. Industri yang dibangun dengan cara seperti itu sangat rentan terhadap goncangan. Satu kali saja patronnya diganggu atau ditekan oleh kekuatan lain yang lebih besar, maka industri yang dibangunnya akan ikut rontok tanpa pembela. Padahal pembangunan industri memerlukan perencanaan, effort, biaya dari pemerintah, dan dukungan penuh rakyat secara kontinyu, seperti yang telah dilakukan pemerintah AS, Jepang, Korea, Malaysia, dan lain-lain ketika membangun industri mereka. Tanpa itu semua, maka investasi masa depan yang ditanam pemerintah bertahun-tahun akan disamakan dengan biaya, atau bahkan dihitung sebagai kerugian oleh para pakar, pengamat ekonomi, kaum terdidik, dan akhirnya rakyat.

Pembinaan petani garam, misalnya, agar mereka bisa memproduksi garam berkualitas tinggi, beryodium dan lain-lain, dengan mudah akan dihitung sebagai proyek rugi. Semua komponen biaya sampai menjadi garam dan sampai ke tangan konsumen akan diakumulasi. Lalu dibagi dengan volume garam yang dihasilkan. Angka yang didapat per ton, misalnya, kemudian disandingkan dengan harga garam impor saat itu. Bila angka yang didapat ternyata lebih tinggi daripada harga garam impor, maka pemerintah akan disarankan untuk segera saja meng-

hentikan pembangunan industri garam yang mahal dan makan waktu itu. Bila angka yang didapat sama dengan harga garam impor, maka pemerintah juga disarankan menghentikan pembangunan industri yang tidak menguntungkan dan makan waktu itu. Bila angka yang didapat lebih rendah sedikit daripada harga garam impor, maka pemerintah pun diminta menghentikan pembangunan industri tersebut, karena impor lebih mudah dan hemat waktu. Pemerintah tinggal memungut pajak impornya dan komisi. Harga diri sebagai bangsa pengimpor garam, padahal negerinya berbentuk gugusan pulau-pulau yang dikelilingi laut, tidak masuk hitungan di situ. Juga kebebasan dari ketergantungan pada negara lain, tidak ikut dinilai. Adapun setelah sekian tahun harga dimainkan, saat kita sudah benar-benar tergantung pada produk negara tersebut, dianggap resiko yang memang harus ditanggung.

Indonesia telah menjelma menjadi importir garam. Itu bukanlah isapan jempol. Negeri yang terdiri dari 17 ribu lebih pulau ini, sejak sebelum Masehi sudah bisa membuat garam, menjelang millenium ketiga malah mengimpor garam buat penduduknya. Mungkin ini bisa didaftarkan sebagai keajaiban dunia ke 8 setelah 7 keajaiban dunia yang dikenal luas. Itu baru industri garam yang bahan bakunya berlimpah dan tak pernah kering, serta tidak memerlukan teknologi canggih. Bagaimana dengan industri perikanan, pertanian, peternakan, makanan, minuman, dan yang semacam itu yang memerlukan sedikit kerja keras dan teknologi canggih? Bagaimana pula dengan industri pertambangan, tekstil, spare part, mesin, otomotif, komputer, pesawat terbang, kapal laut, dan lain-lain yang memerlukan kerja keras, ketelitian dan

tentu teknologi yang lebih advance? Bila di industri garam saja, Indonesia sudah kedodoran, tentu ketertinggalan kita di industri lain semakin mudah dipahami, sekalipun dengan meneteskan air mata.

Pemerintah Soeharto boleh dibilang lupa mengundang partisipasi kaum terdidiknya dalam industrialisasi sejak dalam tataran ide, bila tak bisa disebut gagal. Akibatnya mudah ditebak: industrialisasi yang didengungkan pemerintah dipandang sebelah mata, tidak dihubungkan dengan nasionalisme, keinginan untuk mandiri, pemahaman geopolitik dan geografi Indonesia beserta kekayaan alam dan lautnya. Paruh kedua dari kekuasaan Soeharto, seolah cuma Habibie yang punya obsesi untuk mengembangkan industri strategis. Sementara anggota masyarakat kebanyakan teracuni oleh pikiran-pikiran gampang dan serba instan. Padahal pada 15 Januari 1974 para intelektual kampus telah turun ke jalan meminta pemerintah menghentikan ketergantungan Indonesia kepada barang-barang Jepang, dan lain-lain. Setelah gerakan itu diberangus dan hilang dalam amnesia politik ekonomi rakyat, banyak orang menyamakan IPTN, Pindad, PT PAL atau perusahaan swasta jempolan semacam Grup Texmaco, yang bersusah-payah membangun industri manufaktur paling terintegrasi di Indonesia, dengan mereka yang cuma membangun industri perakitan. Bahkan bukan tidak mungkin perintis dan pembangun industri manufaktur itu disamakan dengan mereka yang cuma menjadi broker.

Dengan pemahaman seperti itu, tentu tidak mudah bagi pemerintah dan juga Habibie atau siapa pun untuk mengembangkan industri strategis di tanah air. Habibie dan mereka yang terlibat dalam pengembangan industri

selama ini seperti membentur tembok. Memang benar dukungan politik dan dana berlimpah bisa didapat dari APBN. Bahkan dana-dana taktis semacam dana reboisasi tempo-tempo bisa didapat, misalnya saat mau memproduksi pesawat N-2130. Bahkan kemudahan itu masih ditambah pula dengan fasilitas bebas pajak, bila IPTN misalnya mau mengimpor bahan baku. Namun tanpa pemahaman yang benar dari masyarakat tentang apa yang mau dibangunnya, pengembangan industri strategis cuma akan bergantung ke atas alias kepada rezim yang berkuasa. Itu amat beresiko tinggi, sebab begitu rezim berganti semua yang telah dibangun itu bisa hangus begitu saja. Artinya kehancurannya pun sudah ditentukan.

Menurut pakar Manajemen dari FE-UI Rhenald Kasali, bisnis yang terlalu bergantung kepada orang kuat, proses belajarnya amat terbatas. Sebagai contoh dia menunjuk IPTN, yang mendapat dukungan langsung dari Habibie. "Bisnis apa pun bila dilindungi orang kuat, pada akhirnya justru tidak akan pernah kuat," ujarnya berteori. Dia tak mengada-ada, tapi tentunya itu bukan monopoli BUMN. Industri yang dikembangkan swasta pun, bila cuma mengandalkan fasilitas dan perlindungan pemerintah, juga tak berkembang, tidak terkecuali industri otomotif yang dikembangkan Astra, Indomobil, dan lain-lain. Padahal mereka juga telah mendapat fasilitas, segala kemudahan dan proteksi puluhan tahun.

Perkembangan kuntet seperti itu bisa terjadi, kata Rhenald, karena learning proses-nya terbatas. Ketika mereka sedang tumbuh, begitu mendapat problem sedikit, sudah lari kepada patron (bapak). Maka akhirnya justru enggak sehat dan mandiri. Mereka tak pernah belajar dari kegagalan yang mereka alami dalam proses. Rhenald tidak

berlebihan. Seiring tersungkurnya dunia usaha Indonesia dan bergugurannya pengusaha-pengusaha swasta besar binaan orba, kinerja kesepuluh BUMN strategis terguncang hebat. Sejak 1998 semuanya ditaruh dalam satu wadah baru PT Pakarya Industri (PI).

IPTN, menurut laporan Badan Pengelola BUMN misalnya, pada 1997, separuhnya dilalui di masa krisis, merugi (sebelum pajak) Rp 194 miliar. Sementara PT Pindad merugi Rp 25 miliar, PT Dahana rugi Rp 1 miliar, Boma Bisma Indra rugi Rp 15 miliar. Yang menuai untung lumayan besar cuma KS dan INTI, masing-masing Rp 192 miliar dan Rp 112 miliar. Selebihnya menuai untung tipis: INKA untung Rp 20 miliar, PAL Rp 10 miliar, PT LEN Rp 3 miliar, dan Barata membukukan laba Rp 25 miliar. Laporan tersebut juga menyebut 6 BUMN industri strategis (IPTN, PAL, Dahana, LEN, Pindad, dan Boma sebagai BUMN) tidak sehat. Krakatau Steel kurang sehat. Sementara PT Inti dinilai sehat. Yang masuk kategori sehat sekali cuma 2, yaitu INKA dan Barata. Setelah 1997 keadaannya malah semakin parah saja. Apalagi IMF tampil sebagai dokter ahli amputasi pada Februari 1998. Lembaga itu langsung menohok jantung industri strategis, yaitu IPTN yang menjadi kebanggaan Soeharto dan Menristek waktu itu BJ Habibie.

Lembaga rente dunia itu menilai megaprojek industri pesawat terbang tersebut sebagai proyek mercusuar yang cuma menghambur-hamburkan uang. Oleh karena itu, bila ingin recovery ekonomi berjalan cepat, menurut IMF, proyek-proyek semacam itu harus segera dihentikan. Begitulah pada tanggal 15 Februari 1998 IMF berhasil mengamputasi urat dana IPTN dari APBN dan berbagai dana taktis lainnya. Presiden Soeharto waktu itu dan

Wapres Habibie, yang memang lagi butuh santunan, langsung mengangguk tanda setuju. Selebihnya diam atau malah bersorak dalam hati memuji ketegasan IMF.

Namun sedikit orang kritis tetap menaruh curiga pada maksud baik lembaga itu. Maklum, resep itu diberikan satu paket dengan keharusan pemerintah membuka kran ekspor kayu gelondongan yang merugikan industri pengolahan kayu dalam negeri dan memperparah kerusakan hutan, masuknya peritel asing Continent & Carrefour yang kemudian bergabung menjadi Carrefour, dan lain-lain. Apalagi IMF terus melanjutkan program tidak populernya dengan penghapusan berbagai subsidi. Sebenarnya dana untuk itu tidaklah besar, jika dibandingkan dengan Rp ratusan triliun buat rekapitalisasi perbankan. Namun suara-suara kritis seperti itu nyaris tak terdengar. Akibatnya industri strategis semacam IPTN, yang memang tidak suci dari salah urus dan manajemen, makin megap-megap kesulitan dana.

Nasib serupa juga menimpa Grup Texmaco (Marimutu Sinivassan). Tanpa disadari, pemerintah setelah Soeharto terus ditekan IMF untuk membunuh sendiri potensi produktif negara dan membiarkan hidup subur potensi konsumtifnya. Tekanan lembaga itu agar pemerintah membiarkan IPTN dan Texmaco mangkrak adalah butki yang tak dapat dibantah. Mengapa kedua perusahaan besar itu yang menjadi sasaran? Bukan Chandra Asri, Astra atau Indomobil yang juga mengalami kesulitan saat krisis? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya mesti dilontarkan kaum intelektual negeri ini, saat pemerintahnya tak berdaya menghadapi tekanan.

Jawaban sederhana dapat diberikan di sini. Sebab baik IPTN, maupun Texmaco, sama-sama mengembang-

kan potensi industri manufaktur beneran, bukan sekadar tukang jahit. IPTN berupaya mengembangkan potensi dirgantara, sehingga Indonesia bisa menjaga kedaulatan udaranya dengan pesawat-pesawat buatan sendiri, sekaligus memudahkan penduduknya untuk menjelajahi tanah airnya yang luas lewat penetrasi udara. Sedang Texmaco, dengan kemampuan teknologinya yang advance bisa menyediakan mesin apasaja yang dibutuhkan negeri ini untuk industrialisasi mulai dari mesin tekstil, traktor tangan, mesin bubut, pengolah padi, kedele, jagung, sampai pembangkit listrik, mesin kapal dan tentu saja otomotif. Perusahaan yang didirikan Sinivassan sejak awal dekade 60-an ini mempunyai potensi besar untuk mengembangkan kemampuan teknologi Indonesia di darat dan di laut. Bahkan dia telah membuat mobil dengan kandungan lokal di atas 85%, termasuk blok mesinnya, sebelum krisis menghantam republik. Tanpa disadari, pelan tapi pasti, IMF mengembalikan Indonesia ke titik nol lewat pintu putar krisis dan mengarahkannya menjadi pasar.



## Sebuah kasus menarik bernama IPTN

IPTN didirikan Prof. Dr. Dipl.Ing. BJ. Habibie pada 1976. Dia dikembangkan dengan dana yang tidak sedikit, dibalut pula dengan visi yang jauh ke depan dan keinginan untuk menjadi tuan di negeri sendiri. Cuma kaum terdidik Indonesia gagal memahami IPTN sebagaimana mestinya. Akibatnya ketika diminta IMF untuk menotok jalan dananya sebagai syarat bantuan, industri pesawat itu tidak mendapat pembelaan sepantasnya. Para pakar ekonomi penganut neoliberalisme apalagi. Mereka nampaknya tidak keberatan bila republik cuma menjadi pasar buat segala produk dari negeri lain. Berbeda dari Jepang, Korea, Cina, dan juga India yang para pakar ekonominya sekaligus merupakan nasionalis sejati, sehingga tekanan dunia luar tidak mengurangi laju industrialisasi negara. Padahal Indonesia, yang luasnya hampir sama dengan Uni Eropa secara keseluruhan, tentu lebih berhak dari negeri manapun untuk memiliki industri perkapalan dan pesawat yang bisa dibanggakan.

IPTN sendiri memang tidak cepat bisa mencatat laba

seperti perusahaan-perusahaan terbang di USA semacam Boeing, Mac Donald Douglas, Lockheed Martin Corp, dan lain-lain. Itu pun sebenarnya masih dapat dimaklumi. Sejarah mencatat perusahaan-perusahaan AS itu pada tahun-tahun awalnya memang mendapat banyak order pembuatan pesawat untuk kebutuhan Perang Dunia II. Toh dalam perjalanan waktu tidak semuanya dapat bertahan. Banyak industri pesawat rontok satu per satu akibat persaingan global. Keadaan itu kemudian memaksa mereka merger untuk bisa bertahan. Lihat saja Mac Donald Douglas, misalnya, dia sudah merger dengan Boeing, Lockheed merger dengan Advanced Airodynamics. Gejala serupa juga melanda industri pesawat di Eropa.

Sekadar contoh, Airbus misalnya, merupakan hasil merger beberapa perusahaan pesawat terbang Eropa seperti Airospacial, British Air, Air Italia, dan lain-lain. Dengan membandingkan industri serupa di negara-negara lain, termasuk di negara-negara maju tersebut, prestasi IPTN sebenarnya tidak jelek-jelek amat. Apalagi bila diingat pemerintah di negara-negara maju semacam AS dan Uni Eropa biasa membantu industri pesawat terbangnya dengan memberikan tender-tender proyek penelitian, pembuatan mesin-mesin atau pesawat tertentu agar industri strategis itu bisa hidup.

Kondisi IPTN sebenarnya tidak buruk-buruk amat dan namanya telah cukup dikenal di bidangnya. Cuma IMF lebih senang bila pemerintah berhenti membantu pengembangannya. "Pemerintah dilarang menyediakan dana buat restrukturisasi IPTN yang cuma butuh sekitar Rp 2 triliun, tapi harus menyediakan dana Rp ratusan triliun buat restrukturisasi perbankan. Ini kan tidak adil," kata Dirut IPTN waktu itu Paramayuda kesal. Menurutnya utang

BUMN strategis ini di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tercatat Rp 900 miliar. Itu pun lebih banyak karena melonjaknya nilai tukar dolar. Sementara total kewajibannya sekitar Rp 1,8 triliun. Baginya itu wajar. "Banyak perusahaan besar milik konglomerat kakap yang keadaannya jauh lebih parah dari IPTN. Bila mereka dibantu pemerintah, mengapa IPTN yang notabene milik negara tidak boleh dibantu?" katanya retorik. Paramayuda yakin bila diberi kesempatan IPTN akan dapat menutup kewajibannya itu.

Optimisme Paramayuda agaknya didasari beberapa perhitungan bisnis yang hampir pasti dapat diraihinya. Pada tahun 2000, misalnya, pemerintah Australia telah membuka tender pengadaan 16-18 pesawat sekelas CN-235, produk yang selama ini menjadi andalan IPTN. Pengadaan pesawat senilai US\$ 350 juta itu dimaksudkan untuk menggantikan pesawat Caribou yang selama ini digunakan Australia. Tanpa pasokan dana segar, menurutnya, amat sulit bagi IPTN memenuhi permintaan tersebut. Padahal IPTN, kata Paramayuda yang juga Dirut BPIS, telah menandatangani MoU dengan pemerintah Australia.

Meskipun harus kehilangan peluang tersebut, manajemen IPTN merasa nasibnya belum lagi ditentukan untuk mati muda. Apalagi AS Hikam, Menristek Kabinet Persatuan Abdurrahman Wahid-Megawati Soekarno Putri di depan Komisi VIII DPR-RI (14 Februari 2000), dengan tegas mengatakan: "No way untuk menghentikan Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN)!" Tentu tidak gampang melanjutkan megaprojek prestiseus tersebut, ketika IMF tak mau menyukonginya. Apalagi fasilitas bebas pajak yang selama ini dinikmati IPTN telah dihapus



pula oleh Presdiden Abdurrahman pada 10 Februari 2000. Lalu bagaimana menristek, mantan peneliti Lippi, itu bisa memajukan IPTN? BUMN itu, menurut Pak Menteri, akan diarahkan untuk melakukan diversifikasi yang amat luas. Alasannya? Dari beberapa kali kunjungannya ke industri strategis, seperti PT Pal, PT Boma Bisma Indra, dan PT Pindad, ternyata yang masih bisa meraih laba adalah industri-industri yang berani melakukan diversifikasi.

Bagi manajemen IPTN diversifikasi usaha bukanlah barang baru. Dia satu paket dengan restrukturisasi manajemen yang telah dijalankan sejak krisis. Sejak dipaksa untuk menghidupkan dirinya sendiri dengan kerja, BUMN buatan Habibie itu telah mengurangi sekitar 6 ribu karyawannya tahun 1999. Kini dengan hanya sekitar 10 ribu karyawan, IPTN merasa lebih lincah melangkah untuk melakukan diversifikasi. "Core business kita tetap pembuatan pesawat. Jadi policy-nya 70% core kompeten kita tetap diarahkan ke pembuatan pesawat dan komponen-komponennya. Sisanya yang 30% kita arahkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang cepat menghasilkan revenue untuk biaya operasional, misalnya membuat antena parabola, simulator pelabuhan, Airtraffic controll, anjungan minyak, barang-barang elektronik, mendisain mobil, gedung, jembatan, dan lain-lain," papar Paramayuda tenang. Paramajuda memang tidak mengada-ada. Sampai saat itu IPTN telah memproduksi sekitar 2000 antena parabola buat kebutuhan Indovision. Sedangkan untuk disain otomotif, BUMN ini telah menandatangani kerjasama dengan Toyota (Jepang) dan tidak lama lagi bekerjasama juga dengan Proton Saga (Malaysia).



Di samping itu IPTN di bawah komando Paramayuda sedang berusaha mengundang investor asing. 49% saham BUMN itu nantinya akan dilego kepada asing agar bisa bernafas lebih lega buat pengembangan-pengembangan yang memang butuh dana banyak. Ini sebetulnya langkah mundur, tapi manajemen nampaknya tak punya alternative lain. Menurutnya hal itu amat perlu agar IPTN nantinya bisa menjadi pemain terbesar dalam industri pesawat terbang di Asia. Saat ini untuk pesawat sekelas CN-235 IPTN sudah menjadi yang terbesar. Tentu maksud tersebut cuma bisa kesampaian, bila IPTN berhasil merestrukturisasi utangnya yang Rp 900 miliar itu.

Sementara ini untuk sekadar menyambung hidup IPTN merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. "Kami tidak pernah berhenti berproduksi. Cuma kegiatannya menjadi agak lambat. Produksi massal memang kita kurang drastis. Namun kegiatan produksi tetap jalan dengan hanya memproduksi pesawat-pesawat yang sudah disertifikasi dan sudah ada kontraknya," ungkap Paramayuda sengit sekaligus membantah isu bahwa kegiatan produksi di IPTN sempat terhenti.

Hal itu dibenarkan Deputy Teknologi Industri Rancang Bangun BPPT Dr. Said D. Jenie yang banyak meman-

tau IPTN. Dia mengakui sejak krisis kondisi IPTN memang payah, tapi kegiatan produksi tidak pernah berhenti sama sekali. IPTN, menurutnya, masih mempunyai kontrak dengan beberapa negara untuk memproduksi pesawat jenis CN-235. "Kini IPTN sedang membuat 8 unit pesawat CN-235 pesanan Korea Selatan. Malaysia memesan 12 unit. Brunei, dan Uni Emirat Arab juga memesan pesawat jenis ini. Dengan rolling kontrak-kontrak ini saja sebenarnya untuk operasional IPTN sudah tidak ada masalah," kata Said datar ketika ditemui penulis waktu itu untuk SWA. Masalah yang paling mendasar justru terletak pada seretnya dana pengembangan. Sebagai contoh dia menunjuk proyek N-250.

Produk N-250, kata Said, sebenarnya sudah separuh jalan. Cuma karena kekurangan dana proyek ini terpaksa dihentikan di tengah jalan. Sampai saat ini sertifikasinya belum selesai. "Untuk mendapatkan sertifikasi, N-250 setidaknya harus memenuhi jam terbang selama 1.700 jam. N-250 telah melakukannya 800 jam, lalu dihentikan karena kesulitan dana. Padahal produksi massalnya cuma boleh dilakukan bila sertifikasinya sudah selesai," tutur Said menyayangkan. "Padahal pemerintah sudah invest banyak sekali di situ. Solusinya sekarang, N-250 harus dicarikan partner yang mau mengembangkan pesawat jenis ini," tambahnya. Menurut mantan Mensristek dan Presiden Habibie dalam 5 tahun mendatang kebutuhan dunia akan pesawat jenis ini akan mencapai 4.500 unit. IPTN dulu berencana bisa memenuhi sekitar 1.800 unit. Perhitungan seperti ini mestinya juga diperhatikan pemerintah setelah Habibie, sehingga dapat berargumentasi ketika berhadapan dengan IMF yang menganggapnya sebagai proyek mercusuar.

Bagi Said IPTN tak bisa disebut proyek mercusuar yang cuma menghamburkan uang negara. "Saya enggak melihat proyek ini sebagai mercusuar. Lihat saja pesawat-pesawat yang kita buat! Semuanya kan dibuat untuk melayani geografis kita," bantahnya dengan suara meninggi. "C-212, misalnya, pesawat terbang jarak sedang yang bisa terbang rendah, dan bisa mendarat di rumput dan lapangan. Ini sangat berguna untuk angkut pasukan. Kemudian CN-235, jarak sedang tapi dengan teknologi lebih canggih daripada C-212. Bahkan N-250, yang terpaksa dihentikan separuh jalan, sangat baik buat transportasi antar pulau," sambung ahli teknologi rancang bangun itu cepat. "Kalau bikin roket atau pesawat jet, itu baru bisa disebut proyek mercusuar," imbuhnya lagi. Sebagai negara bahari, menurut Said, Indonesia tak mungkin dilayani tanpa penetrasi udara, laut, dan sistem telekomunikasi satelit. "Untuk jenis pesawat terbang dengan 40-100 penumpang, saat ini sebenarnya tak ada perusahaan yang menyaingi IPTN dengan CN-235nya. Di jenis ini cuma ada IPTN dan Embraer (Brazil). Sejak kita menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan IMF, kita punya pesaing Fairchild, Dornier (Patungan AS-Jerman). Perusahaan ini dulunya sudah sekarat.

Sebagaimana Menristek AS Hikam dan Dirut IPTN Paramayuda, Said juga melihat diversifikasi usaha sebagai solusi yang baik buat IPTN. Cuma bagi Said, karena peralatan dan kompetensi IPTN sebagian besar memang dalam pembuatan pesawat, maka diversifikasi itu harus tetap diarahkan ke situ. "Akan lebih menguntungkan bila IPTN mencoba menerima pekerjaan pembuatan pesawat terbang dari perusahaan lain. Yang ini sudah berjalan.

IPTN, misalnya, telah bekerjasama secara subkontrak dengan Boing, Dornier, Fairchild, Aerospace corp untuk membuat pesawat jet-738. Juga masih ada beberapa kerjasama lain," jelas Said hati-hati. Di samping itu, kata Said, karena reputasinya sudah diakui dunia, bidang jasa maintenance pesawat pasti bisa dilakukan IPTN. Juga jasa simulasi dan pelatihan. Sebagai bukti Said menunjuk Boing, yang melakukan tes untuk jumbo jetnya mulai dari pita suara sampai testingnya di IPTN. Hal-hal lain yang juga dapat dilakukan IPTN adalah pembuat komponen pesawat. Ini pun sudah berjalan. General Dynamic, misalnya, telah meminta IPTN untuk membuatkan ekor pesawat F-16-nya.

Meskipun agak miris akibat lepas tangannya pemerintah dari kewajiban mengembangkan industri strategis - terutama yang berkaitan dengan pembuatan pesawat terbang, masa depan IPTN nampaknya tidak terlalu suram. Di atas kertas industri ini, kata Paramayuda, telah mulai melaba. "Labanya memang tidak banyak, cuma Rp 500 juta, terlalu kecil buat perusahaan dengan aset sekitar Rp 5,7 triliun. Toh itu saja sudah cukup mengembirakan," kata Paramayuda tersenyum. Dirut IPTN itu memang berhak senang. Apalagi belum lama ini pada acara Air Show di Singapura IPTN telah mendapatkan kontrak senilai US\$ 3,6 juta untuk pembuatan helikopter Bell-412. Pada waktu hampir bersamaan IPTN juga mendapat pesanan baru dari Filipina senilai US\$ 8 juta. Sementara Garuda juga mempercayakan perawatan interiornya pada IPTN. Tentu kemajuan itu bisa lebih cepat lagi bila restrukturisasi utang IPTN bisa segera dibereskan. Paramayuda berharap pemerintah mau mengkonversi utang IPTN menjadi penyertaan modal

pemerintah. Bila itu bisa diwujudkan, maka IPTN akan mudah menggaet mitra asing.

Kemudahan lain yang juga diinginkan IPTN adalah soal bank guarantee. "Dulu bila orang order pesawat, dia memberikan down payment (DP). DP itulah yang kita jadikan modal kerja. Namun sejak krisis situasi perbankan amat memberatkan. Bila kita mendapat DP, orang itu meminta bank guarantee sebagai jaminan, karena dia sudah membayar sementara barang belum didapat. Nah untuk bisa mendapatkan bank guarantee itu, kini bank mengharuskan kita menaruh uang sebesar bank guarantee itu. Jadi sama saja kita mendapatkan DP, tapi tidak boleh diambil. Yah kita tidak bisa kerja juga dong!" jelas Paramayuda setengah mengeluh.

Boleh jadi, kurangnya *sense of technology* dan visi dari pemerintahan pasca Suharto dan Habibie, turut memberi andil membuat persoalan di IPTN berlarut-larut. Arealnya pun kemudian meluas dari soal keuangan sampai ke sumber daya manusia (SDM), dan teknologi canggih yang dimilikinya. Bila dibiarkan terus berlarut, dapat dipastikan IPTN, kemudian berganti nama menjadi PT Dirgantara Indonesia (PTDI), akan menjelma menjadi tumpukan besi tua, mangkrak di tengah modernisasi yang macet. Menurut Dirut PTDI Jusman SD yang menggantikan Paramayuda, setidaknya ada 3 persoalan besar yang belakangan melilit perusahaan yang dipilotinya. Pertama, masalah keuangan akibat diputusnya sumber logistik oleh IMF. Selain itu, dana-dana yang akan digunakan untuk mega proyek IN-250 harus dihentikan. Padahal mega proyek itu telah menelan biaya US\$ 700 juta.

Terputusnya jalur logistik tadi memunculkan masalah

besar di PTDI. Sebab, berdasarkan proyeksi semula, bila N-250 bisa masuk pasar, maka masa depan PTDI sepenuhnya bisa diharapkan dari proyek tersebut. "Itu sebabnya timbul masalah mendasar: apa yang harus menjadi tulang punggung bisnis PTDI di masa depan?" kata Jusman retorik.

Persoalan kedua yang melilit PTDI, kata Jusman, adalah langkanya sumber pendanaan. PTDI mengalami kesulitan mendapat kredit, karena belum ada kepercayaan dari lembaga keuangan. Mereka menganggap PTDI belum mampu meng-cover biaya operasionalnya. Sebelum krisis perusahaan pesawat terbang milik negara ini selalu mendapat kucuran dana dari pemerintah. Ini tentu wajar, Amerika, Inggris, Prancis, Belanda, Jepang, dan negara-negara maju lain pun melakukan hal serupa. Bagi mereka kemampuan teknologi dan industri adalah investasi masa depan. Menurut penelusuran penulis pada 10 tahun pertama, PTDI (baca IPTN) mendapat suplai dana dari pemerintah US\$ 1 miliar. Lalu 10 tahun berikut digelontorkan lagi sebesar US\$ 1,3 miliar. Jadi total investasi yang telah ditanamkan pemerintah untuk membangun industri pesawat terbang tersebut mencapai US\$ 2,3 miliar, atau Rp 4,6 triliun dengan kurs waktu itu.

Jumlah itu sebetulnya tidak terlalu besar, mengingat pabrik petro kimia Chandra Asri milik Prayogo Pangestu saja bisa menelan dana sampai diatas US\$ 1,5 miliar. Padahal operasinya selama 5 tahun berturut-turut rugi terus. Total kerugian Chandra Asri bahkan mencapai US\$ 500 juta. Anehnya perusahaan ini tidak dibiarkan mangkrak. Sebagian besar utangnya malah dikonversi menjadi penyertaan modal pemerintah. Pada saat sama pemerintah ikut pula menanggung beban-beban lain dari

perusahaan konglomerat itu. Padahal dari sisi kinerja, PTDI jelas masih lebih baik daripada Chandra Asri.

Persoalan ketiga PTDI, kata Jusman, menciutnya rasa percaya diri SDM perusahaan pesawat terbang ini. "Ada keraguan dari karyawan, apakah restrukturisasi yang dilakukan ini akan membawa perubahan," katanya. Para karyawan PTDI kini tidak yakin masa depannya akan lebih bagus daripada masa lalunya. Nah untuk mengatasi semua persoalan di atas, manajemen PTDI melakukan reorientasi dan restrukturisasi bisnis. Targetnya apalagi bila bukan untuk mendapatkan revenue dengan memanfaatkan teknologi, SDM dan keahlian. Maka pada September 1998, sebagaimana telah disinggung di atas, dilakukan reorientasi bisnis, dengan tujuan mengkaji ulang seluruh strategi PTDI di masa depan. Ditetapkanlah sampai dengan 2003, sebagai fase konsolidasi dan survival. Setelah itu, PTDI akan masuk ke fase pertumbuhan bertahap dan berkesinambungan.

Dalam fase konsolidasi dan survival ini langkah-langkah efisiensi dilakukan, supaya tidak terjadi perdarahan finansial (financial bleeding). Termasuk di dalamnya rasionalisasi karyawan. Jika sebelumnya jumlah karyawannya mencapai 15.715 orang. Jumlahnya lalu ditiutkan sampai tinggal sekitar 9.777. Selain itu sejak menggantikan Paramayuda pada September 2000, Jusman melakukan diversifikasi portofolio bisnis PTDI. Maksudnya jika sebelumnya seluruh kegiatan PTDI difokuskan hanya memproduksi CN-235, misalnya, di tangannya orientasi bisnis diubah: PTDI tidak hanya mengembangkan satu bisnis, yakni pesawat terbang. Portofolio bisnisnya diperluas menjadi 4 jenis dan dibagi ke dalam 2 unit: yakni unit engineering dan unit bisnis. Unit engineering mencakup

Revenue Center dan Profit Center. Lalu unit bisnis meliputi Strategic Business Units (SBU) dan Satuan Usaha Mandiri (SUM). "Jadi di masa depan dari PTDI ini akan ada 4 pintu yang bisa menghasilkan pendapatan," ucap Jusman menjanjikan.

Dengan begitu, selain dari *core business*-nya memproduksi pesawat terbang (seperti CN-212, CN-235, N-250), revenue PTDI akan datang dari produksi komponen dan rekayasa & rancang bangun pesawat terbang. PTDI juga mengembangkan bisnis turunannya, antara lain: SBU jasa manufaktur, teknologi interior, jasa teknologi mesin, aircraft, helikopter, depend teknologi, sistem antariksa, TI dan SBU Atec. Oleh karena itu, jangan heran bila karyawan PTDI menggarap pembuatan antena parabola untuk Indovision dan merakit komputer merek Garuda.

Masuknya PTDI ke produksi antena parabola untuk Indovision, kata Jusman, tidak muncul begitu saja. Ada sejarah yang lumayan panjang. Pada awalnya sejumlah karyawan PTDI ditugasi mengembangkan software navigasi pesawat terbang berbasis satelit. Untuk tujuan itu, mereka dimagangkan selama 4 tahun di pabrik satelit Hyes, Amerika Serikat. Ketika pulang ke Indonesia proyek tadi kandas akibat krisis. Padahal mereka mempunyai keahlian dalam pembuatan software entertainment melalui satelit, yang disebut Digital Entertainment Sistem (DES). DES sendiri merupakan software parabola yang digunakan Indovision. Bentuknya berupa antena atau tape recorder. Untuk menyalurkan keahlian itu, lalu mereka diposisikan ke SBU antariksa. "Jadi itu bukan usaha sampingan yang serabutan. Mereka memang diarahkan ke sana, karena kami harus hidup di atas kekuatan sendiri," ujar Dirut PTDI

itu bersungguh-sungguh.

Model usaha seperti itulah yang akan dikembangkan PTDI di masa depan. Dengan begitu, nantinya aliran dana akan masuk dari 4 kategori bisnis portofolio tersebut. Jusman enggan menyebutkan berapa alokasi dana yang dipersiapkan untuk keperluan tersebut. "Pokoknya uang itu hanya akan kita keluarkan kalau suatu unit usaha itu mendapat kontrak," tandasnya. Polanya, kata dia, setiap SBU diberikan modal sebesar Rp 600 juta. Termasuk tanggungan gaji selama 6 bulan. Nantinya mereka diwajibkan mencari dan mengembangkan pasar sendiri. Juga harus bisa membiayai *overhead*-nya sendiri.

Apabila suatu SBU selama 3 tahun berturut-turut bisa survive dan mempunyai potensi sehingga dilirik investor, maka akan dilepas menjadi anak perusahaan. Namun bila ternyata dianggap gagal, maka unit usaha itu harus direstrukturisasi. Sejauh ini, lanjut Jusman, pertumbuhan unit usahanya cukup bagus. Sebagai contoh dia menunjuk bisnis perakitan komputer, yang masuk SBU TI. "Dalam tempo 2 tahun SBU TI sudah mampu membukukan pendapatan sebesar Rp 54 miliar. Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari bisnis antena lebih besar lagi," papar Jusman bangga tanpa menyebut angka.

Tak berhenti sampai di situ. Sayap PTDI yang lain, yaitu bisnis part & komponen pesawat terbang, juga berhasil menyabet kontrak kerja dari pemerintah Inggris. PTDI diminta membuat ujung sayap untuk jenis pesawat airbus. Nilai kontraknya mencapai US\$ 10 juta per tahun. Jusman yakin bila krunya bisa mempertahankan kualitas dan deliver time, maka ada kemungkinan kontraknya bisa mencapai 10 tahun.

Jusman mencatat setiap tahun rata-rata pendapat-

an PTDI mencapai Rp 900 miliar hingga Rp 1 triliun. Jumlah tersebut belum dipotong untuk pengeluaran personal cost (gaji karyawan), yang setiap tahunnya mencapai Rp 240 miliar. Adapun yang menjadi penyumbang terbesar pemasukan PTDI 3 tahun terakhir adalah pembuatan pesawat terbang CN-235. Selain itu kedua SBU di atas juga telah ikut menyumbang. Jusman tak bersedia menyebut berapa sumbangan masing-masing kepada perusahaan. Dia menilai wajar bila CN-235 memberi sumbangan terbesar kepada perusahaan. Sebab pesawat itu diminati banyak negara, dan harganya relatif murah. Dia tak mengada-ada. Satu unit CN-235 harga *basic*-nya cuma US\$ 11-12 juta.

CN-235 telah diekspor, antara lain ke Uni Emirat Arab sebanyak 7 pesawat, Malaysia 6 pesawat, Korea 8 pesawat, dan Brunei 1 pesawat. Rencananya PTDI akan mengekspor lagi ke Pakistan sebanyak 4 pesawat. "Dari hasil penjualan CN-235 inilah setidaknya kita bisa memberi makan sekitar 7 ribu karyawan," ungkap Jusman tersenyum. Sampai saat ini industri pesawat terbang nasional itu telah memproduksi hampir 200 pesawat terbang dan helikopter. Pertanyaannya kemudian: mengapa perusahaan ini masih dirundung masalah? "Ini kan proses metamorfosa. Wajar bila masih ada masalah. Apalagi restrukturisasi yang dilakukan di sini kan belum lama. Perusahaan-perusahaan swasta yang hebat-hebat itu juga belum pada beres," jawab Jusman sedikit membanding.

Sampai saat itu PTDI masih mempunyai utang sebesar Rp 4 triliun. Dari utang sejumlah itu, sebesar Rp 1,3 triliun merupakan cash loan. Sedang utang pokoknya sekitar US\$ 100 juta. Yang non cash loan (fasilitas yang

diberikan oleh bank untuk mendukung letter of credit, jaminan-jaminan, performance bonds) mencapai Rp 2,7 triliun. "Sekarang utang yang non cash loan mulai menyusut, karena kita ada prestasi. Termasuk dalam teknik penyelesaiannya. Sedangkan yang cash loan, harus diselesaikan melalui debt to equity swap," kata Jusman tenang.

Dirut PTDI itu berharap pemerintah bertindak lebih bijak dan adil terhadap perusahaan yang dipimpinnya pada tahun-tahun mendatang. Meski era AFTA sudah diambang pintu, dia berharap setidaknya pemerintah dapat memberikan semacam proteksi semu dan insentif kepada produsen dalam negeri, termasuk PTDI. Itu penting agar bisa bersaing dengan produsen luar yang juga masuk ke Indonesia lewat pintu perdagangan bebas. "Saya jamin proteksi itu tidak akan menyebabkan high cost ekonomi. Sebab sifat proteksi itu hanya untuk memberikan kemudahan kepada produk dalam negeri agar bisa melakukan penetrasi, baik terhadap pasar domestik maupun luar negeri. Pemerintah Cina dan Malaysia juga melakukan hal serupa," tutur Jusman penuh harap.

Sayangnya harapan Jusman tak menjadi kenyataan. Setelah Presiden Abdurrahman dimakzulkan MPR dan Megawati menggantikan kedudukannya sebagai RI-1, nasib PTDI semakin suram saja. Restrukturisasi yang telah berhasil dilakukan pada masa Paramayudha dan kinerja yang semakin membaik pada masa Jusman seakan kembali ke titik nol. Persoalan menjadi semakin banyak. Apalagi setelah karyawan juga mulai menuntut hak-haknya yang terbengkalai begitu lama akibat ulah pemerintah yang lebih senang mengikuti keinginan IMF daripada membiarkan PTDI tetap hidup. Bahkan setelah Edwin, yang

dianggap banyak kalagan sebagai orang yang tepat tapi muncul pada saat yang salah, persoalan PTDI makin runyam. Pemerintah seperti sengaja mengulur-ulur waktu pembayaran uang pesangon kepada karyawan yang dirumahkan. Edwin, yang sudah bekerja keras menyelesaikan persoalan itu dan menghidupkan kembali PTDI, akhirnya kabur. Pemerintah Megawati, bahkan menolak permintaan mantan orang nomor satu di IPTN BJ Habibie untuk menyetor IPTN kembali, dengan kompensasi saham 5% bila dia berhasil. Ini sebenarnya peluang yang bagus, tapi pemerintah waktu itu mem-biarkannya terlepas begitu saja. Kini bola ada di tangan pemerintah SBY, yang mempunyai legitimasi langsung dari rakyatnya. Tentu orang boleh berharap penyehatan IPTN bisa lebih cepat dan laju industrialisasi bisa lebih terstruktur

## Z

## Sekilas Tentang Penulis

### Z

Ishak Rafick memulai karir jurnalistiknya pada 26 April 1995 di majalah bisnis terkemuka SWAsembada. Waktu itu dia sudah meraih gelar Master of Art dari Rijks Universiteit Leiden, Nederland. Sebelumnya dia sempat melamar di majalah Warta Ekonomi, tapi tak jadi bergabung karena masalah gaji. Meski gelar MA terlalu tinggi buat profesi wartawan waktu itu, dia tidak peduli. Baginya nilai seseorang tidak ditentukan oleh titel akademis yang disandangnya, juga tidak oleh profesinya, tapi justru oleh caranya menjalankan profesi itu dan karya atau out put yang dihasilkannya. Namun keputusannya bergabung ke majalah SWA telah menam-bah panjang daftar orang-orang yang menjadi wartawan karena kecelakaan (journalist by eccident). Jadi satu grup dengan Gunawan Muhammad (Tempo), Parni Hadi (Republika), dan lain-lain.

Meski rada menyimpang dalam pemilihan profesi, Ishak tak pernah menyesali keputusan itu. Dia pernah ditelepon Acho, kawan ciliknya yang cerdas dari Rotterdam. Temannya itu menyesalkan mengapa dia tidak



menjadi dosen di Universitas Indonesia, tapi malah beralih profesi menjadi wartawan. "Journalist today is president tomorrow," jawabnya bercanda, candaan yang bukan tidak mungkin menjadi kenyataan suatu saat. Ishak memang diplot untuk menjadi dosen di Fakultas Sastra, Universitas Indonesia, yang telah mengirimnya ke Belanda untuk program master. Dia sudah menyelesaikan S2 dengan baik dan kembali membawa ijazah MA dan tesis berjudul: *Het Beeld van Indonesie in de 20ste eeuwse koloniale literatuur* (Wajah Indonesia dalam Literatur Kolonial Abad XX). Dia kemudian pamit kepada Profesor Tajuddin, Rektor UI saat itu, untuk berada di luar UI selama administrasinya belum beres. Sebab dia sudah mengurusnya hampir 3 bulan, tapi tak selesai. Ishak tak bersedia merengek-rengok kepada dekan atau rektor agar administrasinya dibereskan. Menurutnya, kalau itu dilakukan, maka dia berubah dari seorang intelektual menjadi pengemis.

Kendati urung menjadi dosen di kampus bergengsi UI, Ishak tak setengah-setengah menjalani profesi barunya sebagai jurnalis. Dia bahkan memulainya dari bawah sebagai reporter sampai Oktober 1997. Dialah yang mewawancarai Edward Soeryadjaya yang berbisnis minyak di Canada setelah mantan bos Grup Summa itu meninggalkan tanah air. Dia juga yang berhasil membuat pohon bisnis Bob Hasan, bos Kiani Kertas dan Bank Umum Nasional setelah mewawancarainya selama 4 jam di lapangan golf Matoa, Ciganjur. Anak muda inilah yang membongkar kasus jual-beli kuota dan eksportir fiktif tekstil dan produk tekstil lewat laporan investigativenya di Deperindag setelah jatuhnya Soeharto. Dia kemudian diangkat menjadi redaktur magang sampai Oktober 1998.

Tugasnya mengejar nara sumbernya, kemudian menulis liputannya sendiri. Setelah itu dia diangkat menjadi penanggungjawab rubrik Tanah Air, yang menangani makro ekonomi-politik selama setahun. Sukses di rubrik Tanah Air, Ishak kemudian seperti melakukan *tour of duty* dari satu rubrik ke rubrik lain di SWA mulai dari rubrik perbankan, industri strategis, sektor riil, Management, pariwisata dan otonomi daerah, sampai ke rubrik-rubrik tidak tetap semacam petrokimia, tekstil, industri jasa, kertas, properti, dan lain-lain. Sehingga ketika dia direkrut oleh majalah ekonomi terkemuka Forbes (New York) untuk menjadi tim Indonesia buat cover story *The Indonesia 40 richest* (40 orang-orang kaya Indonesia) Oktober 2006, sudah tak ada lagi rubrik yang belum pernah dijamahnya di SWA. Ishak memang kemudian meninggalkan SWA dan bergabung dengan Forbes. Namun Forbes Indonesia tak jadi terbit. Yang muncul *GlobeAsia*, satu-satunya majalah bisnis berbahasa Inggris di Indonesia. Edisi perdananya terbit Januari 2007. Majalah ini tumbuh sangat spektakuler dan kini menjadi majalah bisnis terbesar di Indonesia dari sisi oplah (di atas 90 ribu exemplar). Ishak menjadi senior editor di almarhum barunya itu.

Kelahiran Denpasar, 15 November 1961 ini adalah sosok yang menarik, supel, rendah hati, ringan tangan dan cepat menguasai sesuatu yang baru. Itu sebabnya ketika dia meminta saya untuk menuliskan otobiografinya, saya langsung setuju. Saya sendiri sudah mengenalnya sejak awal 1996, ketika dia memulai babak baru dalam kehidupannya. Sepanjang karirnya sebagai wartawan berbagai training dan kursus singkat diikutinya untuk menambah ilmu dan wawasan. Sekadar menyebut sebagian saja:

pada September 1997 dia ikut Loka Karya Meningkatkan Efektivitas Fungsi Supervisor di Lembaga PPM. Setahun sebelumnya dia telah mengikuti International Strategic Alliances and Joint Ventures by Andre-Mark Chevallier (LPPM - AMA Week). Lalu Journalists Training Programme, The World Bank, Konrad Adenauer Stiftung and Antara News Agency, Februari 1999 tentang Investigative Reporting. Dia juga telah mengikuti the Newro Language Program (NLP) Training (1998), the Edunet Training (2004) dan the Focus Learning (2003). Semua training dan kursus singkat tersebut telah diikutinya secara serius sampai mendapatkan sertifikat. Hal ini langka di kalangan wartawan yang umumnya tak betah berlama-lama di dalam ruangan.

Di bidang akademis sosok ini termasuk orang yang mumpuni, sehingga dia bisa masuk UI tanpa tes dan bahkan mendapat beasiswa. Dia sempat dikirim ke Nijenrode Management Institute, Breukelen, Nederland (1987) mengikuti Somer Course selama 6 minggu yang diikuti 28 negara. Tak heran bila kemudian dia diplot untuk menjadi dosen di almamaternya itu dan mendapat beasiswa untuk melanjutkan S2 di negeri kincir angin. Pria ini sempat menjadi asisten Prof. Dr. Art van Zoest di FS-UI jurusan studi Belanda. Ayah dua anak ini sangat menjunjung tinggi kebebasan. Namun bila sudah memutuskan sesuatu, dia selalu mengerjakannya sebaik-baiknya dan tak pernah menyerah. Tak heran bila sepanjang karirnya sebagai jurnalis sampai saat ini, dia disenangi dan dihormati rekan-rekannya karena kemampuannya menembus sumber dan menjaga hubungan yang baik dengan narasumbernya. Dia berteman akrab dengan keluarga Soeryadjaya, Aksa Mahmud, Peter F Gotha, Bos

Hasan, keluarga Soedarpo Sastrosatomo, Fadel Muhammad, dan lain-lain yang pernah diwawancaranya.

Mantan Ketua Departemen Luar Negeri Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB-PII) periode 1983-86 ini sejak beberapa tahun terakhir active di ProDEMokrasi sebagai senator. Dia juga aktive di Indonesia Demokrasi Monitor (Indemo) pimpinan Harriman Siregar dan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI). Dengan bendera ILUNI, Ishak dan kawan-kawan sempat membangun sumur dalam di daerah-daerah pengungsi di Aceh, saat negeri Serambi Mekah itu dihantam tsunami.

Di samping aktivitas jurnalistik dan kegiatan sosialnya di LSM, pada 2001 Ishak Rafick sempat menjadi presenter di Quick Channel (Indovision) dalam kerjasama dengan majalah SWA. Dia juga sering menjadi pembicara di berbagai seminar dan diskusi di bidang ekonomi, sosial, jurnalistik dan politik.

**Sylvia Hanan, SE**

# Daftar Pustaka

## Z

- Abeng, Tantri, "Indonesia, Inc," Times Academic Press, 2001
- Abeng, Tantri, "Profesi Manajemen," Gramedia Pustak Utama, 2006
- Abugre, Charles, "Critique of World Bank/IMF Insistence on More Structural Adjustment Policies for Least Development Countries," Third World Economic, 1-15 Oktober, 1993
- Ahmad Mubarik, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kenaikan Hutang Luar Negeri Indonesia, Jakarta: CPIS, 1993
- Anderson, James E, "The Uruguay Round and Welfare in Some Distort Agricultural Economies," journal of development Economic, vol. 56, 1998
- Arief, Sritua, "Dari Prestasi Pembangunan Sampai Ekonomi Politik," Jakarta: UI Press, 1990
- Arief, Sritua, "Who Murdered The Rupiah," dalam Inside Indonesia, Melbourne, Australia, edisi Oktober, 1998
- Arief, Sritua, "Indonesia Tanah Air Beta," Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2001
- Chalak, Tal, "The Art of Business," Tower Books, 1993
- Crouch, Harold, "Militer & Politik di Indonesia (judul asli: Army & Politics in Indonesia), penerjemah Th. Sumartana, Pustaka Sinar harapan, Jakarta, 1999
- Fanon, Frantz, "Bumi Berantakan," judul asli "The Wretched of the Earth," penerjemah Ahmad Asnawi, Tep LOK

Press, Jakarta, 2000

Fukuyama, Francis, "The End of History and the Last man, Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal," CV Qalam, Yogyakarta, 2003

Perkins, John, "Confession of an Economic Hit Man," Pengakuan Seorang Ekonom Perusak, penerjemah Herman Tirtaatmaja dan Dwi Karyani. Editor Michael AR. Tosin, Jakarta, Abdi Tandur, 2005

Gie, Kwik Kian, "Ekonomi Indonesia dalam Krisis dan Transisi Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999

Gie, Kwik Kian, "Praktik Bisnis dan Orientasi Ekonomi Indonesia," Gramedia Pustaka Utama dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Jakarta, 1998

Gie, Kwik Kian, Kebijakan Ekonomi Politik dan Hilangnya Nalar," Kompas, Jakarta, 2006

Dananjaya, Utomo, "Sekolah Gratis, Esai-esai Pendidikan yang Membebaskan," Paramadina, Jakarta, 2005

Levitt, Steven D & Dubner, Stephen J, "FREAKonomics," alih bahasa Ahmad Fauzi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006

Schoorl, J.W, "Modernisasi, Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang," alih bahasa R.G. Soekadijo, Gramedia, Jakarta, 1982

Mushashi, Miyamoto, "Lima Unsur Mushashi," alih bahasa drs Suharsono, Kentindo Publisher, 2000

Machiavelli, Nicollo, "IL Principe, Sang Penguasa," alih bahasa C. Woekirsari, Gramedia, Jakarta, 2002

Naisbitt, John, "Global Paradox," alih bahasa drs Budiyan-to, Binarupa Aksara, 1996

Naisbitt, John, "Megatrends Asia," Nicholas Brealey Publishing, London, 1996

Yee, James, "For God and Country," penerjemah Soemarni,

Dastan Books, Jakarta, 2006

Kiyosaki, Robert T., "The Cashflow Quadrant," alih bahasa Rina Buntaran, Gramedia Pustaka Utama, 2003

Sarjadi, Soegeng dan Rinakit, Sukardi, "Membaca Indonesia," Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS), 2005

Rich, Bruce, "Menggadaikan Bumi," judul asli "Mortgaging the Earth: The world Bank, Environmental Impoverishment and the Crisis of Development," penerjemah AS Burhan dan R. Benu Hidayat, penerbit International NGO Forum on Indonesia Development (INFID), 1999

Jay, Antony, "Sistem manajemen Machiavelli," alih bahasa D. Prasetyo, BA, IQRA, Bandung, 1983

Kahin, George Mc Turnan, "Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia," judul asli "Nationalism and Revolution in Indonesia," penerjemah Nin Bakdi Soemanto, UNS Press, 1995

Wibisono, Christianto, "Menelusuri Akar Krisis," editor Ignatius Haryanto, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998

Stiglitz, Joseph E., "Dekade Kecerakahan era '90-an dan awal mula petaka Ekonomi Dunia," penerjemah Aan Suhaeni, Cipta Lintas Wacana, Tangerang, 2003

Hertz, Noreena, "Membunuh atas nama Kebebasan," judul asli Silent Take Over," penerjemah Dindin Solahudin, editor Munir dkk, Penerbit Nuansa, 2004

Sanit, Arbi, "Ormas dan Politik," Lembaga Studi Informasi Pembangunan, 1995

Syahrir, "Krisis Ekonomi Menuju Reformasi Total," Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998

Rafsanjani, "Keadilan Sosial, Pandangan Islam tentang HAM, Hegemoni Barat & Solusi Dunia Modern," judul asli "Social Justice and Problem of Racial Discrimination," penerjemah Anna Farida, editor Purwanto, Nuansa, 2001

Said, Edward W., "Kebudayaan dan Kekuasaan,

Membongkar Mitos Hegemoni Barat," judul asli "Culture and Imperialism," Mizan, 1995

Said, Edward W., "Orientalisme," judul asli "Orientalism," Pustaka, 1994

Wahid, Agus, "60 tahun AM Saifuddin: Indonesia dari Reformasi ke Masyarakat Madani, Media Da'wah, 1991

Sumantoro, "Kegiatan Perusahaan Multinasional, problema politik, hukum & ekonomi dalam pembangunan nasional," Gramedia, Jakarta, 1987

Gde Agung, Ide Anak Agung, "Bali in de XIXde Eeuw, Dutawacana University Press, 1990

Sumawinata, Sarbini Prof, "Politik Ekonomi Kerakyatan," Gramedia, Jakarta, 2002

Chapra, M. Umer, "The Future of Economics, an Islamic Perspective," penerjemah Amdiar Amir, Yan Mahmudi at.al, Shari'ah Economics and Banking Institute (SEBI), Jakarta, 2001

Fromm, Erich, "Lari dari Kebebasan, judul asli "Escape from Freedom," penerjemah Kamdani, editor Ahmad Baidlawi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999

Mc Elroy, Michael B, "The Macroeconomy, Private Choices, Public Actions, and Aggregate Outcomes, Prentice Hall, New Jersey, 1996

Scargrave, Sterling, "Lord of the Rim, Sepak Terjang para Taipan," penyunting Hamid Basyaib, cetakan kedua, Pustaka Alvabet, Jakarta, Januari, 2005

Nordhaus & Samuelson, "Ilmu Makro Ekonomi," alih bahasa Gretta, Theresa Tanoto, Bosco Carvallo, Anna Elly, penerbit Media Global Edukasi, 2004

Gibney, Frank, "De Opkomst van het Verre Oosten," judul asli "The Pacific Century," penerjemah Chiel Vetter, De Haan/Teleac, 1993

Habibie, Baharuddin Jusuf, "Detik-detik yang Menentukan," THC Mandiri, 2006

Syairati, Ali, "Ideologi Kaum Intelektual," penyunting Syafiq Basri & Haidar Bagir, Mizan, 1984

Syariati, Ali, "Kritik Islam terhadap Marxisme dan Sesat Pikir Barat Lainnya," pengantar Dawam Raharjo, Mizan, 1984

Syariati, Ali, "Peranan Cendekiawan Muslim," penerjemah tim naskah Shalahuddin Press, 1985

Syariati, Ali, "Paradigma Kaum Tertindas," Pengantar Hamid Algar, Islamic Center Jakarta, Al Huda, 2001

Silbar, Irena and Allan Little, "Yugoslavia, Death of a Nation," Penguin Books, 1997

Hettne, Bjorn, "Teori Pembangunan dan Tiga Dunia," judul asli "Development Theory and the Three Worlds, alih bahasa tim redaksi Gramedia, Editor A Puspo Kuntjoro, Gramedia Pustaka Utama, 2001

Suta, I Putu Gde Ary & Musa, Subowo, "Membedah Krisis Perbankan," Yayasan Sad Satria Bhakti, 2003

Suta, I Putu Gde Ary & Musa, Subowo, "BPPN the End," Yayasan Sad Satria Bhakti, 2004

Mahathir, Muhammad, "A New Deal for Asia," penerjemah Riki Nalsya, penerbit Handal Niaga Pustaka

Muhammad, Quthb Ibramhim, "Kebijakan Ekonomi Umar bin Khatthab," penerjemah Ahmad Syarifuddin Shaleh, editor Titi Tartilah S,ag., Ummu Fahmi, S.ag., Pustaka Azzam, 2002

Ricklefs, M.C., "Sejarah Indonesia Modern 1200-2004," judul asli "A History of Modern Indonesia since 1200," penerjemah Satrio Wahono dkk, Serambi Ilmu Semesta, 2005

AsShadr, Syahid Muhammad Baqir, "Keunggulan Ekonomi Islam," judul asli Islam and Schools of Economics," penerjemah M. Hashem, Pustaka Zahra, 2002

Miller, Christian T., "Blood Money," penerjemah Leinnovar Bahfein & Sigit Setia, Ufuk Press, 2007

Siddiqi, Muhammad Nejatullah, "Bank Islam," judul asli "Issues in Islamic Banking," penerjemah Asep Hikmat Suhendi, Pustaka, 1984

Soros, George, "Zaman kenisbian: konsekuensi perang terha-

dap terror,<sup>5</sup> judul asli The Age of Fallibility: the consequences of the war on terror,<sup>6</sup> penerjemah Dian R. Basuki, Editor Bambang Harymurti, Pusat Data & Analisa Tempo, 2006

Sastrosoenarto, Hartarto, "Industrialisasi Serta Pembangunan Sektor Pertanian dan jasa Menuju Visi Indonesia 2030," editor Hikmat Hardono dkk, Gramedia Pustaka Utama, 2006

Johnson, Chalmers, "Blow Back, the cost and consequences of American Empire," Fitzhenry & Whiteside Ltd, Canada, 2000



Isiah Rafick menulis karir jurnalistiknya pada 26 April 1995 di majalah bisnis terkemuka SWAsembed. Dia lah yang mewawancarai Edward

Soeryadaya yang berbisnis minyak di Canada setelah mantan bos Grup Sumatra itu meninggalkan tanah air. Dia juga yang berhasrat menuntun kapal pohon bisnis Bob Hasan, bos Kilang Pertamina dan Bank Umum Nasional, setelah mewawancaranya selama 4 jam di lapangan golf Mutiara Cigugur. Anak muda ini lah yang membongkar kasus jual beli kasur, tas, jaket, sepatu, alat elektronik dan produk tekstil lewat ingatan investigasinya di Depertindag setelah jatuhnya Soeharto. Isiah kemudian meninggalkan SWA dan kini bekerja di Majalah GlobeAsia, satu-satunya majalah bisnis berbahasa Inggris di Indonesia. Dia juga aktif di ProGEMKorpas dan masih satu regu dengan ELMU, Ikatan Alumni Universitas Indonesia

# CATATAN HITAM LIMA PRESIDEN INDONESIA

Yang akan Anda baca ini memang bukan sesuatu yang manis.

Buku ini juga tentu tidak ditujukan untuk  
menyenangkan setiap orang seperti cerita pengantar tidur.

Di dalamnya, memuat rekaman hitam bersejarah yang  
boleh jadi belum pernah terungkap di media.

Ini adalah hasil penelusuran jurnalistik selama 10 tahun.

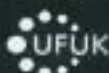
Catatan yang tajam dan paling komprehensif yang membedah  
kegagalan demi kegagalan presiden kita dalam membawa  
Indonesia tinggal landas.

Satu hal yang pasti, ada solusi dan pencerahan yang ditawarkan  
seng penulis kepada kita dengan cara memberi gambaran  
apa adanya tentang tanah air tercinta. Setidaknya agar  
muncul ide-ide kreatif untuk menyelesaikannya.

Selamat membaca!



*Ufuk Publishing House*  
www.ufukpublishing.com



NON FIKSI  
ISU BARU





rahan aset tambahan. Namun siapa lagi yang mau berpikir soal holdback asset, bila ada klausul bagus yang membebaskannya dari itu?

MSAA memang bukan satu-satunya kesepakatan yang disodorkan BPPN kepada konglomerat kakap pema-mah BLBI. Paralel dengan MSAA telah ditandatangani pula Master of Refinancing Agreement (MRA). Empat konglo-merat papan atas menandatangani, dan telah pula menyerahkan sejumlah aset. Usman Admadjaja (Bank Danamon) yang menerima Rp 12,32 triliun BLBI, misalnya, menyerahkan 26 aset yang digabung dalam PT Bantala Kartika Abadi. Kaharuddin Ongko (BUN), yang melahap Rp 7,839 triliun, menyerahkan 20 aset dan disatukan dalam PT Arya Mustika. Bank Umum Nasional (BUN) yang dimiliki Bos Hasan dan Kaharuddin Ongko, kata sumber di BPPN waktu itu memang telah dijadikan mesin uang kedua konglomerat itu lewat orangnya masing-masing. Jadi mereka berdua harus menanggulangi: Bob lewat MSAA, dan Kaharuddin lewat MRA. Samadikun Hartono (Bank Modern) yang memakan Rp 2,663 triliun BLBI menye-rahkan 10 asetnya dan digabung dalam PT Cakrawala Gita Pratama. Lalu Hokiarto, Hokianto (Bank Hokindo) yang memakai Rp 339 miliar BLBI menyerahkan 12 aset.

Meskipun kedua kesepakatan itu sama-sama meru-pakan skema penyelesaian utang BLBI dengan jaminan aset, asumsi yang mendasari keduanya amat berbeda. Menurut sumber di BPPN (kini mantan) MSAA didasari asumsi bahwa aset-aset yang diserahkan para bankir tersebut bagus-bagus dan nilainya melebihi utang BLBI. Sementara skema MRA didasari asumsi bahwa aset-aset yang diserahkan tidaklah bagus, dan nilainya di bawah utang BLBI. Akibatnya perlakuan terhadap mereka juga

berbeda. Skema MRA mewajibkan penenggak BLBI itu untuk menyerahkan jaminan pribadi (personal guarantee), jika utang BLBI mereka ternyata lebih besar daripada aset yang diserahkan. Mereka ini berteriak merasa diperlakukan tidak adil oleh BPPN. Mereka lebih suka bila diizinkan menyelesaikan utang BLBI lewat skema MSAA.

Tidak kurang galaknya adalah 25 mantan pemegang saham bank beku kegiatan usaha (BBKU), yang kini diwajibkan mengikuti struktur penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS). Skema itu memaksa mereka untuk menyelesaikan kewajibannya dengan uang tunai. "Seharusnya pemilik BBKU juga mendapat perlakuan yang sama, yaitu menyelesaikan kewajibannya dengan skema MSAA," kata pemilik Bank Mashill Philip Widjaja.

Dilihat dari semangatnya, menurut Kwik yang kemu-dian kembali ke habitatnya di DPR, MSAA amat meng-untungkan konglomerat perampok uang negara. Meskipun tak banyak yang mendukungnya di pemerintahan, banyak orang secara diam-diam membenarkan pandangan kritis politikus PDI Perjuangan itu. Bahkan Presiden Abdur-rahman Wahid dan para wakil rakyat akhirnya setuju meninjau kembali MSAA. Sebelumnya, masih pada tahun 1999, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaporkan adanya kejanggalan dalam MSAA tersebut, tetapi tidak mendapat tanggapan berarti. Pandangan Kwik sendiri soal MSAA pada dasarnya tidaklah berbeda jauh dari pandangan Econit. Menurut Econit, yang dinakhodai Rizal Ramli sebelum menjadi Menko Perekonomian itu, setidaknya ada 6 kelemahan MSAA. Pertama, kesepakatan tersebut membebaskan debitur dari tindakan pidana yang telah mereka lakukan (release & discharge), seperti pelanggaran batas maksimum pemberian kredit (BMPK).